



PEMERINTAH KOTA PALOPO



RKPD **2022**

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Tahun 2021





WALIKOTA PALOPO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALOPO

NOMOR : 15 Tahun 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA PALOPO TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALOPO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74, Pasal 102 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 103 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka untuk memenuhi maksud tersebut perlu menetapkan Peraturan Walikota Palopo tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palopo Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4248), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem

- Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61)
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 18. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
21. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927).
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1540);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 581);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
36. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
37. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Menjaga Ketahanan Pangan Nasional pada Saat Tanggap Darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
38. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Kerja Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243);
39. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
40. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2012 Nomor 9);
41. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2013 Nomor 11);
42. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2016 Nomor 8);
43. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2017 Nomor 13);

44. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palopo Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2022**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palopo.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Palopo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Kota Palopo untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Kota Palopo untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Kota Palopo Tahun 2022.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Kota Palopo yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**BAB II
SISTEMATIKA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA PALOPO TAHUN 2022**

Pasal 2

RKPD Kota Palopo Tahun 2022 disajikan dengan sistematika yang memuat:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi daerah;
- c. kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah;
- d. sasaran dan prioritas pembangunan daerah;

- e. rencana kerja dan pendanaan daerah;
- f. kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- g. penutup

Pasal 3

- (1) RKPD Kota Palopo Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan APBD Kota Palopo Tahun Anggaran 2022;
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan mewujudkan Visi, Misi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palopo Tahun 2018-2023.

Pasal 4

RKPD Kota Palopo Tahun 2022 merupakan dasar perumusan kebijakan strategis Pemerintah Kota Palopo.

Pasal 5

Sistematika RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tertuang dalam naskah RKPD Kota Palopo Tahun 2022 yang tercantum dalam lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III PENUTUP

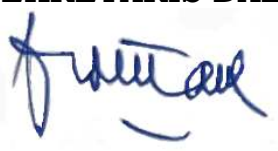
Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, maka memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal, 28 Juni 2021
WALIKOTA PALOPO,


M. JUDAS AMIR

Diundangkan di Palopo
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH,


FIRMANZA DP

BERITA DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 15 NOMOR 2021

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	I-1
	1.1. Latar Belakang.....	I-1
	1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-2
	1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-5
	1.4. Maksud dan Tujuan.....	I-8
	1.5. Sistematika Dokumen RKPD	I-8
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
	2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah	II-1
	2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi.....	II-1
	2.1.1.1. Aspek Geografi	II-1
	2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografi.....	II-1
	2.1.1.3. Topografi	II-2
	2.1.1.4. Geologi.....	II-2
	2.1.1.5. Hidrologi	II-4
	2.1.1.6. Klimatologi	II-5
	2.1.1.7. Penggunaan Lahan	II-5
	2.1.1.8. Potensi Pengembangan Wilayah.....	II-7
	2.1.1.9. Demografi	II-14
	2.1.1.10. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.....	II-15
	2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-18
	2.1.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-18
	2.1.2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi.....	II-18
	2.1.2.1.2. Inflasi.....	II-20
	2.1.2.1.3. Persentase Penduduk Miskin	II-21
	2.1.2.1.4. Tingkat Penganggura Terbuka	II-24
	2.1.2.1.5. Indeks Gini	II-24
	2.1.2.1.6. Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan	II-25
	2.1.2.2. Kesejahteraan Sosial.....	II-28
	2.1.2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	II-28
	2.1.2.2.2. Angka Melek Huruf (AMH)	II-29
	2.1.2.2.3. Angka Rata-Rata Lama Sekolah	II-30
	2.1.2.2.4. Angka Harapan Hidup	II-31
	2.1.2.2.5. Persentase Balita Gizi Buruk	II-32
	2.1.2.2.6. Angka Partisipasi Angkatan Kerja.....	II-32
	2.1.2.2.7. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.....	II-33
	2.1.2.2.8. Tingkat Pengangguran Terbuka	II-34
	2.1.2.2.9. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	II-35
	2.1.2.2.10. Survey Kepuasan Layanan Masyarakat	II-36
	2.1.2.3. Seni Budaya dan Olahraga	II-36
	2.1.2.3.1. Perkembangan Seni, Budayadan Olah raga	II-36

2.1.3.	Aspek Pelayanan Umum	II-37
2.1.3.1.	Layanan Urusan Wajib	II-37
2.1.3.1.1.	Bidang Urusan Pendidikan	II-37
2.1.3.1.2.	Bidang Urusan Kesehatan	II-52
2.1.3.1.3.	Bidang Urusan Pekerjaan Umum	II-72
2.1.3.1.3.1.	Pekerjaan Umum	II-72
2.1.3.1.3.2.	Penataan Ruang	II-81
2.1.3.1.4.	Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	II-83
2.1.3.1.5.	Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	II-86
2.1.3.1.6.	Bidang Urusan Sosial	II-88
2.1.3.2.	Fokus Layanan Urusan Wajib Non Dasar	II-92
2.1.3.2.1.	Bidang Urusan Tenaga Kerja	II-92
2.1.3.2.2.	Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II-96
2.1.3.2.3.	Bidang Urusan Pangan	II-100
2.1.3.2.4.	Bidang Urusan Pertanahan	II-101
2.1.3.2.5.	Bidang Urusan Lingkungan Hidup	II-102
2.1.3.2.6.	Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	II-106
2.1.3.2.7.	Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan	II-109
2.1.3.2.8.	Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	II-111
2.1.3.2.9.	Bidang Urusan Perhubungan	II-119
2.1.3.2.10.	Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika	II-122
2.1.3.2.11.	Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	II-123
2.1.3.2.12.	Bidang Urusan Penanaman Modal	II-124
2.1.3.2.13.	Bidang Urusan Kepemudaan dan Olah raga	II-125
2.1.3.2.14.	Bidang Urusan Statistik	II-127
2.1.3.2.15.	Bidang Urusan Persandian	II-128
2.1.3.2.16.	Bidang Urusan Kebudayaan	II-128
2.1.3.2.17.	Bidang Urusan Perpustakaan	II-129
2.1.3.2.18.	Bidang Urusan Kearsipan	II-130
2.1.3.3.	Layanan Urusan Pilihan	II-131
2.1.3.3.1.	Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan	II-131
2.1.3.3.2.	Bidang Urusan Pariwisata	II-133
2.1.3.3.3.	Bidang Urusan Pertanian	II-133
2.1.3.3.4.	Bidang Urusan Perdagangan	II-135
2.1.3.3.5.	Bidang Urusan Perindustrian	II-135
2.1.3.3.6.	Bidang Urusan Transmigrasi	II-136

2.1.3.4.	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	II-136
2.1.3.4.1.	Sekretariat DPRD	II-136
2.1.3.5.	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	II-137
2.1.3.5.1.	Bidang Urusan Perencanaan	II-137
2.1.3.5.2.	Bidang Urusan Keuangan	II-140
2.1.3.5.3.	Bidang Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	II-142
2.1.3.5.4.	Bidang Urusan Penelitian dan Pengembangan.....	II-144
2.1.3.5.5.	Bidang Urusan Pengawasan	II-145
2.1.4.	Aspek Daya Saing Daerah.....	II-146
2.1.4.1.	Kemampuan Ekonomi Daerah	II-146
2.1.4.2.	Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	II-148
2.1.4.3.	Iklim Berinvestasi.....	II-151
2.1.4.4.	Sumber Daya Manusia.....	II-152
2.1.5.	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	II-153
2.1.5.1.	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	II-153
2.1.5.2.	Capaian Standar Pelayanan Minimal	II-167
2.1.5.3.	Capaian Kinerja SDG's/TPB	II-169
2.2.	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	II-183
2.3.	Permasalahan Pembangunan Daerah	II-186
2.3.1.	Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah.....	II-189
2.3.1.1.	Urusan Wajib Pelayanan Dasar.....	II-189
2.3.1.2.	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	II-191
2.3.1.3.	Urusan Pilihan.....	II-194
2.3.1.4.	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	II-195
2.3.1.5.	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	II-196
2.3.1.6.	Unsur Kewilayahan.....	II-196
2.3.2.	Isu Strategis Daerah.....	II-197
BAB III	KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1.	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	III-1
3.1.1.	Prospek dan Tantangan Perekonomian Daerah.....	III-1
3.1.1.1.	Prospek Perekonomian Daerah	III-2
3.1.1.2.	Prospek Ekonomi Daerah.....	III-4
3.1.1.3.	Tantangan Perekonomian.....	III-5
3.1.2.	Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDRB.....	III-8
3.1.3.	Kemiskinan	III-11
3.1.4.	Tingkat Pengangguran Terbuka	III-12
3.1.5.	Gini Ratio.....	III-14
3.1.6.	PDRB Per Kapita	III-14
3.1.7.	Inflasi	III-15
3.2.1.	Sasaran dan Arah Kebijakan Ekonomi Nasional Tahun 2022.....	III-16

	3.2.2. Sasaran dan Arah Kebijakan Ekonomi Kota Palopo Tahun 2022.....	III-17
	3.2.3. Arah Kebijakan Ekonomi Kota Palopo Tahun 2022	III-18
	3.2.4. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-19
	3.2.4.1. Pendapatan Daerah.....	III-19
	3.2.4.2. Belanja Daerah	III-24
	3.2.5. Arah Kebijakan Belanja Daerah 2022.....	III-27
	3.2.5.1. Pembiayaan Daerah.....	III-28
	3.2.6. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah 2022.....	III-30
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....	IV-1
	4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Palopo	IV-1
	4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2022	IV-5
	4.2.1. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional.....	IV-5
	4.2.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sul-Sel Tahun 2022.....	IV-8
	4.2.3. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kota Palopo Tahun 2022.....	IV-9
	4.3. Pokok Pikiran DPRD Tahun 2022	IV-20
	4.4. Program Prioritas Pembangunan Daerah	IV-23
	4.5. Dukungan Program Pembangunan Daerah Terhadap Prioritas Nasional Tahun 2022	IV-39
	4.6. Dukungan Program Pembangunan Daerah Kota Palopo Terhadap Sasaran Pembangunan Provinsi Sulsel.....	IV-39
	4.7. Dukungan Prioritas Pembangunan daerah terhadap Prioritas Nasional Tahun 2022.....	IV-41
	4.6. Integrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	IV-60
	4.8. Dukungan Sasaran RKPD terhadap Sasaran RKP Tahun 2022.....	IV-42
	4.9. Keterkaitan prioritas pembangunan dengan indikator kinerja utama pembangunan dalam Perubahan RPJMD Kota Palopo ..	IV-44
	4.10. Integrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	IV-45
	4.11. Integrasi dan Dukungan Terhadap Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	IV-48
	4.12. Integrasi dan Dukungan Terhadap Pengarusutamaan Gender ..	IV-50
	4.13. Integrasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	IV-50
	4.14. Inovasi Daerah Tahun 2020	IV-50
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....	V-1
	5.1. Kerangka Pendanaan	V-1
	5.2. Program Prioritas Pembangunan Daerah	V-1
	5.3. Rencana Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022	V-29
BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	VI-1
	6.1. Indikator Makro Pembangunan.....	VI-1
	6.2. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)	VI-1
	6.3. Indikator Kinerja Kunci	VI-2

6.4.	Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM)	VI-23
6.5.	Indikator Sustainable Development Goals (SDGs)	VI-26
BAB VII	P E N U T U P	VII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Luas Wilayah dan Pembagian Wilayah Menurut Kecamatan Kota Palopo tahun 2020	II-1
Tabel 2.2.	Luas dan Tingkat Kemiringan Lereng Kota Palopo 2020.....	II-3
Tabel 2.3	Penggunaan Lahan Kota Palopo 2020	II-8
Tabel 2.4	Penduduk Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-20
Tabel 2.5	Pola Tutupan Lahan Wilayah Kota Palopo Tahun 2018	II-22
Tabel 2.6	Luas Lahan Kritis Kota Palopo 2017 (Ha)	II-24
Tabel 2.7	Perkiraan Luas Kerusakan Hutan Menurut Penyebabnya, 2016	II-24
Tabel 2.8	Angka Kekurangan Rumah (Backlog) Kota Palopo 2018	II-25
Tabel 2.9	Perkiraan Kebutuhan Air Minum di Kota Palopo Tahun 2032.....	II-28
Tabel 2.10	PDRB Kota Palopo Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha (milyar Rupiah) Tahun 2018 – 2020.....	II-30
Tabel 2.11	PDRB Kota Palopo Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (milyar rupiah) Tahun 2018 – 2020	II-31
Tabel 2.12	Kontribusi PDRB Kota Palopo Terhadap PDRB Sulawesi Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018 – 2020 (Persen)	II-32
Tabel 2.13	Pengangguran Terbuka Kota Palopo Tahun 2018 – 2020	II-35
Tabel 2.14	Perkembangan Gini Rasio Beberapa Wilayah di Sulsel Tahun 2016 – 2020	II-36
Tabel 2.15	Kondisi Kemiskinan Kota Palopo 2016 – 2020.....	II-37
Tabel 2.16	Target dan Realisasi Pendapatan Kota Palopo Tahun Anggaran 2020	II-39
Tabel 2.17	Indikator Penyusun IPM Kota Palopo Tahun 2016-2020	II-40
Tabel 2.18	Perkembangan dan Perbandingan IPM Kota Palopo dengan Wilayah Lain Tahun 2016 – 2020.....	II-41
Tabel 2.19	Perkembangan Angka Melek Huruf Kota Palopo 2016-2020	II-42
Tabel 2.20	Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah 2016 – 2020	II-43
Tabel 2.21	Perbandingan Harapan Lama Sekolah 2016 – 2020	II-44
Tabel 2.22	Persentase Balita Gizi Buruk Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-45
Tabel 2.23	Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kota Palopo Tahun 2016 – 2020 ..	II-46
Tabel 2.24	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Palopo Tahun 2016 – 2020..	II-47
Tabel 2.25	Perbandingan Kondisi tenaga Kerja 2020 dan 2020 Kota Palopo ..	II-50

Tabel 2.26	Perkembangan Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I..	II-50
Tabel 2.27	Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2020	II-51
Tabel 2.28	Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-52
Tabel 2.29	Persentase Pendidikan Anak Usia Dini Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-53
Tabel 2.30	Angka Partisipasi Kasar Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-54
Tabel 2.31	Penduduk Usia 10 Tahun ke atas di Kota Palopo yang Ditamatkan Tahun 2016 – 2020	II-55
Tabel 2.32	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Kota Palopo Tahun 2016 - 2020.....	II-56
Tabel 2.33	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Kota Palopo Tahun 2016 -2020.....	II-56
Tabel 2.34	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Kota Palopo Tahun 2019 - 2020.....	II-57
Tabel 2.35	Persentase Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-58
Tabel 2.36	Persentase Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-58
Tabel 2.37	Persentase Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-58
Tabel 2.38	Angka Putus Sekolah Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-59
Tabel 2.39	Persentase Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-59
Tabel 2.40	Persentase Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-60
Tabel 2.41	Persentase Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-60
Tabel 2.42	Angka Kelulusan Kota Palopo 2014 – 2020	II-61
Tabel 2.43	Persentase Angka Kelulusan (AL) SD/MI Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-61
Tabel 2.44	Persentase Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-62
Tabel 2.45	Persentase Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-62

Tabel 2.46	Persentase Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-63
Tabel 2.47	Persentase Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-64
Tabel 2.48	Persentase Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-65
Tabel 2.49	Persentase Sekolah Pendidikan SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan Baik Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-65
Tabel 2.50	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar (SD/SMP yang sederajat) Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-66
Tabel 2.51	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-68
Tabel 2.52	Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Dasar Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-69
Tabel 2.53	Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-70
Tabel 2.54	Persentase Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-Rata Pendidikan Dasar Kota Palopo 2016 – 2020	II-71
Tabel 2.55	Persentase Rasio Guru Terhadap Murid Per Kelas Rata-Rata Pendidikan Menengah Kota Palopo 2016 – 2020	II-72
Tabel 2.56	Persentase Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun Perempuan dan Laki-Laki Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-73
Tabel 2.57	Persentase Penduduk Berusia ≥15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara) Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-74
Tabel 2.58	Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/DIV Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-75
Tabel 2.59	Angka Kematian Bayi (AKB) Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-75
Tabel 2.60	Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-76
Tabel 2.61	Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-77
Tabel 2.62	Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-77
Tabel 2.63	Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-78

Tabel 2.64	Rasio Posyandu Per Satuan Balita Kota Palopo Tahun 2013 – 2018..	II-79
Tabel 2.65	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-79
Tabel 2.66	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-80
Tabel 2.67	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Tahun 2016 – 2020.....	II-80
Tabel 2.68	Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-81
Tabel 2.69	Cakupan Ko,likasi Kebidanan yang Ditangani Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-82
Tabel 2.70	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-83
Tabel 2.71	Cakupan Desa/Kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI) Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-83
Tabel 2.72	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-84
Tabel 2.73	Penduduk yang Tingkat Konsumsinya Lebih Rendah dari 1.200 kkal/kapita/hari Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-85
Tabel 2.74	Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-86
Tabel 2.75	Non Polio AFP Rate Per 100.000 Penduduk Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-87
Tabel 2.76	Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-88
Tabel 2.77	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita TBC BTA Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-88
Tabel 2.78	Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk) Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-89
Tabel 2.79	Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk) Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-90
Tabel 2.80	Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis yang Terdeteksi Dalam Program DOTS Kota Palopo Tahun 2016 – 2020.....	II-91
Tabel 2.81	Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh Dalam Program DOTS Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-92

Tabel 2.82	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-92
Tabel 2.83	Penderita Diare yang Ditangani Kota Palopo Tahun 2016 – 2020.....	II-93
Tabel 2.84	Angka Kejadian Malaria Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-94
Tabel 2.85	Tingkat Kematian Akibat Malaria Kota Palopo Tahun 2015 – 2019 ...	II-94
Tabel 2.86	Proporsi Anak Balita yang Tidur dengan Kelambu Berinsektisida Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-95
Tabel 2.87	Proporsi Anak Balita dengan Demam yang Diobati dengan Obat Anti Malaria yang Tepat Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-95
Tabel 2.88	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari Total Populasi Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-96
Tabel 2.89	Proporsi Jumlah Penduduk Usia 15-24 Tahun yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif Tentang HIV/AIDS Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-97
Tabel 2.90	Cakupan Kunjungan Bayi Kota Palopo Tahun 2016 – 2020.....	II-98
Tabel 2.91	Cakupan Puskesmas Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-99
Tabel 2.92	Cakupan Puskesmas Pembantu Kota Palopo Tahun 2016 – 2020.....	II-100
Tabel 2.93	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Kota Palopo Tahun 2016 – 2020 .	II-100
Tabel 2.94	Cakupan Pelayanan Nifas Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-101
Tabel 2.95	Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-102
Tabel 2.96	Cakupan Pelayanan Anak Balita Kota Palopo Tahun 2016 – 2020...	II-103
Tabel 2.97	Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6-12 Bulan Keluarga Miskin Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-104
Tabel 2.98	Cakupan Penjangkaran Kesehatan Siswa SD dan Setingkat Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-104
Tabel 2.99	Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS) Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-106
Tabel 2.100	Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epideminologi < 24 Jam Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-106
Tabel 2.101	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Berkondisi Baik 2016 – 2019	II-107
Tabel 2.102	Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-108

Tabel 2.103	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (>40 Km/Jam) Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-109
Tabel 2.104	Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 m) Kota Palopo Tahun 2016 – 2020...	II-109
Tabel 2.105	Persentase Sempadan Jalan yang Dipakai Pedagang Kaki Lima atau Bangunan Rumah Liar Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-110
Tabel 2.106	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-111
Tabel 2.107	Persentase Sempadan Sungai yang Dipakai Bangunan Liar Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-111
Tabel 2.108	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-112
Tabel 2.109	Persentase Tidak Terjadi Genangan > 2 Kali Setahun Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-112
Tabel 2.110	Persentase Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor Kota Palopo Tahun 2016 – 2020 .	II-113
Tabel 2.111	Persentase Irigasi Kota Dalam Kondisi Baik Kota Palopo Tahun Tahun 2016 – 2020	II-114
Tabel 2.112	Persentase Rasio Jaringan Irigasi Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-115
Tabel 2.113	Persentase Penduduk Berakses Air Minum Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-115
Tabel 2.114	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020.....	II-117
Tabel 2.115	Persentase Areal Kawasan Kumuh Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-118
Tabel 2.116	Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-118
Tabel 2.117	Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-119
Tabel 2.118	Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-120
Tabel 2.119	Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-121
Tabel 2.120	Luasan RTH Publik Sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan Kota Palopo Tahun 2016 – 2020.....	II-122

Tabel 2.121	Rasio Bangunan Ber-IMB Per Satuan Bangunan Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-122
Tabel 2.122	Rasio Rumah Layak Huni Kota Palopo Tahun 2016 – 2020.....	II-123
Tabel 2.123	Rasio Permukiman Layak Huni Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-124
Tabel 2.124	Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-125
Tabel 2.125	Persentase Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-125
Tabel 2.126	Persentase Pemukiman yang Tertata Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-126
Tabel 2.127	Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-127
Tabel 2.128	Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan Kota Palopo Tahun 2016 – 2020.....	II-127
Tabel 2.129	Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-128
Tabel 2.130	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Disukung dengan PSU Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-128
Tabel 2.131	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-129
Tabel 2.132	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan) Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-130
Tabel 2.133	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota Kota Palopo Tahun 2016 – 2020.....	II-130
Tabel 2.134	Tingkat Waktu Tanggap (<i>response time rate</i>) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-131
Tabel 2.135	Persentase Penegakan PERDA Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-131
Tabel 2.136	PMKS yang Meperoleh Bantuan Sosial Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-32
Tabel 2.137	Persentase PMKS yang Tertangani Kota Palopo Tahun 2016 – 2020.	II-133
Tabel 2.138	Persentase PMKS Skala yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020...	II-134
Tabel 2.139	Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020.....	II-134

Tabel 2.140	Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang Menyediakan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-135
Tabel 2.141	Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-136
Tabel 2.142	Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Menggunakan Sarana dan Prasarana Tanggap Darurat Lengkap Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-136
Tabel 2.143	Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial di Kota Palopo Tahun 2016 – 2021	II-137
Tabel 2.144	Angka Sengketa Pengusaha – Pekerja Per Tahun di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-137
Tabel 2.145	Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) Di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-138
Tabel 2.146	Pencari Kerja yang Ditempatkan di Kota Palopo Tahun 2016-2020 .	II-139
Tabel 2.147	Persentase Keselamatan dan Perlindungan Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-139
Tabel 2.148	Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020.....	II-140
Tabel 2.149	Persentase Pemeriksaan Perusahaan di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-141
Tabel 2.150	Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020.....	II-141
Tabel 2.151	Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020.....	II-142
Tabel 2.152	Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-142
Tabel 2.153	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-143
Tabel 2.154	Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPR di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-143
Tabel 2.155	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-144
Tabel 2.156	Rasio KDRT di Kota Palopo Tahun 2013 – 2018.....	II-144

Tabel 2.157	Persentase Jumlah Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-145
Tabel 2.158	Persentase Laporan Pengaduan ke Unit Pelayanan Terpadu Kota Palopo Tahun 2013 – 2018	II-146
Tabel 2.159	Persentase Penegakan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kota Palopo Tahun 2013 – 2018	II-146
Tabel 2.160	Persentase Pemulangan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-147
Tabel 2.161	Rasio APM dan APK Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Palopo Tahun 2019 – 2020	II-147
Tabel 2.162	Persentase Ketersediaan Pangan Utama di Kota Palopo Tahun 2014 – 2018	II-148
Tabel 2.163	Persentase Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-148
Tabel 2.164	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-149
Tabel 2.165	Persentase Luas Lahan Bersertifikat di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-150
Tabel 2.166	Persentase Penyelesaian Kasus Tanah Negara di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-150
Tabel 2.167	Persentase Penyelesaian Izin Lokasi di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-151
Tabel 2.168	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-151
Tabel 2.169	Terintegrasinya RPPLH Dalam Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-151
Tabel 2.170	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah Provinsi di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-152
Tabel 2.171	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-152
Tabel 2.172	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-152
Tabel 2.173	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-153

Tabel 2.174	Persentase Ketaatan Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-153
Tabel 2.175	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-154
Tabel 2.176	Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditangani di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-154
Tabel 2.177	Persentase Timbulan Sampah yang Ditangani di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-155
Tabel 2.178	Persentase Sampah yang Terkurangi Melalui 3R di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-155
Tabel 2.179	Persentase Cakupan Area Pelayanan di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-156
Tabel 2.180	Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-157
Tabel 2.181	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020....	II-157
Tabel 2.182	Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-158
Tabel 2.183	Rasio Bayi Berakte Kelahiran di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020.....	II-158
Tabel 2.184	Rasio Pasangan Berakte Nikah di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020...	II-159
Tabel 2.185	Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-159
Tabel 2.186	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-160
Tabel 2.187	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-160
Tabel 2.188	Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-160
Tabel 2.189	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang Baik di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-161
Tabel 2.190	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020.....	II-162
Tabel 2.191	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Kota Palopo Tahun 2016 – 2020.....	II-162
Tabel 2.192	Persentase LSM Aktif di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020.....	II-162
Tabel 2.193	Persentase LPM Berprestasi di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-163

Tabel 2.194	Persentase PKK Aktif di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-163
Tabel 2.195	Persentase Posyandu Aktif di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-164
Tabel 2.196	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kota Palopo Tahun 2016 – 2020.....	II-164
Tabel 2.197	Dokumen Rancangan Induk Pengendalian Penduduk Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-165
Tabel 2.198	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-165
Tabel 2.199	Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020.....	II-166
Tabel 2.200	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-166
Tabel 2.201	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya di bawah 20 Tahun di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020.....	II-167
Tabel 2.202	Cakupan PUS yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (unmet need) di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-167
Tabel 2.203	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-168
Tabel 2.204	Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-169
Tabel 2.205	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber-KB di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-169
Tabel 2.206	Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Ber-KB di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-170
Tabel 2.207	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Ber-KB di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-171
Tabel 2.208	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-171
Tabel 2.209	Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/ Mahasiswa di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020.....	II-172
Tabel 2.210	Cakupan PKB/PLKB yang Didayagunakan.....	II-172
Tabel 2.211	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber-KB Mandiri di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-173

Tabel 2.212	Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/ Kelurahan di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020.....	II-174
Tabel 2.213	Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi Di Gudang Kabupaten/Kota di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020.....	II-174
Tabel 2.214	Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi di Faskes Kota Palopo Tahun 2016 – 2020.....	II-175
Tabel 2.215	Persentase Faskes dan Jejaringnya (di seluruh tingkatan wilayah) yang Bekerjasama dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai dengan Standarisasi Pelayanan di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020.....	II-175
Tabel 2.216	Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-176
Tabel 2.217	Cakupan Keluarga yang Mempunyai Balita dan Anak yang Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-176
Tabel 2.218	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD dan APBDes di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-177
Tabel 2.219	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020.....	II-177
Tabel 2.220	Rasio Ijin Trayek di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-178
Tabel 2.221	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020..	II-178
Tabel 2.222	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020.....	II-179
Tabel 2.223	Persentase Layanan Angkutan Darat di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-179
Tabel 2.224	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-180
Tabel 2.225	Persentase Pemasangan Rambu-Rambu di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020.....	II-180
Tabel 2.226	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan Kota Palopo Tahun 2016 – 2020.....	II-181
Tabel 2.227	Cakupan Layanan Komunikasi di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020 ..	II-181

Tabel 2.228	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-182
Tabel 2.229	Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Pribadi di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-182
Tabel 2.230	Persentase Koperasi Aktif di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-183
Tabel 2.231	Persentase UKM Non BPR/LKM Aktif di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-183
Tabel 2.232	Persentase Usaha Mikro dan Kecil Kota Palopo Tahun 2016 – 2020 .	II-184
Tabel 2.233	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-184
Tabel 2.234	Jumlah Nilai Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-184
Tabel 2.235	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja di Kota Palopo Tahun 2013 – 2018.	II-185
Tabel 2.236	Persentase Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-185
Tabel 2.237	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020.....	II-186
Tabel 2.238	Persentase Wirausaha Muda di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-186
Tabel 2.239	Persentase Pembinaan Olahraga di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-186
Tabel 2.240	Persentase Pelatih yang Berseertifikat di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-187
Tabel 2.241	Persentase Pembinaan Atlet Muda di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-187
Tabel 2.242	Persentase Atlet Berprestasi di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-188
Tabel 2.243	Persentase Prestasi Olahraga di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-188
Tabel 2.244	Ketersediaan Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-188
Tabel 2.245	Ketersediaan Buku “Palopo Dalam Angka” Kota Palopo Tahun 2016 – 2020.....	II-188
Tabel 2.246	Ketersediaan Buku “PDRB” Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-189
Tabel 2.247	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020.....	II-189
Tabel 2.248	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020.....	II-189

Tabel 2.249	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-190
Tabel 2.250	Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-190
Tabel 2.251	Jumlah Cagar Budaya yang Diekola Secara Terpadu di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-191
Tabel 2.252	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-191
Tabel 2.253	Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-191
Tabel 2.254	Rasio Perpustakaan Per Satuan Penduduk Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-192
Tabel 2.255	Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan Per Tahun di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-192
Tabel 2.256	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-192
Tabel 2.257	Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis dan Penilai yang Memiliki Sertifikat di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-193
Tabel 2.258	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-193
Tabel 2.259	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-194
Tabel 2.260	Persentase Produksi Perikanan Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-194
Tabel 2.261	Persentase Konsumsi Ikan di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-194
Tabel 2.262	Persentase Cakupan Bina Kelompok Nelayan di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-195
Tabel 2.263	Persentase Produksi Perikanan Kelompok Nelayan di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-195
Tabel 2.264	Persentase Kunjungan Wisata di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-196
Tabel 2.265	Lama Kunjungan Wisata di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-197
Tabel 2.266	Persentase PAD Sektor Pariwisata Kota Palopo Tahun 2016 – 2020 ..	II-197
Tabel 2.267	Persentase Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar di Kota Palopo Tahun 2013 – 2018	II-198
Tabel 2.268	Persentase Pembinaan Kelompok Tani di Kota Palopo Tahun 2013 – 2018	II-199

Tabel 2.269	Nilai Ekspor Bersih Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-199
Tabel 2.270	Persentase Cakupan Bina Kelompok Pengrajin di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-201
Tabel 2.271	Tersedianya RKT Pada Alat-Alat Kelengkapan DPRD Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-202
Tabel 2.272	Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD dengan RPJMD dan RKPD Kota Palopo Tahun 2016 – 2020.....	II-202
Tabel 2.273	Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD ke Dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-202
Tabel 2.274	Ketersediaan Dokumen RPJPD Kota Palopo	II-203
Tabel 2.275	Ketersediaan Dokumen RPJMD Kota Palopo.....	II-204
Tabel 2.276	Ketersediaan Dokumen RKPD Kota Palopo Tahun 2016 – 2020.....	II-204
Tabel 2.277	Ketersediaan Dokumen RTRW Kota Palopo	II-205
Tabel 2.278	Persentase Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-205
Tabel 2.279	Persentase Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-206
Tabel 2.280	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-207
Tabel 2.281	Persentase SILPA Kota Palopo Tahun 2016 – 2018	II-207
Tabel 2.282	Persentase Program/Kegiatan yang Tidak Terlaksana di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-208
Tabel 2.283	Persentase Belanja Pendidikan (205) di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-208
Tabel 2.284	Persentase Belanja Kesehatan (10%) di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-209
Tabel 2.285	Persentase Perbandingan Antara Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-210
Tabel 2.286	Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-210
Tabel 2.287	Ketepatan Waktu Penetapan APBD Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-211
Tabel 2.288	Rata –Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2016 – 2020	II-211

Tabel 2.289	Persentase ASN Kota Palopo yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Tahun 2016 – 2020	II-212
Tabel 2.290	Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural Tahun 2016 – 2020	II-212
Tabel 2.291	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-213
Tabel 2.292	Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-213
Tabel 2.293	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-214
Tabel 2.294	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-214
Tabel 2.295	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-214
Tabel 2.296	Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-215
Tabel 2.297	Persentase Tindak Lanjut Temuan di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-215
Tabel 2.298	Persentase Pelanggaran Pegawai di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-216
Tabel 2.299	Jumlah Temuan BPK di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-216
Tabel 2.300	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-217
Tabel 2.301	Pengeluaran Per Kapita 2016 – 2020 (Ribu Rupiah/Orang/Tahun) ...	II-218
Tabel 2.302	Persentase Pengeluaran Konsumsi RT Non Pangan Per Kapita di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-219
Tabel 2.303	Produktivitas Total Daerah Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-219
Tabel 2.304	Rasio Ekspor + Impor Terhadap PDRB Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-220
Tabel 2.305	Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan di Bank Umum Kota Palopo Tahun 2013 – 2017	II-221
Tabel 2.306	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-221
Tabel 2.307	Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-222

Tabel 2.308	Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal Per Tahun Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-222
Tabel 2.309	Data Jumlah dan Jenis Bank di Kota Palopo	II-223
Tabel 2.310	Jumlah Usaha/Perusahaan dan Tenaga Kerja Kategori Jasa Keuangan dan Asuransi di Kota Palopo dan Kabupaten Sekitar, 2016	II-224
Tabel 2.311	Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih di Kota Palopo Tahun 2014 – 2018	II-224
Tabel 2.312	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik di Kota Palopo Tahun 2014 – 2018	II-225
Tabel 2.313	Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-226
Tabel 2.314	Angka Kriminalitas yang Tertangani di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-227
Tabel 2.315	Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Kelurahan	II-227
Tabel 2.316	Rasio Ketergantungan Kota Palopo Tahun 2016 – 2020	II-228
Tabel 2.317	Rasio Lulusan S1/S2/S3 di Kota Palopo Tahun 2014 – 2018	II-229
Tabel 2.318	Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Palopo	II-229
Tabel 2.319	Capaian SPM Pendidikan Kota Palopo Tahun 2020	II-299
Tabel 2.320	Capaian Indikator Kinerja SDG's/TPB	II-303
Tabel 2.321	Hasil Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan IV 2020	II-325
Tabel 2.322	Keterkaitan Permasalahan Pembangunan Terhadap Hasil Evaluasi Pembangunan Kota Palopo	II-329
Tabel 2.323	Keterkaitan Sasaran, Permasalahan Pembangunan Kota Palopo Tahun 2022	II-332
Tabel 2.324	Keterkaitan Prioritas Pembangunan dan Permasalahan Pembangunan Kota Palopo Tahun 2022	II-333
Tabel 3.1	Perkembangan nilai PDRB Kota Palopo tahun 2018-2020	III-2
Tabel 3.2	Perkembangan Capaian Nilai PDRB Kota Palopo (ADHB & ADHK) Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) Tahun 2018-2020	III-2
Tabel 3.3	Perbandingan nilai inflasi di beberapa wilayah di Sulawesi Selatan tahun 2018-2020	III-2

Tabel 3.4	Perbandingan dan Perubahan Gini Rasio.....	III-4
Tabel 3.5	Perbandingan Kondisi tenaga Kerja 2019 dan 2020 Kota Palopo ..	III-6
Tabel 3.6	Indikator Makro Ekonomi Kota Palopo 2022	III-11
Tabel 3.7	Realisasi dan Proyeksi Target Pendapatan Kota Palopo Tahun 2020-2023.....	III-12
Tabel 3.8	Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Palopo Tahun 2020-2023.....	III-18
Tabel 3.9	Realisasi dan Proyeksi Target Pembiayaan Daerah Kota Palopo Tahun 2021-2023.....	III-24
Tabel 4.1	Penjelasan Misi dan Keterkaitan dengan Visi.....	IV-3
Tabel 4.2	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Palopo Tahun 2022	IV-4
Tabel 4.3	Keterkaitan Permasalahan Pembangunan, Isu Strategis, Prioritas dan Sasaran Pembangunan	IV-7
Tabel 4.4	Keterkaitan Prioritas Nasional, Sulsel dan Kota Palopo Tahun 2022 ..	IV-15
Tabel 4.5	Keterkaitan Pokok Pikiran DPRD Terhadap Prioritas Pembangunan Daerah Kota Palopo 2022	IV-19
Tabel 4.6	Keterkaitan Sasaran,Prioritas Pembangunan, Program Pembangunan dan Program Perangkat daerah Kota Palopo Tahun 2022.....	IV-27
Tabel 5.1	Proyeksi Belanja Pemerintah Kota Palopo Tahun 2022.....	V-1
Tabel 5.2	Prioritas dan Program Pembangunan DaerahKota Palopo Tahun 2022	V-2
Tabel 5.3	Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Alokasi Per Perangkat Daerah Tahun 2022	V-29
Tabel 5.4	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Alokasi Per Perangkat Daerah Tahun 2022	V-31
Tabel 6.1	Capaian, Proyeksi dan Target Indikator Makro Pembangunan Kota Palopo 2022	VI-1
Tabel 6.2	Capaian, Proyeksi dan Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Palopo 2022.....	VI- 1
Tabel 6.3	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pemerintah Kota Palopo Tahun 2022 ...	VI-2
Tabel 6.4	Capaian dan Target Kinerja Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Palopo.....	VI-24
Tabel 6.5	Target Indikator SDGs Kota Palopo 2022	VI-27

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan	I-7
Gambar 2.1. Peta Letak dan Kondisi Geografis.....	II-1
Gambar 2.2. Peta Topografi	II-2
Gambar 2.3. Peta Geologi.....	II-4
Gambar 2.4. Peta Hidrolik.....	II-5
Gambar 2.5. Peta DAS Kota Palopo	II-6
Gambar 4.1. Inovasi Daerah	IV-69

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1.	Piramida Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kota Palopo Tahun 2020.....	II-21
Grafik 2.2.	Status Keterasediaan dan kebutuhan Bahan Pangan 2020	II-26
Grafik 2.3.	Perkembangan Produksi Pangan Utama Kota Palopo (2015-2019).	II-26
Grafik 2.4.	Perkembangan Produksi Daging Kota Palopo (2015 – 2019)	II-27
Grafik 2.5.	Jumlah Sambungan Rumah PAM Tirta Mangkaluku Palopo 2015-2019	II-28
Grafik 2.6.	Inflasi Kota Palopo 2018 -2020	II-33
Grafik 2.7.	Persentase Penduduk Miskin Kota Palopo, 2018-2020	II-34
Grafik 2.8.	Indeks Gini Kota Palopo, 2018-2020.....	II-35
Grafik 2.9.	Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kota Palopo 2020 Dibandingkan dengan Daerah Lain di Luwu Raya.....	II-37
Grafik 2.10.	Perbandingan Capaian AMH Kota Palopo dengan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 - 2018.....	II-42
Grafik 2.11.	Perbandingan Angka Harapan Hidup Kota Palopo dengan Wilayah Lain Tahun 2019	II-44
Grafik 2.12.	perbandingan tingkat pengangguran terbuka Kota Palopo 2020 dibandingkan dengan daerah lain di Luwu Raya.....	II-48
Grafik 3.1.	perbandingan tingkat pengangguran terbuka Kota Palopo 2020 dibandingkan dengan daerah lain di Luwu Raya.....	III-5

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PALOPO
NOMOR 15 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA PALOPO TAHUN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah harus mampu mengintegrasikan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi daerah dan nasional. Perencanaan Pembangunan daerah dirumuskan dengan prinsip responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan yang diwujudkan dalam dokumen RKPD.

Tahapan penyusunan RKPD ini merupakan hasil kinerja Tim melalui proses yang sistematis yaitu : pembentukan tim, pengumpulan data, identifikasi permasalahan, telaah dokumen, diskusi dan perumusan secara keseluruhan.

RKPD berisi tujuan, sasaran dan target kinerja pembangunan yang akan dicapai Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kota Palopo. Selain itu RKPD juga memuat program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif pendanaan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022, yang menjabarkan RPJMD Kota Palopo tahun keempat, yang juga menginternalisasi RKPD Provinsi Sulsel Tahun 2022 dan Program Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2022. Penyusunan RKPD dilakukan melalui serangkaian tahapan dan tatacara yang antara lain meliputi:

- a. Persiapan Penyusunan RKPD;
- b. Penyusunan Rancangan Awal RKPD;
- c. Penyusunan Rancangan RKPD;
- d. Pelaksanaan Musrenbang RKPD;
- e. Perumusan Rancangan Akhir RKPD; dan
- f. Penetapan RKPD.

Dari keseluruhan tahapan penyusunan RKPD tersebut, dokumen ini merupakan Rancangan Akhir RKPD Kota Palopo Tahun 2022. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) mengacu pada RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Tahun 2022, RKPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RKPD juga selanjutnya diseleraskan dengan renja Perangkat Daerah tahun 2022.

Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun APBD.

Diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, menjadi *starting point* bagi Pemerintah Kota Palopo dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah. Nomenklatur yang semula hanya pada level program dan kegiatan, kini menjadi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. Pengelolaan data perencanaan pembangunan yang semula menggunakan aplikasi *E Planning*, harus berganti dengan menggunakan aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) yang disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Dinamika perkembangan ekonomi makro Kota Palopo sampai dengan tahun 2020 menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Palopo jauh melambat dibandingkan beberapa tahun sebelumnya, pengurangan persentase penduduk miskin juga masih berjalan lambat termasuk tingkat pengangguran terbuka. Pada aspek kesejahteraan masyarakat, pendapatan per kapita masyarakat Kota Palopo juga masih tertinggal dibandingkan Kota Makassar dan Pare-pare, sementara gini rasio dan inflasi meski cenderung membaik, tetapi belum signifikan. Beberapa kondisi ekonomi makro ini menjadi perhatian utama dalam penyusunan RKPD Kota Palopo 2022.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Akhir RKPD Kota Palopo Tahun 2022 ini antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4248);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61)
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011) Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 15. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 16. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 26. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 28. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

29. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
30. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
31. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
35. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan di Daerah Kota /Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
36. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
37. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1540);
39. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 86);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 581);
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
48. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
49. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Menjaga Ketahanan Pangan Nasional pada Saat Tanggap Darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
50. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Kerja Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243);
51. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);
52. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
53. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2012 Nomor 9);
54. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2013 Nomor 11);
55. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2016 Nomor 8);
56. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengarusutamaan Gender;
57. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palopo Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2021 Nomor 3).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

RKP dan RKPD Kota Palopo Tahun 2022

Perencanaan Pembangunan Daerah disusun dengan menyelaraskan tujuan dan sasaran pembangunan Nasional sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022

Penyusunan RKPD 2022 Kota Palopo memperhatikan isu strategis dalam RKP Nasional dan sesuai dengan perkembangan kondisi daerah sehingga terjadi keselarasan antara pembangunan pusat dan daerah. Pembangunan Daerah sendiri sejatinya merupakan subsistem dari Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, RKPD Kabupaten/Kota harus mengacu kepada RKP.

Perubahan RPJMD Kota Palopo Tahun 2018-2023 dengan RKPD Kota Palopo Tahun 2022

Penyusunan RKPD 2022 Kota Palopo diselaraskan dengan Perubahan RPJMD Kota Palopo 2018-2023 sebab merupakan periode keempat dari RPJMD dimana konsistensi antara semua dokumen perencanaan harus menjadi perhatian dalam penyusunan dokumen RKPD 2022.

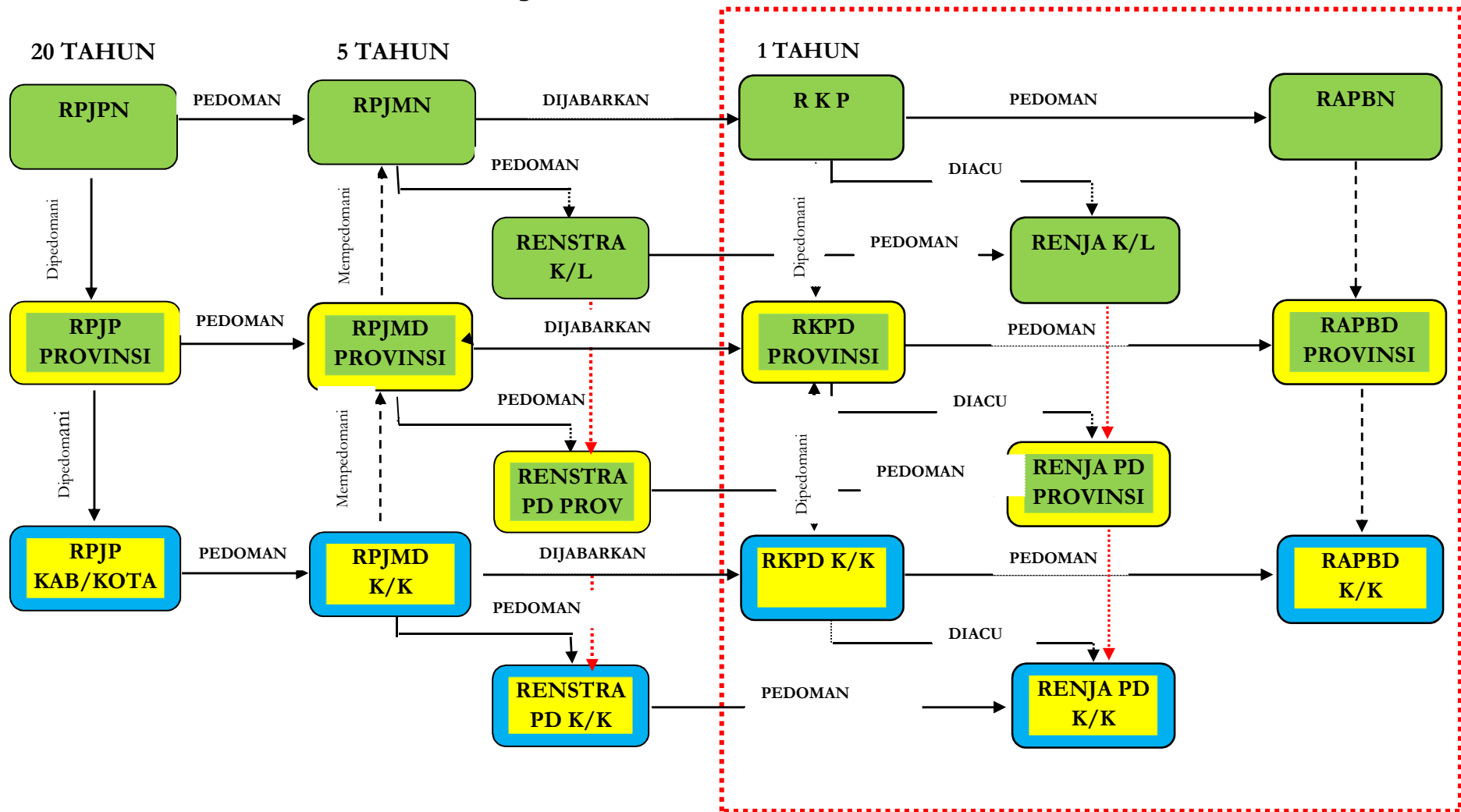
RKPD Kota Palopo Tahun 2022, Renja Perangkat Daerah dan KUA-PPAS

Renja-PD adalah Dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, pogram dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh

dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja-PD lingkup Pemerintah Kota Palopo mengacu pada RKPD Kota Palopo Tahun 2022.

RKPD 2022 selanjutnya, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Gambar 1.1.
Hubungan Antara Dokumen Perencanaan



1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RKPD Kota Palopo Tahun 2022 adalah sebagai :

1. Menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023;
2. Menjadi pedoman perumusan penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah;
3. Menjadi pedoman penyelarasan prioritas pembangunan Provinsi dengan Kota /kota; dan
4. Menjadi pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan dokumen RKPD Kota Palopo Tahun 2022 ini adalah :

1. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah;
2. Menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan Tahun 2022;
3. Menciptakan iklim pemerintahan yang partisipatif, responsive dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;
4. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasa;
5. Sebagai instrument dalam melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
6. Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Kota Palopo.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

RKPD Kota Palopo Tahun 2022, disusun dengan sistematika berdasarkan kaidah peraturan yang berlaku, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang, Dasar hukum penyusunan, Hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta Sistematika Penulisan RKPD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menjelaskan gambaran kondisi umum kondisi daerah meliputi aspek Geografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah dan Evaluasi pelaksanaan program kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD serta Permasalahan pembangunan daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menjelaskan gambaran kinerja Arah kebijakan ekonomi dan arah kebijakan keuangan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menjelaskan Tujuan dan Sasaran Pembangunan serta Prioritas Pembangunan daerah Tahun 2022.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini menjelaskan kerangka pendanaan tahun 2022, program prioritas pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah tahun 2022 yang akan dilaksanakan.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini menggambarkan target tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang akan dicapai pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP

Bab ini menjelaskan substansi dalam rencana kerja pemerintah daerah tahun 2022.

BAB. II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

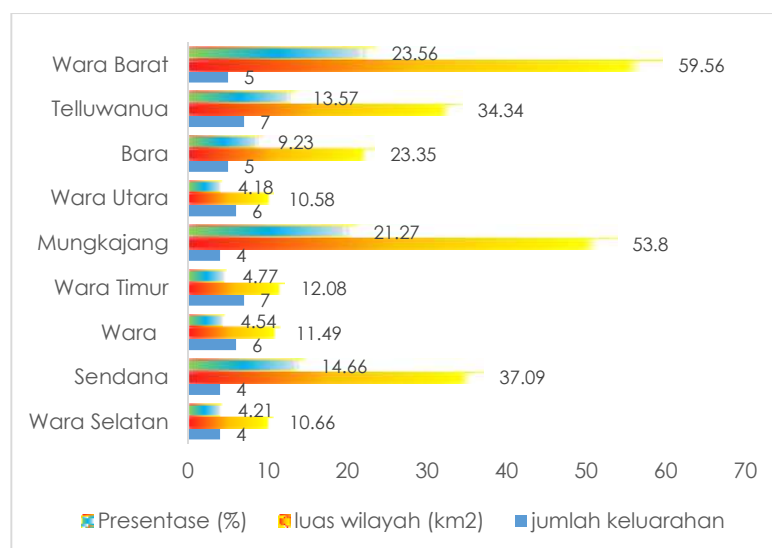
Bagian ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sub bab ini memuat beberapa bahasan dibawah ini :

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Aspek Geografi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Palopo mempunyai luas wilayah 24.752 km², memiliki **9 Kecamatan**, dan **48 Kelurahan**. Kota Palopo berbatasan dengan Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu di sebelah Utara, Teluk Bone di sebelah Timur dan Kecamatan Bua Kabupaten Luwu di sebelah Selatan serta Kecamatan Tondon Nanggala Kabupaten Toraja Utara di sebelah Barat.

Grafik 2.1
Luas Wilayah dan Pembagian Wilayah Menurut Kecamatan
Kota Palopo Tahun 2020



Sumber : Buku Palopo Dalam Angka 2021

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa Kecamatan Wara Barat merupakan kecamatan dengan wilayah terluas dan kecamatan yang terkecil adalah Wara Utara. Kecamatan dengan jumlah kelurahan terbanyak adalah Wara Timur dan kelurahan yang paling sedikit adalah Wara Selatan, Sendana, Mungkajang.

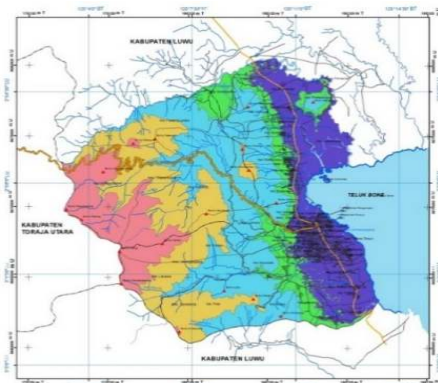
2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografi

Gambar 2.1 Peta Letak dan Kondisi Geografis

Kota Palopo terletak antara **2°53'.15" - 3°04'.08"** Lintang Selatan dan **120°03'.10" -120°14'.34"** Bujur Timur. Geografi wilayah mencakup pesisir di bagian Timur dan pegunungan di bagian Barat, serta dataran rendah memanjang dari utara sampai selatan, dengan 6 aliran sungai. Kemiringan lereng Kota Palopo dilihat dari titik ketinggiannya di atas permukaan air laut antara 0 – 25, 26 – 100, 101 – 500, 501 – 1000, dan 1000+ dpl dengan klimatologi Kota Palopo dipengaruhi oleh curah hujan, suhu dan kelembaban udara.

2.1.1.3 Topografi

Gambar 2.2 Peta Topografi



Kondisi topografi Kota Palopo meliputi ketinggian antara 0 – 1.500 m dari permukaan air laut (dpl) dengan tingkat kemiringan lereng antara 0–2 %, 2–15 %, 15–40 %, dan > 40 %. Adapun tingkat kemiringan lereng Kota Palopo berdasarkan luas wilayahnya yang terluas adalah wilayah dengan tingkat kemiringan lereng 2 – 15 % dengan luas 76,677 Km² sedangkan tingkat kemiringan lereng dengan luas wilayah terkecil adalah tingkat kemiringan lereng 15 % - 40 % dengan luas wilayah 57,989 Km². Untuk lebih jelasnya, luas wilayah berdasarkan tingkat kemiringan lereng Kota Palopo menurut kecamatan ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
Luas dan Tingkat Kemiringan Lereng Kota Palopo 2020

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Tingkat Kemiringan Lereng (Km ²)			
			0-2 %	2-15 %	15-40 %	> 40 %
1.	Wara Selatan	10,66	7,462	1,066	2,132	-
2.	Sendana	37,09	5,564	-	22,254	9,272
3.	Wara	11,49	11,490	-	-	-
4.	Wara Timur	12,08	12,080	-	-	-
5.	Mungkajang	53,80	2,690	-	16,140	34,97
6.	Wara Utara	10,58	6,348	2,116	2,116	-
7.	Bara	23,35	7,005	2,335	14,010	-
8.	Tellu Wanua	34,34	24,038	3,434	6,868	-
9.	Wara Barat	54,13	-	-	5,413	48,717
Jumlah		247,52	76,677	8,951	68,933	57,989

Sumber : Palopo Dalam Angka, 2021

Kondisi ketinggian, bervariasi ini menunjukkan 62,85 % dari total luas wilayah merupakan daerah ketinggian 0-500 m, 24,76 % terletak di ketinggian 501-1.000 m, dan sekitar 12,39 % terletak di atas ketinggian lebih dari 1.000 m. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

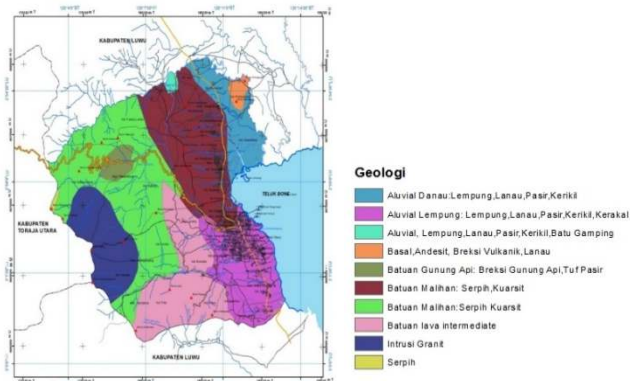
Keadaan permukaan tanah bergunung dan berbukit terutama pada relatif rendah dan berbukit pada bagian Utara. Sedangkan bagian Timur merupakan daerah pantai yang membujur dari Utara ke Selatan dengan panjang pantainya kurang lebih 25 Km. Bagian Selatan berbukit terutama bagian Barat, sedangkan bagian lainnya merupakan dataran rendah yang datar dan bergelombang.

sebelah Barat yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Toraja Utara. Daerah dengan kondisi topografi

2.1.1.4 Geologi

Struktur batuan di Kota Palopo pada umumnya terdiri dari 3 jenis batuan beku. Batuan metamorf dan batuan vulkanik serta endapan alluvial yang hampir mendominasi seluruh wilayah Kota Palopo. Batuan beku yang dijumpai secara umum terdiri dari intrusi batuan beku granit dan gabbro serta beberapa intrusi kecil lainnya. Kemudian dijumpai pula batuan beku yang merupakan jejak aliran lava yang telah membeku yang tersusun dari basalt hingga andesit.

Gambar: 2.3 Peta Geologi



Batuan sedimen yang dijumpai meliputi batu gamping, batu pasir, dan konglomerat, sedangkan batuan metamorf yang dijumpai meliputi batuan meta sedimen. Batuan vulkanik yang dijumpai terdiri dari tufa dan breksi vulkanik. Sedangkan endapan-endapan alluvial terdiri dari material-material bersusunan berangkal, kerakal, kerikil, pasir hingga lempung, kondisi geologi ini akan menunjukkan potensi lahan yang dapat digunakan untuk

mendukung pembangunan dan bangunan Kota Palopo.

Di wilayah Kota Palopo mempunyai struktur batuan yang merupakan bahan galian sebagai bahan induk pembentuk tanah, secara garis besar dapat dikelompokkan sebagai berikut;

- Bahan tanah liat untuk pembentuk batu bata*, banyak diupayakan oleh masyarakat di areal sawah di Kecamatan Wara, dan Wara selatan.
- Batuan endapan sungai berupa sirtu (pasir dan batu)*, banyak terdapat di sungai latuppa didominasi oleh batuan beku yang merupakan batuan sedimen beku, ukurannya bervariasi dari yang sangat besar sampai yang kecil dan merupakan pecahan batu sampai butiran.
- Bahan galian atau butiran emas*, terdapat di sungai Latuppa pada bagian hulu di atas bukit, merupakan daerah bekas penambangan emas di beberapa tempat pada zaman belanda. Dan pada saat ini masih diusahakan oleh masyarakat secara tradisional.
- Batuan sedimen*, menyebar di bagian barat yang berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja
- Batuan terobosan*, yang menyebar di bagian utara yang merupakan daerah pegunungan.

Jenis batuan lainnya yang meruokakan pelapukan bahan pembentuk tanah, yang mempunyai kandungan potensial di Kota Palopo, adalah ;

- Batuan gamping dan marmer (limestone dan marble)*, dimana lokasi penyebarannya di Kecamatan Telluwanua.
- Batuan Granit dan Granodiorit*, untuk bahan bangunan lantai rumah, batu hias dinding dan sebagainya serta untuk pengerasan jalan (aggrogat) dimana lokasi penyebarannya di Kecamatan Wara dan Wara Selatan.
- Batu sabak, filit, kuarsil, batu gamping, dan batu lamau*, terdapat di Kecamatan Wara, Wara Utara dan Bagian Barat Kota Palopo.

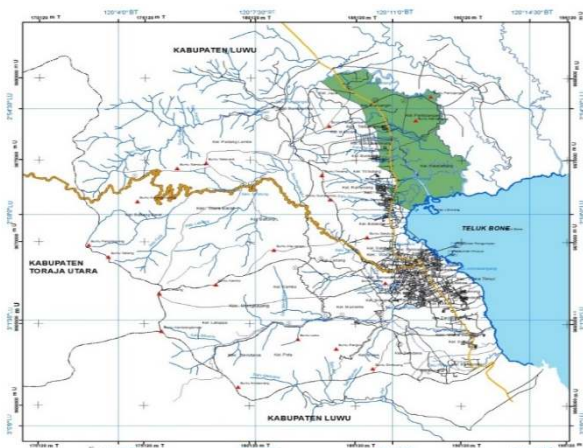
Jenis batuan ini dikelompokkan menurut umur pembentukannya yang diurut dari batuan yang termuda hingga yang tertua, maka batuan-batuan ini tersusun atas 5 (lima) kelompok, yaitu;

- Kelompok endapan alluvial* (termasuk didalamnya endapan Qal atau terumbu lokal) yang termasuk didalamnya endapan alluvial berupa karakal, kerikil, pasir dan batu, serta terumbu koral yang tersebar disepanjang pantai dan alur aliran sungai Latuppa.
- Batuan Tmb*; terdiri dari napal dan sisipan batu gamping setempat-tempat, mengandung batu pasir gamping, konglomerat dan breksi. Selain itu terdapat beberapa kelompok intrusi batuan beku yang terdiri dari batuan beku granit dan gabro. Batuan granit ini dijumpai pada Kecamatan Wara dan Kecamatan Telluwanua.
- Batu Tol*, yaitu kelompok batuan hasil pembukuan aliran larva yang bersusun balastik hingga *andesitic*, kemudian breksi vulkanik, batu pasir dan batu lamau, serta batuan setempat-tempat mengandung fieldsphatoid. Batuan ini tersusun di Bagian Selatan Kota Palopo dan banyak tersebar di daerah Kecamatan Wara Selatan.

- d. *Batuan Tet*, yaitu terdiri dari serpih, batu gamping dan batu pasir dengan sisipan konlomerat. Kelompok batuan ini terdapat di Kecamatan Wara dan Kecamatan Telluwanua.
- e. *Batuan TKI*, yaitu terdiri dari batuan-batuan yang mengalami metamorfisme, antara lain serpihan, filit, rijang, marmer, kuarsit dan beberapa bagian di utara Kota Palopo masuk dalam wilayah Kecamatan Wara dan Kecamatan Wara Selatan.

2.1.1.5 Hidrologi

Gambar 2.4 Peta Hidrolik



Keadaan Hidrologi di Kota Palopo umumnya dipengaruhi oleh sumber air yang berasal dari Sungai Bambalu/Sungai Battang, Sungai Latuppa, Sungai Boting dan anak sungai serta mata air dengan debit yang bervariasi. Disatu sisi keberadaan sungai-sungai tersebut sangat berpotensi dikembangkan bagi kepentingan pariwisata, misalnya wisata permandian alam dan *rafting*. Kondisi hidrologi Kota Palopo secara umum adalah sebagai berikut;

1. Air tanah, air tanah pada umumnya terdapat pada kedalaman 40-100 meter.

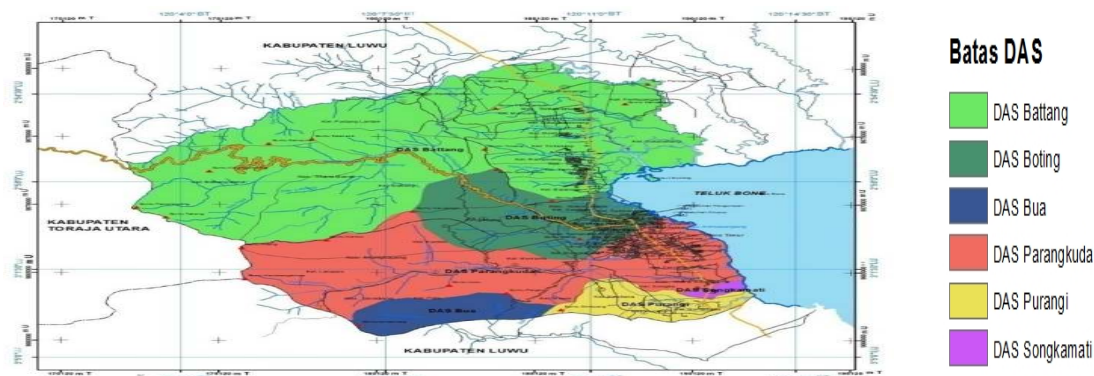
2. Air permukaan, air permukaan pada umumnya berupa sungai dan genangan-genangan.

Dalam hal ini, hidrologi di Kota Palopo untuk berbagai kepentingan harus dilakukan secara bijaksana dengan kelestariannya harus tetap dijaga. Potensi sumberdaya air di Kota Palopo selain dipengaruhi oleh kondisi klimatologi wilayah, juga dipengaruhi oleh beberapa aliran sungai yang melintas pada beberapa kawasan. Potensi sumberdaya air tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan pertanian dan sumber air baku untuk kebutuhan lainnya.

Potensi sumberdaya air di wilayah Kota Palopo yang telah termanfaatkan oleh penduduk dalam kehidupan kesehariannya untuk berbagai keperluan bersumber dari air tanah dangkal (air permukaan dan air tanah dalam air tanah dangkal/permukaan dapat berupa air sungai, sumur, rawa-rawa, bendungan, mata air dan lain sebagainya, sedangkan potensi air tanah dalam dengan pemanfaatan air melalui pengeboran.

Penyediaan air minum merupakan suatu kebutuhan pokok penduduk di suatu daerah, terutama pada daerah-daerah yang potensi air tanahnya terbatas dan kualitasnya kurang memadai jika ditinjau dari aspek kesehatan. Meskipun demikian, pengadaan air minum masih terbatas dan umumnya penduduk menggunakan sumur air tanah dangkal, dalam (*artesis*), air permukaan dan mata air yang bersumber dari pegunungan.

Gambar 2.5 Peta DAS Kota Palopo



Wilayah Kota Palopo terdiri dari beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS) baik yang melintas dalam pusat kota maupun dipinggiran Kota Palopo terdiri dari 6 daerah terdiri dari :

1. DAS Purangi dengan luas cakupan area lebih kurang 1.037 hektar.
2. DAS Bua dengan luas cakupan area lebih kurang 1.168,04 hektar.
3. DAS Songkama'ti dengan luas cakupan area lebih kurang 136,20 hektar.
4. DAS Pacangkuda dengan luas cakupan area lebih kurang 6.412,80 hektar.
5. DAS Boting dengan luas cakupan area lebih kurang 3.087,25 hektar.
6. DAS Salubattang dengan luas cakupan area lebih kurang 13.760,59 hektar.

2.1.1.6 Klimatologi

Curah hujan yang dicatat dari data Badan Metereologi dan Geofisika di pusat pencatatan di wilayah Pelabuhan Tanjung Ringgit Kota Palopo, menunjukkan curah hujan untuk daerah dataran rendah mempunyai variasi antara 500-1000 mm/th, sedangkan untuk daerah hulu (pengunungan) berkisar antara 1000-2000 mm/tahun. Curah hujan dan hari hujan ini akan menentukan pula potensi air permukaan (air sungai) maupun ketersediaan air tanah (*ground water*) seperti dalam peta hidrogeologi Kota Palopo dan wilayah Kabupaten Luwu pada umumnya, yang dapat digunakan sebagai data potensi air tanah dalam jika diperlukan untuk fasilitas pengairan menggunakan sistem pompa air tanah dalam untuk kebutuhan pertanian maupun perkebunan/peternakan.

Kondisi hari hujan harian di Kota Palopo tidak menentu karena udara dan butir air yang diuapkan dari laut berkumpul menjadi awan dan mengenai pengunungan, akhirnya sewaktu-waktu menjadi hujan di Kota Palopo. Dalam hal ini dapat dirasakan, pada waktu musim kemarau masih dapat dirasakan hujan, sebaliknya pada musim hujan masih banyak didapatkan hari tanpa hujan, ini menjadi ciri khusus yang memungkinkan berbagai jenis tanaman buah bergantian berbuah sepanjang tahun. Demikian pula, panjang hari hujan lebih relatif lebih pendek jika dibandingkan dengan wilayah lain di Luwu Raya, sehingga lebih tepat untuk usaha pengeringan, baik untuk hasil laut maupun hasil pertanian.

Suhu udara rata-rata tahunan di dataran rendah Kota Palopo berkisar antara rata-rata 25,5⁰ C – 27,9⁰ C, angka ini berkurang 0,6⁰ C setiap kenaikan 100 Meter, sehingga makin tinggi keadaan permukaan tanah disuatu wilayah udaranya semakin tinggi. Kelembaban udara dipengaruhi oleh keadaan ketinggian permukaan tanah, suhu udara dan kecepatan angin. Kelembaban bervariasi antara 78,8 % sampai 85 % tergantung dari lamanya penyinaran matahari yang bervariasi antara 5,2 sampai 8,5 jam/hari.

Kecepatan angin berkisar antara 41,9-72 km/jam dalam keadaan normal. Angin bertiup dari laut ke daratan pada waktu pagi sampai sore hari dan pada malam hari angin darat mengarah ke laut. Cuaca Kota Palopo cepat berubah dari keadaan panas/kering menjadi mendung dan hujan, hal ini disebabkan uap air laut yang dihembuskan ke arah daratan sampai ke daerah pegunungan di wilayah bagian barat dan sebagian utara Kota Palopo, akan berkumpul menjadi butiran air hujan karena kelembaban udara di kawasan pegunungan, yang terbawa angin ke daerah dataran yang lebih rendah, sehingga terjadi curah hujan yang kebanyakan di wilayah pengunungan dan wilayah daratan sewaktu-waktu. Sehingga Kota Palopo seakan-akan tidak mengenal musim kering yang berkepanjangan karena keadaan sehari-harinya sering terjadi hujan kiriman dan mendung secara mendadak dan hilang dengan cepat pula.

2.1.1.7 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kota Palopo cukup bervariasi sesuai dengan karakteristik wilayah yang dimukimi oleh masyarakat. Secara umum, Kota Palopo ini memiliki 3 dimensi wilayah yaitu pegunungan dan dataran tinggi, dataran rendah serta pesisir dan laut. Perbedaan dimensi wilayah ini mempengaruhi aktifitas masing – masing masyarakat yang bermukim ditempat tersebut. Luas dari masing – masing jenis penggunaan lahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Penggunaan Lahan di Kota Palopo 2020

No	Kecamatan	Lahan Pertanian (Ha)		Lahan Non Pertanian (Ha)
		Sawah	Bukan Sawah	
1	Wara Selatan	136	465	465
2	Sendana	263	2426	1020
3	Wara	83	8	1058
4	Wara Timur	-	199	1009
5	Mungkajang	47	1158	4175
6	Wara Utara	5	246	807
7	Bara	-	1481	854
8	Tellu Wanua	860	2074	500
9	Wara Barat	180	1646	3587

Sumber : Palopo Dalam Angka 2021

KAWASAN BUDIDAYA

Kawasan Peruntukan Perikanan Budidaya :

- Perikanan budidaya tambak seluas lebih kurang 550 Ha di Kecamatan Bara, dan Kecamatan Telluwanua;
- Budidaya air tawar seluas 355,8 Ha di Kecamatan Wara Barat, Kecamatan Mungkajang, Kecamatan Sendana dan Kecamatan Telluwanua;
- Kawasan potensil budidaya rumput laut meliputi tambak dan pantai yang berada di Perairan Teluk Bone seluas lebih kurang 150 Ha di wilayah Kecamatan Bara, dan Kecamatan Telluwanua;
- Balai Benih Ikan Salopao dengan luas 1,3 Ha di Kelurahan Mancani Kecamatan Telluwanua.

KAWASAN LINDUNG

- Kawasan Hutan Lindung

Kawasan hutan lindung dengan luas $\pm$ 8.297,58 hektar terletak di Kelurahan Latuppa, dan Kelurahan Kambo Kecamatan Mungkajang, Kelurahan Battang, Kelurahan Battang Barat, dan Kelurahan Padanglambe Kecamatan Wara Barat.

- Kawasan Pelestarian Alam

Kawasan Taman Wisata Alam Nanggala III seluas 891 hektar terletak di Kelurahan Battang Barat Kecamatan Wara Barat.

- Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Kawasan lindung yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya $\pm$ 12 hektar merupakan kawasan resapan air di Kawasan Mangkaluku dan sekitarnya Kelurahan Murante Kecamatan Mungkajang.

WILAYAH RAWAN BENCANA

Berikut adalah analisis kerentanan wilayah rawan bencana di Kota Palopo :

a. Tanah Longsor

Kawasan rawan bencana tanah longsor berada di Berada di kawasan Battang Barat, dan Battang (Kecamatan Wara Barat), kawasan Latuppa, dan kawasan Kambo (Kecamatan Mungkajang), kawasan Peta (Kecamatan Sendana). Intensitas terjadinya bencana gerakan tanah dalam beberapa tahun terakhir di beberapa lokasi di wilayah Kota Palopo cenderung meningkat frekuensinya.

Bencana ini relatif sering terjadi di kawasan bagian barat Kota Palopo, khususnya di wilayah Kelurahan Battang Barat dan Kelurahan Battang.

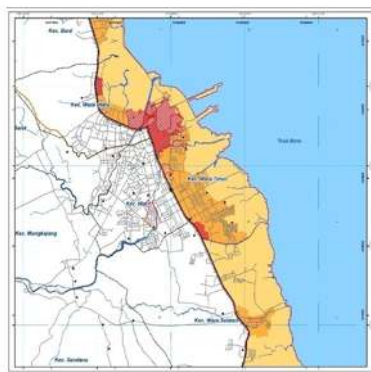
Fenomena ini disebabkan oleh makin meningkatnya pemanfaatan lahan di daerah rentan gerakan tanah. Kondisi ini diperparah saat intensitas hujan yang tinggi terjadi dalam durasi yang panjang. Namun demikian, berdasarkan perhitungan Tim Revisi RTRW Kota Palopo, skor/indeks ancaman bencana tanah longsor di Kota Palopo secara umum masih pada posisi rendah.

b. Banjir

Kawasan rawan banjir berada di Berada di Kelurahan Salubattang, Kelurahan Jaya, Kelurahan Mancani, (Kecamatan Telluwanua), Kelurahan Sabbamparu, Kelurahan Salobulo, Kelurahan Batupasi (Kecamatan Wara Utara), Kelurahan Pontap, Kelurahan Ponjalae, Kelurahan SalotelluE (Kecamatan Wara Timur), Kelurahan Amassangan, Kelurahan Lagaligo, Kelurahan Dangerakko, Kelurahan Tompotikka (Kecamatan Wara), dan Kelurahan Padanglambe (Kecamatan Wara Barat)

c. Kebakaran Gedung dan Permukiman

Peta Rawan Kebakaran



Kawasan rawannya berada di Berada di kawasan permukiman kepadatan tinggi pada wilayah Kelurahan Penggoli, Kelurahan Batupasi, Kelurahan Pontap, Kelurahan Ponjalae, Kelurahan Sabbamparu, Kelurahan Luminda, Kelurahan Pajalesang, Kelurahan Boting, Kelurahan Tompotikka, dan Kelurahan Dangerakko.

Ancaman kebakaran gedung dan permukiman berada pada klasifikasi/kategori *Rendah* yakni pada skor 1,00 atau dalam kelas interval 1,65 – 1,00. Sementara klasifikasi ancaman Sedang dan Tinggi masing-masing berada pada kelas interval 2,32 – 1,66, dan 3,00 – 2,23.

d. Kebakaran Hutan dan Lahan

Kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan berada di Berada di wilayah Kecamatan Wara Barat, Kecamatan Mungkajang, Kecamatan Sendana, dan Kecamatan Telluwanua. Ancaman kebakaran hutan dan lahan berada pada klasifikasi/kategori *Rendah* yakni pada skor 1,00 atau dalam kelas interval 1,65–1,00. Sementara klasifikasi ancaman Sedang dan Tinggi masing-masing berada pada kelas interval 2,32–1,66, dan 3,00–2,23.

e. Gelombang Ekstrim dan Abrasi

Kawasan rawannya berada di Berada di wilayah Kecamatan Wara Selatan, Kecamatan Wara Timur, Kecamatan Wara Utara, dan Kecamatan Bara. Ancaman gelombang ekstrim dan abrasi Kota Palopo berada pada klasifikasi/kategori *Rendah* yakni pada skor 1,50 atau masih dalam kelas interval 1,65–1,00. Sementara klasifikasi ancaman Sedang dan Tinggi masing-masing berada pada kelas interval 2,32–1,66, dan 3,00–2,23. Indikator yang digunakan untuk bahaya gelombang ekstrim dan abrasi adalah tinggi gelombang, arus wilayah perairan (*current*) tutupan vegetasi di wilayah pesisir, bentuk garis pantai dan tipologi pantai.

2.1.1.8 Potensi Pembangunan Wilayah

Pengembangan wilayah Kota Palopo diarahkan dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang baik Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRW) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sulawesi Selatan. Posisi Kota Palopo untuk mendukung pengembangan Sulawesi Selatan sebagai simpul transportasi, industri, perdagangan, pariwisata, dan pertanian yang seiring dengan peningkatan kualitas lingkungan.

KAWASAN STRATEGIS PROVINSI (KSP) Di Wilayah Kota Palopo

1. KSP dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, merupakan kawasan pengembangan budidaya rumput laut ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Wara Utara, Kecamatan Wara Timur, Kecamatan Wara Selatan, Kecamatan Bara, dan sebagian wilayah Kecamatan Telluwanua.
2. KSP dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi merupakan kawasan penambangan minyak dan gas bumi Blok Bone Utara.
3. KSP dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup terdiri atas:
 - a. Kawasan hutan lindung ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Mungkajang, dan sebagian wilayah Kecamatan Wara Barat;
 - b. Kawasan Taman Hutan Raya Nanggala ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Wara Barat.

KAWASAN STRATEGIS KOTA (KSK)

KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi terdiri atas :

1. Kawasan Reklamasi Salemo seluas $\pm$ 700 Ha di wilayah Kecamatan Wara Selatan, Kecamatan Wara, Kecamatan Wara Timur, Kecamatan Wara Utara, dan Kecamatan Bara;
2. Kawasan Satelit Pembibitan Ayam seluas 1,9 Ha wilayah Kelurahan Mancani;
3. Kawasan Perumahan Terpadu seluas $\pm$ 100,0 Ha di wilayah Kelurahan Purangi;
4. Kawasan Pusat Kota Palopo meliputi Kelurahan Tompotikka dan Kelurahan Salekoe;
5. Kawasan Pusat Niaga Palopo di wilayah Kelurahan Dangerakko;
6. Kawasan Pusat Perbelanjaan di wilayah Kelurahan Salobulo;
7. Kawasan Peruntukan Industri seluas $\pm$ 360 Ha di wilayah Kelurahan Maroangin;
8. Kawasan Terminal tipe A seluas $\pm$ 5,0 Ha di wilayah Kelurahan Songka;
9. Kawasan Koridor Jalan Andi Djemma;
10. Kawasan Koridor Jalan Andi Kambo;
11. Kawasan Koridor Jalan DR. Sam Ratulangi;
12. Kawasan Pelabuhan Tanjung Ringgit di wilayah Kelurahan Pontap;
13. Kawasan Hiburan Labombo di wilayah Kelurahan Salekoe;
14. Kawasan Transmigrasi seluas $\pm$ 976,73 Ha di wilayah Kelurahan Peta;
15. Kawasan Resor Kambo seluas 5,0 Ha di wilayah Kelurahan Kambo.

KSK dari sudut kepentingan Sosial Budaya terdiri atas :

1. Kawasan Bersejarah Istana Datu Luwu dan Masjid Djami Tua seluas 2,0 Ha di wilayah Kelurahan Ammassangan;
2. Kawasan Mesjid Agung Luwu Palopo seluas 2,0 Ha di wilayah Kelurahan Boting;
3. Kawasan Menara Payung Luwu terintegrasi dengan Pusat Kuliner Tradisional seluas 1,0 Ha di wilayah Kelurahan Batupasi;
4. Kawasan Islamic Centre Palopo seluas $\pm$ 2,0 Ha di wilayah Kelurahan Takkalala;
5. Kawasan Komunitas Adat Peta, Latuppa, Mungkajang dan Battang;
6. Kawasan Desa Wisata Peta, Murante, dan Latuppa Kecamatan Mungkajang;
7. Kawasan Olah Raga Terpadu (kawasan stadion olahraga Lagaligo) seluas $\pm$ 2,0 Ha di wilayah Kelurahan Lagaligo;
8. Kawasan Sirkuit Road Race seluas $\pm$ 8,0 Ha di wilayah Kelurahan Songka.

KSK dari sudut kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup terdiri atas:

1. Kawasan Hutan Lindung yang berada di wilayah Kecamatan Mungkajang, dan di wilayah Kecamatan Wara Barat dengan luas keseluruhan 8.666 Ha;
2. Kawasan DAS Pacangkuda (sumber utama air baku air minum kota) seluas $\pm$ 6.646,66 di wilayah Kelurahan Latuppa dan Kelurahan Murante;
3. Kawasan Taman Keanekaragaman Hayati (Kehati) seluas 5,0 Ha di wilayah Kelurahan Padang Lambe.

KSK dari sudut Kepentingan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi

- Kawasan Sagu *Teknopark* Palopo seluas 10,0 Ha di wilayah Kelurahan Salubattang.

KAWASAN PERUNTUKAN PERKANTORAN

❖ Kawasan Perkantoran Pemerintah Skala Kota :

Tersebar di beberapa sub wilayah sesuai dengan kondisi eksisting, yakni : Kelurahan Tompotikka, Kelurahan Ammassangan, Kelurahan Lagaligo, dan Kelurahan Boting (Kecamatan Wara), Kelurahan Salekoe, dan Kelurahan Pontap (Kecamatan Wara Timur), Kelurahan To'bulung (Kecamatan Bara), Kelurahan Tomarunding (Kecamatan Wara Barat), Kelurahan Batupasi (Kecamatan Wara Utara), dan Kelurahan Mungkajang (Kecamatan Mungkajang).

❖ Kawasan Perkantoran Pemerintah skala kecamatan dan kelurahan (skala lokal)

Tersebar di masing sub-sub wilayah kota di masing-masing wilayah kecamatan dan kelurahan, yang akan lebih mengefisienkan pelayanan kepada masyarakat setempat.

- ❖ **Kawasan peruntukan perkantoran swasta, direncanakan pada :**
 - a. Kawasan pusat kota;
 - b. Koridor jalan-jalan utama kota, yakni koridor jalan arteri primer, jalan kolektor primer, serta jalan lokal primer yang memiliki akses yang tinggi dengan kawasan lainnya;
 - c. Kawasan reklamasi Salemo.

KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI DAN PERGUDANGAN

- ❖ **Kawasan Peruntukan Industri:**
Di wilayah Kelurahan Maroangin Kecamatan Telluwanua direncanakan seluas 360Ha.
- ❖ **Kawasan industri kecil dan usaha mikro**
Tidak menimbulkan limbah berbahaya, peruntukannya tersebar di sub-sub wilayah KotaPalopo.
- ❖ **Kawasan peruntukan pergudangan**
 - a. Lokasinya berdekatan atau teraglomerasi dengan kawasan peruntukan Industri Kelurahan Maroangin Kecamatan Telluwanua seluas 25,0 Ha.
 - b. Kawasan Pergudangan lainnya (eksisting) berada di Kelurahan Batu Walenrang yang direncanakan seluas 25, 0 Ha.

KAWASAN PERUNTUKAN PARIWISATA

- ❖ **Kawasan pariwisata budaya meliputi:**
 - a. Istana Kedatuan Luwu (Kawasan Lalebata) terletak di Kelurahan Amassangan Kecamatan Wara;
 - b. Rumah adat Peta dan tempat tarian adat di Kelurahan Peta Kecamatan Sendana;
 - c. Rumah adat Mungkajang dan Latuppa dan tempat tarian adat di Kecamatan Mungkajang;
 - d. Maccera Tasi (Pesta Laut) di Kecamatan Wara Timur dan Kecamatan Wara Utara;
 - e. Tempat pendaratan Belanda di Kelurahan Balandai Kecamatan Bara;
 - f. Tempat pementasan kesenian di Kelurahan Temmalebba Kecamatan Bara.
- ❖ **Kawasan pariwisata alam meliputi:**
 - a. Kawasan Agrowisata Latuppa di Kelurahan Latuppa, Kelurahan Murante Kecamatan Mungkajang dan Kelurahan Peta Kecamatan Sendana.
 - b. Kawasan Air Terjun Babak di Kelurahan Latuppa Kecamatan Mungkajang;
 - c. Kawasan Air Terjun Siguntu di Kelurahan Latuppa Kecamatan Mungkajang;
 - d. Kawasan Air Terjun Rantenase di Kelurahan Peta Kecamatan Sendana;
 - e. Kawasan Kali Jodoh di Kelurahan Murante Kecamatan Mungkajang;
 - f. Pemandangan alam Kambo di Kelurahan Kambo Kecamatan Mungkajang;
 - g. Kawasan Air Terjun Mawa di Kelurahan Mawa Kecamatan Sendana;
 - h. Puncak Sampoddo di Kelurahan Sampoddo Kecamatan Wara Selatan;
 - i. Kawasan wisata Pantai Labombo di Kelurahan Salekoe Kecamatan Wara Timur;
 - j. Kawasan wisata Permandian alam Batupapan, Batiok dan Lumarrang (kurungan batu) di Kelurahan Padanglambe Kecamatan Wara Barat;
 - k. Gua Kalo Dewata di Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat;
 - l. Kawasan wisata Pantai Songka di Kelurahan Songka Kecamatan Wara Selatan;
 - m. Kawasan wisata Permandian alam Batutongkon di Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat;
 - n. Kawasan tempat pelelangan ikan (TPI) di Kelurahan Ponjalae Kecamatan Wara Timur;
 - o. Kawasan wisata Pulau Libukang di Kelurahan Balandai Kecamatan Bara;
 - p. Kawasan wisata Lembah Kattun di Kelurahan Battang Barat Kecamatan Wara Barat.

Rencana Pengembangan Kawasan Pariwisata Buatan:

- a. Kawasan wisata seni kreatif di pedestrian jalan Jenderal Ahmad Yani di Kelurahan Amassangan;
- b. Kawasan wisata seni kreatif di koridor lapangan Pancasila Kelurahan Tompotikka;
- c. Rencana pengembangan kawasan Resor Kambo di Kelurahan Kambo;
- d. Rencana pengembangan kawasan wisata kuliner di Kawasan Menara Payung Luwu di Kelurahan Batupasi.

KAWASAN PERUNTUKAN RUANG TERBUKA NON HIJAU (RTNH)

❖ Plaza

Pelataran tempat berkumpulnya massa (*assembly point*) dengan berbagai jenis kegiatan seperti sosialisasi, duduk-duduk, aktivitas massa, dan lain-lain.

- Rencana pengembangannya berada di kawasan Menara Payung (*Landmark* Kota Palopo), serta di kawasan reklamasi Pantai Salemo berada di Kelurahan Sabbamparu (Kecamatan Wara Utara), Kelurahan Ponjale (Kecamatan Wara Timur), dan di Kelurahan Salekoe (Kecamatan Wara), dan Kelurahan Takkalala (Kecamatan Wara Selatan).

❖ Pelataran Parkir

Pelataran parkir merupakan suatu bentuk ruang terbuka non hijau sebagai suatu pelataran dengan fungsi utama meletakkan kendaraan bermotor seperti mobil atau motor; serta kendaraan lainnya seperti sepeda. Lahan parkir dikenal sebagai salah satu bentuk RTNH yang memiliki fungsi ekonomis.

- Rencana pengembangan lahan parkir umum di Kota Palopo direncanakan terintegrasi dengan Plaza, juga pada terminal tipe A Songka dan terminal C Dangerakko, fasilitas *park and ride* stasiun kereta api, serta di masing-masing kawasan pariwisata di beberapa sub wilayah.

❖ Lapangan Olahraga

Lapangan olah raga merupakan suatu bentuk ruang terbuka non hijau sebagai suatu pelataran dengan fungsi utama tempat dilangsungkannya kegiatan olah raga :

- Berupa lapangan olah raga bulutangkis dan basket. Pengembangannya di beberapasub wilayah, termasuk di lahan kawasan reklamasi Salemo nantinya.

❖ Tempat Bermain dan Rekreasi

Tempat bermain dan rekreasi merupakan suatu bentuk ruang terbuka non hijau sebagai suatu pelataran dengan berbagai kelengkapan tertentu untuk mewadahi kegiatan utama bermain atau rekreasi masyarakat.

- Direncanakan berada di kawasan reklamasi Salemo, di Kelurahan Salekoe (Kecamatan Wara), Kelurahan Songka (Kecamatan Wara Timur), dan di wilayah Kelurahan Sampoddo berupa Anjungan Cerdas.

❖ Koridor

Koridor merupakan suatu bentuk ruang terbuka non hijau sebagai jalur dengan fungsi utama sebagai sarana aksesibilitas pejalan kaki yang bukan merupakan trotoar (jalur pejalan kaki yang berada di sisi jalan). Koridor sebagai ruang terbuka non hijau dibentuk diantara dua bangunan atau gedung, dimana dimanfaatkan sebagai ruang sirkulasi atau aktivitas tertentu.

- Rencana pengembangan Koridor berada pada kawasan Reklamasi Salemo.
- Dipriotaskan pada kawasan Perdagangan dan Jasa sebagai pembatas antar blok-blok bangunan sehingga pengunjung lebih leluasa, nyaman, dan aman dalam beraktivitas berkeliling.
- Sementara untuk Koridor di kawasan pariwisata digunakan sebagai lintasan *jogging*, dan kegiatan sejenis lainnya.

❖ Ruang Terbuka Biru (RTB)

RTB tidak hanya sebagai penyimpan air, ruang terbuka biru (seperti kanal, danau, sungai, dll) juga memiliki fungsi sebagai tempat wisata, sarana transportasi air, dan fungsi lainnya.

- Badan air : Sungai Latuppa, Sungai Boting, Sungai Takkalala, Sungai Amassangan, Sungai Pikun, Sungai Salubatang, Sungai Batu, Sungai Songka Mati, Sungai Ponjalae, dan Sungai Andoli.
- Kanal Labombo di Kelurahan Salekoe dan Kanal Takkalala di Kelurahan Takkalala dalam kawasan reklamasi Salemo.

KAWASAN PERUNTUKAN RUANG KEGIATAN SEKTOR INFORMAL

Rencana pengembangan peruntukan ruang kegiatan sektor informal, meliputi :

1. Kawasan pelataran Lagota Pusat Niaga Palopo di Kelurahan Lagaligo;
2. Kawasan sekitar lapangan Kodim Kelurahan Salobulo;
3. Koridor jalan akses Pelabuhan – Lemo-Lemo di Kelurahan Sabbamparu dan Kelurahan Salobulo.
4. Koridor Jalan Guttu Patalo dan Jalan Wecudai sekitar stadion Lagaligo di Kelurahan Lagaligo
5. Kawasan terminal Tipe A Songka di Kelurahan Songka;
6. Kawasan terminal Tipe C Dangerakko di Kelurahan Dangerakko;
7. Kawasan stasiun kereta api di Kelurahan Songka;
8. Kawasan park and ride kereta api di Kelurahan Songka;
9. Kawasan reklamasi Salemo;
10. Kawasan puncak Sampoddo di Kelurahan Sampoddo;
11. Kawasan pelabuhan Tanjung Ringgit di Kelurahan Pontap;
12. Koridor jalan poros Latuppa di Kelurahan Latuppa;
13. Koridor jalan poros terminal tipe A Songka di Kelurahan Songka;
14. Koridor jalan poros Battang di Kelurahan Battang dan Kelurahan Battang Barat.

KAWASAN PERUNTUKAN PELAYANAN PUSAT KESEHATAN

Kawasan peruntukan pelayanan pusat kesehatan:

- a. Rumah Sakit Umum Sawerigading kelas/tipe B dengan cakupan/skala pelayanan regional ditetapkan di Kelurahan To'bulung Kecamatan Bara;
- b. Rumah Sakit Umum At Medika di Kelurahan Tompotikka;
- c. Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Madyang di Kelurahan Salekoe;
- d. Rumah Sakit Tentara di Kelurahan Amassangan;
- e. Rumah Sakit Bintang Laut di Kelurahan Pattene;
- f. Rumah Sakit Mega Buana di Kelurahan Binturu;
- g. Rumah Sakit Mujaisyah di Kelurahan Balandai;
- h. Rencana pengembangan Rumah Sakit Jiwa Kalang-Kalang di Kelurahan To'bulung;
- i. Rencana pengembangan kawasan peruntukan sarana kesehatan skala regional dan skala kota di kawasan Reklamasi Salemo;
- j. Rencana pengembangan kawasan peruntukan sarana kesehatan skala regional dan skala kota di wilayah Kecamatan Wara Selatan, Kecamatan Wara Timur, dan Kecamatan Wara Utara.
- k. Kawasan peruntukan pelayanan pusat kesehatan skala pelayanan lingkungan berupa Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang tersebar merata di setiap wilayah kecamatan, agar lebih mudah diakses oleh warga setempat.

KAWASAN PERUNTUKAN PELAYANAN PERIBADATAN

Kawasan Masjid Agung Luwu Palopo di Kelurahan Batupasi Kecamatan Wara Utara.

- a. Kawasan Islamic Centre di Kelurahan Takkalala Kecamatan Wara Selatan.
- b. Sementara untuk pengembangan kawasan peruntukan peribadatan lainnya yang berskala lingkungan akan disesuaikan dengan kebutuhan umat masing-masing.

KAWASAN PERUNTUKAN PERTEMUAN, PAMERAN DAN SOSIAL BUDAYA

Kawasan peruntukan kegiatan pertemuan, insentif, konferensi, pameran, dan sosial budaya meliputi :

- a. Kompleks Islamic Centre di Kelurahan Takkalala Kecamatan Wara Selatan;
- b. SaodenraE Convention Centre di Kelurahan Batupasi Kecamatan Wara Utara;
- c. Rencana peruntukan perhotelan kelas berbintang di Kecamatan Wara, Kecamatan Wara Selatan, Kecamatan Wara Timur, Kecamatan Wara Utara, dan Kecamatan Mungkajang;
- d. Pengembangan perhotelan kelas berbintang di kawasan reklamasi Salemo;
- e. Pengembangan Plaza Menara Payung (landmark Kota Palopo) di Kelurahan Batupasi;
- f. Gedung Kesenian di Kelurahan Lagaligo Kecamatan Wara;
- g. Gedung Pemuda di Kelurahan Binturu Kecamatan Wara Selatan;
- h. Gedung Merdeka Convention Hall di Kelurahan SalekoE Kecamatan Wara Timur; dan

- i. Gedung Rasdiana Convention Hall di Kelurahan Lagaligo Kecamatan Wara;
- j. Kawasan Perkemahan di Kelurahan Padang Lambe.

KAWASAN PERUNTUKAN OLAHRAGA

Kawasan Peruntukan Olah Raga :

- a. Kawasan olahraga terpadu Lagaligo di Kelurahan Lagaligo Kecamatan Wara;
- b. Kawasan Lapangan Gaspa di Kelurahan Boting Kecamatan Wara;
- c. Rencana pengembangan lapangan sepakbola di setiap wilayah kecamatan;
- d. Rencana pengembangan lapangan bulutangkis dan sepak takraw di setiap wilayah kelurahan;
- e. Rencana pengembangan kawasan sirkuit Road Race seluas 8,0 Ha di Kelurahan Rampoang Kecamatan Wara Selatan;
- f. Rencana pengembangan kawasan lapangan Golf seluas 10,0 Ha di wilayah Kelurahan Purangi Kecamatan Sendana.

KAWASAN PERUNTUKAN TRANSMIGRASI

Rencana pengembangan kawasan peruntukan Transmigrasi di wilayah Kota Palopo seluas 976,73 Ha di wilayah Kelurahan Peta Kecamatan Sendana.

KAWASAN PERUNTUKAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA

Kawasan pertahanan dan keamanan negara meliputi :

- a. Komando Distrik Militer 1403 Sawerigading berada di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kecamatan Wara;
- b. Rumah jabatan Komando Distrik Militer 1403 Sawerigading berada di Jalan Wolter Mongsidi Kecamatan Wara;
- c. Kantor Polisi Militer (PM) di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kecamatan Wara Utara;
- d. Kawasan Lapangan Tembak di Kelurahan Balandai Kecamatan Wara;
- e. Lapangan Kodim di Jalan Dr. Samratulangi Kecamatan Wara Utara;
- f. Lapangan Asrama TNI AD 721 Makassar di Jalan Opu Tosappaile Kelurahan Boting Kecamatan Wara;
- g. Kantor Polisi Resort Palopo di Jalan Opu Tosappaile Kelurahan Boting Kecamatan Wara;
- h. Zibang Palopo di Jalan Opu Tosappaile Kelurahan Boting Kecamatan Wara;
- i. Tepbek Palopo di Jalan Opu Tosappaile Kelurahan Boting Kecamatan Wara;
- j. Koramil di Jalan Opu Tosappaile Kelurahan Boting Kecamatan Wara dan Polsektersebar di masing-masing wilayah kecamatan.

KAWASAN HUTAN PRODUKSI

Kawasan Hutan Produksi terletak di Kelurahan alubattang Kecamatan Telluwanua dengan luas 608 hektar (*Sumber : BPKH Wilayah VII Makassar*)

KAWASAN PERUNTUKAN PERTANIAN

➤ Kawasan Peruntukan Pertanian Tanaman Pangan

Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan yang direncanakan sebagai kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) di wilayah Kota Palopo seluas 1.100 Ha, yang tersebar di beberapa sub wilayah, meliputi :

- 1. Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan:
 - a. Wilayah Kecamatan Telluwanua :
 - 1) Di wilayah Kelurahan Jaya seluas 400 Ha;
 - 2) Di wilayah Kelurahan Salubattang seluas 180 Ha;
 - 3) Di wilayah Kelurahan Pentojangan seluas 150 Ha;
 - 4) Di wilayah Kelurahan Sumarambu seluas 130 Ha;
 - 5) Di wilayah Kelurahan Maroangin seluas 80 Ha.
 - b. Wilayah Kecamatan Sendana :
 - Di wilayah Kelurahan Sendana seluas 80 Ha.
 - c. Wilayah Kecamatan Wara Barat
 - Di wilayah Kelurahan Padang Lambe seluas 80 Ha.

2. Kawasan Sentra Pengolahan Hasil Pertanian masing-masing seluas 1,0 Ha di Kelurahan Songka dan Kelurahan Battang Barat.
 - **Kawasan Peruntukan Perkebunan**
Kawasan peruntukan perkebunan berupa kawasan perkebunan rakyat seluas 2.724 Ha yang tersebar di wilayah Kecamatan Sendana, Kecamatan Mungkajang, Kecamatan Wara Barat, dan Kecamatan Telluwanua.
 - **Kawasan peruntukan pertanian Holtikultura**
Kawasan peruntukan pertanian holtikultura seluas 2.083 Ha tersebar di wilayah Kecamatan Sendana, Kecamatan Mungkajang, Kecamatan Wara Barat dan Kecamatan Telluwanua.

KAWASAN PERUNTUKAN PETERNAKAN

Kawasan peruntukan Peternakan di wilayah Kota Palopo meliputi :

- a. Kawasan Satelit Pembibitan Ayam seluas 1,9 Ha di Kelurahan Mancani, dan seluas 1,0 Ha di Kelurahan Maroangin;
- b. Kawasan Rumah Tahanan Hewan seluas 2,0 Ha di Kelurahan Padang Lambe;
- c. Kawasan lahan Hijauan Makanan Ternak (HMT) dan ladang pembesaran kandang seluas 10,0 Ha di wilayah Kelurahan Padang Lambe.
- d. Kawasan pakan ternak seluas 1,0 Ha termasuk didalamnya gudang dan tempat mesin pakan di wilayah Kelurahan Padang Lambe;
- e. Rumah Potong Hewan (RPH) dan Rumah Potong Unggas (RPU) seluas 1,5 hektar yang berlokasi di Kelurahan Purangi Kecamatan Sendana;
- f. Ternak unggas di dikembangkan di daerah pinggiran kota di wilayah Kecamatan Telluwanua, Kecamatan Wara Barat, Kecamatan Bara, dan Kecamatan Sendana;
- g. Kawasan penggembalaan ternak sapi seluas 100 Ha di wilayah Kelurahan Peta;
- h. Kawasan Pusat Kesehatan Hewan seluas 1,0 Ha di wilayah Kelurahan Mancani.
- i. Kawasan Penampungan Ternak seluas 4 Ha Lewadang Kelurahan Purangi Kecamatan Sendana;

KAWASAN PERUNTUKAN PERIKANAN

Kawasan Peruntukan Perikanan tangkap, meliputi :

Perikanan tangkap berada di Perairan Teluk Bone dan didukung oleh ketersediaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) PonjalaE/ Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).

KAWASAN PERUNTUKAN PERTAMBANGAN

1. Pengembangan kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas terletak di Blok Bone Utara.
2. Pengembangan kawasan peruntukan pertambangan mineral terdiri atas :
 - a. Penambangan emas terletak di Kelurahan Latuppa Kecamatan Mungkajang;
 - b. Penambangan galena terletak di Kelurahan Latuppa Kecamatan Mungkajang, Kelurahan Battang, Kelurahan Battang Barat Kecamatan Wara Barat;
 - c. Penambangan marmer terletak di Kelurahan Battang, Kelurahan Padanglambe Kecamatan Wara Barat;
 - d. Penambangan granit terletak di Kelurahan Latuppa Kecamatan Mungkajang, Kelurahan Battang Barat Kecamatan Wara Barat, Kelurahan Sumarambu Kecamatan Telluwanua.
3. Potensi pengembangan kawasan peruntukan pertambangan rakyat berupa pertambangan **Golongan Batuan** yang terdapat di wilayah :
 - a. Kecamatan Mungkajang;
 - b. Kecamatan Wara Selatan;
 - c. Kecamatan Wara Barat;
 - d. Kecamatan Sendana;
 - e. Kecamatan Telluwanua;
 - f. Kecamatan Bara;
 - g. Kecamatan Wara Utara;
 - h. Kecamatan Wara.

Golongan Batuan ada 47 jenis, salah satunya adalah kerikil berpasir alami (Sirtu)

2.1.1.9. Demografi

Hasil Sensus Penduduk 2020 (SP 2020) menunjukkan bahwa penduduk Kota Palopo pada akhir 2020 tercatat sebanyak 184.681 jiwa, secara terinci menurut jenis kelamin masing-masing 92.444 jiwa laki-laki dan 92.237 jiwa perempuan, dengan demikian maka Rasio Jenis Kelamin sebesar 100,22, angka ini menunjukkan bahwa bahwa pada 100 penduduk perempuan ada 100-101 penduduk laki-laki. Pertumbuhan penduduk dari tahun 2019 ke 2020 sebesar 0,04 persen. Dengan demikian bila dibandingkan dengan luas wilayah 247,52 Km maka kepadatan penduduk di Kota Palopo yaitu 746 jiwa per kilometer persegi.

Tabel 2.3

Gambaran Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kepadatan Wilayah Kota Palopo Tahun 2016-2020

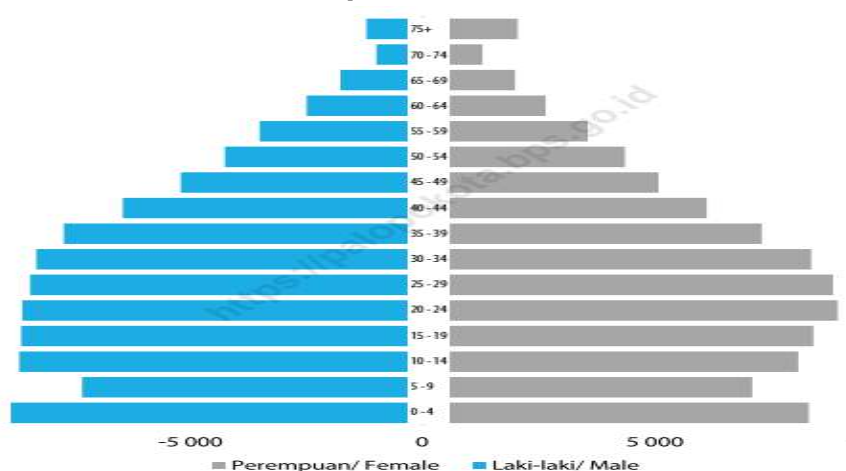
No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah	Jiwa	172.916	176.907	180.678	184.614	184.681
2	Laki-Laki	Jiwa	84.192	85.967	87.812	89.917	92.444
3	Perempuan	Jiwa	88.724	90.940	92.866	94.697	92.237
4	Pertumbuhan	%	2,38	2,97	2,13	2,18	0,04
5	Densitas	Jiwa/Km ²	698	715	730	746	746,13
6	Sex Ratio	%	94,89	94,53	94,56	94,27	100,22

Sumber Data : Kota Palopo Dalam Angka Tahun 2021

Hasil SP 2020 Kota Palopo menunjukkan jumlah penduduk Kota Palopo sejumlah 184.681 jiwa penduduk, tercatat 5,03 persen penduduk lansia (65 tahun keatas), selebihnya sekitar 68,82 persen yang berada pada kelompok usia produktif (usia 15 – 64 tahun). Rasio ketergantungan pada tahun 2020 sebesar 45,31 artinya bahwa pada Tahun 2020 untuk setiap 100 penduduk usia produktif hanya menanggung 45-46 orang usia non produktif. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Palopo mengalami bonus demografi. Bonus demografi adalah kondisi dimana jumlah penduduk kelompok usia produktif lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah penduduk usia tidak produktif (0-15 tahun, dan diatas 64 tahun).

Grafik 2.2

Piramida Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kota Palopo Tahun 2020



Sumber Data : Kota Palopo Dalam Angka 2021

Dari piramida penduduk di atas dapat terlihat bahwa dari 184.681 jiwa penduduk tercatat sekitar 28,33 persen berada pada usia muda (0-14 tahun) dan 4,19 persen pada kelompok usia tua (65 tahun keatas), selebihnya sekitar 67,48 persen yang berada pada kelompok usia produktif (usia 15 – 64 tahun) atau dengan kata lain beban tanggungan (*Dependency Ratio*) Kota Palopo Tahun 2020 sebesar 48,19 persen, yang berarti dari 100 penduduk usia produktif Kota Palopo akan menanggung secara ekonomi sebesar 48,19 persen penduduk usia tidak produktif.

2.1.1.10. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Dalam konteks ini kondisi eksisting suatu wilayah akan ditunjukkan dengan status kondisi lingkungan baik secara fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan telah terjadi kerusakan atau tidak. Oleh karena itu dibutuhkan baku kerusakan lingkungan hidup untuk menilai status kondisi lingkungan tersebut.

Sedangkan daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Dalam konteks ini daya tampung lingkungan dihubungkan dengan pencemaran lingkungan akibat dari suatu kegiatan, oleh karena itu dibutuhkan baku mutu lingkungan hidup untuk menilai status pencemaran lingkungan tersebut.

Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup harus menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan kebijakan, rencana, dan program pembangunan daerah karena dengan diketahuinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup maka diketahui cadangan sumber daya wilayah serta kemampuan fisik wilayah dalam mendukung kebijakan, rencana, dan program yang akan dilaksanakan di dalamnya. Ketika daya dukung dan daya tampung wilayah sudah terlampaui, maka:

- Kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan
- Segala usaha dan/atau kegiatan yang melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Kemudian indikator daya dukung lahan adalah angka indeks tutupan lahan yang di Kota Palopo angkanya pada tahun 2020 berada pada posisi 19.31, 2019 19.29

Daya Dukung Permukiman

Semakin berkembangnya Kota Palopo menjadi wilayah perkotaan yang memiliki sarana dan fasilitas yang cukup lengkap di bidang pendidikan, kesehatan, dan pasar tenaga kerja menjadikan Kota ini sebagai tujuan daerah sekitarnya untuk bekerja maupun menuntut ilmu. Hal ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan meningkatnya permintaan bangunan tempat tinggal.

Kondisi permukiman di Kota Palopo digolongkan menjadi 3 golongan yaitu :

- Permukiman Kepadatan Tinggi seluas lebih kurang 1.024 hektar berada pada Kecamatan Wara, Kecamatan Wara Utara dan Kecamatan Wara Timur
- Permukiman Kepadatan Sedang seluas lebih kurang 680 hektar berada pada Kecamatan Wara Selatan dan Kecamatan Bara
- Permukiman Kepadatan Rendah seluas lebih kurang 1.794 hektar berada pada Kecamatan Wara Barat, Kecamatan Sendana, Kecamatan Mungkajang dan Kecamatan Telluwanua.

Tabel 2.4
Angka Kekurangan Rumah (Backlog) Kota Palopo 2020

Nomor	Kecamatan	Kekurangan Rumah (backlog)
1	Wara Selatan	205
2	Sendana	537
3	Wara	1.012
4	Wara Timur	889
5	Mungkajang	167
6	Wara Utara	554
7	Bara	961
8	Telluwanua	1.103
9	Wara Barat	205
Total		5.633

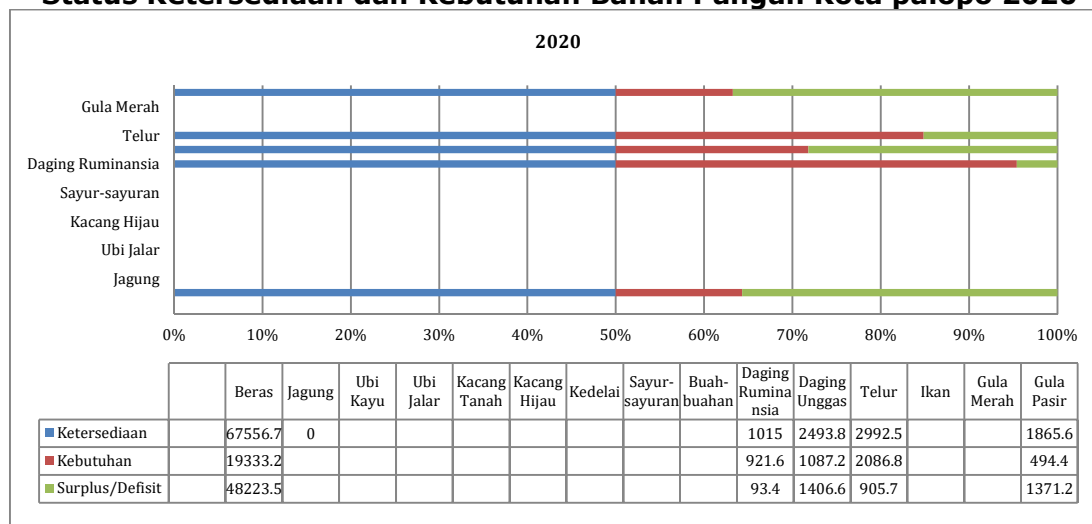
Sumber: Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat kekurangan rumah sebanyak 5.633 unit di Kota Palopo. Kecamatan dengan kebutuhan rumah terbanyak terdapat di Kecamatan Telluwanua (1.103 unit) dan Kecamatan Wara (1.012 unit). Sedangkan kecamatan dengan kebutuhan rumah terendah ada di Wara Barat dan Wara Selatan masing-masing 205 unit. Dilihat dari status kepemilikan bangunan tempat tinggal, yang berstatus milik sendiri persentasenya sebesar 74,02 persen, sedangkan yang berstatus kontrak/sewa dan lainnya sebesar 25,98 persen.

Status Daya Dukung dan Ambang Batas Penyediaan Bahan Pangan

Indikator umum yang digunakan dalam melihat kondisi pangan dalam suatu wilayah biasanya merujuk pada ketentuan FAO yang mensyaratkan ketersediaan energi minimal 2200 kkal/kapita/hari dan protein 54 gram/kapita/hari. Jika merujuk pada standar ini, maka Palopo masih berada di bawah ketentuan FAO dalam hal ketersediaan energi, yakni masih berada pada angka 2.130,1 kkal/kapita/hari. Sedangkan untuk ketersediaan proteinnya, Palopo sudah melampaui karena sudah berada pada posisi 68,9 gram/kapita/hari (2016).

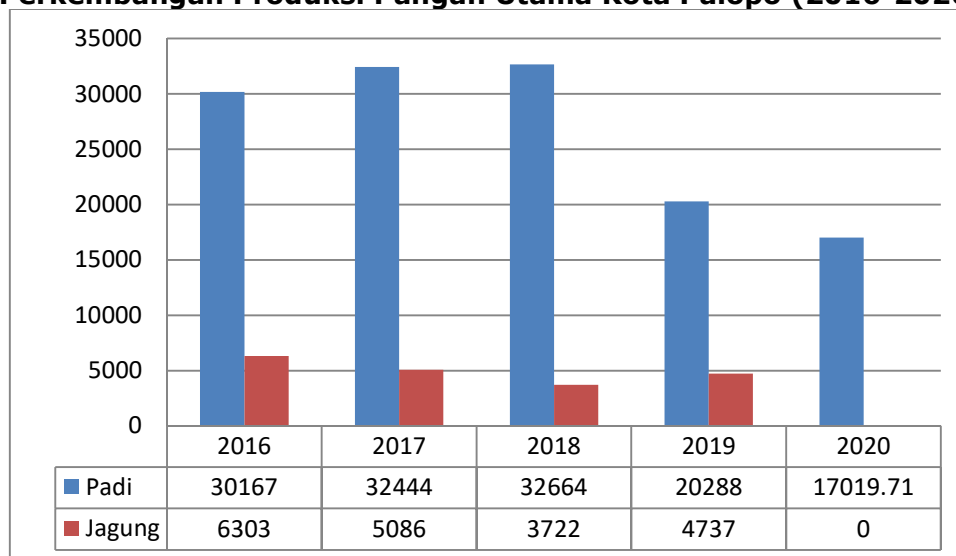
Grafik 2.3
Status Ketersediaan dan Kebutuhan Bahan Pangan Kota palopo 2020



Sumber : Palopo Dalam Angka 2021

Perkembangan produksi pangan nabati dan pangan hewani di Kota Palopo menunjukkan tren yang fluktuatif dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Tahun 2016, produksi padi Kota Palopo pada angka 30.167 Ton, 2017 32.444 ton, tahun 2018 32,664 ton, tahun 2019 20.288 ton dan tahun 2020 berada pada angka 17.019,71 ton.

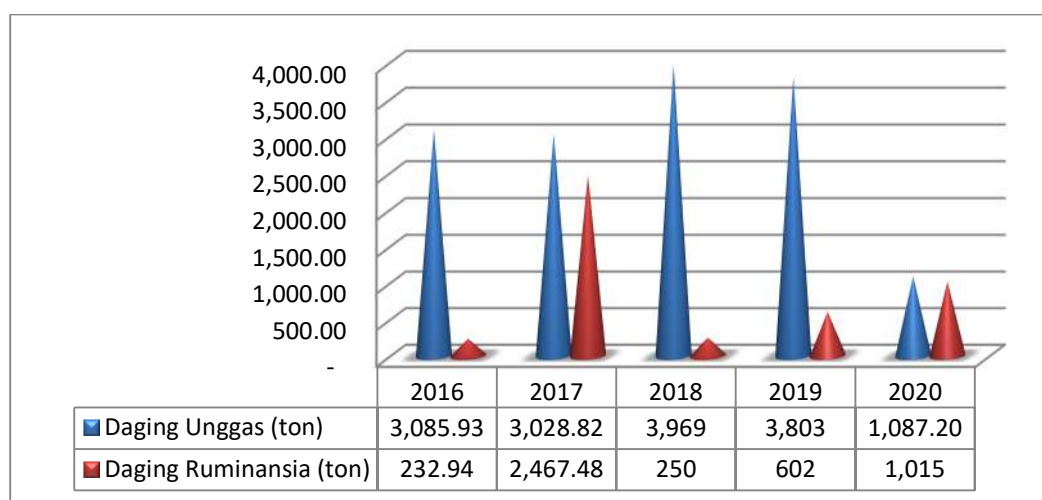
Grafik 2.5
Perkembangan Produksi Pangan Utama Kota Palopo (2016-2020)



Sumber : Palopo Dalam Angka, 2021

Sementara itu, perkembangan produksi pangan hewani (daging) 2016-2020 disajikan dalam gambar berikut :

Grafik 2.5
Perkembangan Produksi Daging Kota Palopo (2016-2020)



Sumber : Palopo Dalam Angka, 2021

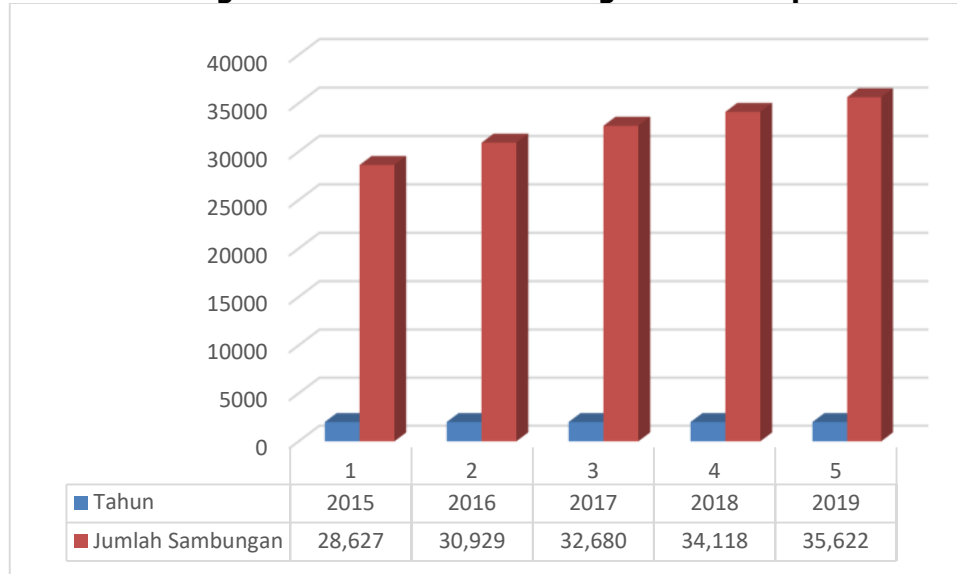
Status Daya Dukung dan Ambang Batas Penyediaan Air Bersih

Sampai tahun 2019, jumlah pelanggan air minum PDAM di Kota Palopo sebanyak 35.622 sambungan, jumlah ini meningkat pesat dibandingkan tahun 2015 yang berada pada angka 28.627 sambungan.

Diprediksi hingga tahun 2032, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk beserta aktifitasnya ($\pm$ 313.766 jiwa), maka akan membutuhkan air minum minimum sebanyak 28.238 m³/hari atau dengan kapasitas produksi sebesar 327 lt/dtk untuk kebutuhan domestik (rumah tangga).

Layanan air minum melalui jaringan perpipaan yang dikelola oleh Perusahaan Air Minum (PAM) Tirta Mangkaluku Kota Palopo relatif semakin baik. PAM Tirta Mangkaluku Kota Palopo (dahulu bernama PDAM Kota Palopo).

Grafik 2.6
Jumlah Sambungan Rumah PAM Tita Mangkaluku Palopo 2015-2019



Sumber : Palopo Dalam Angka 2020

2.1.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Diisi sesuai dengan kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut dijelaskan tentang kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, seni budaya dan olahraga diuraikan sebagai berikut :

2.1.2.1 KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI

2.1.2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu daerah yang timbul akibat berbagai aktifitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi dimiliki oleh residen atau non residen. Sehingga PDRB bisa digunakan sebagai alat untuk melihat kondisi perekonomian suatu wilayah/region. Besar kecilnya nilai PDRB suatu wilayah sangat ditentukan oleh aktivitas perekonomian yang terjadi di wilayah tersebut dalam kurun waktu tertentu. Dengan melakukan perbandingan PDRB antar tahun, dapat dilihat perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Selain itu, PDRB juga dapat digunakan untuk melihat struktur perekonomian serta perubahan harga di tingkat produsen (*inflasi/deflasi*).

Perkembangan perekonomian suatu daerah/wilayah sangat tergantung pada potensi dan sumber daya alam yang dimiliki, serta kemampuan daerah dalam mengelola potensi tersebut. Untuk itu sebagai usaha meningkatkan laju perputaran roda perekonomiannya, pemerintah Kota Palopo terus menerus berusaha mengembangkan segala potensi yang dimilikinya dengan membuat dan menetapkan berbagai kebijakan serta langkah-langkah strategis yang kemudian diaktualisasikan dalam bentuk pembangunan yang selama ini dilaksanakan.

Hingga tahun 2020, perekonomian Kota Palopo menunjukkan perkembangan yang terus membaik. Hal ini terlihat dari nilai PDRB atas dasar harga berlaku yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2020, PDRB Kota Palopo atas dasar harga

berlaku (adhb) sebesar 8,02 triliun rupiah atau naik sebesar 82.8 milyar rupiah dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 2.5
PDRB Kota Palopo Atas Dasar Harga Berlaku
(ADHB) Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) Tahun 2018-2020

No	Bidang /Urusan	Tahun		
		2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.232,24	1.301,47	1.352,04
2	Pertambangan & Penggalian	12,16	12,39	12,55
3	Industri Pengolahan	197,01	216,26	205,18
4	Pengadaan Listrik dan Gas	5,81	6,05	6,18
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	12,50	13,55	13,61
6	Konstruksi	1.194,98	1.330,13	1.325,43
7	Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.723,39	1.938,86	1.963,95
8	Transportasi dan Pergudangan	432,45	475,89	409,35
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	85,98	93,72	87,50
10	Informasi dan Komunikasi	301,91	335,27	374,82
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	566,53	579,66	593,39
12	Real Estat	358,34	384,06	403,01
13	Jasa Perusahaan	6,72	7,52	7,46
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	580,05	616,97	624,20
15	Jasa Pendidikan	309,44	342,26	349,40
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	171,40	184,63	193,41
17	Jasa Lainnya	94,22	103,82	103,81
	PDRB ADHB	7.285,14	7.942,48	8.025,29
	Pertumbuhan PDRB (%)	7.52	6.75	0.45

Sumber Data : BPS Kota Palopo 2021

Sama halnya dengan PDRB atas dasar harga berlaku Kota Palopo, PDRB atas dasar harga konstan tahun 2020 juga mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2020, PDRB Kota Palopo atas dasar harga konstan (adhk) sebesar 5,47 triliun rupiah atau naik sebesar 24,72 milyar rupiah dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 2.6
PDRB Kota Palopo Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) Tahun 2018-2020

No	Bidang /Urusan	Tahun		
		2018	2019	2020
1	Pertanian, kehutanan dan Perikanan	830,61	871,74	884,51
2	Pertambangan & Penggalian	6,71	6,82	6,76
3	Industri Pengolahan	129,18	139,20	130,85

4	Pengadaan Listrik dan Gas	5,67	5,89	6,10
5	Pengadaan air, Pengelolaan sampah, Limbah dan Daur Ulang	14,75	15,42	15,42
6	Konstruksi	734,33	779,14	774,84
7	Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.291,73	1.421,61	1.426,60
8	Transportasi dan Pergudangan	286,15	312,34	268,07
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	59,80	64,55	60,02
10	Informasi dan Komunikasi	303,02	335,22	376,60
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	383,21	382,09	391,48
12	Real Estate	233,02	246,38	285,25
13	Jasa Perusahaan	4,61	5,07	4,97
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	368,09	380,14	377,91
15	Jasa Pendidikan	247,46	262,10	265,76
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	137,06	145,79	150,56
17	Jasa Lainnya	67,61	73,88	73,37
	PDRB ADHK	5.102,99	5.447,36	5472,08

Sumber Data : BPS Kota Palopo 2021

Kontribusi yang diberikan Kota Palopo terhadap pembentukan PDRB Provinsi Sulawesi Selatan masih sangat kecil. Nilai PDRB Kota Palopo di tahun 2020 sebesar 8,02 triliun rupiah hanya memberikan kontribusi sebesar 1,59 persen bagi pembentukan PDRB Provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel 2.7
Kontribusi PDRB Kota Palopo terhadap PDRB Sulawesi Selatan
Atas Dasar Harga Berlaku, Tahun 2018– 2020 (Persen)

Tahun	PDRB Sulawesi Selatan (Miliar Rp)	PDRB Kota Palopo (Miliar Rp)	% Kota Palopo thd Sulawesi Selatan
2018	461.774,74	7.285,14	1,58
2019	504.321,74	7.942,48	1,57
2020	504.478,54	8.025,29	1,59

Sumber Data : BPS Kota Palopo 2021

2.1.2.1.2. Inflasi

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan

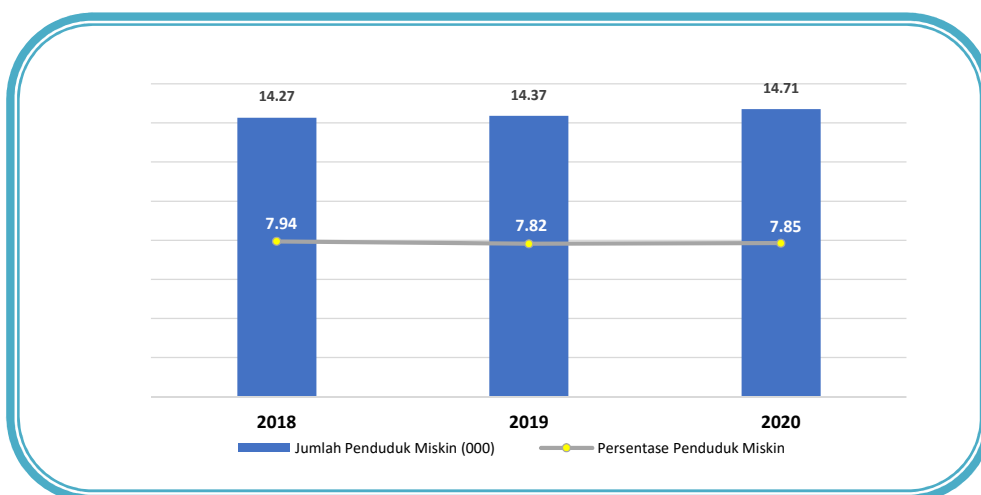
proses menurunnya nilai uang secara kontinu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi rendahnya tingkat harga.

Laju Inflasi di Kota Palopo selama tahun 2020 sebesar 1,21 persen angka ini menunjukkan penurunan indeks sebesar 1,03 persen dibanding inflasi tahun 2019. Pada Tahun 2019, di Kota Palopo tercatat laju inflasi sebesar 2,24 persen (Menggunakan Tahun dasar 2018=0). Pada Tahun 2020, Inflasi tertinggi terjadi pada bulan Mei sebesar 0,49 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 104,18. Inflasi terjadi karena adanya perubahan harga yang ditunjukkan oleh peningkatan nilai indeks enam kelompok pengeluaran yaitu inflasi pada Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau sebesar 1,19 persen, Kelompok Pakaian dan Alas Kaki sebesar 0,25 persen, Kelompok Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 0,28 persen, Kelompok Transportasi sebesar 0,09 persen, kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran 0,28 persen dan Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 0,03 persen.

2.1.2.1.3. Persentase Penduduk Miskin

Kemiskinan selalu dipandang sebagai masalah yang serius di dunia sehingga menjadi urutan pertama dalam Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) sebagai kesepakatan pembangunan global. Tingginya angka kemiskinan menjadi salah satu isu strategis yang menjadi perhatian khusus dan prioritas bagi pemerintah pusat maupun daerah. Berbagai upaya terus dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Palopo untuk menurunkan angka kemiskinan, salah satunya sebagai komitmen mendukung tujuan pertama dalam SDG's (*Sustainable Development Goals*).

Grafik 2.7
Persentase Penduduk Miskin Kota Palopo
Tahun 2018-2020



Sumber : BPS Kota Palopo, 2018-2020

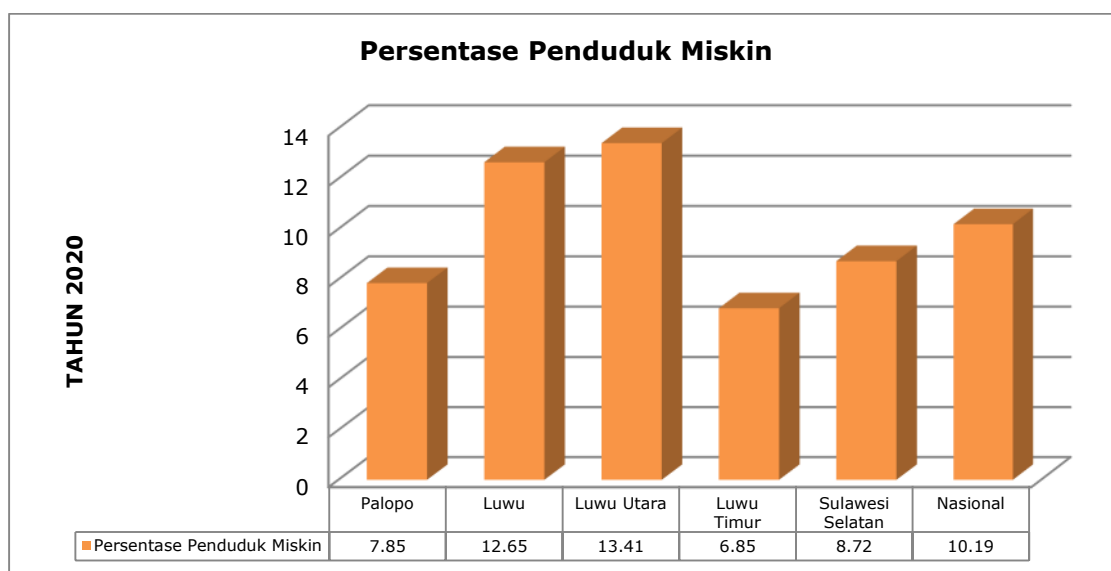
Kondisi kemiskinan selama di Kota Palopo periode 2018-2020 mengalami fluktuasi pada kisaran angka 7 persen lebih. Pada Tahun 2018 persentase penduduk miskin sekitar 7,94 persen. Selanjutnya pada Tahun 2019 menunjukkan penurunan angka sekitar 0,12 persen yaitu dari angka 7,94 persen pada tahun 2018 menjadi 7,82 persen pada Tahun 2019, sebaliknya pada tahun 2020 mengalami peningkatan 0,03 persen yaitu dari 7,82 persen menjadi 7,85 persen. Adanya peningkatan kemiskinan di Tahun 2020 diduga disebabkan karena adanya pengaruh pandemi Covid-19 terhadap pelaku usaha dan pendapatan masyarakat.

Dibandingkan dengan 24 kabupaten/ kota Lain di Sulawesi Selatan, Persentase Penduduk Miskin 2020 Kota Palopo **masih lebih baik** daripada Kabupaten Luwu Utara (13.41%) dan Kabupaten Luwu (12.65%). Bahkan lebih baik dari rata-rata persentase penduduk miskin Sulawesi Selatan 2020 (8.72%) dan nasional (10.19%).

Meski demikian, capaian Pemerintah Kota Palopo ini masih dibawah capaian persentase penduduk miskin Kota Pare-Pare 2020 (5.44%), Kota Makassar (4.54%), bahkan Kabupaten Luwu timur yang 2020 hanya memiliki 6.85% penduduk miskin.

Namun dari sisi **jumlah**, Kota Palopo adalah wilayah di Luwu Raya dengan Jumlah Penduduk Miskin **paling sedikit**. Tahun 2020 Kota Palopo hanya memiliki penduduk miskin sebanyak 14.370 jiwa. Sementara Kabupaten Luwu (46.180 Jiwa), Luwu Utara (42.480 Jiwa), Luwu Timur (20.830 Jiwa). Bahkan dengan Kota Makassar yang memiliki jumlah penduduk miskin jauh diatas Kota Palopo, yakni sebanyak 65.120 Jiwa. Di Sulawesi Selatan, hanya Kota Pare-Pare yang memiliki penduduk miskin paling kecil (7620 Jiwa) disusul Kota Palopo (14.370 Jiwa).

Grafik 2.8
Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kota Palopo 2020 Dibandingkan dengan Daerah Lain di Luwu Raya



Tabel 2.8
Kondisi dan Perbandingan Kemiskinan Kota Palopo 2016-2020

No	Indikator	Capaian Kinerja Kota Palopo					Capaian Kinerja Sulsel					Capaian Kinerja Nasional				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Penduduk Miskin (%)	8.74	8.78	7.94	7.82	7.85	9.24	9.48	8.87	8.69	8.99	10.7	10.12	9.66	9.41	10.19
2	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	15.020	15,440	14,270	14,370	14,710	796,810	825,970	779,640	767,800	776,830	27.76 Juta	27.77 Juta	25.95 Juta	24.79 Juta	27.55 Juta
3	Perkembangan Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	261,056	274,319	292,602	324,233	362,859	277,049	295,306	316,988	341,555	362,031	361,267	385,953	408,962	440,538	458,947
4	Indeks Kedalaman Kemiskinan	1.17	1.75	1.14	1.15	0.95	1.53	1.92	1.68	1.63	1.65	1.74	1.79	1.63	1.5	1,75
5	Indeks Keparahan Kemiskinan	0.28	0.6	0.26	0.29	0.21	0.38	0.5	0.51	0.43	0.46	0.44	0.46	0.41	0.36	0.47

Sumber : Dari berbagai sumber resmi BPS

2.1.2.1.4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang menggambarkan persentase angkatan kerja yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha, atau mereka yang tergolong angkatan kerja namun tidak terserap dalam pasar kerja. Berdasarkan data hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) BPS 2020, TPT Kota Palopo sebesar 10,37 persen, lebih tinggi 0,7 poin dibandingkan TPT Tahun 2019. Pada Tahun 2020, jumlah penduduk angkatan kerja di Kota Palopo mencapai 85.026 orang meningkat sebanyak 609 orang dibandingkan tahun 2020 (84.417 orang). Menurut jenis kelamin Angkatan kerja untuk laki-laki di Kota Palopo Tahun 2020 sebesar 51.266 orang sedangkan angkatan kerja perempuan sebesar 33.760 orang.

Tabel 2.9

Pengangguran Terbuka Kota Palopo Tahun 2018 – 2020

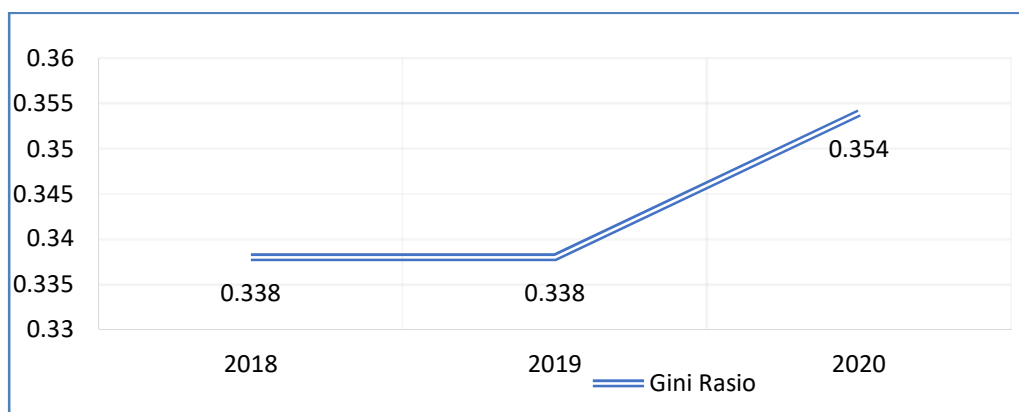
No.	Uraian	Satuan	Tahun		
			2018	2019	2020
1	Jumlah Penduduk angkatan Kerja	Orang	80.040	84.417	85.026
2	Bekerja	Orang	71.427	76.257	76.211
3	Tidak Bekerja	Orang	8.613	8.160	8.815
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	10,76	9,67	10,37

Sumber: BPS Kota Palopo 2021

2.1.2.1.5. Indeks Gini

Permasalahan pembangunan ekonomi yang dihadapi oleh Kota Palopo seperti halnya daerah lain bukan hanya sekedar pencapaian target angka pertumbuhan ekonomi, namun juga terhadap upaya pencapaian prioritas-prioritas pembangunan ekonomi masyarakat secara lebih luas, termasuk pemerataan distribusinya yang ditunjukkan dengan Indeks Gini.

**Grafik 2.9 Indeks Gini Kota Palopo
Tahun 2018-2020**



Sumber: BPS

Kota Palopo, 2018-2020

Nilai Indeks Gini di Kota Palopo menunjukkan tren kenaikan dalam satu tahun terakhir. Pada tahun 2018 Indeks Gini Kota Palopo berada pada nilai 0,338, kemudian di tahun 2020 stagnan pada poin 0,338 dan pada Tahun 2020 Indeks Gini Kota Palopo meningkat menjadi 0,354 poin. Kondisi ini menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan ketimpangan pendapatan masyarakat di Kota Palopo dalam 1 tahun terakhir.

Nilai Indeks Gini di Kota Palopo menunjukkan tren yang relatif menurun dari tahun 2016-2020. Pada tahun 2016 Indeks Gini Kota Palopo berada pada nilai 0,374, kemudian di tahun 2017 turun menjadi 0,341, tahun 2018 menjadi 0.338 tahun 2019

stagnan di angka 0.338 dan di tahun 2020 Indeks Gini Kota Palopo menurun di nilai 0,354. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran di Kota Palopo selama tahun 2016-2020 mengalami tren menurun, yang artinya terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran masyarakat di Kota Palopo.

Tabel 2.10
Perkembangan Gini Rasio Beberapa Wilayah
di Sulsel 2016-2020

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Luwu	0.359	0.395	0.362	0.352	0,352
Tana Toraja	0.314	0.318	0.369	0.362	0,341
Luwu Utara	0.410	0.358	0.361	0.364	0,364
Luwu Timur	0.434	0.411	0.398	0.387	0,373
Toraja Utara	0.374	0.411	0.411	0.384	0,378
Makassar	0.397	0.396	0.383	0.390	0,390
Parepare	0.386	0.384	0.382	0.350	0,349
Palopo	0.374	0.341	0.338	0.338	0.354
Sulawesi Selatan	0.426	0.407	0.397	0.389	0,382
Nasional (Maret)	0.394	0.393	0.389	0.382	0.391

Sumber : Ranhir RKPD Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

2.1.2.1.6. Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut adalah data PAD Kota Palopo :

Tabel 2.11
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Palopo
Tahun Anggaran 2020

URAIAN	JUMLAH (Rp)	
	ANGGARAN	REALISASI
PENDAPATAN	969,562,250,067.00	969,407,489,043.27
PENDAPATAN ASLI DAERAH	173,393,617,952.00	177,203,606,906.65
Pendapatan Pajak Daerah	33,028,000,000.00	34,031,809,461.00
Hasil Retribusi Daerah	8,883,482,000.00	8,880,154,097.48
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6,801,973,147.00	6,801,973,147.00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	124,680,162,805.00	127,489,670,201.17
DANA PERIMBANGAN	669,756,718,109.00	665,583,965,763.00
Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	16,073,016,000.00	18,379,394,493.00
Dana Alokasi Umum	498,865,870,000.00	497,008,966,000.00
Dana Alokasi Khusus	154,817,832,109.00	150,195,605,270.00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	126,411,914,006.00	126,619,916,373.62
Pendapatan Hibah	66,470,610,413.00	65,516,179,506.00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	46,715,623,393.00	46,443,640,112.62
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	6,983,797,000.00	6,983,797,000.00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	6,241,883,200.00	7,664,639,200.00
Pendapatan Lain-lain	-	11,660,555.00

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Palopo Tahun 2020. *Unauditted*.

Pelayanan Publik dan Pengelolaan Keuangan

Predikat Layanan Publik/Tingkat Kepatuhan Layanan Publik

Predikat Layanan Publik Pemerintah Kota Palopo menurut Ombudsman Republik Indonesia, berada pada zona hijau. Ini bermakna bahwa tingkat kepatuhan pemerintah Kota Palopo **kategori tinggi**. Tahun 2022, Pemerintah Kota Palopo akan berupaya memastikan bahwa pencapaian pelayanan publik tetap berada predikat tinggi.

Penetapan APBD

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Palopo selalu ditetapkan sesuai jadwal yang ditentukan atau tepat waktu. Kondisi ini diharapkan terus dipertahankan pada penetapan APBD Tahun 2022.

Perangkat Daerah yang Menggunakan E-Procurement

Dari sebanyak 49 perangkat daerah pada Pemerintah Kota Palopo, seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa semuanya telah dilaksanakan dan menggunakan sistem e procurement. Dimana OPD memanfaatkan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa. Kondisi ini pada tahun 2022 diharapkan mampu dipertahankan bahkan ditingkatkan.

Pemakaian E Budgeting

Penyusunan APBD Kota Palopo juga telah menggunakan sistem e budgeting berbasis SIPD, sehingga proses penyusunan rancangan APBD dimulai dengan berbasis elektronik. Kondisi ini diharapkan terus dipertahankan pada tahun 2022.

Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Kesehatan

Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Kesehatan di Kota Palopo berada pada angka rata-rata 79.80 atau mutu layanan berkategori B (Baik). Indeks Kepuasan ini terutama pada layanan kesehatan di RSUD Sawerigading Rampoang yang berada pada angka indeks 3.11 poin dan Puskesmas Wara yang berada pada angka indeks 3.27 point. Kondisi ini pada tahun 2022, diharapkan terus ditingkatkan.

Peningkatan Investasi Daerah

Kondisi investasi di Kota Palopo digambarkan pada tabel sebagai berikut :

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Capaian Tahun			Target 2022
		2018	2019	2020	
	Penanaman Modal				
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN)	157	78	74	110
2	Jumlah investor berskala nasional (PMA)	0	0	0	0
3	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Juta)	184,830	130,740	109,484	120,706
4	Rasio daya serap tenaga kerja (per 100 Juta Nilai PMDN)	8	8	9	10

Sumber : Dinas PMPTSP Kota Palopo, 2021

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Pemerintah Kota Palopo selama 5 tahun berturut-turut sejak Tahun 2015 hingga 2020 telah mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Palopo telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berlaku.

Pejabat Pengelola Informasi Publik

Salah satu kewajiban badan publik yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 adalah menyediakan Daftar Informasi Publik (DIP). DIP adalah catatan yang berisi keterangan sistematis tentang informasi publik yang berada dibawah penguasaan badan publik. Melalui aplikasi PPID Kemendagri yang digunakan ini, badan publik dapat mempublikasi informasi yang dikuasai yang selanjutnya tersusun sebagai DIP secara otomatis. Pemerintah Kota Palopo juga telah menyediakan layanan ini yang bisa diakses melalui <http://ppid.palopokota.go.id/>. PPID ini ditetapkan dengan Peraturan Walikota Palopo Nomor 45 Tahun 2017.



Tampilan aplikasi PPID Kota Palopo :

Publikasi APBD secara Online

Sebagai bagian dari transparansi, Pemerintah Kota Palopo pun telah mempublikasikan APBD Kota Palopo secara online yang bisa diakses melalui internet pada laman : <https://palopokota.go.id/blog/page/apbd-kota-palopo>. Berikut adalah screen shot publikasi APBD Kota Palopo :



Opini

Laporan Keuangan Pemerintah Kota

Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota yang direlease untuk tahun 2019 adalah Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan di Pemerintah Kota Palopo telah dilakukan sesuai standar akuntansi pengelolaan keuangan pemerintah dengan baik dan benar. Kondisi ditargetkan untuk tetap dipertahankan pada tahun 2022. Sebagai bentuk transparansi pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Palopo menyediakan layanan dalam laman :

<https://palopokota.go.id/page/transparansi-pengelolaan-keuangan-daerah>.



Predikat SAKIP Pemerintah Kota

Predikat kinerja akuntabilitas atau SAKIP Kota Palopo sampai dengan tahun 2020 berada pada posisi 60.03 (B), lebih baik dari kondisi tahun 2019 dengan predikat CC (52.43) dan kondisi 2018 yang berada pada angka 50.02. Capaian 2020 ini belum memenuhi target RKPD 2020 dan belum memenuhi target RPJMD. Pemerintah Kota Palopo tetap berupaya untuk meningkatkan kualitas SAKIP dimana tahun 2022 diharapkan berpredikat BB.

2.1.2.2 KESEJAHTERAAN SOSIAL

2.1.2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Dalam melakukan pengukuran keberhasilan pembangunan suatu negara tidak hanya ditandai oleh tingginya pertumbuhan ekonominya saja, tetapi juga mencakup kualitas manusianya. Oleh karena itu, konsep pengukuran keberhasilan pembangunan harus berorientasi kepada pelakunya (manusia atau masyarakatnya), yaitu bagaimana pertumbuhan ekonomi mampu dirasakan seluruh lapisan masyarakat dan meningkatkan kualitas masyarakat sebagai manusia. Pembangunan manusia yang mencakup tiga dimensi pokok yaitu kesehatan (umur panjang), pendidikan (pengetahuan) dan daya beli (standar kehidupan layak) dapat dilihat dari perkembangan IPM di suatu wilayah.

IPM merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan untuk mengukur empat dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, yaitu Angka Harapan Hidup saat lahir, capaian tingkat pendidikan yang terdiri dari Angka Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah dan pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan guna mengukur akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup yang layak.

Tabel 2.12
Indikator Penyusun IPM Kota Palopo Tahun 2016-2020

No.	Indikator Penyusun IPM	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Umur Harapan Hidup (Tahun)	70,25	70,30	70,49	70,79	70,88
2	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	15,03	15,05	15,06	15,07	15,08
3	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	10,26	10,33	10,51	10,75	10,76
4	Paritas Daya Beli (Ribu Rupiah)	12.516	12.319	12.662	12.986	12.995
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		76,45	76,71	77,30	77,98	78,06

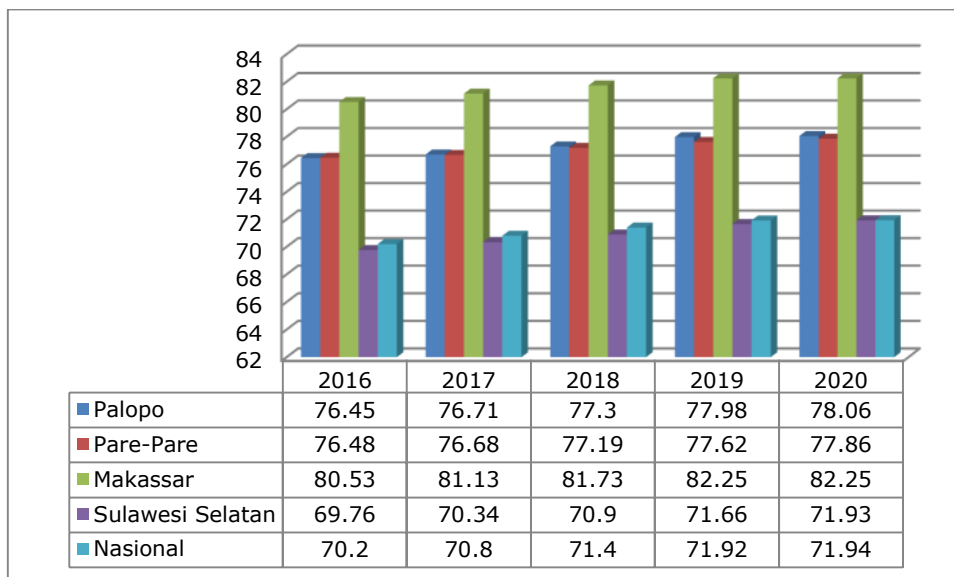
Sumber : BPS Kota Palopo 2021

IPM Kota Palopo terus mengalami kenaikan meskipun tidak terlalu signifikan. Hal ini disebabkan karena investasi di bidang kesehatan dan pendidikan khususnya terhadap peningkatan indikator penyusun IPM tidak serta merta membuahkan hasil dalam jangka pendek, tetapi terlihat secara nyata dalam jangka panjang.

IPM Kota Palopo terus mengalami peningkatan pada periode 2016-2020, dimana di tahun 2016 berada pada nilai 76,45 kemudian naik menjadi 77,98 di tahun 2019. Pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi sebesar 78,06. Tahun 2020 IPM tumbuh sebesar 0,88 persen dibandingkan dengan 2018, namun pada tahun 2020 IPM tumbuh melambat sebesar 0,10 persen.

IPM 2020 dengan nilai 78.06 capaiannya lebih baik dari tahun 2019 dengan nilai 77.98. Dari 23 Kabupaten Kota di Sulsel, IPM Kota Palopo menempati peringkat kedua di Sulawesi Selatan setelah Kota Makassar (82.25). Pertumbuhan IPM 2020 Kota Palopo (0.88), juga lebih baik dari tahun 2018 (0.77).

Grafik 2.10
Perbandingan IPM Kota Palopo dengan Wilayah Lain
Tahun 2016-2020



Sumber : BPS, Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Angka, 2021

Indeks Pembangunan Manusia Kota Palopo tahun 2020 berada pada angka 78.06 point, atau mencapai target daerah **Tahun 2020** yang berada pada angka 77.06 point. Jika dibandingkan dengan tingkat sulsel dan nasional, IPM Kota Palopo **lebih baik dan berada diatas** IPM Provinsi yang berada pada angka 71.93 dan Nasional yang berada pada angka 71.94.

Meski demikian dari aspek persentase tingkat pertumbuhan, IPM Kota Palopo yang tumbuh sebesar 0.08%, ini **berada di atas** angka persentase pertumbuhan IPM secara nasional pada tahun 2020 yang menyentuh angka 0.02%. Akan tetapi berada dibawah angka persentase pertumbuhan IPM Sulsel 2020 yang berada pada angka 0.27%.

Nilai IPM Kota Palopo sejak pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 berhasil menggeser Kota Pare-Pare sebagai daerah ber IPM tertinggi kedua di Provinsi Sulawesi Selatan dan menempatkan Kota Palopo sebagai kota dengan IPM tertinggi setelah Kota Makassar. Pada tahun sebelumnya Palopo selalu berada di bawah nilai capaian IPM Kota Pare-Pare, dimana IPM pada Tahun 2016 sebesar 76.45.

2.1.2.2.2. Angka Melek Huruf (AMH)

Kemampuan penduduk dalam membaca dan menulis dapat dilihat berdasarkan indikator Angka Melek Huruf (AMH). AMH juga merupakan salah satu indikator pencapaian SDGs, yang

akan menjamin bahwa pada tahun 2030 semua remaja dan proporsi kelompok penduduk dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.

Usaha-usaha yang telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis penduduk, antara lain melalui program kejar paket A, paket B, dan program keaksaraan fungsional. Melalui program ini diharapkan penduduk yang tidak pernah sekolah mampu membaca dan menulis huruf latin, termasuk juga mampu berbahasa Indonesia.

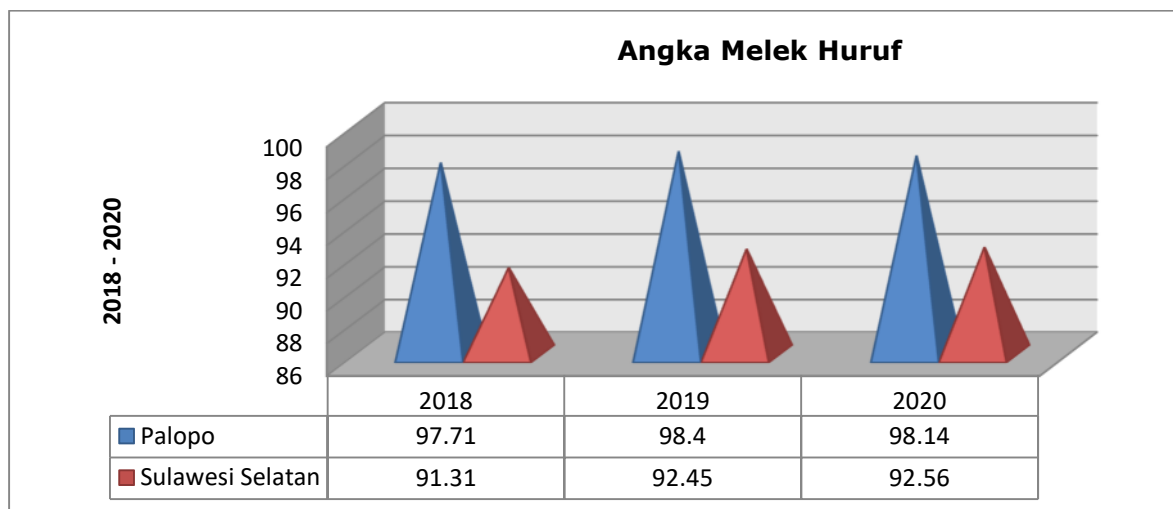
Tabel 2.13
Perkembangan Angka Melek Huruf Kota Palopo
2016-2020

Indikator	Capaian Tahun			
	Satuan	2018	2019	2020
Penduduk yang Berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)	%	97,71	98,40	98,14

Sumber : Palopo Dalam Angka, 2021.

AMH Kota Palopo pada tahun 2020 di Kota Palopo berada pada angka 98.14 % yang menunjukkan bahwa dari 100 orang penduduk Kota Palopo yang berumur 15 tahun keatas, terdapat 98 orang yang sudah mampu membaca dan menulis. Capaian ini menurun dari tahun 2019 yang berada pada angka 98.40 %

Grafik 2.11
Perbandingan Capaian AMH Kota Palopo dengan Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2018 - 2020



Sumber : BPS

Angka melek huruf Kota Palopo sejak Tahun 2018 lebih baik dari rata-rata angka melek huruf Provinsi Sulawesi Selatan. Tahun 2020 angka melek huruf Kota Palopo 2017 juga **lebih baik** dari rata-rata angka melek huruf Sulsel.

2.1.2.2.3 Angka Rata – Rata Lama Sekolah

Angka Rata-rata lama sekolah (RLS) 2020 Kota Palopo pada posisi 10.76 Tahun, berada di atas atau melebihi target 2020 Kota Palopo (10.39 tahun). Capaian ini juga lebih baik dibandingkan tahun 2019 (10.75 tahun).

Tabel 2.14
Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah 2016-2020

Indikator Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	Capaian Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Palopo	10.26	10.33	10.51	10.75	10.76
Pare-Pare	10.02	10.09	10.29	10.30	10.45
Makassar	11.07	11.08	11.09	11.20	11.21
Sulawesi Selatan	7.75	7.95	8.02	8.26	8.38
Nasional	7,95	8,10	8.17	8.34	8.48

Sumber : BPS, Sulawesi Selatan Dalam Angka 2021

Angka rata-rata lama sekolah di Kota Palopo tahun 2020 berada pada posisi 10.76 Tahun, lebih baik daripada angka tahun 2019 yang berada pada angka 10.75 Tahun. Meski demikian, capaian angka rata –rata lama sekolah Kota Palopo ini jauh diatas angka RLS Nasional pada tahun 2020 yang berada pada angka 8.48 Tahun dan RLS Sulawesi Selatan 2020 yang berada pada angka 8.38 Tahun.

Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) Angka **Harapan Lama Sekolah (HLS)** didefinisikan sebagai lamanya **sekolah** (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Berikut adalah Harapan Lama sekolah Kota Palopo Tahun 2015-2020 :

Tabel 2.15
Perbandingan Harapan Lama Sekolah 2016-2020

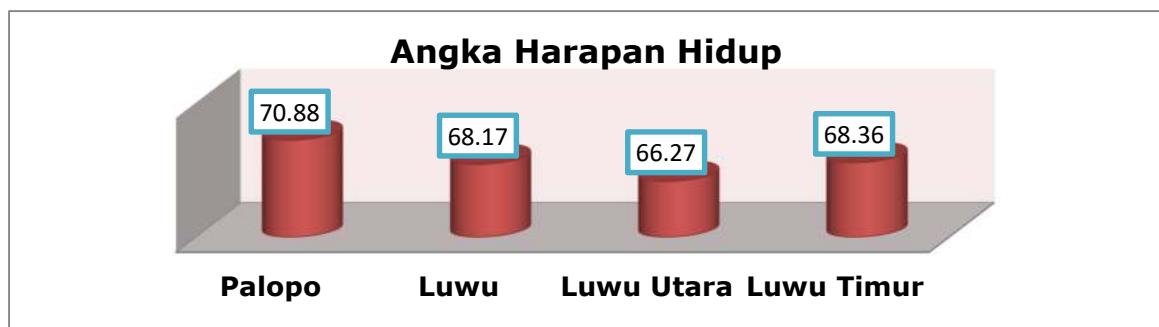
Indikator Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Capaian Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Palopo	15.03	15.05	15.06	15.07	15.08
Pare-Pare	14.45	14.46	14.47	14.49	14.50
Makassar	14.80	15.18	15.55	15.56	15.57
Sulawesi Selatan	13.16	13.28	13.34	13.36	13.45
Nasional	12.72	12.85	12.91	12.95	12,98

Sumber : BPS, Sulawesi Selatan Dalam Angka 2021

Capaian Harapan Lama Sekolah Kota Palopo Tahun 2020 masih berada dibawah target HLS Kota Palopo yang berada pada angka 15.15 Tahun. Capaian HLS Tahun 2020 Kota Palopo masih berada dibawah HLS Kota Makassar (15.57 Tahun), tapi lebih baik dari HLS Sulsel (13.45 Tahun) dan Nasional (12.98 Tahun).

2.1.2.2.4. Angka Harapan Hidup

Grafik 2.10
Perbandingan Angka Harapan Hidup Kota Palopo dengan Wilayah Lain Tahun 2020



Angka atau umur harapan hidup (AHH) di Kota Palopo tahun 2020 sebesar 70.88 Tahun. Ini lebih baik dari angka harapan hidup tahun 2018 yang berada pada angka 70.32 Tahun atau menguat 0.30 Point. Capaian ini juga **melebihi target 2020** Kota Palopo yang berada pada angka 70.32 Tahun. Bahkan telah melampaui target akhir AHH di RPJMD Kota Palopo pada tahun 2023.

AHH Kota Palopo Tahun 2013 hanya berada pada angka 70.10, kemudian naik menjadi 70.12 (2014), 70.20 di 2015, setahun kemudian menjadi 70.25 (2016), 70.30 pada tahun (2017). Akselerasi atau lompatan tertinggi AHH Kota Palopo terjadi pada tahun 2018 dimana mampu mencapai 70.49 atau meningkat 0.19 point dibandingkan tahun sebelumnya. Padahal di tahun-tahun sebelumnya, trend peningkatan AHH Kota Palopo hanya meningkat antara 0.02 - 0.08 point.

Jika dibandingkan dengan 24 kabupaten/ kota Lain di Sulawesi Selatan, AHH 2020 Kota Palopo menempati posisi ke enam, dibawah Kabupaten Toraja Utara (73.35), Tana Toraja (73.15), Kota Makassar (72), Kota Pare-Pare (71.18), Kabupaten Enrekang (70.83). AHH Kota Palopo 2019, juga masih berada diatas rata-rata AHH Sulsel 2020 (70.43 Tahun), dan rata-rata AHH nasional 2020 (71.34 Tahun).

Angka Harapan Hidup Kota Palopo 2019, masih menjadi yang paling tinggi di luwu raya, dimana Angka Harapan Hidup beberapa kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kota Palopo, memiliki AHH yang masih di bawah capaian Kota Palopo. Kabupaten Luwu berada pada angka 70.19 Tahun, Luwu Timur 70.38 Tahun, Luwu Utara 68.31 Tahun.

2.1.2.2.5 Persentase Balita Gizi Buruk

Gizi buruk adalah kondisi tubuh terparah yang mengalami kekurangan gizi dalam kurun waktu yang lama (menahun). Hal ini umumnya terjadi pada anak-anak, gizi buruk pada anak seringkali disebabkan oleh kurangnya asupan makanan bergizi seimbang, di samping itu bisa juga disebabkan oleh penyakit-penyakit tertentu yang menyebabkan terganggunya proses pencernaan makanan ataupun terganggunya penyerapan zat gizi penting yang diperlukan oleh tubuh.

Tabel 2.16
Persentase Balita Gizi Buruk
Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
a.	Jml Balita Gizi Buruk	Jiwa	3	4	2	0	0
b.	Jumlah Balita	Jiwa	16,177	16,963	17,826	18,002	18,11
C	Persentase Balita Gizi Buruk	%	0,02	0,02	0.01	0	0
D	Balita Gizi Buruk per 10.000 balita	Rasio	2	2	1	0	0

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo, 2021

2.1.2.2.6 Angka Partisipasi Angkatan Kerja

Indikator ini mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu negara/wilayah. Semakin tinggi Partisipasi Angkatan Kerja menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Tabel 2.17
Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kota Palopo
Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
a.	Jumlah Angkatan kerja 15 tahun ke atas	Orang	67.504	75.563	75.829	80.564	85.299
	Laki – Laki	Orang	40.975	47.057	45.831	47.611	49.391
	Perempuan	Orang	26.529	28.506	29.998	32.953	35.908

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
b.	Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas	Orang	123.168	134.147	129.460	133.176	136.892
	Laki – Laki	Orang	58.952	63.6	61.900	63.611	65.322
	Perempuan	Orang	64.216	70.547	67.560	69.565	71.570
c	Angka Partisipasi Angkatan Kerja	%	54,81	56,33	58,57	60,49	62,41
	Angka Partisipasi Angkatan Kerja Laki-Laki	%	69,51	73,99	74,04	74,85	75,66
	Angka Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	41,31	40,41	44,4	47,37	50,34

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo, 2021

Data di atas menunjukkan angka partisipasi angkatan kerja di Kota Palopo sepanjang tahun 2016 – 2020 meningkat. Pada tahun 2016, dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas, mampu menyediakan 55 orang angkatan kerja berusia 15 tahun keatas yang aktif secara ekonomi bekerja, pada tahun 2020 angkanya meningkat menjadi 62 orang per 100 penduduk.

Dari aspek gender, tabel di atas juga menunjukkan angka partisipasi angkatan kerja perempuan sepanjang 2016– 2020 di Kota Palopo masih terus berada dibawah angka partisipasi angkatan kerja laki. Olehnya pengarusutamaan gender dalam aspek ketenagakerjaan di Kota Palopo diharapkan agar ke depan angka partisipasi angkatan kerja perempuan terus meningkat.

2.1.2.2.7 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi angkatan kerja Kota Palopo Tahun 2020 berada pada angka 70.85 persen atau lebih baik dari capaian 2019 di angka 64.58 persen.

Tabel 2.18
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Kota Palopo Tahun 2016 –2020

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penduduk Angkatan Kerja	Orang	67.504	75.563	75.829	80.564	85.299
	- Laki – Laki	Orang	40.975	47.057	45.831	47.611	49.391
	- Perempuan	Orang	26.529	28.506	29.998	32.953	35.908
2	Jumlah Penduduk Usia Kerja (15-64 Tahun)	Orang	116.200	126.879	121.883	124.755	127.627
	- Laki – Laki	Orang	56.109	60.63	58.794	60.142	61,49
	- Perempuan	Orang	60.091	66.249	63.089	64.613	66.137
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	58,09	59,56	58.31	64.58	70,85
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Laki-Laki	%	73,03	77,61	77.95	79.16	80,37
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	44,15	43,03	47.55	51.00	54,45

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo, 2021.

Angka pada tabel di atas menunjukkan adanya kenaikan tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Palopo sepanjang 2016 – 2020. Jika pada tahun 2016, dari 100 orang penduduk usia 15 -64 tahun, ada 58 orang (pembulatan 58.09 yang tersedia untuk memproduksi barang atau jasa di Kota Palopo, pada tahun 2020 menjadi 70-71 orang yang tersedia untuk memproduksi barang atau jasa.

Artinya sepanjang 2016 – 2020, jumlah tenaga kerja di Kota Palopo yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa meningkat. Olehnya Pemerintah Kota Palopo perlu mengakselerasi program dan kegiatan ketenagakerjaan.

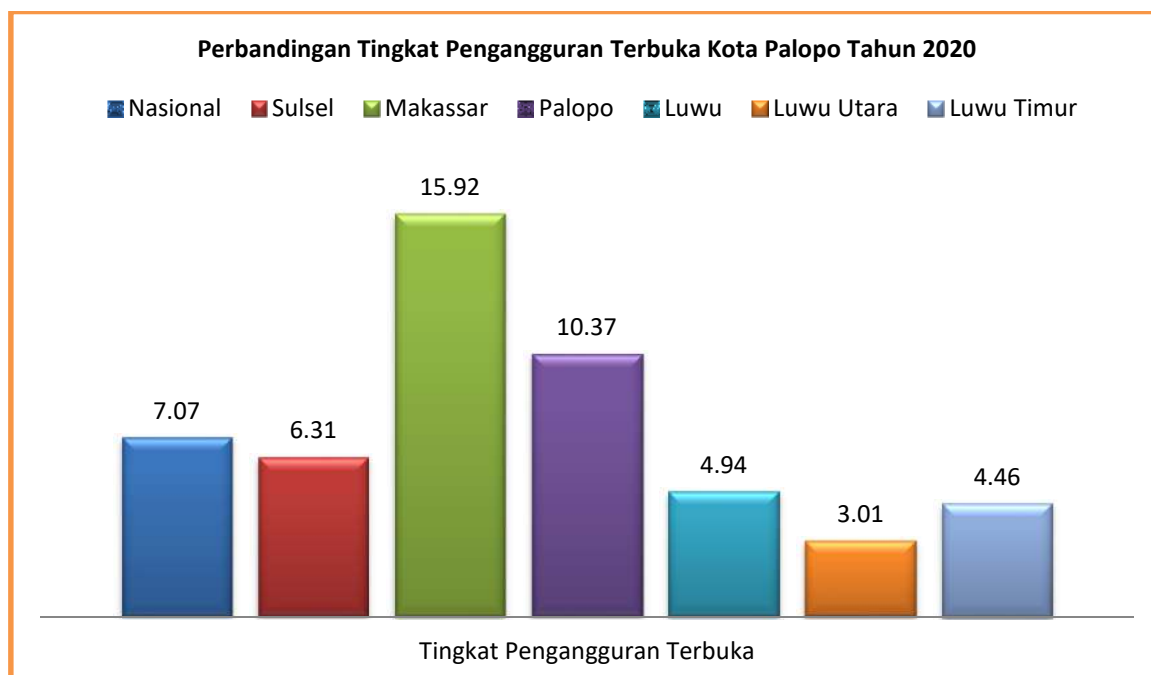
Dari aspek gender, tabel diatas juga menunjukkan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan sepanjang 2016 – 2020 di Kota Palopo masih jauh tertinggal dibawah TPAK laki. Olehnya pengarusutamaan gender dalam aspek ketenagakerjaan di Kota Palopo perlu agar ke depan TPAK perempuan terus meningkat.

2.1.2.2.8 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka yang menjadi Indikator perluasan kesempatan berusaha dan produktifitas tenaga kerja di Kota Palopo pada tahun 2020, berada pada angka 10.37% (Maret 2020). Jumlah ini belum memenuhi target daerah 2020 yakni 9,51%. Dibandingkan 2019, Tingkat penangguran terbuka 2020 di Kota Palopo juga lebih besar. Sebab di 2019, angka tingkat pengangguran terbuka hanya pada posisi 10. 32%. Tetapi sudah jauh lebih baik dibandingkan tahun 2018 dimana angkanya pada posisi 11.60%. Meski demikian, kondisi 2020, memang masih berada dibawah target Kota Palopo 2020 yang berada pada angka 9.51%. Kemudian bila dibandingkan target akhir RPJMD 2023, kondisi 2020 baru memenuhi 80.71% target pengangguran terbuka pada tahun 2023 nanti.

Bila dibandingkan dengan kabupaten/kota Lain di Sulawesi Selatan, tingkat pengangguran terbuka Kota Palopo ini masih lebih baik dari Kota Makassar yang berada pada angka 15.92% (Agustus 2020). Tapi belum lebih baik dibandingkan tingkat pengangguran terbuka beberapa kabupaten yang berbatasan wilayah secara langsung dengan Kota Palopo, yakni Kabupaten Luwu (4.94%), Kabupaten Luwu Utara (3.01%) dan Kabupaten Luwu Timur (4.46%), Kota Pare-Pare (7.14%), bahkan belum lebih baik daripada -rata Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional 2020 (7.07%) Rata-Rata Sulsel (6.31%).

Grafik perbandingan tingkat pengangguran terbuka Kota Palopo 2020 dibandingkan dengan daerah lain di Luwu Raya.



Meningkatnya tingkat pengangguran terbuka di Kota Palopo tahun 2020 disebabkan beberapa kondisi sebagai berikut :

- Jumlah angkatan kerja pada s.d Agustus 2020 sebanyak 85.026 orang, bertambah sekitar 609 orang jika dibandingkan Agustus 2019. Sebaliknya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurun 0,71 persen menjadi 61,23 persen.
- Dalam setahun terakhir, pengangguran meningkat sebanyak 655 orang, sejalan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang meningkat 0,70 persen menjadi 10,37 persen pada Agustus 2020.
- Dilihat dari tingkat pendidikan, TPT untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) paling tinggi diantara tingkat pendidikan lain, yaitu sebesar 19,61 persen.
- Penduduk yang bekerja s.d Agustus 2020 sekitar 76.211 orang, berkurang 0.06 persen dari Agustus 2019.
- Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase penduduk yang bekerja terjadi pada sektor pertanian (3,92 persen).
- Sebaliknya, lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan persentase terjadi pada sektor jasa (3,10 persen) dan sektor manufaktur (0,82 persen).
- Penduduk Bekerja di kegiatan formal pada Agustus 2020 sebanyak 44.2 ribu orang (58,01 persen). Sebaliknya terdapat sekitar 32,0 ribu orang (41.99 persen) penduduk bekerja di kegiatan informal.
- Selama setahun terakhir persentase penduduk bekerja di kegiatan formal mengalami penurunan 9.87 persen.
- Dampak Pandemi COVID19 terhadap ketenagakerjaan Kota Palopo Agustus 2020, terdiri dari pengangguran karena Covid-19 (1.994 orang), Bukan Angkatan Kerja karena Covid-19 (586 orang), sementara tidak bekerja karena Covid-19 (962 orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 (11.192 orang).

Berikut adalah gambaran kondisi ketenagakerjaan Kota Palopo sampai dengan tahun 2020 :

Tabel 2.19
Perbandingan Kondisi tenaga Kerja 2019 dan 2020 Kota Palopo

Uraian	2019 (Ribu Orang)	2020 (Ribu Orang)	Perubahan
Penduduk Usia Kerja	136.3	138.9	2.6
Angkatan Kerja	84.4	85	0.6
Bekerja	76.3	76.2	-0.1
Pengangguran	8.1	8.8	0.7
Bukan Angkatan Kerja	51.9	53.8	1.9
Tingkat Pengangguran Terbuka	9.67	10.37	0.7
Laki-laki	10.81	11.22	0.41
Perempuan	7.95	9.07	1.12
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	61.94	61.23	-0.71
Laki-laki	76.81	76.23	-0.58
Perempuan	48.01	47.14	-0.87

2.1.2.2.9 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

Keluarga Pra Sejahtera adalah keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic needs*) secara minimal seperti kebutuhan akan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan dasar bagi anak usia sekolah.

Sedangkan Keluarga Sejahtera I adalah keluarga-keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan psikologisnya (*psychological needs*) seperti kebutuhan ibadah, makan protein hewani, pakaian, ruang untuk interaksi keluarga, dalam keadaan sehat, mempunyai penghasilan, bisa baca dan tulis latin.

Tabel 2.20**Perkembangan Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I**

No	Bidang/Urusan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (%)	30.34	28.9	26.82	26.09%	26.09% (2019)

Sumber : Badan Pusat Statistik

Pada tahun 2016, di Kota Palopo terdapat 30.34% kategori keluarga sejahtera I dan keluarga prasejahtera. Namun 2018, jumlah kemudian menurun menjadi 26.81%. Ini menunjukkan adanya pengurangan dari aspek persentase jumlah keluarga untuk kedua kategori ini.

2.1.2.2.10 Survey Kepuasan Layanan Masyarakat

Survey Kepuasan Masyarakat telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Palopo. Rata-rata tingkat kepuasan masyarakat pada tahun 2020 berada pada angka 83.08 poin. Ini menunjukkan kinerja unit layanan berpredikat baik dengan mutu layanan yang baik pula. Tahun 2021, kondisi ini diharapkan mampu dipertahankan bahkan terus ditingkatkan.

Tabel 2.21
Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2020

NO.	PERANGKAT DAERAH	NILAI INDEKS	IKM	KINERJA UNIT LAYANAN	MUTU PELAYANAN
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3,53	88.33	Sangat Baik	A
2	RSUD Sawerigading	3,11	77.77	Baik	B
3	Puskesmas Wara	3,27	81.83	Baik	
4	Dinas Sosial (Rastra APBN dan APBD)	-	83.24	Baik	B
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	83.00	Baik	B
6	Kecamatan Wara	3.36	84.19	Baik	B
Rata-rata			83.06	Baik	B

Sumber : LAKIP Kota Palopo Tahun 2020

2.1.2.3 SENI BUDAYA DAN OLAHRAGA**2.1.2.3.1 Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga**

Tabel 2.22
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Group Kesenian	14	16	18	18	30
Jumlah Gedung Kesenian	1	1	1	1	1
Jumlah Klub Olahraga	4	8	8	8	86
Jumlah Gedung Olahraga	1	1	1	1	1

Sumber Data: Dinas Kebudayaan dan Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Palopo Tahun 2021
Jumlah group kesenian di Kota Palopo meningkat dari tahun 2016 sebanyak 14 group menjadi 32 group kesenian pada tahun 2020, sementara jumlah gedung kesenian jumlahnya tetap. Klub olahraga mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 4 klub pada tahun 2016 menjadi 86 klub pada tahun 2020. Sedangkan gedung olahraga jumlahnya tetap sepanjang 2016-2020.

2.1.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

Diisi sesuai dengan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek pelayanan umum. Lebih lanjut dijelaskan tentang urusan layanan wajib dan pilihan, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan.

2.1.3.1 LAYANAN URUSAN WAJIB

Layanan urusan wajib dasar diarahkan pada pembangunan bidang Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, dan Sosial.

2.1.3.1.1. Bidang Urusan Pendidikan

Pendidikan Anak Usia Dini

Merupakan jumlah siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan anak dibagi jumlah seluruh anak yang berusia 4-6 tahun yang dinyatakan dalam persentase.

Tabel 2.23
Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Kota Palopo Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA/ Penitipan Anak	Orang	4.338	4.110	4.698	4.034	3.583
2	Jumlah anak usia 4 – 6 Tahun	Orang	6.875	6.511	6.714	6.554	6.562
PAUD		%	61,75	63,16	63,10	62,48	54.60

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Palopo Tahun 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat partisipasi anak berusia 4-6 tahun mengakses pendidikan anak usia dini relatif masih rendah berada pada level 54.60 % dan belum mencapai angka 75%. Ini menunjukkan bahwa perlunya ada akselerasi program, kegiatan dan sub kegiatan, sehingga lebih banyak anak usia 4-6 tahun yang mengakses lembaga pendidikan anak usia dini di Kota Palopo.

Sampai dengan tahun 2020, jumlah lembaga pendidikan anak usia dini di Kota Palopo, totalnya sebanyak 130 lembaga, termasuk yang berada dibawah Kementerian Agama. Jumlah ini terdiri dari Raudatul Afhal (RA) sebanyak 5, TPA sebanyak 3, Satuan Paud Sejenis (SPS) sebanyak 2, Kelompok Bermain (KB) sebanyak 30, TK sebanyak 90.

Beberapa aspek yang mesti menjadi perhatian dalam meningkatkan angka patrisipasi ini adalah memastikan edukasi dan sosialisasi urgensi pendidikan anak usia dini terhadap orang tua dan memastikan bahwa biaya pendidikan pada level ini bisa dijangkau oleh semua kalangan.

Angka Partisipasi Kasar

Angka partisipasi Kasar adalah Proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. Sejak tahun 2007 Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. Angkanya menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan.

APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK mendekati atau **lebih dari 100** persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Hal ini juga dapat menunjukkan

bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya.

Tabel 2.24
Angka Partisipasi Kasar Kota Palopo Tahun 2016 - 2020

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	APK SD/MI/Paket A	111,66	106,00	112.89	105.99	104.62
2	APK SMP/MTs/Paket B	86,17	84,91	84.17	86.02	87.87
3	APK SMA/MA/SMK/Paket C	95,35	85,39	110.31	110.74	107.53

*Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Palopo, Palopo Dalam Angka, 2021
Dinas Pendidikan Kota Palopo*

Tabel di atas menunjukkan bahwa partisipasi kasar tingkat SD sederajat di Kota Palopo tahun 2016-2020 selalu melebihi 100%. Kondisi ini menggambarkan setiap tahunnya selalu ada penduduk yang sudah bersekolah di tingkat SD, meski umurnya belum mencukupi 7 tahun, atau melebihi umur yang seharusnya. Namun kondisi ini juga mencerminkan bahwa di Kota Palopo, untuk tingkat sekolah dasarnya, tetap mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya yakni penduduk berumur 7-12 tahun.

Pada tingkat pendidikan SMP/ sederajat, partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan ini fluktuatif. Jika pada tahun 2016 dari 100 orang penduduk berumur 13-15 tahun yang bersekolah rata-rata sebanyak 86 orang, pada tahun 2020 menjadi 87-88 orang per 100 penduduk umur 13-15 tahun.

Sementara pada jenjang SMA/ sederajat partisipasi kasar pada jenjang pendidikan ini justru meningkat. Jika pada tahun 2016 dari 100 orang penduduk berumur 16-18, tahun yang bersekolah rata-rata sebanyak 95 orang, pada tahun 2020 meningkat menjadi 107 orang, per 100 penduduk umur 16-18 tahun.

Beberapa aspek yang sangat erat kaitannya dengan upaya meningkatkan partisipasi kasar adalah aspek ketersediaan sekolah, guru dan keterjangkauan biaya pendidikan. Olehnya ke depan melalui pelaksanaan pendidikan paripurna, Kota Palopo berharap mampu meningkatkan angka partisipasi kasar pada jenjang pendidikan dasar yakni SD dan SMP sederajat. Untuk menyikapi hal ini Pemerintah Kota Palopo melaksanakan program pendidikan gratis. Sehingga diharapkan dapat mempertahankan atau bahkan meningkatkan partisipasi pada anak usia sekolah.

Angka Pendidikan yang Ditamatkan

Indikator ini menunjukkan besaran atau persentase komposisi penduduk usia menurut ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki masing-masing tingkat pendidikan. Mulai dari SD, SMP dan SMA/ sederajat. Ini untuk mengetahui tingkat kualitas pendidikan penduduk dengan menggunakan jenjang pendidikan tertentu sebagai batasan minimalnya atau sebagai bahan analisis pasar kerja.

Semakin tinggi ijazah/STTB yang dimiliki oleh sebagian besar penduduk suatu wilayah maka mencerminkan semakin tinggi taraf intelektualitas masyarakat di wilayah tersebut. Berikut adalah data penduduk usia 10 tahun keatas di Kota Palopo 2016-2017, sesuai tingkat pendidikan yang berhasil ditamatkan :

Tabel 2.25
Penduduk Usia 10 Tahun ke atas di Kota Palopo yang Ditamatkan
Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
A	Angka pendidikan yang ditamatkan (%)					
1	Tidak/Belum Bersekolah (%)	7.85	7.02	6.31	6.64	7.32
2	Tamat SD/ sederajat (%)	30.47	14.18	12.69	15.79	17.01
3	Tamat SMP/ sederajat (%)	11.82	23.63	24.71	20.02	22.53
4	Tamat SMA (%)	31.75	36.68	37.88	36.19	33.58
5	Tamat SMK (%)	4.06	2.81	2.39	3.52	3.04

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
6	Tamat Perguruan Tinggi (%)	14.08	15.67	16.00	17.84	16.52
7	Diploma I/II (%)	0.29	0.37	0.38	0.39	0.41
8	Diploma III (%)	1.82	1.39	1.12	1.79	1.47
9	Diploma IV/S1-S3 (%)	11.97	13.91	14.51	15.66	14.64

Sumber Data : Dinas Pendidikan

Angka Partisipasi Murni

Adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. Untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah.

APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Jika APM = 100, berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A

Tabel di bawah ini menunjukkan, pada tahun 2016, terdapat 95,37% anak usia 7-12 tahun yang tepat waktu bersekolah di tingkat SD/MI sederajat. Dan pada tahun 2020 menjadi 99,01%. Jumlah anak yang masuk tepat waktu sekolah semakin tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa daya serap sekolah pada tingkat pendidikan SD/MI/Paket A relatif cukup baik karena ditunjang dengan jumlah ketersediaan sekolah yang memadai.

Tabel 2.26
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A
Kota Palopo Tahun 2016 - 2020

Angka Partisipasi Murni (APM) Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin					
Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
SD/MI	95,37	99,32	99,78	99.44	99.01
Laki-Laki	100.00	99,33	99,60	99.40	75.62
Perempuan	90,52	99,31	100,00	99.66	73.15

Sumber Data : Buku Palopo Dalam Angka, 2021 dan Dinas Pendidikan Kota Palopo

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B

Tabel di bawah ini menunjukkan, APM pada tingkat pendidikan ini terus membaik setiap tahunnya. Jika tahun 2016, hanya 76,61 % anak usia 13-15 tahun yang tepat waktu bersekolah di tingkat SMP/MTs sederajat, pada tahun 2020 sudah mencapai angka 78,33%. Jumlah anak yang masuk tepat waktu sekolah semakin tinggi, menunjukkan daya serap sekolah pada tingkat pendidikan ini semakin membaik. Meski pun angkanya jika dibandingkan dengan APM tingkat SD sederajat, APM pada tingkat SMP/MTs sederajat masih berada di bawah.

Tabel 2.27
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B
Kota Palopo Tahun 2016 - 2020

Angka Partisipasi Murni (APM) Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin					
Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
SMP/MTs	76,61	77,89	78,39	78.11	78.33
Laki-Laki	77,50	75,35	79,35	77.18	88.74
Perempuan	75,52	80,28	77,55	79.04	99.96

Sumber Data :Buku Palopo Dalam Angka, 2021 dan Dinas Pendidikan Kota Palopo Tahun 2021

Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/Paket C

Tabel di bawah ini menunjukkan, APM pada tingkat pendidikan ini terus membaik setiap tahunnya. Jika tahun 2015, hanya 68,29 % anak usia 16-18 tahun yang tepat waktu bersekolah di tingkat SMA/SMK sederajat, pada tahun 2020 sudah mencapai angka 67,4%. Jumlah anak yang masuk tepat waktu sekolah semakin tinggi, menunjukkan daya serap sekolah pada tingkat pendidikan ini semakin membaik.

Tabel 2.28
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C
Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

Angka Partisipasi Murni (APM) Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin					
Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
SMA/MA/SMK	65,72	66,42	67,99	67.40	67.62
Laki-Laki	66,80	69,65	75,27	74.80	76.32
Perempuan	64,73	63,24	62,00	60.00	58.92

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Palopo Tahun 2021

Angka Partisipasi Sekolah

Adalah proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Sejak Tahun 2009, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Pada kelompok umur mana peluang tersebut terjadi dapat dilihat dari besarnya APS pada setiap kelompok umur.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A

Tabel 2.29
Persentase Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A
Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
7 - 12	100	99,32	99,78	99.70	99.53
Laki-Laki	100	99,33	99,60	99.46	75,62
Perempuan	100	99,31	100	99.94	73,14

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Palopo Tahun 2021

Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B

Tabel 2.30
Persentase Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B
Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
13 - 15	96,57	98,13	100	99.17	98.69
Laki-Laki	95,14	96,15	100	98.38	88.74
Perempuan	98,35	100	100	99.96	99.96

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Palopo Tahun 2021

Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C**Tabel 2.31****Persentase Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C
Kota Palopo Tahun 2016 – 2020**

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
16 - 18	100	99,32	99,78	84.43	84.31

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Palopo, Tahun 2021

Angka Putus Sekolah

Adalah proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Adapun kelompok umur yang dimaksud adalah kelompok umur 7-12 tahun, 13-15 tahun dan 16-18 tahun. Untuk mengukur kemajuan pembangunan di bidang pendidikan dan untuk melihat keterjangkauan pendidikan maupun pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok umur (7-12, 13-15 dan 16-18 tahun).

Semakin tinggi angka putus sekolah menggambarkan kondisi pendidikan yang tidak baik dan tidak merata. Begitu sebaliknya jika angka putus sekolah semakin kecil maka kondisi pendidikan di suatu wilayah semakin baik. Contoh APTS 7-12 = 10,11% berarti secara rata-rata dari 100 anak usia 7-12 tahun yang sedang atau pernah bersekolah terdapat 10 sampai 11 anak yang putus sekolah dan lebih cenderung 10 anak yang putus sekolah.

Tabel 2.32**Angka Putus Sekolah Kota Palopo Tahun 2016 – 2020**

No	Bidang/Urutan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Angka Putus Sekolah SD/MI (%)	0	0.68	0,79	0,004	0,43
2.	Angka Putus Sekolah SMP/MTs (%)	3.43	1.87	1,26	0,006	0,78
3.	Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA (%)	9,10	10.28	7,35	n/a	n/a

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Palopo, Palopo Dalam Angka 2016-2020
Dinas Pendidikan Kota Palopo

Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI**Tabel 2.33****Persentase Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI
Kota Palopo Tahun 2016 - 2020**

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Capaian Kinerja APTS SD/MI Kota Palopo	Orang	0	153	179	74	74
2.	Jumlah Seluruh APS SD/MI Kota Palopo (Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun yang pernah/sedang bersekolah)	Orang	21,952	22,500	22.617	22.838	14,543
3.	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0	0.68	0,79	0.32	0,51

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Palopo, diolah dari Palopo Dalam Angka 2016-2020
Dinas Pendidikan Kota Palopo

Data di atas menunjukkan bahwa angka putus sekolah Kota Palopo 2016-2020 pada tingkat SD cenderung meningkat. Angka putus sekolah Jika pada tahun 2016 sebesar 0% pada tahun 2020 sebesar 0,51%. Artinya pada tahun 2020, dari 100 siswa sekolah SD ada 1 orang siswa yang sudah tidak bersekolah lagi atau tidak menamatkan pendidikannya pada jenjang SD/ sederajat. Ini mesti disikapi oleh Pemerintah sehingga angkanya tidak semakin meningkat.

Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs

Tabel 2.34
Persentase Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs
Kota Palopo Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Capaian Kinerja APTS SMP/MTs Kota Palopo	Orang	385	214	146	69	69
2.	Jumlah Seluruh Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs Kota Palopo (Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun yang pernah/sedang bersekolah)	Orang	11,213	11,465	11.595	11.722	75,88
3.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	3.43	1.87	1,26	0.59	0,91

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Palopo, diolah dari Palopo Dalam Angka 2016-2021 Dinas Pendidikan Kota Palopo

Data di atas menunjukkan bahwa angka putus sekolah Kota Palopo 2016-2020 pada tingkat SMP menurun. Dari 385 kasus pada tahun 2016 menurun menjadi 69 kasus pada tahun 2020.

Pada tahun 2013, dari 100 siswa ada 5 (pembulatan 5.14%) yang sudah **Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA**

Tabel 2.35
Persentase Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA
Kota Palopo Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Capaian Kinerja APTS SMA/SMK/ sederajat se Kota	Orang	962	1,147	854	Pindah kewenangan ke Pemerintah Provinsi Sulsel	
2	Jumlah Seluruh APS SMA/SMK/ sederajat se- Kota Palopo (Jumlah Penduduk Usia 16-18 Tahun yang pernah/sedang bersekolah)	Orang	10,573	11,162	11.620		
3.	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	%	9,10	10.28	7,35		

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Palopo, diolah dari Palopo Dalam Angka 2013-2018 Dinas Pendidikan Kota Palopo

Data di atas menunjukkan bahwa angka putus sekolah pada tingkat ini di Kota Palopo semakin menurun. Jika pada tahun 2016 terdapat 9 orang orang siswa putus sekolah dari 100 siswa, pada tahun 2018 hanya terdapat 7 orang (7,35%) siswa yang putus sekolah per 100 orang siswa.

Angka Kelulusan

Angka kelulusan menunjukkan besar jumlah siswa yang tidak tinggal kelas atau berhasil menamatkan pendidikannya pada level yang sedang ia tempuh. Indikator ini menunjukkan keberhasilan para siswa dalam mengikuti ujian sekolahnya.

Tabel 2.36
Angka Kelulusan Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

No	Bidang/Urusan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Angka Kelulusan SD	98,87	100	100	100	100
2.	Angka Kelulusan SMP	99,62	99,30	99,38	100	100
3.	Angka Kelulusan SMA/SMK	102,44	99,75	100	Pindah kewenangan ke Pemerintah Provinsi Sulsel	

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Palopo Tahun 2020

Angka Kelulusan (AL) SD/MI

Tabel 2.37
Persentase Angka Kelulusan (AL) SD/MI
Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI	Orang	2.830	3.038	3.072	3193	3.086
2.	Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun sebelumnya	Orang	2.862	3.038	3.047	3193	3.086
3.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	98,87	100	100	100	100

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan bahwa angka kelulusan dari tahun ke tahun pada tingkat SD terus membaik. Jika pada tahun 2016 persentase angka kelulusan mencapai 98.87%, dan sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, semua siswa pada jenjang pendidikan SD/ sederajat lulus atau mencapai 100%.

Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs

Demikian halnya dengan kelulusan tingkat SMP sederajat. Data pada tabel dibawah menunjukkan bahwa angka kelulusan dari tahun ke tahun pada tingkat ini terus membaik. Jika pada tahun 2015 persentase angka kelulusan masih pada posisi 99.05%, pada tahun 2020 meningkat menjadi 100%.

Tabel 2.38
Persentase Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs
Kota Palopo Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs	Orang	2.822	2.865	2.900	3178	2.713
2.	Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun sebelumnya	Orang	2.833	2.885	2.918	3178	2.713
3.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	99,62	99,30	99,38	100,00	100,00

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Palopo Tahun 2021

Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA

Tabel 2.39
Persentase Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA
Kota Palopo Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	%	102,44	99,75	Pindah kewenangan ke Pemerintah Provinsi Sulsel		

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan bahwa angka kelulusan SMA sederajat pada empat tahun awal 2015-2016 angkanya melebihi 100%. Ini disebabkan karena mereka yang sebelumnya tinggal kelas atau tidak lulus, baru berhasil 2015 dan 2016. Kemudian pada tahun 2017 masih terdapat 0,25% siswa yang tidak berhasil menamatkan pendidikan SMA sederajatnya tepat waktu karena tidak berhasil lulus.

Angka Melanjutkan (AM)

Indikator ini menggambarkan persentase pelajar yang melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Angka ini diperoleh dengan membagi Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs terhadap jumlah lulusan pada jenjang SD/MI Tahun ajaran sebelumnya.

Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

Tabel 2.40
Persentase Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
Kota Palopo Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA	Siswa	4531	n/a	4.681	Pindah kewenangan ke Pemerintah Provinsi Sulsel	
2.	Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs Tahun ajaran sebelumnya	Siswa	3228	3361	3.388	3.178	2.713
3.	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	141.24	137.56	140.36		

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah lulusan SMP/Sederajat yang melanjutkan pendidikannya ke jenjang SMA/Sederajat meningkat setiap tahunnya. Jika pada tahun 2016 hanya pada angka 141.24%, pada tahun 2018 menjadi 140.36 %. Angka melanjutkan yang melebihi 100% ini menunjukkan bahwa semua lulusan SMP/MTS yang ada di Kota Palopo, melanjutkan pendidikannya ke tingkat SMA/SMK/ sederajat.

Angka melanjutkan melebihi 100% ini, menurut data Dinas Pendidikan Kota Palopo, karena cukup banyak lulusan SMP/ sederajat yang berada di luar wilayah Kota Palopo, memilih untuk bersekolah di SMA/ sederajat yang berada di wilayah Kota Palopo. Terutama lulusan SMP/ sederajat yang menetap di perbatasan Kabupaten Luwu.

Beberapa alasannya adalah, sarana dan prasarana pendidikan pada sekolah sekolah di Kota Palopo lebih kompetitif dibandingkan dengan sekolah SMA/ Sederajat yang berada di wilayah mereka tinggal. Faktor lainnya adalah karena orang tua mereka bekerja di wilayah Kota Palopo.

Kondisi ini juga menunjukkan tingkat kepatuhan terhadap sistem zonasi pendidikan belum berjalan cukup baik. Sebab masih banyak lulusan sekolah yang memilih bersekolah diluar dari zona wilayahnya. Namun ini juga menunjukkan adanya ketimpangan kualitas sekolah maupun pendidikan sehingga para lulusan memilih bersekolah di wilayah Kota Palopo dengan alasan sarana dan prasarana sekolah serta kualitas pembelajaran yang lebih

kompetitif. Meski demikian kondisi ini juga menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2018, daya serap pendidikan menengah baik SMA, SMK atau MA di Kota Palopo cukup baik, sehingga mampu menampung lulusan yang berasal dari luar Kota Palopo.

Fasilitas Pendidikan

Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik

Indikator ini menggambarkan kondisi umum bangunan sekolah SD atau yang setingkat yang layak dipakai proses belajar mengajar. Semakin tinggi nilai persentasenya, menunjukkan bahwa tersedia ruang kelas yang cukup untuk menunjang proses belajar mengajar.

Tabel 2.41

Persentase Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik Kota Palopo Tahun 2016 - 2020

No	Bidang/Urusan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Sekolah SD/MI berkondisi Baik	77	77	77	80	80
a	Jumlah SD Negeri Berkondisi Baik	62	63	63	65	65
b	Jumlah SD Swasta Berkondisi Baik	11	11	11	12	12
c	Jumlah MI Negeri Berkondisi Baik	4	4	4	3	-
d	Jumlah MI Swasta Berkondisi Baik	-	-	-	-	3
2	Jumlah seluruh SD/MI di Kota Palopo (Negeri & Swasta)	79	80	80	80	80
e	Jumlah SD Negeri	64	65	65	65	65
f	Jumlah SD Swasta	11	11	11	12	12
g	Jumlah MI Negeri	4	4	4	-	-
h	Jumlah MI Swasta	-	-	-	3	3
3	Persentase Sekolah SD/MI Kondisi baik(%)	97.47	96.25	96,25	100	100

Sumber Data : BPS Kota Palopo dan Palopo Dalam Angka 2016-2021
Dinas Pendidikan Kota Palopo Tahun 2021

Data menunjukkan bahwa seluruh sekolah dasar (SD) di Kota Palopo kondisinya sudah baik dalam menunjang proses belajar mengajar. Yakni Sekolah Dasar yang terletak di Tandung dan di Pamenta. Keduanya merupakan daerah Kota Palopo snya relief jauh dan berada pada daerah terluar dari wilayah Kota **Sekolah Pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan Baik**

Tabel 2.42

Persentase Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik Kota Palopo Tahun 2016 - 2020

No	Bidang/Urusan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jml SMP/MTs Kondisi Baik	29	30	31	33	30
a.	Jumlah SMP Negeri Berkondisi Baik	13	14	15	14	14
B	Jumlah SMP Swasta Berkondisi Baik	8	8	8	11	8
C	Jumlah MTs Negeri Berkondisi Baik	8	8	8	8	1
D	Jumlah MTs Swasta Berkondisi Baik	-	-	-		7
2.	Jml Seluruh SMP/MTs	29	30	31	33	30
E	Jumlah SMP Negeri	13	14	15	14	14
F	Jumlah SMP Swasta	8	8	8	11	8
G	Jumlah MTs Negeri	8	8	8	1	1
H	Jumlah MTs Swasta	-	-	-	7	7
3.	Persentase Sekolah SMP/MTs Kondisi baik (%)	100	100	100	100	100

Sumber Data : BPS dan Dinas Pendidikan Kota Palopo Tahun 2021

Tabel 2.43
Persentase Sekolah Pendidikan SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan Baik
Kota Palopo Tahun 2016 - 2020

No	Bidang/Urusan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jml SMA/SMK/MA Kondisi Baik	31	31	31	Pindah Kewenangan ke Provinsi	
a.	Jumlah SMA Negeri Berkondisi Baik	6	6	6		
b.	Jumlah SMA Swasta Berkondisi Baik	6	6	6		
c.	Jumlah SMK Negeri Berkondisi Baik	7	7	7		
d.	Jumlah SMK Swasta Berkondisi Baik	11	11	11		
e.	Jumlah MA Berkondisi Baik	1	1	1		
2	Jml Seluruh SMA/SMK/MA	31	31	31		
e.	Jumlah SMA Negeri	6	6	6		
f.	Jumlah SMA Swasta	6	6	6		
g.	Jumlah SMK Negeri	7	7	7		
h.	Jumlah SMK Swasta	11	11	11		
i.	Jumlah MA Negeri	1	1	1		
j.	Jumlah MA Swasta	0	0	0		
3	Persentase Sekolah SMA/SMK/MA Kondisi baik (%)	100	100	100		

Sumber Data : BPS dan Dinas Pendidikan Kota Palopo Tahun 2020

Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar

Adalah gambaran ketersediaan atau daya tampung sekolah per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan tertentu. Pendidikan dasar adalah tingkat SD/Mi dan SMP/MTs. Sehingga jumlah sekolah yang berada dalam tabel di bawah ini adalah jumlah SD dan Jumlah Sekolah madrasah Ibtidaiyah (MI) yang pengelolaannya dibawah Kementerian Agama dan Pihak Swasta lainnya, namun berlokasi di Kota Palopo.

Tabel 2.44
Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah
Pendidikan Dasar (SD/SMP yang sederajat) Kota Palopo Tahun 2016 - 2020

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	SD/MI					
1.1	Jumlah gedung sekolah	79	80	80	80	80
	<i>SD Negeri</i>	64	65	65	65	65
	<i>SD Swasta</i>	11	11	11	12	12
	<i>MI Negeri</i>	4	4	4	-	-
	<i>MI Swasta</i>	-	-	-	3	3
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	21,952	22,500	22.617	20.292	
1.3.	Rasio SD/MI (per 10.000)	36	36	36	39	
2	SMP/MTs					
2.1	Jumlah gedung sekolah	29	30	31	33	30
	<i>SMP Negeri</i>	13	14	14	14	14
	<i>SMP Swasta</i>	8	8	8	11	8
	<i>MTs Negeri</i>	8	8	8	1	1
	<i>MTs Swasta</i>	0	0	0	7	7
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	11,226	11,469	11.583	10.864	
2.3.	Rasio SMP/MTs (per 10.000)	26	26	26	30	
3						

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
3.1	Total Jumlah gedung sekolah (SD + SMP sederajat)	108	110	112		
3.2	Total jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun + jumlah penduduk usia 13-15 tahun	33,178	33,969	34.200	31.156	
3.4	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar Per 10.000	33	32	32	36	

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Palopo, Palopo Dalam Angka 2016-2020
Dinas Pendidikan Kota Palopo

Tabel di atas menggambarkan bahwa rasio ketersediaan sekolah untuk pendidikan dasar yakni SD dan SMP atau yang sederajat di Kota Palopo sepanjang tahun 2016-2020 cenderung menurun. Jika pada tahun 2016 untuk 10.000 penduduk usia pendidikan dasar (7-12 tahun) tersedia sekolah sebanyak 36 unit, tahun 2020 juga tersedia sebanyak 39 unit. Sementara untuk SMP, tahun 2015 tersedia 26 sekolah, tahun 2020 tersedia sebanyak 30 sekolah untuk sebanyak 10.000 penduduk usia 13-15 tahun.

Untuk tingkat pendidikan dasar SD dan SMP, rasio ketersediaan sekolah 2015-2020 cenderung menurun. Jika 2015 terdapat sebanyak 37 sekolah untuk penduduk sebanyak 10.000 jiwa, pada tahun 2020 hanya 36 sekolah untuk menampung 10.000 penduduk.

Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah

Perbandingan antara murid dan sekolah, mencerminkan besarnya daya tampung anak usia sekolah pada jenjang pendidikan SMA/MA dan SMK.

Tabel 2.45
Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah
Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
	SMA/MA/SMK					
1	Jumlah Sekolah	31	31	31	31	31
	SMA Negeri	6	6	6	6	6
	SMA Swasta	6	6	6	6	6
	SMK Negeri	7	7	7	7	7
	SMK Swasta	11	11	11	11	11
	Madrasah Aliyah	1	1	1	1	1
2	Jumlah Penduduk Usia 16-18 th	10.962	11.457	11.790		
3	Rasio Ketersediaan Sekolah (per 10.000 penduduk)	28	27	28		

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Palopo, Palopo Dalam Angka 2013- 2018
Dinas Pendidikan Kota Palopo

Tabel di atas menggambarkan bahwa rasio ketersediaan sekolah untuk pendidikan menengah di Kota Palopo sepanjang tahun 2015-2018 meningkat. Jika pada tahun 2015 untuk 10.000 penduduk usia pendidikan 16-18 tahun tersedia sekolah sebanyak 27 unit, tahun 2018 hanya tersedia sebanyak 28 unit.

Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar

Adalah perbandingan antara jumlah murid pada suatu jenjang sekolah dengan jumlah guru sekolah yang bersangkutan. Indikator ini untuk menggambarkan ketersediaan guru pada level pendidikan tertentu terhadap jumlah siswa pada level pendidikan tersebut.

Indikator ini akan menunjukkan perkembangan beban kerja guru. Semakin rendah nilai rasio ini berarti semakin tinggi beban kerja guru yang bersangkutan, yang berdampak pada

berkurang tingkat pengawasan dan perhatian guru terhadap murid sehingga mutu pengajaran cenderung semakin rendah.

Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa untuk pendidikan dasar, rasio guru dan murid sepanjang tahun 2015-2019, untuk tingkat pendidikan dasar menurun. Artinya beban kerja yang dirasakan oleh guru pendidikan dasar pada tingkat SD dan SMP semakin tinggi, meskipun jika dilihat dari angka rasio masih dalam kondisi normal.

Jika pada tahun 2015, untuk 10.000 siswa pendidikan dasar (SD dan SMP) dilayani 890 orang guru, pada tahun 2020 hanya dilayani oleh 649 orang guru. Pada jenjang SD/Mi/ sederajat, tahun 2015 sampai tahun 2019, pada tingkat SD/MI, rasio guru dan murid 937 guru per 10.000 murid pada tahun 2015, menjadi 601 guru per 10.000 murid pada tahun 2019.

Jenjang SMP/MTs/ Sederajat, pada tahun 2015, rasio guru murid berada pada angka 800 guru per 10.000 murid pada tahun 2015 menjadi 737 guru per 10.000 murid pada tahun 2019.

Tabel 2.46
Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Dasar
Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah Guru	1.208	1.136	1.128	1878	
	<i>SD Negeri</i>	986	933	924	898	939
	<i>SD Swasta</i>	160	142	142	170	181
	<i>MI Negeri</i>	62	61	61	0	0
	<i>MI Swasta</i>	0	0	0	45	45
1.2.	Jumlah Murid	19.091	18.719	18.969	18505	
	<i>SD Negeri</i>	15.867	15.393	15.451	14.342	14.424
	<i>SD Swasta</i>	2.514	2.659	2.742	2.959	2.936
	<i>MI Negeri</i>	710	667	642	0	0
	<i>MI Swasta</i>	0	0	0	1204	686
	Rasio Guru/Murid SD/MI (per 10.000)	633	607	595	601	
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah Guru	764	697	682	765	
	<i>SMP Negeri</i>	497	478	479	489	526
	<i>SMP Swasta</i>	101	86	73	107	61
	<i>MTs Negeri</i>	166	133	147	74	75
	<i>MTs Swasta</i>	0	0	0	95	77
2.2.	Jumlah Murid	10.167	10.137	10.173	10370	
	<i>SMP Negeri</i>	7.615	7.562	7.610	7276	7496
	<i>SMP Swasta</i>	1.135	1.289	1.308	1589	1322
	<i>MTs Negeri</i>	1.417	1.286	1.311	903	898
	<i>MTs Swasta</i>	0	0	0	602	556
	Rasio Guru/Murid SMP/MTs (per 10.000)	751	688	670	737	
3	Pendidikan Dasar (SD + SMP, Sederajat)					
3.1.	Jumlah Guru (SD dan SMP)	1.972	1.833	1.811	1664	
3.2.	Jumlah Murid (SD dan SMP)	29.258	28.856	29.142	28875	
3.3	Rasio Guru/Murid Pendidikan Dasar (per 10.000)	674	635	621	649	

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Palopo Tahun 2021

Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Menengah

Tabel 2.47
Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah
Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
	SMA/MA/SMK					
1	Jumlah Guru	990	980	1.085		
	SMA Negeri	331	331	333		
	SMA Swasta	87	87	74		
	SMK Negeri	361	351	421		
	SMK Swasta	169	169	215		
	MA	42	42	42		
2	Jumlah Murid	11.121	11.131	11.671		
	SMA Negeri	5.005	5.005	5.172		
	SMA Swasta	892	902	1.082		
	SMK Negeri	3.496	3.496	3.473		
	SMK Swasta	1.728	1.728	1.944		
3	Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah per 1000	89	88	93		

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Palopo, Palopo dalam Angka 2015-2020
Dinas Pendidikan Kota Palopo*

Tabel di atas menggambarkan bahwa pada tahun 2015, untuk mendidik 1000 siswa SMA/SMK/MA sederajat di Kota Palopo tersedia guru sebanyak 231 orang. Sementara pada tahun 2019, hanya tersedia 93 orang guru untuk melayani 1000 orang siswa.

Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata – Rata Pendidikan Dasar

Adalah rata-rata **jumlah guru sekolah pendidikan dasar per kelas** dibagi jumlah murid pendidikan dasar. Rasio guru per kelas diperoleh dengan membagi jumlah ruang kelas tersedia dengan jumlah guru yang tersedia.

Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata adalah jumlah guru pendidikan dasar per kelas per 10.000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan **ketersediaan tenaga pengajar per kelas**. Disamping itu juga untuk mengukur jumlah ideal guru per kelas terhadap jumlah murid agar tercapai mutu pengajaran.

Tabel 2.48
Persentase Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-rata Pendidikan Dasar
Kota Palopo 2016 - 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Pendidikan Dasar (SD/MI dan SMP/MTs, Swasta dan Negeri)					
1	Jumlah Guru Pendidikan Dasar (Orang)	1,972	1,833	1.811	1.878	
2	Jumlah Kelas Pendidikan Dasar (Buah)	1,145	1,120	1.137		
3	Rasio Guru Per Kelas Pendidikan Dasar (Guru/ Kelas)	1.72	1.64	1,59	1,01	
4	Jumlah Murid Pendidikan Dasar (Orang)	29,258	28,856	29.142	28.875	
5	Rasio Siswa Per Kelas Pendidikan Dasar (Siswa/ Kelas)	25.55	25.76	25,81		
6	Rasio Guru Murid per Kelas Rata-Rata Pendidikan Dasar per 10.000 (Guru/Siswa/Kelas)	0.59	0.57	0,55		

Sumber : Diolah dari Data Badan Pusat Statistik Kota Palopo, Palopo dalam Angka 2016-2020 dan Buku Potensi Wilayah Kota Palopo

Dinas Pendidikan Kota Palopo

Data di atas menunjukkan bahwa pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) di tahun 2015, tersedia 1 orang (pembulatan 0.81) guru untuk setiap kelas pendidikan dasar, di tahun 2018, kondisinya tidak jauh berbeda yakni terdapat 1 orang guru (pembulatan 0.55) untuk setiap ruang kelas pendidikan dasar.

Data tersebut juga menunjukkan bahwa pada tahun 2015, jumlah rata-rata murid untuk setiap kelasnya pada pendidikan dasar sebanyak 27 orang per kelas (pembulatan 25.50), di tahun 2018 kondisinya juga tidak jauh berbeda yakni 25-26 orang siswa per kelasnya (pembulatan 25.81).

Sementara untuk rasio Guru Murid per Kelas Rata-Rata Pendidikan Dasar yang dihitung per 10.000 jumlah siswa pendidikan dasar, diperoleh dengan membagi nilai rasio jumlah Guru Per Kelas Pendidikan Dasar (rasionya) dengan jumlah siswa pendidikan dasar yang ada.

Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata – Rata Pendidikan Menengah

Tabel 2.49
Persentase Rasio Guru Terhadap Murid Per Kelas Rata-rata Pendidikan Menengah Kota Palopo 2016 - 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Pendidikan Menengah (SMA/SMK/MA) Swasta & Negeri					
1	Jumlah Guru Pendidikan Menengah (Orang)	990	980	931	Pindah Kewenangan	
2	Jumlah Kelas Pendidikan Menengah (Buah)	477	462	465		
3	Rasio Guru Per Kelas Pendidikan Menengah (Orang/ Kelas)	2.08	2.12	2,00		
4	Jumlah Murid Pendidikan Menengah (Orang)	11,732	11,785	12.123		
5	Rasio Siswa Per Kelas Pendidikan Menengah (Siswa/ Kelas)	24.6	25.5	26,06		
6	Rasio Guru Murid per Kelas Rata-Rata Pendidikan Menengah per 10000 (Orang/Kelas)	1.77	1.80	1,61		

*Sumber : Diolah dari Data BPS Kota Palopo, Palopo dalam Angka 2013-2018 dan Buku Potensi Wilayah Kota Palopo
Dinas Pendidikan Kota Palopo*

Data di atas menunjukkan bahwa pada tingkat pendidikan menengah (SMA/SMK/Setara) di tahun 2015, tersedia 4-5 orang (pembulatan 4.77) guru untuk setiap kelas pendidikan dasar, di tahun 2018, tersedia 2 orang guru (pembulatan 1.61) untuk setiap ruang kelas pendidikan menengah.

Data diatas juga menunjukkan bahwa pada tahun 2015, jumlah rata-rata murid untuk setiap kelasnya pada pendidikan menengah sebanyak 26-27 orang per kelas (pembulatan 26.8), di tahun 2018 kondisinya menjadi 26 orang siswa per kelasnya (pembulatan 26.0).

Proporsi Murid Kelas 1 yang Berhasil Menamatkan Sekolah Dasar

Adalah indikator yang menggambarkan berapa besar penduduk usia 12 tahun pada tahun tertentu, yang berhasil menamatkan pendidikan sekolah dasarnya yang dinyatakan dalam persentase. Ini menunjukkan berapa banyak penduduk Kota Palopo yang berhasil menamatkan pendidikan dasar tingkat SD/MI nya.

Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 – 24 Tahun, Perempuan dan Laki-Laki

Adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun sampai 24 tahun yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab, dan huruf lainnya (seperti huruf jawa, kanji, dll) terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah, karena membaca merupakan dasar

utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. Angka Melek Huruf (AMH) merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan. Angka melek huruf berkisar antara 0-100.

Tingkat melek huruf yang tinggi menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan dasar yang efektif dan atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajaran. Contoh: AMH Kota Palopo Tahun 2013 sebesar 92,93 persen, artinya sekitar 93 persen penduduk di Kota Palopo yang berumur 15 tahun ke atas dapat membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya.

Tabel 2.50
Persentase Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 – 24 Tahun
Perempuan dan Laki – Laki Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
a	Banyaknya penduduk usia 15-24 thn yang belum melek huruf	Orang	11	2	3		
	<i>Laki</i>	<i>Orang</i>	<i>6</i>	<i>0</i>	<i>2</i>		
	<i>Perempuan</i>	<i>Orang</i>	<i>7</i>	<i>2</i>	<i>1</i>		
b	Banyaknya penduduk usia 15-24 thn	Orang	40,279	41,073	50.903		
	<i>Laki</i>	<i>Orang</i>	<i>18,896</i>	<i>19,273</i>	<i>20.336</i>		
	<i>Perempuan</i>	<i>Orang</i>	<i>21,383</i>	<i>21,800</i>	<i>30.567</i>		
c	Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun, Perempuan dan Laki-laki	%	99.973	99.995	100,00		
	<i>Laki</i>	<i>%</i>	<i>99.97</i>	<i>100.00</i>	<i>100,00</i>		
	<i>Perempuan</i>	<i>%</i>	<i>99.97</i>	<i>99.99</i>	<i>100,00</i>		

Sumber Data : Dinas Pendidikan Tahun 2019, *Potensi Wilayah Palopo, Statistik Daerah Kota Palopo, Palopo Dalam Angka Dinas Pendidikan Kota Palopo

Data di atas menunjukkan bahwa AMH penduduk usia 15-24 tahun Kota Palopo pada tahun 2015 sebesar 99.954%, artinya sebanyak 99 dari 100 orang penduduk usia tersebut di Kota Palopo sudah mampu membaca dan menulis.

Kondisi ini lebih membaik di tahun 2018 dimana AMH penduduk usia 15-24 tahun telah mencapai 100% yang menunjukkan bahwa 100 orang dari 100 penduduk Kota Palopo yang berumur 15-24 tahun pada tahun 2018 sudah mampu membaca dan menulis.

Penduduk Berusia ≥15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)

Adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab, dan huruf lainnya (seperti huruf jawa, kanji, dll) terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Angka Melek Huruf (AMH) merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan. Angka melek huruf berkisar antara 0-100.

Tabel 2.51
Persentase Penduduk Berusia ≥15 Tahun Melek Huruf
(Tidak Buta Aksara) Kota Palopo Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
a	Jumlah Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf se Kota Palopo	Orang	118,993	123,206	126.709		
b	Jumlah Seluruh Penduduk yang berusia > 15 tahun	Orang	123,168	126,430	129.955		
c	Penduduk Berusia ≥15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)	%	96,61	97.45	97,71		

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Palopo, Statistik Daerah Kota Palopo, Buku Potensi Wilayah Kota Palopo tahun 2019
Dinas Pendidikan Kota Palopo*

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2015 masih terdapat 98.22% penduduk Kota Palopo yang berusia diatas 15 yang tidak buta aksara. Namun pada tahun 2019, angka ini menurun dimana hanya terdapat 97.71% penduduk usia 15 tahun ke atas yang melek huruf di Kota Palopo.

Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Adalah indikator yang menggambarkan kualitas dari tenaga guru yang ada di Kota Palopo. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin tinggi kualitas tenaga guru yang ada di Kota Palopo.

Tabel 2.52
Persentase Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV
Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

No	Bidang/Urusan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jml guru bejazah S1-D4	3.657	3.861	4.049		1.630
2	Jml guru SD/Sederajat+SMP Sederajat +SMA Sederajat	2,962	2,813	2.742	1708 (sd & smp)	1.733
3	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi s1/d4	123.46	137.26	147,26		94,06

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan persentase guru yang berijazah S1-D4 di Kota Palopo meningkat tajam. Jika pada tahun 2015 berada pada angka 61.55%, tahun 2018 berada pada angka 147.26%. Ini menunjukkan bahwa sampai tahun 2018 semua guru yang berstatus ASN di Kota Palopo telah menyandang strata satu atau sarjana/diploma 4.

Kondisi pada tahun 2016, 2017 dan 2018 melebihi angka 100% sebab, terdapat guru yang menempuh strata satu kembali untuk menyesuaikan gelar pendidikan kesarjanaanya sesuai dengan mata pelajaran yang diampuh. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendidikan para tenaga guru di Kota Palopo sudah sangat kompetitif.

2.1.3.1.2. Bidang Urusan Kesehatan

Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup

Adalah Angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup).

Tabel 2.53
Angka Kematian Bayi (AKB)
Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kematian bayi (berumur kurang 1 tahun pada 1 tahun tertentu)	6	6	3	2	3
2	Jumlah kelahiran hidup pada 1 tahun tertentu	2.755	2.959	3.029	3.282	3.158
3	Rasio Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup	2,18	2,03	0,99	0,61	0.95

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2016, dari 1000 kelahiran hidup, ada 6 kasus kematian bayi sebelum usia tepat 1 tahun, kemudian 2020 mengalami penurunan dalam 1000 kelahiran 3 kasus.

Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)

Adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun. Angka kelangsungan hidup bayi = (100-angka kematian bayi). Angka kematian bayi dihitung dengan jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama.

Tabel 2.54
Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)
Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Per 1000 kelahiran	100	100	100	100	100
2.	AKB per 1000	2,18	2,03	0,99	0,61	1,02
3	AKHB	97,82	97,97	99,01	99,39	98,98

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2016-2020 terdapat 1-2 bayi yang meninggal sebelum usia tepat 1 tahun.

Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup

Adalah jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi).Indikator ini terkait langsung dengan target kelangsungan hidup anak dan merefleksikan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan anak-anak bertempat tinggal termasuk pemeliharaan kesehatannya.

Angka Kematian Balita kerap dipakai untuk mengidentifikasi kesulitan ekonomi penduduk.Misalkan perhitungan dari data Susenas 2004 mendapatkan perkiraan Angka Kematian Balita sebesar 74 per 1000 balita, dengan referensi waktu Mei 2002. Artinya, pada tahun 2002 setiap 1000 baita (umur 0 sampai 4 tahun 11 bulan 29 hari) pada tahun 2002, 74 anak diantaranya tidak akan berhasil mencapai umur tepat lima tahun.

Tabel 2.55
Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah kematian Balita (berumur kurang 5 tahun)	21	16	19	19	11
2.	Jumlah kelahiran hidup pada satu tahun tertentu	2.755	2.959	3.029	3.282	2.945
3	Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup	7,62	5,41	6,27	5,79	3,74

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2021

Tabel di atas menunjukkan, pada tahun 2016, dari 1000 balita yang lahir, ada 7 balita yang meninggal dan tidak mencapai umur tepat lima tahun. Dan tahun 2020 terjadi penurunan angka kematian balita dimana hanya terdapat 3 kematian balita per 1000 kelahiran. Sesuai data dalam tabel di atas, perlunya mempertahankan pola kinerja program kesehatan terutama ibu, bayi dan balita mengingat adanya trend penurunan jumlah balita yang meninggal per 1000 kelahiran hidup.

Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup

Angka kematian bayi endogen atau kematian neonatal adalah banyaknya kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama (dinyatakan dengan per seribukelahiran hidup) setelah dilahirkan, dan umumnya disebabkan oleh factor factor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan.

Oleh karena kematian neo-natal disebabkan oleh faktor endogen yang berhubungan dengan kehamilan maka angka ini dapat dimanfaatkan untuk menyusun program-program untuk mengurangi angka kematian neo-natal yang bersangkutan dengan program pelayanan kesehatan Ibu hamil, misalnya program pemberian pil besi dan suntikan anti tetanus.

Tabel 2.56
Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup
Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup	21	16	11	14	8
2.	Jumlah Kelahiran Hidup pada Satu Tahun Tertentu	2.755	2.959	3.029	3.282	2.945
3	Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup	7	5	3	4	3

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2021

Tabel di atas menunjukkan, pada tahun 2016 dari 1000 kelahiran hidup, terdapat 7 kasus kematian neonatal pada bayi, dan pada tahun 2020 menurun menjadi 3 kasus kematian neonatal pada bayi per 1000 kelahiran bayi hidup.

Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup

Atau Maternal Mortality Ratio (MMR) adalah Banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup.

Yang dimaksud dengan Kematian Ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh dll.

Tabel 2.57
Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup
Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Ibu Hamil yang Meninggal karena hamil, bersalin dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun	4	2	3	1	1
2.	Jumlah Kelahiran Hidup di wilayah tertentu pada kurun waktu yang sama	2.755	2.959	3.029	3.282	2.945
3	Angka Kematian Ibu per	145	68	99	30	34

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
	100.000 Kelahiran Hidup					

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2021

Tabel di atas menunjukkan, dari 100.000 ibu melahirkan, terdapat 145 kasus kematian ibu atau Maternal Mortality Ratio (MMR) di Kota Palopo pada tahun 2016. Dan pada tahun 2020, terjadi penurunan menjadi 34 kasus kematian ibu per 100.000 ibu melahirkan. Angka ini menunjukkan bahwa kasus kematian ibu karena melahirkan terus mengalami penurunan dalam kurun waktu 5 tahun.

Rasio Posyandu Per Satuan Balita

Dari rasio ini dapat diketahui banyaknya penduduk yang harus dilayani oleh sebuah sarana pelayanan kesehatan. Angka ini dapat digunakan sebagai indikator untuk menilai kecukupan penyediaan sarana pelayanan kesehatan. Indikator tersebut harus disertai dengan kriteria standar dan target yang diinginkan. Kriteria standar untuk kecukupan tidak sama pada setiap wilayah, tergantung dari kebutuhan masyarakat dan jenis pelayanan. Karena itu sebaiknya kriteria standar ditentukan oleh masing-masing daerah.

Perhitungan rasio ini pada berbagai wilayah akan menghasilkan distribusi sarana kesehatan yang dapat digunakan sebagai pegangan untuk menyusun rancangan pemerataan sarana pelayanan kesehatan.

Tabel 2.58
Rasio Posyandu Per Satuan Balita Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Posyandu	147	149	149	149	149
2.	Jumlah Balita	16.178	16.963	17.355	17.724	18.111
3	Rasio Posyandu Per Satuan Balita (1.000)	9	9	9	8	8

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2016, untuk melayani 1000 balita, tersedia sebanyak 9 posyandu. Namun pada tahun 2020, hanya tersedia 8 posyandu untuk melayani 1000 orang balita. Ini menggambarkan adanya peningkatan beban kerja posyandu di Kota Palopo.

Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk

Indikator ini untuk mengetahui ketersediaan fasilitas kesehatan seperti puskesmas, pustu dan poliklinik yang bisa disediakan pemerintah dalam melayani masyarakat. Semakin tinggi angka rasionya, maka semakin banyak faskes yang disiapkan pemerintah untuk melayani masyarakatnya.

Tabel 2.59
Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
a.	Jumlah Puskesmas, Poliklinik, Pustu	Jml	48	48	48	48	42
b.	Jumlah Penduduk	Jiwa	172.916	176.907	180.678	184.614	184.681
c	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	Rasio	3	3	3	3	2

	(10.000)					

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2016, untuk melayani 10.000 orang penduduk tersedia sebanyak 3 faskes (puskesmas, poliklinik dan pustu). Namun pada tahun 2020, sudah tersedia 2 fasilitas kesehatan. Ini menggambarkan adanya pengurangan beban kerja faskes di Kota Palopo.

Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Indikator ini memberikan gambaran perkembangan beban kerja dan daya tampung rumah sakit yang ada di Kota Palopo dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Tabel 2.60
Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk
Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Rumah Sakit	6	7	8	8	8
2.	Jumlah Penduduk	172.916	176.907	180.678	184.614	184.681
3	Rasio Rumah Sakit per satuan Penduduk (100.000)	4	4	4	4	4

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 5 (lima) tahun untuk melayani penduduk sebanyak 100.000 orang hanya tersedia sebanyak 4 rumah sakit.

Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Rasio ini dapat digunakan sebagai indikator untuk menyusun rencana dalam penyediaan jumlah dan jenis tenaga kesehatan yang dibutuhkan, hingga pendidikan, latihan dan penyebaran tenaga kesehatan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Dari rasio ini dapat diketahui jumlah penduduk yang harus dilayani oleh seorang tenaga kesehatan tertentu, karena itu rasio ini dapat digunakan sebagai indikator untuk menilai kecukupan penyediaan tenaga kesehatan untuk suatu jenis pelayanan kesehatan.

Tabel 2.61
Rasio Dokter Per Satuan Penduduk
Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
a.	Jumlah dokter	Orang	83	89	112	117	
b.	Jumlah penduduk	Jiwa	172.916	176.907	180.678	184.614	
c	Rasio Dokter Persatuan Penduduk	Per 10.000	5	5	6	6	

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2016, untuk melayani 10.000 jiwa penduduk, Pemerintah Kota Palopo bisa menyiapkan 5 orang dokter atau 1 dokter harus melayani sebanyak 2000 penduduk. Namun pada tahun 2020, meningkat menjadi tersedia 6 orang dokter untuk melayani 10.000 jiwa penduduk Kota Palopo. Ini memberikan informasi bahwa beban kerja tenaga dokter di Kota Palopo sejak 2020 jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2016. Ini menunjukkan adanya potensi peningkatan cakupan dan kualitas layanan kesehatan di Kota Palopo.

Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk

Adalah indikator yang menunjukkan seberapa besar ketersediaan tenaga medis yang siap melayani per 1000 penduduk di Kota Palopo. Ini menggambarkan kondisi beban kerja yang

dialami tenaga medis. Semakin tinggi nilai rasio indikator ini maka semakin ringan beban kerja para tenaga medis tersebut.

Tabel 2.62
Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk
Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
a.	Jumlah Tenaga Medis	Orang	82	89	93	117	114
b.	Jumlah penduduk	Jiwa	172.916	176.907	180.678	184.614	184.681
c.	Rasio tenaga Medis Persatuan Penduduk (10.000)	Rasio	5	5	5	6	6

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2016, untuk melayani 10.000 jiwa penduduk, Pemerintah Kota Palopo bisa menyiapkan 5 orang tenaga medis. Namun pada tahun 2020, tersedia 6 orang tenaga medis untuk melayani 10.000 jiwa penduduk Kota Palopo.

Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

Komplikasi kebidanan yang dimaksud adalah kesakitan pada ibu hamil ibu bersalin, dan ibu nifas yang dapat mengancam jiwa ibu dan/ atau bayi, Komplikasi dalam kehamilan, dsb. Semakin tinggi angka indikator ini, menggambarkan tingkat penanganan kesehatan ibu hamil dan bayi yang semakin baik.

Tabel 2.63
Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani
Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

No	Bidang Urusan	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Jml	472	457	465	545	443
2.	Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama	Jml	617	647	639	632	690
	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	76,49	70,63	72,77	86,23	64,2

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2021

Tabel di atas menggambarkan bahwa tingkat penanganan komplikasi kebidanan yang ditangani di Kota Palopo dari tahun ke tahun terus menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2016, dari 100 kasus komplikasi kebidanan sebanyak 76 kasus berhasil ditangani. Dan pada tahun 2020 sebanyak 64 kasus berhasil ditangani per 100 kasus komplikasi kebidanan. Ini mengindikasikan membaiknya pelayanan kesehatan bagi ibu hamil terutama cakupan pelayanan kesehatan yang mereka butuhkan.

Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Adalah Perbandingan antara persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih, seperti dokter, bidan, perawat, dan tenaga medis lainnya dengan jumlah persalinan seluruhnya, dan dinyatakan dalam persentase. Indikator ini Mengukur kematian ibu secara akurat adalah sulit, kecuali tersedia data registrasi yang sempurna tentang kematian dan penyebab kematian. Oleh karena itu sebagai proksi indikator yang digunakan adalah proporsi pertolongan kelahiran oleh tenaga kesehatan terlatih.. Semakin banyak persalinan yang ditolong dengan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan diharapkan dapat mengurangi angka kematian ibu melahirkan.

Tabel 2.64
Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan
yang Memiliki Kompetensi Kebidanan
Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

No	Bidang Urusan	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Orang	2.767	2.956	3.035	3.279	2.947
2.	Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama	Jml	2.944	3.086	3.035	3.225	3.295
3	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	93,99	95,79	100	101.67	89.44

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2021

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kota Palopo yaitu 100 persen pada tahun 2016 dengan jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan sebanyak 2767 ibu bersalin (jiwa). Sedangkan pada tahun 2020, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yaitu 89.44 persen dengan jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan sebanyak 2.947 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa hampir semua persalinan di Kota Palopo sudah ditangani oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.

Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Universal Child Immunization (UCI) adalah tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0-11 bulan), ibu hamil, wanita usia subur dan anak sekolah tingkat dasar. Imunisasi dasar lengkap pada bayi meliputi: 1 dosis BCG, 3 dosis DPT, 4 dosis polio, 4 dosis hepatitis B, 1 dosis campak. Pada ibu hamil dan wanita usia subur meliputi 2 dosis TT. Untuk anak sekolah tingkat dasar meliputi 1 dosis DT, 1 dosis campak dan 2 dosis TT. Semakin tinggi persentase indikator ini semakin baik kinerja UCI.

Tabel 2.65
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

No	Bidang Urusan	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah desa/kelurahan UCI	Jml	47	46	46	45	34
2.	Jumlah seluruh desa/kelurahan	Jml	48	48	48	48	48
3	Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	97,92	95,83	95,83	93,75	70,83

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2016 cakupan 97,92 persen kelurahan yang ada di Kota Palopo telah memenuhi UCI dimana sasaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah bayi, ibu hamil, wanita usia subur dan anak sekolah pada tingkat dasar, dan tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 70.83.

Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Cakupan balita gizi buruk di Kota Palopo yang mendapat perawatan sudah mencapai angka 100 persen sejak tahun 2016 hingga tahun 2020. Hal ini berarti bahwa semua balita gizi buruk sudah mendapatkan perawatan medis melalui sarana pelayanan kesehatan.

Tabel 2.66
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan
Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Orang	3	4	2	0	0
2.	Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama	Orang	3	4	2	0	0
3	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	100	100

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan mencapai 100 %. Sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan dan balita gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu sebanyak nol balita atau tidak terdapat balita gizi buruk di Kota Palopo yang mendapatkan perawatan. Hal ini menandakan kondisi penanganan balita di Kota Palopo semakin membaik.

Proporsi Penduduk dengan Asupan Kalori di bawah Tingkat Konsumsi Minimum (Standar yang Digunakan Indonesia 2.100 Kkal/Perkapita/Hari)

Indikator ini memberikan gambaran proporsi dan kemampuan masyarakat untuk mengkonsumsi pangan secara cukup dan bergizi. Umumnya masyarakat miskin belum mampu memenuhi konsumsi pangan minimum baik dari aspek kuantitas maupun kualitas gizi. Indikator ini erat kaitannya dengan aspek kemiskinan. Semakin tinggi angka indikator ini, artinya semakin banyak penduduk yang kekurangan pangan karena kesulitan mengakses kebutuhan dasar akibat aspek ekonomi.

Tabel 2.67
Penduduk yang Tingkat Konsumsinya Lebih Rendah
dari 2.100 kkal/kapita/hari Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Banyaknya penduduk yang tingkat konsumsinya lebih rendah dari 2.100 kkal/kapita/hari (Jumlah Penduduk Miskin)						
		Orang	14,510	15,020	15,440	15.428	14370
2	Jumlah Balita (Jumlah Penduduk Berumur di Bawah Lima Tahun)						
		Orang	15.275	16.178	16.963	17.355	17.724
3	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)						
		%	95.0	92.8	91.0	87,73	81.08

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas memperlihatkan bahwa pada tahun 2015, dari 100 balita per 100 balita penduduk miskin, 95 balita memiliki asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum. Namun 2019, kondisinya lebih baik, dimana hanya ada 81 orang balita dari 100 balita keluarga miskin yang tingkat konsumsi kalornya berada di bawah minimum.

Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak

Tabel 2.68
Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak
Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

No	Bidang Urusan	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah anak yang usia 1 tahun yang mendapat imunisasi campak di suatu wilayah selama 1 tahun	Orang	3.081	3.166	3.237	3.892	3.272
2.	Jumlah anak usia 1 tahun pada wilayah dan tahun yang sama	Orang	2.755	2.959	3.029	3.952	3.138
3	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	%	111,83	107	106,87	98,48	104,27

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2021

Data di atas menunjukkan terjadinya penurunan persentase bayi berumur di bawah satu tahun yang memperoleh imunisasi campak di Kota Palopo sampai dengan tahun 2020. Pada tahun 2020 dari 100 balita rata-rata hanya 104 orang yang mendapatkan imunisasi campak. Ini menunjukkan bahwa kinerja imunisasi perlu ditingkatkan. Misalnya melalui media sosialisasi yang menegaskan keamanan, kehalalan dan arti pentingnya imunisasi bagi para balita.

Non Polio AFP Rate Per 100.000 Penduduk

AFP (Acute Flaccid bahwa kasus AFP bukanlah kasus polio, melainkan Paralysis) merupakan gejala kelumpuhan pada anak yang berumur < 15 tahun yang bersifat layuh/flaccid dan terjadi secara mendadak (akut) bukan karena rudapaksa/trauma/kecelakaan. Untuk membuktikan bahwa virus polio liar sudah tidak ada lagi di Kota Palopo, maka harus ditemukan gejala gejala yang menyerupai penyakit polio.

Dalam penilaian kinerja surveilans AFP, terdapat indikator NonPolio AFP rate > 2 per 100.000 anak usia kurang dari 15 tahun per tahun dan spesimen adekuat > 80 %. Non PolioAFP rate merupakan target penemuan kasus per tahun. Jadi apabila suatu wilayah memiliki jumlah penduduk <15 tahun sebanyak 500.000, maka wilayah tersebut harus dapat menemukan minimal 10 kasus AFP dalam satu tahun. Jika target penemuan belum dapat dipenuhi, dapat dikatakan bahwa kinerja surveilans AFP belum baik, karena masih dimungkinkan adanya kasus yang belum terjaring.

Tabel 2.69
Non Polio AFP Rate Per 100.000 Penduduk
Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

No	Bidang Urusan	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah kasus AFP non polio yang dilaporkan	Kasus	1	0	1	0	0
2.	Jumlah penduduk < 15 tahun	Orang	48.835	48.835	51.780	54.522	48.304
3	Non polio AFP rate per 100.000 penduduk	Rasio	2	0	0	0	0

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2016, dari 100.000 penduduk Kota Palopo survey AFP hanya menemukan 2 kasus non polio AFP Rate, bahkan 2020 sama sekali tak ada. Ini menunjukkan kinerja surveillance Non Polio AFP Rate di Kota Palopo cukup baik.

Ini jika merujuk pada indikator keberhasilan surveillance AFP yang menyebutkan bahwa daerah dengan jumlah penduduk <15 tahun sebanyak 500.000 orang, maka wilayah tersebut harus dapat menemukan minimal 10 kasus AFP dalam satu tahun. Dengan kondisi Kota Palopo yang hanya memiliki jumlah penduduk dibawah 15 tahun berkisar 48 ribu orang pada tahun 2020, target penemuan AFP sebanyak 0 kasus dan itu tercapai. Kondisi ini juga memberikan gambaran, bahwa kemungkinan penyebaran polio atau gejala lainnya yang mirip polio di Kota Palopo sangat kecil.

Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani

Pneumonia adalah penyakit infeksi yang menyerang paru, sehingga menyebabkan kantung udara di dalam paru meradang dan membengkak. Kondisi kesehatan ini sering kali disebut dengan paru-paru basah, sebab paru bisa saja dipenuhi dengan air atau cairan lendir. Kondisi paru-paru basah ini dapat dialami oleh siapa pun. Namun pneumonia pada anak bisa sangat berbahaya dan menyebabkan kematian. Bahkan, badan kesehatan dunia (WHO) menyebutkan jika penyakit pneumonia adalah penyebab 16% kematian balita di dunia pada tahun 2015. Sementara, di Indonesia sendiri, dilansir dari CNN, penyakit pneumonia pada anak menyebabkan 2-3 balita yang meninggal setiap jamnya.

Tabel 2.70
Cakupan Balita Pneumonia Yang Ditangani
Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

No	Bidang Urusan	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah penderita pneumonia balita yang ditangani di suatu wilayah kerja pada kurun waktu 1 tahun	Orang	51	105	171	163	51
2.	Jumlah perkiraan penderita pneumonia balita di suatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama	Orang	1.618	1.696	1.736	1.772	1.811
	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	%	3,15	6,19	9,85	9,20	2,82

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2021

Meskipun persentasenya meningkat dari tahun ke tahun, tabel di atas menunjukkan cakupan penanganan balita yang diperkirakan menderita penyakit berbahaya seperti pneumonia di Kota Palopo masih sangat rendah. Pada tahun 2016, kinerjanya hanya berada pada angka 3,15% meskipun meningkat pada tahun 2018 yang mencapai 9,85%. Artinya pada tahun 2018, dari 100 kasus pnemunia, rata-rata hanya ditangani hanya 9-10 kasus. Pada tahun 2020 mengalami penurunan angka pada kisaran 2,82%. Pemerintah Kota Palopo melalui Dinas terkait bersama stake holder terkait perlu meningkatkan kinerja untuk menangani kasus pneumonia ini.

Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit yang sangat mudah sekali dalam penularannya. Seperti halnya penyakit flu biasa, dalam penyebarannya TBC juga melalui udara. Penyakit tuberkolosis sangat mematikan apabila tidak segera dilakukan penanganan. Di Indonesia, penanganan sejak dini sudah dilakukan dengan memberikan paket imunisasi BCG pada balita. Namun demikian, belum sepenuhnya Indonesia 100% terbebas dari penyakit ini.

Tabel 2.71
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA
Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wilayah kerja selama 1 bulan	Orang	241	243	250	415	300
2.	Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam kurun waktu yang sama	Orang	222	176	301	349	499

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
3	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	108,56	138,07	83,06	119	60,12

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2021

Tabel di atas menggambarkan bahwa meskipun jumlah penderita TBC BTA naik hampir setiap tahunnya, cakupan pelayanan dan pengobatan terhadap para penderita juga terus meningkat. Ini menunjukkan kinerja pelayanan untuk menangani kasus atau penderita TBC BTA sudah cukup baik. Angkanya melebihi 100% sebab juga terdapat pengidap TBC BTA dari luar Kota Palopo namun mendapat penanganan medis di Kota Palopo, sebagai salah satu daerah yang memiliki pusat layanan rujukan.

Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)

Adalah indikator yang menggambarkan tingkat penyebaran penyakit atau pengidap TBC paru per 100.000 penduduk Kota Palopo. Indikator ini untuk mengetahui perkembangan jumlah pengidap penyakit TBC di Kota Palopo.

Tabel 2.72
Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)
Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Banyaknya kasus penderita TBC (baru dan lama)	Orang	354	430	250	450	300
2.	Jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama	Orang	172.916	176.907	180.678	184.614	184.681
3	Tingkat prevalensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Orang	205	243	138	225	162

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2016, dari 100.000 penduduk Kota Palopo, terdapat 205 orang yang terjangkit atau menjadi pengidap penyakit TBC, jumlah ini menurun pada tahun 2020 menjadi 162 orang per 100.000 penduduk. Olehnya program program baik yang sifatnya pencegahan maupun pengobatan, mestinya menjadi fokus penanganan pemerintah Kota Palopo melalui Dinas terkait pada tahun tahun mendatang.

Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)

Adalah indikator yang menggambarkan kasus kematian pengidap TBC paru per 100.000 penduduk Kota Palopo. Semakin tinggi angka kasus ini semakin tinggi tingkat kematian karena penyakit TBC.

Tabel 2.73
Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)
Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah pasien TB yang meninggal	Orang	0	0	0	0	0
2.	Jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama	Orang	172.916	176.907	180.678	184.614	184.614
3	Presentase tingkat kematian karena	Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
	tuberkulosis (per 100.000 penduduk)						

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2021

Meski secara jumlah, pengidap TBC di Kota Palopo meningkat setiap tahunnya, namun kematian yang disebabkan oleh karena penyakit ini sepanjang 2013-2018 sama sekali tidak ada. Ini menunjukkan bahwa tindakan pengobatan yang dilaksanakan cukup efektif dalam mengobati para pasien. Kondisi ini juga menunjukkan pengobatan bagi para pasiennya dilakukan dengan standar operasional yang baik, sehingga kematian yang disebabkan oleh penyakit ini di Kota Palopo nihil.

Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis yang Terdeteksi Dalam Program DOTS

DOTS merupakan strategi penanggulangan Tuberkulosis di Rumah Sakit melalui pengobatan jangka pendek dengan pengawasan langsung. DOTS adalah tempat untuk konsultasi pasien TB. Penanggulangan Tuberkulosis merupakan program nasional yang harus dilaksanakan di seluruh Unit Pelayanan Kesehatan termasuk Rumah Sakit. Khusus bagi pelayanan pasien tuberkulosis di Rumah Sakit dilakukan dengan strategi DOTS.

Hal ini memerlukan pengelolaan yang lebih spesifik, karena dibutuhkan kedisiplinan dalam penerapan semua standar prosedur operasional yang ditetapkan, disamping itu perlu adanya koordinasi antar unit pelayanan dalam bentuk jejaring serta penerapan standar diagnosa dan terapi yang benar, dan dukungan yang kuat dari jajaran direksi rumah sakit berupa komitmen dalam pengelolaan penanggulangan TB. Semakin tinggi nilai indikatornya, menunjukkan bahwa kinerja program DOTS semakin baik.

Tabel 2.74
Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis yang Terdeteksi Dalam Program DOTS Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah pasien tuberkulosis BTA yang mendapat pengobatan melalui DOTS	Orang	354	430	250	415	299
2.	Jumlah pasien baru TB BTA paru yang diperkirakan ada dalam wilayah tertentu	Orang	222	176	301	454	499
3	Proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	%	159,46	244,32	83,06	91,41	59,92

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2021

Tabel di atas menggambarkan bahwa kinerja penanganan pasien TB dalam program DOTS sejak 2016 sampai dengan 2020 cenderung terus membaik. Tahun 2016, hanya 159,46% pasien TB BTA dalam program DOTS mendapatkan pengobatan dan 2020 angka menjadi 59,92% pasien TB BTA yang memperoleh pengobatan melalui program DOTS.

Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh Dalam Program DOTS

Fokus utama DOTS adalah penemuan dan penyembuhan pasien, prioritas diberikan kepada pasien TB tipe menular. Strategi ini akan memutuskan penularan TB dan dengan demikian menurunkan insiden TB di masyarakat. Menemukan dan menyembuhkan pasien merupakan cara terbaik dalam upaya pencegahan penularan TB. Semakin tinggi nilai indikatornya, menunjukkan bahwa kinerja program DOTS semakin baik.

Tabel 2.75
Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh Dalam Program DOTS
Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah pasien tuberkulosis BTA yang sembuh di suatu wilayah selama 1 tahun	Orang	159	154	114	66	165
2.	Jumlah pasien baru TB BTA paru yang diobati di wilayah dan pada kurun waktu yang sama	Orang	241	243	250	166	300
3	Proporsi kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	%	65,98	63,37	45,60	39,76	55,00

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2021

Tabel di atas menggambarkan bahwa kinerja program DOTS di Kota Palopo sepanjang tahun 2016-2020 mengalami fluktuatif. Kondisi ini mengindikasikan cukup banyaknya pasien TB yang tidak menjalankan prosedur pengobatan TB dalam program DOTS secara baik. Ini bisa dipengaruhi banyak faktor, terutama faktor internal pasien atau pengidap TB. Olehnya diperlukan advokasi dan sosialisasi serta edukasi yang lebih intensi dalam meningkatkan motivasi untuk sembuh serta mengikuti program pengobatan secara teratur bagi pasien atau pengidap TB.

Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Jumlah penderita penyakit DBD yang ditemukan pada tahun 2015 yaitu 280 kasus, yang ditangani sesuai SOP berjumlah 280 kasus. Pada tahun 2019, jumlah penderita penyakit DBD yang ditemukan dan yang ditangani sesuai SOP sebanyak 105 kasus. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD dari tahun 2015 sampai tahun 2020 mencapai 100 persen, hal ini dipengaruhi oleh keaktifan petugas kesehatan di masing – masing wilayah kerja.

Tabel 2.76
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD
Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP disatu wilayah kerja selama 1 tahun	Orang	366	74	121	105	23
2.	Jumlah penderita DBD yang ditemukan disatu wilayah dalam kurun waktu yang sama	Orang	366	74	121	105	23
3	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100	100	100

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2021

Penderita Diare yang Ditangani

Tabel 2.77
Penderita Diare yang Ditangani
Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

Kota Tulungagung Tahun 2016 - 2020						
Uraian	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani di sarana kesehatan dan kader di suatu wilayah tertentu dalam waktu 1 tahun (*)						
	Orang	3.384	3.287	3.736	3.736	1.833

Uraian	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah perkiraan penderita diare pada satu wilayah tertentu dalam waktu yang sama (10% dari angka kesakitan diare x jumlah penduduk) (**)						
	Orang	338	328	373	373	183
Jumlah Penduduk						
	Jiwa	168.894	172.916	176.907	180.678	184.614
Penderita diare yang ditangani						
	%	0.000058	0.000057	0.000058	0.000054	0.0991
	Per 100.000	6	6	6	5	99.09

Sumber Data : (*)Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2021, (**) Rumus Permendagri 86 Tahun 2017, (***) BPS Kota Palopo tahun 2021

Tabel di atas menggambarkan tingkat penanganan diare di Kota Palopo sepanjang tahun 2016-2019 cenderung stagnan. Jika pada tahun 2016, dari 100.000 penduduk Kota Palopo ditangani sebanyak 6 kasus diare, pada 2019, diare yang tertangani 5 kasus diare. Tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 99 kasus yang ditangani. Kedepan angka yang menjadi target persentase indikator ini harus ditekan.

Angka Kejadian Malaria

Tabel 2.78
Angka Kejadian Malaria
Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Penduduk yang menderita malaria pada tahun tertentu	Orang	287	226	182	114	51
2.	Jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama	Orang	172.916	176.907	180.678	184.614	184.681
3	Penderita malaria yang ditangani per 100.000	Per 100.000	166	128	101	62	27

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2021

Tabel di atas menunjukkan pada tahun 2016, dari 100.000 penduduk Kota Palopo terdapat sebanyak 166 kejadian malaria. Jumlah kasus mengalami penurunan sampai tahun 2020 dengan hanya menangani kasus sebanyak 27 per 100.000 penduduk. Ini menunjukkan kinerja penanggulangan angka malaria di Kota Palopo mulai menunjukkan kondisi yang lebih baik.

Tingkat Kematian Akibat Malaria

Tabel 2.79
Tingkat Kematian Akibat Malaria
Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah kematian tersangka malaria	Orang	0	0	0	0	0
2.	Jumlah penduduk beresiko pada kurun waktu 1 tahun	Orang	191	287	226	182	114
3	Tingkat kematian akibat malaria (1.000)	Per 1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa angka kematian akibat kasus malaria di Kota Palopo sepanjang tahun 2015-2020 per 1000 penduduk nihil. Ini menggambarkan bahwa penanganan pasien kasus malaria di Kota Palopo berhasil.

Proporsi Anak Balita yang Tidur Dengan Kelambu Berinsektisida

Tabel 2.80
Proporsi Anak Balita yang Tidur dengan Kelambu Berinsektisida
Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Banyaknya balita yang pada malam sebelumnya survei tidur menggunakan kelambu yang sudah diproteksi dengan insektisida	Orang	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
2.	Jumlah balita	Orang	16.178	16.963	17.355	17.724	18.109
3	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2021

Proporsi Anak Balita Dengan Demam yang Diobati Dengan Obat Anti Malaria yang Tepat

Tabel 2.81
Proporsi Anak Balita dengan Demam yang Diobati dengan Obat
Anti Malaria yang Tepat Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah penderita diobati dengan ACT dalam 1 tahun	Orang	24	34	10	30	49
2.	Jumlah penderita positif dalam 1 tahun	Orang	24	34	10	30	51
3	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	%	100	100	100	100	96

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2021

Prevalensi HIV/AIDS (persen) Dari Total Populasi

Prevalensi adalah seberapa sering suatu penyakit atau kondisi terjadi pada sekelompok orang, dalam hal ini adalah HIV AIDS. Atau dengan kata lain merupakan gambaran tentang frekwensi penderita lama dan baru yang ditemukan selama jangka waktu tertentu terhadap sekelompok populasi dalam waktu tertentu.

Tabel 2.82
Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari Total Populasi
Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah pasien HIV dan AIDS di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Orang	58	117	128	80	87
2.	Jumlah penduduk di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama	Orang	172.916	176.907	180.678	184.614	184.681
3	Prevalensi HIV/AIDS (persen)	%	0,000335	0,000661	0,000708	0,000433	0,000471

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
	dari total populasi						
4	Rasio per 100.000	per 100.000	34	66	71	43	47

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa periode 2016-2020 jumlah pengidap HIV AIDS di Kota Palopo meningkat. Jika 2016 hanya sebanyak 58 orang, tahun 2020 jumlahnya mencapai 87 orang. Dalam rasio per 100.000 penduduk, pada tahun 2016 terdapat rata-rata 4 kasus HIV AIDS, dan meningkat menjadi rata-rata 43 kasus per 100.000 penduduk pada tahun 2020. Kondisi ini memerlukan perhatian serius pemerintah sehingga jumlahnya setiap tahun seharusnya bisa ditekan.

Proporsi Jumlah Penduduk Usia 15 – 24 Tahun yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif Tentang HIV/AIDS

Indikator ini menggambarkan cakupan edukasi, sosialisasi tentang bahaya HIV/ AIDS di kalangan 15-24 tahun.

Tabel 2.83
Proporsi Jumlah Penduduk Usia 15 – 24 Tahun yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif Tentang HIV/AIDS Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah penduduk usia 15 – 24 tahun yang mempunyai pengetahuan komprehensif tentang bahaya penyakit HIV/AIDS di satu wilayah pada waktu tertentu	Orang	548	0	0	0	0
2.	Jumlah penduduk usia 15 – 24 tahun di satu wilayah pada waktu yang sama (*)	Orang	40.279	40.279	41.073	41.727	n/a
3	Proporsi jumlah penduduk usia 15 – 24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	%	1,36	0,00	0,00	0,00	n/a

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2021, (*) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Ini juga menunjukkan pelaksanaan program kegiatan yang sifatnya sosialisasi dan edukasi publik terutama bagi usia 15-24 tahun oleh Pemerintah Kota Palopo belum secara konsisten dan berkelanjutan. Kegiatan ini kadang dilaksanakan dan kadang pula tidak dilaksanakan. Pada tahun 2016, dari 10.000 penduduk usia 15-24 tahun hanya 136 orang yang mendapatkan sosialisasi HIV AIDS. Sementara disisi lain jumlah usia 15-24 tahun yang menjadi fokus sasaran edukasi, jumlahnya terus meningkat. Ini menjadi potensi meningkatnya ancaman bagi prevalensi HIV AIDS di Kota Palopo.

Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Palopo, menunjukkan cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin dari 100 persen pada tahun 2013 tetap menjadi 100 persen di tahun 2018. Hal ini diakibatkan jumlah kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan strata I meningkat dari 51.080 pada tahun 2013 menjadi 130.531 pada tahun 2018.

Informasi dari Dinas Kesehatan Kota Palopo menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2013-2018, tidak ada pasien miskin yang ditolak oleh fasilitas kesehatan yang ada di Kota Palopo. Pasien miskin yang berobat di fasilitas kesehatan di Kota Palopo telah ditanggung oleh

Pemerintah Kota Palopo. Sebab sejak tahun tersebut Pemerintah Kota Palopo membayar premi asuransi kesehatan bagi seluruh masyarakat miskin Kota Palopo.

Cakupan Kunjungan Bayi

Indikator ini menggambarkan tingkat kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan yang ada terutama bagi bayi yang baru lahir. Semakin tinggi nilai indikator ini, menunjukkan semakin tingginya kesadaran masyarakat akan kesehatan bayi yang ada.

Tabel 2.84
Cakupan Kunjungan Bayi
Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Jumlah kunjungan	2.638	2.982	3.029	3274	2794
2.	Seluruh bayi lahir hidup disatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama	Orang	2.755	2.959	3.029	3282	2945
3	Cakupan kunjungan bayi	%	95,75	100,78	100,00	99,76	94,87

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2020

Tabel di atas menggambarkan rentang waktu 2016-2020, tingkat kunjungan bayi ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pelayanan standar kesehatan, semakin membaik. Ini terkait erat dengan kesadaran masyarakat untuk memantau perkembangan kesehatan bayinya di sejumlah pusat kesehatan yang ada. Jumlah kunjungan bayi setiap tahunnya terus meningkat jika 2015 hanya sebanyak 2.638 pada tahun 2020 mencapai 2.794 kunjungan atau 94,87 % dari jumlah bayi yang lahir.

Cakupan Puskesmas

Tabel 2.85
Cakupan Puskesmas
Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah puskesmas	12	12	12	12	12
2.	Jumlah seluruh kecamatan	9	9	9	9	9
3	Cakupan puskesmas (%)	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh kecamatan yang ada di Kota Palopo memiliki minimal satu pusat kesehatan masyarakat. Bahkan sejak 2016-2020 ada kecamatan yang memiliki lebih dari satu puskesmas. Kondisi ini tentu diharapkan bisa meningkatkan cakupan dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat di Kota Palopo.

Cakupan Pembantu Puskesmas

Tabel 2.86
Cakupan Pembantu Puskesmas Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah pembantu puskesmas	22	29	30	30	30
2.	Jumlah seluruh kelurahan	48	48	48	48	48
3	Cakupan pembantu puskesmas (%)	45,83	60,42	62,50	62,50	62,50

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2021

Tabel di atas menunjukkan pada tahun 2016 hanya 45,83 % di Kota Palopo yang memiliki puskesmas pembantu. kondisi ini berlangsung sampai pada tahun 2016. Namun pada tahun 2017-2020 62,50 % kelurahan yang ada di Kota Palopo telah memiliki puskesmas pembantu. Ini menunjukkan semakin banyaknya jumlah puskesmas pembantu yang diharapkan bisa memperluas akses masyarakat terhadap sarana kesehatan sekaligus meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.

Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

Semakin tinggi nilai indikator ini menunjukkan semakin baiknya kesadaran ibu hamil untuk memeriksakan kesehatan dirinya dan calon bayinya pada sarana kesehatan yang ada.

Tabel 2.87
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4
Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan ante-natal K4 di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Orang	2.796	3.001	3.004	3.159	2.858
2.	Jumlah sasaran ibu hamil di suatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama	Orang	3.083	3.234	3.193	3.159	3.452
3	Cakupan kunjungan ibu hamil K4	%	90,69	92,80	94,08	100	82.79

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2021

Tabel di atas menggambarkan kesadaran ibu hamil untuk memeriksakan dirinya dan kesehatan bayinya semakin baik dari tahun ke tahun. Jika pada tahun 2016 sebesar 90,69 % terjadi penurunan pada tahun 2020 dengan cakupan kunjungan ibu hamil sebesar 82,79%.

Cakupan Pelayanan Nifas

Pelayanan ibu nifas merupakan pelayanan kesehatan sesuai standar pada ibu mulai 6 jam sampai 42 hari pasca persalinan oleh tenaga kesehatan. Masa nifas merupakan masa dimulai setelah kelahiran plasenta dan berakhir ketika alat kandung kembali seperti semula sebelum hamil, yang berlangsung selama 6 – 8 minggu atau dalam agama islam disebut 40 hari. Tujuan dari masa nifas yaitu untuk mengetahui kesejahtraan ibu dan bayi, baik dari kesehatan, kebersihan, nutrisi, pemberian ASI, tanda bahaya masa nifas, perdarahan, cara mencegah hipotermi pada bayi. Semakin tinggi nilai indikatornya semakin baik kesadaran ibu yang sudah melahirkan terhadap status kesehatan dirinya dan bayinya usai melahirkan.

Tabel 2.88
Cakupan Pelayanan Nifas
Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah peserta ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Orang	2.743	2.816	3.177	3.210	2.804
2.	Seluruh ibu nifas di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama	Orang	2.944	3.087	3.158	3.225	3.295
3	Cakupan pelayanan nifas	%	93,17	91,22	100,60	99,53	85,10

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2021

Tabel di atas menggambarkan tingkat kesadaran ibu usai melahirkan sepanjang 2016-2020 sudah cukup baik. Meski demikian data ini juga mengungkapkan masih adanya ibu yang

usai melahirkan namun tidak lagi memanfaatkan pelayanan kesehatan nifas. Olehnya masih dibutuhkan sosialisasi dan edukasi sehingga kesadaran ibu yang telah melahirkan untuk memantau perkembangan kesehatannya semakin baik di tahun mendatang

Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi yang Ditangani

Menurut World health Organization (WHO) Neonatus adalah bayi baru lahir hingga berumur 28 hari. Sementara menurut kemenkes 2015, adalah bayi yang baru lahir berusia 0-28 hari sejak dilahirkan. Umur ini sangat rentan terhadap berbagai macam gangguan kesehatan. Olehnya penanganan untuk mengatasi atau mencegah munculnya berbagai macam ancaman gangguan kesehatan sangat penting dilaksanakan.

Tabel 2.89
Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani
Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah neonatus dengan komplikasi yang tertangani	310	301	288	376	305
2.	Jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi yang ada	413	444	454	492	451
3	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (%)	75,06	67,79	63,44	76,42	67,63

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan bahwa 2016-2020 jumlah bayi yang lahir di Kota Palopo dengan kondisi neonatus beragam semakin meningkat setiap tahunnya. Tahun 2016 hanya 310, tahun 2020 sebanyak 305. Kondisi ini tentu membutuhkan penanganan yang serius terutama pada aspek pencegahan, dimana mengedukasi ibu hamil menjadi point penting dalam upaya tersebut. Melihat persentase penanganan, kinerja indikator ini cukup baik ditandai dengan meningkatnya angka kinerja penanganan bayi dengan komplikasi neonatus.

Cakupan Pelayanan Anak Balita

Tabel 2.90
Cakupan Pelayanan Anak Balita
Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan minimal 8 kali di satu wilayah kerja pada waktu tertentu	Orang	7.248	8.431	8.486	10.418	6.293
2.	Jumlah seluruh anak balita di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama	Orang	12.861	13.487	17.355	14.093	9.293
3	Cakupan pelayanan anak balita	%	56,36	62,51	48,90	73,92	68,14

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2021

Data di atas menunjukkan bahwa 2016-2020 cakupan pelayanan anak balita menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Per tahun terjadi peningkatan pelayanan terhadap anak balita. Ini menggambarkan semakin baiknya kesadaran para orang tua dalam memeriksakan kesehatan anak balitanya.

Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6 – 12 Bulan Keluarga Miskin

Indikator ini hanya mengukur pada rumah tangga miskin. Kemiskinan umumnya menjadi salah satu dari sekian banyak penyebab anak usia 6-12 tahun di keluarga miskin tidak pernah mendapatkan makanan pendamping ASI, sehingga terjadi kerawanan gizi. Olehnya

pemerintah melaksanakan program pemberian makanan pendamping ASI bagi rumah tangga miskin.

Tabel 2.91
Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6 – 12 Bulan
Keluarga Miskin Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah anak usia 6 – 24 bulan keluarga miskin yang mendapat MP ASI	Orang	564	507	339	290	1.495
2.	Jumlah seluruh anak usia 6 – 24 bulan keluarga miskin	Orang	564	507	339	290	1.921
3	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan keluarga miskin	%	100	100	100	100	77,82

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2021

Data di atas menunjukkan bahwa 2016-2019, semua anak berumur 6-12 tahun yang lahir dari keluarga miskin di Kota Palopo menerima makanan pendamping ASI. Tahun 2020 cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan keluarga miskin sebesar 77,82 % Ini membuktikan bahwa komitmen Pemkot Palopo untuk memperhatikan gizi bagi masyarakat miskin cukup baik.

Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat

Indikator ini menunjukkan langkah dan cakupan kemampuan pemerintah daerah dalam memeriksa status kesehatan seluruh siswa sekolah dasar pada tahun tertentu. Semakin tinggi angka indikator ini semakin baik cakupan pemeriksaan siswa sekolah yang ada setingkat sekolah dasar.

Tabel 2.92
Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat
Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah murid SD kelas 1 dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Orang	2.660	2.790	2.619	2.981	2.981
2.	Jumlah murid SD kelas 1 dan setingkat di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Orang	2.692	2.861	2.690	3.044	3.044
3	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	%	98,81	97,52	97,36	97,93	97,93

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2021

Data di atas menunjukkan bahwa 2016-2020, sebagian besar siswa sekolah dasar di Kota Palopo setiap tahunnya diperiksa status kesehatannya. Cakupan pemeriksaan mencakup 97,93 % siswa sekolah dasar yang ada. Ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Palopo menciptakan generasi yang sehat sejak pendidikan dasar.

Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin

Pelayanan bagi masyarakat miskin di Kota Palopo 2015-2020 telah mencakup semua pasien dari golongan tidak mampu. Besarnya persentase yang melebihi angka 100% disebabkan sangat banyaknya pasien masyarakat miskin dari kabupaten di sekitar Kota Palopo yang memanfaatkan sarana dan prasarana kesehatan rujukan yang ada di Kota Palopo yakni RSUD Sawerigading Rampoang.

Jumlah masyarakat miskin ini merupakan 40% masyarakat miskin yang berada pada desil paling bawah. Sejak BPJS berlaku, Dinas kesehatan tak bisa memisahkan data pasien miskin yang mengakses sarkes strata 1

Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS)

Tabel 2.93
Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS) Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pelayanan gawat darurat level 1	6	7	8	8	8
2.	Jumlah RS	6	7	8	8	8
3.	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) (%)	100	100	100	100	100

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2021

Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam

Indikator ini menggambarkan kecepatan pemerintah kota palopo merespon terjadinya sebuah Kejadian Luar Biasa (KLB) di wilayah Kota Palopo. Kecepatan merespon sebuah KLB adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam mengatasi KLB di sebuah daerah.

Kejadian Luar Biasa atau KLB merupakan suatu status yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia untuk mengelompokkan suatu peristiwa atau penyakit tertentu. Biasa nya penyakit tersebut lebih berpengaruh pada penyakit yang biasanya terjadi. Sehingga KLB dapat didefinisikan sebagai suatu peningkatan kasus yang berhubungan dengan penyakit, yang memiliki tingkatan yang sangat tinggi.

Tabel 2.94
Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah KLB di desa/kelurahan ditangani > 24 jam dalam periode tertentu	Kasus	4	0	3	0	2
2.	Jumlah KLB di desa/kelurahan yang terjadi pada periode yang sama	Kasus	4	0	3	0	2
3	Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100	0,00	100	0,00	100

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa pemerintah Kota Palopo memberikan respon yang sangat baik terhadap adanya KLB di wilayah administrasi Kota Palopo. Namun yang mesti diwaspadai adalah terjadinya KLB hampir setiap tahun di Kota Palopo.

2.1.3.1.3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.1.3.1.3.1. Pekerjaan Umum

Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Jumlah panjang jalan yang dimaksud dalam indicator ini, adalah total keseluruhan panjang jalan yang berada di wilayah Kota Palopo termasuk jaringan jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Jalan Negara yang ada

Kondisi jaringan jalan dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) golongan. Salah satunya adalah Jalan Kondisi Baik (B) yang didefinisikan sebagai semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi baik menurut kriteria teknis

(tingkat kerusakan $\leq 6\%$), sehingga arus lalu-lintas dapat berjalan lancar sesuai dengan kecepatan disain dan tidak ada hambatan yang disebabkan oleh kondisi jalan.

Tabel 2.95
Proporsi Panjang Jaringan Jalan
Berkondisi Baik 2016-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
a.	Panjang Jalan Berkondisi Baik (Km)	279.1	279.1	296.68	342.09	350.03
b.	Panjang Jalan Keseluruhan (Km)	502	502	503.16	503.16	503.16
c	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	55.60	55.6	58.96	67.99	69.57

Sumber data : Palopo Dalam Angka, 2020

Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk

Jumlah panjang jalan yang dimaksud dalam indikator ini, adalah total keseluruhan panjang jalan yang berada di wilayah Kota Palopo termasuk jaringan jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Jalan Negara yang ada.

Jaringan yang baik sangat mempengaruhi mobilitas dan aksesibilitas pergerakan di dalam jaringan tersebut. Pendekatan yang biasanya digunakan untuk perencanaan jaringan adalah pendekatan ekonomi, sosial, budaya serta pertahanan keamanan nasional dan tidak boleh melupakan hambatan fisik yang mungkin ditemui.

Di dalam sektor transportasi aksesibilitas adalah ukuran kemudahan untuk mencapai suatu tujuan, sehingga dikatakan kalau aksesibilitas tinggi adalah bila alternatif rute menuju suatu tempat banyak sehingga dapat dicapai dengan gampang dari beberapa tujuan.

Tabel 2.96
Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk
Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
a.	Jumlah panjang jalan (Jalan Negara + Jalan Propinsi + Jalan Kewenangan Pemkot)	502	503.16	503.16	503.16	317.34
b.	Jumlah penduduk	172.916	176.907	180.678	184.614	184.681
c	Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk (per 10.000)	29	28	28	27	17

Sumber Data : BPS Palopo Dalam Angka 2021

Persentase Kawasan Pemukiman yang Belum Dapat Dilalui Kendaraan Roda 4

Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Sementara pemukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan (UU No 1 Tahun 2011).

Indikator ini menggambarkan kondisi jalan untuk mengakses pemukiman masyarakat yang memperlihatkan konektifitas dan aksesibilitas sebuah kawasan pemukiman penduduk. Semakin besar nilai indikator ini semakin sulit pula aksesibilitas wilayah maupun transportasi penduduk yang bermukim di daerah tersebut.

Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (>40 Km/Jam)

Data panjang jalan dalam indikator ini dibatasi pada ruas jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Palopo, tidak termasuk jalan kewenangan Propinsi Sulawesi Selatan dan Jalan Negara. Jalan berkondisi baik dikategorikan jika mampu dilewati kendaraan roda empat dengan kecepatan di atas 40 Km/Jam. Hal ini mengindikasikan kualitas jalan dari keseluruhan panjang jalan.

Tabel 2.97
Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (>40 Km/Jam)
Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
a.	Panjang Jalan Berkondisi Baik yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Palopo (Km)	220.49	264.14	309.54	317.48	373.81
b.	Panjang Jalan Kewenangan Pemerintah Kota Palopo (Km)	443.39	443.39	443.39	443.39	443.39
c	Proporsi panjang jaringan jalan kewenangan Pemerintah Kota Palopo yang dalam kondisi baik (%)	49.73	59.57	69.81	71.60	84.3

Sumber Data : Palopo Dalam Angka 2021

Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 m)

Tabel 2.98
Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 m) Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
a.	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase (Km)	0,875	5,663	8,06	10,76	260.76
b.	Panjang seluruh jalan kabupaten (Km)	443,39	443,39	443,39	503,16	443.39
c	Persentase	0,20	1,28	1,79	2,14	58.81

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Palopo Tahun 2021

Data yang ditampilkan pada tabel di atas hanya data panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase yang lebarnya lebih dari 1,5 meter, sesuai indikator yang disebutkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Sebab masih terdapat ruas jalan lain di Kota Palopo yang memiliki trotoar dan drainase namun ukurannya lebih kecil daripada 1,5 meter.

Data pada tabel menunjukkan bahwa sampai pada tahun 2020, mencapai 58.81% jalan di Kota Palopo yang memiliki trotoar dan drainase selebar minimal 1,5 meter. Kondisi ini masih lebih baik dibandingkan dengan tahun 2016 yang berada pada angka 0,20%. Ini juga menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil ruas jalan di Kota Palopo yang memiliki saluran pembuangan air/drainase yang memadai dengan lebar minimal 1,5 meter.

Persentase Sempadan Jalan yang Dipakai Pedagang Kaki Lima atau Bangunan Rumah Liar

Tabel 2.99
Persentase Sempadan Jalan yang Dipakai Pedagang Kaki Lima
atau Bangunan Rumah Liar Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
a.	Panjang sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar (km)	-	-	-	-	-
b.	Panjang seluruh sempadan jalan kabupaten (km)	886.78	886.78	886,78	886,78	886,78
c	Persentase	-	-	-	-	

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Palopo Tahun 2021

Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Rumah Tinggal Bersanitasi adalah hunian yang memiliki fasilitas Tempat Buang Air Besar/Tinja). Rumah tinggal berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi, sebagai berikut: 1) Fasilitas air bersih, 2) Pembuangan air besar/tinja, 3) Pembuangan air limbah (air bekas) dan 4) pembuangan sampah. Sementara menurut UU No 1 Tahun 2011, rumah tinggal adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.

Tabel 2.100
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kota Palopo Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Rumah Tinggal berakses sanitasi	37,457	39.183	42.622	42.772	33.066
2	Jumlah Rumah Tinggal	42.262	43.167	44.209	44081	39.514
3	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	88.63	90.77	96,41	97,03	83,68

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palopo 2021

Data di atas menunjukkan rumah tinggal di Kota Palopo telah bersanitasi pada tahun 2020 sebanyak 83.68 %. Kondisi ini apabila dibandingkan tahun 2016, mengalami penurunan yang berada pada angka 88.63 %. Secara keseluruhan rumah tinggal bersanitasi di Kota Palopo mengalami peningkatan dalam waktu lima tahun terakhir.

Persentase Sempadan Sungai yang Dipakai Bangunan Liar

Tabel 2.101
Persentase Sempadan Sungai yang Dipakai Bangunan Liar
Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
a.	Panjang sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (km)	8.090,78	8.735,01	9.041,97	9.492,93	7.929,27
b.	Panjang seluruh sempadan sungai kabupaten (km)	18.947,97	18.947,97	18.947,97	18.947,97	18.947,97
c	Persentase (%)	42,70	46,10	47,72	50,10	41.85

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Palopo Tahun 2021

Data di atas menunjukkan bahwa sempadan sungai di Kota Palopo dari tahun ke tahun semakin banyak yang diakses oleh bangunan liar/tak berijin. Jika tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 7,4 % sempadan sungai yang diakses bangunan liar atau sepanjang 1.402,15 Km. Pada tahun 2020 jumlahnya mengalami penurunan menjadi

41.85% Kondisi ini menunjukkan perlunya meningkatkan kinerja penataan ruang agar sempadan sungai yang dipakai oleh bangunan liar semakin menurun.

Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik / Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat

Tabel 2.102
Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik / Pembuangan Aliran Air
Tidak Tersumbat Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
a.	Panjang drainase tersumbat pembuangan aliran air (km)	64,23	55,47	47,24	46,90	n/a
b.	Panjang seluruh drainase di Kota Palopo (km)	507,90	516,65	524,89	529,04	529.179
	Persentase	12,64	10,73	8,99	8,86	

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Palopo Tahun 2021

Data di atas menunjukkan kualitas dan fungsi drainase di Kota Palopo semakin menurun. Jika pada tahun 2016 terdapat 12,64 % drainase Kota Palopo yang kondisinya baik dalam artian tidak tersumbat, pada tahun 2020 hanya ada % drainase Kota Palopo yang kondisinya baik atau tidak tersumbat. Ini menunjukkan bahwa perlu ada upaya Pemerintah Kota Palopo dalam meningkatkan atau mengakselerasi program dan kegiatan penanganan drainase pada tahun mendatang.

Tidak Terjadi Genangan > 2 Kali Setahun

Tabel 2.103
Persentase Tidak Terjadi Genangan > 2 Kali Setahun
Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
a.	Luasan daerah yang tergenang (Ha)	0,306	0,214	0,078	11.85	8.5
b.	Luasan daerah rawan genangan atau berpotensi tergenang (Ha)	2,120	1,484	0,545	49.22	46
c.	Persentase (a/b x 100%)	14,43	14,42	14,31	24.08	18.47

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Palopo Tahun 2021

Data di atas menunjukkan bahwa perkembangan luas daerah yang tidak terjadi genangan di Kota Palopo stagnan atau berjalan di tempat. Sampai tahun 2020, hanya 18,47 % daerah di Kota Palopo yang tidak terjadi genangan lebih dari 2 kali dalam setahun. Ini menunjukkan hanya sebagian kecil daerah rawan genangan di Kota Palopo yang tidak terjadi genangan 2 kali dalam setahun.

Kemudian luas daerah yang tergenang lebih dari dua kali dalam setahun di Kota Palopo jauh berkurang pada tahun 2020 yang berada pada angka 8.5 Ha. Meski pada tahun 2016, luas daerah yang tergenang mencapai 0.306 Ha. Luasan daerah rawan genangan atau berpotensi tergenang di Kota Palopo juga berkurang dari 2,120 Ha pada tahun 2016 menurun menjadi 46 Ha pada tahun 2020. Pemerintah Kota Palopo menginginkan tidak ada lagi daerah yang tergenang di Kota Palopo pada tahun-tahun mendatang.

Persentase Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor.

Tabel 2.104
Persentase Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan
Aliran Sungai Rawan Longsor Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
a.	Jumlah lokasi pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor (Km)	1.071,94	1.074,93	1.164,07	1.242,70	18.671.71
b.	Jumlah seluruh wilayah rawan longsor (Km)	31.579,94	31.579,94	31.579,94	31.579,94	31.579,94
	Persentase (a/b x 100%)	3,39	3,40	3,69	5,05	59.13

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Palopo Tahun 2021

Data di atas menunjukkan pada tahun 2016 Pemerintah Kota Palopo baru mampu menangani 3.39 % wilayah aliran sungai rawan longsor/jalan penghubung rawan longsor, dengan membangun turap. Namun pada tahun 2020, persentase luas wilayah yang mampu ditangani meningkat menjadi 59.13 %, dan masih menyisakan 40.87 % wilayah rawan longsor baik aliran sungai maupun jalan penghubung yang belum tertangani atau memiliki turap.

Kondisi ini menunjukkan bahwa ancaman terjadinya musibah longsor pada daerah rawan termasuk pada lokasi jalan penghubung dan daerah aliran sungai di Kota Palopo potensinya masih sangat besar.

Persentase Irigasi Kota Dalam Kondisi Baik

Tabel 2.105
Persentase Irigasi Kota Dalam Kondisi Baik
Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
a.	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik (Ha)	522,39	678,05	743,29	667,77	707,71
b.	Luas irigasi kabupaten (Ha)	800	950,45	980,54	907,90	907,90
	Persentase (a/b x 100%)	65,30	71,34	75,80	73,55	77.95

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Palopo Tahun 2021

Data di atas menunjukkan bahwa luas irigasi di Kota Palopo yang berkategori baik dari tahun ke tahun semakin meningkat. Jika pada tahun 2016 pada angka 65.30 % pada tahun 2020 pada angka 77.95 %. Meski demikian data ini juga menunjukkan bahwa masih ada irigasi Kota Palopo yang kondisinya tidak baik dimana pada tahun 2020, luasnya masih mencapai 200,19 Ha. Angka inilah yang mestinya menjadi target kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ke depannya dalam melaksanakan program dan kegiatan keririgasan.

Rasio Jaringan Irigasi

Rasio jaringan irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya. Panjang jaringan irigasi meliputi jaringan primer, sekunder, tersier. Hal ini mengindikasikan ketersediaan saluran irigasi untuk kebutuhan budidaya pertanian.

Tabel 2.106
Persentase Rasio Jaringan Irigasi
Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
a.	Panjang Saluran Irigasi (Km)	47,296	54,406	72,210	73,721	75,005
b.	Luas Lahan Budidaya Pertanian (Sawah) (Ha)	800	907.90	907.90	907.90	907.90

c	Rasio Jaringan Irigasi (Per 1000 Ha)	59.12	59.93	76.54	81.20	82.61

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palopo 2018, Dinas Pertanian, Peternakan Perkebunan Kota Palopo 2021

Data di atas menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2016-2020, panjang irigasi untuk mengairi sawah seluas 1000 Ha di Kota Palopo meningkat. Jika tahun 2016 untuk 1000 Ha sawah hanya dilayani irigasi sepanjang 42,296 Km, pada tahun 2020 untuk luasan yang sama telah mampu dilayani jaringan irigasi sepanjang 74,005 Km. Meningkatnya cakupan irigasi terhadap lahan persawahan ini diharapkan mampu meningkatkan produktifitas lahan pertanian dan pada akhirnya menjadi salah satu faktor penghambat alih fungsi lahan pertanian terutama persawahan di Kota Palopo.

Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Tabel 2.107
Persentase Penduduk Berakses Air Minum
Di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
a.	Jumlah Penduduk Berakses Air Minum (jiwa)	148,725	165,284	171.359	176.521	175.646
b.	Jumlah Penduduk (jiwa)	172.916	176.907	180.678	184.614	184.681
	Persentase (a/b x 100%)	86.01	93,00	94,84	95,61	95.11

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palopo 2021

Data di atas menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2020, besaran penduduk Kota Palopo yang memiliki akses terhadap air minum sebanyak 95,11 %. Kondisi ini lebih baik dibandingkan tahun 2016 yang hanya berada pada angka 86.01 %. Meski demikian ini menunjukkan bahwa masih ada kurang lebih 4,89 % penduduk Kota Palopo yang belum memiliki akses air minum.

Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan

Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak adalah perbandingan antara rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum berkualitas (layak) dengan rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam persentase.

Air minum yang berkualitas (layak) adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur dan mata air yang tidak terlindung.

Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak adalah perbandingan antara rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum berkualitas (layak) dengan rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam persentase. Indikator ini digunakan untuk memantau akses penduduk terhadap sumber air berkualitas berdasarkan asumsi bahwa sumber air berkualitas menyediakan air yang aman untuk diminum bagi masyarakat. Semakin besar persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak menunjukkan semakin baiknya kondisi rumah tangga di suatu daerah.

Indikator ini digunakan untuk memantau akses penduduk terhadap sumber air berkualitas berdasarkan asumsi bahwa sumber air berkualitas menyediakan air yang aman untuk diminum bagi masyarakat. Semakin besar persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak menunjukkan semakin baiknya kondisi rumah tangga di suatu daerah.

Data pada tabel di bawah menunjukkan bahwa pada tahun 2015, jumlah penduduk Kota Palopo yang memiliki Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak sebanyak 144.100 jiwa atau sebesar 85.32 % dari jumlah penduduk atau dalam satuan rumah tangga sebanyak 26.341 Rumah Tangga atau 71,44 % dari total jumlah rumah tangga yang ada.

Kondisi ini kemudian jauh lebih membaik pada tahun 2018, dimana jumlah penduduk yang memiliki akses berkelanjutan terhadap air minum layak 171.359 jiwa atau 94,84% dari jumlah penduduk yang ada dalam satuan rumah tangga sebanyak 39.444 Rumah Tangga atau 94.49% dari total jumlah rumah tangga yang ada.

Tabel 2.108
Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

No	Sumber Air Bersih	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
A	Jumlah penduduk dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan						
1	Leding (Perpipaan)	RT	30,92 9	32680	36.22 4	38.16 2	
2	Keran Umum	RT	0	-	0	0	
3	Hydrant Umum	RT	0	-	0	67	
4	Terminal Air	RT	0	-	0	0	
5	Air Hujan	RT	0	-	0	0	
6	Mata air terlindungi	RT	1,080	1,158	744		
7	Sumur Terlindungi	RT	455	410	321		
8	Sumur (Bor/Pompa)	RT	0	-	0	0	
B	Jumlah Rumah Tangga dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan						
		RT	32.46 4	34.24 8	37.26 9	39.20 7	
C	Jumlah Rumah Tangga						
		RT	37.74 9	38.64 1	39.44 4	40.30 3	39.51 4
D	Persentase Rumah Tangga dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan						
		RT	86,00	88,63	94,49	97,28	
E	Jumlah Penduduk Kota Palopo yang memiliki akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan						
		Jiwa	148.7 25	165.2 84	171.3 59	176.5 21	175.6 46
F	Jumlah Penduduk Kota Palopo						
		Jiwa	172,9 16	176,9 07	180.6 78	184.6 14	184.6 81
G	Persentase Penduduk Kota Palopo yang memiliki akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan						
		Persen	86.01	93,43	94,84	95,61	95.11

Sumber Data : Olahan dari Data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palopo, BPS 2021

Persentase Areal Kawasan Kumuh

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman, permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Sementara Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

Tabel 2.109
Persentase Areal Kawasan Kumuh
Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

No	Bidang/Urusan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
a	Luas kawasan Kumuh (Ha)	42.58	32.08	20.85	3,85	427,36
b	Luas wilayah Kota Palopo (Ha)	2.529.90	2.529.90	2.529,90	2.529,90	252990
c	Persentase luas areal kawasan kumuh	1.60	1.20	0.82	0,15	0.16

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palopo 2021

Data di atas menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2016-2020, total luas kawasan kumuh yang telah ditangani sebanyak 384,78 Ha. Dari luas awal kawasan kumuh sebanyak 42.58 Ha pada tahun 2013, menjadi 427.36 Ha pada tahun 2020. Sehingga sampai pada tahun 2020 persentase luas areal kawasan kumuh Kota Palopo terhadap luas wilayah Kota Palopo, hanya tersisa 0,16 %.

Tersedianya Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan

Tabel 2.110
Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan
Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

No	Bidang/Urusan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
a	Volume sampah di perkotaan yang mengalami guna ulang, daur ulang, pengelolaan di tempat pengelolaan sampah sebelum masuk TPA (ton)	1189	3.614	1.376	1.387	
b	Total volume sampah (Ton)	35.674	37.427	34.171	33.699	
c	Persentase Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan (%)	3,3	3,5	4.02	4,11	

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palopo 2021

Data di atas menunjukkan pada tahun 2016, volume sampah yang berhasil dikurangi sebelum sampai ke tempat Pembuangan Akhir Sampah hanya sebanyak 981 ton atau sekitar 2,50% dari produksi sampah yang ada. Tahun 2019, volume sampah yang berhasil dikurangi meningkat menjadi 1.387 Ton atau sebanyak 4,11%.

Ini menunjukkan adanya progress pengurangan sampah di Kota Palopo yang semakin tahun semakin membaik. Artinya proses reduce, recycle dan reuse sampah di Kota Palopo berjalan sesuai yang diharapkan. Dampaknya sampah yang ke Tempat Pembuangan Akhir Sampah bisa dikurangi sehingga masa pakai/operasinya juga diharapkan semakin bertambah.

Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk

Indikator ini untuk mengetahui kapasitas tampung tempat pemakaman umum yang bisa diakses masyarakat Kota Palopo. Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk adalah jumlah daya tampung tempat. pemakaman umum per 1.000 jumlah penduduk.

Tabel 2.111
Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk
Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
a.	Total Luas Tempat Pemakaman Umum (ha)	28	28	28	28	28
b	Jumlah Lokasi Tempat Pemakaman Umum	15	15	15	15	15

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
c	Jumlah Penduduk	172.916	176.907	180.678	184.614	184.681
c	Rasio per 10.000 penduduk	1.62	1.58	1,55	1.52	1.52

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palopo 2021

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2020 untuk 10.000 penduduk Kota Palopo rata-rata hanya tersedia 1.52 Ha lahan pemakaman. Rasio ini menurun jika dibandingkan tahun 2016 dimana untuk 10.000 penduduk terdapat 1.62 Ha lahan pemakaman.

Pada tahun 2016 terdapat 28 titik lokasi pemakaman umum yang dikelola oleh Pemerintah Kota Palopo. Tahun 2016-2020 terdapat 15 lokasi pemakaman umum di Kota Palopo yang bisa diakses masyarakat umum. Kapasitas makan per Ha, diperkirakan mampu menyediakan sebanyak 4000-5000 kuburan.

Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk

Indikator ini untuk mengetahui kapasitas tampung rumah ibadah yang bisa diakses masyarakat Kota Palopo.

Tabel 2.112
Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk
Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
a.	Jumlah Tempat Ibadah	312	316	322	336	358
	Mesjid	187	191	193	202	221
	Mushola	47	47	52	52	67
	Gereja Protestan	70	70	69	74	59
	Gereja Katolik	5	5	5	5	8
	Vihara	2	2	2	2	2
	Kuil/Pura	1	1	1	1	1
b.	Jumlah Penduduk	172.916	176.907	180.678	184.614	184.681
c.	Rasio per 1000 penduduk	1,79	1,78	1,78	1.82	1.93

Sumber Data : Badan Pusat Statistik, 2021

Sesuai angka dalam tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2016, untuk 1000 penduduk Kota Palopo tersedia sebanyak 2 (pembulatan 1,79) tempat ibadah di Kota Palopo. Kondisi yang serupa juga terjadi pada tahun 2020, dimana hanya terdapat 2 tempat ibadah per 1000 penduduk Kota Palopo.

2.1.3.1.3.2. Penataan Ruang

Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

Hak Guna Bangunan atau HGB adalah hak untuk mengusahakan (mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah) tanah yang dikuasai langsung oleh negara, untuk jangka waktu tertentu. Sementara Hak Pengelolaan atau HPL menurut Menurut Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.

Sedangkan berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya, antara lain berupa perencanaan dan peruntukan tanah, penggunaan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, penyerahan bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dan atau bekerjasama dengan pihak ketiga.

Indikator ini mengindikasikan kemampuan Pemerintah Daerah Kota Palopo dalam memanfaatkan tanah yang berada dalam penguasaannya menjadi ruang terbuka hijau. Nilai

rasio yang semakin tinggi menunjukkan bahwa intensitas pemanfaatan tanah oleh pemerintah daerah untuk ruang terbuka hijau semakin baik.

Tabel 2.113
Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB
Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
a.	Luas ruang terbuka hijau (Ha)	1.169.23	1.170.72	1171.52	1.174.21	1.174.21
b.	Luas wilayah ber HPL/HGB (Ha)	n/a	n/a	n/a	31.8511	31.8.511
c	Rasio Ruang Terbuka Hijau				3.67	3.68

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Palopo Tahun 2021

Data di atas menunjukkan bahwa luas ruang terbuka hijau di Kota Palopo meningkat sejak tahun 2016. Jika pada tahun 2016 tersedianya ruang terbuka hijau sebanyak 1.169,23 Ha, pada tahun 2020 menjadi 1.174,21 Ha, atau bertambah sebanyak 4,98 Ha dalam lima tahun terakhir.

Luasan RTH Publik Sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan

Menurut Permendagri Nomor 1 Tahun 2007, jenis Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan terdiri dari : Taman kota, Taman wisata alam, Taman rekreasi, Taman lingkungan perumahan dan permukiman, Taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial, Taman hutan raya, Hutan kota, dan hutan lindung.

Sesuai Revisi Rencana Tata Ruang Kota Palopo, Ruang Terbuka Hijau Kota Palopo akan dilaksanakan sebagai berikut :

- RTH Publik tersebar di wilayah Kota Palopo direncanakan seluas 5.269,55 hektar atau sebesar 20,41%.
- RTH Private seluas 2.601,7 hektar atau sebesar 10,08%.

Tabel 2.114
Luasan RTH Publik Sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota/Kawasan
Perkotaan Kota Palopo Tahun 2016 – 2021

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
a.	Luasan RTH publik yang tersedia (ha)	1.169.23	1.170.72	1.171,81	1.174,21	1174.21
b.	Luasan RTH publik yang seharusnya tersedia di wilayah kota/kawasan perkotaan (Ha)	1.525.89	1.525.89	1.525,89	1.525,89	1325.89
c	Persentase Luasan RTH dari Luas Wilayah Kota (%)	76.63	76.72	76,79	76,95	76.95

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Palopo Tahun 2021

Angka dalam tabel di atas menunjukkan bahwa 76,95% target luasan RTH di Kota Palopo telah dicapai sampai dengan tahun 2020. Sisanya sebanyak 23,05% belum tercapai. Artinya pemerintah Kota Palopo masih harus membangun 151.68 Ha ruang terbuka hijau bagi publik untuk memenuhi target luasan RTH yang ada di dalam dokumen RT RW Kota Palopo.

Rasio Bangunan Ber-IMB Per Satuan Bangunan

Tabel 2.115
Rasio Bangunan Ber – IMB Per Satuan Bangunan
Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
a.	Jumlah bangunan ber IMB (Buah)	1.465	1.595	1.202	1.255	-
b.	Jumlah bangunan (Buah)	19227	19.629	21480	24488	28.305
c	Rasio Bangunan Ber-IMB Per Satuan Bangunan	0.1003	0.088	0.0779	0.0556	0.0535

d	Per 100 (%)	8.8	7.79	5.56	5.35	4.52

Sumber Data : SIPD Kota Palopo, Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Palopo Tahun 2021

2.1.3.1.4. Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Rasio Rumah Layak Huni

Rumah layak huni didefinisikan sebagai rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Derajat kelayakan rumah tempat tinggal diukur dari dua aspek yaitu (1) kualitas fisik rumah dan (2) kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah tempat tinggal diukur dengan 3 variabel, yaitu : jenis atap terluas, jenis dinding terluas dan jenis lantai terluas; sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan tiga variabel, yaitu: luas lantai per kapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar (WC). Jadi Rasio rumah layak huni adalah perbandingan jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk.

Tabel 2.116
Rasio Rumah Layak Huni
Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
a	Jumlah rumah layak huni	28.258	29.777	32.097	34.268	35.313
b	Jumlah penduduk	172.916	176.907	180.678	182.107	184.681
c	Rasio Rumah Layak Huni	0,163	0,168	0,178	0,188	0,191
d	Rasio Rumah Layak Huni Provinsi Sulsel (*)	0,22	0,19	0,19		

Sumber Data : Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Palopo Tahun 2021, () RKPD Sulsel 2019*

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah rumah layak huni di Kota Palopo sepanjang tahun 2016-2020 meningkat. Jika pada tahun 2016 hanya terdapat sebanyak 28.258 unit rumah layak huni, pada tahun 2020 jumlah rumah layak huni meningkat menjadi 35.313 unit.

Rasio rumah layak huni pada tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2016, per 1000 penduduk Kota Palopo hanya terdapat 163 unit rumah layak huni, kondisi ini terus membaik dimana pada tahun 2020 terdapat 191 unit rumah layak huni per 1000 penduduk Kota Palopo.

Jika satu rumah layak huni diasumsikan dihuni oleh lima orang penduduk, artinya pada tahun 2016 dari 1000 penduduk, hanya terdapat 815 orang penduduk yang tinggal di rumah layak huni, sisanya sebanyak 185 orang tinggal di rumah belum layak huni. Sementara di tahun 2020, untuk rasio 1000 penduduk, sebanyak 955 penduduk sudah tinggal di rumah layak huni, sisanya sebanyak 45 orang masih tinggal di rumah belum layak huni.

Meski demikian capaian rasio rumah layak huni ini masih berada di bawah angka rasio rumah layak huni Provinsi Sulawesi Selatan. Rasio rumah layak huni Sulsel yang pada tahun 2018 berada pada angka 0,19, tahun 2016 pada angka 0,22, tahun 2015 pada angka 0,21 dan 2014 sebesar 0,20. (Dok. RKPD Sulsel 2019). Salah satu upaya pemerintah Kota Palopo dalam meningkatkan indikator kinerja ini adalah melaksanakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Rasio Pemukiman Layak Huni

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Rasio permukiman layak huni adalah perbandingan luas permukiman layak huni dengan luas wilayah permukiman secara keseluruhan. Indikator ini mengukur proporsi luas permukiman yang layak huni terhadap keseluruhan luas permukiman. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin baik.

Tabel 2.117
Rasio Permukiman Layak Huni
Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
a	Luas area permukiman Layak Huni (Ha)	4.356	4.414	5.078	5.130	5.205
b	Luas area permukiman keseluruhan (Ha)	4.622	4.682	5.561	5.561	5.561
c	Rasio Permukiman Layak Huni (%)	94,24	94,28	91,32	92,26	93.59
d	Rasio Pemukiman Layak Huni Sulsel (%)	89	97	97		

Sumber Data : Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Palopo Tahun 2021 dan Dok. RKPD Sulsel 2019

Rasio permukiman layak huni dari tahun ke tahun semakin meningkat, seperti yang terlihat pada tabel, rasio permukiman layak huni tahun 2016 pada angka 94.24% menjadi 93.59%. Angka pada tabel di atas juga memperlihatkan bahwa pada tahun 2016, dari 100 Ha areal permukiman, terdapat 94.24 Ha areal permukiman layak huni. Jumlah ini meningkat menjadi 93.59 Ha per 100 Ha areal permukiman pada tahun 2020.

Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni

Tabel 2.118
Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni
Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
a.	Jumlah seluruh rumah layak huni disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Unit	28.258	29.777	33.856	34.378	35.313
b.	Jumlah rumah disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Unit	36.978	37.504	37.076	37.598	38.075
	Persentase	%	76,42	79,39	91,32	91,44	92.74

Sumber Data : Dinas Perumahan & Permukiman Tahun 2021

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2016, dari 100 rumah yang ada, sebanyak 76 rumah merupakan rumah layak huni. Kondisi ini terus membaik dimana pada tahun 2020 angkanya menjadi 92 rumah layak huni per 100 rumah. Ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah rumah layak huni di Kota Palopo sepanjang 2016-2020.

Keberadaan PP Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan perumahan bagi MBR dan Permendagri 55 Tahun 2017 tentang kemudahan memperoleh perizinan bagi pembangunan perumahan MBR juga berkontribusi terhadap pencapaian ini.

Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau

Tabel 2.119
Persentase Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau
Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
a.	Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu	Unit	3.412	3.928	4.390	4.912	5.389
b.	Jumlah rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu	Unit	4.012	4.265	4.727	5.249	5.726
	Persentase	%	85,04	92,10	92,87	93,58	94,11

Sumber Data : Dinas Perumahan & Permukiman Tahun 2021

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2016, dari 100 rumah tangga MBR yang ada, sebanyak 85 rumah tangga MBR telah menempati rumah layak huni. Kondisi ini terus membaik dimana pada tahun 2020 angkanya menjadi 94 rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni per 100 rumah tangga MBR. Ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni di Kota Palopo sepanjang 2016-2020. Artinya semakin banyak rumah tangga MBR yang mampu mengakses rumah layak huni.

Persentase Pemukiman yang Tertata

Persentase luas permukiman yang tertata adalah proporsi luas area permukiman yang sesuai dengan peruntukan berdasarkan rencana tata ruang satuan permukiman terhadap luas area permukiman keseluruhan.

Tabel 2.120
Persentase Pemukiman yang Tertata
Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
a.	Luas area permukiman tertata	Ha	4.535	4.647	4.703	4702.47	892,63
b.	Luas area permukiman keseluruhan	Ha	4.622	4682	4.738	4738	1.319
	Persentase	%	98,12	99,25	99,26	99.25	67.67

Sumber Data : Dinas Perumahan & Permukiman Tahun 2021

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2016, persentase luas permukiman yang tertata di Kota Palopo menurun dari 98,12 % menjadi 67.67% pada tahun 2020. Selain persentase, luas area permukiman yang tertata pun menurun dari 4.535 Ha pada tahun 2016 menjadi 892,63 Ha pada tahun 2020.

Angka dalam tabel juga menunjukkan dari 100 Ha area permukiman yang ada, pada tahun 2016 terdapat 98 Ha sudah tertata. Kondisi ini terus mengalami perubahan dimana pada tahun 2020 angkanya menjadi 67 Ha area permukiman yang tertata dari 100 Ha area permukiman yang ada. Ini menunjukkan luas area permukiman yang tertata mengalami fluktuatif, di Kota Palopo sepanjang 2016-2020.

Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh

Lingkungan permukiman kumuh adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman yang mengalami kekumuhan. Beberapa indikator yang dapat dipakai untuk mengetahui apakah sebuah kawasan atau lingkungan permukiman yang tergolong kumuh atau tidak adalah diantaranya dengan melihat : Tingkat kepadatan kawasan, Kepemilikan lahan dan bangunan serta kualitas sarana dan prasarana yang ada dalam kawasan tersebut. Penilaian tingkat kekumuhan harus terdiri dari kombinasi dari beberapa indikator kumuh yang ada.

Tabel 2.121
Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh
Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
a.	Luas lingkungan permukiman kumuh	Ha	42.58	32.08	20,85	3,85	426,37
b.	Luas wilayah Kota Palopo	Ha	2.529.90	2.529.90	2.529,90	2.529,90	247,52
	Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh	%	1.68	1.26	0,82	0,15	1,72

Sumber Data : Dinas Perumahan & Permukiman Tahun 2021, Keterangan : 1 Km2 = 100 Ha

Data di atas menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2020 persentase luas lingkungan permukiman kumuh terhadap total luas wilayah Kota Palopo sebanyak 1.72%%, meningkat jika dibandingkan kondisi tahun 2016 yang berada pada angka 1.68%.

Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan

Tabel 2.122
Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan
Kota Palopo Tahun 2016– 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
a.	Luasan permukiman kumuh yang tertangani	Ha	46.75	57.25	68,48	85,48	85,48

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
b.	Luas pemukiman kumuh	Ha	42.58	32.08	20,85	3,85	3,85
c	Persentase luasan pemukiman kumuh	%	45.15	35.91	23,34	4,31	4,31

Sumber Data : Dinas Perumahan & Permukiman Tahun 2021

Pada tahun 2016 luas pemukiman kumuh Kota Palopo adalah 42.58 Ha sesuai Surat Keputusan Walikota Palopo. Pada tahun 2016 sebanyak 46.75 Ha ditangani, sehingga Desember 2020 hanya tersisa 85.48 Ha pemukiman kumuh di Kota Palopo.

Pada tahun 2016, akumulasi pemukiman kumuh yang tertangani 46.75, sehingga luas pemukiman kumuh pada tahun 2016 berkurang menjadi 42.58 Ha. Di tahun 2018 kembali ditangani sebanyak 68.48 Ha, sehingga sampai Desember 2018, luas pemukiman kumuh di Kota Palopo hanya tersisa 20.34 Ha.

Angka dalam tabel di atas juga menunjukkan total luas pemukiman kumuh yang sudah ditangani Pemerintah Kota Palopo sepanjang tahun 2016-2020 sebanyak 85.48 Ha dari kondisi awal 46.75 Ha dan tersisa 3.85 Ha pada tahun 2020.

Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan

Tabel 2.123
Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan
Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
a.	Jumlah rumah tangga kumuh perkotaan	KK	2.931	2.864	776	189	8.770
b.	Jumlah seluruh rumah tangga	KK	37.749	38.641	39.778	39.773	40.303
	Persentase	%	7,76	7,41	1,95	0,48	21.8

Sumber Data : Dinas Perumahan & Permukiman Tahun 2021

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2016, dari 100 rumah tangga di Kota Palopo, terdapat sebanyak 7-8 rumah tangga kumuh perkotaan, kondisi ini semakin meningkat di tahun 2020, dimana terdapat 21 rumah tangga kumuh dari 100 rumah yang ada.

Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung Dengan PSU

Indikator ini menggambarkan keberadaan sarana dan prasarana utilitas umum (PSU) berupa kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian. Semakin tinggi nilai indikator ini semakin baik kualitas pemukiman masyarakat.

Tabel 2.124
Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung Dengan
PSU Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
a.	Jumlah lingkungan yang didukung PSU pada kurun waktu tertentu	Kawasan	27	30	32	41	46
b.	Jumlah lingkungan perumahan pada kurun waktu tertentu	Kawasan	135	143	150	159	164
	Persentase	%	20,00	20,98	21,33	25,79	28.05

Sumber Data : Dinas Perumahan & Permukiman Tahun 2021

Data di atas menunjukkan bahwa kawasan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan Prasarana Utilitas Umum (PSU) di Kota Palopo semakin berkurang. Jika pada tahun 2016 terdapat 20,00% lingkungan yang didukung PSU, pada tahun 2020 jumlah meningkat menjadi 28,05%, yang artinya bahwa dari 100 lingkungan perumahan yang ada pada tahun 2020, terdapat 28 lingkungan perumahan yang memiliki PSU.

2.1.3.1.5. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat: untuk memastikan tingkat keamanan dan ketertiban masyarakat. Ukuran yang digunakan untuk keamanan dan

ketertiban masyarakat adalah rasio polisi pamong praja terhadap setiap 10.000 penduduk, jumlah Linmas setiap 10.000 penduduk serta tersedianya pos siskamling per desa/kelurahan atau sebutan lain.

Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Tabel 2.125
Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)
Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
a.	100 orang Petugas Linmas di kabupaten/kota daerah pemekaran baru	Orang	96	96	96	96	96
b.	1 wilayah kerja kabupaten/kota	Kelurahan	48	48	48	48	48
	Persentase	%	200	200	200	200	200

Sumber Data : Dinas Satpol PP Kota Palopo, 2021.

Berdasarkan tabel di atas, jumlah petugas Linmas sebanyak 2 orang dalam 1 kelurahan. Beberapa persoalan yang dihadapi dalam peningkatan kinerja indikator ini sesuai data Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo Tahun 2018, adalah anggota Linmas yang tidak terdaftar, dimana personilnya selalu berganti atau tidak permanen, belum adanya insentif bulanan bagi linmas dan kurangnya event pembinaan bagi mereka. Beberapa hal yang menjadi solusi atas kondisi ini adalah memperbaiki tata kelola Linmas dengan menerbitkan surat keputusan kepala daerah tentang anggota Linmas sehingga lebih mengikat dan permanen, kemudian memberikan mereka insentif yang telah memiliki SK dan memberikan pelatihan dalam pelaksanaan tugas di masyarakat.

Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)

Tabel 2.126
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)
Palopo Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
a.	Pelanggaran K3 yang terselesaikan	215	186	169	153	150
b.	Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh SATPOL PP	233	208	184	160	158
	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%)	96,60	92,20	91,80	95,62	94,93

Sumber Data : Dinas SATPOL PP Kota Palopo Tahun 2021

Data di atas menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2016 – 2020, seluruh laporan pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo semuanya diselesaikan. Namun sesuai data Pol PP Kota Palopo, jumlah pelanggaran K3 yang mereka selesaikan jauh lebih banyak dari yang dilaporkan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa meski pelanggaran K3 tersebut tidak dilaporkan, jika ditemukan oleh Satuan Pol PP juga diselesaikan.

Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota

Angka dalam tabel menunjukkan bahwa cakupan jangkauan pelayanan bencana kebakaran di Kota Palopo meningkat. Jika tahun 2015, hanya 6,06%, tahun 2020 menjadi 10,08%. Artinya sampai dengan tahun 2019, dari 252,99 Km² luas Kota Palopo, yang masuk jangkauan manajemen kebakaran hanya 10 Km². Meski meningkat, kinerja cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kota Palopo ini ke depan harus lebih ditingkatkan mengingat cukup banyak daerah rawan kebakaran terutama di daerah padat penduduk dan perumahan.

Tabel 2.127
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota
Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
a.	Jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran	Km ²	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
b.	Luas wilayah kabupaten/kota	Km ²	247,50	247,50	252,99	252,99	252,99
	Persentase	%	9,09	9,09	10,08	10,08	10,08

Sumber Data : Dinas Pemadam Kebakaran & Penyelamatan Kota Palopo Tahun 2021

Tingkat Waktu Tanggap (*response time rate*) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Indikator tingkat waktu tanggap atau *response time rate* adalah indikator yang menggambarkan tingkat kesiapan petugas pemadam kebakaran untuk menangani kasus kebakaran yang terjadi. Semakin tinggi persentase indikator ini, menunjukkan semakin banyaknya kasus kebakaran yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit.

Tabel 2.128
Tingkat Waktu Tanggap (*response time rate*) Daerah Layanan Wilayah
Manajemen Kebakaran (WMK) Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
a.	Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit	Kasus	40	37	36	61	105
b.	Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK	Kasus	60	39	38	93	106
	Persentase	%	67,67	94,87	94,74	65,59	98,13

Sumber Data : Dinas Pemadam Kebakaran & Penyelamatan Kota Palopo Tahun 2021

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah kasus kebakaran yang ditangani kurang atau dalam waktu maksimal 15 menit, menurun. Pada tahun 2016, dari 60 kasus kebakaran, hanya 40 kasus yang ditangani kurang dalam waktu 15 menit, sementara di 2020, dari 106 kasus kebakaran, yang ditangani kurang atau maksimal 15 menit sebanyak 105 kasus. Ke depan angka yang menjadi target indikator ini harus lebih ditingkatkan.

Persentase Penegakan PERDA

Data pada tabel di bawah ini menunjukkan bahwa tingkat pelanggaran Perda di Kota Palopo semakin membaik. Jika tahun 2016 berada pada angka 97,70%, tahun 2020 menurun menjadi 94,93%. Ini menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap ketetapan Peraturan Daerah.

Tabel 2.129
Persentase Penegakan PERDA
Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
a.	Jumlah penyelesaian penegakan PERDA	215	186	169	153	150
b.	Jumlah pelanggaran PERDA	220	190	184	160	158
	Persentase penegakan PERDA (%)	97,70	97,90	91,80	95,62	94,93

Sumber Data : Dinas SATPOL PP Kota Palopo Tahun 2021

2.1.3.1.6. Bidang Urusan Sosial

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM, salah satunya adalah SPM Bidang Sosial.

Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial

Adalah indikator yang menggambarkan kemampuan Pemerintah dalam menangani Penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kota Palopo dengan memberikan bantuan sosial. Semakin tinggi persentase indikator ini, menunjukkan semakin baiknya penanganan PMKS di Kota Palopo.

Tabel 2.130
PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial
Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
a	Jumlah PMKS yang diberi bantuan	Jiwa	6.857	8.777	9.586	11.068	16.785
b	Jumlah PMKS yang menerima seharusnya menerima bantuan	Jiwa	18.556	18.388	18.586	20.134	24.304
c	Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial	%	36.95	47.73	51.58	54,97	69,06

Sumber Data : Dinas Sosial Kota Palopo Tahun 2021

Pada tahun 2016 jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang mendapat bantuan sebesar 36,68% dari jumlah PMKS yang ada, dan pada tahun 2016 jumlah tersebut menurun menjadi 36,95%, tetapi tahun berikutnya terus meningkat hingga tahun 2020 persentase pada angka 69.06%. Ini menunjukkan semakin tahun cakupan PMKS yang memperoleh bantuan sosial di Kota Palopo semakin meningkat. Meski demikian dalam konteks pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, capaian kinerja ini masih perlu ditingkatkan pada tahun mendatang.

Persentase PMKS yang Tertangani

Adalah indikator yang menggambarkan cakupan atau besaran penanganan PMKS yang ada di Kota Palopo. Penanganan PMKS bisa dalam bentuk kegiatan seperti langkah-langkah rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial bagi para PMKS. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin baik penanganan PMKS di Kota Palopo.

Tabel 2.131
Persentase PMKS yang Tertangani
Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
a	Jumlah PMKS yang tertangani	Jiwa	6.822	6.875	9.598	11.139	16.865
b	Jumlah PMKS yang ada	Jiwa	18.597	18.588	18.662	20.221	24.337
c	Persentase PMKS yang Tertangani	%	36.68	36.98	51,43	55,09	69,30

Sumber Data : Dinas Sosial Kota Palopo Tahun 2021

Data di atas menunjukkan besaran PMKS yang tertangani di Kota Palopo sejak 2016 – 2020 meningkat. Jika 2016 sebanyak 36.68 % artinya dari 100 orang PMKS, yang berhasil ditangani sebanyak 36 orang, namun 2020 berhasil ditangani 69 orang dari 100 orang PMKS yang ada. Meski demikian dalam konteks pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, capaian kinerja ini masih perlu ditingkatkan pada tahun mendatang.

Persentase PMKS Skala yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Adalah indikator yang menggambarkan besaran PMKS yang diberikan bantuan sandang pangan, papan dan kebutuhan dasar lainnya. Semakin tinggi indikator ini, semakin banyak

PMKS yang terancam kehidupannya akibat persoalan pemenuhan kebutuhan yang sangat mendasar.

Tabel 2.132
Persentase PMKS Skala yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
a	Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun	Jiwa	7.011	8.748	9.318	10.245	16.398
b	Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial	Jiwa	16.015	15.184	15.778	16.990	21.348
c	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	43,77	57,61	59,06	60,30	76,81

Sumber Data : Dinas Sosial Kota Palopo Tahun 2021

Data di atas menunjukkan besaran PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam satu tahun di Kota Palopo sejak 2016 – 2020 meningkat. Jika 2016 sebanyak 43,77% artinya dari 100 orang PMKS, sebanyak 43 orang telah diberikan bantuan sosial, tahun 2020 sebanyak 76 orang bisa diberikan bantuan sosial, dari 100 orang PMKS yang ada. Meski demikian dalam konteks pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, capaian kinerja ini masih perlu ditingkatkan pada tahun mendatang.

Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial

Tabel 2.133
Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
a	Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos						
		Unit	8	8	8	11	11
b	Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos						
		Unit	8	8	8	11	11
c	Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial						
		Unit	100	100	100	100	100

Sumber Data : Dinas Sosial Kota Palopo Tahun 2021

Target SPM untuk indikator ini sebesar 100%. Sejak tahun 2016 – 2020, target indikator ini telah dicapai. Ini menunjukkan bahwa semua panti sosial yang ada di Kota Palopo telah menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sosial bagi para penghuninya.

Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Tabel 2.134
Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)
yang Menyediakan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesejahteraan
Sosial Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
a	Jumlah WKBSM dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesos						
		Unit	48	48	48	48	48
b	Jumlah WKBSM dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos skala						
		Unit	48	48	48	48	48
c	Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang menyediakan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial						
		%	100	100	100	100	100

Sumber Data : Dinas Sosial Kota Palopo Tahun 2021

Data di atas menunjukkan bahwa semua WKSBM di Kota Palopo telah menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial. Dinas Sosial Kota Palopo sejak tahun 2016 – 2020, setiap tahunnya memberikan bantuan kepada kelompok WKSBM. Setiap tahunnya sebanyak 4 kelompok.

Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat

Tabel 2.135
Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama
Masa Tanggap Darurat Kota Palopo Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
a	Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun						
		Jiwa	223	139	347	100	562
b	Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun						
		Jiwa	39	223	139	347	100
c	Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat						
		%	100	100	100	100	100

Sumber Data : Dinas Sosial Kota Palopo Tahun 2021

Target SPM untuk indikator ini adalah 80% artinya dari 100 orang korban bencana 80 orang harus mendapatkan bantuan sosial selama masa tanggap darurat. Di Kota Palopo capaian indikator kinerja ini telah terpenuhi dan mencapai 100%.

Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi Dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap

Tabel 2.136
Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Menggunakan Sarana dan
Prasarana Tanggap Darurat Lengkap
Kota Palopo Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
a	Jumlah korban bencana dalam 1 (satu) tahun yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 tahun						
		Jiwa	42	0	0	0	0

b	Jumlah korban bencana yang seharusnya dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat skala						
		Jiwa	42	0	0	0	0
c	Presentase Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Menggunakan Sarana dan Prasarana Tanggap Darurat Lengkap						
		%	100	0	0	0	0

Sumber Data : Dinas Sosial Kota Palopo Tahun 201

Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial

Tabel 2.137
Presentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial di Kota Palopo Tahun 2016 – 2021

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
a	Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 tahun						
		Orang	39	138	248	672	387
b	Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam 1 (satu) tahun						
		Orang	992	1.162	1.260	1.622	2.305
c	Presentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial						
		%	3,93	11,88	19,68	41,43	16,79

Sumber Data : Dinas Sosial Kota Palopo Tahun 2021

Data di atas menunjukkan pada tahun 2020, dari 100 penyandang cacat di Kota Palopo 16 orang penyandang yang menerima jaminan sosial. Capaian indikator ini di Kota palopo sepanjang 2016 – 2020 masih sangat perlu diakselerasi.

2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Dasar

2.1.3.2.1. Bidang Urusan Tenaga Kerja

Angka Sengketa Pengusaha – Pekerja per Tahun

Tabel 2.138
Angka Sengketa Pengusaha – Pekerja Per Tahun di Kota Palopo 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Sengketa Pengusaha Pekerja	10	14	16	18	11
2	Jumlah Perusahaan	1.678	1.685	1.741	1887	1897
3	Jumlah Perusahaan ber TDP(*)	829	774	719	707	715
4	Angka Sengketa Pengusaha – Pekerja Per Tahun (x 1000)	6,0	8,3	9,19	9.5	0,57
5	Angka Sengketa Pengusaha – Pekerja di Perusahaan ber TDP Per Tahun (x 100)	1.21	1.81	2,23	2.55	1,5

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja, 2021

Data di atas menunjukkan sepanjang 2016-2020, kasus sengketa pekerja dan pengusaha di Kota Palopo meningkat. Jika tahun 2016, dari 1000 perusahaan yang ada, rata-

rata jumlah kasus sengketa ketenagakerjaan antara pekerja dan perusahaan sebanyak 6 kasus, pada tahun 2020 sisa kasus.

Besaran Kasus yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)

Indikator ini menggambarkan besaran sengketa antara pengusaha dan pekerja yang berhasil diselesaikan dengan perjanjian bersama. Semakin tinggi nilai indikator ini artinya semakin banyak sengketa/perselisihan antara buruh/pekerja dan pengusaha yang diselesaikan melalui kesempatan dan musyawarah.

Tabel 2.139
Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)
di Kota Palopo Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	8	10	11	2	11
2	Kasus yang Dicatat/Dilaporkan	10	14	15	18	11
3	Besaran Kasus Yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (%)	80	71	73	11	100

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo Tahun 2021

Data di atas menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2016-2020 besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama menurun, jika 2016 sebanyak 80% tahun 2020 besaran kasus yang diselesaikan mencapai 100% 11%.

Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan

Tabel 2.140
Pencari Kerja yang Ditempatkan
di Kota Palopo Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
a.	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	Org	78	121	718	1.072	412
b.	Jumlah pencari kerja yang mendaftar	Org	2.491	2.664	2.74	2.018	2.085
Pencari Kerja yang ditempatkan (a/b)		%	3,13	4,54	26,20	53,12	24,97

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo, 2021

Data di atas menunjukkan bahwa, dari 100 orang pencari kerja yang mendaftar, pada tahun 2016 hanya 3 orang tenaga kerja yang ditempatkan. Kondisinya jauh berbeda terjadi pada tahun 2020, dimana 25 orang tenaga kerja yang ditempatkan.

Keselamatan dan Perlindungan

Indikator ini menggambarkan besaran perusahaan yang memperhatikan dan menerapkan prinsip keselamatan dan perlindungan bagi pekerjanya. Semakin tinggi angka indikator ini semakin banyak cakupan tenaga kerja yang dilindungi keselamatan dan keamanan kerjanya.

Tabel 2.141
Persentase Keselamatan dan Perlindungan
Kota Palopo Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Perusahaan yang menerapkan K3	Buah	406	420	431	478	482
2	Jumlah Perusahaan	Buah	1.678	1.689	1.700	1.887	1.897
3	Persentase Keselamatan & Perlindungan (x 100)	%	24	25	25	25,3	25,4

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo Tahun 2021

Data di atas menunjukkan pada tahun 2016, dari 100 perusahaan yang ada, hanya 24% perusahaan yang menerapkan prinsip keselamatan dan perlindungan bagi tenaga kerjanya. Kondisi ini berlangsung cukup stagnan sampai tahun 2020. Dimana rata-rata kinerja indikator ini hanya 24-25%. Jika dilihat dari jumlah, angka cenderung meningkat dari tahun ke tahun.

Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek

Indikator ini menggambarkan cakupan pekerja yang menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak jumlah pekerja/buruh yang dijamin jaminan sosial bidang ketenagakerjaannya.

Tabel 2. 142
Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek
di Kota Palopo Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Jamsostek	Orang	10.383	10.478	11.438	13.765	13.765
2	Jumlah Buruh/Pekerja	Orang	28.337	28.377	29.337	25.105	31.210
3	Besaran Pekerja/Buruh Peserta Jamsostek	Persen	37	37	39	54.82	44

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo, 2021

Data di atas menunjukkan persentase buruh pekerja untuk menjadi peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Palopo dalam lima tahun terakhir terus meningkat. Ini menggambarkan adanya kesadaran pekerja untuk menjadi bagian dalam program jaminan kesejahteraan sosial ketenagakerjaan ini.

Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah

Indikator ini menggambarkan pengaruh kebijakan pemerintah daerah terhadap angka perselisihan buruh dan pengusaha. Semakin tinggi nilai indikator ini, menunjukkan semakin dinamisnya kondisi ketenagakerjaan di daerah.

Besaran Pemeriksaan Perusahaan

Indikator yang menunjukkan cakupan perusahaan yang diperiksa dalam menerapkan prinsip prinsip sesuai UU ketenagakerjaan. Semakin tinggi nilai indikator ini, menunjukkan semakin tingginya komitmen pemerintah dan perusahaan memenuhi hak dan kewajibannya bagi para pekerja dan buruh.

Tabel 2.143
Persentase Pemeriksaan Perusahaan
di Kota Palopo Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah perusahaan yang telah diperiksa	Buah	8	6	8	8	65
2	Jumlah perusahaan terdaftar (ber TDP) (*)	Buah	961	829	825	707	715
3	Persentase Pemeriksaan Perusahaan	%	0,87	0,67	0,97	1.13	9,1

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo Tahun

Data diatas menunjukkan bahwa besaran pemeriksaan perusahaan di Kota Palopo sepanjang 2016-2020 masih sangat rendah. Tahun 2016, rasio menunjukkan dari 100 perusahaan hanya 1 perusahaan yang diperiksa, kondisi yang tak jauh berbeda dengan tahun 2020. Ini menunjukkan belum optimalnya pengawasan pada sejumlah perusahaan di Kota Palopo.

Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan

Indikator ini menggambarkan besaran perusahaan yang menggunakan peralatan di perusahaannya namun tetap memperhatikan prinsip prinsip keamanan kerja dan perlindungan bagi tenaga kerjanya. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin baik bagi keamanan kerja bagi para karyawannya.

Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi

Indikator ini memberikan gambaran proporsi tenaga kerja di Kota Palopo yang memiliki keterampilan kompetensi kerja setelah mendapatkan pelatihan. Umumnya hambatan utama untuk meningkatkan kapasitas tenaga kerja (seperti memiliki lebih banyak tenaga kerja terampil) adalah rendahnya akses ke pendidikan menengah berbasis vokasi, apalagi dengan kondisi Kota Palopo dimana sebagian besar angkatan kerja merupakan lulusan SMA/SMK sederajat. Indikator ini akan berdampak pada tingkat produktifitas tenaga kerja yang ada dalam menghasilkan nilai tambah produk barang atau jasa.

Tabel 2.144
Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis
Kompetensi di Kota Palopo Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
a.	Jumlah tenaga kerja yang dilatih	Orang	16	88	102	236	0
b.	Jumlah pendaftar pelatihan berbasis kompetensi	Orang	280	305	319	508	0
c.	Persentase	%	5.71	28.85	31,97	46,45	0

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo, 2021

Data di atas menunjukkan besaran tenaga kerja yang dilatih dengan berbasis kompetensi meningkat sepanjang tahun 2016-2020. Jika pada tahun 2016 berada pada angka 5.71% pada tahun 2020 tidak .

Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat

Indikator ini menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat dalam skala komunitas dalam pelatihan ketenagakerjaan. Semakin nilai indikator ini, semakin banyak komunitas komunitas tenaga kerja yang siap kerja di sebuah daerah.

Tabel 2.145
Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat di Kota Palopo Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
a.	Jumlah tenaga kerja yang dilatih	Orang	16	32	35	0	0
b.	Jumlah pendaftar pelatihan berbasis masyarakat	Orang	270	286	289	0	0
	Persentase	%	5.92	11.2	12,10	0	0

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo Tahun 2021

Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan

Tabel 2.146
Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan di Kota Palopo Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
a.	Jumlah tenaga kerja yang dilatih	Orang	64	20	18	0	0
b.	Jumlah pendaftar pelatihan kewirausahaan	Orang	175	343	341	0	0
	Persentase	%	36.60	5.83	5,28	0	0

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo Tahun 2021

Data di atas menunjukkan persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan oleh dinas tenaga kerja semakin menurun. Jika pada tahun 2016 berada pada angka 36.60%, pada tahun 2020 menjadi 0%.

2.1.3.2.2. Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Tabel 2.147
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
a.	Pekerja perempuan di lembaga pemerintah	Orang	2.933	2.902	2.811	2.795	6.652
b.	Jumlah pekerja perempuan	Orang	25.711	26.563	26.532	30135	n/a
c	Persentase	%	11,40	10,92	10,59	9.27	

Sumber Data : BPS Kota Palopo dan Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kota Palopo Tahun 2021

Data di atas menunjukkan partisipasi perempuan di lembaga pemerintah sejak tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016 pada angka 11.40% sementara di 2019 pada angka 9.27%.

Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPR

Tabel 2.148
Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPR di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
a.	Jumlah kursi DPR yang	Orang	5	5	5	7	7

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
	diduduki perempuan						
b.	Jumlah total kursi di keanggotaan DPRD	Orang	25	25	25	25	25
c	Persentase	%	20	20	20	28	28.00

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kota Palopo Tahun 2021

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah perempuan yang bekerja di lembaga legislatif Kota Palopo periode 2016-2020. Dalam 2 periode pemilihan legislatif, jumlah perempuan yang duduk menjadi anggota DPRD Kota Palopo sebanyak 7 orang dengan persentase 28% dari jumlah keseluruhan anggota DPRD Kota Palopo.

Kondisi ini masih berada di atas capaian nasional dimana hanya 17,32% perempuan yang duduk di lembaga legislatif, termasuk provinsi yang hanya pada angka 17,6%. Jika dibandingkan dengan target pencapaian SDGs yang pada tahun 2030 menargetkan 30% perempuan duduk menjadi anggota lembaga legislatif, Kota Palopo ke depan, paling tidak harus memiliki 8 orang anggota legislatif dari kalangan perempuan.

Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta

Tabel 2.149
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
a.	Pekerja perempuan di lembaga swasta	Orang	801	840	886	412	407
b.	Jumlah pekerja perempuan	Orang	25.711	26.563	26.609	30.135	n/a
C	Persentase	%	3.12	3.16	3,33	1.37	

Sumber Data : BPS Kota Palopo 2019

Data di atas menunjukkan partisipasi perempuan di lembaga swasta sejak tahun 2016-2020 meningkat. Pada tahun 2016 pada angka 3,12% sementara di 2020 pada angka %. Kondisi ini selaras dengan data partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, yang sejak tahun 2016-2020 menurun.

Artinya pekerja perempuan lebih banyak mengakses lapangan kerja di sektor swasta dari pada lembaga pemerintahan di Kota Palopo. Beberapa lapangan usaha swasta yang banyak diakses oleh pekerja perempuan adalah lapangan usaha perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi serta lapangan usaha jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan.

Rasio KDRT

Tabel 2.150
Rasio KDRT di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
a.	Jumlah KDRT	Kasus	22	10	8	8	2
b.	Jumlah rumah tangga	KK	37.749	38.641	39.444	40.303	n/a
c	Rasio KDRT	Per 10.000	6	3	2	1	

Sumber Data : BPS Kota Palopo dan Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kota Palopo Tahun 2021

Data di atas menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2015-2019, kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kota Palopo menurun. Jika pada tahun 2015, dari 10.000 rumah tangga terdapat sebanyak 5 kasus KDRT, sementara di 2020 jumlahnya menurun menjadi 1 kasus.

Jumlah Tenaga Kerja di Bawah Umur

Persentase tenaga kerja di bawah umur adalah proporsi pekerja anak usia 5-14 tahun terhadap jumlah pekerja usia 5 tahun ke atas. Semakin tinggi nilai indikator ini mengindikasikan masih lemahnya perlindungan anak. Anak dianggap masih memiliki nilai ekonomi dan seringkali anak dieksploitasi.

Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Tabel 2.151
Persentase Jumlah Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
a.	Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan	Orang	19122	26226	26694	30135	
b.	Jumlah angkatan kerja perempuan	Orang	n/a	28506	29998	32953	
c.	Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%		92.00%	88.99%	91.45%	

Sumber Data : BPS Kota Palopo dan Data Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kota Palopo

Dari aspek gender, tabel diatas juga menunjukkan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan sepanjang 2016-2020 di Kota Palopo terus meningkat, dari 89.71% di 2015 menjadi 91.45% di 2019.

Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu

Tabel 2.152
Persentase Laporan Pengaduan ke Unit Pelayanan Terpadu
Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
a.	Jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu	Laporan	32	36	36	11	13
b.	Jumlah laporan/pengaduan yang masuk ke unit pelayanan terpadu	Laporan	145	149	149	11	13
	Persentase	%	22.07	24,16	24.16	100	100

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kota Palopo Tahun 2021

Data di atas menunjukkan bahwa tingkat penanganan pengaduan atau laporan kasus perempuan atau anak korban kekerasan di Kota Palopo menurun. Jika tahun 2016, laporan ditindaklanjuti sebanyak 32 aduan. Sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 semua laporan/pengaduan telah ditindaklanjuti.

Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus – Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Tabel 2.153
Persentase Penegakan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
a.	Jumlah perkara diputuskan pengadilan dengan dasar perundang – undangan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak	Perkara	74	87	96	2	3
b.	Jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidangkan	Perkara	74	87	96	2	3
	Persentase	%	100	100	100	100	100

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kota Palopo Tahun 2021

Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Tabel 2.154
Persentase Pemulangan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
a.	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pemulangan	Orang	49	31	36	1	10
b.	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang tercatat di UPT	Orang	254	145	150	11	13
	Persentase	%	19.29	21.38	24,00	9,09	76.92

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kota Palopo Tahun 2021

Rasio APM Perempuan/Laki – Laki di SD

Tabel 2.155
APM dan APK Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Palopo Tahun 2019 - 2020

Jenjang Pendidikan Educational Level	Angka Partisipasi Murni (APM) Net Participation Rates		Angka Partisipasi Kasar (APK) Gross Participation Rates	
	2019	2020	2019	2020
SD/MI Elementary School	99,44	99,61	105,99	104,62
SMP/MTs Lower Secondary School	78,11	78,33	84,82	87,87
SMA/SMK/MA Upper Secondary School	67,40	67,62	100,74	107,53

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Palopo 2019

2.1.3.2.3. Bidang Urusan Pangan

Ketersediaan Pangan Utama

Tabel 2.156
Persentase Ketersediaan Pangan Utama
di Kota Palopo Tahun 2014 – 2018

Rata-rata Palopo Tahun 2014 - 2020							
No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
a.	Rata – rata jumlah ketersediaan pangan utama per Tahun						
		Kg	17,774.4 4	19,466.0 0	34,568.7 5	42,545	67,560.8 9
b.	Jumlah penduduk						
		Orang	172,916	176,907	176,907	184,614	184,614
c	Jumlah Konsumsi Rill						
		Kg	17,130.1 2	16,721.0 0	18,332.5 5	106.2	103.1
d	Persentase Ketersediaan Pangan Utama Per Jumlah Penduduk						
		%	10.28	11.00	19.54	23.05	36.60
e	Persentase Ketersediaan Pangan Utama Per Jumlah Konsumsi Rill						
		%	103.76	116.42	188.56	40.061,2 1	65.529,4 8

Sumber Data : Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo Tahun 2021

Data di atas menunjukkan bahwa angka ketersediaan bahan pangan utama di Kota Palopo meningkat sepanjang tahun 2016 – 2020. Pada tahun 2016, untuk 100 jiwa penduduk Kota Palopo, rata-rata tersedia 9,56 Kg pangan utama, sementara di 2018 tersedia sebanyak 19,54 Kg bahan pangan utama per 100 jiwa penduduk Kota Palopo. Jika dibandingkan dengan tingkat konsumsi riil, angka ketersediaan pangan utama juga meningkat. Jika pada tahun 2014 pada angka 94,50 %, pada tahun 2018 berada pada angka 188,56 %.

Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita

Tabel 2.157
Persentase Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita
di Kota Palopo Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
a	Ketersediaan pangan/kapita/hari x Kandungan Kalori x BDD	Kkal/ka pita/hari	21,301	20,128	38.650	39.81	24.42
b	Koefisien	Angka	100	100	100	100	100
1	Ketersediaan energi	Kkal/ka pita/hari	2.130,1	2.012,8	3.865	3.981,0	2.442,0
a	Ketersediaan pangan/kapita/hari x Kandungan Protein x BDD	Kkal/ka pita/hari	689	691	1.019,6	1.041.5	978.4
b	Koefisien	Angka	100	100	100	100	100
2	Ketersediaan Protein	gram/kapita/hari	68.9	69.1	101,96	104,15	97,84
3	Ketersediaan Energi dan Protein per Kapita	(kkal/ka pita/hari)	2.199	2.082	3.966	4.085	2.540

Sumber Data : Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo Tahun 2021,
RAD Pangan dan Gizi Kota Palopo 2016-2020

Food and Agriculture Organization atau FAO mensyaratkan untuk ketersediaan energi minimal adalah sebesar 2200 kkal/kapita/hari dan protein sebesar 54 gram/kapita/hari. Sementara standar Indonesia 2000-2100 kkal/kapita/hari. Kondisi ini menunjukkan bahwa kondisi ketersediaan energi dan protein Kota Palopo sepanjang tahun 2016-2020 sudah berada diatas standar minimal FAO.

Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

Tabel 2.158
Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan
Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
a.	Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi di pedagang pengumpul di satu tempat sesuai standar yang berlaku dalam kurun waktu tertentu						
	Sampel		9	9	13	32	16
b.	Jumlah total sampel pangan yang diperdagangkan pengumpul di suatu wilayah menurut ukuran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu						
	Sampel		12	11	18	37	17
	Persentase		75	82	72	86	94

Sumber Data : Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo Tahun 2021

2.1.3.2.4. Bidang Urusan Pertanahan

Persentase Luas Lahan Bersertifikat

Persentase luas lahan bersertifikat adalah proporsi jumlah luas lahan bersertifikat (HGB, HGU, HM, HPL) terhadap luas wilayah daratan. Indikator pertanahan untuk mengetahui tertib administrasi sebagai kepastian dalam kepemilikan tanah.

Tabel 2.159
Persentase Luas Lahan Bersertifikat di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
a.	Jumlah luas lahan bersertifikat	Km2	3,23	3,77	5,43	70,43	71,07
b.	Jumlah luas wilayah	Km2	247,52	247,52	249,18	247,52	247,5
	Persentase	%	1,31	1,52	2,17	28,46	28,72

Sumber Data : Dinas Pertanahan Kota Palopo Tahun 2021

Tabel di atas menunjukkan sebagian besar lahan di wilayah Kota Palopo belum bersertifikat. Sampai tahun 2020 hanya 28,72 % wilayah Kota Palopo yang memiliki bukti hak kepemilikan. Meskipun jika dibandingkan pada tahun 2016, jumlah luas wilayah yang telah bersertifikat sudah mengalami peningkatan dari 1,31 %.

Data dalam tabel juga menunjukkan bahwa dari 100 Km2 wilayah Kota Palopo, hanya 28,72 Km2 yang bersertifikat sampai pada tahun 2020. Oleh karena itu Pemerintah Kota Palopo harus lebih memberikan akses dan melaksanakan advokasi masyarakat tentang pentingnya bukti legalisasi kepemilikan tanah.

Penyelesaian Kasus Tanah Negara

Tabel 2.160
Persentase Penyelesaian Kasus Tanah Negara di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
a.	Jumlah kasus yang diselesaikan	Kasus	0	0	1	4	3
b.	Jumlah kasus yang terdaftar	Kasus	4	4	4	14	11
	Persentase	%	0,00	0,00	25	28,57	27,27

Sumber Data : Dinas Pertanahan Kota Palopo Tahun 2021

Penyelesaian Izin Lokasi

Tabel 2.161
Persentase Penyelesaian Izin Lokasi
di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
a.	Jumlah ijin lokasi	Buah	1	0	0	2	1
b.	Permohonan ijin lokasi	Buah	1	1	1	2	1
c.	Persentase	%	100	0	0	100	100

Sumber Data : Dinas Pertanahan Kota Palopo Tahun 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa persentase penyelesaian izin lokasi di Kota Palopo sepanjang tahun 2016-2020 masih fluktuatif. Pada tahun 2016 menjadi 100% dan tahun 2017-2018 0% atau belum ada satupun permohonan izin lokasi yang diterbitkan izin lokasinya. Tahun 2020 kembali menjadi 100%.

2.1.3.2.5. Bidang Urusan Lingkungan Hidup

Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota

Tabel 2.162
Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota
di Kota Palopo Tahun 2016 - 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Tersusunnya RPPLH kabupaten/Kota	Belum Tersedia	Belum Tersedia	Belum Tersedia	Belum Tersedia	Belum Tersedia

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan Kota Palopo Tahun 2021

Terintegrasinya RPPLH Dalam Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota

Tabel 2.163
Terintegrasinya RPPLH Dalam Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota
di Kota Palopo Tahun 2016 - 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/Kota	Belum Tersedia	Belum Tersedia	Belum Tersedia	Belum Tersedia	Belum Tersedia

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan Kota Palopo Tahun 2021

Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah Provinsi

Tabel 2.164
Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah Provinsi
di Kota Palopo Tahun 2016 - 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	-	Ada (KLHS Revisi RTRW	-	-	-

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan Kota Palopo Tahun 2021

Penyelenggaraan KLHS dilaksanakan untuk menjamin Kebijakan rencana Program (K/R/P) mengintegrasikan pembangunan berkelanjutan. Sepanjang 2013-2018, Pemerintah Kota Palopo hanya 3 kali menyelenggarakan KLHS yang menghasilkan 3 dokumen yakni KLHS RTRW pada tahun 2013, KLHS Kawasan Pesisir dan KLHS revisi RT RW Kota Palopo 2012-2032.

Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air

Tabel 2.165
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air
Kota Palopo Tahun 2016 - 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Hasil pengukuran indeks kualitas air	Cemar ringan	Cemar ringan	Cemar ringan	Cemar ringan	Cemar ringan

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan Kota Palopo Tahun 2021

Kondisi di atas menunjukkan bahwa kualitas air secara umum di wilayah Kota Palopo masih dalam batas kewajaran. Sepanjang 2015 – 2019, hasil pengukuran indeks kualitas air di Kota Palopo berada dalam kategori cemar ringan. Data ini diperoleh dengan mengambil sampel air di beberapa sungai dan saluran air/drainase.

Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara

Tabel 2.166
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara
Kota Palopo Tahun 2016 - 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Hasil pengukuran indeks kualitas udara	Sangat baik	Unggul	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan Kota Palopo Tahun 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa kualitas udara di Kota Palopo pada tahun 2017, kondisinya lebih baik dibandingkan tahun 2015 – 2016. Sesuai hasil uji di UPTD Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo, kualitas udara pada tahun 2015 – 2016 berkategori sangat baik, tahun 2017 berada pada kategori unggul. Namun tahun 2018 – 2020 kembali berada pada kategori sangat baik.

Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Tabel 2.167
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan
Kota Palopo Tahun 2016- 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Hasil pengukuran indeks kualitas tutupan lahan	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan Kota Palopo Tahun 2021

Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Data pada tabel di bawah menunjukkan sepanjang tahun 2016 – 2020, masih lebih banyak pelaku usaha di Kota Palopo yang belum taat terhadap kepemilikan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH. Sampai tahun 2020, masih terdapat 95,67% yang belum taat atas izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH. Data ini juga menunjukkan jumlah pelaku usaha yang taat, masih berfluktuatif, meski cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun.

Tabel 2.168
Persentase Ketaatan Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH
di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
a.	Jumlah ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari izin yang	Izin	1109	1161	1578	1759	1315

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
	diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota Palopo yang ditangani						
b.	Total penanggung jawab usaha dana atau kegiatan yang dibina dan diawasi terhadap izin lingkungan , izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota Palopo	Pihak	432	432	653	645	57
	Persentase	%	38,95	37,20	24,16	27,27	4.33

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan Kota Palopo Tahun 2021

Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup

Tabel 2.169
Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
a.	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Kali	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan Kota Palopo Tahun 2021

Pemerintah Kota Palopo sampai tahun 2020 belum pernah memberikan apresiasi apapun kepada lembaga atau pihak manapun, terkait pengelolaan lingkungan hidup.

Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kota Palopo, Lokasi Usaha dan Dampaknya di Daerah Kota Palopo

Tabel 2.170
Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditangani di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
a.	Pengaduan masyarakat yang ditangani	Buah	7	11	13	10	7
b.	Total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi	Buah	7	11	13	10	7
	Persentase	%	100	100	100	100	100

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan bahwa penanganan pengaduan masyarakat terkait pengelolaan lingkungan di Kota Palopo sepanjang tahun 2016 – 2020, sangat baik. Semua pengaduan yang disampaikan atau dilaporkan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Palopo. Ini mengindikasikan Pemerintah Kota Palopo sangat merespon isu-isu di masyarakat yang terkait dengan persoalan lingkungan.

Timbulan Sampah yang Ditangani

Tabel 2.171
Persentase Timbulan Sampah yang Ditangani di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
a.	Volume timbulan sampah yang ditangani	(Ton)	31.047	33.040	30.409	30.419	29.437,25

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
b.	Jumlah total timbunan sampah	(Ton)	35.674	37.427	34.171	33.699	33.215
	Persentase	%	87,02	88,28	88.90	90,26	88,63

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan Kota Palopo Tahun 2021

Dari data di atas, menunjukkan bahwa persentase volume timbunan sampah yang ditangani dari tahun 2016 – 2020 semakin meningkat. Ini menunjukkan kinerja penanganan sampah di Kota Palopo, membaik. Jika pada tahun 2016 hanya mampu menangani 87,02% timbunan sampah. Tahun 2020, berada pada angka 88,636%.

Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi Melalui 3R

Tabel 2.172

Persentase Sampah yang Terkurangi Melalui 3R di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
a	Jumlah Timbunan Sampah yang ditangani (Ton)	Ton	35.674	37.427	34.171	33.699	29.437,25
b	Jumlah yang tertangani di TPS 3R setara	Ton	1.189	1.334	1.376	1.387	1.401
c	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R (b/a)	%	3,33	3,56	4,02	4,11	91,2

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan Kota Palopo Tahun 2021

Jumlah sampah yang tertangani di TPS 3R adalah sampah yang terkurangi melalui 3R adalah jumlah sampah yang dikelola melalui aktifitas 3R seperti bank sampah, pusat daur ulang, pengomposan, dan lain-lain dan tidak diangkut ke TPA atau dibuang ke lingkungan.

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah sampah seperti ini meningkat sejak 2016 ke 2020. Ini menunjukkan bahwa peran TPS 3R di Kota Palopo berjalan cukup baik. Jika pada tahun 2016 TPS 3R hanya mampu menangani sebanyak 1.189 Ton, tahun 2020 mampu menangani 1.401 Ton sampah. Ini menunjukkan bahwa beberapa strategi 3R dalam pengurangan sampah yang masuk TPA, seperti bank sampah, pusat daur ulang, pengomposan, cukup baik.

Dampaknya jumlah sampah yang terangkut ke TPA dari tahun ke tahun di Kota Palopo semakin berkurang, sehingga masa pakai TPA bisa lebih panjang/lama. Sebab akan semakin menurunkan beban tampung yang akan diterima oleh TPAS Kota Palopo yang ada di Kelurahan Mancani.

Persentase Cakupan Area Pelayanan

Tabel 2.173

Persentase Cakupan Area Pelayanan di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
a.	Luas area pelayanan pengelolaan sampah	km ² /ha	151,72	159,01	166,27	167,89	201.56
b.	Luas area Kota Palopo	km ² /ha	247,52	247,52	247,52	247,52	247.52
	Persentase	%	61	64	67	67,83	80.52

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan Kota Palopo Tahun 2021

Data di atas menunjukkan bahwa luas area pelayanan sampah dari tahun ke tahun meningkat. Jika tahun 2016 hanya 61% wilayah Kota Palopo yang terlayani, tahun 2020 wilayah Kota Palopo sudah dijangkau pelayanan sampah sebanyak 80.52%.

Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani

Tabel 2.174
Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani
di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
a.	Jumlah sampah yang tertangani	Meter Kubik (ton)	26.381	29.405	30.601	29.325	18.487,25
b.	Total jumlah timbunan sampah di Kota Palopo	Meter Kubik (ton)	35.674	37.427	34.171	33.699	38.823,96
	Persentase	%	73,95	78,56	89,55	87,02	47.62

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan Kota Palopo Tahun 2021

Dari data di atas, menunjukkan bahwa persentase volume timbunan sampah yang ditangani dari tahun 2016 – 2019 semakin meningkat. Ini menunjukkan kinerja penanganan sampah di Kota Palopo, membaik. Jika pada tahun 2016 hanya mampu menangani 73,95% timbunan sampah. Tahun 2020, mengalami penurunan dan berada pada angka 47,62%.

Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kota Palopo

Tabel 2.175
Operasionalisasi TPA/TPST/SPA
di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
a.	Nilai TPA (Program Adipura) ≥ 71	75,65	77,81	79,46	-	-

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan Kota Palopo Tahun 2021

Data di atas menunjukkan bahwa nilai predikat Tempat Pembuangan Sampah Kota Palopo semakin menunjukkan peningkatan ke arah lebih baik. Jika pada tahun 2016 hanya pada angka 75,65, pada tahun 2018 menjadi 79,46. Untuk tahun 2020 belum diumumkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

2.1.3.2.6. Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk

Tabel 2.176
Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk
di Kota Palopo Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
a.	Jumlah penduduk usia >17 yang ber KTP	Orang	108.634	114.080	122.053	117.965	117.983
b.	Jumlah penduduk usia >17 atau telah menikah	Orang	138.174	145.476	130.842	125.420	126.650
c.	Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk	Orang	0,79	0,78	0,65	0,67	0,69
d.	Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk per 100	Orang	79	78	65	67	69

Sumber Data : Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kota Palopo Tahun 2021

Data di atas menunjukkan bahwa tahun 2016 dari 100 penduduk Kota Palopo, sebanyak 79 orang telah penduduk wajib KTP. Sedangkan tahun 2020 sebanyak 69 orang.

Rasio Bayi Berakte Kelahiran

Tabel 2.177
Rasio Bayi Berakte Kelahiran
di Kota Palopo Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
a.	Bayi Berakte Kelahiran	Orang	2.609	1.397	1.323	2.183	4.382
b.	Jumlah bayi	Orang	2.977	2310	1.569	2.305	4.512
c	Rasio Bayi Berakte Kelahiran	Rasio	0.88	0.605	0,84	0,94	0,97
d	Rasio Bayi Berakte Kelahiran per 100	Per 100	87.64	60.48	84,32	94	97

Sumber Data : Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kota Palopo Tahun 2021

Data di atas menunjukkan bahwa tahun 2016 dari 100 balita yang lahir, sebanyak 87 bayi telah memiliki akte kelahiran. Pada tahun 2020 mengalami peningkatan dari 100 bayi lahir, sebesar 97 bayi yang memiliki akte kelahiran.

Rasio Pasangan Berakte Nikah

Tabel 2.178
Rasio Pasangan Berakte Nikah
di Kota Palopo Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
a.	Jumlah pasangan nikah berakte nikah	Pasang	14.867	16.116	17.274	14.867	14.967
b.	Jumlah keseluruhan pasangan nikah	Pasang	40.003	42.856	38.930	38.882	38.439
c.	Rasio Pasangan Berakte Nikah	Rasio	0,37	0,38	0,44	0,38	0.39
d	Rasio Pasangan Berakte Nikah per 100	Per 100	37	38	44	38	39

Sumber Data : Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kota Palopo Tahun 2021

Data di atas menunjukkan bahwa tahun 2016 dari 100 penduduk yang menikah, hanya 37 pasangan yang memiliki akte nikah. Kondisi ini jauh lebih baik dari tahun 2018 dimana dari 100 pasangan nikah 44 pasangan yang resmi memiliki akte nikah, tetapi kembali mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 39 pasangan yang resmi memiliki akte nikah.

Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi

Tabel 2.179
Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi
di Kota Palopo Tahun 2016 - 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi	Ada	Aada	Ada	Ada	Ada

Sumber Data : Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kota Palopo Tahun 2021

Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK

Tabel 2.180
Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK
di Kota Palopo Tahun 2016 - 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah

Sumber Data : Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kota Palopo Tahun 2021

Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Tabel 2.181
Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
di Kota Palopo Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
a.	Jumlah KTP ber NIK yang diterbitkan	Lembar	109.003	114.080	122.053	117.695	117.983
b.	Jumlah penduduk wajib KTP	Jiwa	138.174	138.174	130.843	125.420	126.650
	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	78,89	82,56	93,28	93,84	93,16

Sumber Data : Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kota Palopo Tahun 2021

Data di atas menunjukkan tahun 2020 sebanyak 93,16 % penduduk Kota Palopo yang wajib memiliki KTP sudah ber KTP, sehingga tersisa 6,14 % penduduk wajib ber KTP namun belum memiliki KTP. Kondisi ini jauh lebih baik dibandingkan tahun 2016 dimana hanya 78,89 % penduduk wajib KTP yang memiliki KTP.

Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran

Tabel 2.182
Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran
di Kota Palopo Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
a.	Jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutan (#)	Orang	2.755	2.959	3.006	1.811	4.102
b.	Jumlah kelahiran di tahun bersangkutan (@)	Orang	2.755	2.959	3.006	1.811	4.102
	Persentase	%	100	100	100	100	100

Sumber Data : Dinas Kesehatan 2020 (@) dan Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kota Palopo Tahun 2020(#)

Data di atas menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2016 - 2020, cakupan penerbitan akta kelahiran di Kota Palopo sudah mencapai 100% ini menunjukkan bahwa semua bayi yang lahir pada tahun tersebut, pada tahun itu juga langsung memiliki akte kelahiran.

2.1.3.2.7. Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan

Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang Baik

Tabel 2.183
Persentase Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang Baik di Kota Palopo Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
a.	Jumlah kantor pemerintahan kelurahan yang baik	Kantor	47	47	48	48	48
b.	Jumlah seluruh pemerintahan Kelurahan	Kelurahan	48	48	48	48	48
Persentase		Persen	97,92	97,92	100	100	100

Sumber Data : Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Palopo Tahun 2021

Data di atas menunjukkan bahwa sampai pada tahun 2020 tidak ada lagi kantor kelurahan di wilayah Kota Palopo yang kondisinya kurang baik.

Rata – Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Tabel 2.184
Rata – Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kota Palopo Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
a.	Jumlah kelompok binaan LPM	Kelompok	48	48	48	48	48
b.	Jumlah LPM	Kelompok	48	48	48	48	48
Rata-rata		Kelompok	1	1	1	1	1

Sumber Data : Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Palopo Tahun 2021

Data di atas menunjukkan bahwa tiap kelurahan di Kota Palopo rata-rata memiliki 1 lembaga pemberdayaan masyarakat. Jumlah LPM ini tidak mengalami penambahan selama 5 tahun.

Rata – Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK

Data di bawah ini menunjukkan bahwa pada tahun 2017, 1 PKK di Kota Palopo membina sebanyak 2-3 kelompok binaan. Kelompok binaan PKK ini antara lain adalah Dasawisma dan BKMT di tingkat kelurahan.

Tabel 2.185
Rata – Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Kota Palopo Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
a.	Jumlah kelompok binaan PKK	Kelompok	-	145	145	145	145
b.	Jumlah PKK	Unit	58	58	58	58	58
Rata - rata				2,5	2,5	2,5	2,5

Sumber Data : Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Palopo Tahun 2021

Persentase LSM Aktif

Tabel 2.186
Persentase LSM Aktif di Kota Palopo Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
a.	Jumlah LSM aktif	Buah	2	1	0	1	3
b.	Jumlah LSM	Buah	36	36	36	36	38
Persentase		%	5,55	2,77	0	2,77	7,89

Sumber Data : Badan kesbang Linmas Kota Palopo Tahun 2021

Sesuai data dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palopo, sebagian besar LSM di Kota Palopo sampai dengan tahun 2020, tidak aktif. Jumlah LSM yang aktif tersebut berdasarkan laporan yang disampaikan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palopo.

Persentase LPM Berprestasi

Tabel 2.187
Persentase LPM Berprestasi di Kota Palopo Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
a.	Jumlah LPM berprestasi	Buah	-	2	2	2	2
b.	Jumlah LPM	Buah	-	48	48	48	48
Persentase		%		4,17	4,17	4,17	4,17

Sumber Data : Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Palopo Tahun 2021

Sesuai data dari Bag. Pemberdayaan Masyarakat & Kelurahan Setda Kota Palopo, pada tahun 2020 hanya 4,17% atau 2 LPM di Kota Palopo yang berprestasi. Jumlah relatif masih sedikit dibanding jumlah seluruh LPM yang ada di Kota Palopo.

Persentase PKK Aktif

Tabel 2.188
Persentase PKK Aktif di Kota Palopo Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
a.	Jumlah PKK aktif	Unit	58	58	58	58	58
b.	Jumlah PKK	Unit	58	58	58	58	58
Persentase		%	100	100	100	100	100

Sumber Data : Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Palopo Tahun 2021

Sesuai data Bagian Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Kota Palopo, dari 58 PKK yang ada di Kota Palopo terdiri dari 9 PKK Kecamatan dan 48 PKK Kelurahan

Persentase Posyandu Aktif

Tabel 2.189
Persentase Posyandu Aktif di Kota Palopo Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah posyandu aktif	Buah	147	147	149	149	149
b.	Total posyandu	Buah	147	147	149	149	149
Persentase		%	100	100	100	100	100

Sumber Data : Bag. Pemberdayaan Masyarakat & Kelurahan Setda dan Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2015-2019, Posyandu di Kota Palopo 100% berfungsi aktif melakukan pembinaan kesehatan masyarakat. Selain itu, data di atas

juga menunjukkan bahwa terjadi penambahan 2 unit Posyandu dari 147 unit di tahun 2016 menjadi 149 di tahun 2017.

2.1.3.2.8. Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

Angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk pertahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk tahun dasar.

Tabel 2.190
Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)
Kota Palopo Tahun 2016 - 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	2,38	2,31	2,13	2,18	2,17

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Palopo Tahun 2021

Dokumen Rancangan Induk Pengendalian Penduduk dengan 5 Aspek

Adalah indikator yang menunjukkan adanya dokumen Rancangan Induk Pengendalian Penduduk pada pemerintah daerah. Indikator ini menunjukkan adanya garnd desain pada level pemerintah daerah dalam mengendalikan laju peetumbuhan penduduk dan scenario penanganannya.

Tabel 2.191
Dokumen Rancangan Induk Pengendalian Penduduk
Kota Palopo Tahun 2016 - 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Dokumen Rancangan Induk Pengendalian Penduduk (ada/tidak)	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kota Palopo Tahun 2020

Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB

Tabel 2.192
Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Berperan Aktif Dalam
Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB
di Kota Palopo Tahun 2016 - 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Perangkat Daerah yang berperan aktif di kampung KB	16	16	16	18	19
Jumlah semua perangkat daerah	40	49	49	49	49
Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam Pembangunan Daerah melalui Kampung KB	40,00	32,65	32,65	36,73	38,77

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kota Palopo Tahun 2021

Program Kampung KB baru terbentuk pada tahun 2015. Jumlah kampung KB yang berada di Kota Palopo pada tahun 2016 sebanyak 1 kampung KB, pada tahun 2020 sebanyak ... kampung KB.

Perangkat daerah yang berperan aktif di Kampung KB Kota Palopo sejak tahun 2016 - 2020 mengalami peningkatan. Pada Tahun 2016 perangkat daerah yang ikut terlibat dalam sebanyak 16 perangkat daerah dan pada tahun 2020 sudah melibatkan 19 perangkat daerah.

Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga

Tabel 2.193
Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga
di Kota Palopo Tahun 2016 - 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah anak (Orang)	66.155	62.376	62.433	61.121	n/a
Jumlah keluarga	34.660	34.786	34.843	34.925	n/a
Rata-rata jumlah anak per keluarga	2	2	2	2	n/a

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kota Palopo Tahun 2021

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa program Keluarga Berencana di Kota Palopo berhasil mengendalikan pertumbuhan penduduk. Data menunjukkan sepanjang tahun 2016 - 2019, rata-rata jumlah anak per keluarga di Kota Palopo hanya 2 orang. Ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan program pengendalian penduduk terutama dalam ber KB berhasil.

Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 - 49

Tabel 2.194
Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 - 49
di Kota Palopo Tahun 2016 - 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah peserta KB aktif	16.873	17.774	18.226	16.973	16.879
Jumlah pasangan usia subur	23.181	23.802	24.254	22.411	22.326
Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	72,79	74,67	75,15	75,73	75,60

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kota Palopo Tahun 2021

Data di atas menunjukkan bahwa dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 terjadi peningkatan angka pemakaian alat kontrasepsi. Hal ini menunjukkan tingkat kesadaran Pasangan Usia Subur (PUS) dalam memakai alat kontrasepsi. Pada tahun 2020, dari 100 PUS sekitar 75 PUS telah menggunakan alat kontrasepsi. Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan kondisi pada tahun – tahun sebelumnya.

Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya di bawah 20 Tahun

Tabel 2.195
Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya di bawah 20 Tahun
di Kota Palopo Tahun 2016 - 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah pasangan usia subur dengan istri di umur kurang 20 th	222	239	223	66	n/a
Jumlah pasangan usia subur	23.181	23.802	24.254	22.411	n/a
Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	0.96	1.00	0,92	0,29	n/a
Per 1000 PUS	10	10	9	3	n/a

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kota Palopo Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2016 dari 1.000 Pasangan Usia Subur, terdapat 21 Pasangan Usia Subur yang memiliki istri berumur di bawah 20 tahun. Namun pada tahun 2019, hanya terdapat 3 pasangan PUS yang memiliki istri berumur dibawah 20 tahun. Ini menunjukkan semakin berkurangnya pasangan yang menikah di bawah usia 20 tahun sekaligus memberikan gambaran semakin membaiknya kesadaran masyarakat Kota Palopo untuk tidak menikah dalam usia dini.

Cakupan PUS yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)

Tabel 2.2196
Cakupan PUS yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (unmet need)
di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani	5.468	5.350	5.802	2.768	2.694
Jumlah pasangan usia subur	23.181	23.802	24.254	22.411	22.326
Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) (%)	23,59	22,48	23,92	12,35	12,67

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kota Palopo Tahun 2021

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa pelayanan ber KB bagi PUS di Kota Palopo sepanjang tahun 2016-2020 semakin membaik. Tahun 2016 masih terdapat 23,59 % Pasangan Usia Subur yang Ingin Ber KB, tapi tidak terpenuhi, artinya pada tahun ini hanya ada 69,73 % PUS yang ingin ber KB dan sudah terpenuhi.

Sementara di tahun 2020, persentase PUS yang ingin ber-KB dan sudah terpenuhi telah berada pada angka 87,65 %, karena hanya ada 12,67 % PUS yang ingin ber KB dan belum terpenuhi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa semakin banyak PUS yang ingin ber-KB dan telah mendapatkan pelayanan KB setiap tahunnya. Olehnya angka target indikator ini ke depannya harus lebih ditekan dari tahun 2020.

Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Tabel 2.197
Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
di Kota Palopo Tahun 2016 - 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah akseptor KB yang menggunakan MKJP	3.635	3.877	4.648	3.721	4.028
Jumlah akseptor KB	16.873	17.774	18.545	16.973	16.879
Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	21,54	21,81	25,06	21,92	23,86

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kota Palopo Tahun 2020/21

Data di atas menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2016-2020, jumlah akseptor KB yang menggunakan kontrasepsi jangka panjang (MKJP) di Kota Palopo semakin meningkat. Baik dalam skala jumlah, maupun dalam skala persentase. Jika pada tahun 2016 terdapat 3.635 akseptor KB menggunakan MKJP (21,54%), tahun 2020 akseptor KB menggunakan MKJP meningkat menjadi 4.028 atau 23,86%.

Data tersebut juga memberikan informasi, bahwa dari 100 akseptor KB, pada tahun 2016, sebanyak 21-22 akseptor menggunakan MKJP, 78-79 akseptor lainnya menggunakan alat kontrasepsi lainnya. Dan pada tahun 2018, jumlahnya menjadi 25 akseptor pengguna MKJP, tetapi kembali mengalami penurunan pada tahun 2020.

Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi

Tabel 2.198
Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi
di Kota Palopo Tahun 2016 - 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan Kontrasepsi	8.071	8.023	8.794	5.438	3.793

Jumlah akseptor KB	16.873	17.774	18.545	16.973	16.879
Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi (%)	47,83	45,14	47,42	32,03	22,47

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kota Palopo Tahun 2021

Tabel di atas memperlihatkan bahwa pada tahun 2016, dari 100 akseptor KB yang ada, ada 47 pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan alat kontrasepsinya dan 40 pasangan masih menggunakan alat kontrasepsi.

Kemudian pada tahun 2020, ada 22 pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan alat kontrasepsinya dan ada 58 pasangan masih yang menggunakan alat kontrasepsinya. Artinya sejak 2016-2020, jumlah PUS akseptor KB yang masih menggunakan alat kontrasepsi mengalami fluktuasi, dari 47 pasangan tahun 2016 mengalami penurunan pengguna kontrasepsi pada tahun 2020 sebanyak 22 pasangan.

Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber-KB

Tabel 2.199
Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber-KB
di Kota Palopo Tahun 2016 - 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah anggota kelompok BKB yang ber-KB	1.045	3.345	3.981	3.940	1.270
Jumlah anggota kelompok BKB	1.660	4.451	5.087	5.316	1.722
Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (%)	62,95	75,15	78,26	74,11	22,47

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kota Palopo Tahun 2021

Tabel di atas memperlihatkan bahwa pada tahun 2016, dari 100 anggota kelompok BKB, terdapat 62 anggota kelompok BKB yang sudah ber KB, sisanya sebanyak 38 belum ber KB. Kemudian pada tahun 2020, ada 22 anggota kelompok BKB, yang sudah ber KB, sisanya sebanyak 78 belum ber KB.

Artinya sejak 2016-2020, semakin banyak anggota Bina Keluarga Balita yang mengikuti program KB. Ini menunjukkan bahwa kinerja indikator ini terus membaik di Kota Palopo sejak lima tahun terakhir. Sehingga ke depan, angka persentase yang akan menjadi target untuk indikator ini harus lebih ditingkatkan.

Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Ber-KB

Tabel 2.200
Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Ber-KB
di Kota Palopo Tahun 2016 - 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah anggota kelompok BKR yang ber-KB	536	2.007	2.632	2.601	1.066
Jumlah anggota kelompok BKR	1.011	3.427	4.052	4.306	1.818
Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB (%)	53,02	58,56	64,96	60,61	58,63

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kota Palopo Tahun 2021

Tabel di atas memperlihatkan bahwa pada tahun 2016, dari 100 anggota kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR), terdapat 53 anggota kelompok BKR yang sudah ber KB, sisanya sebanyak 47 belum ber KB. Kemudian pada tahun 2020, ada 58 anggota kelompok BKR, yang sudah ber KB, sisanya sebanyak 42 belum ber KB. Artinya sejak 2016-2020, semakin banyak anggota Bina Keluarga Remaja yang mengikuti program KB dan semakin sedikit anggota BKR yang tidak ber KB.

Ini menunjukkan bahwa kinerja indikator ini terus membaik di Kota Palopo sejak lima tahun terakhir. Sehingga ke depan, angka persentase yang akan menjadi target untuk indikator ini harus lebih ditingkatkan.

Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Ber-KB

Tabel 2.201
Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Ber-KB
di Kota Palopo Tahun 2016 - 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah anggota kelompok BKL yang ber-KB	342	1.458	2.001	1.855	613
Jumlah anggota kelompok BKL	809	3.089	3.632	3.411	1.276
Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB (%)	42,27	47,20	55,09	54,38	48,04

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kota Palopo Tahun 2021

Tabel di atas memperlihatkan bahwa pada tahun 2016, dari 100 anggota kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL), terdapat 42 anggota kelompok BKL yang sudah ber KB, sisanya sebanyak 58 belum ber KB. Kemudian pada tahun 2020, ada 48 anggota kelompok BKL yang sudah ber KB, sisanya sebanyak 52 belum ber KB. Artinya sejak 2016-2020, semakin banyak anggota Bina Keluarga Lansia yang mengikuti program KB dan semakin sedikit anggota BKL yang tidak ber KB.

Ini menunjukkan bahwa kinerja indikator ini terus membaik di Kota Palopo sejak lima tahun terakhir. Sehingga ke depan, angka persentase yang akan menjadi target untuk indikator ini harus lebih ditingkatkan.

Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan

Tabel 2.202
Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan
Kota Palopo Tahun 2016 - 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah PPKS	1	1	1	1	1
Jumlah Kecamatan	9	9	9	9	9
Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	0,11	0,11	0,11	0,11	11

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kota Palopo Tahun 2021

Data di atas menunjukkan bahwa Kota Palopo hanya memiliki satu Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera itupun harus melayani 9 kecamatan yang ada.

Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa

Tabel 2.203
Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa
di Kota Palopo Tahun 2016 - 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah PIK R/M (Buah)	66	81	93	184	68
Jumlah Kecamatan (Buah)	9	9	9	9	9
Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa (a/b)	7,33	9,00	10,33	20,44	7,55

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kota Palopo Tahun 2021

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2016, Kota Palopo memiliki 66 Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa. Artinya pada tahun ini, untuk setiap kecamatan di Kota Palopo terdapat 2 wadah PIK Remaja dan Mahasiswa yang terbentuk. Pada tahun 2019, kondisinya jauh semakin baik. Sebab satu kecamatan, rata-rata memiliki 20 PIK R/M. Pada Tahun 2020 mengalami penurunan, dimana satu kecamatan rata-rata hanya memiliki 7 PIK R/M. Diharapkan kedepan jumlah pusat informasi dan konseling di Kota Palopo dapat meningkatkan cakupan pelayanan kepada remaja dan mahasiswa di Kota Palopo.

Cakupan PKB/PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk

Tabel 2.204
Cakupan PKB/PLKB yang Didayagunakan
Kota Palopo Tahun 2016 - 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah PKB dan PLKB yang didayagunakan	68	68	68	66	63
Jumlah PKB/PLKB	68	68	68	66	63
Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan (%)	100	100	100	100	100

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kota Palopo Tahun 2021

Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri

Tabel 2.205
Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan
Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber-KB Mandiri
di Kota Palopo Tahun 2016 - 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber-KB mandiri	123	640	774	671	218
Jumlah anggota kelompok UPPKS	693	3102	3.791	2.804	952
Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri (%)	17,75	20,63	20,42	23,93	22,89

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kota Palopo Tahun 2021

Tabel di atas memperlihatkan bahwa pada tahun 2016, dari 100 anggota kelompok UPPKS, hanya ada 17 anggota yang sudah ber KB Mandiri, sisanya sebanyak 85 anggota belum ber KB secara mandiri.

Kemudian pada tahun 2020, hanya ada 22 anggota kelompok UPPKS yang sudah ber KB mandiri, sisanya sebanyak 78 anggota belum ber KB secara mandiri. Artinya sejak 2016-2020, kemandirian anggota kelompok UPPKS untuk ber KB mengalami peningkatan. Sebab dari 100 anggota UPPKS, jumlah anggota yang ber KB secara mandiri justru semakin menurun, dari 17 anggota pada tahun 2016 menjadi 22 anggota pada tahun 2020.

Ini menunjukkan bahwa kinerja indikator ini pada tahun 2020, lebih tinggi dibandingkan capaian kinerja tahun 2016. Sehingga ke depan, angka persentase yang akan menjadi target untuk indikator ini harus dipertahankan atau ditingkatkan.

Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan

Tabel 2.206
Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap
Desa/Kelurahan di Kota Palopo Tahun 2016 - 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah petugas Pembantu Pembina KB Desa	48	48	48	48	48
Jumlah Kelurahan	48	48	48	48	48
Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan (%)	100	100	100	100	100

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kota Palopo Tahun 2021

Data di atas menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2016-2020, satu kelurahan di Kota Palopo telah dilayani satu orang petugas pembantu pembina KB Kelurahan. Kondisi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan KB dan keberhasilan program KB di setiap kelurahan di Kota Palopo.

Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di gudang Kabupaten/Kota

Tabel 2.207
Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi
di Gudang Kabupaten/Kota di Kota Palopo Tahun 2016 - 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persediaan alat dan obat Kontrasepsi	5.330	9.688	11.830	13.849	17.634
Rata Rata Pemakaian alat dan obat Kontrasepsi per bulan tingkat Kota	551	1.331	1.599	1.049	1.114,43
Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi + i gudang Kabupaten/Kota (%)	9,67	7,28	7,39	13,20	13,82

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kota Palopo Tahun 2021

Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi di Faskes

Tabel 2.208
Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi
di Faskes Kota Palopo Tahun 2016 - 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persediaan alat dan obat Kontrasepsi	11.673	4.512	1.414	4.512	18.473
Rata Rata Pemakaian alat dan obat Kontrasepsi per bulan di Faskes	211,91	67,91	32,58	67,91	999,92
Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di Faskes	55.1	66.4	43,40	66,40	18,47

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kota Palopo Tahun 2021

Persentase Faskes Dan Jejaringnya (diseluruh Tingkatan Wilayah) yang Bekerja Sama Dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan

Tabel 2.209
Persentase Faskes dan Jejaringnya (di seluruh tingkatan wilayah) yang Bekerjasama dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai dengan Standarisasi Pelayanan di Kota Palopo Tahun 2016 - 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Faskes dan jejaring yang bekerjasama dengan BPJS	19	20	20	23	23
Jumlah Faskes dan jejaring	19	20	20	23	23
Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	100	100	100	100	100

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kota Palopo Tahun 2021

Data di atas menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2015-2019, semua fasilitas kesehatan dan jejaringnya seluruhnya telah bekerjasama dengan BPJS. Ini menunjukkan bahwa akses untuk mendapatkan pelayanan KBKR di Kota Palopo semakin terbuka.

Cakupa/n Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga

Tabel 2.210
Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga di Kota Palopo Tahun 2016 - 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	145	427	465	732	272
Jumlah kelompok kegiatan	139	221	259	732	272
Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	1,04	1,93	1,80	1,00	1,00

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kota Palopo Tahun 2021

Cakupan Keluarga yang Mempunyai Balita dan Anak yang Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

Tabel 2.211
Cakupan Keluarga yang Mempunyai Balita dan Anak yang Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak di Kota Palopo Tahun 2016 - 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang	1.025	3.686	4.284	4.306	1.722
Jumlah keluarga mempunyai balita dn anak	5.220	6.715	6.570	4.306	1.722
Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	19,63	54,89	65,21	100	100

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kota Palopo Tahun 2021

Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD dan APBDes

Tabel 2.212
Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana
dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD dan APBDes
di Kota Palopo Tahun 2016 - 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah anggaran untuk urusan PPKB	3.332.894.600	2.969.721.000	2.784.312.000	2.441.839.000	3.210.274.000
Jumlah APBD dan APBDes	5.112.260.200	3.542.370.000	3.356.961.000	5.909.076.000	5.189.110.000
Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	65,19	83,83	82,94	41,32	61,86

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kota Palopo Tahun 2021

2.1.3.2.9. Bidang Urusan Perhubungan

Arus Penumpang Angkutan Umum

Tabel 2.213
Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum
di Kota Palopo Tahun 2016 - 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah arus keluar masuk penumpang angkutan umum dengan bis (Orang)	1.680.024	1.344.991	1.326.741	1.323.252	539.500
Jumlah arus keluar masuk penumpang angkutan umum dengan kapal laut (Orang)	122	445	314	352	238
Jumlah total arus penumpang angkutan umum (Orang)	1.680.146	1.345.436	1.327.055	1.323.604	539.500

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2021

Data ini menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2016 – 2020, jumlah penumpang yang keluar masuk di Kota Palopo menurun. Jika tahun 2016, ada sebanyak 1,680 juta orang, tahun 2020 hanya ada 539.500 penumpang angkutan umum. Salah satu faktor yang patut diduga menjadi penyebab penurunan ini, adalah cukup banyak masyarakat yang beralih menggunakan transportasi udara dan berkurangnya aktivitas diluar rumah akibat adanya pandemic covid-19.

Rasio Ijin Trayek

Tabel 2.214
Rasio Ijin Trayek
di Kota Palopo Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
a.	Jumlah ijin trayek yang dikeluarkan	Buah	3	3	4	4	4
b.	Jumlah penduduk	Jiwa	172.916	176.907	202.483	202.204	184.681
c	Rasio	Per 100.000	2	2	2	2	2

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2021

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2016, dalam mengakses wilayah di Kota Palopo, hanya tersedia 3 trayek angkutan umum bagi 100.000 penduduk Kota Palopo. Jumlah ini mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2020 menjadi 4 trayek. Dari perspektif layanan angkutan umum, masyarakat akan semakin kesulitan mengakses beberapa spot wilayah di Kota Palopo jika ingin menggunakan angkutan umum massal. Sebab jumlah penduduk akan cenderung terus bertambah. Meski demikian saat ini, Kota Palopo memiliki alternatif transportasi umum lainnya misalnya taksi dan layanan transportasi daring/internet sepeda motor.

Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

Tabel 2.215
Jumlah Uji KIR Angkutan Umum
di Kota Palopo Tahun 2016 - 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah uji KIR angkutan umum (Unit)	1.301	1.152	3.362	2.608	2.602

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2021

Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Tabel 2.216
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis
di Kota Palopo Tahun 2016 - 2020

Uraian	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah pelabuhan laut	Unit	1	1	1	1	1
Jumlah terminal bis	Unit	1	1	1	1	1

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2021

Persentase Layanan Angkutan Darat

Indikator yang menunjukkan seberapa besar kemampuan layanan angkutan transportasi darat yang tersedia untuk memenuhi atau mencakup kebutuhan transportasi darat atau penumpang yang ada. Semakin tinggi angka indikator ini, semakin tinggi kemampuan layanan angkutan darat di Kota Palopo.

Tabel 2.217
Persentase Layanan Angkutan Darat
di Kota Palopo Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
a.	Jumlah angkutan darat	Unit	1.441	1.332	1.452	1.415	3.479
b.	Jumlah penumpang angkutan darat	Orang	1.680.024	1.344.991	1.326.741	1.323.252	573.160
Persentase		%	0,085	0,099	0,109	0,106	0.0061
Per 10.000 Penumpang			8,5	9,9	10,9	10,6	60.69

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2021

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2016, untuk melayani 10.000 penumpang angkutan darat di Kota Palopo hanya tersedia 8 unit angkutan darat. Kondisi ini jauh berbeda pada tahun 2020, dimana untuk 10.000 penumpang angkutan darat hanya tersedia 60-61 unit angkutan darat. Ini diakibatkan penurunan jumlah penumpang selama tahun 2020 akibat pandemic covid 19 dan pembatasan social berskala besar.

Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum

Tabel 2.218
Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum
di Kota Palopo Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah angkutan umum yang tidak memiliki KIR pada tahun n	Unit	170	140	180	41	12
b.	Jumlah angkutan umum pada tahun n	Unit	1.524	1.441	1.332	1.452	1.393
Persentase		%	10,89	11,15	9,71	13,51	0,86

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2015 dari 100 angkutan umum yang beroperasi di Kota Palopo hanya 10-11 kendaraan yang tidak memiliki KIR, artinya ada sebanyak 89-90 kendaraan yang sudah memiliki KIR. Pada tahun 2019, kondisi ini jauh lebih baik, sebab hanya ada 1 kendaraan yang tidak memiliki KIR per 100 kendaraan. Meningkatnya kepemilikan KIR angkutan umum ini mengindikasikan membaiknya tingkat kelayakan dan keamanan angkutan umum.

Pemasangan Rambu - Rambu

Tabel 2.219
Persentase Pemasangan Rambu - Rambu
di Kota Palopo Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah pemasangan rambu - rambu pada tahun n	Buah	142	144	158	179	254
b.	Jumlah rambu - rambu yang seharusnya tersedia	Buah	205	220	250	254	450
Persentase		%	65,27	65,45	63,20	70,47	46,40

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2015, pemenuhan kebutuhan rambu lalu lintas hanya 65,27%, kondisi ini jauh lebih baik dibandingkan tahun 2018

yang berada pada angka 70,47% tetapi kembali mengalami penurunan pada tahun 2020 yang berada pada angka 46,40%. Kondisi ini juga mengindikasikan bahwa tingkat pengamanan jalan raya bagi pengguna jalan di Kota Palopo semakin menurun.

2.1.3.2.10. Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika

Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan

Tabel 2.220
Persentase Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan Kota Palopo Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
a.	Jumlah KIM	Kelompok	0	30	30	32	34
b.	Jumlah kecamatan yang ada dalam Kota Palopo	Kecamatan	9	9	9	9	9
Persentase		%	0	3,33	3,33	3,55	3,77

Sumber Data : Dinas Komunikasi & Informatika Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan bahwa di Kota Palopo sampai dengan tahun 2020 KIM terbentuk sebanyak 34 lembaga. Ini menunjukkan bahwa partisipasi dan keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan informasi di Kota Palopo oleh masyarakat mulai melembaga dan dianggap penting.

Cakupan Layanan Telekomunikasi

Tabel 2.221
Cakupan Layanan Telekomunikasi di Kota Palopo Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
a.	Luas wilayah yang tercoverage	Km ²	212,87	212,87	222,47	222,47	222,47
b.	Luas wilayah keseluruhan	Km ²	247,52	247,52	247,52	247,52	247,52
Jumlah (a/b)			0,83	0,86	0,90	0,90	0,90

Sumber Data : Dinas Komunikasi & Informatika Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan adanya peningkatan cakupan wilayah Kota Palopo yang mampu diakses jaringan atau layanan telekomunikasi dari 83% menjadi 90%. Peningkatan luas coverage ini menunjukkan semakin besar wilayah Kota Palopo termasuk penduduk Kota Palopo yang diakses oleh layanan telekomunikasi. Ini menunjukkan sebuah perkembangan yang cukup baik bagi keterbukaan informasi di sebuah daerah.

Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet

Tabel 2.222
Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet di Kota Palopo Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
a.	Jumlah rumah tanggayang memiliki akses internet	KK	2.837	3.314	7.029	9.045	9.900
b.	Jumlah rumah tangga	KK	37.749	38.641	39.444	39.444	39.444
Jumlah (a/b)			0,07	0,08	0,18	0,23	0,25

Sumber Data : Dinas Komunikasi & Informatika Kota Palopo Tahun 2021

Data di atas menunjukkan tahun 2020, dari 100 rumah tangga di Kota Palopo, rata-rata sebanyak 25 Rumah tangga telah mengakses internet. Jumlah ini jauh meningkat dibandingkan tahun 2016 yang hanya pada angka 7 Rumah Tangga saja. Ini menunjukkan bahwa tingkat penggunaan internet pada rumah tangga di Kota Palopo terus mengalami peningkatan, dan semakin mudahnya masyarakat mendapatkan berbagai sumber informasi.

Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Pribadi

Tabel 2.223
Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Pribadi
di Kota Palopo Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
a.	Jumlah rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	KK	13.967	15.456	16.383	19.700	19.700
b.	Jumlah rumah tangga	KK	37.749	38.641	39.444	39.444	39.444
Jumlah (a/b)			0,37	0,40	0,42	0,50	0,50

Sumber Data : Dinas Komunikasi & Informatika Kota Palopo Tahun 2021

Data di atas menunjukkan jumlah pengguna komputer pribadi per rumah tangga di Kota Palopo terus meningkat. Dari 100 rumah tangga yang ada pada tahun 2020 sebanyak 50 rumah tangga menggunakan komputer pribadi. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan tahun 2016 yang hanya pada angka 37 dari 100 rumah tangga yang ada. Ini menunjukkan penggunaan komputer di masyarakat dan di Kota Palopo semakin memasyarakat.

2.1.3.2.11. Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Persentase Koperasi Aktif

Pada tahun 2015, jumlah seluruh koperasi di Kota Palopo sebanyak 283 unit dan setiap tahun terus meningkat hingga mencapai 292 unit pada tahun 2019. Namun dari tabel di bawah ini dapat dilihat bahwa persentase koperasi aktif terus mengalami penurunan. Permasalahan dari menurunnya persentase koperasi aktif, yakni adanya koperasi yang tidak melaksanakan RAT.

Tabel 2.224
Persentase Koperasi Aktif
di Kota Palopo Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
a.	Jumlah Koperasi Aktif	Unit	204	204	206	74	69
b.	Jumlah Seluruh Koperasi	Unit	286	287	290	292	292
Jumlah Koperasi Aktif			71,32	71,08	71,03	25,34	24

Sumber Data : Dinas Koperasi, UMKM Kota Palopo Tahun 2021

Persentase UKM Non BPR/LKM Aktif

Tabel 2.225
Persentase UKM Non BPR/LKM Aktif
di Kota Palopo Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
a.	Jumlah UKM non BPR/LKM aktif	Unit	1.982	2.037	2.158	2.209	2.001
b.	Jumlah seluruh UKM non BPR/LKM	Unit	1.982	2.307	2.160	2.211	2.001

	Persentase	%	100	100	99,91	99,91	100

Sumber Data : Dinas Koperasi & UMKM Kota Palopo Tahun 2021

Persentase BPR/LKM Aktif

Yang dimaksud LKM adalah Lembaga Keuangan Mikro, sementara BPR adalah Bank Perkreditan Rakyat. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. LKM umumnya diakses oleh masyarakat di tingkat pedesaan atau wilayah yang selama ini sulit dijangkau atau menjangkau bank komersial. LKM biasanya berbentuk koperasi atau Perseroan terbatas.

Persentase Usaha Mikro dan Kecil

Tabel 2.226
Persentase Usaha Mikro dan Kecil
Kota Palopo Tahun 2016 - 2021

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
a.	Jumlah usaha mikro dan kecil	Unit	6.314	6.561	6.664	6.764	9.021
b.	Jumlah seluruh UKM	Unit	8.296	8.598	8.824	8.975	11.022
	Persentase	%	76,11	76,31	75,52	75,37	81,84

Sumber Data : Dinas Koperasi & UMKM Kota Palopo Tahun 2021

Tabel di atas memperlihatkan bahwa sejak 2016, usaha mikro dan kecil mendominasi kondisi UMKM yang ada di Kota Palopo. Oleh karenanya program dan kegiatan UMKM akan lebih banyak dirasakan manfaatnya jika difokuskan pada Usaha Mikro dan Usaha kecil yang ada di Kota Palopo.

2.1.3.2.12. Bidang Urusan Penanaman Modal

Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Penanaman modal Dalam Negeri dapat dilakukan oleh perseorangan WNI, badan usaha Negeri, dan/atau pemerintah Negeri yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Berikut adalah tabel jumlah investor berskala nasional di Kota Palopo 2015-2019. Jumlah investor merujuk pada jumlah proyek-proyek penanaman modal yang diinvestasikan baik PMDN maupun PMA selama 1 (satu) tahun.

Tabel 2.227
Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)
di Kota Palopo Tahun 2016 - 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	122	147	129	78	74

Sumber Data : Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Palopo Tahun 2021

Jumlah dan Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Tabel 2.228
Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)
di Kota Palopo Tahun 2016 - 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN) (Buah)	122	147	129	85	74
Jumlah nilai investasi	268.331,63	382.322,26	220,859	130,740	109.484

verskala nasional (PMA/PMDN) (Juta)					

Sumber Data : Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Palopo Tahun 2021

Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Tabel 2.229
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja
di Kota Palopo Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
a.	Jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan (*)	Orang	28,337	28,377	30.140	760	392
b.	Jumlah seluruh PMDN (**)	Juta	268,331.63	382,322.26	220,859	130.,74	109.484
c	Rasio per 100 Juta	Angka	10.56	7.42	13.65	9.04	36

Sumber Data : Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Palopo Tahun 2021,

Angka dalam tabel menunjukkan bahwa pada tahun 2016 untuk 100 juta nilai PMDN, mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 10-11 orang. Sementara pada tahun 2020 untuk nilai PMDN yang sama yakni 100 juta hanya mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 36 orang.

Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)

Tabel 2.230
Persentase Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN
di Kota Palopo Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
a.	Realisasi PMDN tahun evaluasi	Rupiah	1.717.284.282.177	113.990.629.638	220,859,000.000	130,740,222,514	109.484.145.881
b.	Realisasi PMDN sebelum evaluasi	Rupiah	96.603.152.212	268.331.634.389	382,322.260.000	220,859.000.000	130.740.222.514
	Persentase	%	178	42,48	57.77	59.19	21.25

Sumber Data : Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Palopo Tahun 2021

2.1.3.2.13. Bidang Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif

Tabel 2.231
Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif
di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
a.	Jumlah organisasi pemuda yang aktif	OKP	151	151	151	153	73
b.	Jumlah seluruh organisasi pemuda	OKP	218	218	218	218	102
	Persentase	%	69,3	69,3	69,3	70,2	71,6

Sumber Data : Dinas Pemuda & Olah Raga Kota Palopo Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, persentase organisasi Pemuda yang aktif mengalami stagnan.

Persentase Wirausaha Muda

Tabel 2.232
Persentase Wirausaha Muda
di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
a.	Jumlah wirausaha muda	Kelompok	134	134	134	136	430
b.	Jumlah seluruh wirausaha	Kelompok	7.669	7.669	7.669	7.669	3.299
	Persentase	%	1,75	1,75	1,75	1,77	1,3

Sumber Data : Dinas Pemuda & Olah Raga Kota Palopo Tahun 2021

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa dari 1.000 kelompok wirausaha, terdapat 130 wirausaha muda.

Cakupan Pembinaan Olahraga

Tabel 2.233
Persentase Pembinaan Olahraga di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
a.	Jumlah cabang olahraga yang dibina	Cabor	10	10	12	16	32
b.	Jumlah seluruh cabang olahraga yang ada/terdaftar	Cabor	26	26	26	27	33
	Persentase	%	38,46	38,46	46,15	59,26	96,96

Sumber Data : Dinas Pemuda & Olah Raga Kota Palopo Tahun 2021

Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi

Tabel 2.234
Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi
di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
a.	Jumlah pelatih bersertifikat	Orang	27	27	27	27	23
b.	Jumlah seluruh pelatih	Orang	83	83	83	83	83
	Persentase	%	32,53	32,53	32,53	32,53	27,71

Sumber Data : Dinas Pemuda & Olah Raga Kota Palopo Tahun 2021

Cakupan Pembinaan Atlet Muda

Tabel 2.235
Persentase Pembinaan Atlet Muda
di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
a.	Jumlah atlet pelajar yang dibina	Orang	30	30	36	48	-
b.	Jumlah seluruh atlet pelajar	Orang	170	170	170	170	98
	Persentase	%	17,6	17,6	21,2	28,2	0

Sumber Data : Dinas Pemuda & Olah Raga Kota Palopo Tahun 2021

Jumlah Atlet Berprestasi

Tabel 2.236
Persentase Atlet Berprestasi
di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah atlet yang memenangi kejuaraan tingkat nasional dan internasional dalam satu tahun	36	7	7	4	-

Sumber Data : Dinas Pemuda & Olah Raga Kota Palopo Tahun 2021

Jumlah Prestasi Olahraga

Tabel 2.237
Persentase Prestasi Olahraga
di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah prestasi cabang olahraga yang dimenangkan dalam satu tahun	36	7	7	4	-

Sumber Data : Dinas Pemuda & Olah Raga Kota Palopo Tahun 2021

2.1.3.2.14. Bidang Urusan Statistik

Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi

Tabel 2.238
Ketersediaan Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi
di Kota Palopo Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
a.	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	Dalam Proses	Dalam proses penginputan

Sumber Data : Dinas Persandian & Statistik Kota Palopo Tahun 2021

Buku "Palopo Dalam Angka"

Tabel 2.239
Ketersediaan Buku "Palopo Dalam Angka"
Kota Palopo Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
a.	Buku Palopo Dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Dalam Proses	Ada

Sumber Data : Dinas Persandian & Statistik Kota Palopo Tahun 2020

Buku "PDRB"

Tabel 2.240
Ketersediaan Buku "PDRB"
Kota Palopo Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
a.	Buku "PDRB"	Ada`	Ada	Ada	Dalam Proses	Ada

Sumber Data : Dinas Persandian & Statistik Kota Palopo Tahun 2021

2.1.3.2.15. Bidang Urusan Persandian

Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah

Indikator ini menggambarkan tingkat pengamanan informasi pada tingkat Pemerintah Kota dan Perangkat daerah Kota Palopo. Semakin tinggi persentase indikator ini menunjukkan bahwa pengamanan informasi dari aspek jaminan terhadap keotentikan, keutuhan, ketersediaan, dan nir penyangkalan informasi pada pemerintah Kota Palopo, lebih baik.

Tabel 2.241
Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi
di Kota Palopo Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
a.	Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah	OPD	30	35	38	39	39
b.	Jumlah total perangkat daerah	OPD	40	49	49	49	49
	Persentase	%	75	71,42	77,55	79,59	79,59

Sumber Data : Dinas Persandian dan Statistik Kota Palopo Tahun 2021

2.1.3.2.16. Bidang Urusan Kebudayaan

Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Tabel 2.242
Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya
di Kota Palopo Tahun 2016 - 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	12	15	18	14	5

Sumber Data : Dinas Kebudayaan Kota Palopo Tahun 2021

Festival merupakan sarana komunikasi yang penting untuk membangun, memberdayakan dan pengakuan suatu identitas budaya. Festival seni dan budaya juga merupakan upaya untuk mempertahankan nilai – nilai seni budaya dan nilai tradisional.

Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan

Tabel 2.243
Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan
di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
a.	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Buah	148	148	148	148	148
b.	Total benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dimiliki daerah	Buah	149	149	149	149	148
	Persentase	%	99,32	99,32	99,32	99,32	100

Sumber Data : Dinas Kebudayaan Kota Palopo Tahun 2021

Dari 149 buah total benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dimiliki daerah, yang merupakan aset daerah sebanyak 148 buah. 1 buah merupakan rumah pribadi yang berada dalam kawasan cagar budaya sehingga tidak dilakukan pelestarian oleh pemerintah Kota Palopo.

Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi

Tabel 2.244
Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi
di Kota Palopo Tahun 2016 - 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	1	0	0	0	0

Sumber Data : Dinas Kebudayaan Kota Palopo Tahun 2021

Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu

Tabel 2.245
Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu
di Kota Palopo Tahun 2016 - 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	51	51	51	52	53

Sumber Data : Dinas Kebudayaan Kota Palopo Tahun 2021

2.1.3.2.17. Bidang Urusan Perpustakaan

Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun

Tabel 2.246
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun
di Kota Palopo Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
a.	Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun	Orang	13.274	13.650	14.456	14.958	35.571
b.	Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani	Orang	144.650	147.955	147.300	147.300	153.110
	Persentase	%	9,18	9,23	9,81	10,15	23,23

Sumber Data : Dinas Perpustakaan Kota Palopo Tahun 2021

Tabel di atas menunjukkan pada tahun 2015, hanya 9,18 % masyarakat yang wajib baca yang pernah memanfaatkan jasa layanan perpustakaan daerah Kota Palopo. Namun persentasenya terus meningkat sampai pada tahun 2020 persentasenya berada pada angka 23,23 % atau tumbuh kurang lebih dua persen periode 2016 – 2020

Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah

Tabel 2.247
Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah
Kota Palopo Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
a.	Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Buah	308	1.232	1.191	7.656	7.615
b.	Jumlah koleksi jumlah buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Buah	895	2.632	2.360	19.891	20.279
	Persentase	%	34,41	46,81	50,46	38,49	37,55

Sumber Data : Dinas Perpustakaan Kota Palopo Tahun 2021

Rasio Perpustakaan Per Satuan Penduduk

Tabel 2.248
Rasio Perpustakaan Per Satuan Penduduk
Kota Palopo Tahun 2016 - 2020

Uraian	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah perpustakaan	Jiwa	205	208	208	208	216
Jumlah penduduk	Jiwa	172.916	176.907	180.678	184.614	184.681
Rasio Perpustakaan per Satuan Penduduk	Per 1000	1.19	1.18	1,16	1,13	1.17

Sumber Data : Dinas Perpustakaan Kota Palopo Tahun 2021

Data di atas menunjukkan bahwa sejak 2016 – 2020, rasio jumlah perpustakaan yang di Kota Palopo terhadap jumlah penduduk relatif stagnan. Jika tahun 2016, untuk 1000 penduduk tersedia 1 unit perpustakaan, kondisi yang sama juga terjadi pada tahun 2020.

Jumlah Rata – Rata Pengunjung Perpustakaan Per Tahun

Tabel 2.249
Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan Per Tahun
di Kota Palopo Tahun 2016 - 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah rata- rata pengunjung perpustakaan per tahun	1.106	1.137	1.204	1.246	2.964

Sumber Data : Dinas Perpustakaan Kota Palopo Tahun 2021

Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan

Tabel 2.250
Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan
Kota Palopo Tahun 2015 – 2020

Uraian	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	Judul	308	1.232	1.191	404	185

Sumber Data : Dinas Perpustakaan Kota Palopo Tahun 2021

Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis dan Penilai yang Memiliki Sertifikat

Tabel 2.251
Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis dan Penilai yang Memiliki Sertifikat di Kota Palopo Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
a.	Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang bersertifikat	Orang	1	1	1	2	3
b.	Jumlah seluruh pustakawan, tenaga teknis dan penilai	Orang	3	3	3	3	3
	Persentase	%	33	33	33	67	100

Sumber Data : Dinas Perpustakaan Kota Palopo Tahun 2021

2.1.3.2.18. Bidang Urusan Kearsipan

Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku

Tabel 2.252
Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip
Secara Baku di Kota Palopo Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
a.	Jumlah perangkat daerah yang menerapkan arsip secara baku	OPD	1	1	8	12	6
b.	Jumlah perangkat daerah	OPD	40	49	49	49	49
	Persentase	%	2,5	2,04	16,33	24,48	12,24

Sumber Data : Dinas Kearsipan Kota Palopo Tahun 2021

Sampai dengan tahun 2020, sudah 12 Perangkat Daerah yang menerapkan arsip secara baku. Hal ini disebabkan oleh tenaga fungsional di Perangkat Daerah belum ada dan kurangnya sarana dan prasarana kearsipan yang berada di Perangkat Daerah.

Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan

Tabel 2.253
Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Kota Palopo Tahun 2016 - 2020

Uraian	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan	Kegiatan	6	7	6	7	6

Sumber Data : Dinas Kearsipan Kota Palopo Tahun 2021

2.1.3.3. Layanan Urusan Pilihan

2.1.3.3.1. Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan

Produksi Perikanan

Tabel 2.254
Persentase Produksi Perikanan Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah produksi ikan	Ton	13.767,20	14.861,76	16.951,90	18.387,50	133.481,18
b.	Target daerah	Ton	13.822,00	15.205,00	16.347,76	18.397,00	143.016,07
C	Persentase	%	99,60	97,74	103,70	99,95	93,33

Sumber Data : Dinas Perikanan Kota Palopo Tahun 2019

Tabel di atas menunjukkan bahwa kinerja Dinas Perikanan Tahun 2015-2020 mampu memenuhi target produksi perikanan daerah. Ini menunjukkan bahwa kinerja perangkat daerah tersebut sangat baik. Produksi perikanan Kota Palopo cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun dan tahun.

Konsumsi Ikan

Tabel 2.255
Persentase Konsumsi Ikan di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah konsumsi ikan	Kg	57	49,83	53,54	58,34	53,81
b.	Target daerah	Kg	46,7	50	53,47	56,01	54,61
c.	Persentase	%	122,06	99,66	100,13	104,16	97,62

Sumber Data : Dinas Perikanan Kota Palopo Tahun 2019

Cakupan Bina Kelompok Nelayan

Tabel 2.256
Persentase Cakupan Bina Kelompok Nelayan
di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan pemda tahun n	Klpk	35	7	4	15	11
b.	Jumlah kelompok nelayan	Klpk	162	123	127	134	142
	Persentase	%	21,60	5,69	3,15	11,19	7,75

Sumber Data : Dinas Perikanan Kota Palopo Tahun 2019

Tabel di atas menunjukkan bahwa cakupan bina kelompok nelayan oleh Pemerintah Kota Palopo dari tahun ke tahun terus menunjukkan penurunan. Jika tahun 2015 pada angka 21.60%, pada tahun 2020 pada angka 7.75%.

Produksi Perikanan Kelompok Nelayan

Tabel 2.257
Persentase Produksi Perikanan Kelompok Nelayan
di Kota Palopo Tahun 2015-2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah produksi ikan (ton) kontribusi hasil kelompok nelayan	Ton	9.514,20	11.146,20	12.713,92	13.338,29	14.677,68
b.	Jumlah produksi ikan di daerah	Ton	13.767,20	14.861,76	16.951,90	18.397,50	133.481,18
	Persentase		69,11%	75,00%	75,00%	72,54%	10,99

Sumber Data : Dinas Perikanan Kota Palopo Tahun 2019

Tabel di atas menggambarkan bahwa kontribusi perikanan kelompok nelayan di Kota Palopo sejak 2020 jauh merosot dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah Kota Palopo perlu mengakselerasi program dan kegiatan perikanan yang fokus pada peningkatan kontribusi perikanan kelompok nelayan terhadap produksi ikan daerah.

Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial

Indikator ini untuk mengetahui luas kawasan lindung perairan terhadap seluas seluruh wilayah perairan yang menjadi wilayah sebuah daerah. Semakin tinggi rasio luas kawasan lindung perairan sebuah daerah, semakin tingginya aspek kehati-hatian dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perairan tersebut. Sejak berlakunya UU No 23 Tahun 2014, kewenangan wilayah kelautan menjadi kewenangan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan.

Nilai Tukar Nelayan

Adalah Perbandingan antara indeks harga yang diterima Nelayan dan Pembudidaya Ikan (It) dengan indeks harga yang dibayar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (Ib) yang dinyatakan dalam persentase.

Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan > 100 : berarti Nelayan dan Pembudidaya Ikan mengalami surplus. b. Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan = 100 : berarti Nelayan dan Pembudidaya Ikan mengalami impas/break even. c. Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan < 100 : berarti Nelayan dan Pembudidaya Ikan mengalami defisit. Tingkat kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Ikan pada suatu periode mengalami penurunan dibanding tingkat kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Ikan pada periode sebelumnya.

2.1.3.3.2. Bidang Urusan Pariwisata

Kunjungan Wisata

Tabel 2.258
Persentase Kunjungan Wisata
di Kota Palopo Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
a.	Jumlah capaian kinerja kunjungan wisata se – Kota Palopo	Orang	95.918	99.481	106.211	127.410	61.267
b.	Jumlah kunjungan wisata yang direncanakan se – Kota Palopo	Orang	95.000	100.000	105.000	110.000	115.000
	Persentase	%	100,97	99,48	101,15	115,83	53,27

Sumber Data : Dinas Pariwisata Kota Palopo Tahun 2021

Lama Kunjungan Wisata

Data pada tabel di bawah ini menunjukkan bahwa rata-rata lama kunjungan per orang wisatawan di Kota Palopo adalah selama dua hari.

Tabel 2.259
Lama Kunjungan Wisata di Kota Palopo Tahun 2016 - 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Rata – rata kunjungan wisata dalam satu tahun	2 Hari	2 Hari	2 Hari	2 Hari	1 Hari

Sumber Data : Dinas Pariwisata Kota Palopo Tahun 2021

PAD Sektor Pariwisata

Tabel 2.260
Persentase PAD Sektor Pariwisata
Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
PAD sektor pariwisata	4,622,441,398	5,879,898,891	7.027.772.114	8.561.179.405	6.428.266.808
Total PAD	134.110.076.220,35	167.310.913.609,15	139.278.661.859,07	167.052.191.690	46.097.862.325,28
Persentase	3.45	3.51	5,05	5,12	13,94

Sumber Data : Dinas Pariwisata Kota Palopo Tahun 2021

Data di atas menunjukkan kontribusi PAD sektor Pariwisata Kota Palopo cenderung meningkat. Jika pada tahun 2015 sebesar 4,15%, pada tahun 2020 hanya sebesar 5.12%.

2.1.3.3.3. Bidang Urusan Pertanian

Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar

Tabel 2.261
Persentase Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya
Per Hektar di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
a.	Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (Ton)					
	Padi	3.0167	32,444	33.259	20.355,7	17.585,85
	Jagung	6,303	5086	4.988	7.493	5.350
	Ubi Kayu	70.4	70	39,20	-	-
	Ubi jalar	18.94	4.55	1,12	-	-
	Sagu	33.04	15.59	1,67	2.23	18.2
b.	Luas panen tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (Ha)					
	Padi	5,128	5172	5.200	4.954	3.054
	Jagung	928	753	684	1.111	866
	Ubi Kayu	7	1	1	-	-
	Ubi Jalar	1	0	0	-	-
	Sagu	112.83	289.75	298,84	151.55	103.19
c	Produktifitas (Ton/Ha)					
	Padi	5.88	6.27	6,40	6.42	5.76
	Jagung	6.79	6.75	7,09	6.75	6.19
	Ubi Kayu	10.06	70	79,52	-	-
	Ubi jalar	18.94	4.55	2,95	-	-
	Sagu	0.29	0.05	0,01	31.3	0.252

Sumber Data : Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan Kota Palopo Tahun 2021

Data di atas menunjukkan bahwa produktivitas tanaman padi dan jagung sebagai komoditas utama di Kota Palopo menunjukkan produktivitas yang meningkat. Pada tahun 2016, hanya dihasilkan 5,88 Ton padi per ha, tahun 2019, produktivitas padi menjadi 6.42 Ton/Ha. Akan tetapi terjadi penurunan pada tahun 2020 dengan produktivitas 5.76 ton per hektar. Tahun 2020 produktivitas jagung 6.19 Ton/Ha dan Sagu sebanyak 0.01 Ton/Ha.

Cakupan Bina Kelompok Petani

Kelompok tani merupakan alat bagi petani untuk mencapai tujuan –tujuan kelompok bukan alat dari pihak lain (pemerintah, swasta dll) yang dimobilisasi untuk mencapai keberhasilan.

Tabel 2.262
Persentase Pembinaan Kelompok Tani
di Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
a.	Jumlah kelompok petani yang mendapatkan bantuan pemda tahun n	Klpk	319	222	437	267	439
b.	Jumlah kelompok tani	Klpk	407	438	458	475	499
	Persentase	%	78,38	50,68	95.41	56.21	87.97

Sumber Data : Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan Kota Palopo Tahun 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah kelompok tani tiap tahun mengalami peningkatan. Hal ini menandakan bahwa tingkat kesadaran petani di Kota Palopo relatif cukup tinggi untuk mengelola pertaniannya secara bersama-sama. Cakupan bina kelompok tani periode 2016-2020, terbesar pada tahun 2020.

2.1.3.3.4. Bidang Urusan Perdagangan

Ekspor Bersih Perdagangan

Tabel 2.263
Nilai Ekspor Bersih
Kota Palopo Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
a.	Nilai ekspor	Juta	1.746.139	2.112.272	2,357,785.97	2.539.220,00	2.538.012,08
b.	Nilai impor	Juta	2.580.805	2.914.631	3,033,366.30	3.543.980,00	3.543.980,26
C	Nilai ekspor bersih (a-b)	Juta	(834.666)	(802.359)	(945,580)	(1.004.760,00)	(1.005.968,18)

Sumber Data : Dinas Perdagangan Kota Palopo Tahun 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa ekspor kota Palopo lebih kecil dibandingkan dengan impor yang masuk ke Kota Palopo. Ini menunjukkan bahwa Kota Palopo menjadi market yang cukup potensial bagi sejumlah komoditas yang dibutuhkan oleh masyarakat Kota Palopo. Kondisi ini sekaligus menjadi tantangan dan potensi bagi para pelaku usaha di Kota Palopo untuk memenuhi aneka kebutuhan masyarakat Kota Palopo yang selama ini masih diimpor dari luar Kota Palopo.

Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal

Pedagang adalah orang yang melakukan perdagangan, memperjual belikan barang yang tidak diproduksi sendiri, untuk memperoleh suatu keuntungan. Indikator ini untuk mengetahui kinerja intervensi pemerintah Kota Palopo dalam memberikan bantuan bagi kelompok pedagang/usaha informal di Kota Palopo dalam rangka peningkatan produksi dan produktifitas usahanya. Semakin tinggi persentase indikator ini menunjukkan komitmen dan keseriusan pemerintah Kota Palopo membina dan mengembangkan penghidupan pedagang/usaha informal yang ada.

Pedagang besar adalah pedagang yang kegiatannya membeli barang dalam jumlah yang besar dan menjualnya kembali dengan jumlah yang besar. Pedagang Menengah adalah pedagang yang membeli barang dagangan dalam jumlah besar dan menjualnya kembali kepada para pedagang kecil dalam jumlah sedang atau kecil. Pedagang Kecil adalah pedagang yang membeli barang dagangan dalam jumlah sedang dan menjualnya kembali kepada konsumen akhir. Termasuk didalamnya pedagang mikro (BPS).

Data menunjukkan bahwa jumlah pedagang sepanjang tahun 2016-2020 di Kota Palopo meningkat. Jika tahun 2015 sebanyak 6.853 pada tahun 2017 sebanyak 7.756 pedagang. Jumlah ini merupakan akumulasi pedagang besar kecil maupun menengah.

Sesuai klasifikasi usahanya, jumlah pedagang kecil juga meningkat. Jika pada tahun 2015 hanya terdapat 5.930 pedagang kecil pada tahun 2017 menjadi sebanyak 6.886 pedagang. Jumlah pedagang menengah berkurang dari 680 usaha pada tahun 2015 menjadi 538 pedagang pada tahun 2017.

2.1.3.3.5. Bidang Urusan Perindustrian

Cakupan Bina Kelompok Pengrajin

Tabel 2.264
Persentase Cakupan Bina Kelompok Pengrajin
di Kota Palopo Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
a.	Jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan binaan pemda	Kelompok	11	0	0	5	4
b.	Jumlah kelompok pengrajin	Kelompok	83	117	130	204	237
c	Persentase	%	13,25	0,00	0,00	2.45	1,69

Sumber Data : Dinas Perindustrian Kota Palopo Tahun 2021

Angka dalam tabel di atas memperlihatkan bahwa cakupan binaan bagi kelompok pengrajin di Kota Palopo sepanjang tahun 2016-2020 menurun. Jika tahun 2016 hanya sebanyak 13,25% dan tahun 2017 dan 2018 tak ada bantuan bagi kelompok pengrajin di Kota Palopo dan 2020 sebanyak 1,69%.

2.1.3.3.6. Bidang Urusan Transmigrasi

Persentase Transmigran Swakarsa

Transmigrasi swakarsa adalah transmigrasi yang dilaksanakan atas kemauan dan biaya sendiri sedangkan pemerintah hanya menyediakan lahan untuk bertani atau mendirikan rumah untuk tempat tinggalnya. Indikator ini untuk mengetahui tingkat partisipasi dan kemampuan masyarakat secara mandiri untuk melaksanakan transmigrasi.

Suatu penyelenggaraan transmigrasi dapat dikatakan berhasil jika memenuhi syarat sebagai berikut: Jumlah penduduk yang ditransmigrasikan ke daerah lain, tiap tahun lebih banyak daripada pertambahan penduduk daerah yang ditinggalkan. Jika di daerah yang ditinggalkan itu tekanan penduduk sudah berangsur-angsur berkurang dan orang-orang yang ditransmigrasikan itu memperoleh tingkat hidup yang lebih baik. Jika antara pendatang baru (transmigran) dan penduduk yang didatangi dapat hidup berdampingan, dapat terjadi perpaduan kebudayaan, sehingga terhindar dan perasaan kesukuan di antara mereka.

2.1.3.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

2.1.3.4.1. Sekretariat DPRD

Tersedianya Rencana Kerja Tahunan Pada Setiap Alat – Alat Kelengkapan DPRD Kota

Tabel 2.265
Tersedianya RKT Pada Alat – Alat Kelengkapan DPRD
Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat – alat kelengkapan DPRD provinsi/kab/kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber Data : Sekretariat DPRD Kota Palopo Tahun 2021

Tersusun dan Terintegrasinya Program – Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen Rencana Lima Tahun (RPJM) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)

Tabel 2.266
Terintegrasinya Program – Program Kerja DPRD dengan RPJMD
dan RKPD Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja dprd untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima tahun (RPJM) maupun dokumen rencana tahunan (RKPD)	Ada (2)	Ada (2)	Ada (3)	Ada (3)	Ada (3)

Sumber Data : Sekretariat DPRD Kota Palopo Tahun 2021

Terintegrasinya Program – Program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda dan Anggaran ke Dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD

Tabel 2.267
Terintegrasinya Program – Program Kerja DPRD ke Dalam
Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD
Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Terintegrasinya Program – Program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda dan Anggaran ke Dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada (2)	Ada (2)	Ada (2)	Ada (2)	Ada (2)

Sumber Data : Sekretariat DPRD Kota Palopo Tahun 2021

2.1.3.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

2.1.3.5.1. Bidang Urusan Perencanaan

Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan makro untuk jangka waktu 20 tahun. Dokumen RPJPD Kota Palopo diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dan acuan untuk penyusunan perencanaan pembangunan selanjutnya baik untuk jangka menengah maupun jangka pendek.

Tabel 2.268
Ketersediaan Dokumen RPJPD
Kota Palopo

Uraian	Ada/Tidak	PERDA/PERKADA
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 11 Tahun 2013 tentang RPJPD Kota Palopo Tahun 2005 – 2025

Sumber Data : BAPPEDA Kota Palopo Tahun 2020

Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA/PERKADA

Adalah indikator yang mengindikasikan komitmen daerah terhadap regulasi pengelolaan perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah lima tahunan secara terencana dan memiliki azas legal. Dokumen RPJMD belaku selama lima tahunan. Daerah yang memiliki dokumen RPJMD yang telah perdakan, menunjukkan keseriusan daerah untuk melaksanakan pembangunan secara terencana dan sistematis dan memiliki aspek legalitas.

Tabel 2.269
Ketersediaan Dokumen RPJMD
Kota Palopo

Uraian	Ada/Tidak	PERDA/PERKADA
Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 12 Tahun 2013 tentang RPJMD Kota Palopo Tahun 2013 – 2018
	Ada	Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan RPJMD Kota Palopo Tahun 2013 – 2018
Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2020 tentang RPJMD Kota Palopo Tahun 2018 – 2023

Sumber Data : BAPPEDA Kota Palopo Tahun 2020

Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERKADA

Adalah indikator yang mengindikasikan komitmen daerah terhadap regulasi pengelolaan keuangan daerah secara terencana dan memiliki azas legal. Dokumen RKPD belaku satu tahun. Daerah yang memiliki dokumen RKPD yang telah perwalkan, menunjukkan keseriusan daerah untuk melaksanakan pembangunan secara terencana dan sistematis dan memiliki aspek legalitas.

Tabel 2.270
Ketersediaan Dokumen RKPD
Kota Palopo Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	Ada/Tidak	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Perwa I No. 12 Tahun 2014	Perwa I No. 22 Tahun 2015	Perwa I No. 12 Tahun 2016	Perwa I No. 35 Tahun 2017	Perwa I No. 40 Tahun 2018

Sumber Data : BAPPEDA Kota Palopo Tahun 2020

Tersedianya Dokumen RTRW Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA

Adalah indikator yang mengindikasikan tersedianya tujuan dan sasaran serta strategis pembangunan kewilyahan sebuah daerah. Daerah yang memiliki dokumen RT RW yang telah diperdakan, dianggap telah memiliki komitmen melaksanakan pembangunan berkelanjutan dan peduli pada isu isu lingkungan hidup dan kesejahteraan sosial masyarakat.

Tabel 2.271
Ketersediaan Dokumen RTRW
Kota Palopo

Uraian	Ada/Tidak	PERDA/PERKADA
Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 9 Tahun 2013 tentang RTRW Kota Palopo Tahun 2012 – 2032

Sumber Data : BAPPEDA Kota Palopo Tahun 2020

Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD

Adalah indikator yang mengindikasikan komitmen daerah pada perencanaan strategis (lima tahunan) dan perencanaan operasional (tahunan). Angka 100 persen menunjukkan tingkat kesesuaian dan keselarasan dokumen RPJMD dan RKPD sangat baik, yang mencerminkan adanya komitmen dan konsistensi pada apa yang direncanakan dengan apa yang akan dilaksanakan pada tahun tertentu.

Tabel 2.272
Persentase Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD
Kota Palopo Tahun 201 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
a.	Jumlah program RKPD tahun berkenaan	Buah	222	192	213	245	261
b.	Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan	Buah	235	243	231	250	250
Persentase		Persen	94,46	79,01	92,20	98	104.4

Sumber Data : BAPPEDA Kota Palopo Tahun 2021

Jumlah program RKPD tahun 2020 sebanyak 261 dibandingkan dengan Program di RPJM terdapat selisih program sebanyak 11 program yang diakibatkan program DAK yang tidak tertuang di dalam RPJMD Kota Palopo Tahun 2018-2023.

Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD

Adalah indikator yang mengindikasikan komitmen daerah menganggarkan apa yang direncanakan dan merencanakan apa yang dianggarkan. Indikator ini juga menggambarkan kualitas perencanaan dan pengelolaan belanja daerah. Semakin tinggi kesesuaian RKPD dengan APBD semakin baik perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah.

Tabel 2.273
Persentase Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD
Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
a.	Jumlah program APBD tahun berkenaan	Buah	182	182	158	245	240
b.	Jumlah program RKPD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan	Buah	222	192	213	245	261
Persentase		%	81,98	94,79	74,17	100	91.95

Sumber Data : BAPPEDA Kota Palopo Tahun 2021

Jumlah program RKPD tahun 2020 sebanyak 261 dibandingkan dengan Program di APBD terdapat selisih program sebanyak 21 program yang terdapat di RKPD tidak semuanya diakomodir di APBD karena keterbatasan kemampuan fiskal.

Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW

Adalah indikator yang mengindikasikan komitmen daerah untuk menselaraskan rencana penggunaan tata ruang termasuk tujuan, sasaran dan program penataan ruang dengan rencana pembangunan strategis yang ada. Semakin besar tingkat kesesuaian perencanaan strategis dengan tujuan, sasaran dan program di RT RW semakin baik pengelolaan tata ruang di sebuah daerah.

2.1.3.5.2. Bidang Urusan Keuangan

Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan

Adalah indikator yang mengindikasikan kualitas manajemen pengelolaan keuangan daerah yang sesuai standar akuntansi yang ada. Clean and clear adalah predikat pengelolaan keuangan daerah tertinggi, disusul Wajar Tanpa Pengecualian, Wajar dengan Pengecualian dan terendah adalah Disclaimer.

Tabel 2.274
Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan
Kota Palopo Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
a.	Hasil opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	Belum Rilis

Sumber Data : BPKAD Kota Palopo Tahun 2021

Persentase SILPA

Sedangkan SILPA (dengan huruf i besar/kapital) adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan. Yaitu selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Dalam penyusunan APBD angka SILPA ini seharusnya sama dengan nol. Artinya bahwa penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang terjadi.

SiLPA (dengan huruf i kecil) adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yaitu selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Tabel 2.275
Persentase SILPA
Kota Palopo Tahun 2016 - 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Total SILPA	59.142.126.892,80	22.836.223.879,74	1,151,996,965.34	34.049.876.279,26	46.816.641.540
Total APBD	1.149.130.774.704	1.015.794.194.014	982,957,077,365.89	956.451.857.030,35	943.885.796.203,19
Persentase	5,15	2,25	0.12	3.56	4.96

Sumber Data : BPKAD Kota Palopo Tahun 2021, audited

Persentase Program/Kegiatan yang Tidak Terlaksana

Adalah indikator yang mengindikasikan komitmen daerah dalam melaksanakan program yang tertuang dalam APBD daerah. Semakin tinggi atau banyak program APBD yang tidak dilaksanakan, menunjukkan perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah yang belum baik.

Tabel 2.276
Persentase Program/Kegiatan yang Tidak Terlaksana
di Kota Palopo Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
a.	Jumlah program dalam APBD yang tidak dilaksanakan	Prog	1	2	2	1	3
b.	Total program dalam APBD	Prog	346	359	321	381	242
	Persentase		0,3	0,6	0,62	0,3	1,2
a.	Jumlah kegiatan dalam APBD yang tidak dilaksanakan	Keg	10	15	15	12	11
b.	Total kegiatan dalam APBD	Keg	1361	1414	1.437	1.615	1.512
	Persentase		0,7	1,06	1,04	0,74	0,73

Sumber Data : BPKAD Kota Palopo Tahun 2021

Persentase Belanja Pendidikan (20%)

Adalah indikator yang mengindikasikan komitmen daerah memenuhi spending moneter untuk membiayai urusan pendidikan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Persentase belanja bidang pendidikan yang semakin mendekati angka 20% menunjukkan komitmen daerah dalam meningkatkan dan memenuhi perintah UU mewujudkan anggaran yang layak dalam pembangunan sektor pendidikan.

Tabel 2.277
Persentase Belanja Pendidikan (20%)
di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah belanja bidang pendidikan (Rp)	255.348.088.498	181.192.586.801	179,786,127,789.00	192.962.137.080,00	184.538.461.945
Total APBD (Rp)	1.149.130.774.704	1.015.794.194.014	982,957,077,365.89	956.451.857.030,35	943.885.796.203,19
Persentase	22.22	17.84	18.29	20.17	19.55

Sumber Data : BPKAD Kota Palopo Tahun 2021

Data di atas menunjukkan bahwa belanja bidang Pendidikan di Kota Palopo cenderung menurun. Jika pada tahun 2016 berada pada angka 22.22%, tahun 2020 hanya pada angka 19.55%.

Persentase Belanja Kesehatan (10%)

Adalah indikator yang mengindikasikan komitmen daerah memenuhi spending moneter untuk membiayai urusan kesehatan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Persentase belanja bidang kesehatan yang semakin mendekati angka 10% menunjukkan komitmen daerah dalam meningkatkan dan memenuhi perintah UU mewujudkan anggaran yang layak dalam pembangunan sektor kesehatan.

Tabel 2.278
Persentase Belanja Kesehatan (10%)
di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah belanja bidang kesehatan (Rp)	214.226.652.392	248.704.751.533	258,102,101,672.28	283.035.096.618,97	350.535.474.412,56
Total APBD (Rp)	1.149.130.774.704	1.015.794.194.014	982,957,077,365.89	956.451.857.030,35	943.885.796.203,19
Persentase	18.64	24.48	26.26%	29.60%	37.14

Sumber Data : BPKAD Kota Palopo Tahun 2021

Data di atas menunjukkan bahwa belanja bidang kesehatan di Kota Palopo pada tahun 2020 telah melebihi angka 10%. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Palopo sangat komitmen terhadap pembangunan bidang kesehatan di Kota Palopo.

Perbandingan Antara Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung

Adalah indikator yang mengindikasikan komitmen daerah mewujudkan APBD yang lebih pro rakyat dan berorientasi pada pembangunan daerah dan masyarakat. Persentase belanja langsung yang lebih tinggi, menunjukkan bahwa belanja lebih banyak diarahkan pada pembangunan daerah bukan pada pemenuhan kebutuhan aparatur pemerintah saja.

Tabel 2.279
Persentase Perbandingan Antara Belanja Langsung
dengan Belanja Tidak Langsung
Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah belanja langsung (Rp)	719.186.393.030	651.615.212.524	565,990,971,307. 28	542.280.383.025,45	527.126.849.065
Total APBD (Rp)	1.149.130.774.704	1.015.794.194.01 4	982,957,077,365. 89	956.451.857.030,35	943.885.796.203,19
Persentase	62.59	64.15	57.6%	56.70%	55.85 %
Jumlah belanja tidak langsung (Rp)	429.944.381.674	364.178.985.490	416,966,106,058. 61	414.171.474.004,90	416.758.947.138
Total APBD (Rp)	1.149.130.774.704	1.015.794.194.01 4	982,957,077,365. 89	956.451.857.030,35	943.885.796.203,19
Persentase	37.41	35.85	42.42%	43.30%	44.15 %

Sumber Data : BPKAD Kota Palopo Tahun 2021

Data di atas menunjukkan Pemerintah Kota Palopo setiap tahunnya mampu mengalokasikan anggaran yang lebih banyak untuk belanja program dan kegiatan perangkat daerah.

Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa

Tabel 2.280
Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa
di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah belanja bagi hasil Kab/Kota/Desa	23.386.791.194	18.220.349.272	56,476,634,835.00	62,767,391,329.43	46.443.640.112,62
Total APBD	1.149.130.774.704	1.015.794.194.014	982,957,077,365.89	956,778,838,394.35	943.899.350.653,19
Persentase	2,04	1,79	5.75	6.56	4.92

Sumber Data : BPKAD Kota Palopo Tahun 2021

Data dalam tabel di atas memperlihatkan bahwa persentase dana bagi hasil yang diterima pemerintah Kota Palopo sepanjang 2106-2019 meningkat. Pada Tahun 2020 mengalami penurunan dan berada pada angka 4.92%.

Penetapan APBD

Tabel 2.281
Ketepatan Waktu Penetapan APBD
Kota Palopo Tahun 2016 - 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu

Sumber Data : BPKAD Kota Palopo Tahun 2021

2.1.3.5.3. Bidang Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Rata – Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan

Tabel 2.282
Rata- Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan
Tahun 2016 - 2020

Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	Hari/JamPelajaran	103 Hari/8 93 JP	103 Hari/8 93 JP	103 Hari/8 93 JP	103 Hari/8 93 JP	103 Hari/8 93 JP

Sumber Data : Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM Kota Palopo Tahun 2020

Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal

Adalah indikator yang mengindikasikan peningkatan sumber daya manusia aparatur daerah melalui peningkatan jumlah aparatur yang telah mengikuti diklat formal. Semakin tinggi nilai indikator ini, menunjukkan semakin tingginya komitmen daerah meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama aparatur sipili negara di daerah.

Tabel 2.283
Persentase ASN Kota Palopo yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal
Tahun 2016 - 2020

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Orang	34	42	36	30	4
2.	Jumlah total ASN	Orang	4.794	4.672	4.553	4.503	4.310
3	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	0,7	0,9	0,79	0,67	0,09

Sumber Data : Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Kota Palopo dalam upaya meningkatkan kapasitas aparturnya melalui pendidikan dan pelatihan sejak 2015-2020 mengalami fluktuatif. Jika pada tahun 2015 ada sebanyak 0,5% aparatur yang didiklat, pada tahun 2020 sekitar 0,67%.

Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural

Tabel 2.284
Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural Tahun 2016 - 2020

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural	Orang	281	286	297	377	379
2.	Jumlah total jabatan	Orang	927	977	979	993	993
3	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	30,3	29,3	30,34	37,97	38,17

Sumber Data : Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan sampai tahun 2020, masih ada 62,03% pejabat struktural Kota Palopo yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan. Olehnya Pemerintah Kota Palopo perlu mengakselerasi program dan kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi pejabat struktural dengan lembaga penyelenggara.

Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah

Adalah indikator yang menunjukan jumlah jabatan pimpinan tinggi yang bertanggung jawab memimpin pelaksanaan roda pemerintahan sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Sekaligus mengukur komitmen daerah dalam menegakan perda tentang susunan organisasi dan perangkat daerah Kota Palopo yang berlaku pada masanya.

Tabel 2.285
Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah
Kota Palopo Tahun 2016 - 2020

Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah	Orang	34	33	35	33	33

Sumber Data : Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM Kota Palopo Tahun 2021

Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah

Tabel 2.286
Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah
Kota Palopo Tahun 2016 - 2020

Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah	Orang	900	949	951	960	975

Sumber Data : Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM Kota Palopo Tahun 2021

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah jabatan administrasi pada pemerintah Kota Palopo sejak 2016-2020 bertambah sebanyak 75 jabatan dari 900 jabatan pada tahun 2016 menjadi 975 jabatan administrasi pada tahun 2020.

Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah

Tabel 2.287
Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi
Pemerintah Kota Palopo Tahun 2016 - 2020

Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah	Orang	2.261	2.217	2.210	2.213	2.122

Sumber Data : Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM Kota Palopo Tahun 2021

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada lingkup Pemerintah Kota Palopo sejak 2016-2020 terus berkurang. Kondisi ini terutama diakibatkan oleh perpindahan kewenangan tenaga fungsional guru terutama pada tingkat pendidikan menengah pasca terbitnya UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana Pendidikan Menengah dikelola oleh Pemerintah provinsi. Sehingga tenaga guru pada pendidikan menengah juga beralih ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

2.1.3.5.4. Bidang Urusan Penelitian dan Pengembangan

Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan

Tabel 2.288
Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan
Kota Palopo Tahun 2016 - 2020

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah kelitbangan dalam RKPD	Prog	11	11	11	6	11
2.	Jumlah kelitbangan dalam RPJMD	Prog	11	11	11	6	11
Persentase		%	100	100	100	100	100

Sumber Data : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palopo, 2021.

Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan

Tabel 2.289
Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan
Kota Palopo Tahun 2016 - 2020

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti		17	4	4	3	2
2.	Jumlah kelitbangan dalam Renja perangkat daerah		20	11	11	5	4
	Persentase	%	85	36,36	36,36	50	50

Sumber Data : Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo Tahun 2021

Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah

Adalah indikator yang mengindikasikan komitmen daerah dalam menerapkan inovasi secara terus menerus dalam rangka peningkatan kinerja. Semakin tinggi persentase indikator ini, menunjukkan semakin besarnya komitmen perangkat daerah dalam memperbaiki kualitas kinerja dan pelayanan publik sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah

Tabel 2.290
Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah
Kota Palopo Tahun 2016 - 2020

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan	Buah	6	12	14	18	18
2.	Jumlah inovasi yang diusulkan	Buah	23	23	23	49	18
	Persentase	%	26,08	52,10	60,87	36,3	100

Sumber Data : Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo, 2021.

2.1.3.5.5. Bidang Urusan Pengawasan

Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan

Tabel 2.291
Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan
di Kota Palopo Tahun 2016 - 2020

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah rekomendasi temuan yang ditindaklanjuti	Kasus	166	260	202	158	621
2.	Jumlah rekomendasi total temuan	Kasus	399	456	434	211	636
3.	Persentase	%	41,60	57,02	46,54	75	97,64

Sumber Data : Inspektorat Daerah Kota Palopo Tahun 2021

Data di atas menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan dalam menindaklanjuti temuan di lingkup Pemerintah Kota Palopo justru semakin membaik. Jika pada tahun 2016, persentase temuan yang ditindaklanjuti pada angka 41,60% pada tahun 2020, temuan yang ditindaklanjuti meningkat menjadi 97,64 %.

Persentase Pelanggaran Pegawai

Tabel 2.292
Persentase Pelanggaran Pegawai
di Kota Palopo Tahun 2016 - 2020

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah ASN yang dikenai sanksi	Orang	4	2	0	41	37
2.	Jumlah total ASN	Orang	4.794	4.672	4.544	4.503	4.310
3.	Persentase	%	0,08	0,04	0,00	0,91	0,86

Sumber Data : Inspektorat Daerah Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan dilihat dari jumlah kasus dan persentase, tingkat pelanggaran pegawai di Kota Palopo sepanjang tahun 2016-2020 meningkat. Jika pada tahun 2016 sebanyak 4 dari 1000 pegawai Kota Palopo pernah mendapatkan sanksi, jumlah ini meningkat pada Tahun 2020 dari 1000 pegawai kota Palopo 37 orang pernah dikenakan sanksi.

Jumlah Temuan BPK

Tabel 2.293
Jumlah Temuan BPK
di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Temuan BPK	9	19	16	12	27

Sumber Data : Inspektorat Daerah Kota Palopo Tahun 2021

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2016 sebanyak 9 jumlah temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, namun tahun 2020 mengalami peningkatan sebanyak 27 temuan. Kondisi ini mencerminkan bahwa salah satu fungsi Inspektorat Kota Palopo yakni melaksanakan supervisi, berjalan semakin baik sehingga perangkat daerah lebih baik dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dan asetnya.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Diisi sesuai dengan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek daya saing daerah. Lebih lanjut dijelaskan tentang fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/infrastruktur, fokus iklim berinvestasi, dan fokus sumberdaya manusia.

2.1.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (*attractiveness*) bagi pelaku ekonomi yang telah berada didalam dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan multiplier effect bagi peningkatan daya saing daerah. Kemampuan ekonomi daerah memicu daya saing daerah.

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Pengeluaran konsumsi per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Sementara pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita adalah total biaya pengeluaran rumah tangga dibagi dengan banyaknya rumah tangga yang ada.

Data pengeluaran dapat mengungkap tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, makin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran makin membaik tingkat kesejahteraan.

Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pengeluaran bukan makanan. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

Tabel 2.294
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita di Kota Palopo
Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah	3,388.89	3,721.83	4,116.12	4,453.72	4,453.72

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Tangga (Milyar /Thn)					
2	Jumlah Rumah Tangga (RT)	37,749	38,641	39,444	40,303	40,303
	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita (Juta/Tahun)	89,774	96,318	104,354	110,506	110,506

Sumber Data : Data BPS Kota Palopo

Data dalam tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah konsumsi rumah tangga di Kota Palopo sejak 2016-2020 meningkat. Jika pada tahun 2016 hanya berada pada angka 89,774 juta per tahun per rumah tangga, tahun 2020 meningkat menjadi 110,51 juta per tahun per rumah tangga.

Pengeluaran Per Kapita

Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Data pengeluaran dapat mengungkap tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, makin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran makin membaik tingkat kesejahteraan.

Tabel 2.295
Pengeluaran Per Kapita 2016-2020
(Ribu Rupiah/Orang/Tahun)

Wilayah	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Palopo	12,156	12,319	12,662	12,986	12,955
Pare-Pare	12,966	13,078	13,303	13,648	
Makassar	16,013	16,367	16,597	16,989	
Sulawesi Selatan	10,281	10,489	10,814	11,118	
Nasional	10,420	10,664	11,059	11,299	

Sumber : BPS. Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Angka, 2021

Pengeluaran per kapitas masyarakat Kota Palopo tahun 2020 melebihi target pengeluaran per kapita Kota Palopo tahun 2020 yang berada pada angka 12.812 (ribu/orang/tahun).

Persentase Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Non Pangan Per Kapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga adalah nilai belanja yang dilakukan oleh rumah tangga untuk membeli berbagai jenis kebutuhannya (pangan dan non pangan) dalam periode waktu tertentu. Pengeluaran untuk konsumsi makanan dan bukan makanan berkaitan erat dengan tingkat pendapatan masyarakat. Semakin besar belanja dan konsumsi non pangan, semakin besar tingkat kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.296
Persentase Pengeluaran Konsumsi RT Non Pangan Per Kapita
di Kota Palopo Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Pengeluaran Makanan	Rp	447,306	428,060	529.701	623,068	536662
b.	Pengeluaran Non Makanan	Rp	547,171	448,870	570.813	662,290	651984
c	Total Pengeluaran Konsumsi	Rp	994,477	876,930	1,101	1,285,358	1,188,646
d	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan	%	55.02%	51.19%	51.87%	51.53%	54.85%

Sumber Data : BPS Palopo, Buku Indikator Kesejahteraan Masyarakat dan Palopo Dalam Angka 2019

Data di atas menunjukkan bahwa konsumsi non pangan per kapita masyarakat Kota Palopo sepanjang tahun 2015-2020 selalu berada di atas angka konsumsi pangannya. Artinya sebagian besar pendapatan masyarakat di Kota Palopo sepanjang kurun waktu tersebut di atas dipakai lebih banyak untuk belanja non pangan. Ini menunjukkan bahwa rata-rata tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Palopo sudah relatif cukup baik.

Produktivitas Total Daerah

Produktifitas total daerah diperoleh dengan membagi nilai tambah sektor lapangan usaha dengan jumlah angkatan kerja yang ada dalam kurun waktu tertentu. Produktivitas total daerah dihitung untuk mengetahui tingkat produktivitas tiap sektor per angkatan kerja yang menunjukkan seberapa produktif tiap angkatan kerja dalam mendorong ekonomi daerah per sektor.

Produktivitas Total Daerah dapat diketahui dengan menghitung produktivitas daerah per sektor (17 sektor) yang merupakan jumlah PDRB dari setiap sektor dibagi dengan jumlah angkatan kerja dalam sektor yang bersangkutan.

Tabel 2.297
Produktivitas Total Daerah
Kota Palopo Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah Nilai Tambah Sektor (= Jumlah PDRB (Hb/Juta)	5.351.284,90	5.906.480,42	6.550.688,67	7.285.142,35	7.942.480
B	Jumlah Angkatan Kerja (Orang)	65.346	67.504	75.563	75.829	80.854
C	Produktifitas Total Daerah (Juta/Thn)	81.89	87.5	86.69	96.67	98.23

Sumber Data : Diolah dari Buku PDRB Kota Palopo 2019, diolah

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2015, seorang tenaga kerja yang bekerja hanya menghasilkan nilai tambah produk sebesar 81.89 juta/tahun dan pada tahun 2020 menjadi 98.23 juta/tahun/tenaga kerja

Rasio Ekspor + Impor Terhadap PDB (Indikator Keterbukaan Ekonomi)

Tabel 2.298
Rasio Ekspor + Impor Terhadap PDRB
Kota Palopo Tahun 2016-2019

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Ekspor (Juta)	1,723.68	1,859.52	2,239.90	2,539.22	2,743.11
2	Jumlah Impor (Juta)	2,578.30	2,695.62	3,188.62	3,543.98	3,785.40
3	Jumlah Ekspor + Impor (Juta)	4,301.98	4,555.14	5,428.52	6,083.20	6,528.51
4	Jumlah PDRB (Juta)	5,886.52	6,514.94	7,285.14	7,942.48	8,456.47
5	Rasio Ekspor + Impor (%)	73.08%	69.92%	74.51%	76.59%	77.20%

Sumber Data : Palopo Dalam Angka 2019,

Angka dalam tabel juga menunjukkan bahwa setaip tahun ekonomi di Kota Palopo semakin terbuka yang ditandai dengan semakin meningkatnya nilai rasio ekspor dan impor terhadap PDRB Kota Palopo.

2.1.4.2. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Tabel 299
Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan
di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
a.	Panjang jalan	Km	502	503.16	503,16	503,16	503,16
b.	Jumlah kendaraan	Unit	26.846	27.998	29.150	30,607	35,994
Rasio		Angka	0.019	0.018	0,017	0,016	0,014
Rasio		Per 1000	19	18	17	16	14

Sumber Data : BPS, Palopo Dalam Angka 2021

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2016, tingkat kepadatan jalan per Km terdapat 19 kendaraan, sementara di 2020, terdapat 14 kendaraan. Artinya kondisi jalan di Kota Palopo pada tahun 2020, lebih padat dibandingkan tahun 2016.

Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum

Tabel 2.300
Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum
di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah orang yang terangkut angkutan umum	1.680.024	1.344.991	1.326.741	1.323.252	573.160
Jumlah barang yang terangkut angkutan umum (m3)	605.649	600.911	603.524	607.024	n/a

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2020

Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal Per Tahun

Tabel 2.301
Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal Per Tahun
Kota Palopo Tahun 2016 - 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah barang melalui dermaga per tahun (m ³)	605.649	600.911	603.524	615.594	481.279
Jumlah orang melalui dermaga per tahun (orang)	122	445	314	352	238
Jumlah barang melalui terminal per tahun (kg)	3.360	2.689	3.176	3.620	n/a
Jumlah orang melalui terminal per tahun (orang)	1.680.024	1.344.991	1.326.741	1.323.252	573.160

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2020

Ketaatan Terhadap RTRW

Ketaatan terhadap RTRW merupakan realisasi luas wilayah sesuai dengan peruntukannya dibagi dengan luas wilayah yang direncanakan sesuai dengan RTRW. Makin tinggi nilai indikator ini menunjukkan makin taatnya pembangunan terhadap rencana RT RW yang ada.

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
a.	Realisasi RTRW	n/a	16.846.73	16.859.0622	16.883.7265	16.933.0553
b.	Rencana peruntukan	25.816.6644	25.816.6644	25.816.6644	25.816.6644	25.816.6644
c.	Persentase	n/a	65.25	65.30	65.39	65.50

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang , 2021.

Jenis dan Jumlah Bank

Aktivitas Sektor keuangan memegang peranan yang sangat signifikan dalam memacu pertumbuhan ekonomi suatu negara pada umumnya dan Palopo pada khususnya. Aktivitas sektor keuangan, atau yang lebih umum dikenal sebagai jasa keuangan, meliputi beberapa sub sektor diantaranya Perbankan, Asuransi dan Dana Pensiun, Jasa Keuangan Lainnya serta Jasa Penunjang Keuangan. Untuk Palopo, peningkatan kinerja sektor keuangan lebih dipengaruhi oleh kinerja positif perbankan. Sektor perbankan menjadi lokomotif pertumbuhan sektor riil melalui akumulasi kapital dan inovasi teknologi. Lebih tepatnya, sektor keuangan mampu memobilisasi tabungan dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang membutuhkan melalui kredit. Mereka menyediakan para peminjam berbagai instrumen keuangan dengan kualitas tinggi dan resiko rendah. Hal ini akan menambah investasi dan akhirnya mempercepat pertumbuhan ekonomi

Tabel 2.302
Data Jumlah dan Jenis Bank di Kota Palopo Tahun 2017 - 2020

Jenis Bank	2017	2018	2019	2020
Bank umum (Konvensional & Syariah)	12	12	20	20

Sumber: Potensi Ekonomi Kota Palopo

Jenis Kelas dan Jumlah Restoran

Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum merupakan salah satu sektor unggulan penggerak ekonomi Palopo. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang meliputi usaha perhotelan, restoran dan rumah makan. Berdasarkan analisis economic based approach kategori ini terpilih sebagai sektor unggulan di Palopo. Kontribusi kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB Kota Palopo pada Tahun 2016 masih terbilang kecil yaitu sebesar 1,21 persen dan mencatatkan laju pertumbuhan positif sebesar 8,45 persen.

Jenis Kelas dan Jumlah Penginapan Hotel

Berdasarkan data BPS, jumlah hotel, jumlah kamar, jumlah tempat tidur dan jumlah tamu hotel menunjukkan tren meningkat. Jumlah hotel/penginapan/wisma dan sejenisnya di Kota Palopo sampai dengan tahun 2015 sebanyak 38 unit. Dua unit diantaranya merupakan bintang dua dan sisanya 36 unit adalah non bintang. Penyebaran penginapan tersebut hanya berada di tiga kecamatan yakni Kecamatan Wara sebanyak 16 unit, Wara Timur sebanyak 12 unit dan Mungkajang 2 unit serta Wara Utara 4 unit.

Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih

Tabel 2.303
Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih
di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

No	Sumber Air Bersih	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Leding (Perpipaan)	21.958	23.467	25.594	26.806	28.018
2	Sumur Lindung	956	1.006	1.044	1.073	1.102
3	Sumur Tidak Terlindung	6.217	6.222	6.248	6.258	6.268
4	Mata Air Terlindung	3.427	3.477	3.515	3.544	3.573
5	Air Kemasan	2.749	2.799	2.837	2.866	2.895
6	Lainnya	717	767	805	834	863
Total Jumlah Rumah Tangga yang menggunakan air bersih						
		36.423	37.738	38.422	39.088	39.754
Jumlah Rumah Tangga						
		36.871	37.749	39.444	40.302	41.160
Persentase Rumah Tangga yang menggunakan air bersih						

No	Sumber Air Bersih	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
		98,87%	99,97%	97,41	96,99	96,58

Sumber Data : Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Palopo Tahun 2021

Rasio Ketersediaan Daya Listrik

Adalah indikator yang menggambarkan kondisi energi listrik yang telah dikonsumsi oleh masyarakat Kota Palopo, dibandingkan dengan jumlah kebutuhan listrik yang ada.

Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik

Indikator ini menunjukkan seberapa besar masyarakat Kota Palopo yang mampu menikmati akses listrik. Semakin tinggi persentase indikator ini, menunjukkan semakin banyak masyarakat Kota Palopo yang mengakses listrik, sehingga lebih mudah dalam mengakses pelayanan lain dan menikmati berbagai hasil pembangunan lainnya.

Tabel 2.304
Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik
di Kota Palopo Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
a.	Jumlah rumah tangga pengguna listrik	Rumah Tangga	67,228	-	70,172	71,644	72,748
b.	Jumlah seluruh rumah tangga	Rumah Tangga	37.749	38.641	39,444	40.302	41.160
	Persentase						

Sumber Data : Statistik Daerah Kota Palopo, Dinas Pertambangan & ESDM Kota Palopo 2018

Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon

Indikator ini menggambarkan seberapa besar penetrasi alat komunikasi berupa ponsel diakses dan digunakan oleh masyarakat. Semakin tinggi nilai indikator ini artinya semakin banyak masyarakat yang memiliki akses informasi dan komunikasi melalui telephone yang menunjukkan semakin mudah dan terbukanya informasi yang ada.

Tabel 2.305
Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon
di Kota Palopo Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
a.	Jumlah penduduk yang menggunakan HP/telepon	Jiwa	122.321	140.181	153.493	159.200	168.420
b.	Jumlah penduduk	Jiwa	172.916	176.907	180.678	184.614	187.539
	Persentase	%	70,74	79,24	84,95	86,00	89,81

Sumber Data : Dinas Komunikasi & Informatika Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan peningkatan yang cukup besar atas akses penduduk terhadap telepon atau handphone di Kota Palopo. Tahun 2015 hanya 66,73% masyarakat yang menggunakan atau bisa mengakses layanan ini. Namun pada 2020 jumlahnya meningkat menjadi 86,00% sudah mengaksesnya. Ini menunjukkan semakin mudahnya komunikasi informasi di tingkat masyarakat.

2.1.4.3. Iklim Berinvestasi

Angka Kriminalitas yang Tertangani

Tabel 2.306
Angka Kriminalitas yang Tertangani
di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
a.	Jumlah tindak kriminal tertangani dalam 1 tahun	20	47	102	230	283
b.	Jumlah penduduk	172.916	176.907	180,678	184.614	187.539
Angka kriminalitas yang tertangani (per 10000)		8	12	6	12	15

Sumber data : BPS Kota Palopo

Data di atas menunjukkan bahwa dari 10.000 penduduk rata-rata terjadi kasus kejahatan sebanyak 7 kasus yang tertangani pada tahun 2015, sementara pada tahun 2020 angka menjadi 12 kasus tertangani per 10.000 penduduk.

Persentase Kelurahan Berstatus Swasembada Terhadap Total Kelurahan

Berdasarkan kriteria status, desa/kelurahan diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yaitu Desa/Kelurahan Swadaya, Desa/Kelurahan Swakarsa dan Desa/Kelurahan Swasembada. Desa/Kelurahan Swasembada; adalah desa yang berkecukupan dalam hal sumber daya manusia dan juga dalam hal dana modal sehingga sudah dapat memanfaatkan dan menggunakan segala potensi fisik dan non fisik desa secara maksimal.

Kehidupan desa swasembada sudah mirip kota yang modern dengan pekerjaan mata pencarian yang beraneka ragam serta sarana dan prasarana yang cukup lengkap untuk menunjang kehidupan masyarakat pedesaan maju.

Tabel 2.307
Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Kelurahan
Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
A	Persentase kelurahan berswasembada	%	100	100	100	100	100

Sumber Data : Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan bahwa semua kelurahan yang ada di Kota Palopo sejak 2015 sampai dengan 2019, Kota Palopo dengan 48 kelurahan yang ada dinilai telah berkecukupan dalam hal sumber daya manusia dan juga dalam hal dana modal sehingga sudah dapat memanfaatkan dan menggunakan segala potensi fisik dan non fisik desa secara maksimal. Kehidupannya masyarakatnya mirip dengan kota yang modern dengan pekerjaan mata pencarian yang beraneka ragam serta sarana dan prasarana yang cukup lengkap untuk menunjang kehidupan masyarakat yang maju.

2.1.4.4. Sumber Daya Manusia

Rasio Ketergantungan

Adalah Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja).

Rasio ketergantungan (dependency ratio) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Dependency ratio merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung

penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Tabel 2.308
Rasio Ketergantungan
Kota Palopo Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio ketergantungan	48.81	48.46	48.11	47.98	45.31

Sumber Data : Diolah dari Palopo Dalam Angka 2021

Data di atas menunjukkan bahwa untuk 100 orang penduduk usia produktif di Kota Palopo pada tahun 2016 mempunyai tanggungan sebanyak 49 orang usia non produktif. Beban ini tak jauh berbeda dengan tahun 2020 dimana untuk 100 orang penduduk usia produktif memiliki tanggungan sebanyak 45 orang usia non produktif.

Rasio Lulusan S1/S2/S3

Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya.

Tabel 2.309
Rasio Lulusan S1/S2/S3
di Kota Palopo Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
a.	Jumlah lulusan S1/S2/S3	Orang	15.599	16.490	12,452	11.403	10.354
b.	Jumlah penduduk	Orang	172.916	176.374	180.678	184.614	187.539
C	Rasio	Per 100	9.0	9.3	14.51	6.18	5.52

Sumber Data : Palopo Dalam Angka 2016-2020

Data di atas menunjukkan bahwa tahun 2014 dari 100 orang penduduk Kota Palopo terdapat 8-9 orang yang merupakan lulusan perguruan tinggi baik yang berpredikat sarjana, master/magister ataupun doktor. Kondisi tahun 2018 meningkat menjadi 14 orang berpendidikan strata 1 ke atas dari 100 penduduk Kota Palopo.

2.1.5. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

2.1.5.1. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Hasil analisis gambaran umum kondisi daerah terkait dengan capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dapat dirangkum dalam bentuk tabel, sebagai berikut :

Tabel 2.310
Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kota Palopo 2015-2020

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Capaian Kinerja Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi					
	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian					
1	Pertumbuhan PDRB (%/Tahun)	6.98	7.19	7.52	6.75	0.45
2	Laju inflasi (%/Tahun)	2.47	3.94	4.19	1.91	1.21
3	PDRB per kapita (Juta/Tahun)	34.18	37	40.32	43.02	42.61
4	Paritas Daya Beli (Ribu/Tahun)	12,156	12,319	12,465	12,986	12,995
5	Indeks Gini (Angka)	0.370	0.340	0.338	0.338	0.354
6	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan (%)	91.26	91.22	92.06	92.18	92.15
7	Persentase Penduduk Miskin (%)	8.74	8.78	7.94	7.82	7.85*

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Capaian Kinerja Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
8	Perkembangan Garis Kemiskinan Kota Palopo (Rp/Kapita/Bulan)	261,056	274,319	292,602	324,233	362,859
9	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	15,020	15,440	14,265	14,370	14,710
	Jumlah Penduduk(jiwa)	172,916	176,907	180,678	184,614	184,681
10	Proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari USD 1,00 (PPP) per kapita per hari (%)	8.74	8.78	7.94	7.82	7.85
	Indeks Kedalaman Kemiskinan	1.17	1.75	1.14	1.15	0.95
	Indeks Keparahan Kemiskinan	0.28	0.6	0.26	0.29	0.21
	Indeks Kesehatan	77.31	77.38	77.44	78.14	78.28
	Indeks Pendidikan	75.95	76.24	76.81	77.69	77.76
	Indeks Pengeluaran	76.1	76.51	76.88	78.12	78.14
11	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Angka)	76.69	76.71	77.3	77.98	78.06
12	Angka melek huruf (%)	96.07	98.22	97.71	98.4	98.16
13	Angka rata-rata lama sekolah (Tahun)	10.26	10.33	10.51	10.75	10.76
	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	15.03	15.05	15.06	15.07	15.08
14	Angka usia harapan hidup (Tahun)	70.25	70.30	70.49	70.79	70.88
15	Persentase balita gizi buruk (%/Tahun)	0.02	0.02	0.02	0	0
16	Prevalensi balita gizi kurang (%/Tahun)	2.14	2.37	1.91	3.84	3.24
17	Cakupan Kelurahan Siaga Aktif (%)	100	100	100	100	100
18	Angka partisipasi angkatan kerja (%)	54.81	56.33	55.48	60.49	62.35
	Angka Partisipasi Angkatan Kerja Laki-Laki	69.51	73.99	72.93	74.85	75.66
	Angka Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	41.31	40.41	39.81	47.37	50.34
19	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	58.09	59.56	58.31	64.58	61.23*
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Laki-Laki	73.03	77.61	76.40	79.16	76.23
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	44.15	43.03	42.32	51	47.14
20	Tingkat pengangguran terbuka (%)	14.43	10.96	11.60	10.32	10.37*
	Jumlah penganggur (Orang)		8265	8795	8314	8815
21	Rasio penduduk yang bekerja (%)	85.57	89.04	88.4	89.68%	89.63
22	Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja (%)	76.66	70.56	72.24	75.4	71.80%
23	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas (%)	46.9	50.15	49.16	54.25%	51.57%
24	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja (%)	-	25.51	25.76	25.07%	33.62%
	Laki - Laki	-	18.05	21.03	-	22.15
	Perempuan	-	7.46	9.48	-	11.46
25	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (%)	30.34	28.9	26.82	26.09%	26.09 (2019)
26	Indeks Kepuasan Masyarakat	n/a	79.9	80.34	83.08	83.06
27	Persentase PAD terhadap pendapatan (%)	13.35	17.91	19.78	16.83%	22.85%
28	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
29	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	90	91.6	92.5	92.6	90.1
30	Penguatan cadangan pangan (%)	66.3	72	76.14	115.2	87.53
31	Produksi sektor pertanian (Ton/Tahun)	36,592	37,620	36,527	25,025	21,756
	Padi	30,167	32,444	32,664	20,288	17,019
	Jagung	6,303	5,086	3,722	4,737	4,737
	Ubi Kayu	70.4	70	141	165	189
	Ubi Jalar	18.94	4.55	2.65	1.68	0.30
	Sagu	33.04	15.59	n/a	n/a	n/a
	Daging (Ruminansia dan Unggas) Ton	3318.87	3276.3	3365.50	4404.99	3642.79
	Daging (Ruminansia) Ton	232.94	247.48	249.50	601.82	375.62
	Daging Sapi (Ton)	232.24	247.16	222.80	596.87	370.18
	Daging Kerbau (Ton)	0.7	0.32	0.10	1.03	3.77
	Daging Kambing (Ton)	-	-	-	3.92	1.67

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Capaian Kinerja Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Daging Unggas (Ton)	3085.93	3028.822	3968.92	3803.16	3267.17
	Daging Ayam Kampung (Ton)	143.72	145.012	148.40	123.77	124.28
	Daging Ayam Pedaging (Ton)	2,934.04	2,875.36	3,270.70	3,666.04	3,129.60
	Daging Itik/Bebek/Entog (Ton)	8.17	8.45	8.70	13.36	13.29
	Telur (Ayam Kampung/Ras/Itik/Entog) (Ton)	2063.9	1778.18	2065.87	1422.3	1354.3
	Telur Ayam Buras/Kampung (Ton)	1999.48	1590.19	1467.59	1222.384	1,083
	Telur Ayam Ras Petelur (Ton)	-	45	28.987	86.872	150.688
	Itik/Angsa/Entog (Ton)	64.42	142.99	133.02	113.08	120.55
32	Produksi sektor perkebunan (Ton/Tahun)	1818.27	578.45	1101.64	2018.66	1364.64
	Kelapa Dalam	49.67	31.92	25.80	17.70	7.24
	Kopi	66.12	66.27	64.50	50.96	60.40
	Kopi Robusta	66.07	66.26	64.80	64.4	64.00
	Kopi Arabika	0.05	0.01	0.00	0.00	0.00
	Cengkeh'	110.36	127.99	125.70	130.81	135.92
	Kakao	1,526	286	820.84	1,950	1,297
33	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB (%)	0.19	0.18	0.17	0.16	0.15
34	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	1.21	0.69	0.18	0.21	0.14
35	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	22.9	23.62	24.10	24.41	24.47
36	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%)	2.91	2.82	2.77	2.72	2.56
37	Pertumbuhan Industri (%)	1.84	22.13	28.89	35.65	42.41
ASPEK DAYA SAING DAERAH						
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Ribu/Kapita/Tahun)	89,774	96,318	102,051	110.51	112,776.50
2	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (%)	51.19	51.87	51.53	54.85	55.34
3	Produktivitas total daerah (Ribu/Tenaga Kerja/Tahun)	87.5	86.69	96.67	98.23	94.39
4	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	100	100	100	100	100
5	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi) (%)	73.08	69.92	74.51	76.59	77.47
6	Rasio pinjaman terhadap simpanan di bank umum	1.35	0	1.19	1.14	1.09
7	Angka kriminalitas yang tertangani (per 10.000)	12	12	13	12	8
8	Rasio ketergantungan	48.81	48.46	48.11	47.98	45.31
Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah						
NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR					
ASPEK PELAYANAN UMUM						
Layanan Urusan Wajib Dasar						
1.	Pendidikan					
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%)	63,10	63,12	63.1	62.48	54.6
2	Angka Partisipasi Kasar					
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A (%)	111,66	106,00	112.89	105.99	104.62
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B (%)	86,17	84,91	84.17	86.02	87.87
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C (%)	95,35	85,39	110.31	110.74	107.53
3	Angka pendidikan yang tamatkan (%)					
	Tidak/Belum Bersekolah (%)	7.85	7.02	10.61	6.64	7.32
	Tamat SD/ sederajat (%)	30.47	14.18	14.94	15.79	17.01
	Tamat SMP/ sederajat (%)	11.82	23.63	22.05	20.02	22.53
	Tamat SMA (%)	31.75	36.68	30.59	36.19	33.58
	Tamat SMK (%)	4.06	2.81	3.5	3.52	3.04
	Tamat Perguruan Tinggi (%)	14.08	15.67	16.00	17.84	16.52
	Diploma I/II (%)	0.29	0.37	0.43	0.39	0.41
	Diploma III (%)	1.82	1.39	3.21	1.79	1.47

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Capaian Kinerja Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Diploma IV/S1-S3 (%)	11.97	13.91	14.69	15.66	14.64
4	Angka Partisipasi Murni					
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%)	95,37	99,32	99.78	99.44	99.01
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%)	76,61	77,89	78.39	78.11	78.33
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C (%)	65,72	66,42	67.99	67.4	67.62
5	Angka partisipasi sekolah (%)					
	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A (Per 1000)	1000	993.2	997.8	997	995.3
	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B (Per 1000)	965.7	981.3	100	991.7	986.9
	Angka partisipasi sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C (Per 1000)	884,1	883,4	847.5	844.3	843.1
6	Angka Putus Sekolah:					
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%)	0	0.68	0.03	0.04	0.43
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%)	3.43	1.87	1.26	0.006	0.78
	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA (%)	9,10	10.28	-	-	-
7	Angka Kelulusan:					
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)	98.87	100	99.14	100	100
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%)	99.62	99.3	99.46	100	100
	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA (%)	102.44	99.75	-	-	-
8	Angka Melanjutkan (AM):					
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)			100	100	100
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA (%)			100	-	-
9	Fasilitas Pendidikan:					
	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	97.47	96.25	100	100	100
	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik (%)	100	100	100	100	100
	Sekolah pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik (%)	100	100	100	100	100
10	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar (per 10,000)	33	32	33	-	-
	SD/MI (per 10,000)	36	36	37	-	-
	SMP/ MTS (per 10,000)	26	26	26	-	-
	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan menengah (per 10,000)	28	27	27	-	-
	SMA/MA/SMK	28	27	27	-	-
11	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar (per 10.000)	674	635	620	-	-
	SD/MI (per 10,000)	633	607	654	-	-
	SMP/ MTS (per 10,000)	751	688	671	-	-
	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah atas /MA/SMK (per 1000)	89	88	80	-	-
12	Rasio guru/murid per kelas rata-rata pendidikan dasar (per 10.000)	0.59	0.57	0.55	-	-
	Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata pendidikan menengah (per 10.000)	1.77	1.8	1.61	-	-
13	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki (%)	99.973	99.995	100	98.16	97.71
14	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) (%)	96,61	97.45	97.71	98.42	98.87
15	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%)	123.46	137.26	99.53	-	94.06
2.	Kesehatan					
1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	2	2	1	0.61	0.95

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Capaian Kinerja Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
2	Angka kelangsungan hidup bayi (per 100)	100	98	100	99.39	98.98
3	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	7.62	5.41	6.27	5.79	3.74
4	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	7.62	5.41	3.63	4.27	2.72
5	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	145.19	67.59	99.04	30.47	33.96
6	Rasio posyandu per satuan balita (Per 1000 balita)	9.09	8.78	8.59	8.41	8.23
7	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk (per 10.000)	3	3	3	3	3
8	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk (per 100.000)	4	4	4	4	4.33
9	Rasio dokter per satuan penduduk (per 1.000)	0.48	0.50	0.62	0.63	0.62
10	Rasio tenaga medis per satuan penduduk (per 10.000)	5	5	6	6	6
11	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)	76.50%	70.63%	72.77%	86.23%	66.92%
12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)	93.99%	95.79%	100.00%	101.67%	89.44%
13	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%)	97.92%	95.83%	95.83%	93.75%	70.83%
14	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%)	100	100	100	Tidak ada Kasus	-
15	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari) (%)	85.9	87.4	85.63	-	-
16	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak (%)	111.83%	107.00%	106.87%	98.48%	104.27%
17	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk (Rasio)	2	0	0	0	-
18	Cakupan balita pneumonia yang ditangani (%)	3.15%	6.19%	9.85%	9.20%	7.61%
19	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%)	108.56%	138.07%	83.06%	118.91%	100.00%
20	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (Rasio per 100.000 penduduk)	204.72	243.07	138.37	224.79	162.50
21	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	0	0	0	0	0
22	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS (%)	159.46%	244.32%	83.06%	91.41%	100.00%
23	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS (%)	65.98%	63.37%	45.60%	39.76%	93.00%
24	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)	100	100	100	100	100
25	Penderita diare yang ditangani (per 100.000)	6	6	6	5	
26	Angka kejadian Malaria (per 1000)	1.66	1.28	1.01	0.62	0.72
27	Tingkat kematian akibat malaria (per 1000)	0	0	0	0	0
28	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat (%)	100	100	100	100	100
29	Prevalensi HIV/AIDS dari total populasi (%)	0.03%	0.07%	0.07%	0.04%	0.070%
30	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS (%)	1,36	0,00	0.00	0.00	0.00
31	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)	100	100	100	100	100
32	Cakupan kunjungan bayi (%)	95.75%	100.78%	100.00%	99.76%	94.87%

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Capaian Kinerja Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
33	Cakupan puskesmas (%)	133,33	133,33	133.33	133.33	133.33
34	Cakupan pembantu puskesmas (%)	45.83%	60.42%	62.50%	62.50%	62.50%
35	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 (%)	90.69%	92.80%	94.08%	100.00%	82.79%
36	Cakupan pelayanan nifas (%)	93.17%	91.22%	100.60%	99.53%	85.10%
37	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (%)	75.06%	67.79%	63.44%	76.42%	67.63%
38	Cakupan pelayanan anak balita (%)	56.36%	62.51%	48.90%	73.92%	39.20%
39	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin (%)	100	100	100	100	100
40	Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat (%)	98,81	97,52	97.27	97.93	95.83
41	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%)	-	-	100		-
42	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) (%)	100	100	100	100	100
43	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam (%)	100	0	100	Tidak ada Kasus	100
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
	Pekerjaan Umum:					
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	55.6	58.96	67.99	69.57%	67.87%
2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk (per 10,000)	29	28	28	27	27
3	Persentase Jalan Kewenangan Kota yang Berkondisi Baik (> 40 KM/Jam) (%)	49.73	58.33	69.81	71.60%	69.67%
4	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) (%)	0.2	1.28	1.82	2.14	51.82
5	Persentase rumah tinggal bersanitasi (%)	88.63	90.77	96.41	97.03	83.68
6	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (%)	42,70	46,10	47.72	50.1	41.85
7	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)	12.64	10.73	8.99	8.87	7.93
8	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun (%)	14.43	28.79	26.46	24.08	18.478
9	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor (%)	47.54	50.94	54.63	58.56	59.13
10	Persentase irigasi kota dalam kondisi baik (%)	65.3	71.34	75.8	73.55	77.95
11	Rasio Jaringan Irigasi (per 1000 Ha)	59.12	59.93	76.54	81.2	82.610
12	Persentase penduduk berakses air minum (%)	86.01	93	94.84	95.61	95.11
13	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan (%)	86	88.63	94.49	97.28	100
14	Persentase areal kawasan kumuh (%)	1.89	0.76	0.49	0.15	0.16
15	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	4.5	4.53	4.03	4.1	4.0
16	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk (per 10.000)	1.62	1.58	1.55	1.52	1.52
17	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk (per 1000)	1.8	1.78	1.78	1.82	1.84
3	Penataan Ruang:					
1	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	-	-	-	36.92	36.92
2	Luas Ruang Terbuka Hijau Publik (Ha)	1,169	1,170	1,171	1,174	1,174
3	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	76.63	76.72	76.79	76.98	76.98

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Capaian Kinerja Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
	(%)					
4	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	0.088	0.077	0.055	0.053	0.045
5	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan	0.5871	0.3957	0.3698	0.4555	0.4046
6	Ketaatan terhadap RTRW	-	65.25	65.3	65.39	65.5
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman					
1	Rasio rumah layak huni	0.16	0.16	0.17	0.19	0.191
2	Rasio permukiman layak huni (%)	94.24	94.28	95.86	92.26	93.60
3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%)	70.25	79.39	84.19	91.44	92.75
4	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau (%)	85.04	92.1	94.31	93.58	92.75
5	Persentase pemukiman yang tertata (%)	98.12	99.25	99.53	92.84	67.67
6	Persentase lingkungan pemukiman kumuh (%)	0.35	0.13	0.82	0.15	1.7
7	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (%)	93.18	37.5	25.00	4.31	22.20
8	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan (%)	7.76	7.41	6.91	0.47	21.8
9	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU (%)	20	20.98	22.68	25.79	28.05
5.	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					
1	Cakupan petugas perlindungan Masyarakat (Linmas)	200	200	200.00	200	200
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	96,60	92,20	91,80	95,62	94.93
3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	9,09	9,09	10,08	10,08	10,08
4	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	67,67	94,87	94,74	65,59	98,13
5	Persentase Penegakan PERDA	97,70	97,90	91,80	95,62	94,93
6.	Sosial					
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	37,70	48,72	51.58	54,97	69.06
2	Persentase PMKS yang tertangani (%)	37.73	48.4	51.43	55.09	69.3
3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar (%)	43.77	57.61	59.06	60.3	76.81
4	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya (%)	0	0	0	0	0
5	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial (%)	100	100	100	100	100
6	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (%)	100	100	100	100	100
7	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (%)	100	100	100	100	100
8	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap (%)	100	0	100	0	0
9	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial (%)	3.09	11.88	19.68	41.43	16.79
Layanan Urusan Wajib Non Dasar						

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Capaian Kinerja Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Tenaga Kerja					
1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun (Per 1000)	6	8.3	9.19	9.50	0.57
	Angka sengketa pengusaha-pekerja di Perusahaan ber TDP per tahun (Per 1000)	1.21	1.81	2.23	2.55	1.5
2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) (%)	80	71	73.00	11.00	100.00
3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%)	3.13	4.54	26.2	53.12	42.51
4	Keselamatan dan perlindungan (%)	24	25	25	25.3	25.4
5	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek (%)	37	37	39	54.82	44
6	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah (%)	0	0	0	0	0
7	Besaran Pemeriksaan Perusahaan (%)	0.67	0.97	0.97	1.13	9.1
8	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan (%)	0.48	-	0.25	-	-
9	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	5.71	28.85	31.97	46.45	0.00
10	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat (%)	5.92	11.2	12.1	0	0
11	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan (%)	36.6	5.83	5.28	0	0
12	Rasio lulusan S1/S2/S3	9	9.3	14.51	-	-
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	11,40	10,92	10.59	9.27	9.27
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR (%)	20	20	20	28.00	28.00
3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta (%)	3.12	3.16	3.33	1.4	-
4	Rasio KDRT (per 10.000)	6	3	2	1	-
5	Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	44.15	43.03	42.32	91.45%	-
6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (%)	7.09	22.07	24.16	100	100
7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit (%)	100	100	100	100	100
10	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (%)	100	100	100	-	-
11	Cakupan layanan pemulihan bagi perempuan dan anak korban kekerasan (%)	19.29	21.38	24	9.09	76.92
12	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD					
	APM Perempuan pada Tingkat SD	90.52	99.12	100	100	100
	APM Laki-Laki Pada Tingkat SD	100	99.33	100	100	100
13	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP					
	APM Perempuan pada Tingkat SMP	75,52	80,28	86.34	89.95	93.56
	APM Laki-Laki Pada Tingkat SMP	77,50	75,35	90.42	94.73	99.04
16	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA					

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Capaian Kinerja Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
	APM Perempuan pada Tingkat SMA	64,73	63,24	75.89	79.61	83.33
	APM Laki-Laki Pada Tingkat SMA	66,80	69,65	83.58	89.17	94.74
17	Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi	41.76	42.27	42.63	42.92	43.21
3	Pangan					
1	Ketersediaan pangan utama (%)	10.28	11	19.54	23.05	36.60
2	Ketersediaan energi dan protein perkapita (Kkal/kapita/hari)	2,199	2,082	3,966	4,085	2,540
	Ketersediaan energi perkapita (Kkal/kapita/hari)	2,130.10	2012.8	1821.36	3981	2,442
	Ketersediaan protein perkapita (Kkal/kapita/hari)	68.9	69.1	71.46	104.15	97.84
3	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	75	82	72.00	86.00	94.00
4	Pertanahan					
1	Persentase luas lahan bersertifikat (%)	1.31	1.52	2.17%	27.84	28.71
2	Penyelesaian kasus tanah Negara (%)	0	0	25	28.57	27.27
3	Penyelesaian izin lokasi (%)	100	0	100	100	100
5	Lingkungan Hidup					
Kabupaten/Kota						
1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Belum ada	Belum ada
2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Belum ada	Belum ada
3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah	-	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan
5	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	Sangat Baik	Unggul	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
6	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	Belum tersedia	Belum tersedia	Belum tersedia	Belum tersedia	Belum tersedia
7	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota (%)	38.95	37.2	41.38	36.67	4.33
8	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota					
	Jumlah PPLHD yang dilatih dan/atau dibina (Orang)	0	0	0	0	0
	Jumlah sarana prasarana PPLHD yang memenuhi standar minimum (Orang)	0	0	0	0	0
9	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	0	0	0	0	0
10	Terverifikasi MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional	0	0	0	0	0
11	Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	0	0	0	0	0
12	Penetapan hak MHA	0	0	0	0	0
13	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan (%)	0	0	0	0	0
14	Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana (%)	0	0	0	0	0
15	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	0	0	0	0	0
16	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup (Kali)	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
17	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.(%)	100	100	100	100%	100%

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Capaian Kinerja Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
18	Timbulan sampah yang ditangani (%)	87.02	88.28	89.00	90.27	88.63
19	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R (%)	3.17	3.5	4.03	4.12	4.76
20	Persentase cakupan area pelayanan (%)	61	88.28	88.9	90.26	81.43
21	Persentase jumlah sampah yang tertangani	87.02	78.56	89.55	87.02	47.62
22	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	75.65	77.81	79.46	-	-
23	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan (%)	0	0	0	0	0
24	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	0	0	0	0	0
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	0.79	0.78	0.65	0.67	0.69
2	Rasio bayi berakte kelahiran	0.88	0.6	0.84	0.94	0.97
3	Rasio pasangan berakte nikah	0.37	0.38	0.44	0.38	0.39
4	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	ada	ada	ada	ada	ada
5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah
6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (%)	78.89	82.56	93.28	93.84	93.16
7	Cakupan penerbitan akta kelahiran (%)	100	100	100	100	100
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (%)	97.92	97.92	100	100	100
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	1	1	1	1	1
3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK (%)	-	2.5	2.5	4.17	4.17
4	Persentase LSM aktif (%)	5.4	0	0.00	2.78	-
5	Persentase LPM Berprestasi (%)	-	4.17	4.17	4.17	4.17
6	Persentase PKK aktif	100	100	100	100	100
7	Persentase Posyandu aktif (%)	100	100	100	100	100
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	2.38	2.31	2.23	2.18	2.17
2	Total Fertility Rate (TFR) (Angka)	-	-	2.44	-	-
3	Dokumen Rancangan Induk Pengendalian Penduduk (ada/tidak)	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
4	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB (%)	40	32.65	32.65	36.73	38.78
5	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2	2	2	2	2
6	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49 (%)	72.79	74.67	75.15%	75.74%	75.60%
7	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	n/a	27.39	18	18.68	-
8	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun (1000 PUS)	10	10	9	3	-
9	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) (%)	23.59	22.48	23.92	12.35	12.07
10	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (%)	21.54	21.81	25.06	21.92	23.86
11	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi (%)	47.83	45.14	47.42	32.04	22.47
12	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (%)	62.95	75.15	78.26	74.12	73.75

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Capaian Kinerja Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
13	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB (%)	53.02	58.56	64.96	60.61	58.64
14	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB (%)	42.27	47.2	55.09	54.38	48.04
15	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan (%)	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11
16	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	7.33	9.00	10.333	20.44	7.6
17	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk (%)	100	100	100	100	100
18	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri (%)	17.75	20.63	20.42	23.93	22.90
19	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	100	100	100	100	100
20	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di gudang Kabupaten/Kota (%)	9.67	7.28	8.74	13.20	15.82
21	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di Faskes (%)	55.1	66.4	43.40	66.44	18.47
22	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan (%)	100	100	100	100	100
23	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga (%)	104	193	180	100	100
24	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak (%)	19.63	54.89	64.01	100	100
25	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD (%)	65.19	83.83	82.94	41.32	61.87
9	Perhubungan					
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum (Orang)	1,680,146	1,345,436	1,829,172	2,005,012	539,500
2	Rasio ijin trayek (Per 100.000 Penduduk)	2	2	2	2	2
3	Jumlah uji kir angkutan umum (Unit)	1301	1152	3362	2608	2602
4	Jumlah Pelabuhan Laut dan Terminal Bis	2	2	2	2	2
5	Persentase layanan angkutan darat (per 10.000)	8.5	9.9	10.9	10.6	6.07
6	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum (%)	90.28	86.49	84.92	76.80	74.79
7	Persentase Pemasangan Rambu-rambu (%)	65.45%	63.20%	70.47	46.00	76.70
8	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan (per 1000)	19	18	17	16	16
9	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum (Orang/Tahun)	1,849,760	1,454,583	1,936,728	2,094,130	573,160
10	Jumlah barang yang terangkut angkutan umum (M3/Tahun)	605,771	601,356	603,524	607,024	607,337
11	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	2,289,155	1,454,583	1,936,728	2,094,130	1,054,677
10	Komunikasi dan Informatika					
1	Persentase pengembangan dan	0	3.33	3.33	3.35	3.77

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Capaian Kinerja Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
	pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan (%)					
2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	0.86	0.86	0.9	0.9	0.9
3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon (%)	70.74	79.24	84.95	86	-
4	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	0.08	0.09	0.10	0.23	0.25
5	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	0.37	0.4	0.42	0.5	0.5
11	Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah					
1	Persentase koperasi aktif (%)	71.32	71.08	71.03	25.34	23.6
2	Persentase UKM non BPR/LKM aktif (%)	100	100	99.91	99.91	100
3	Persentase Usaha Mikro dan Kecil (%)	76.11	76.31	75.52	75.37	81.85
12	Penanaman Modal					
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN)	122	147	129	78	74
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Juta)	268,332	382,322	220,859	130,740	109,484
3	Rasio daya serap tenaga kerja (per 100 Juta Nilai PMDN)	10.56	7.42	9.50	13.65	9.00
4	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	178	42.48	57.77	59.19	21.25
13	Kepemudaan dan Olah Raga					
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)	69.30	69.30	69.27	70.20	71.06
2	Persentase wirausaha muda (%)	1.75	1.75	1.75	1.77	1.3
3	Cakupan pembinaan olahraga (%)	38.46	38.46	46.15%	59.26	96.96
4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi (%)	68.18	68.18	32.53	32.53	27.71
5	Cakupan pembinaan atlet muda (%)	68.18	68.18	21.18	28.2	0
6	Jumlah atlet berprestasi (Orang)	36	7	7	4	0
7	Jumlah prestasi olahraga (Cabang)	36	7	7	4	0
14	Statistik					
1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Dalam Proses
2	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Buku "PDRB"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
15	Persandian					
1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah (%)	75	71.42	86	79.59	79.59
16	Kebudayaan					
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	12	15	18	14	5
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%)	99.32	99.32	99.32	99.33	100
3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi (Buah)	1	0	1	0	0
4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	51	51	56	52	53
17	Perpustakaan					
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (%)	9.18	9.23	9.55	10.15	23.23
2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	34.41	46.81	50.46	38.49	37.55
3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk (per 1000)	1.19	1.16	1.16	1.13	1.17
4	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	1,106	1,137	1,204	1,246	2,964
5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	308	1,232	1,191	404	185
6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat (%)	33	33	33	67	100
18	Kearsipan					
1	Persentase Perangkat Daerah yang	2.5	2.04	16.33	24.49	12.24

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Capaian Kinerja Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
	mengelola arsip secara baku					
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	6	7	8	7	6
Layanan Urusan Pilihan						
1.	Pariwisata					
1	Kunjungan wisata (%)	100.97	99.48	101.15	115.83	53.28
2	Lama kunjungan Wisata (Rata-rata Kunjungan Wisata Dalam Satu Tahun)	2	2	2	2	1
3	PAD sektor pariwisata (%)	3.45	3.51	5.05	5.12	3.63
2.	Pertanian					
1	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	17,73	17,60	17.39	17.28	17.17
2	Produksi Bahan Pangan Utama (Ton/Tahun)	36,592	37,620	36,529	25,028	22,963
	Padi	30167	32,444	32,664	20,288	17,585
	Jagung	6303	5,086	3,722	4,737	5,360
	Ubi Kayu	70.4	70.0	141	165	189
	Ubi Jalar	18.94	4.6	2.65	1.68	0.30
	Sagu	33.04	15.59	1.67	2.23	18.2
6	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (Ton/Ha)					
	Padi	5.88	6.27	6.40	6.41	5.76
	Jagung	6.79	6,75	7.09	7.10	6.19
	Ubi Kayu	10.06	70.00	29.52	-	-
	Ubi jalar	18.94	4.55	-	-	-
	Sagu	0.29	0.05	-	-	0.25
7	Cakupan bina kelompok petani	78.38	50.68	52.17	56.21	87.98
3	Energi dan Sumber Daya Mineral					
1	Persentase rumah tangga pengguna listrik	-	-	100	100	100
2	Rasio ketersediaan daya listrik	-	-	100	100	100
4	Perdagangan					
1	Ekspor Bersih Perdagangan (Nilai/Juta)	-834.666	-802.359	-945580	- 1,004,760	(1,005,968 .10)
2	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal (%)	7.22	7.82	8.71	10.67	-
5	Perindustrian					
1	Cakupan bina kelompok pengrajin (%)	13,25	0	0.00	2.45	1.69
6	Transmigrasi					
1	Persentase transmigran swakarsa	0	0	0		
7	Perikanan					
1	Produksi perikanan (%)	97.74	103.7	99.95	93.33	96.90
2	Konsumsi ikan (%)	99.6	100.13	104.16	98.54	98.20
3	Cakupan bina kelompok nelayan (%)	5.69	3.15	11.19	7.75	2.80
4	Produksi perikanan kelompok nelayan (%)	75	75	72.50	11.00	6.75
Penunjang Urusan						
1.	Perencanaan Pembangunan					
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada	ada	ada	Ada	Ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	ada	ada	ada	Ada	Ada
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPd yang telah ditetapkan dengan PERKADA	ada	ada	ada	Ada	Ada
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada	ada	ada	Ada	Ada
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPd (%)	94.46	79.01	92.2	98	98
6	Penjabaran Konsistensi Program RKPd kedalam APBD (%)	81.98	94.79	74.17	100	100
2.	Keuangan					
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Capaian Kinerja Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
2	Persentase SILPA	0	0	0	0	0
3	Persentase SILPA terhadap APBD	5.15	2.25	0.12	3.56	4.96
4	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana (%)					
	Persentase program yang tidak terlaksana (%)	0,3	0,6	0.62	0.30	1.24
	Persentase kegiatan yang tidak terlaksana (%)	0,7	1,06	1.04	0.74	0.73
5	Persentase belanja pendidikan (20%)	22.22	17.84	18.29	20.17	19.55
6	Persentase belanja kesehatan (10%)	18.64	24.48	26.26	29.59	37.14
7	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung (%)					
	Perbandingan antara belanja langsung dengan APBD (%)	62.59	64.15	57.6	56.7	55.85
	Perbandingan antara belanja tidak langsung dengan APBD (%)	37.41	35.85	42.42	43.3	44.15
8	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa (%)	2.04	1.79	5.75	6.56	4.92
9	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
3.	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan					
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan (Hari/Jam Pelajaran)	103/893	103/893	103/893	103/893	103/894
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (%)	0,7	0,9	0.79	0.67	0.09
3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	30,3	29,3	30.4	37.97	38.17
4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	34	33	33.3	33	33
5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	900	949	951	960	975
6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah (Orang)	2261	2217	2210	2213	2122
4.	Penelitian dan pengembangan					
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan.(%)	100	100	100	100	100
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.(%)	85	36,36	23.63	50	50
	Penerapan SIDA:					
3	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah(%)	26.08	52.1	60.87	36.3	100
5.	Pengawasan					
1	Persentase tindak lanjut temuan	41,60	57,02	46.54	75	97.64
2	Persentase pelanggaran pegawai	0,06	0,04	0	0.91	0.86
3	Jumlah temuan BPK	9	19	16	12	27
6.	Sekretariat Dewan					
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

2.1.5.2. Capaian Standar Pelayanan Minimal

Berikut adalah Capaian STandar Pelayanan Minimal Pada Enam Urusan Pemerintah Kota Palopo sampai dengan Tahun 2020 :

Tabel. 2.311
Capaian SPM Kota Palopo Tahun 2020

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Capaian 2020
	Aspek Pelayanan Dasar		
I	SPM Bidang Pendidikan		100
	Pendidikan Dasar		
1	Persentase penduduk Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	%	100
	Pendidikan Kesetaraan		
2	Persentase penduduk Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan Kesetaraan	%	100
	Pendidikan Anak Usia Dini		
3	Persentase penduduk Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	100
II	SPM Bidang Kesehatan		84.06
	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		
1	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	%	96.27
	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		
2	Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	%	99.79
	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		
3	Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	%	96.86
	Pelayanan kesehatan balita		
4	Persentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	%	68.33
	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar		
5	Persentase penduduk usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	%	97.93
	Pelayanan kesehatan pada usia produktif		
6	Persentase penduduk usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	%	50.66
	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut		
7	Persentase penduduk usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	%	74.82
	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi		
8	Persentase penduduk penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	%	41.88
	Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus		
9	Persentase penduduk penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	%	87.03
	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat		
10	Persentase penduduk dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan		100
	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis		

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Capaian 2020
11	Persentase penduduk terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100
	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)		
12	Persentase penduduk dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	%	95.17
III	SPM Bidang Pekerjaan Umum		
	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari		89.51
1	Persentase penduduk yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	81.70
	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik		
2	Persentase penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	%	97.31
IV	SPM Bidang Perumahan		100
	Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana		
1	Persentase penduduk korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100
	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah		
2	Persentase penduduk yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100
V	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum		
	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum		79.80
1	Persentase penduduk yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	%	90.37
	Pelayanan informasi rawan bencana		
2	Persentase penduduk yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	88.88
	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		
3	Persentase penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	84.17
	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		
4	Persentase penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	70.00
	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		
5	Persentase penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	%	65.59
VI	SPM Bidang Sosial		
	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti		100
1	Persentase penduduk penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100
	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti		
2	Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi	%	100

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Capaian 2020
	sosial diluar panti		
	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti		
3	Persentase penduduk lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100
	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti		
4	Persentase penduduk /gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	%	100
	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota		
5	Persentase penduduk korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan social	%	100

2.1.5.3 Capaian Kinerja SDG's/TPB

Tabel. 2.312
Capaian Indikator Kinerja SDGs/TPB Kota Palopo
Tahun 2020

TARGET	INDIKATOR	CAPAIAN 2020
Tujuan I Tanpa Kemiskinan		
Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	7.85
Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	80.41
Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	
Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	1.12
Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	3.164
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	100

TARGET	INDIKATOR	CAPAIAN 2020
yang tepat, termasuk keuangan mikro.		
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	82.59
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	75.60
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	95.11
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	21.08
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	1
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	100
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua	Angka Partisipasi Murni	100

TARGET	INDIKATOR	CAPAIAN 2020
laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	(APM) SMP/MTs/ sederajat.	
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	100
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	100
Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	n/a
Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	n/a
Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	n/a
Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	n/a
Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	61.15

TARGET	INDIKATOR	CAPAIAN 2020
berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.		
Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Pend. 20 Kes. 25 Perl. Sos. 5
Tujuan II Tanpa Kelaparan		
Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	8.2
Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	1.79
Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Sedang 14 Berat 30
Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	7.98
Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	20
Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	20
Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	1

TARGET	INDIKATOR	CAPAIAN 2020
kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.		
Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	0
Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	60
Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	91.6
Tujuan III Kehidupan Sehat dan Sejahtera		
Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	Angka Kematian Ibu (AKI).	65
Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	100
Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	100
Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	1
Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	4
Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	1

TARGET	INDIKATOR	CAPAIAN 2020
Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	Persentase kelurahan yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	100
Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	0.04
Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	230
Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	Kejadian Malaria per 1000 orang.	1,700
Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	Jumlah kelurahan yang mencapai eliminasi malaria.	1
Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	Persentase kelurahan yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	1
Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	Prevalensi tekanan darah tinggi.	11
Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun.	25
Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	2
Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	72
Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana,	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua	76.54

TARGET	INDIKATOR	CAPAIAN 2020
informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	
Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	23
Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	12
Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	Total Fertility Rate (TFR).	3
Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	Unmet need pelayanan kesehatan.	11
Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	100
Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	100
Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait kekeleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	100
Meningkatkan secara signifikan pembiayaan	Kepadatan dan distribusi	100

TARGET	INDIKATOR	CAPAIAN 2020
kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.	tenaga kesehatan.	
Tujuan IV Pendidikan Berkualitas		
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	100
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	100
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	85
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	100
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	100
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun.	10.36
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	100
Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2)	SD/MI (100) SMP/MTs (100)

TARGET	INDIKATOR	CAPAIAN 2020
masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.	SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun.	100
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	100 & 100
Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	SD (55) SMP (60) SMA (65) SMK (55)
Tujuan V Kesenjangan Gender		
Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	3
Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	0
Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	0
Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	0
Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	60
Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun	9

TARGET	INDIKATOR	CAPAIAN 2020
	dan sebelum umur 18 tahun.	
Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	20
Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	30
Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	20%
Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	71%
Tujuan VI Air Bersih dan Sanitasi Layak		
Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	90
Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	505 m3/detik
Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	100
Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	91
Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	Jumlah kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	9
Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free	9

TARGET	INDIKATOR	CAPAIAN 2020
merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	(ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	
Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	Jumlah Kelurahan yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	183 Skala Lingkungan
Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	60
Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	0
Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Memenuhi Standar
Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Ada
Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	Jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	Ada
Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	Ada
Tujuan VIII Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi		
Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	7.14

TARGET	INDIKATOR	CAPAIAN 2020
produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.		
Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	PDB per kapita.	37.1
Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	72.66
Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	25.6
Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	20
Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	9.81
Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	1.22
Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	Jumlah wisatawan mancanegara.	1,100
Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	113,900
Tujuan IX Industri, Inovasi, Infrastruktur		
Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB dan per kapita.	3.00%
Mempromosikan industrialisasi inklusif dan	Laju pertumbuhan PDRB	5%

TARGET	INDIKATOR	CAPAIAN 2020
berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.	industri manufaktur.	
Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	2,400
Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	25%
Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.	Proporsi individu yang menggunakan internet	0.1
Tujuan X Berkurangnya Kesenjangan		
Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	Koefisien Gini.	0.339
Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	8.1
Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	39
Tujuan XI Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan		
Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	93
Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	15
Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta	Rata-rata institusi yang berperan secara aktif	44

TARGET	INDIKATOR	CAPAIAN 2020
kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.	dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.	
Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	Ada
Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	0
Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	25
Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	750 *juta
Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	100
Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.	Jumlah kelurahan yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan.	Ada
Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	0
Tujuan XII Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab		
Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya,	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah	430

TARGET	INDIKATOR	CAPAIAN 2020
sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.	sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	
Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	2
Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	1
Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional.	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	1
Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	1
Tujuan XIII Penanganan Perubahan Iklim		
Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	0
Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	0

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2021 dan Realisasi RPJMD

Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.

Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD.

Tabel 2.13
Hasil Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Sampai dengan Triwulan IV 2020

No	KOTA PALOPO	RATA- RATA TINGKAT CAPAIAN RKPD TRIWULAN IV TA. 2020		PREDIKAT TINGKAT CAPAIAN RKPD TRIWULAN IV TA. 2020		KET
		KINERJA (%)	REALISASI ANGGARAN (%)	KINERJA (%)	REALISASI ANGGARAN	
1	2	3		4		5
1	Dinas Pendidikan	95.96	70.95	Sangat Tinggi	Sedang	
2	Dinas Kesehatan	91.47	91.35	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
3	Badan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah	96.50	95.73	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
4	Dinas Pekerjaan Umum (PU)	75.33	90.34	Sedang	Sangat Tinggi	
5	Dinas Perumahan dan Permukiman	94.56	83.16	Sangat Tinggi	Tinggi	
6	Dinas Pemadam Kebakaran	94.75	92.81	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
7	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	80.28	89.21	Tinggi	Tinggi	
8	Satuan Polisi Pamong Praja	87.92	96.27	Tinggi	Sangat Tinggi	
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100.00	92.50	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
10	Dinas Sosial	80.97	98.85	Tinggi	Sangat Tinggi	
11	Dinas Perhubungan	100.00	97.99	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
12	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (BLHK)	86.58	86.33	Tinggi	Tinggi	
13	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	98.46	94.33	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	97.16	94.78	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
15	Dinas Pengendalian Penduduk & KB	75.93	77.52	Tinggi	Tinggi	
16	Dinas Ketenaga Kerjaan	86.25	66.59	Tinggi	Sedang	
17	Dinas Koperasi dan UMKM	90.63	97.52	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
18	Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu	97.09	96.62	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
19	Dinas Kebudayaan	99.99	94.78	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
20	Dinas Pemuda dan Olahraga	100.00	97.46	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
21	Dinas Kearsipan	91.64	93.36	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
22	Dinas Perpustakaan	100.00	98.07	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
23	Dinas Komunikasi dan Informatika	99.97	97.85	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
24	Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluh	100.00	97.24	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)	100.00	97.90	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	99.93	94.02	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	

No	KOTA PALOPO	RATA- RATA TINGKAT CAPAIAN RKPD TRIWULAN IV TA. 2020		PREDIKAT TINGKAT CAPAIAN RKPD TRIWULAN IV TA. 2020		KET
		KINERJA (%)	REALISASI ANGGARAN (%)	KINERJA (%)	REALISASI ANGGARAN	
27	Badan Pendapatan Daerah	99.95	93.70	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
28	Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM	81.41	83.57	Tinggi	Tinggi	
29	Badan Penelitian dan Pengembangan	99.99	99.32	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
30	Sekretariat Daerah (SEKDA)	94.85	92.40	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
31	Sekretariat DPRD	86.08	84.23	Tinggi	Tinggi	
32	Inspektorat	100.00	84.77	Sangat Tinggi	Tinggi	
33	Dinas Persandian dan Statistik	99.68	93.86	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
34	Dinas Pertanian, dan Peternakan, Perkebunan	93.33	76.27	Sangat Tinggi	Tinggi	
35	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif	96.84	98.00	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
36	Dinas Perikanan	100.00	98.28	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
37	Dinas Perdagangan	89.04	97.92	Tinggi	Sangat Tinggi	
38	Dinas Perindustrian	100.00	95.47	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
39	Dinas Pertanahan	89.18	32.43	Tinggi	Sangat Rendah	
40	Dinas Transmigrasi	100.00	97.75	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
41	Kecamatan Sendana	92.78	92.44	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
42	Kecamatan Bara	98.48	62.91	Sangat Tinggi	Rendah	
43	Kecamatan Mungkajang	94.69	76.98	Sangat Tinggi	Tinggi	
44	Kecamatan Telluwanua	93.03	94.72	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
45	Kecamatan Wara Barat	90.21	60.32	Sangat Tinggi	Rendah	
46	Kecamatan Wara Selatan	95.35	75.86	Sangat Tinggi	Tinggi	
47	Kecamatan Wara Timur	92.28	78.17	Sangat Tinggi	Tinggi	
48	Kecamatan Wara Utara	100.00	87.75	Sangat Tinggi	Tinggi	
49	Kecamatan Wara	88.55	57.38	Tinggi	Rendah	
Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Perangkat Daerah		93.82	87.71	Sangat Tinggi	Tinggi	

Sumber : Laporan Evaluasi Hasil RKPD Kota Palopo Tahun 2020

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan dianalisa dari hasil capaian pembangunan, dan dinamika social yang berkembang di masyarakat yang memerlukan perhatian untuk segera ditangani. Berikut adalah Keterkaitan Permasalahan Pembangunan Kota Palopo Tahun 2022 Terhadap Hasil Evaluasi Pembangunan Kota Palopo s.d tahun 2020

Tabel 2.314
Keterkaitan Permasalahan Pembangunan Terhadap Hasil Evaluasi
Pembangunan Kota Palopo

Permasalahan Pembangunan	Hasil Evaluasi Pembangunan
1. Daya Saing & Kualitas Sumber Daya Manusia	Angka Pertumbuhan IPM Lamban dan Kurang Berdaya Saing Angka Pertumbuhan IPM Kota Palopo 2020 (0.10) masih berada dibawah angka pertumbuhan IPM Sulawesi Selatan 2020 (0.38) dan juga tertinggal dari angka pertumbuhan IPM Kota Pare-Pare 2020 (0.31) poin. Angka pertumbuhan IPM Kota Palopo bahkan juga kalah dengan Luwu Timur (0.58), Luwu Utara (0.16) dan Luwu (0.17). Jika angka pertumbuhan ini terus berlangsung demikian, aka nada titik dimana pada tahun tertentu, IPM Kota Palopo akan berada dibawah IPM beberapa kabupaten di Luwu Raya, dan akan semakin tertinggal dengan kota lainnya di Sulsel.
2. Taraf Hidup dan Tingkat Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Angka PDRB per Kapita Relatif Rendah Angka PDRB per Kapita (ADHB) masyarakat Kota Palopo tahun 2020 (42.01 Juta/Kapita/Thn) lebih rendah atau menurun dibandingkan 2019 (43.02 Juta/Tahun). Kondisi tahun 2020 juga menunjukan, PDRB per Kapita Kota Palopo masih belum sekompetitif indicator yang sama pada level nasional, karena capaian Kota Palopo ini masih berada dibawah rata-rata PDRB per kapita nasional 2020 (56.9 Juta/Kapita/Tahun), berada dibawah Kota Pare-Pare (49.9 Juta Kapita/Tahun), bahkan juga tertinggal dengan PDRB per Kapita Kabupaten Luwu 2020 (43.85 Juta/Kapita/Tahun).
	Gini Rasio Cenderung Meningkat Angka gini rasio Kota Palopo pada tahun 2020 (0.354) meningkat dibandingkan tahun 2019 (0.338). Ini mengindikasikan semakin melebarnya kesenjangan pendapatan pada masyarakat Kota Palopo. Nilai indeks gini Kota Palopo tahun 2020 juga belum memenuhi atau belum lebih baik dari target Kota Palopo 2020 yakni 0.337 poin.
	Persentase Penduduk Miskin Tak Penuhi Target Daerah Persentase penduduk miskin Kota Palopo tahun 2020 (7.85%) berada dibawah atau tak memenuhi target Kota Palopo tahun 2020 (7.64%). Bahkan jika dibandingkan tahun 2019 (7.82%), persentase penduduk miskin 2020 justru lebih besar. Persentase penduduk Kota Palopo 2020, belum lebih baik dari Kota Pare-Pare, Kota Makassar bahkan di Luwu Raya, setelah Luwu Utara, Kota Palopo menjadi wilayah dengan persentase penduduk miskin terbanyak.
	Jumlah Penduduk Miskin Meningkat Penurunan proporsi penduduk miskin di Kota Palopo kurun waktu 2016-2020 berjalan lamban. Data menunjukan tahun 2016 ke 2017, jumlah penduduk miskin malah meningkat dari 15.020 Jiwa

Permasalahan Pembangunan	Hasil Evaluasi Pembangunan
	menjadi 15,440 jiwa di tahun 2017. Dan 2017-2018, menurun 1,170 jiwa (dari 15440 jiwa menjadi 14,270 Jiwa). Namun 2018-2019, jumlah meningkat lagi dari 14,270 jiwa (2018) menjadi 14,370 Jiwa (2019) kemudian di tahun 2020 jumlahnya meningkat menjadi 14.710 Jiwa.
3. Pemerataan Pembangunan dan Daya Saing Infrastruktur Daerah	Indeks Daya Saing Infrastruktur Persentase Jalan Mantap 2020 masih pada angka 67.87%, dengan panjang jalan berkondisi baik 342.09 Km dari total panjang jalan 503.16 Km. Persentase masyarakat yang mengakses air minum layak sebesar 95.11 %, belum sesuai target SPM. Persentase sanitasi layak sebesar 83.68%, dengan Indeks daya saing infrastruktur tahun 2020 sebesar 85.88
4. Pengelolaan Tata Ruang dan Ketahanan Daerah Terhadap Bencana	Banjir Masih Jadi Ancaman Pada tahun 2020, peristiwa atau bencana banjir masih berdampak pada 2 (dua) kelurahan di Kecamatan Telluwanua, yaitu Kelurahan Pentojangan (16.2 Ha) dan Kelurahan Salubattang (38.75 Ha). Total areal yang terdampak banjir adalah 54.95 ha. Capaian ini jauh dari target 2020 yang menargetkan 15 ha areal terdampak banjir. Banjir ini merusak kawasan budidaya pertanian dan kawasan pemukiman dan perumahan masyarakat. Ancaman bencana lain adalah longsor pada kawasan pemukiman masyarakat, ancaman banjir serta abrasi serta semakin tingginya kerentanan ancaman kebakaran akibat semakin padatnya rumah penduduk. Keteraturan bangunan serta penegakan aturan sebelum memulai pembangunan menjadi hal yang perlu mendapatkan penekanan dan perhatian.
	Ruang terbuka Hijau Belum Capai Target Target Nilai Indikator Ruang Terbuka Hijau Publik Tahun 2020 adalah sebesar 76,95 dan terealisasi sebesar 76,93%. Selisih luasan RTH yang dibangun dan dipelihara belum sesuai karena adanya kendala proses pembebasan lahan pada kegiatan pengadaan tanah untuk Ruang Terbuka Hijau yang belum dapat direalisasikan, belum semua RTH berfungsi optimal karena status kepemilikan dan kewenangan pengelolaan lahan RTH yang belum sepenuhnya dikuasai oleh Pemerintah Kota, Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam merawat dan memelihara RTH yang disediakan oleh pemerintah.
5. Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja dan Layanan Publik (Dasar dan Non Dasar) yang Inovatif	Akuntabilitas Kinerja dan Nilai RB Belum Sesuai Target Daerah Pelaksanaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah serta layanan public yang berstandar dan berbasis inovasi masih sangat perlu dikembangkan oleh Pemerintah Kota Palopo termasuk pelaksanaan pemerintahan yang berbasis elektronik. Pada tahun 2020, nilai SAKIP Pemerintah Kota Palopo berada pada predikat B lebih baik dari tahun 2019 yang berada pada predikat CC.
6. Penanganan Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Tingkat Pengangguran Terbuka Meningkat & Tak Penuhi Target Daerah Tingkat pengangguran terbuka Kota Palopo pada tahun 2020, berada pada angka 10.37% (Maret 2020) dan belum memenuhi target daerah 2020 yakni 9,51%. Kondisinya pun meningkat, dibandingkan setahun lalu, 2019 yang berada pada angka 10.32%. Kinerjanya belum lebih baik dari beberapa kabupaten yakni Kabupaten Luwu (4.94%), Luwu Utara (3.01%) dan Luwu Timur (4.46%), Kota Pare-Pare (7.14%), bahkan belum lebih baik daripada -rata Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional 2020 (7.07%) Rata-Rata Sulsel (6.31%).

Permasalahan Pembangunan	Hasil Evaluasi Pembangunan
	Pertumbuhan PDRB Terendah Dalam Sejarah Kota Palopo Pada tahun 2020, laju pertumbuhan PDRB Kota Palopo hanya berada pada angka 0.45%. Kondisi ini belum mencapai target pemerintah tahun 2020 (4.16%). Angka pertumbuhan LPE 2020, juga tertinggal jauh dengan LPE 2019 yang berada pada angka 6.75% bahkan menjadi yang terendah sejak Kota Palopo terbentuk. Meski demikian, bila dibandingkan dengan wilayah lain, angka LPE 2020 Kota Palopo masih lebih baik dari angka LPE Kota Makassar yang berada pada angka minus yakni (-1.27%), Kota Pare-Pare, minus (-0.08%) dan rata-rata angka LPE Sulawesi Selatan minus (-0.70%) bahkan LPE Nasional minus (-0.21%). LPE Kota Palopo masih tumbuh positif, sementara daerah lain, melambat dan berada pada angka negative dibandingkan setahun sebelumnya, 2019

Berikut adalah rumusan permasalahan pembangunan daerah Kota Palopo Tahun 2022 yang berhubungan dengan Sasaran Pembangunan Daerah :

Tabel 2.315
Keterkaitan Sasaran, Permasalahan Pembangunan
Kota Palopo Tahun 2022

Sasaran Pembangunan	Permasalahan Pembangunan 2022
Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat (S.1)	1. Daya Saing Kualitas Sumber Daya Manusia
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (S.2)	
Meningkatnya derajat kesejahteraan sosial masyarakat (S.3)	2. Taraf Hidup dan Tingkat Kesejahteraan Sosial Masyarakat
Meningkatnya kapasitas dan Layanan infrastruktur perkotaan (S.4)	3. Pemerataan Pembangunan dan Daya Saing Infrastruktur Daerah
Meningkatnya Konektifitas dan Aksesibilitas Wilayah serta Infrastruktur Strategis Daerah (S.5)	
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup (S.6)	4. Pengelolaan Tata Ruang dan Ketahanan Daerah Terhadap Bencana
Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (S.7)	5. Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja dan Layanan Publik (Dasar dan Non Dasar) yang Inovatif
Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S.8)	
Meningkatnya Perluasan Kesempatan Berusaha dan Produktifitas Tenaga Kerja (S.9)	6. Penanganan Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Meningkatnya Produksi dan Produktifitas (S.10)	
Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam perekonomian daerah (S.11)	

Tabel 2.316
Keterkaitan Prioritas Pembangunan dan Permasalahan Pembangunan Kota
Palopo Tahun 2022

Permasalahan Pembangunan 2022	Prioritas RKPD 2022
1. Daya Saing Kualitas Sumber Daya Manusia	Pengembangan Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat (1)
2. Taraf Hidup dan Tingkat Kesejahteraan Sosial Masyarakat	
3. Pemerataan Pembangunan dan Daya Saing Infrastruktur Daerah	Pengembangan Wilayah dan Daya Saing Infrastruktur Kota (2)
4. Pengelolaan Tata Ruang dan Ketahanan Daerah Terhadap Bencana	Pemantapan Pengelolaan Ruang, Pencegahan dan Penanganan Bencana Alam maupun Non Alam (3)
5. Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja dan Layanan Publik (Dasar dan Non Dasar) yang Inovatif	Pengembangan Layanan Publik, Inovasi Daerah dan Reformasi Birokrasi (4)
6. Penanganan Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Pemulihan Ekonomi dan Produktifitas Daerah (5)

2.3.1. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah. Identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah dimasa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah harus konsisten dengan permasalahan yang dijabarkan dalam permasalahan perangkat daerah pada Renja Perangkat Daerah.

2.3.1.1. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

(1) Urusan Pendidikan

1. Pemerataan atas Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan Belum Maksimal, antara dalam kota dan beberapa wilayah yang berada kecamatan terluar.
2. Pertumbuhan jumlah anak usia sekolah pada tingkat pendidikan dasar belum berbanding lurus dengan penyediaan sarana dan prasarana gedung sekolah.
3. Pendidikan non formal dan pendidikan luar biasa belum berkembang dengan baik dan berstandarisasi.
4. Masih adanya beberapa sarana sekolah yang aktifitas belajar mengajarnya terganggu akibat ancaman banjir, longsor dan keamanan lingkungan sekolah.
5. Pembinaan terhadap kelompok belajar masyarakat belum optimal dalam mendorong pendidikan kesetaraan
6. Penguatan dan pemberian peran yang lebih besar kepada Dewan Pendidikan belum konsisten.

(2) Urusan Kesehatan

1. Pemantapan system kesehatan daerah terutama system, pelayanan dan sarana prasarana kesehatan dalam penanganan penyakit menular seperti covid 19
2. Penerapan standar pelayanan minimal (SPM) kesehatan belum mencakupi seluruh unsur pelayanan yang dipersyaratkan.
3. Tuntutan pada layanan kesehatan yang cepat, mudah, dan tanpa antrian dengan kejelasan waktu pelayanan, semakin mengemuka.
4. Partisipasi masyarakat miskin terhadap Jaminan Kesehatan Nasional masih belum memadai, akibat keterbatasan ekonomi.
5. Ketersediaan jumlah angkutan medis (ambulance) dan jangkauan pelayanan masih terbatas.

6. Jumlah dan ketersediaan ruang rawat inap di Fasilitas Kesehatan Tingkat Rujukan (Rumah Sakit) belum memadai.
7. Rasio jumlah balita dan posyandu dari waktu ke waktu terus menunjukkan trend yang tidak berimbang. Demikian halnya dengan rasio ideal pelayanan dokter umum, dokter spesialis terhadap jumlah pasien di Fasilitas Kesehatan Tingkat Rujukan (RS).
8. Penyebaran dan distribusi keberadaan puskesmas terakreditasi, ketersediaan ruang rawat inap, ketersediaan obat dan peralatan esensial, termasuk perbaikan sarana dan prasarana faskes tingkat pertama lebih banyak terpusat di sekitar kota. Demikian halnya dengan pelayanan kesehatan dan keselamatan anak dan balita termasuk ibu hamil dan melahirkan serta bagi lansia.
9. Koordinasi dengan perangkat daerah lain belum optimal terkait pembukaan dan peningkatan kualitas jalan dari beberapa pemukiman masyarakat terhadap fasilitas kesehatan, dan pengawasan obat dan makanan.
10. Upaya mengembangkan obat asli dengan memanfaatkan potensi lokal belum memadai.
11. Upaya penanggulangan penyakit menular dan penciptaan lingkungan yang sehat, perbaikan gizi, dan promosi kesehatan lainnya belum optimal.
12. Standar dan pelayanan RSUD Sawerigading menjadi RS Rujukan di Luwu Raya masih perlu diakselerasi.
13. Penyediaan dan pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana di RSUD diperhadapkan pada keterbatasan kemampuan keuangan daerah.

(3) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai belum memadai.
2. Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir belum optimal.
3. Pembangunan prasarana pengaman pantai belum memadai.
4. Pembangunan dan peningkatan kualitas jalan dan jembatan di kawasan pesisir dan daerah luar kota belum memadai dan belum merata.
5. Koordinasi dengan sejumlah stake holder terkait yang membutuhkan penanganan akses jalan dan jembatan, belum terjalin dengan baik seperti akses jalan jembatan ke fasilitas kesehatan, pendidikan, sentra produksi/budidaya.
6. Koordinasi perencanaan dan pemanfaatan serta pengelolaan tata ruang dan perencanaan infrastruktur jaringan belum memadai.
7. Pengelolaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau belum maksimal.
8. Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan dan pengelolaan serta perlindungan ruang terbuka hijau masih minim.
9. Eksistensi lahan budidaya secara khusus lahan pertanian di Kota Palopo terus tertekan oleh pengembangan sektor lain seperti perumahan dari waktu ke waktu.
10. Jaringan irigasi kabupaten sebagian mengalami kerusakan sehingga kurang efektif dalam layanan air.

(4) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

1. Pengembangan perumahan dan lingkungan sehat perumahan belum optimal dalam menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan pelayanan perumahan, termasuk masih adanya rumah layak huni.
2. Pemberdayaan komunitas perumahan belum memadai dalam penataan pemukiman termasuk penataan lingkungan pemukiman kumuh.
3. Pengelolaan areal pemakaman belum optimal
4. Belum tercukupinya dukungan prasarana dan sarana umum (PSU) dalam menghadirkan lingkungan perumahan/pemukiman yang sehat dan aman.

(5) Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1. Upaya peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal kurang bersinergi antar stakeholder
2. Fasilitas, sarana-prasarana serta kapasitas SDM Satpol PP dalam penegakan Perda secara menyeluruh belum memadai.

3. Upaya pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban, termasuk pelibatangnya dalam pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) dan menjaga keamanan, belum memadai.
4. Kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran dalam masyarakat termasuk pada lingkungan perumahan belum memadai.
5. Kecukupan sarana dan prasarana serta peralatan penanganan kebakaran belum memadai dalam memenuhi tingkat waktu tanggap (response time rate) yang baik pada wilayah manajemen kebakaran (WMK).
6. Kapasitas dalam penyediaan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, penyelamatan dan evakuasi korban bencana serta penyelamatan dan evakuasi korban bencana belum berkembang seiring dengan tuntutan/kebutuhan.
7. Kapasitas dan kerjasama stakeholder daerah dalam pengembangan wawasan kebangsaan, peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial masyarakat, serta deteksi dini dan pencegahan konflik sosial, masih rendah.

(6) Urusan Sosial

1. Data mutakhir untuk keseluruhan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan PMKS dalam berbagai kelompok/golongan belum tersedia dengan cukup sebagai dasar dalam penanganan PMKS.
2. Ketersediaan sumberdaya manusia, finansial dan sarana-prasarana dalam penanganan, pemberian bantuan sosial, dan pemberdayaan ekonomi bagi PMKS masih terbatas.
3. Kemampuan panti sosial dan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) dalam penyediaan sarana pelayanan sosial dan prasarana kesejahteraan sosial masih terbatas.
4. Kemampuan SDM dan sarana-prasarana dalam rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti, anak terlantar di luar panti, lanjut usia terlantar di luar panti, tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti, masih terbatas.
5. Kemampuan SDM dan sarana-prasarana dalam evakuasi, bantuan sosial, perlindungan sosial dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana masih terbatas.

2.3.1.2. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

(1) Urusan Tenaga Kerja

1. Data yang lengkap tentang pekerja dan pencari kerja untuk kepentingan penyaluran pencari kerja, keselamatan dan perlindungan pekerja, serta kepesertaan dalam program Jamsostek belum tersedia secara termutakhirkan.
2. Pemanfaatan teknologi informasi dalam upaya peningkatan kesempatan kerja (bursa kerja) belum memadai dalam kondisi peluang kesempatan kerja dan lapangan berusaha tidak seimbang dengan pertumbuhan angkatan kerja.
3. Cakupan besaran pencari kerja dan tenaga kerja dalam pelatihan berbasis kompetensi, berbasis masyarakat, dan pelatihan kewirausahaan belum memadai.
4. Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan belum memadai.

(2) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Kompetensi dan peluang perempuan untuk bersaing pada pekerjaan di lembaga pemerintah, DPRD dan lembaga swasta belum memadai.
2. Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kekerasan terhadap anak secara fisik dan psikologis menunjukan trend yang terus meningkat.
3. Kapasitas unit pelayanan terpadu dalam penanganan pengaduan, rehabilitasi sosial, layanan kesehatan dan layanan bantuan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan masih terbatas.
4. Kelembagaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak belum efektif dalam pengintegrasian pada kebijakan dan penganggaran.
5. Kapasitas dalam layanan pemulihan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan belum memadai.

6. Akses dan kemampuan perempuan dalam partisipasi pendidikan dasar, menengah dan perguruan tinggi serta pendidikan kesetaraan melek huruf masih tertinggal.

(3) Urusan Pangan

1. Koordinasi dan penanganan daerah rawan dengan stake holder lain yang terkait belum efektif
2. Pemantauan dan analisis akses pangan, harga pangan, cadangan pangan dan pengembangan model distribusi, pemasaran hasil, dan sistem informasi pangan yang efisien belum memadai
3. Diversifikasi pemanfaatan pangan masyarakat belum optimal dalam mendukung pemenuhan pangan berimbang sesuai pola pangan harapan.
4. Sinergi dan koordinasi dengan stake holder terkait dalam pengawasan mutu dan keamanan pangan belum optimal

(4) Urusan Pertanahan

1. Pengembangan sistem informasi dan pendaftaran tanah belum memadai dalam mendukung sertifikasi tanah.
2. Penataan penguasaan, pemilikan dan penggunaan dan pemanfaatan tanah belum optimal dalam mencegah dan menyelesaikan kasus tanah negara maupun tanah masyarakat.
3. Pengembangan komunikasi dan informasi secara bersinergi dengan perangkat daerah lain belum optimal termasuk dalam penyelesaian izin lokasi.

(5) Urusan Lingkungan Hidup

1. Beberapa spot lokasi di Kota Palopo masih sering dilanda banjir dan di beberapa titik lainnya digenangi air saat musim penghujan tiba serta kebakaran hutan dalam skala kecil pada musim kemarau.
2. Luas lahan kritis dan tingkat kerusakan hutan terus bertambah seiring dengan semakin menurunnya daya tampung lingkungan, kapasitas dan kualitas air baku, akibat pencemaran dan pengrusakan lingkungan.
3. Pengintegrasian RPPLH dan KLHS kedalam dokumen perencanaan daerah belum terukur dan dilengkapi data mutakhir.
4. Pemantauan, pengukuran dan pengendalian kualitas tutupan lahan, air dan udara belum terkordinasikan secara rutin dan efektif.
5. Identifikasi, verifikasi, penetapan dan pendampingan masyarakat hukum adat serta kearifan dan pengetahuan lokal terkait pengelolaan lingkungan hidup belum terprioritaskan.
6. Luas area penanganan sampah serta pengurangan sampah melalui mekanisme reduce, reuse dan recicle (3R) masih terbatas.
7. Dampak pemanasan global semakin meningkat dalam kondisi penanganan efek gas rumah kaca belum optimal.

(6) Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

1. Ketidaktersediaan bahan dan fasilitas menghambat pelayanan Penerbitan KTP secara tepat waktu dan memuaskan.
2. Komitmen pelaporan kelahiran dan pengurusan akte kelahiran oleh masyarakat belum maksimal.
3. Kordinasi antar stakeholder dalam penerbitan akte nikah belum optimal.
4. Pelaporan dan pencatatan penduduk datang, pergi dan meninggal belum optimal.

(7) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Kebutuhan sarana/prasarana dan fasilitas perkantoran desa yang baik belum terpenuhi secara merata termasuk dalam pemanfaatan teknologi informasi.
2. Kinerja LPM dalam pemberdayaan masyarakat belum efektif dan merata.
3. Kinerja PKK dalam pembinaan masyarakat belum efektif dan merata.
4. Kapasitas SDM dan perlengkapan pada posyandu berkembang secara tidak berimbang dengan kebutuhan pelayanan masyarakat khususnya ibu hamil dan bayi.
5. Keswadayaan masyarakat dalam mendorong dan memelihara keberlanjutan pemberdayaan masyarakat belum optimal

6. Kapasitas SDM pemerintahan desa dalam menjalankan kewenangan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa belum mencukupi.

(8) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Ketersediaan dan Pemanfaatan Rencana Induk Pengendalian Penduduk dan kebijakan kependudukan lainnya dalam pengendalian kualitas dan kuantitas penduduk belum efektif.
2. Pelayanan kontrasepsi belum menjangkau secara menyeluruh pada pasangan usia subur dalam menekan kelahiran anak.
3. Peran serta masyarakat dalam pelayanan KB mandiri serta kesadaran kesehatan reproduksi belum memadai.
4. Bina keluarga balita, keluarga remaja dan keluarga lansia belum didukung oleh tenaga pendamping yang memadai.
5. Model operasional BKB-Posyandu-PADU belum terkoordinasi.

(9) Urusan Perhubungan

1. Pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana perhubungan belum optimal dalam merespons pertambahan kebutuhan angkutan umum, pelayanan terminal dan penataan izin trayek.
2. Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ kurang optimal
3. Pengendalian dan pengamanan lalu lintas belum memadai
4. Pengawasan kelaikan jalan kendaraan angkutan umum belum memadai
5. Pendapatan asli daerah dari sektor perhubungan belum tergal dengan baik.
6. Uji KIR sesuai standar belum mencakupi semua angkutan umum.
7. Pemenuhan rambu-rambu lalu lintas belum mencakupi sesuai kebutuhan.

(10) Urusan Komunikasi dan Informatika

1. Kelompok informasi masyarakat tingkat kecamatan belum berkembang secara fungsional.
2. Layanan telekomunikasi belum menjangkau semua wilayah.
3. Data tentang kepemilikan masyarakat atas hand-phone/telepon, akses internet dan komputer pribadi belum terpenuhi secara lengkap.
4. SDM bidang teknologi komunikasi dan informasi pada OPD belum terpenuhi.

(11) Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1. Iklim usaha kecil dan menengah belum kondusif dan memadai.
2. Kemampuan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM belum memadai
3. Sistem pendukung usaha bagi UMKM belum optimal belum berkembang.
4. Kompetensi dan kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi bagi keaktifan koperasi rendah.
5. Kapasitas SDM, teknologi dan permodalan dalam pengelolaan UKM, lembaga keuangan mikro (LKM) dan BPR terbatas.
6. Daya saing produk usaha mikro dan kecil masih rendah.

(12) Urusan Penanaman Modal

1. Iklim investasi dan realisasi investasi belum didukung oleh kebijakan, fasilitasi, koordinasi, pengembangan sistem informasi, penyederhanaan prosedur, kajian isentif investasi secara memadai.
2. Ketersediaan data potensi ekonomi daerah yang siap ditawarkan kepada investor nasional dan asing belum lengkap.
3. Upaya promosi dan kerjasama investasipada level domestik dan luar negeri masih minim.
4. Penyiapan potensi sumberdaya dan sarana-prasarana daerah pendukung investasi masih terbatas.
5. Pengembangan data dan informasi statistik daerah terkait investasi belum tersinergikan antar OPD.

(13) Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

1. Sarana/prasarana serta kordinasi antar elemen pemuda dalam mendorong keaktifan organisasi dan peran serta pemuda belum memadai.
2. Jiwa kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda belum memadai.
3. Sarana/prasarana serta fasilitas olah raga serta pelatih cabang olah raga dalam mendorong atlet/cabang olah raga berprestasi masih terbatas.
4. Kebijakan dan manajemen serta pemasyarakatan olahraga belum memadai

(14) Urusan Statistik

1. Belum tersedianya data lengkap berdasarkan indikator kinerja kunci masing-masing perangkat daerah.
2. Terlambatnya ketersediaan data umum kondisi daerah yang termuat dalam "Kabupaten dalam Angka", dan "PDRB" sehingga kurang mutakhir dijadikan dasar dalam perencanaan tahunan.
3. Upaya pengembangan data/informasi/statistik daerah belum terkoodinasi dan masih sektoral, dimana data statistik daerah masih bervariasi pada tingkat PD, bahkan terkadang multi interpretasi.
4. Pemanfaatan informasi dan teknologi digital berbasis web dalam pengelolaan data statistik daerah belum signifikan.

(15) Urusan Persandian

1. Kelembagaan dan arah pengembangan dan pengelolaan SDM persandian daerah belum terstruktur secara massive dan terkoordinasi dengan baik.
2. Penggunaan sandi belum termanifestasikan dalam komunikasi perangkat daerah.

(16) Urusan Kebudayaan

1. Penyelenggaraan festival seni dan budayabelum berlangsung secara berkala
2. Benda, situs dan kawasan cagar budaya belum terkelola secara sistematis dalam kerangka pelestarian.
3. Ketersedian data karya budaya untuk kepentingan inventarisasi dan revitalisasi belum akurat dan komprehensif.

(17) Urusan Perpustakaan

1. Budaya baca dan pembinaan perpustakaan di sejumlah lembaga pendidikan belum memadai dan belum merata.
2. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengembangan minat baca masyarakat masih sangat kurang.
3. Kualitas SDM (pustakawan, tenaga teknis, dan penilai) dalam pengelolaan perpustakaan daerah masih rendah.
4. Cakupan materi dan jumlah unit pada koleksi buku perpustakaan daerah masih terbatas.

(18) Urusan Kearsipan

1. Cakupan dan kualitas penerapan pengelolaan arsip secara baku pada perangkat daerah belum menyeluruh.
2. Jumlah dan kualitas SDM pengelola kearsipan belum cukup untuk mendukung perbaikan sistem kearsipan, penyelamatan dokumen daerah dan pemeliharaan sarana prasana kearsipan.
3. Pemanfaatan teknologi informasi digital dalam pengelolaan kearsipan belum memadai.

2.3.1.3. Urusan Pilihan

(1) Urusan Kelautan dan Perikanan

1. Kapasitas peralatan dan teknologi penangkapan ikan belum berkembang mengikuti tuntutan baru dalam modernisasi perikanan.
2. Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar, dan penyediaan sarana dan prasarana perikanan masih minim.
3. Kelompok nelayan belum berkembang optimal sebagai wahana peningkatan produksi

- dan edukasi bagi penangkapan yang ramah lingkungan
4. Kesejahteraan nelayan lapisan bawah masih rendah dan memiliki kesenjangan yang tinggi dengan nelayan lapis atas.

(2) Urusan Pariwisata

1. Destinasi wisata yang ada belum tertata mengikuti perkembangan kontemporer kepariwisataan dan masih ada potensi destinasi wisata yang belum dikembangkan.
2. Pemasaran dan jaringan kemitraan kepariwisataan belum efektif mendukung peningkatan jumlah pengunjung wisata.
3. Pengembangan komunikasi dan informasi dalam promosi kepariwisataan masih minim.
4. Penerimaan dan kontribusi sektor kepariwisataan terhadap PAD dan PDRB belum optimal.
5. Pengintegrasian ekonomi kreatif sebagai salah satu fokus komoditas penunjang kepariwisataan masih terkendala dengan belum tersedianya lokasi yang memadai.
6. Pendayagunaan keindahan alam dan lingkungan hidup sebagai salah satu potensi wisata belum optimal.

(3) Urusan Pertanian

1. Penerapan teknologi dan ketersediaan sarana prasarana pendukung pertanian, peternakan dan perkebunan masih terbatas.
2. Eksistensi lahan pertanian produktif terus terancam akibat pengembangan pembangunan sektor lain.
3. Pengolahan produksi hasil pertanian, perkebunan dan peternakan belum optimal
4. Jaringan dan kemitraan usaha baik produksi dan pemasaran hasil pertanian, peternakan dan perkebunan belum memadai
5. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengembangan sektor pertanian secara luas masih minim
6. Kualifikasi kelompok tani dan gabungan kelompok tani dalam mendukung peningkatan produktivitas usahatani masih rendah.

(4) Urusan Perdagangan

1. Simpul distribusi dan sentra ekonomi masyarakat lainnya masih jauh dari kondisi nyaman
2. Kelembagaan dan kemitraan perdagangan belum optimal
3. Pengawasan mutu dan peredaran barang yang beredar belum memadai dan terkoordinasi baik dengan PD lainnya.
4. Perlindungan atas konsumen belum optimal
5. Pembinaan terhadap personal dan kelembagaan pedagang kaki lima dan asongan belum optimal.
6. Data tentang pedagang/usaha informal belum tersedia dengan cukup sebagai dasar dalam pembinaan.

(5) Urusan Perindustrian

1. Data potensi dan karakteristik usaha kelompok pengrajin belum tersedia dengan cukup.
2. Kluster industri kecil dan menengah dalam suatu kawasan industri belum berkembang dengan optimal.
3. Pemanfaatan teknologi informasi dan sinergi antar pihak dalam pengembangan industri belum memadai.

2.3.1.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

(1) Sekretariat Daerah

1. Perumusan kebijakan dan koordinasi administrasi belum sepenuhnya efektif mendukung penyelenggaraan urusan.
2. Penyelenggaraan kegiatan antara sekretariat daerah dengan perangkat daerah sering tumpang tindih.

(2) Sekretariat Dewan

1. Ketersediaan Rencana Kerja Tahunan pada setiap alat-alat Kelengkapan DPRD belum

akurat.

2. Program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda, dan fungsi anggaran belum sepenuhnya terintegrasi dalam RPJMD dan RKPD.

2.3.1.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

(1) Perencanaan

1. Kualitas SDM Perencanaan Pembangunan Daerah masih sangat terbatas
2. Ketersediaan data sesuai indikator kinerja kunci berbagai urusan dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah masih terbatas.
3. Perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja dalam penyelenggaraan urusan oleh perangkat daerah belum akurat dan tepat waktu.
4. Pembahasan prioritas Renja/RKPD dalam proses musrenbang RKPD belum substantif berbasis fakta.
5. Penjabaran konsistensi RPJMD ke dalam RKPD dan RKPD kedalam APBD belum akurat.
6. Pengendalian pemanfaatan ruang dalam membangun konsistensi RTRW belum akurat dan menyeluruh.

(2) Keuangan

1. SDM berkualitas pada OPD dalam analisis dan pelaporan keuangan masih terbatas.
2. Porsi SILPA dalam penyelenggaraan keuangan daerah masih signifikan.
3. Program/kegiatan yang tidak berjalan karena keterbatasan realisasi anggaran masih ada.
4. Pendapatan Asli Daerah masih sangat minim dan masih sangat tergantung pada Dana Alokasi Umum.

(3) Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

1. Kebutuhan dana untuk pendidikan dan pelatihan formal, structural dan fungsional bagi ASN tidak mencukupi sesuai tingkat kebutuhan ASN.
2. Penyelenggaraan tugas jabatan fungsional pada beberapa PD belum optimal dalam peningkatan capaian kinerja.

(4) Penelitian dan Pengembangan

1. SDM dan sarana/prasarana kelitbangan daerah belum memadai dalam mendukung kegiatan kelitbangan
2. Pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah masih terbatas.
3. Iklim pengembangan inovasi dalam penyelenggaraan urusan pada perangkat daerah belum berjalan dengan baik.

(5) Pengawasan

1. Temuan pelanggaran administrative dan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pada perangkat daerah masih ada.
2. Penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi temuan BPK belum maksimal.

2.3.1.6. Unsur Kewilayahan

1. Penyelenggaraan pemerintahan umum di kecamatan belum sepenuhnya efektif.
2. Fungsi kordinasi dalam pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum, pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan PD di kecamatan, penerapan dan penegakan Perda belum sepenuhnya efektif.
3. Fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan di desa dan kelurahan belum sepenuhnya efektif.
4. Fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum, dan pemeliharaan fasilitas pelayanan umum belum sepenuhnya efektif di kelurahan.

2.3.2. Isu Strategis Daerah

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dan memiliki karakteristik bersifat penting, mendasar, dan mendesak, dalam menentukan tujuan jangka menengah penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Perumusan isu strategis Kota Palopo bersumber dari permasalahan pembangunan yang dihadapi dan hasil dan evaluasi capaian pembangunan tahun 2020, dengan mempertimbangkan arah kebijakan RPJMD Kota Palopo pada tahun 2022 dan RKP 2022 sehingga memiliki keselarasan dan bersinergi.

Dengan melakukan sintesa pada permasalahan pembangunan, capaian dan hasil evaluasi pembangunan, arah kebijakan rpjmd dan rkp 2022, maka isu strategis yang berdampak langsung terhadap pembangunan daerah Kota Palopo yang perlu mendapat perhatian ke depan serta faktor penentu keberhasilan pembangunan dapat dilihat sebagai berikut :

1. Penguatan dan Optimalisasi Sistem dan Layanan Kesehatan dan Pendidikan Daerah
2. Optimalisasi Perlindungan, Rehabilitasi, dan Pemberdayaan Sosial termasuk Ketahanan & Stabilitas Daerah
3. Pengembangan Infrastruktur/Wilayah, dan *Sustainable* Lingkungan
4. Pengembangan Layanan Publik dan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Berbasis Digital/Elektronik
5. Pemulihan Kondisi Investasi Daerah, UMKM, Optimalisasi Ekonomi Digital dan Sektor Produktif dan Potensial Daerah (Perindustrian, Pariwisata dan Perdagangan)

Berikut uraian tentang isu strategis Kota Palopo Tahun 2022 :

1. Penguatan dan Optimalisasi Sistem dan Layanan Kesehatan dan Pendidikan Daerah

Penguatan dan optimalisasi aspek kesehatan pada tahun 2022 akan menekankan pada perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat (ptotokel kesehatan) termasuk optimalisasi penanganan pandemic covid 19, penanggulangan penyakit menular dan cakupan layanan jaminan kesehatan masyarakat, menurunkan angka kematian ibu dan anak, serta stunting, dan standar pelayanan minimal bidang kesehatan. Beberapa OPD yang akan menjadi leading sector isu ini adalah dinas kesehatan, BLUD Sawerigading, RSUD Palammai Tandi, Dinas Pengendalian Pendudukan dan KB.

Sementara pada aspek pendidikan, diarahkan untuk menekan angka putus sekolah pendidikan dasar, dan meningkatkan angka melek huruf, terutama bagi penduduk usia produktif dan pemenuhan layanan dasar pendidikan. Beberapa perangkat daerah yang akan menjadi leading sector pada isu strategis ini adalah Dinas pendidikan, bersama dinas perpustakaan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat.

2. Optimalisasi Perlindungan, Rehabilitasi, dan Pemberdayaan Sosial termasuk Ketahanan & Stabilitas Daerah

Isu ini menekankan upaya mempertahankan bahkan meningkatkan daya beli masyarakat, mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dan rasio ketergantungan, sehingga mampu meningkatkan proporsi keluarga sejahtera, disamping meningkatkan keberdayaan perempuan dalam pembinaan keluarga sejahtera. Beberapa OPD yang akan menjadi leading sector terkait isu strategis ini adalah dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dinas social, dinas ketahanan pangan, dinas pertanian, perikanan, dalam upaya mendorong peningkatan kesejahteraan social masyarakat dan pemenuhan layanan dasar (SPM) social masyarakat.

3. Pengembangan Infrastruktur/Wilayah, dan Sustainable Lingkungan

Isu ini menekankan pada upaya pengembangan aksesibilitas dan konektivitas Wilayah, yang akan focus pada peningkatan dan pemantapan kualitas jalan/jembatan, penyediaan infrastruktur strategis daerah, penataan sarana dan prasarana perhubungan, serta pengembangan akses komunikasi dan informasi di daerah, perumahan dan pemukiman dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Dimana beberapa isu lingkungan yang terkait adalah penanganan banjir dan genangan skala banjir, penyediaan ruang-ruang public yang berkualitas, ketahanan bencana dan tangguh bencana.

Dalam implementasinya, pengembangan ini mencakup Infrastruktur Publik/Strategis, dan Infrastruktur Layanan Dasar masyarakat, Pemantapan Akses dan Kualitas Sanitasi, Akses Terhadap perumahan dan permukiman layak serta Penataan Perumahan & Pemukiman yang Sehat dan Produktif SPM Perumahan Pemukiman dan e PU-an. Beberapa OPD yang menjadi leading sector adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informasi, Dinas Perumahan dan Pemukiman, Dinas Transmigrasi dan Dinas Pertanian.

4. Pengembangan Layanan Publik dan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Berbasis Digital/Elektronik

Penekanan pada isu strategis ini adalah tumbuh Kembangnya Inovasi, Akuntabilitas Kinerja, dan implementasi SPBE yang akan diarahkan pada pemantapan Tata Kelola Pemerintahan, Kinerja, Sarana dan Prasarana, dan Kapasitas SDM Aparatur, Pemantapan layanan dasar maupun kualitas layanan publik lainnya. Kondisi ini diharapkan mampu meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap semua layanan public yang dilaksanakan.

Beberapa aspek yang akan menjadi focus penanganannya adalah meningkatkan persentase organisasi perangkat daerah dengan nilai SAKIP dan Reformasi Birokrasi yang berkategori baik, meningkatkan tingkat profesionalisme aparatur melalui pendidikan, pelatihan dan kompetensi serta disiplin kinerja, mengoptimalkan inovasi daerah untuk terus tumbuh dan berkembang pada sejumlah perangkat daerah pelaksana pelayanan public dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui peningkatan pemenuhan usulan prioritas kecamatan yang di-APBD-kan, sesuai harapan masyarakat. Beberapa OPD yang akan menjadi Project leader prioritas ini adalah Sekretariat Daerah, Bappeda, dan Inspektorat Kota Palopo.

Faktor penentu dalam isu strategis ini adalah upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja lembaga pemerintah, pemberian dan penyelenggaraan pelayanan public yang berstandar, lebih mudah, cepat murah dan ber SOP bagi masyarakat, berbasis inovasi dan dengan mengakselerasi transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik. Mencakup di dalamnya pengelolaan keuangan daerah yang menjamin akselerasi pendapatan daerah. Prioritas ini diharapkan dapat terus mengembangkan kapasitas baik dalam kualitas maupun jangkauan layanan pemerintahan yang lebih merata.

5. Pemulihan Kondisi Investasi Daerah, UMKM, Optimalisasi Ekonomi Digital dan Sektor Produktif dan Potensial Daerah (Perindustrian, Pariwisata dan Perdagangan)

Isu ini menekankan pada optimalisasi dan normalisasi Lapangan Usaha dengan penerapan protocol kesehatan, peningkatan pelatihan dan kompetensi serta Kualitas Tenaga Kerja, pemulihan Investasi dan peran UMKM yang akan diarahkan pada Pelatihan Kerja (Life Skill). Pemulihan iklim investasi daerah dengan meningkatkan promosi dan Kualitas Pelayanan Investasi, Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Usaha Produktif, Peningkatan Daya Saing Produk/Komoditas Daerah, Pemantapan Pembinaan Kapasitas Pelaku Usaha, Permodalan/Pembiayaan, Pemasaran, Teknologi dan Infrastruktur serta Kelembagaan, serta pemulihan pariwisata daerah yang lebih berbasis even dengan meningkatkan partisipasi para Seniman dan Budayawan serta pelaku usaha ekonomi kreatif di daerah.

Beberapa kondisi yang ingin dicapai dalam isu ini adalah pulihnya kembali investasi daerah, meningkatnya daya serap tenaga kerja, meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi oleh para pelaku usaha, meningkatnya aktifitas perdagangan dan kuliner, serta iven-iven formal lainnya yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, sebagai beberapa sub tematik utama dalam prioritas kelima ini. Beberapa OPD yang menjadi leading sector isu ini adalah Dinas Penanaman Modal, Dinas tenaga Kerja, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi dan UMKM.

6. Pemulihan Kondisi Investasi Daerah, UMKM, Optimalisasi Ekonomi Digital dan Sektor Produktif dan Potensial Daerah (Perindustrian, Pariwisata dan Perdagangan)

Isu ini menekankan pada optimalisasi dan normalisasi Lapangan Usaha dengan penerapan protocol kesehatan, peningkatan pelatihan dan kompetensi serta Kualitas Tenaga Kerja, pemulihan Investasi dan peran UMKM yang akan diarahkan pada Pelatihan Kerja (*Life Skill*). Pemulihan iklim investasi daerah dengan meningkatkan promosi dan Kualitas Pelayanan Investasi, Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Usaha Produktif, Peningkatan Daya Saing Produk/Komoditas Daerah, Pemantapan Pembinaan Kapasitas Pelaku Usaha, Permodalan/Pembiayaan, Pemasaran, Teknologi dan Infrastruktur serta Kelembagaan, serta pemulihan pariwisata daerah yang lebih berbasis iven dengan meningkatkan partisipasi para Seniman dan Budayawan serta pelaku usaha ekonomi kreatif di daerah.

Beberapa kondisi yang ingin dicapai dalam isu ini adalah pulihnya kembali investasi daerah, meningkatnya daya serap tenaga kerja, meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi oleh para pelaku usaha, meningkatnya aktifitas perdagangan dan kuliner, serta iven-iven formal lainnya yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, sebagai beberapa sub tematik utama dalam prioritas kelima ini. Beberapa OPD yang menjadi leading sector isu ini adalah Dinas Penanaman Modal, Dinas tenaga Kerja, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi dan UMKM.

BAB. III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kawasan Palopo dan Sekitarnya

Dalam konteks pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan (RKPD 2022 Sulsel), Pengembangan wilayah Palopo dan Sekitarnya dengan pendekatan koridor pertumbuhan melalui pengembangan kawasan perkotaan Belopa, dan kawasan perkotaan Batu Sitanduk di Kabupaten Luwu, kawasan perkotaan Malili di Kabupaten Luwu Timur, dan kawasan perkotaan Masamba di Kabupaten Luwu Utara, guna memacu pertumbuhan ekonomi nasional dan pendekatan koridor pemerataan melalui pengembangan kawasan perkotaan Makale di Kabupaten Tana Toraja, dan kawasan perkotaan Rantepao di Kabupaten Toraja Utara guna memenuhi pemerataan dan perluasan cakupan wilayah pemenuhan pelayanan dasar.

Sebagai upaya mewujudkan upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan serta perluasan pemenuhan pelayanan dasar, maka pembangunan wilayah Palopo dan Sekitarnya diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) agar dapat berfungsi sebagai kawasan lumbung pangan nasional, dan pusat industri pengolahan hasil perkebunan, pusat pengembangan komoditas pertambangan nikel. Selain itu, wilayah Palopo dan Sekitarnya juga merupakan bagian dari kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) Toraja dan Sekitarnya yang diarahkan sebagai pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan yang didukung oleh industri dan jasa wisata.

Wilayah Palopo dan sekitarnya merupakan kawasan rawan bencana banjir dengan potensi tinggi pada kabupaten Luwu, Luwu Utara, dan Luwu Timur, kawasan rawan bencana sesar aktif dengan resiko tinggi di kabupaten Luwu Timur, dan kawasan rawan bencana longsor dengan potensi tinggi di Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Kabupaten Tana Toraja, Toraja Utara, dan Kota Palopo.

Dalam upaya mewujudkan sasaran pengembangan wilayah secara efektif dan integratif, maka Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan tema RKPD Tahun 2022, yaitu **"Pemulihan Ekonomi melalui penguatan inovasi daerah dan pementapan hilirisasi pengolahan berbasis Sumber daya alam"** Berdasarkan tema tersebut maka pengembangan wilayah Sulawesi Selatan akan didorong melalui peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur wilayah dan peningkatan konektivitas antar wilayah untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi dan hilirisasi industri pengolahan, sebagai upaya mewujudkan sasaran pembangunan daerah. Target pengembangan wilayah tahun 2022 menurut scenario Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (RKPD 2022) pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Target Indikator Makro Pembangunan Tahun 2022
Menurut RKPD Sulsel 2022 untuk Kawasan Palopo & Sekitarnya

No	Wilayah	Target Kinerja 2022			
		Persentase Penduduk Miskin	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	IPM	Pertumbuhan Ekonomi (%)
1	Kota Palopo	7.42	8.71	78.72	4,84-6,46
2	Kab Luwu	12.82	4.59	71.09	4,38-5,84
3	Kab Luwu Utara	13.27	2.6	70.14	4,98-6,64
4	Kab Luwu Timur	6.84	3.87	73.82	2,49-3,33
5	Kab Toraja Utara	13.13	3.81	69,90	4,54-6,06
6	Kab Tana Toraja	12,17	4,50	69,31	5,05-6,73

Sumber : Dokumen Ranhir RKPD 2022 Sulawesi Selatan

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sulawesi Selatan sesuai arahan RPJMN tahun 2020-2024 maka pengembangan ke 5 (lima) Kawasan Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan sebagai berikut :

Dengan sektor unggulan pariwisata, perkebunan, pertanian, perikanan dan pertambangan merupakan kawasan yang diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). PKW meliputi Kota Palopo, sedangkan PKL meliputi Kawasan Perkotaan Masamba di Kabupaten Luwu Utara, Kawasan Perkotaan Belopa di Kabupaten Luwu, Kawasan Perkotaan Malili di Kabupaten Luwu Timur, Kawasan Perkotaan Makale di Kabupaten Tana Toraja, dan Kawasan Perkotaan Rantepao di Kabupaten Toraja Utara.

Sedangkan tujuan pengembangan Kawasan Palopo yang diamanatkan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 adalah sebagai pusat pertumbuhan berbasis potensi sumberdaya alam dan kepariwisataan, dengan memperhatikan peran Kabupaten Luwu Utara sebagai bagian dari Kawasan Sorowako yang merupakan Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara sebagai bagian dari Kawasan Toraja yang merupakan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang diharapkan dapat mengoptimalkan perannya untuk menjadi salah satu sumber penggerak utama perekonomian Sulawesi Selatan.

Pengembangan di sektor pertanian diarahkan untuk mewujudkan Kawasan Palopo sebagai salah satu penyangga pangan Sulawesi Selatan yang berperan sebagai lumbung pangan nasional yang didukung oleh investasi Pemerintah melalui pembangunan bendungan dan peningkatan jaringan di daerah irigasi Baliase di Kabupaten Luwu Utara. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, perdagangan besar dan eceran, dan pertambangan tetap menjadi menjadi sektor utama penggerak perekonomian melalui akselerasi hilirisasi pengelolaan produk berbasis sumberdaya alam khususnya komoditas kakao dan kopi yang didukung oleh peningkatan konektivitas antar wilayah karena dinamika sektor pertanian, perikanan dan kehutanan akan berdampak positif terhadap penurunan persentase tingkat kemiskinan di Kawasan Palopo.

Peningkatan peran sektor perdagangan di Kawasan Palopo didorong melalui upaya optimalisasi peran Kawasan Toraja sebagai kawasan strategis pariwisata nasional yang didukung oleh infrastruktur transportasi melalui Bandar Udara di Kabupaten Toraja Utara dan Kabupaten Luwu serta pengembangan pelabuhan pengumpul. Mengacu pada data BPS tahun 2020, dalam rangka peningkatan indeks pembangunan manusia di Kawasan Palopo maka kebijakan pembangunan yang perlu dikembangkan terkait bidang pendidikan yang difokuskan pada program peningkatan angka rata-rata lama sekolah yaitu Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara.

Masih dibidang pendidikan fokus pada program yang meningkatkan harapan lama sekolah yaitu pada Kabupaten Luwu, Luwu Utara dan Kabupaten Luwu Timur. Selanjutnya pada bidang kesehatan kebijakan yang perlu dikembangkan pada kawasan ini adalah optimalisasi pelaksanaan standar pelayanan minimal pada kawasan ini masih dibawah rata-rata Sulsel kecuali Kota Palopo, Kabupaten Tana Toraja, dan Kabupaten Toraja Utara.

Untuk daya beli pada kawasan ini secara umum tinggal melanjutkan kinerja yang dilakukan selama ini, namun pada Kabupaten Tana Toraja, Toraja Utara dan Kabupaten Luwu perlu mendapatkan perhatian dengan cara meningkatkan produksi barang dan jasa. Dalam rangka pengintegrasian pembangunan rendah karbon, maka di Kawasan Palopo akan dilakukan kebijakan peningkatan dan pemeliharaan kualitas, daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, khususnya kawasan hutan yang persentase luasannya terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan dengan tetap memperhatikan resiko bencana, mengingat Kota Palopo, Kabupaten Luwu Timur, Luwu, dan Luwu Utara, merupakan kabupaten/kota dengan kelas multi resiko bencana tinggi.

Mengemukakan tentang arahan nasional di bidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPJMD provinsi/kabupaten/kota. Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta

permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

3.1.1. Prospek dan Tantangan Perekonomian Daerah

3.1.1.1 Prospek Perekonomian Daerah

Prospek Ekonomi Kota Palopo Tahun 2022, akan sangat dipengaruhi intervensi dimensi kesehatan terutama soal penanganan pandemic covid 19 dan upaya vaksinasi dan ketepatan sasaran perlindungan dan pemberdayaan social yang dilaksanakan oleh pemerintah. Meski demikian, Pemerintah Kota Palopo akan tetap optimis bahwa perekonomian tahun 2022 akan mulai membaik. Olehnya upaya-upaya yang bersifat pemulihan atas perekonomian daerah dan recovery atas aspek kesejahteraan masyarakat tetap akan menjadi focus penanganan pemerintah Kota Palopo.

Prospek ekonomi Kota Palopo di Tahun 2022 digambarkan sebagai berikut :

- a) Pemerintah Kota Palopo optimis, target angka pertumbuhan ekonomi 2022 (4.68%), akan lebih baik dari capaian 2020 (0.45%). Ditandai dengan mulai pulihnya sejumlah sector informal di kota palopo dan semakin maraknya aktiitas perdagangan masyarakat yang memanfaatkan layanan berbasis daring.
- b) Angka pengangguran terbuka pada tahun 2022 diharapkan maksimal berada pada angka 8.55%, dimana pada tahun 2020 berada pada posisi 10.37%. Pulihnya sejumlah sector informal di Kota Palopo dan pemanfaatan teknologi informasi berbasis daring oleh para pelaku usaha diharapkan mampu melahirkan lapangan pekerjaan dan kesempatan usaha baru, disamping akan dilaksanakannya sejumlah proyek infrastruktur diharapkan mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak.
- c) Angka kemiskinan diproyeksi maksimal 6.28% pada tahun 2022. Pemerintah Kota Palopo akan melaksanakan sejumlah program perlindungan dan pemberdayaan social, mulai dari bantuan social, bantuan usaha dan pemberdayaan keluarga yang berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, untuk memastikan ketepatan sasaran program. Serangkaian upaya ini diharapkan mampu meningkatkan beberapa indikator ekonomi seperti pendapatan per kapita, paritas daya beli masyarakat diproyeksi juga diharapkan bisa naik setelah pada tahun 2022, masing-masing berada pada angka 43 juta/perkapita/tahun dan 13,320 (ribu/tahun).
- d) Perkembangan investasi yang masuk ke Kota Palopo pada tahun 2022, juga akan berupaya dipulihkan oleh Pemerintah Kota Palopo melalui serangkaian kegiatan promosi investasi dan memastikan pelayanan investasi di Kota ini akan jauh lebih kompetitif, lebih mudah, lebih cepat dan lebih akuntabel dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dengan melakukan sejumlah inovasi layanan.
- e) Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan daerah Kota Palopo pada akhir tahun 2022, juga diproyeksikan lebih meningkat dibandingkan realisasi tahun 2020 memberikan kontribusi sebesar 22.85%.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Kota Palopo akan berupaya :

- a) Menjaga dan memastikan bahwa lapangan usaha di Kota Palopo kembali berjalan normal seperti sebelum pandemic covid 19, seperti perdagangan dan logistic serta investasi daerah, sehingga tetap mampu mendukung penyediaan lapangan kerja, dan usaha produktif masyarakat kembali berjalan seperti sebelumnya.
- b) Menjaga dan memastikan bahwa upaya-upaya recovery atau pemulihan ekonomi daerah dan status kesejahteraan masyarakat tetap dilaksanakan, sebagai akibat pandemic covid 19
- c) Menjaga dan memastikan bahwa pengeluaran dan belanja Pemerintah tetap berjalan dan dilaksanakan secara tepat dan cermat dalam fungsinya sebagai salah satu stimulator ekonomi daerah
- d) Memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga dengan menjaga kestabilan dan distribusi barang, dan ketersediaannya serta menjaga inflasi daerah, .
- e) Memastikan dan menjaga agar intervensi pemerintah dalam hal Pemberdayaan dan penanganan masyarakat miskin melalui program pemenuhan kebutuhan dasar,

perlindungan dan pemberdayaan masyarakat miskin atau rentan, tetap berjalan dengan efektif.

Perekonomian Daerah dan Dampak Pandemic Covid 19

Dampak pandemic covid 19 di Kota Palopo antara lain, jumlah hotel yang sempat ditutup sebanyak 5 buah, tingkat hunian (okupansi) turun sampai pada angka 5%, dan sekitar 70% karyawan hotel dirumahkan. Kemudian sebagian besar belanja infrastruktur daerah di Kota Palopo ditunda, dan sejumlah komitmen investasi sector swasta di Kota Palopo mengalami reschedule, jumlah UMKM yang terdampak akibat pembatasan social dan jam operasional usaha sebanyak 6.265 unit usaha, jumlah total tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja dan dirumahkan pada angka 2086 orang.

Selain itu, Pemerintah Kota Palopo juga merefocusing APBD 2020 yakni 10.9 Milyar untuk Penanganan Kesehatan, 5,3 Milyar untuk penanganan dampak ekonomi, 1.6 Milyar untuk jaring Pengaman Sosial yang masih sebagai Belanja Tidak Terduga.

Secara ringkas, dampak pandemic covid 19 bagi perekonomian Kota Palopo sampai akhir tahun 2020, digambarkan sebagai berikut :

- f) Ekonomi Kota Palopo diproyeksikan akan melambat sampai dengan akhir tahun 2020, mengingat angka pertumbuhan ekonomi Palopo tanpa pandemic covid pun telah menurun dari 7.52% ditahun 2018 menjadi 6.75% di tahun 2019, dan pada tahun 2020 dengan besarnya pengaruh covid 19, hampir dapat dipastikan akan semakin menekan pertumbuhan ekonomi di Kota Palopo.
- g) Angka pengangguran terbuka dan jumlah pengangguran di 2020, diproyeksikan akan semakin meningkat dibandingkan posisi tahun lalu 2019 yang berada pada angka 10.32% (8314 orang), setelah sempat pada posisi 14.32% pada tahun 2016,
- h) Angka kemiskinan diproyeksi juga bakal meningkat, daripada tahun 2019 (7.82%), yang merupakan angka terendah persentase penduduk miskin Kota Palopo sejak tahun 2013 silam.
- i) Beberapa indikator ekonomi seperti pendapatan per kapita, paritas daya beli masyarakat diproyeksi juga akan menurun pada akhir tahun 2020, setelah pada tahun 2019, masing-masing berada pada angka 43.02 juta/perkapita/tahun dan 12,986 (ribu/tahun).
- j) Perkembangan investasi yang masuk ke Kota Palopo pada akhir tahun 2020, juga diproyeksikan sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2019.
- k) Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan daerah Kota Palopo pada akhir tahun 2020, juga diproyeksikan menurun dibandingkan tahun 2019 memberikan kontribusi sebesar 16.83%, dan 19.78% pada tahun 2018.

3.1.1.2 Prospek Ekonomi Daerah

Prospek ekonomi Kota Palopo sampai dengan akhir tahun 2020 akan sangat dipengaruhi dampak pandemic covid 19, termasuk pada dinamika ekonomi Kota Palopo. Di satu sisi pandemi menekan aktifitas berusaha masyarakat akibat adanya pembatasan social, dan himbauan menjaga jarak fisik dan social (physical/social distance). Tetapi disisi lain, pandemic juga meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam mengelola usaha.

Pembatasan-pembatasan tersebut berpengaruh terhadap pola produksi, distribusi bahkan sampai tingkat konsumsi masyarakat atas barang dan jasa. Dan beberapa sector yang paling terdampak adalah perdagangan, jasa perhotelan, makanan akomodasi dan kuliner yang pada akhirnya mempengaruhi pendapatan asli daerah Kota Palopo sampai dengan akhir tahun 2020.

Pandemi juga memicu meningkatnya konsumsi masyarakat pada alat-alat pribadi untuk pengamanan kesehatan diri, dan jasa informasi komunikasi dimana aktifitas ekonomi masyarakat yang biasanya dilakukan secara konvensional, disaat pandemic dilakukan secara virtual/daring.

Ancaman perlambatan ekonomi Kota Palopo dan penurunan pendapatan masyarakat pada tahun 2020 akan sangat dipengaruhi oleh efektifitas intervensi yang dilakukan pemerintah Kota Palopo, menangani dampak pandemic covid 19 pada aspek perlindungan social dan pemulihan ekonomi daerah.

3.1.1.3 Tantangan Perekonomian

A. Tantangan Perekonomian Global

Pandemi COVID-19 berpotensi mengubah tatanan ekonomi dunia. Kekhawatiran terbesar adalah terjadinya resesi ekonomi di banyak negara. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan, produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada kuartal III 2020 minus 3,49 persen, ini artinya Indonesia sudah memasuki masa resesi ekonomi. Saat ini, selain Indonesia, beberapa negara yang telah mengalami resesi di antaranya Amerika Serikat, Singapura, Korea Selatan, Australia, Uni Eropa, hingga Hong Kong

Resesi ekonomi adalah suatu kondisi di mana perekonomian suatu negara mengalami penurunan selama dua kuartal berturut-turut. Hal ini ditandai dengan produk domestik bruto (PDB) yang minus. Efek dari resesi ialah ekonomi yang lesu, hal ini berdampak pada daya beli masyarakat melemah, penghasilan merosot, rendahnya tingkat konsumsi, investasi tidak bergairah, hingga gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). Kondisi tersebut umumnya ditandai dengan meningkatnya risiko harga komoditas yang tidak stabil hingga menimbulkan syok, risiko krisis utang, serta risiko geopolitik. Olehnya upaya mitigasi betul betul harus disiapkan. Risiko lainnya adalah berkembangnya teknologi digital, berikut risiko menyangkut keamanan siber.

Tantangan lain adalah perubahan iklim yang dapat menimbulkan berbagai fenomena, seperti anomali cuaca dan bencana alam. Tantangan perubahan iklim ini pengaruhnya akan sama dengan Covid-19 dan akan mengancam seluruh dunia. Perubahan iklim akan mendorong perubahan cuaca secara ekstrem sehingga dapat menimbulkan korban harta benda dan korban jiwa. Selain itu, perubahan iklim memiliki potensi menyebabkan terjadinya berbagai bencana alam, seperti banjir dan tanah longsor.

Studi terbaru menunjukkan bahwa pada 2030, kenaikan suhu diprediksi bisa mencapai 3,2 derajat Celsius. Potensi kenaikan suhu yang ekstrem bahkan tetap terjadi meski negara-negara telah menunjukkan komitmen nasionalnya mencegah perubahan iklim melalui Perjanjian Paris atau Paris Agreement. Kenaikan ini pun jauh melebihi batas ambang atau trasehold sebesar 1,1 persen yang dianggap sudah mengancam dunia.

Sebagai negara dengan populasi yang besar, Indonesia harus ikut aktif dalam mencegah menjaga iklim dunia melalui program-program mitigasi dan adaptasi. Sebab, akibat dari memburuknya iklim akan mengancam perekonomian. Saat ini, Indonesia tengah melaksanakan program Nationally Determined Contributions (NDC) untuk mengurangi emisi CO2 sebanyak 29 persen pada 2030 melalui peningkatan bauran energi baru terbarukan (EBT) dengan target 23 persen. Penurunan emisi bisa lebih besar hingga 41 persen seumpama Indonesia memperoleh dukungan dunia.

B. Tantangan Perekonomian Nasional & Regional (Sulsel)

Berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia dalam pemulihan ekonomi nasional, akibat dampak dari pandemi Covid-19. **Tantangan pertama** dan terpenting adalah vaksinasi, bagaimana mengelola Covid-19, serta membangun herd immunity. Keberhasilan vaksinasi dan penanggulangan dampak Covid akan memulihkan perekonomian, khususnya pada sektor konsumsi. Sektor ini baru akan pulih ketika masyarakat yakin bahwa Covid sudah terkendali. **Tantangan kedua** adalah bagaimana memulihkan korporasi dan perbankan. Pemerintah Indonesia melakukan peran untuk memulihkan kembali hubungan keduanya dengan memberikan subsidi pada tingkat bunga dan jaminan pinjaman kemudian ketiga adalah spill over yang berasal dari kebijakan negara maju, khususnya Amerika Serikat. **Tantangan terakhir** adalah terbatasnya ruang kebijakan fiskal seiring semakin tingginya utang dan defisit. Maka dari itu, pemerintah harus melakukan reformasi, baik dari sisi pendapatan maupun belanja. Olehnya Pemerintah dan Bank Indonesia bersama-sama melakukan koordinasi dalam merancang kebijakan dan berkomunikasi kepada lembaga pemeringkat pasar.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka menengah masih akan tetap diwarnai berbagai ketidakpastian global. Meski demikian, pemerintah cukup optimistis geliat perekonomian nasional tak akan terganggu. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia telah mencapai sebesar -2,07 persen. Kemudian pada tahun 2021 akselerasi ekonomi nasional menargetkan sebesar 5,0 persen sedangkan tahun 2022 sebesar 5,64 - 6,0 persen.

Dengan target tersebut, Indonesia dibidik masih menyandang predikat UpperMiddle Income Countries. Sehingga kedepan pemerintah menyiapkan lima langkah untuk meningkatkan investasi, yakni finalisasi Rancangan Undang-Undang terkait Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan, pemberian fasilitas kemudahan akses pinjaman perbankan, pemberian fasilitas investasi seperti percepatan perizinan berusaha di kementerian, lembaga, dan daerah melalui sistem Online Single Submission terintegrasi, pemberian kemudahan untuk investasi berorientasi ekspor, hingga kemudahan dalam pemenuhan bahan baku dalam negeri dan ekspor.

Target peningkatan ekspor barang dan jasa diprediksi akan terus meningkat dengan didorong naiknya permintaan ekspor Indonesia akibat pulihnya aktivitas ekonomi dunia. Sementara itu, Pertumbuhan ekonomi dari sisi lapangan usaha mengandalkan sektor industri, perdagangan, serta penyediaan akomodasi dan makan minum sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, sementara sektor terdampak negatif diharapkan pulih, seiring dengan normalnya kondisi global dan domestik yang berujung pada semakin bergeraknya roda industri dan memicu kedatangan wisatawan.

Akselerasi pertumbuhan ekonomi juga didukung peningkatan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang didorong pulihnya permintaan domestik dan global serta meningkatnya produktivitas lahan dan penguatan nilai tambah produk. Pemerintah pun optimistis dalam melakukan perbaikan (pemulihan ekonomi) berlanjut hingga 2022, meski tidak dapat dipungkiri bahwa pandemi Covid-19 masih akan mewarnai tahun depan dan proses pengendalian Covid-19 sangat bergantung pada penemuan dan distribusi vaksin hingga mencapai herd immunity.

Level Sulawesi Selatan

Pada level regional yakni Sulawesi Selatan, tantangan perekonomian Sulawesi Selatan ke depan, sebagaimana pencapaian dalam beberapa tahun terakhir, tidak lagi pada pencapaian pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi. Faktanya, bahwa inklusivitas pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan tergolong rendah dalam lima tahun terakhir, sehingga kerangka pendanaan harus mampu difokuskan pada inklusivitas pertumbuhan, dan tetap diupayakan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi tinggi yang dicapai selama ini.

Kerangka pendanaan harus mendorong alokasi pembiayaan pembangunan untuk menurunkan tingkat pengangguran, menciptakan pemerataan pendapatan antar wilayah, serta mereduksi tingkat kemiskinan. Sehingga tantangannya bukan semata-mata pada mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi pada meningkatkan sensitivitas pertumbuhan ekonomi tersebut untuk penciptaan lapangan pekerjaan dan berusaha bagi pelaku ekonomi kecil dan menengah yang tersebar hingga ke daerahdaerah pelosok Sulawesi Selatan.

Untuk itu, kecenderungan pembiayaan yang lebih ekspansif ditempuh Sulawesi Selatan harus dapat memastikan untuk meningkatkan inklusivitas pertumbuhan ekonomi yang dicapai selama ini. Kerangka pendanaan untuk alokasi program pembangunan daerah dan program perangkat daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang lebih ekspansif ke depan, akan difokuskan pada arah kebijakan, antara lain:

- (1) mendorong peningkatan pendapatan masyarakat, untuk tetap menjaga stabilitas permintaan konsumsi domestik; serta

- (2) menciptakan iklim investasi untuk mendorong peningkatan investasi daerah, selain untuk merespon permintaan konsumsi domestik juga ditujukan untuk mendorong produksi unggulan daerah dalam memenuhi permintaan pasar ekspor.

Penyebaran COVID-19 yang terjadi secara masif membuat pemerintah menerapkan berbagai kebijakan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 dengan penerapan social dan physical distancing berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Work From Home (WFH) yang membatasi mobilitas masyarakat. Kebijakan tersebut kemudian menciptakan efek penutupan tempat hiburan/rekreasi, pusat perbelanjaan dan toko ritel.

Kesadaran masyarakat dalam melaksanakan protokol Kesehatan diharapkan dapat mencegah meluasnya pandemi COVID-19. Pemanfaatan bantuan pemerintah dalam rangka penanganan COVID-19 secara optimal diharapkan dapat memberikan pengaruh positif dalam meningkatkan daya beli masyarakat. Selain itu Akselerasi pertumbuhan ekonomi akan dicapai melalui kolaborasi dan gotong royong antar daerah dalam mengembangkan ekonomi regional. Dibutuhkan effort dari masing-masing Pemda dalam memaksimalkan Sumber Daya Alam (SDA) maupun Sumber Daya Ekonomi (SDE) karena Pemda sebagai entrepreneur yang harus terlibat aktif dan inovatif untuk mendorong aktifitas dan kreatifitas bisnis di daerah.

Dengan melihat kondisi Sulawesi Selatan yang saat ini masih bergelut dengan wabah covid-19 yang makin meluas, untuk tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan diproyeksikan sebesar 5,98 - 7,60 persen yang lebih tinggi dari target awal yaitu 4,62 - 5,98 persen sebagai mana yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 sebesar 5,4 - 6,0 persen.

C. Tantangan Perekonomian Daerah (Kota Palopo)

Beberapa kondisi faktual sebagai dampak pandemic covid 19 di Kota Palopo adalah sebagai berikut :

1. Aktifitas perekonomian daerah yang melambat
2. Peningkatan jumlah pengangguran,
3. Angka kemiskinan meningkat,
4. Keterbatasan masyarakat pada Keterjangkauan harga pangan
5. Kesenjangan social ekonomi yang menguat
6. Penurunan kontribusi sejumlah lapangan usaha yang menjadi pilar utama penggerak ekonomi Kota Palopo terutama sector perdagangan
7. Meningkatnya inflasi di daerah
8. Pembangunan sejumlah paket infrastruktur daerah yang terhambat

Berangkat dari kondisi tersebut, beberapa tantangan berkaitan dengan kondisi perekonomian Kota Palopo pasca pandemic covid 19 di Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Memulihkan kembali ekonomi di Kota Palopo dengan mengakselerasi aktifitas semua lapangan usaha yang tertekan akibat pandemic covid 19 di Kota Palopo dengan memastikan bahwa seluruh aktifitasnya akan dilaksanakan dengan menjalankan protocol kesehatan.
2. Memulihkan kondisi social ekonomi masyarakat, dengan memastikan efektifitas dan ketepatan sasaran program perlindungan social/social safety net, dan memacu kembali program pemberdayaan masyarakat .
3. Memacu dan mengakselerasi kembali investasi daerah yang mampu menyediakan lapangan kerja dan memperkuat lapangan berusaha masyarakat, sehingga angka pengangguran dan angka/tingkat partisipasi angkatan kerja tetap mampu dipertahankan/ditingkatkan.
4. Memastikan kestabilan harga-harga bahan pokok dan barang bersubsidi termasuk inflasi, sehingga mampu mempertahankan daya beli masyarakat terhadap barang-barang kebutuhan pokok tetap terjaga, dengan melakukan upaya-upaya yang mampu menjaga ketersediaan dan distribusi barang-barang tersebut, secara bersinergi antara semua pihak yang terlibat.

5. Menjaga dan memastikan bahwa pengeluaran dan belanja Pemerintah tetap berjalan dan dilaksanakan secara tepat dan cermat dalam fungsinya sebagai salah satu stimulator ekonomi daerah
6. Mengawal dan memastikan kebijakan fiskal pemerintah pusat dan daerah yang menjadi upaya recovery atau pemulihan ekonomi berjalan tepat sasaran.
7. Peningkatan cakupan dan kualitas infrastruktur daerah yang lebih merata dan berkualitas terutama pada aspek konektifitas dan aksesibilitas wilayah. Sehingga kesenjangan ekonomi dan social tidak semakin melebar.

3.1.2. Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDRB

Pada tahun 2020, laju pertumbuhan PDRB Kota Palopo hanya berada pada angka 0.45% (BPS Kota Palopo Tahun 2021). Kondisi ini belum mencapai target pemerintah tahun 2020, yang berada pada angka 7.16% pada RKPD Pokok Tahun 2020. Bahkan juga tidak memenuhi angka target perubahan pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang ditetapkan dalam Perubahan RKPD Kota Palopo Tahun 2020, yang menempatkan angka 4.16% sebagai target laju pertumbuhan PDRB.

Angka pertumbuhan LPE 2020, juga tertinggal jauh dengan LPE 2019 yang berada pada angka 6.75%. Bahkan LPE 2020, menjadi laju pertumbuhan PDRB Kota Palopo yang paling terendah sepanjang berdirinya Kota Palopo. Berikut adalah kondisi laju pertumbuhan PDRB Kota Palopo rentan waktu 2015-2020 :

Tabel 3.2
Laju Pertumbuhan PDRB (ADHK)
Menurut Lapangan Usaha di Kota Palopo 2018–2020

No	Bidang /Urusan	Tahun		
		2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.42	4.95	1.47
2	Pertambangan & Penggalian	2.55	1.73	-0.86
3	Industri Pengolahan	2.95	7.75	-5.59
4	Pengadaan Listrik dan Gas	5.51	3.89	3.64
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	8.05	4.56	-0.05
6	Konstruksi	5.41	6.1	-0.55
7	Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9.15	10.05	0.35
8	Transportasi dan Pergudangan	10.06	9.15	-14.17
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7.27	7.93	-7.01
10	Informasi dan Komunikasi	13.26	10.63	12.34
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.67	-0.29	2.46
12	Real Estat	4.7	5.73	4.82
13	Jasa Perusahaan	9.23	9.94	-1.84
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	16.75	3.27	-0.59
15	Jasa Pendidikan	10.38	5.91	1.4
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9.68	6.37	3.27
17	Jasa Lainnya	12.22	9.28	-0.69
	PDRB ADHB	7.52	6.75	0.45

Sumber : Palopo Dalam Angka 2021

Meski demikian, bila dibandingkan dengan wilayah lain, angka LPE 2020 Kota Palopo masih lebih baik dari angka LPE Kota Makassar yang berada pada angka minus yakni (-1.27%), Kota Pare-Pare, minus (-0.08%) dan rata-rata angka LPE Sulawesi Selatan minus (-0.70%) bahkan LPE Nasional minus (-0.21%). LPE Kota Palopo masih tumbuh positif, sementara daerah lain, melambat dan berada pada angka negative dibandingkan setahun sebelumnya, 2019.

Ini menunjukkan bahwa pada tahun 2020, meskipun nilai produksi barang dan jasa menurun dibandingkan 2019, tahun 2020 di Kota Palopo, masih terjadi peningkatan nilai produksi barang dan jasa sebesar 0.45% dibandingkan tahun 2019 lalu, dan kondisi tersebut tidak mampu dilakukan daerah lain sehingga angka LPEnya berada pada posisi angka LPE negative.

Berikut adalah perkembangan nilai PDRB Kota Palopo tahun 2018-2020 :

Tabel 3.3
Perkembangan nilai PDRB Kota Palopo tahun 2018-2020

Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (miliar Rp)	Laju Pertumbuhan (%)
2018	5.102,99	7,52
2019	5.447,36	6,75
2020	5,472,08	0.45

Sumber Data : BPS Kota Palopo 2021

Tabel diatas menunjukkan pada tahun 2019-2020, masih terdapat peningkatan nilai nilai produksi barang dan jasa di Kota Palopo senilai 24.72 (Milliar) dengan persentase peningkatan nilai PDRB sebesar 0.45% dari tahun 2019.

Tabel 3.4.
Perkembangan Capaian Nilai
PDRB Kota Palopo (ADHB & ADHK)
Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) Tahun 2018-2020

No	Bidang /Urusan	PDRB ADHB Tahun			PDRB ADHK Tahun		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.232,24	1,301.47	1,352.04	830,61	871,74	884.51
2	Pertambangan & Penggalan	12,16	12.39	12.55	6,71	6,82	6.76
3	Industri Pengolahan	197,01	216.26	205.18	129,18	139,20	130.85
4	Pengadaan Listrik dan Gas	5,81	6.05	6.18	5,67	5,89	6.1
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	12,50	13.55	13.61	14,75	15,42	15.42
6	Konstruksi	1.194,98	1,330.13	1,325.43	734,33	779,14	774.84
7	Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.723,39	1,938.86	1,963.95	1.291,73	1.421,61	1,426.60
8	Transportasi dan Pergudangan	432,45	475.89	409.35	286,15	312,34	268.07
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	85,98	93.72	87.5	59,80	64,55	60.02
10	Informasi dan Komunikasi	301,91	335.27	374.82	303,02	335,22	376.6
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	566,53	579.66	593.39	383,21	382,09	391.48
12	Real Estat	358,34	384.06	403.01	233,02	246,38	258.25

No	Bidang /Urusan	PDRB ADHB Tahun			PDRB ADHK Tahun		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
13	Jasa Perusahaan	6,72	7.52	7.46	4,61	5,07	4.97
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	580,05	616.97	624.2	368,09	380,14	377.91
15	Jasa Pendidikan	309,44	342.26	349.4	247,46	262,10	265.76
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	171,40	184.63	193.41	137,06	145,79	150.56
17	Jasa Lainnya	94,22	103.82	103.81	67,61	73,88	73.37
	PDRB ADHB	7.285,14	7,942.48	8,025.29	5.102,99	5.447,36	5,472.08

Sumber Data : BPS Kota Palopo 2021

Berdasarkan hasil perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Palopo Menurut Lapangan Usaha 2020, nilai PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp 8.025,29 (milyar). Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar Rp 82,81 milyar dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai Rp 7.942,48.

Berdasarkan harga konstan 2010, PDRB juga mengalami kenaikan dari Rp 5.447,36 milyar di tahun 2019 menjadi Rp 5.472,08 milyar di tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa selama tahun 2020, Kota Palopo mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 0,45 persen, melambat dibandingkan tahun sebelumnya.

Selama lima tahun terakhir, struktur perekonomian Kota Palopo didominasi oleh tiga kategori lapangan usaha diantaranya Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; dan Konstruksi. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Palopo pada tahun 2020 dihasilkan oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor, yang besarnya mencapai 24,47 persen.

Pada tahun 2020 struktur perekonomian Palopo didominasi oleh 3 (tiga) kategori lapangan usaha, diantaranya: 1) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; 2) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; dan 3) Konstruksi;. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Palopo. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Palopo pada tahun 2020 dihasilkan oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, yaitu mencapai 24,47 persen (angka ini meningkat dari 24,47 persen di tahun 2019). Selanjutnya lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 16,85 persen, kemudian disusul oleh lapangan usaha Konstruksi sebesar 16,52 persen.

Tabel 3.5
Distribusi Persentase PDRB Kota Palopo (ADHB)
Menurut Lapangan Usaha (Persen), Tahun 2018– 2020

No	Bidang /Urusan	Tahun		
		2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	16,91	16,39	16,85
2	Pertambangan & Penggalan	0,17	0,16	0,16
3	Industri Pengolahan	2,70	2,72	2,56
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,08	0,08
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,17	0,17	0,17
6	Konstruksi	16,40	16,75	16,52
7	Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	23,66	24,41	24,47

No	Bidang /Urusan	Tahun		
		2018	2019	2020
8	Transportasi dan Pergudangan	5,94	5,99	5,10
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,18	1,18	1,09
10	Informasi dan Komunikasi	4,14	4,22	4,67
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,78	7,30	7,39
12	Real Estat	4,92	4,84	5,02
13	Jasa Perusahaan	0,09	0,09	0,09
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,96	7,77	7,78
15	Jasa Pendidikan	4,25	4,31	4,35
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,35	2,32	2,41
17	Jasa Lainnya	1,29	1,31	1,29
	PDRB ADHB	100	100	100

3.1.3. Kemiskinan

Persentase penduduk miskin pada tahun 2020 berada pada angka 7.85%, belum memenuhi target daerah 2020 yang berada pada angka 7.64%. Bila dibandingkan tahun 2019, capaian kinerja persentase penduduk miskin Kota Palopo tahun 2020, belum lebih baik, sebab persentase penduduk miskin justru lebih besar atau meningkat dibandingkan setahun yang lalu.



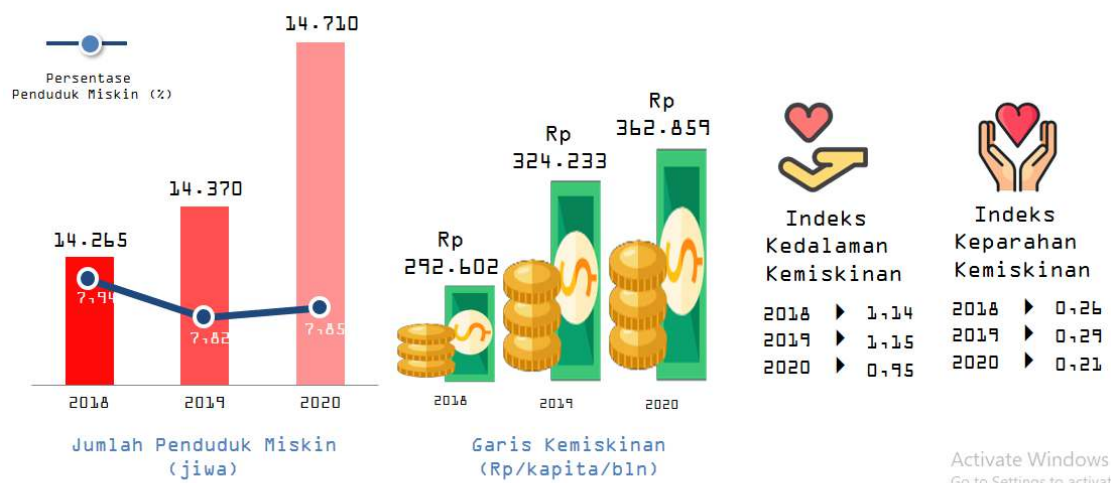
Demikian halnya dengan jumlah penduduk miskin Kota Palopo yang pada 2020 sebanyak 14.710 jiwa (7,85 persen), naik 340 jiwa dibandingkan kondisi Tahun 2019 yang sebesar 14.370 jiwa (7,82 persen). Capaian 2020 Kota Palopo ini juga masih jauh dari terhadap target akhir RPJMD pada tahun 2023 yang menargetkan angka 6.08%.

Meski demikian, persentase penduduk miskin Kota Palopo 2020 ini masih lebih baik daripada rata-rata

persentase penduduk miskin Sulsel yang berada pada angka 8.72% (Maret 2020) dan nasional 9.78%. Persentase penduduk miskin di Kota Palopo berada pada peringkat 10 (sepuluh) dimana tingkat kemiskinan tertinggi diduduki oleh Kabupaten Jeneponto dengan persentase penduduk miskin sebesar 14,58 persen, Kabupaten Pangkajene Kepulauan sebesar 13,96 persen dan Kabupaten Luwu Utara sebesar 13,41 persen.

Selain persentase dan jumlah penduduk miskin yang meningkat, Garis kemiskinan Kota Palopo pada Maret 2020 juga meningkat, dari Rp. 324,233,- per kapita per bulan di tahun 2019 menjadi Rp 362.859,- per kapita per bulan di Tahun 2020. Meski demikian, Indeks kedalaman kemiskinan Kota Palopo Maret 2020 menurun 0,20 poin dari 1,15 menjadi 0,95 dibanding Maret 2019. Demikian pula dengan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Palopo Maret 2020 turun 0,08 poin dari 0,29 menjadi 0,21 dibanding periode sebelumnya, 2019.

Meningkatnya garis kemiskinan Kota Palopo dari Rp. 324.233 ribu per kapita/bulan tahun 2019 menjadi Rp.362.859 per kapita per bulan pada tahun 2020, menyebabkan semakin banyak warga masyarakat kota Palopo yang akhirnya hidup dibawah garis kemiskinan dan kemudian menyandang status penduduk miskin.



*Sumber: BPS Kota Palopo
 **Data tahun 2020 merupakan angka sementara

Pembatasan social berskala besar dalam rangka menyikapi pandemic covid 19 telah menghambat sebagian besar aktifitas berusahnya untuk mendapatkan pendapatan bagi pemenuhan kebutuhan hidupnya. Kondisi ini sangat dirasakan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, terutama buruh tani, buruh kontruksi dan nelayan serta pekerja di sector informal lainnya. Buruh tani yang diupah harian pada lapangan usaha pertanian, tidak dapat bekerja karena pemilik lahan juga menunda aktifitas produksinya. Ini juga dirasakan oleh kelompok nelayan, yang produksinya tidak mampu diserap oleh pasar, karena konsumsi rumah tangga yang tertahan. Semuanya kemudian berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat.

Demikian pula dengan buruh kontruksi yang diupah harian tidak dapat bekerja, akibat penundaan sejumlah proyeksi kontruksi dan investasi di daerah yang direschedule ulang oleh investornya akibat pembatasan social berskala besar tersebut. Penutupan sejumlah usaha sector informal akibat sepiunya konsumen yang diikuti pemutusan hubungan kerja terutama bagi tenaga kerja harian lepas, juga memberi andil dalam peningkatan angka kemiskinan. Terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yang terlibat

3.1.4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka yang menjadi Indikator meningkatnya perluasan kesempatan berusaha dan produktifitas tenaga kerja di Kota Palopo pada tahun 2020, berada pada angka 10.37% (Maret 2020). Jumlah ini belum memenuhi target daerah 2020 yakni 9,51%. Tingkat penangguran terbuka 2020 di Kota Palopo jumlah meningkat, dibandingkan setahun lalu. Sebab di 2019, angka tingkat pengangguran terbuka hanya pada posisi 10.32%. Tetapi sudah jauh lebih baik dibandingkan tahun 2018 dimana angkanya pada posisi 11.60%.



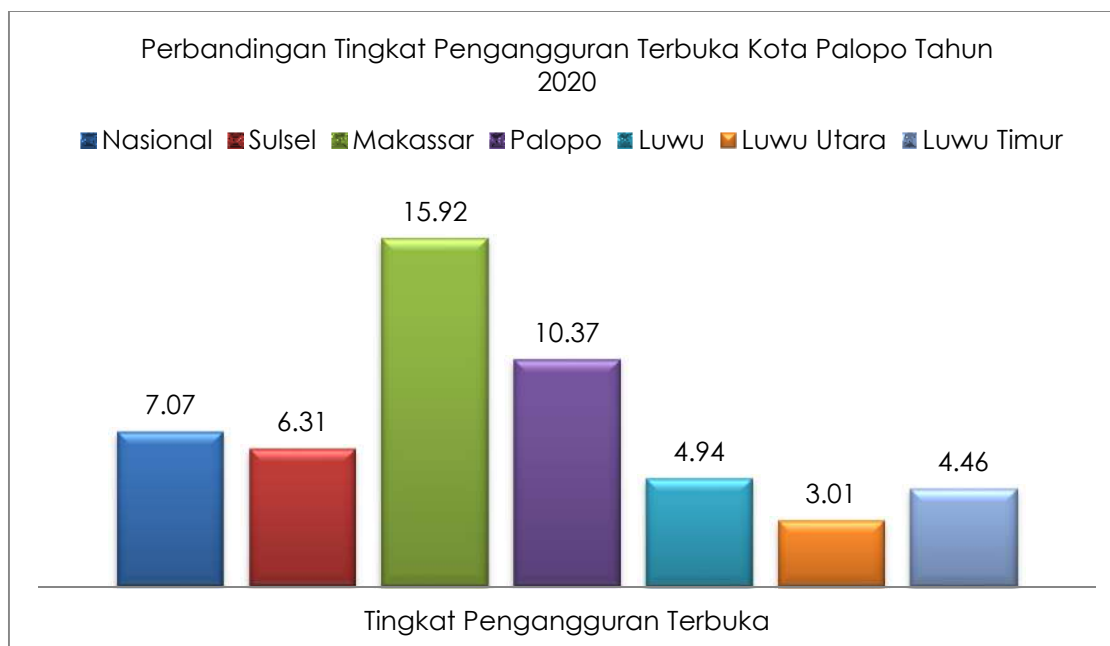
Meski demikian, kondisi 2020, memang masih berada dibawah target Kota Palopo 2020 yang berada pada angka 9.51%. Kemudian bila dibandingkan target akhir RPJMD 2023, kondisi 2020 baru memenuhi 80.71% target pengangguran terbuka pada tahun 2023 nanti.

Bila dibandingkan dengan kabupaten/kota Lain di Sulawesi Selatan, tingkat pengangguran terbuka Kota

Palopo ini masih lebih baik dari Kota Makassar yang berada pada angka 15.92% (Agustus 2020). Tapi belum lebih baik dibandingkan tingkat pengangguran terbuka beberapa kabupaten yang berbatasan wilayah secara langsung dengan Kota Palopo, yakni Kabupaten Luwu (4.94%),

Kabupaten Luwu Utara (3.01%) dan Kabupaten Luwu Timur (4.46%), Kota Pare-Pare (7.14%), bahkan belum lebih baik daripada -rata Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional 2020 (7.07%) Rata-Rata Sulsel (6.31%).

Grafik perbandingan tingkat pengangguran terbuka Kota Palopo 2020 dibandingkan dengan daerah lain di Luwu Raya.



Meningkatnya tingkat pengangguran terbuka di Kota Palopo tahun 2020 disebabkan beberapa kondisi sebagai berikut :

- Jumlah angkatan kerja pada s.d Agustus 2020 sebanyak 85.026 orang, bertambah sekitar 609 orang jika dibandingkan Agustus 2019. Sebaliknya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurun 0,71 persen menjadi 61,23 persen.
- Dalam setahun terakhir, pengangguran meningkat sebanyak 655 orang, sejalan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang meningkat 0,70 persen menjadi 10,37 persen pada Agustus 2020.
- Dilihat dari tingkat pendidikan, TPT untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) paling tinggi diantara tingkat pendidikan lain, yaitu sebesar 19,61 persen.
- Penduduk yang bekerja s.d Agustus 2020 sekitar 76.211 orang, berkurang 0.06 persen dari Agustus 2019.
- Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase penduduk yang bekerja terjadi pada sektor pertanian (3,92 persen).
- Sebaliknya, lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan persentase terjadi pada sektor jasa (3,10 persen) dan sektor manufaktur (0,82 persen).
- Penduduk Bekerja di kegiatan formal pada Agustus 2020 sebanyak 44.2 ribu orang (58,01 persen). Sebaliknya terdapat sekitar 32,0 ribu orang (41.99 persen) penduduk bekerja di kegiatan informal.
- Selama setahun terakhir persentase penduduk bekerja di kegiatan formal mengalami penurunan 9.87 persen.
- Dampak Pandemi COVID19 terhadap ketenagakerjaan Kota Palopo Agustus 2020, terdiri dari pengangguran karena Covid-19 (1.994 orang), Bukan Angkatan Kerja karena Covid-19 (586 orang), sementara tidak bekerja karena Covid-19 (962 orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 (11.192 orang).

Berikut adalah gambaran kondisi ketenagakerjaan Kota Palopo sampai dengan tahun 2020 :

Tabel 3.6
Perbandingan
Kondisi tenaga Kerja 2019 dan 2020 Kota Palopo

Uraian	2019 (Ribuan Orang)	2020 (Ribuan Orang)	Perubahan
Penduduk Usia Kerja	136.3	138.9	2.6
Angkatan Kerja	84.4	85	0.6
Bekerja	76.3	76.2	-0.1
Pengangguran	8.1	8.8	0.7
Bukan Angkatan Kerja	51.9	53.8	1.9
Tingkat Pengangguran Terbuka	9.67	10.37	0.7
Laki-laki	10.81	11.22	0.41
Perempuan	7.95	9.07	1.12
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	61.94	61.23	-0.71
Laki-laki	76.81	76.23	-0.58
Perempuan	48.01	47.14	-0.87

3.1.5. Gini Ratio

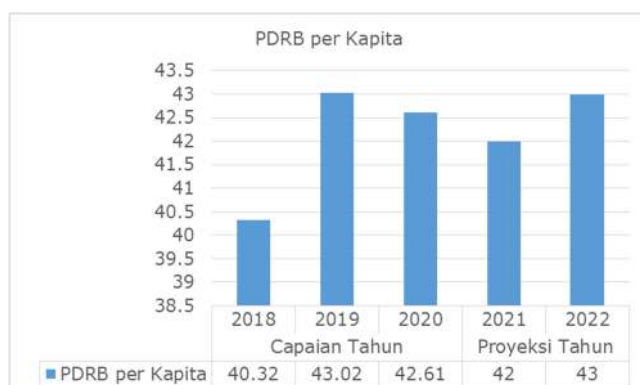


Angka gini rasio Kota Palopo pada tahun 2020 berada pada posisi 0.354, sedikit meningkat dibandingkan 2019 dan 2018 (0.338). Ketimpangan pendapatan masyarakat Kota Palopo tahun 2020 tersebut sedikit lebih baik dibandingkan nasional yang berada pada 0.385 poin (September 2020) dan gini rasio Sulsel 0.382 poin. Perubahan gini rasio Kota Palopo pada tahun 2019 ke 2020 sebesar 0.016 poin, kondisi ini lebih

Tabel 3.7
Perbandingan dan Perubahan Gini Rasio

No	Wilayah	Tahun		Perubahan
		2019	2020	
1	Kota Makassar	0.390	-	-
2	Kota Pare-Pare	0.350	-	-
3	Kota Palopo	0.338	0.354	0.016 (+)
4	Sulawesi Selatan	0.391	0.389	0.003 (-)
5	Nasional	0.380	0.381	0.005 (+)

3.1.6. PDRB per Kapita



Angka PDRB per Kapita Kota Palopo Tahun 2020 berada pada posisi 42.61 Juta/Kapita/Tahun. Posisi ini jauh melebihi atau melampaui target kinerja yang diperjanjikan tahun 2020 yang berada pada angka 37.3 Juta/Kapita/Tahun. Bahkan angkanya juga sudah melampaui target akhir PDRB per Kapita Kota Palopo pada periode akhir RPJMD 2023 yang berada pada angka 37.8 Juta/Kapita/Tahun. Sehingga realisasi

kinerja terhadap target yang ditetapkan pada IKU ini pada tahun 2020 adalah 114.24%.

Tetapi jika dilihat dari perspektif angka capaian, PDRB per Kapita Kota Palopo 2020, belum lebih baik dari capaian tahun 2019. Bahkan nilai atau angkanya turun atau lebih rendah 5.31 Juta dibandingkan tahun 2019 yang berada pada angka 43.02. Berikut adalah gambaran capaian PDRB per Kapita Kota Palopo 2018-2020 :

Grafik diatas memperlihatkan bahwa PDRB per Kapita Kota Palopo Tahun 2020 lebih rendah atau menurun sebesar 1.01 Juta dibandingkan 2019. Ini menunjukkan bahwa tingkat produksi dan produktifitas Kota Palopo pada tahun 2020, belum lebih baik dari kondisi 2019.

Kondisi tahun 2020 juga menunjukkan, PDRB per Kapita Kota Palopo masih belum sekompetitif indikator yang sama pada level nasional, karena capaian Kota Palopo ini masih berada dibawah rata-rata PDRB per kapita nasional 2020 (56.9 Juta/Kapita/Tahun), berada dibawah Kota Pare-Pare (49.9 Juta Kapita/Tahun), bahkan juga tertinggal dengan PDRB per Kapita Kabupaten Luwu 2020 (43.85 Juta/Kapita/Tahun). Untuk melihat posisi dan seberapa kompetitif pencapaian PDRB per Kapita 2020 Kota Palopo, berikut adalah perbandingan PDRB per Kapita beberapa daerah di Sulsel Tahun 2020 :

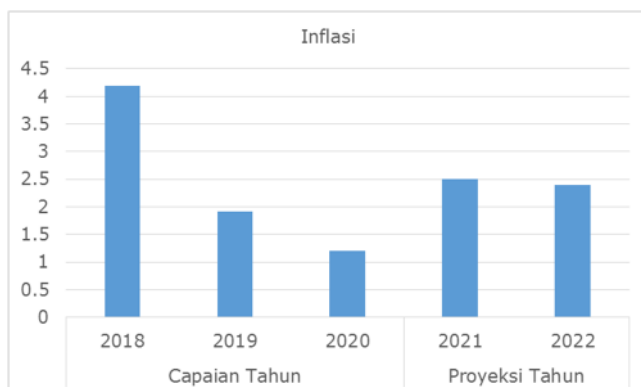
Wilayah	Capaian PDRB per Kapita 2019 (Juta/Rupiah)	Capaian PDRB per Kapita 2020 (Juta/Rupiah)
Kota Palopo	43.02	42.01
Kota Pare-Pare	49.80	49.9
Kota Makassar	116.87	125.25
Kabupaten Luwu	43.25	43.85
Kabupaten Luwu Utara	41.70	40.99
Kabupaten Luwu Timur	70.07	70.49
Sulawesi Selatan	56.98	56.51
Nasional	59.1	56.9

Tabel diatas menunjukkan bahwa penurunan PDRB per Kapita masyarakat Kota Palopo 2019-2020 sebesar 1.01 Juta/Kapita, masih lebih baik dibandingkan dengan penurunan nilai PDRB per Kapita tingkat nasional yang turun sebesar 2.2 Juta, tapi belum lebih baik dibanding dengan penurunanan PDRB per Kapita Sulawesi Selatan yang hanya turun sebesar 0.47 Juta/Kapita atau Kabupaten Luwu Utara yang hanya menurun 0.71 Juta/Kapita,.

Berbeda kondisinya dengan kinerja PDRB per Kapita di di Kota Pare-Pare yang nilai PDRB per kapitanya justru meningkat sebesar 0.1 Juta/Kapita dan Kota Makassar meningkat sebesar 8.38 Juta/Kapita serta Kabupaten Luwu Timur yang juga naik 0.42 Juta.

Secara umum, kinerja upaya peningkatan PDRB per Kapita Tahun 2020 di Kota Palopo, sangat jauh tertinggal dengan kota lain di Sulsel bahkan beberapa kabupaten lain yang berbatasan, yang mampu merealisasikan peningkatan PDRB per Kapita masyarakatnya sepanjang tahun 2019-2020.

3.1.7. Inflasi



Salah satu cara untuk mengetahui stabilitas perekonomian suatu daerah dengan melihat tingkat perkembangan indeks harga konsumen (laju inflasi) di daerah tersebut. Laju Inflasi Kota Palopo Tahun 2020 berada pada angka 1.21% sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2019 yang berada pada angka 1.91% atau 2018 yang pada posisi 4.19% Inflasi bulanan sepanjang tahun 2020

menunjukkan fluktuasi harga yang cukup signifikan terutama pada beberapa bulan tertentu.

Pada tahun 2020 tercatat puncak inflasi terjadi pada bulan Mei yakni 0,49 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 104,18, sedangkan deflasi terdalam terjadi pada bulan September dengan deflasi sebesar 0,17 persen serta Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 104,22. Inflasi tertinggi pada tahun 2020 dialami oleh Kabupaten Bulukumba sebesar 2,30. Kota Palopo juga mengalami inflasi sebesar 2,04 dengan IHK 104,49.

Tabel perbandingan nilai inflasi di beberapa wilayah di Sulawesi Selatan tahun 2018-2020 :

Tabel 3.8.

Perbandingan nilai inflasi di beberapa wilayah di Sulawesi Selatan tahun 2018-2020

No	Wilayah	Tahun		
		2018	2019	2020
1	Bulukumba	3.85	2.25	2.30
2	Bone	4.69	1.64	1.89
3	Kota Makassar	3.48	2.43	2.13
4	Kota Pare-Pare	1.96	2.45	1.61
5	Kota Palopo	4.19	1.91	1.21
6	Sulawesi Selatan	3.50	2.35	2.04

3.2 Sasaran dan Arah Kebijakan Perekonomian

3.2.1 Sasaran dan Arah Kebijakan Ekonomi Nasional Tahun 2022

Upaya diversifikasi ekonomi dalam rangka pemulihan ekonomi dilakukan dengan cara peningkatan nilai tambah melalui peningkatan kontribusi industri pengolahan dan pengembangan produk pertanian. Peningkatan produksi pangan dilakukan melalui pembangunan *food estate*. Pemulihan dan peningkatan daya saing ekonomi dilakukan dengan menerapkan konsep pembangunan rendah karbon (*green recovery*). Di samping itu, dilakukan transformasi menuju ekonomi digital melalui langkah-langkah perluasan, pemerataan, dan peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan digital.

Arah kebijakan Ekonomi makro secara nasional ditujukan terutama untuk mendukung prioritas pembangunan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dengan fokus belanja untuk peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur, pangan (pertanian dan perikanan), pariwisata, jaring pengaman sosial, dunia usaha, dan UMKM.

Kebijakan tersebut dilakukan secara komprehensif dengan reformasi di bidang belanja melalui kebijakan antara lain pertama, efisiensi belanja melalui penajaman biaya operasional sejalan dengan perubahan proses kerja. Kedua, optimalisasi teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberian pelayanan (*service delivery*).

Ketiga, redesain sistem penganggaran yang menggunakan pendekatan belanja yang lebih baik (*spending better*) yang fokus pada pelaksanaan program prioritas berbasis pada hasil (*result based*) dan efisiensi kebutuhan dasar, serta antisipatif terhadap berbagai tekanan (*automatic stabilizer*). Arah kebijakan ekonomi makro secara nasional menderivasi arah kebijakan perekonomian daerah.

Interaksi arah kebijakan ini merupakan faktor penting guna menjamin efektifitas pendanaan dalam pencapaian sasaran perekonomian daerah dan sasaran pembangunan nasional melalui pendekatan secara holistik ini akan lebih terfokus pada penyelesaian permasalahan-permasalahan perekonomian regional dan nasional, sehingga dampak yang dihasilkan dan manfaat yang diperoleh dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Untuk mewujudkan tema tersebut maka sasaran pembangunan nasional tahun 2022 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro perekonomian nasional yang terdampak pandemi Covid-19, yaitu sebagai berikut :

Berdasarkan hasil analisis pada berbagai prospek dan tantangan ekonomi daerah, dan sejalan dengan arah kebijakan ekonomi makro RKP 2022, maka strategi yang akan ditempuh oleh pemerintah Kota Palopo Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Peningkatan nilai tambah produk barang maupun jasa melalui peningkatan kontribusi industri pengolahan dan pengembangan produk pertanian.
2. Peningkatan nilai tambah produksi pangan dilakukan melalui sinkronisasi pembangunan Kota Palopo dengan konsep *food estate*.
3. Pemulihan dan peningkatan daya saing ekonomi dilakukan dengan menerapkan konsep pembangunan rendah karbon (*green recovery*).
4. Implementasi transformasi menuju ekonomi digital melalui langkah-langkah perluasan, pemerataan, dan peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan digital.

3.2.2 Sasaran dan Arah Kebijakan Ekonomi Kota Palopo Tahun 2022

Sasaran Pembangunan Ekonomi Kota Palopo secara makro diuraikan sebagai berikut :

1. Memulihkan kembali pertumbuhan ekonomi daerah agar mampu lebih inklusif, dengan memastikan upaya upaya untuk mengendalikan gini rasio di Kota Palopo tidak semakin meningkat
2. Menekan dan menjaga kestabilan tingkat inflasi dan meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat sehingga daya beli tetap terjaga, disamping menjaga ketersediaan dan keterjangkauan logistic daerah terutama pangan tetap berjalan normal.
3. Memantapkan upaya perlindungan, pemberdayaan, penguatan dan pendampingan masyarakat miskin dan kelompok minoritas lain melalui sinergi dan berbagai program penanganan yang lebih terfokus
4. Menekan jumlah dan persentase penangguran terbuka dengan meningkatkan skil dan kompetensi tenaga kerja, kualitas dan daya saing investasi daerah dan peningkatan akses dan kualitas tenaga kerja.

Berikut adalah komparasi target kinerja indicator makro ekonomi Kota Palopo, Sulsel dan Nasional Tahun 2022 :

Tabel 3.9
Komparasi Target Indikator Makro Ekonomi
Kota Palopo, Sulsel, Nasional 2022

Indikator Kinerja Makro	Target Kinerja 2022		
	Kota Palopo (RKPD)	RKPD Sulsel	Nasional (RKP)
Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	78.82	72.57	73.44-73.48
Persentase Penduduk Miskin (%)	6.28	8.10	8.5-9.0
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	8.55	5.9	6.24-5.52
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4.68	4.62-5.98	5.4-6.0
PDRB per Kapita (Juta/Kapita/Thn) (ADHB)	43	62.37	56.9
Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio/Poin)	0.333	0.381	0.376-0378
Inflasi	2.4	3,0-1,0	2.8

Sumber : RKPD Sulsel 2022 dan RKP 2022

3.2.3. Arah Kebijakan Ekonomi Kota Palopo Tahun 2022

Tahun 2022 akan menjadi tahun kunci bagi pemulihan ekonomi dan akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk mencapai sasaran pembangunan. Pemulihan ekonomi diarahkan untuk memulihkan daya beli masyarakat dan dunia usaha untuk meningkatkan permintaan. Upaya pemulihan juga dilakukan melalui diversifikasi ekonomi untuk mengakselerasi pertumbuhan sektor-sektor yang terkena dampak besar dari Covid-19 dan mendorong sektor lain yang berpotensi tumbuh lebih cepat yang seluruhnya diintegrasikan dengan perbaikan pada system dan layanan kesehatan dalam menangani pandemic covid 19.

Terdapat **tiga arah kebijakan untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi** yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 oleh Pemerintah Kota Palopo. Arah kebijakan pertama dan kedua merupakan bagian dari prioritas pembangunan pertama, sementara arah kebijakan ketiga merupakan bagian dari prioritas kelima, sebagai berikut :

1. Pemantapan Layanan Sistem Kesehatan Daerah

Penekanan arah kebijakan pada aspek ini adalah :

- Mengoptimalkan Upaya untuk menghentikan dan menangani Penyebaran Covid 19
- Memantapkan Pelaksanaan serta Edukasi Masyarakat tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, Mulai dari Individu, Keluarga dan Lingkungan.
- Memastikan bahwa protocol kesehatan tetap dijalankan dan terus dioptimalisasi pada area layanan public, sekolah/civitas akademik, dan lembaga pemerintah dan dunia usaha lainnya.
- Memantapkan Pelaksanaan Pencegahan Dini Penyakit Menular
- Memantapkan Ketersediaan dan Kualitas Sarana Prasarana Kesehatan Terutama yang Terkait dengan Pandemi Covid 19
- Memantapkan Cakupan Layanan Iuran Kepesertaan BPJS Daerah
- Mengoptimalkan peran dan sinergi penanganan dengan Kelurahan Tangguh Bencana

2. Pemantapan Pelaksanaan Social Safety Net (Jaringan Pengamanan Sosial)

Penekanan arah kebijakan pada aspek ini memulihkan daya beli masyarakat yang akan diimplementasikan pada upaya adalah :

- Mengoptimalkan dan Menjaga Efektifitas serta Sinergi Cakupan Layanan Program Program Jaring Pengaman Sosial ke Masyarakat baik yang berasal dari Pemerintah Pusat, provinsi maupun pemangku kepentingan lainnya.
- Memastikan bahwa bantuan social yang bersumber dari APBD daerah dilaksanakan tepat sasaran dan mempertimbangkan Basis Data Terpadu, atas bantuan social yang dilaksanakan Perangkat Daerah ke Masyarakat
- Memastikan bahwa harga pangan dan ketersediaannya relative mampu diakses dan dijangkau masyarakat melalui optimalisasi pengelolaan empat rumah pangan yang ada di Kota Palopo.
- Memastikan barang bersubsidi tetap tersedia dengan harga sesuai HET Pemerintah.

3. Pemantapan Pemulihan Ekonomi dan Produktifitas Daerah

Penekanan arah kebijakan adalah memulihkan dunia usaha dan investasi daerah yang implementasinya pada aspek :

- Menjaga dan mengoptimalkan produksi dan produktifitas daerah, dan menjaga ketahanan pangan daerah
- Mengoptimalkan bantuan-bantuan usaha kepada kelompok usaha masyarakat
- Memastikan bahwa seluruh aktifitas lapangan usaha kembali berjalan sesuai scenario *new normal* dengan protocol kesehatan
- Memperluas cakupan pelatihan tenaga kerja berbasis life skill dan fasilitasi akses pada lapangan berusaha
- Memastikan proyek proyek infrastruktur padat karya yang bersumber dari dana kelurahan mengakomodir tenaga kerja local masyarakat.
- Memastikan infrastruktur yang menunjang perekonomian mampu diakses dan dimanfaatkan masyarakat secara optimal

- Memastikan pelaksanaan program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat, dijalankan perangkat daerah secara integrative dan bersinergi antara program pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah Kota Palopo.
- Mengoptimalkan peran dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam mengakselerasi ekonomi masyarakat dan ekonomi daerah

3.2.4 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

3.2.4.1 Pendapatan Daerah

Berikut ini adalah gambaran mengenai realisasi dan target pendapatan Pemerintah Kota Palopo :

Tabel 3.10
Realisasi dan Proyeksi Target Pendapatan Kota Palopo
Tahun 2020-2023

Uraian (sesuai PP58/2005)	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020 (*)	Uraian (Sesuai PP 12/2019)	Anggaran 2021 (Pokok)	Realisasi 2021 (Tri I)	Proyeksi	
						2022	2023
PENDAPATAN	984.500.257.290,51	969.407.489.043,27	PENDAPATAN	982.408.360.730	205.334.715.174,24	1,046,921,373,130	1,110,869,201,990
Pendapatan Asli daerah	165.664.354.780,08	177.203.606.906,65	Pendapatan Asli daerah	167.917.529.330	10.422.924.948,24	196,585,372,483	221,435,217,995
Pajak Daerah	34.860.944.165,02	34.031.809.461,00	Pajak Daerah	39.277.700.000	7.110.924.948,00	43,205,470,000	47,526,017,000
Retribusi Daerah	9.074.168.785,55	8.880.154.097,48	Retribusi Daerah	10.760.902.200	2.126.891.535,24	12,913,082,640	15,495,699,168
Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan	7.496.932.396,00	6.801.973.147,00	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan	7.000.000.000	0,00	7,500,000,000	7,750,000,000
Lain-Lain PAD yang sah	114.232.309.433,51	127.489.670.201,17	Lain-Lain PAD yang sah	110.878.927.130	1.185.326.136,00	132,966,819,843	150,663,501,827
Dana Perimbangan	726.842.067.622,00	665.583.965.763,00	Dana Transfer	793.700.031.400	187.484.245.837,00	740,165,164,027	774,794,145,544
Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	13.109.805.665,00	18.379.394.493,00	Dana Perimbangan	708,075,282,734	187.484.245.837,00	740,165,164,027	774,794,145,544
Dana Alokasi Umum	537.722.702.000,00	497.008.966.000,00					
Dana Alokasi Khusus	176.009.559.957,00	150.195.605.270,00	a. Transfer Umum			532,812,636,925	546,541,996,466
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	91.993.834.888,43	126.619.916.373,62	<i>Dana Bagi Hasil Pajak/bagi Hasil Bukan Pajak</i>	<i>15,582,614,000</i>		<i>16,361,744,700</i>	<i>17,179,831,935</i>
Pendapatan Hibah	20.449.560.150,00	65.516.179.506,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>	<i>503,854,529,000</i>		<i>516,450,892,225</i>	<i>529,362,164,531</i>
Dana bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	50.159.951.545,43	46.443.640.112,62	b. Transfer khusus			207,352,527,102	228,252,149,078
Dana Penyesuaian	13.007.644.000,00	6.983.797.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus Fisik</i>	<i>188,638,139,734</i>		<i>207,352,527,102</i>	<i>228,252,149,078</i>

Uraian (sesuai PP58/2005)	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020 (*)	Uraian (Sesuai PP 12/2019)	Anggaran 2021 (Pokok)	Realisasi 2021 (Tri I)	Proyeksi	
						2022	2023
Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	8.141.883.200,00	7.664.639.200,00	<i>Dana Insentif Daerah</i>			0	0
Pendapatan Lain-Lain	234.795.993,00	11.660.555,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	20.790.800.000	7.427.544.389,00	110,170,836,620.00	114,639,838,451.00
			<i>Hibah</i>		7.427.544.389,00	20,790,800,000	20,790,800,000
			<i>Dana darurat</i>			0	0
			<i>Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah Lainnya**)</i>			58,944,193,770	61,891,403,459
			<i>Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus***)</i>			30,435,842,850	31,957,634,993

Catatan : * Unaudited

Sumber : LKPJ Kota Palopo Tahun 2018 & Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Palopo 2018-2021

Realisasi Pendapatan Daerah Kota Palopo Tahun 2020 seperti terlihat pada Tabel di atas sebesar Rp.969.407.489.043,27 atau 99,98% dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp.969.562.250.067,00. Adapun uraiannya sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah.

Realisasi PAD yang dapat dicapai selama Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp.177.203.606.906,65 atau 102,20% dari yang ditargetkan Rp.173.393.617.952,00. Realisasi ini terdiri dari :

- 1) Realisasi pendapatan yang bersumber dari Pajak Daerah sebesar Rp.34.031.809.461,00 atau 103,04. dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp.33.028.000.000.
- 2) Realisasi pendapatan yang bersumber dari Retribusi Daerah, sebesar Rp.8.880.154.097,48 atau 99,96%. Realisasi retribusi yang tidak mencapaitarget yang telah ditetapkan diakibatkan oleh adanya beberapa sumber penerimaan yang mengalami kendala dalam pelaksanaan pemungutannya.
- 3) Realisasi pendapatan yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mencapai target 100% yakni sebesar Rp.6.801.973.147,00.yang bersumber dari pendapatan dividen atas penyertaan modal ke PT. Bank Sulselbar.
- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah, terealisasi sebesarRp.127.489.670.201,17atau sebesar 102,25% dari target. Adapun rincian sumber dana tersebutdiperoleh darihasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan, Kelebihan realisasi Jasa Giro pemegang kas, penerimaan bunga deposito, Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran Gaji dan Tunjangan, pengembalian tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan pembayaran denda atas keterlambatan pekerjaan dari pihak ketiga, Pendapatan BLUD RSUD Sawerigading, Pendapatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Penerimaan pihak ketiga.

b. Dana Perimbangan

Realisasi Pendapatan Daerah dari Dana Perimbangan pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.665.583.965.763,00 atau 99,38% dari target sebesar Rp.669.756.718.109,00. Realisasi ini bersumber dari:

- 1) Realisasi penerimaan yang bersumber dari Dana bagi hasil pajak dan bukan pajak mencapai Rp.18.379.394.493,00 atau terealisasi 112,55% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.16.073.016.000,00.
- 2) Realisasi penerimaan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) mencapai Rp.497.008.966.000,00 atau terealisasi 99,63% dari target yang ditetapkan sebesar Rp498.865.870.000,00.
- 3) Realisasi penerimaan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) mencapai Rp.150.195.605.270,00 atau terealisasi 97,01% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.154.817.832.109,00.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Realisasi penerimaan daerah yang bersumber dari lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah mencapai Rp.126.619.916.373,62atau 100,16% dari target sebesar Rp.126.411.914.006,00 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Realisasi penerimaan yang bersumber dari dana Hibah Pemerintah sebesar Rp.65.516.179.506,00 atau terealisasi 98,56% dari target yang ditetapkan. Penerimaan hibah ini berasal dari hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)yang diperuntukkan membiayai Operasional Sekolah dan hibah dari Kementerian Kesehatan untuk RSUD Sawerigading yang diperuntukkan untuk pengadaan alat Kesehatan.
- 2) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi terealisasi sebesar Rp.46.443.640.112,62 atau 99,41% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.46.715.623.393,00.
- 3) Realisasi penerimaan dari Dana Insentif Daerah sebesar Rp6.983.797.000,00 atau 100% dari taret yang ditetapkan.
- 4) Realisasi penerimaan dari Bantuan Keuangan dari Provinsi mencapai Rp.7.664.639.200,00 atau 122,79% dari target sebesar Rp.6.241.883.200,00.
- 5) Realisasi Pendapatan Lain-Lain sebesar Rp.11.660.555,00.

Permasalahan Pengelolaan Pendapatan

Tahun 2020 merupakan tahun yang sulit dalam pengelolaan pendapatan daerah. Adanya pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia dan terkhusus di Kota Palopo mengakibatkan lumpuhnya aktivitas perekonomian. Pengelolaan keuangan daerah diprioritaskan pada pengendalian wabah COVID-19 yang di tandai dengan perubahan peraturan pengelolaan keuangan untuk mengantisipasi penyebaran wabah COVID-19 tersebut.

Berdasarkan realisasi pendapatan Tahun 2020, Porsi Pendapatan Dana Perimbangan sebesar 68,65% terhadap total Pendapatan. Hal ini menunjukkan Kinerja Pendapatan sangat dipengaruhi oleh realisasi Dana Perimbangan. Adanya Perubahan peraturan Pengelolaan Pendapatan seperti *refocusing* anggaran berdampak pada penyesuaian dan/atau perubahan kembali terhadap kebijakan dan regulasi penunjang sehingga pengelolaan pendapatan di Kota Palopo dapat memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas sesuai ketentuan yang berlaku.

Pada tahun 2020 realisasi pendapatan daerah Kota Palopo sebesar Rp969.407.489.043,27 atau sebesar 99,98%.Capaian realisasi tersebut menurun jika dibandingkan realisasi pendapatan daerah tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena beberapa target pendapatan mengalami koreksi penurunan target anggaran akibat munculnya pandemi COVID-19. Pembatasan aktivitas masyarakat menyebabkan transaksi ekonomi tidak berjalan optimal.

Langkah Penanganan

Dalam upaya untuk meningkatkan realisasi Pendapatan Daerah tahun berikutnya, maka ada beberapa kebijakan yang akan diterapkan. Dari sisi Perpajakan Daerah, kebijakan tersebut antara lain: (a) melakukan penataan kebijakan perpajakan daerah; (b) melakukan penyuluhan peningkatan pelayanan dan sosialisasi perpajakan; (c) melakukan pembinaan internal aparatur dalam pelaksanaan perpajakan daerah; (d) melakukan penegakan hukum; serta (e) mensinergikan unsur-unsur terkait dalam penggalian potensi perpajakan untuk memberikan dukungan data/informasi kepada Satuan Kerja Pengelola Pendapatan Daerah.

Di bidang Retribusi Daerah dan PAD lain-lain yang sah, kebijakan yang dilakukan adalah melalui : (1) peninjauan atas jenis dan tarif penerimaan Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu; (2) peningkatan pengawasan dan penggalian potensi penerimaan Retribusi Jasa Umum; (3) Pembinaan, Sosialisasi dan Penyebarluasan terkait Ketentuan tentang Peraturan Perundang-undangan Bidang Pendapatan Daerah kepada Masyarakat; (4) peningkatan kinerja dan perbaikan administrasi dan pelayanan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah pada Satuan Kerja Pengelola Pendapatan Daerah serta penyelesaian Aset yang bersengketa; dan (5) Peningkatan Koordinasi dalam pengelolaan Pendapatan yang melibatkan Pihak Ketiga seperti BPJS dan lain-lain.

Sementara itu, untuk mencapai target Pendapatan di Bidang Lain-Lain Pendapatan Yang Sah, Pemerintah Kota Palopo melaksanakan kebijakan dan upaya optimalisasi antara lain melalui: (a) Sinkronisasi data kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian terkait guna pencapaian penerimaan Dana perimbangan dan dana Penyesuaian; (b) Koordinasi dan konsultasi intensif kepada Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan terkait Penerimaan Bagi Hasil Pajak Propinsi, dan bantuan keuangan; (c) perbaikan administrasi dan sistim pelaporan pada Satuan Kerja Pengelola Pendapatan Daerah.

Arah Kebijakan Pendapatan Daerah 2022

Secara umum, arah kebijakan pendapatan daerah tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Penyesuaian rencana penerimaan dari dana perimbangan dan sumber-sumber penerimaan dari sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan mengacu pada realisasi tahun 2020 dimana terdapat perubahan akibat pandemi COVID-19.
2. Optimalisasi kembali PAD sebagai upaya membangun kemandirian daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi yang pada tahun sebelumnya tidak berjalan optimal akibat COVID-19.
3. Rasionalisasi dalam penetapan target pendapatan daerah berdasarkan potensi dan mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan serta melakukan evaluasi terhadap realisasi penerimaan pendapatan tahun sebelumnya;
4. Optimalisasi peran dan kontribusi BUMD melalui PAD dan;
5. Mengoptimalkan dan mendayagunakan kekayaan dan aset daerah.

Dengan arah kebijakan Pendapatan diatas diharapkan dapat mendorong peningkatan Pendapatan Daerah Kota Palopo sehingga dapat mendukung program-program prioritas pemerintah daerah dalam mensejahterahkan masyarakat Kota Palopo. Pada tahun 2021 untuk membiayai pembangunan infrastruktur maka Pemerintah Kota Palopo akan melakukan pelepasan hak atas kepemilikan asset Ruko Sawerigading. Hasil penjualan asset ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan Asli Daerah untuk membiaya belanja daerah tahun 2021.

Memperhatikan kebijakan pemerintah pusat serta trend pertumbuhan pendapatan daerah maka pendapatan daerah pada Tahun 2022 diproyeksikan akan naik menjadi Rp. 1.036.922 juta.

Proyeksi Pendapatan Daerah pada Tahun 2022 dengan memperhatikan:

1. Kondisi pandemi COVID-19.
2. Realisasi pendapatan Tahun 2020 dan Target Pendapatan Tahun 2021.
3. Target pertumbuhan PAD.
4. Dana perimbangan diestimasikan naik 5% dan DAK diestimasikan tetap.
5. Begitupun dengan Lain-Lain Pendapatan yang sah di estimasikan tetap kecuali DBH pajak provinsi yang memiliki trend meningkat setiap tahunnya, sehingga DBH pajak provinsi diestimasikan naik sebesar 5% dari realisasi 2019.

Ketergantungan Pemerintah Kota Palopo terhadap Dana Perimbangan masih sangat besar seperti daerah lainnya. Fluktuasi Pendapatan dari dana perimbangan akan sangat mempengaruhi keuangan pemerintah kota palopo namun keadaan tersebut berada di luar kendali pemerintah daerah karena alokasi dana perimbangan ditentukan oleh pemerintah pusat dan Provinsi berdasarkan formula yang telah ditetapkan.

Dalam mengoptimalkan PAD Kota Palopo masih banyak Permasalahan yang dihadapi sampai saat ini, mulai dari lemahnya sanksi pelanggaran terhadap wajib pajak dan retribusi, pendapatan dari bagi hasil belum optimal, pemberdayaan aset daerah belum optimal, sistem Waskat dan Wasdal masih lemah, Perusda/BUMD belum maksimal sebagai penghasil PAD, serta masih kurangnya partisipasi Swasta/BUMN dalam pembangunan daerah.

Untuk pencapaian target dan solusi permasalahan diatas, maka Kebijakan Umum Pengelolaan Anggaran Pendapatan Daerah diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui:

- a. Peningkatan kualitas pengelolaan pendapatan daerah melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan yang dilaksanakan secara hati-hati dan bijaksana dengan memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat;
- b. Upaya penyederhanaan sistem dan prosedur pengelolaan administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD;
- c. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki, sehingga diharapkan mampu memberikan dukungan yang optimal dalam menunjang kebutuhan dana melalui upaya mencari potensi sumber pendapatan daerah secara optimal berdasarkan kewenangan dan potensi yang dimiliki dengan mengutamakan peningkatan pelayanan serta mempertimbangkan kemampuan masyarakat; dan
- d. Peningkatan koordinasi antar SKPD, Pemerintah Kota dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) dalam rangka peningkatan pendapatan daerah khususnya yang bersumber dari Pemerintah Pusat.

3.2.4.2. Belanja Daerah

Berikut ini adalah gambaran mengenai realisasi dan target belanja daerah Pemerintah Kota Palopo :

Tabel 3.11
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Palopo
Tahun 2020-2023

Uraian (PP58/2005)	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020*	Uraian (PP12/2019)	Anggaran 2021 (Pokok)	Realisasi tahun 2021 (Triwulan I)	Proyeksi (juta)	
						2022	2023
BELANJA	956.451.857.030,35	943.899.350.653,19	BELANJA	991.605.000.000	94.796.682.869,73	1,038,980,000,000	1,110,275,000,000
Belanja Tidak Langsung	414.171.474.004,90	416.772.501.588,44	Belanja Operasi	752.474.404.227	93.462.490.202,73	497,691,775,076	509,563,021,013
Belanja Pegawai	398.058.052.827,00	396.957.981.108,00	Belanja Pegawai	462.394.924.936	78.567.256.537	473,691,775,076	475,635,776,867
Belanja Bunga	2.175.102.608,90	2.053.411.769,44	Belanja Barang dan Jasa	275.094.504.299	14.073.443.750	284,837,480,855	282,830,902,009
Belanja Hibah	10.269.800.000,00	5.592.900.000,00	Belanja Bunga	2.357.876.050	821.789.915,73	2,000,000,000	2,000,000,000
Belanja Bantuan Sosial	2.912.700.000,00	2.469.500.000,00	Belanja Subsidi				
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/kabupaten/Kota dan Partai Politik	755.818.569,00	854.592.490,00	Belanja Hibah	10.713.892.490	0,00	16,000,000,000	25,927,244,146
Belanja Tidak Terduga	0,00	8.844.116.221,00	Belanja Bantuan Sosial	1.913.206.452	0,00	4,500,000,000.00	4,500,000,000.00
Belanja Langsung	542.280.383.025,45	527.126.849.064,75	Belanja Modal	229.631.500.039	1.334.192.667,00	256,450,744,069	317,881,076,978
Belanja Pegawai	56.328.312.279,00	64.657.156.562,00					
Belanja Barang Jasa	287.339.065.244,04	254.501.788.721,86	Belanja Tidak Terduga	4.500.000.000	0,00	4,500,000,000	4,500,000,000
Belanja Modal	198.613.005.502,41	207.967.903.780,89					

Ket. * Unaudited

Sumber : LKPJ Kota Palopo Tahun 2018 & Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Palopo 2018-2023

Menyangkut pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 ini, susunan belanja daerah terdiri atas Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, dengan rincian realisasi sebagai berikut :

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung yang terealisasi sebesar Rp.416.772.501.588,44 dari alokasi anggaran sebesar Rp. 435.873.745.049,00 atau 95,61 % dengan rincian sebagai berikut :

- 1) **Belanja Pegawai** yang direncanakan sebesar Rp.412.153.601.459,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.396.957.981.108,00 atau 96,31%.
- 2) **Belanja Bunga** yang dianggarkan sebesar Rp.3.626.200.100,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.2.053.411.769,44 atau 56,62%, realisasi ini untuk pembayaran bunga pinjaman pemerintah Kota Palopo pada Bank Dunia melalui penerusan pinjaman SLA nomor 1215 tanggal 17 April tahun 2008.
- 3) **Belanja Hibah** yang direncanakan sebesar Rp.7.622.100.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.5.592.900.000,00 atau 73,37%. Capaian realisasi ini digunakan untuk pelaksanaan hibah kepada beberapa kegiatan organisasi kemasyarakatan, dalam rangka penunjang pelaksanaan pembangunan.
- 4) **Belanja Bantuan Sosial** yang direncanakan sebesar Rp.2.680.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.2.469.500.000,00 atau 92,14%. Capaian realisasi ini digunakan untuk pelaksanaan bantuan sosial kepada masyarakat khususnya bagi masyarakat yang tidak mampu, Selain itu alokasi Bantuan Sosial sebagian besar bersumber dari Dana Alokasi Khusus yang digunakan untuk pelaksanaan program bantuan bedah rumah.
- 5) **Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik** yang direncanakan sebesar Rp.854.592.490,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.854.592.490,00 atau 100%. Bantuan Keuangan ini diberikan kepada sebelas partai yang memiliki perwakilan di DPRD Kota Palopo.
- 6) **Belanja Tidak Terduga** yang dialokasikan sebesar Rp.8.937.251.000,00 dan realisasi sebesar Rp.8.844.116.221,00. Belanja tidak terduga ini merupakan belanja yang diperuntukkan untuk penanganan pandemi COVID-19 di Kota Palopo.

b. Belanja Langsung

Belanja Langsung yang direncanakan sebesar Rp.658.366.371.297,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.527.126.849.064,75 atau 42,13% dengan rincian sebagai berikut:

- 1) **Belanja Pegawai** yang direncanakan sebesar Rp.65.841.767.300,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.64.657.156.562,00 atau 98,20%. Belanja Pegawai pada belanja langsung di peruntukan untuk honorarium pelaksana kegiatan lintas Organisasi Perangkat Daerah, Lembur, Pengelola Keuangan dan Pengelola Pengadaan barang dan Jasa.
- 2) **Belanja Barang dan Jasa** yang dialokasikan anggaran sebesar Rp.266.654.426.895,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.254.501.788.721,86 atau 95,44%.
- 3) **Belanja Modal** yang direncanakan sebesar Rp.325.870.177.102,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.207.967.903.780,89 atau 63,81%.

Permasalahan Pengelolaan Belanja Daerah 2020

Dalam Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020, permasalahan yang dihadapi secara umum meliputi :

- a) Pelaksanaan beberapa program dan kegiatan tertentu cenderung bertumpuk di akhir tahun sehingga mempengaruhi proses pembayaran dan laporan kegiatan tersebut. Hal ini dapat menyebabkan proses Pelaksanaan kegiatan telah selesai namun proses administrasi pembayaran menjadi lambat sehingga pembayaran kegiatan tersebut menyebrang tahun anggaran.
- b) Kemampuan Aparatur dalam mengabsorpsi dan mengadopsi berbagai regulasi dan ketentuan perundang-undangan yang baru tentang mekanisme dan tata cara pelaksanaan APBD relatif masih terbatas.

Langkah Penanganan

Dari identifikasi permasalahan yang timbul, maka alternatif solusi terhadap kondisi tersebut, diperlukan langkah-langkah taktis dan strategis sebagai berikut :

- 1) Mempersiapkan SDM yang handal sebagai Tenaga Pengelola Keuangan Daerah Kota Palopo, utamanya Tenaga Teknis dan Operasional Pengelola melalui Diklat dan Pendidikan Teknis Keuangan lainnya.
- 2) Segera melakukan perubahan dan peninjauan terhadap dokumen- dokumen perencanaan dan dokumen-dokumen perangkat aturan sebagai acuan kebijakan digunakan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palopo.
- 3) Memperbaiki dan menyempurnakan Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai Arah Perubahan Undang – Undang Paket Keuangan Negara serta Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 4) Memantapkan Koordinasi, kerjasama dan pengendalian dalam Pengelolaan Keuangan Daerah mulai dari Penyusunan Naskah APBD, Pembahasan APBD, Penetapan APBD serta Penatausahaan APBD antar Unit Kerja Pengelola APBD dengan Tim Penyusun APBD serta Tim Anggaran Pemerintah Kota Palopo dengan Tim Anggaran DPRD Kota Palopo.
- 5) Tetap mempedomani Strategi Pembangunan Kota Palopo dan Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 6) Pelaksanaan kegiatan yang terjadwal sesuai anggaran kas yang telah dibuat, sehingga pelaksanaan kegiatan tidak menumpuk diakhir tahun anggaran.

3.2.5. Arah Kebijakan Belanja Daerah 2022

Arah kebijakan belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dapat dilaksanakan Bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau pemerintah daerah dengan pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sekaitan dengan kondisi pendapatan sebagaimana diuraikan di atas dan dikaitkan dengan permasalahan /isu yang dihadapi maka ditetapkan arah kebijakan belanja daerah sebagai berikut :

- a. Belanja daerah yang bersifat wajib dan mengikat menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
- b. Belanja hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel dan transparan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- c. Belanja tidak terduga diperuntukkan untuk penanganan bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial.
- d. Belanja operasi setiap perangkat daerah diarahkan untuk mendukung operasional perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian sasaran program pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2018-2023.

Alokasi Belanja pada tahun 2022 diuraikan antara lain sebagai berikut :

1. Belanja pegawai yang pengalokasian dananya untuk gaji pegawai dengan asumsi bahwa sudah tidak ada lagi kenaikan gaji pegawai dan diganti dengan Gaji Tunjangan Hari Raya. Akres Gaji sebesar 2,5 persen untuk mengantisipasi kenaikan gaji pegawai yang disebabkan Kenaikan Gaji Berkala, kenaikan tunjangan maupun yang disebabkan karena adanya promosi jabatan, pemberian insentif pegawai termasuk gaji ke 13 yang diberikan setiap tahunnya, Iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan PNS, Upah pungut/insentif, Sertifikasi Guru, tambahan penghasilan guru non sertifikasi serta tambahan penghasilan lainnya bagi PNSD, uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
2. Belanja hibah yang diberikan kepada badan/lembaga/organisasi swasta dan/ atau kelompok masyarakat, sepanjang berpartisipasi dan mendukung penyelenggaraan pembangunan di Kota Palopo;
3. Belanja subsidi untuk bantuan biaya produksi/jasa kepada perusahaan/Lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat ;
4. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat atau membantu masyarakat yang mengalami Krisis Sosial;
5. Bantuan keuangan dianggarkan untuk pemberian bantuan kepada partai politik sebagaimana yang diatur dalam peraturan Menteri dalam negeri tentang Pedoman Tata Cara

- Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik; dan
6. Belanja tidak terduga, merupakan belanja untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan non alam dan/atau bantuan sosial serta kebutuhan mendesak lainnya.

Belanja Pemerintah Kota Palopo disusun dengan memperhitungkan sasaran yang ingin dicapai dalam rangka penyelenggaraan otonomi, disusun baik menurut klasifikasi belanja berdasarkan urusan wajib pelayanan dasar, wajib non pelayanan dasar dan urusan pilihan daerah dan klasifikasi menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara dan daerah.

3.2.5.1. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah seluruh penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, dan pada hakikatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

Tabel 3.12
Realisasi dan Proyeksi Target Pembiayaan Daerah
Kota Palopo Tahun 2021-2023

Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Anggaran 2021 (Pokok)	Proyeksi	
				2022	2023
Pembiayaan					
Penerimaan Pembiayaan	51.517.849.148,34	70.649.876.279,26	30.938.918.536	40,000,000,000	40,000,000,000
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.142.849.148,34	34.049.876.279,26	7.138.918.536	5.000,000,000	5.000,000,000
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	46.375.000.000,00	36.600.000.000,00	23.800.000.000	35.000	35.000
Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-
Pengeluaran Pembiayaan	45.516.373.129,24	49.341.373.129,24	26.741.375.000	37,941,373,130	37,941,373,130
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	7.941,000,000	7.941,000,000
Pembayaran Pokok Utang	45.516.373.129,24	49.341.373.129,24	26.741.375.000	30.000,000,000	30.000,000,000
Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
Silpa	34,049,876,279	46,885,021,540	-	10,000,000,000	2,652,828,860

3.2.6. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah 2022

Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah. Sedangkan Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman.

Kebijakan pembiayaan diarahkan pada pembiayaan daerah yang mengacu pada akurasi, efisiensi dan profitabilitas dengan strategi sebagai berikut:

1. Jika APBD surplus, maka perlu dilakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk penyertaan modal maupun sisa lebih perhitungan anggaran berjalan;
2. Jika APBD defisit, maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dan melakukan rasionalisasi belanja; atau
3. Jika sisa lebih perhitungan anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD, maka dilakukan dengan dana pinjaman.

Selama ini sebagian besar penerimaan pembiayaan daerah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya. Memperhatikan perkembangan kebijakan pembiayaan daerah, Trend Pembiayaan dan kebutuhan pembangunan daerah, maka kebijakan umum pembiayaan daerah tahun 2022 adalah:

1. Menciptakan pembiayaan daerah yang aman dan tidak mengganggu stabilitas maupun kesinambungan anggaran daerah dengan memanfaatkan SILPA dan rencana pinjaman daerah;
2. Menjadikan penyertaan modal pemerintah daerah dalam BUMD sebagai langkah perbaikan kinerja BUMD yang bersangkutan;
3. Menjadikan penyertaan modal (investasi) daerah sebagai upaya untuk meningkatkan PAD.

BAB. IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kota Palopo Tahun 2022, mengacu kepada permasalahan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palopo Tahun 2018-2023, hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2020, dan prioritas nasional dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022. Termasuk kebijakan pengembangan wilayah yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palopo dan arahan pengembangan wilayah dalam RKPD Sulawesi Selatan.

Hal ini kemudian menjadi acuan bagi OPD dalam menyusun rencana kerja untuk selanjutnya menyelektaskan dan menjabarkan tujuan dan sasaran pembangunan, isu strategis, strategi, dan arah kebijakan serta prioritas pembangunan. Dokumen RKPD Kota Palopo ini juga memuat kebijakan turunan dari prioritas pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022.

Beberapa aspek lain yang juga menjadi pertimbangan adalah proyeksi kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah, serta kondisi lingkungan strategis, sebagaimana dibahas dalam bab sebelumnya. Substansi prioritas pembangunan daerah dalam RKPD 2022 mendasarkan dan memperhatikan:

- 1) Arah kebijakan Pemerintah yang dijabarkan pada Rancangan RKP 2022.
- 2) Arah kebijakan RPJMD Kota Palopo Tahun 2018-2023 guna mencapai visi misi sebagaimana ditetapkan dalam arah kebijakan tahun 2022
- 3) Konsistensi antara kebijakan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kota Palopo sebagai upaya pencapaian target pembangunan nasional maupun provinsi.
- 4) Penyelesaian terhadap masalah yang bersifat urgen pada tahun 2020.

Prioritas dan sasaran pembangunan diarahkan untuk menjamin terwujudnya visi misi Pemerintah Kota Palopo sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2018-2023 dan mendukung terwujudnya prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam RKP 2022.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Palopo

Tahun 2022 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palopo Tahun 2018-2023, sehingga penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan serta program kebijakan prioritas Rencana Pembangunan Tahunan Provinsi Sulawesi Selatan.

Olehnya sesuai dengan RPJMD Kota Palopo tersebut, berikut adalah visi yang akan diwujudkan dan misi yang akan dilaksanakan Pemerintah Kota Palopo :

Visi

Sesuai Perda Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan RPJMD Kota Palopo Tahun 2018-2023, Visi Kota Palopo adalah

“ Terwujudnya Palopo sebagai Kota Maju, Inovatif dan Berkelanjutan Pada Tahun 2023 ”.

Pada Visi Kota Palopo Tahun 2018 – 2023 terdapat 3 (tiga) kalimat kunci yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Maju, Palopo yang maju bermakna bahwa kota ini bergerak kearah yang lebih positif, ditandai dengan ketersediaan sarana dan prasarana perkotaan yang lebih lengkap, lebih berkualitas, lebih berestetika dan bermanfaat bagi perekonomian dan kesejahteraan warga.

Inovatif, Palopo yang inovatif bermakna bahwa kota ini selalu member solusi terhadap persoalan warga melalui pengelolaan pemerintahan dan layanan public yang efisien, efektif dan berbasis riset, serta industri kreatif berkembang sebagai sektor utama penggerak ekonomi.

Berkelanjutan Palopo yang berkelanjutan bermakna bahwa pembangunan dilakukan secara harmoni sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, inklusif secara sosial dan memperlihatkan kelestarian budaya local

Palopo Maju, Inovatif dan Berkelanjutan bermakna bahwa Kota Palopo memiliki visi dalam pembangunan sarana dan prasarana perkotaan yang memberi dampak positif dalam perekonomian dan kesejahteraan rakyat, penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan pengembangan ekonomi kreatif, dengan tetap memperhatikan keseimbangan harmonis antara lingkungan hidup dan kondisi budaya.

Misi

Sesuai dengan Visi tersebut diatas dan sebagai upaya dalam mewujudkannya, maka ditetapkan Misi Pembangunan Kota Palopo Tahun 2018 – 2023, yaitu sebagai berikut :

1. Melaksanakan layanan pendidikan, kesehatan serta jaminan dan perlindungan sosial untuk kelompok rentan;
2. Mewujudkan lingkungan yang layak huni melalui pengembangan infrastruktur perkotaan, penataan pemukiman, sanitasi dan ruang terbuka hijau;
3. Memodernisasi layanan publik, meningkatkan kualitas aparatur dan tata kelola pemerintahan, serta mendorong partisipasi publik dalam pembangunan;
4. Mendorong kewirausahaan berbasis jasa dan niaga melalui peningkatan keterampilan hidup, permodalan dan pendampingan bisnis;
5. Mewujudkan iklim yang toleran terhadap pengembangan pariwisata & ekonomi kreatif yang bercirikan nilai budaya Luwu.

Tabel 4.1
Penjelasan Misi dan Keterkaitan dengan Visi

No	Misi	Penjelasan Misi	Pokok Visi
1	Melaksanakan layanan pendidikan, kesehatan serta jaminan dan perlindungan sosial untuk kelompok rentan	Misi ini bermakna bahwa pembangunan manusia dilaksanakan melalui intervensi sektor pendidikan, kesehatan, dan pelaksanaan perlindungan sosial masyarakat, utamanya bagi kelompok-kelompok rentan seperti warga miskin, penyandang disabilitas, perempuan, anak dan kelompok minoritas.	Maju
2	Mewujudkan lingkungan yang layak huni melalui pengembangan infrastruktur perkotaan, penataan pemukiman, sanitasi dan ruang terbuka hijau	Misi ini bermakna bahwa Palopo sebagai habitat manusia memberikan daya dukung dan daya tampung yang layak, ditinjau dari kapasitas infrastruktur kota, permukiman, air bersih, sanitasi dan kualitas lingkungan hidup.	Berkelanjutan dan Maju
3	Memodernisasi layanan public, meningkatkan kualitas aparatur dan tata kelola pemerintahan serta mendorong partisipasi public dalam pembangunan	Modernisasi layanan public bermakna bahwa pelaksanaan layanan public diubah menjadi lebih inovatif, professional, serta efektif dan efisien, melalui pemanfaatan teknologi, peningkatan kualitas aparatur, dan penyempurnaan tata kelola pemerintahan, serta pelibatan public dalam pembangunan.	Inovatif
4	Mendorong kewirausahaan berbasis jasa dan niaga melalui peningkatan keterampilan hidup, permodalan dan pendampingan bisnis	Kewirausahaan berbasis jasa dan niaga bermakna bahwa perekonomian dan penyediaan lapangan kerja didorong pada sector usaha jasa dan niaga, yang dicapai melalui upaya-upaya peningkatan kualitas angkatan kerja dan kapasitas bisnis masyarakat.	Maju
5	Mewujudkan iklim yang toleran terhadap pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif yang bercirikan nilai budaya Luwu	Iklim yang toleran terhadap pariwisata dan ekonomi kreatif bermakna bahwa sector pariwisata dan ekonomi kreatif berkembang melalui dukungan berbagai sumberdaya dan memiliki identitas budaya Luwu yang berdimensi religi (agama).	Maju dan Berkelanjutan

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Jumlah tujuan pembangunan Kota Palopo sebanyak 5 (lima) dan sasaran sebanyak 11 (sebelas)

Perumusan tujuan dan sasaran strategis menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Selain menerjemahkan visi/misi, perumusan tujuan dan sasaran juga dimaksudkan untuk menjawab permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis daerah, dan untuk menyeraskan ketercapaian indikator kinerja pembangunan daerah. Tujuan, sasaran, indikator dan target kinerja pembangunan Kota Palopo 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Kota Palopo Tahun 2022

Misi/Tujuan	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Realis asi 2020	Target Kinerja Tahun	
					2021	2022
Visi : Terwujudnya Palopo sebagai Kota Maju, Inovatif dan Berkelanjutan Pada Tahun 2023						
Misi 1 : Melaksanakan layanan pendidikan, kesehatan serta jaminan dan perlindungan sosial untuk kelompok rentan						
Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kualitas Hidup Masyarakat (T.1)		1	Indeks Pembangunan Manusia (Point)	78.06	78.4	78.82
	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat (S.1)	2	Indeks Pendidikan (Poin)	77.76	78.37	78.48
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (S.2)	3	Indeks Kesehatan (poin)	78.28	78.21	78.58
	Meningkatnya derajat kesejahteraan sosial masyarakat (S.3)	4	Persentase Penduduk Miskin (%)	7.85	6.57	6.28
		5	PDRB per Kapita (Juta/Kapita/Thn) (ADHB)	42.61	42	43
Misi 2 : Mewujudkan lingkungan yang layak huni melalui pengembangan infrastruktur perkotaan, penataan pemukiman, sanitasi dan ruang terbuka hijau						
Terwujudnya Infrastruktur Perkotaan yang berkualitas (T.2)		6	Indeks Daya Saing Infrastruktur (Angka)	85.88	85.9	86. 20
	Meningkatnya kapasitas dan Layanan infrastruktur perkotaan (S.4)	7	Persentase Areal Kawasan Kumuh (%)	0.02	1.61	1.57

Misi/Tujuan	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Target Kinerja Tahun	
					2021	2022
	Meningkatnya Konektifitas dan Aksesibilitas Wilayah serta Infrastruktur Strategis Daerah (S.5)	8	Indeks Layanan Jalan (Poin)	67.09	67.95	68.15
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup (S.6)	9	Luas Kawasan Terdampak Banjir (Ha)	54.95	10	7
		10	Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau Publik	76.95	79.98	80
Misi 3 : Memodernisasi layanan public, meningkatkan kualitas aparatur dan tata kelola pemerintahan serta mendorong partisipasi public dalam pembangunan						
Terwujudnya Birokrasi Profesional Kompetitif dan Melayani (T.3)		11	Indeks Reformasi Birokrasi (Nilai)	50.33	65	70
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (S.7)	12	Nilai Akuntabilitas Pemerintahan Daerah (Nilai)	60.03 (B)	70 (BB)	75 (BB)
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S.8)	13	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik (Point)	83.06	84	85
Misi 4 : Mendorong kewirausahaan berbasis jasa dan niaga melalui peningkatan keterampilan hidup, permodalan dan pendampingan bisnis						
Terwujudnya produktivitas perekonomian daerah (T.4)		14	Pertumbuhan Ekonomi (%)	0.45	4.16	4.68
	Meningkatnya Perluasan Kesempatan Berusaha dan Produktifitas Tenaga Kerja (S.9)	15	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	10.37	9.03	8.55
	Meningkatnya Produksi dan Produktifitas (S.10)	16	Produktifitas Total Daerah (Juta/Tenaga Kerja/Tahun)	94.39	104.13	109.94
Misi 5 : Mewujudkan iklim yang toleran terhadap pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif yang bercirikan nilai budaya Luwu						
Terwujudnya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing (T.5)		17	Total Kontribusi PAD Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Terhadap PAD (%)	2.28	8.78	9.8
	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam perekonomian daerah (S.11)	18	Kontribusi PAD Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (%)	0.02	5	6
		19	Kontribusi PAD Ekonomi Kreatif	2.26	3.78	3.8

Misi/Tujuan	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Target Kinerja Tahun	
					2021	2022
			terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (%)			

4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2022

4.2.1. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional 2022

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 menjadi acuan penyusunan prioritas pada rencana kerja tahunan selama 5 tahun. Selanjutnya, untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan meningkatkan pengendalian dalam proses pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah maka RKP 2022 merupakan penjabaran dari prioritas Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 dan menjadi acuan penyusunan RKPD Tahun 2022 untuk menjaga keserasian rencana pembangunan.

Tema Pembangunan Nasional 2022

Tema pembangunan RKP Tahun 2022 adalah **"Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural"**. Tema tersebut berfokus pada dua hal yaitu Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural. Pemulihan Ekonomi dapat diterjemahkan sebagai upaya pemulihan daya beli masyarakat dan dunia usaha serta diversifikasi ekonomi. Pemulihan daya beli dan dunia usaha yang dilakukan sejalan dengan penuntasan krisis kesehatan, dilakukan melalui pemberian bantuan untuk pemulihan dunia usaha, menjaga daya beli rumah tangga, serta percepatan pembangunan infrastruktur padat karya. Selain itu, dilakukan juga program khusus untuk mendorong kembali daya beli masyarakat dan membangkitkan dunia usaha. Pada saat bersamaan, diversifikasi ekonomi dilakukan melalui program peningkatan nilai tambah, ketahanan pangan, pembangunan rendah karbon, dan pemerataan infrastruktur dan kualitas layanan digital.

Penyusunan tema pembangunan RKP Tahun 2022 dilakukan dengan mempertimbangkan sasaran RPJMN Tahun 2020-2024, arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2020, kebijakan pembangunan tahun 2021, serta berbagai isu strategis yang menjadi perhatian. Tema RKP Tahun 2022 juga disusun sebagai respons terhadap kondisi Indonesia yang sedang berada dalam proses pemulihan akibat pandemi Covid-19. Krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19 telah berdampak sistemik terhadap pembangunan nasional, terutama pada aspek sosial dan ekonomi.

Kontraksi ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 2020 mengakibatkan meningkatnya angka pengangguran, melemahnya daya beli masyarakat dan menurunnya produktivitas di sektor-sektor strategis. Kebijakan pemulihan ekonomi nasional masih perlu dilakukan pada tahun 2022, dan sekaligus menyiapkan landasan yang kokoh bagi Indonesia untuk melakukan transformasi ekonomi sesuai yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024.

Pandemi Covid-19 berimplikasi terhadap perubahan pola aktivitas ekonomi, sosial, serta pelayanan publik. Penerapan *social distancing* dan protokol kesehatan menuntut penggunaan teknologi digital secara intensif dalam mendukung aktivitas manusia. Kondisi demikian tetap akan berlangsung dalam kehidupan era *new normal*, meskipun *herd immunity* diharapkan telah tercapai di tahun 2022. Berdasarkan hal tersebut, tema pembangunan RKP Tahun 2022 diarahkan untuk pemulihan dampak Covid-19 dengan berorientasi pada membangun ke depan dengan lebih baik (*Build Forward Better*).

Sasaran Pembangunan Nasional 2022

Untuk mewujudkan tema pembangunan nasional 2022 maka sasaran pembangunan nasional tahun 2022 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro

ekonomi khususnya perekonomian nasional yang terdampak pandemi Covid-19, adapun sasaran pembangunan tahun 2022 adalah:

(1) Percepatan pemulihan ekonomi dengan indikator :

- (a) pertumbuhan ekonomi,
- (b) tingkat pengangguran terbuka,
- (c) rasio gini, dan
- (d) penurunan emisi gas rumah kaca;

(2) Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia dengan indikator :

- (a) indeks pembangunan manusia dan
- (b) tingkat kemiskinan.

Selain itu, indikator pembangunan tahun 2022 juga menitikberatkan pada indikator nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan. Target sasaran dan indikator pembangunan tahun 2022 ditunjukkan oleh table berikut :

Tabel 4.3
Indikator Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2022

Indikator Pembangunan	Target 2022
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5.4-6.0 %
Tingkat kemiskinan (%)	8.5-9.0 %
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	6.24-5.52%
Rasio Gini (Indeks)	0.376 - 0378
Indeks Pembangunan manusia (IPM)	73.44 -73.48
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (%)	26.8 - 27.1%
Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan Non Migas	5.8 -6.5%
Kontribusi PDB Pariwisata	4.30%

Sumber : Permendagri 17 Tahun 2021

Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional 2022

Sesuai dengan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2022, ditetapkan arah kebijakan pembangunan untuk tahun 2022 adalah pemulihan ekonomi dan reformasi struktural melalui pemulihan daya beli dan usaha, diversifikasi ekonomi yang didukung dengan reformasi iklim investasi, reformasi kelembagaan, serta reformasi peningkatan kualitas SDM dan perlindungan sosial. Sebagai operasionalisasi dari arah kebijakan, disusun sepuluh strategi pembangunan, yakni :

1. meningkatkan nilai tambah sektor industri,
2. mempercepat pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata,
3. meningkatkan ketahanan pangan masyarakat,
4. meningkatkan peran UMKM terhadap ekonomi nasional,
5. meningkatkan pemerataan infrastruktur,
6. meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan digital,
7. meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK),
8. mempercepat reformasi perlindungan sosial,
9. meningkatkan kualitas SDM dan inovasi, serta
10. memperkuat sistem kesehatan nasional dan penanganan Covid-19.

Prioritas Pembangunan Nasional 2022

Sasaran dan prioritas penyusunan RKP Tahun 2022 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun Sumber Daya Manusia pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;

2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 Undang- Undang. pertama Undang-Undang Cipta Kerja dan kedua Undang- Undang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM);
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2022 selanjutnya dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2022. Tujuh PN merupakan Agenda Pembangunan yang termuat dalam RPJMN Tahun 2020–2024 dan tetap dipertahankan pada RKP Tahun 2022 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan. Hal ini juga ditujukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah.

Secara rinci penjelasan setiap prioritas nasional dapat diuraikan pada pembahasan berikut.

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:
 - ❖ Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
 - ❖ Akselerasi peningkatan nilai tambah *agrofisery industry*, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan. Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui: Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah, Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang, Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif, Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah, serta Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing. Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui: mPengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial; Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas; Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda; Pengentasan kemiskinan; dan Peningkatan produktivitas dan daya saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan

dan kemodernan. Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu yang bertumpu pada: Revolusi mental dalam sistem pendidikan; Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan Revolusi mental dalam sistem sosial. Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama; dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar. Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui: Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah; Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan; Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK; Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim. Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan: Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup; Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta Pembangunan Rendah Karbon.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui: Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas; Meningkatkan Hak-Hak Politik Dan Kebebasan Sipil; Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber; Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

4.2.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sulsel Tahun 2022

Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 merupakan agenda tahunan pembangunan pemerintah daerah yang dijabarkan dari RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023. Prioritas pembangunan daerah dirumuskan sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah, isu strategis dan disusun berdasarkan arah kebijakan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 serta untuk menjamin sinergitas pembangunan nasional dan daerah.

Prioritas tahun 2022 banyak dipengaruhi adanya pandemi Covid-19 yang telah menimbulkan disrupsi pada kehidupan manusia, menyebabkan terhentinya aktivitas ekonomi di seluruh negara dan berakibat terjadinya resesi di dunia. Dampak yang dirasakan Sulawesi selatan juga cukup besar dengan terputusnya mata-rantai pasokan barang dan jasa, terganggunya mobilitas masyarakat, dan terhentinya kegiatan ekonomi khususnya pada sektor industri dan pariwisata yang berdampak pada meningkatnya angka-angka pengangguran dan kemiskinan serta pada akhirnya menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Keadaan ini tentu harus dikendalikan, maka menjadi keharusan bagi Pemerintah daerah untuk melakukan orientasi baru dalam perencanaan pembangunan pada tahun 2022. Dengan demikian perencanaan pembangunan pada tahun 2022 akan difokuskan pada pemulihan kehidupan masyarakat dan roda perekonomian untuk dapat kembali berjalan lancar,

peningkatan sistem kesehatan, memperkuat sistem ketahanan pangan nasional, membangun sistem perlindungan sosial secara terpadu.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan tema pembangunan daerah tahun 2022 yaitu ***Inovasi Pemanfaatan Potensi & Sumber Daya Alam Untuk Kebangkitan Ekonomi***, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pemantapan reformasi birokrasi
2. Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur wilayah untuk akselerasi pertumbuhan
3. Percepatan pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial
4. Percepatan pembangunan Sumber daya manusia yang berkarakter dan berbudaya
5. Pengelolaan komoditas unggulan berbasis sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup.

Prioritas Pembangunan Tahun 2022 di atas dimaksudkan sebagai fokus pembangunan tahun 2022 untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya dan isu strategis daerah tahun 2022. Dalam mencapai prioritas pembangunan tersebut, maka pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 difokuskan pada sasaran, indikator dan target kinerja sebagai berikut :

Tabel 4.4
Sasaran, Indikator & Target Kinerja Sulsel 2022

Sasaran Pembangunan Sulsel	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2020
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Provinsi	A (>80 – 90)
Berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahandan pelayanan public	Indeks Pelayanan Publik	A- (4,01 – 4,50)
Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur wilayah	Indeks Layanan Infrastruktur	83,38
Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor unggulan daerah	Tingkat Pengangguran terbuka	5.9
Menurunnya kesenjangan Pendapatan antar lapisan masyarakat	Rasio Gini	0.389
Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Pendidikan	Indeks Pendidikan	66,39
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	77,90
Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan gender	76.36
Meningkatnya aktualisas nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan masyarakat	Angka Kriminalitas (Kasus)	24,573
Meningkatnya hilirisasi ekonomi sektor unggulan daerah	Produktifitas Total Daerah	86.643.579
Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Potensi Penurunan emisi GRK (Juta Ton CO 2Eq)	1,198

4.2.3. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kota Palopo Tahun 2022

Tema dan Prioritas Pembangunan Kota Palopo 2022

Prioritas pembangunan daerah Kota Palopo 2022 adalah gambaran prioritas pembangunan yang dipilih. Proses pemilihannya mempertimbangkan prioritas pembangunan Nasional (RKP) dan Sulsel, permasalahan pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan tahun berjalan, isu strategis daerah, termasuk pokok-pokok pikiran DPRD Kota Palopo tahun 2022 dan Perubahan RPJMD Kota Palopo Tahun 2018-2023. Olehnya tema RKPD 2022 Kota Palopo adalah **"Pemulihan Ekonomi, Peningkatan Daya Saing dan Kemandirian Daerah"**.

Kemudian dari hasil sintesa atas poin point tersebut diatas, ditetapkan **5 prioritas pembangunan Kota Palopo Tahun 2022** sebagai berikut :

1. Pengembangan Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat
2. Pengembangan Wilayah dan Daya Saing Infrastruktur Kota
3. Pemantapan Pengelolaan Ruang, Pencegahan dan Penanganan Bencana Alam maupun Non Alam
4. Pengembangan Layanan Publik, Inovasi Daerah dan Reformasi Birokrasi
5. Pemulihan Ekonomi dan Produktifitas Daerah

Prioritas Nasional, Sulsel dan Kota Palopo Tahun 2022 memiliki saling keterkaitan sebagai upaya menjaga sinergitas pembangunan nasional dan daerah. Berikut adalah tabel keterkaitan prioritas pembangunan pada tahun 2022 pada tingkat nasional, Sulsel dan Kota Palopo :

Tabel 4.5
Keterkaitan Prioritas Nasional, Sulsel dan Kota Palopo
Tahun 2022

Prioritas Nasional	Prioritas Sulsel	Prioritas Palopo
Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing (PN3)	Percepatan pembangunan Sumber daya manusia yang berkarakter dan berbudaya	Pengembangan Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat (1)
Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN 2)	Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur wilayah untuk akselerasi pertumbuhan	Pengembangan Wilayah dan Daya Saing Infrastruktur Kota (2)
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan (PN1)	Percepatan pemulihan ekonomi dan perlindungan social	Pemulihan Ekonomi dan Produktifitas Daerah (5)
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN 5)	Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur wilayah untuk akselerasi pertumbuhan	Pengembangan Wilayah dan Daya Saing Infrastruktur Kota (2)
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim (PN6)	Pengelolaan komoditas unggulan berbasis sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup	Pemantapan Pengelolaan Ruang, Pencegahan dan Penanganan Bencana Alam maupun Non Alam (3)
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN4)	Pemantapan Reformasi Birokrasi	Pengembangan Layanan Publik, Inovasi Daerah dan Reformasi Birokrasi (4)
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Layanan Publik (PN7)		

Untuk memberikan kejelasan atas prioritas pembangunan daerah Kota Palopo Tahun 2022 dan implementasi konsep HITS/THIS, berikut adalah penjelasan isi dari lima prioritas pembangunan Kota Palopo tahun 2022 yang diuraikan sebagai berikut :

1. PENGEMBANGAN KUALITAS SDM DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Pengembangan kualitas sumber daya manusia akan dilakukan dengan menguatkan akses dan kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Derajat Kesejahteraan Sosial Masyarakat. Pada aspek pendidikan, diarahkan untuk menekan angka putus sekolah pendidikan dasar, dan meningkatkan angka melek huruf, terutama bagi penduduk usia produktif. Sementara pada aspek kesehatan menekankan pada perilaku hidup bersih dan sehat, penanggulangan penyakit menular dan cakupan layanan jaminan kesehatan masyarakat, menurunkan angka kematian ibu dan anak, serta stunting. Pada aspek kesejahteraan menekankan pada upaya mempertahankan bahkan meningkatkan daya beli masyarakat, mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dan rasio ketergantungan, sehingga mampu meningkatkan proporsi keluarga sejahtera, disamping meningkatkan keberdayaan perempuan dalam pembinaan keluarga sejahtera.

Sebagai bentuk implementasikan konsep **holistic integrative, tematik spasial (HITS)**, pelaksanaan prioritas ini akan melibatkan beberapa perangkat daerah secara bersinergi yakni, Dinas pendidikan, bersama dinas perpustakaan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat, dinas kesehatan, BLUD Sawerigading, RSUD Palammaji Tandji, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat, dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dinas social, dinas ketahanan pangan, dinas pertanian, perikanan, dalam upaya mendorong peningkatan kesejahteraan social masyarakat.

Implementasi prioritas ini dengan melibatkan dan mensinergikan sejumlah peran OPD sebagai sebuah kesatuan gerak yang akan menekankan pentingnya "peran keseluruhan dan saling keterkaitan" dari semua OPD yang terlibat. Sehingga perencanaan prioritas pembangunan disusun menyeluruh yang merangkum segala aspek dan factor yang berkaitan (**holistic**). Beberapa **sub tema (tematik)** pada prioritas ini yang akan dicapai adalah meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan, meningkatnya akses dan layanan kesehatan masyarakat serta meningkatnya perlindungan dan pemberdayaan social masyarakat, pembangunan keluarga dan pemberdayaan serta kesetaraan gender, dan peningkatan jumlah keluarga sejahtera, sebagai beberapa sub tematik utama dalam prioritas pertama ini.

Pemerintah Kota Palopo akan berupaya menyatukan peran semua OPD dalam mencapai sub tema yang akan diwujudkan tersebut kedalam sebuah proses, dengan mengarahkan kegiatan-kegiatan pada perangkat daerah terkait, untuk saling terintegrasi dalam mengimplementasikan satu prioritas pembangunan (**integrative**). Lokus prioritas untuk peningkatan aspek pendidikan yakni di Kecamatan terluar Kota Palopo yakni Kec Sendana Wara Barat dan Telluwana, aspek kesehatan dan kesejahteraan social pada 9 kecamatan dengan menekankan pada kecamatan dengan penduduk miskin terbanyak yakni Wara, Wara Timur dan Wara Utara. (**spasial**)

2. PENGEMBANGAN WILAYAH DAN DAYA SAING INFRASTRUKTUR KOTA

Mencakup Pengembangan Aksesibilitas dan Konektifitas Wilayah, yang akan focus pada peningkatan dan pemantapan kualitas jalan/jembatan, penyediaan infrastruktur strategis daerah, penataan sarana dan prasarana perhubungan, serta pengembangan akses komunikasi dan informasi di daerah, perumahan dan pemukiman.

Aspek lainnya, mencakup Infrastruktur Publik/Strategis dan Infrastruktur Layanan Dasar yang diarahkan pada penyediaan sarana dan prasarana serta cakupan fasilitas Infrastruktur Perkotaan serta SPM PU PR, Pemantapan Akses dan Kualitas Sanitasi, Akses Terhadap perumahan dan permukiman layak serta Penataan Perumahan & Pemukiman yang Sehat dan Produktif SPM Perumahan Pemukiman.

Implementasi prioritas ini akan melibatkan beberapa perangkat daerah secara bersinergi yakni, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informasi, Dinas Perumahan dan Pemukiman, Dinas Transmigrasi dan Dinas Pertanahan

dalam sebuah kesatuan gerak serta sinergi. Sehingga perencanaan prioritas pembangunan disusun menyeluruh yang merangkum segala aspek dan factor yang berkaitan (**holistic**).

Beberapa **sub tema (tematik)** pada prioritas ini yang akan dicapai adalah konektifitas dan aksesibilitas wilayah, kualitas kawasan perumahan dan pemukiman, serta sarana dan prasarana layanan dasar masyarakat serta infrastruktur perkotaan lainnya.

Pemerintah Kota Palopo akan berupaya menyatukan peran semua OPD dalam mencapai sub tema yang akan diwujudkan tersebut kedalam sebuah proses, dengan mengarahkan kegiatan-kegiatan pada perangkat daerah terkait, untuk saling terintegrasi dalam mengimplementasikan satu prioritas pembangunan (**integrative**). Lokus prioritas untuk prioritas pembangunan kedua ini adalah Kecamatan Wara Timur, Sendana, Mungkajang, Wara Barat dan Telluwanua. (**spasial**)

3. PEMANTAPAN PENGELOLAAN RUANG, PENCEGAHAN DAN PENANGANAN BENCANA ALAM MAUPUN NON ALAM

Pemantapan pengelolaan ruang akan mencakup pengelolaan dan optimalisasi taman-taman kota dan pemeliharaan ruang terbuka hijau lainnya, sebagai salah satu pusat aktifitas public, yang memiliki dampak ekonomi, optimalisasi penanganan persampahan dan kualitas lingkungan hidup lainnya.

Pencegahan dan penanganan bencana alam maupun non alam lainnya diarahkan pada pemenuhan standar pelayanan minimal perlindungan masyarakat terutama pada masa dan pasca bencana, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat tentang tangguh bencana, misalnya kebakaran, dan banjir dengan mengoptimalkan infrastruktur terkait misalnya penanganan drainase, talud, tanggul dan sebagainya.

Sebagai bentuk implementasi konsep **holistic integrative, tematik spasial (HITS)**, pelaksanaan prioritas ini akan melibatkan beberapa perangkat daerah secara bersinergi yakni, Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang, dinas pemadam kebakaran, badan penanggulangan bencana daerah secara bersinergi sesuai peran dan tugas fungsi masing-masing. Sehingga perencanaan prioritas pembangunan disusun menyeluruh yang merangkum segala aspek dan factor yang berkaitan (**holistic**) dengan tata kelola ruang dan kebencanaan.

Beberapa **sub tema (tematik)** pada prioritas ini adalah pemanfaatan dan optimalisasi ruang terbuka hijau, penanganan persampahan dan kerusakan lingkungan, penanganan banjir dan genangan, penanganan kebencanaan terutama kebakaran dan tangguh bencana. Pemerintah Kota Palopo akan berupaya menyatukan peran semua OPD dalam mencapai sub tema yang akan diwujudkan tersebut kedalam sebuah proses, dengan mengarahkan kegiatan-kegiatan pada perangkat daerah terkait, untuk saling terintegrasi dalam mengimplementasikan satu prioritas pembangunan (**integrative**).

Lokus prioritas untuk peningkatan aspek pendidikan yakni di Kecamatan Telluwanua, Wara Timur, dan Wara Barat, sebagai beberapa lokus yang tingkat kerawanan kebencanaannya relative lebih tinggi dibandingkan 5 kecamatan lain di Kota Palopo. (**spasial**)

4. PENGEMBANGAN LAYANAN PUBLIK, INOVASI DAERAH DAN REFORMASI BIROKRASI

Mencakup pada Tumbuh Kembangnya Inovasi, Akuntabilitas Kinerja, dan SPBE yang akan diarahkan pada pemantapan Tata Kelola Pemerintahan, Kinerja, Sarana dan Prasarana, dan Kapasitas SDM Aparatur, Pemantapan layanan dasar maupun kualitas layanan publik lainnya yang didasari dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kondisi ini diharapkan mampu meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap semua layanan public yang dilaksanakan.

Beberapa aspek yang akan menjadi focus penanganan adalah meningkatkan persentase organisasi perangkat daerah dengan nilai SAKIP dan Reformasi Birokrasi yang berkategori baik, meningkatkan tingkat profesionalisme aparatur melalui pendidikan, pelatihan dan kompetensi serta disiplin kinerja, mengoptimalkan inovasi daerah untuk terus tumbuh dan berkembang pada sejumlah perangkat daerah pelaksana pelayanan public dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui peningkatan pemenuhan usulan prioritas kecamatan yang di-APBD-kan, sesuai harapan masyarakat.

Pelaksanaan prioritas ini akan melibatkan sebagian besar seluruh perangkat daerah secara bersinergi namun beberapa OPD yang akan menjadi Project leader prioritas ini adalah Sekretariat Daerah, Bappeda, dan Inspektorat Kota Palopo. Sehingga perencanaan prioritas pembangunan disusun menyeluruh yang merangkum segala aspek dan factor yang berkaitan **(holistic)**.

Beberapa **sub tema (tematik)** pada prioritas ini yang akan dicapai adalah meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan perangkat daerah, meningkatnya kualitas layanan pemerintah dan meningkatnya inovasi layanan, sebagai beberapa sub tematik utama dalam prioritas keempat ini.

Pemerintah Kota Palopo akan berupaya menyatukan peran semua OPD dalam mencapai sub tema yang akan diwujudkan tersebut kedalam sebuah proses, dengan mengarahkan kegiatan-kegiatan pada perangkat daerah terkait, untuk saling terintegrasi dalam mengimplementasikan satu prioritas pembangunan **(integrative)**. Lokus prioritas adalah seluruh perangkat daerah Kota Palopo dan pada layanan diarahkan pada 12 kantor yang melaksanakan layanan public secara langsung, seperti Dinas Kependudukan Catatan Sipil, RSUD, Penanaman Modal dan sebagainya. **(spasial)**

5. PEMULIHAN EKONOMI DAN PRODUKTIFITAS DAERAH

Pemulihan ekonomi dan produktifitas daerah akan dilakukan dengan optimalisasi dan normalisasi Lapangan Usaha dengan penerapan protocol kesehatan, peningkatan pelatihan dan kompetensi serta Kualitas Tenaga Kerja, Peningkatan Investasi dan UMKM yang akan diarahkan pada Pelatihan Kerja (Life Skill).

Semua upaya ini akan dilakukan sejalan dengan upaya memulihkan kembali iklim investasi daerah dengan meningkatkan promosi dan Kualitas Pelayanan Investasi, Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Usaha Produktif, Peningkatan Daya Saing Produk/Komoditas Daerah, Pemantapan Pembinaan Kapasitas Pelaku Usaha, Permodalan/Pembiayaan, Pemasaran, Teknologi dan Infrastruktur serta Kelembagaan, serta pemulihan pariwisata daerah yang lebih berbasis iven dengan meningkatkan partisipasi para Seniman dan Budayawan serta pelaku usaha ekonomi kreatif di daerah.

Pelaksanaan prioritas ini akan beberapa pera perangkat daerah secara bersinergi seperti Dinas Penanaman Modal, Dinas tenaga Kerja, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi dan UMKM, sehingga prioritas ini akan dilaksanakan dan ditangani dari berbagai aspek dan factor yang berkaitan dengan pemulihan ekonomi dan produktifitas daerah. **(holistic)**.

Beberapa **sub tema (tematik)** pada prioritas ini yang akan dicapai adalah meningkatnya nilai investasi daerah, meningkatnya daya serap tenaga kerja, meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi oleh para pelaku usaha, meningkatnya aktifitas perdagangan dan kuliner, serta iven-iven formal lainnya yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, sebagai beberapa sub tematik utama dalam prioritas kelima ini.

Pemerintah Kota Palopo akan berupaya menyatukan peran semua OPD dalam mencapai sub tema yang akan diwujudkan tersebut kedalam sebuah proses, dengan mengarahkan kegiatan-kegiatan pada perangkat daerah terkait, untuk saling terintegrasi dalam mengimplementasikan satu prioritas pembangunan **(integrative)**. Lokus prioritas adalah

Kota Palopo, terutama pada wilayah potensial seperti Kecamatan Telluwanua dan wilayah produktif Wara, Wara Utara dan Wara Timur. **(spasial)**

Sasaran Pembangunan Daerah (Kota Palopo) Tahun 2022

Sasaran pembangunan Kota Palopo Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.6
Sasaran Pembangunan, Indikator dan Target Kinerja Tahun 2022

Sasaran Pembangunan Kota Palopo	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2022
Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat (S.1)	Indeks Pendidikan (Poin)	78.48
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (S.2)	Indeks Kesehatan (poin)	78.58
Meningkatnya derajat kesejahteraan sosial masyarakat (S.3)	Persentase Penduduk Miskin (%)	6.28
	PDRB per kapita (Juta/Kapita/Thn)	
Meningkatnya kapasitas dan Layanan infrastruktur perkotaan (S.4)	Persentase Areal Kawasan Kumuh (%)	1.57
Meningkatnya Konektifitas dan Aksesibilitas Wilayah serta Infrastruktur Strategis Daerah (S.5)	Indeks Layanan Jalan (Poin)	68.15
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup (S.6)	Luas Kawasan Terdampak Banjir (Ha)	7
	Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau Publik	80
Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (S.7)	Nilai Akuntabilitas Pemerintahan Daerah (Nilai)	70
Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S.8)	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik (Point)	85
Meningkatnya Perluasan Kesempatan Berusaha dan Produktifitas Tenaga Kerja (S.9)	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	8.55
Meningkatnya Produksi dan Produktifitas (S.10)	Produktifitas Total Daerah (Juta/Tenaga Kerja/Tahun)	109.94
Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam perekonomian daerah (S.11)	Kontribusi PAD Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (%)	6
	Kontribusi PAD Ekonomi Kreatif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (%)	3.8

Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kota Palopo Tahun 2022

Strategi dan arah kebijakan pembangunan Kota Palopo dalam RKPD tahun 2022 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan cara Pemerintah Kota Palopo mencapai tujuan dan sasaran dalam Perubahan RPJMD 2018-2023, sekaligus menjadi implementasi misi Pemerintah Kota Palopo dalam mewujudkan Visi Palopo Maju Inovatif dan Berkelanjutan.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 4.7
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Palopo
Tahun 2022

Sasaran RPJMD	Strategi	Arah Kebijakan Tahun 2022
Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat (S.1)	Meningkatkan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan secara proporsional dengan meningkatkan partisipasi kesempatan belajar dan keberlanjutan pendidikan (Stra 1)	Pemantapan tata kelola dan kualitas layanan pendidikan, keberlanjutan pendidikan serta SPM Pendidikan
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (S.2)	Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dengan mengoptimalkan sumber daya kesehatan secara efektif dan efisien (Stra 2)	Optimalisasi cakupan dan kualitas serta tata kelola pelayanan dan sistem kesehatan serta pemenuhan UHC serta SPM Kesehatan Penanganan Dampak Pandemi Covid 19
Meningkatnya derajat kesejahteraan sosial masyarakat (S.3)	Meningkatkan rehabilitasi, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat yang beriringan dengan pengendalian penduduk serta meningkatkan partisipasi, kerjasama dan sinergitas penanganan kesejahteraan sosial (Stra 3)	Optimalisasi Upaya Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Fakir Miskin, PMKS Berbasis BDT (Basis Data Terpadu/SPKD), dan Pembinaan dan Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial bagi Kelompok Rentan Berbasis Rumah Tangga/Keluarga yang Responsif Gender serta Cakupan SPM Sosial, Penanganan Dampak Pandemi Covid 19
Meningkatnya kapasitas dan Layanan infrastruktur perkotaan (S.4)	Meningkatkan pemenuhan infrastruktur dasar di kawasan permukiman secara beriringan dengan upaya menata dan mengembangkan potensi kawasan hunian untuk produktif. (Stra 4)	Akselerasi Peningkatan Kawasan Hunian Produktif Tanpa Kumuh dengan Akses Sanitasi dan Cakupan Rumah Layak Huni, SPM Perumahan Pemukiman dan Layanan SPM Ke PU-an
Meningkatnya Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah serta Infrastruktur Strategis Daerah (S.5)	Mengembangkan infrastruktur strategis perkotaan yang beriringan dengan pengembangan usaha serta kawasan produktif daerah yang ada (Stra 5)	Pemantapan kapasitas dan ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas Infrastruktur Perkotaan serta SPM PU PR
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup (S.6)	Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan dan Memantapkan Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengendalian & Pemanfaatan ruang (Stra 6)	Optimalisasi Upaya Penanganan/Pengurangan Luas Terdampak Banjir dan Genangan serta Peningkatan Ruang Terbuka Hijau serta SPM Kebencanaan

Sasaran RPJMD	Strategi	Arah Kebijakan Tahun 2022
Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (S.7)	Meningkatkan Cakupan dan Kualitas Layanan dengan prinsip e government dengan memantapkan regulasi, struktur, tata kelola layanan sistem serta kinerja pemerintah daerah yang dibarengi dengan pemantapan kualitas SDM, kinerja aparatur serta sarana dan prasarana yang ada (Stra 7)	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dengan mempertimbangkan dampak Pandemi Covid 19, Kinerja, Sarana dan Prasarana, dan Kapasitas SDM Aparatur
Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S.8)	Meningkatkan Kapasitas Aparatur Pelayanan Publik, penguatan sistem/regulasi dan penegakan standarisasi pelayanan yang beriringan dengan upaya pemantapan sarana dan prasarana, Inovasi , Teknologi Sistem Layanan dan Aksesibilitas Publik Atas Layanan dengan Penerapan Prinsip Smart City (Stra 8)	Optimalisasi layanan dasar maupun kualitas layanan publik lainnya yang didasari dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan mempertimbangkan perkembangan dampak Pandemi Covid 19
Meningkatnya Perluasan Kesempatan Berusaha dan Produktifitas Tenaga Kerja (S.9)	Mengembangkan Sistem Layanan dan Kerjasama Daerah dalam hal Ketenagakerjaan dan Penyediaan Lapangan Kerja serta Peningkatan SDM Angkatan Kerja yang disertai dengan pengembangan Promosi, Sarana Prasarana dan Kualitas Daya Dukung Investasi (Stra 9)	Akselarasi Penyediaan Lapangan Kerja, Kualitas Tenaga Kerja dan Kesesuaian Kompetensi Angkatan Kerja dengan Kebutuhan Lapangan Kerja dan Penanganan Dampak Pandemi Covid 19 di sektor Produksi dan Produktifitas Daerah
Meningkatnya Produksi dan Produktifitas (S 10)	Mengembangkan Produksi dan Produktifitas Daerah, Memperkuat Pemberdayaan dan Kelembagaan Usaha Produktif Masyarakat disertai peningkatan Skala Usaha dan Aksesibilitas Kelembagaan Usaha Masyarakat serta pengembangan industri unggulan dan industri potensial lainnya (Stra 10)	Optimalisasi Daya Saing Produk/Komoditas Daerah dengan mempertimbangkan dampak Pandemi Covid 19.
Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam perekonomian daerah (S.11)	Meningkatkan daya saing pariwisata disertai dengan peningkatan SDM, Kelembagaan, Penguasaan Teknologi dan Iklim Usaha yang Kondusif dengan ikut menguatkan dan mengembangkan sarana prasarana, kerjasama dan pemasaran produk ekonomi kreatif daerah (Stra 11)	Optimalisasi Pembinaan Kapasitas Pelaku Usaha, Permodalan/Pembiayaan, Pemasaran, Teknologi dan Infrastruktur serta Kelembagaan Termasuk Bagi Seniman dan Budayawan.

Keterkaitan Rumusan Permasalahan Pembangunan Daerah terhadap Prioritas Pembangunan

Berikut adalah gambaran keterkaitan Permasalahan Pembangunan, Isu Strategis, Prioritas, Sasaran, Indikator serta Target Kinerja Pembangunan Kota Palopo tahun 2022 :

Tabel 4.8
Keterkaitan Permasalahan Pembangunan,
Isu Strategis, Prioritas dan Sasaran Pembangunan

Permasalahan Pembangunan 2022	Isu Strategis 2022	Prioritas RKPD 2022	Sasaran Pembangunan 2022
1. Peningkatan Daya Saing Kualitas Sumber Daya Manusia, Lamban	1. Penguatan dan Optimalisasi Sistem dan Layanan Kesehatan dan Pendidikan Daerah	Pengembangan Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat (1)	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat (S.1) Indikator Kinerja : Indeks Pendidikan (Poin) Target Kinerja : 78.48
2. Taraf Hidup dan Tingkat Kesejahteraan Sosial Masyarakat Belum Kompetitif dengan Daerah Lain	2. Optimalisasi Perlindungan, Rehabilitasi, dan Pemberdayaan Sosial termasuk Ketahanan & Stabilitas Daerah	Pengembangan Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat (1)	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (S.2) Indikator Kinerja : Indeks Kesehatan (poin) Target Kinerja : 78.58 Meningkatnya derajat kesejahteraan sosial masyarakat (S.3) Indikator Kinerja 1: Persentase Penduduk Miskin (%) Target Kinerja : 6.28 Indikator Kinerja 2 : PDRB per kapita (Juta/Kapita/Thn) Target Kinerja : 43
3. Pemerataan Pembangunan dan Daya Saing Infrastruktur Daerah, Belum Sesuai Target Daerah	3. Pengembangan Infrastruktur/Wilayah, dan Sustainabel Lingkungan	Pengembangan Wilayah dan Daya Saing Infrastruktur Kota (2)	Meningkatnya kapasitas dan Layanan infrastruktur perkotaan (S.4) Indikator Kinerja : Persentase Areal Kawasan Kumuh (%) Target Kinerja : 1.57 Meningkatnya Konektifitas dan Aksesibilitas Wilayah serta Infrastruktur Strategis Daerah (S.5) Indikator Kinerja : Indeks Layanan Jalan (Poin) Target Kinerja : 68.15
4. Pengelolaan Tata Ruang dan Ketahanan Daerah Terhadap	3. Pengembangan Infrastruktur/Wilayah, dan Sustainabel Lingkungan	Pemantapan Pengelolaan Ruang, Pencegahan dan Penanganan Bencana Alam	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup (S.6)

Permasalahan Pembangunan 2022	Isu Strategis 2022	Prioritas RKPD 2022	Sasaran Pembangunan 2022
Bencana Belum Optimal		maupun Non Alam (3)	Indikator Kinerja 1: Luas Kawasan Terdampak Banjir (Ha) Target Kinerja : 7 Indikator Kinerja 2: Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau Publik Target Kinerja :80
5. Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja dan Layanan Publik (Dasar dan Non Dasar) yang Inovatif Belum Sesuai Target Daerah	4. Pengembangan Layanan Publik dan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Berbasis Digital/Elektronik	Pengembangan Layanan Publik, Inovasi Daerah dan Reformasi Birokrasi (4)	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (S.7) Indikator Kinerja : Nilai Akuntabilitas Pemerintahan Daerah (Nilai) Target Kinerja : 70 Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S.8) Indikator Kinerja : Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik (Point) Target Kinerja : 85
6. Pengangguran Terbuka Masih Tinggi dan Pertumbuhan Ekonomi Melambat	5. Pemulihan Kondisi Investasi Daerah, UMKM, Optimalisasi Ekonomi Digital dan Sektor Produktif dan Potensial Daerah (Perindustrian, Pariwisata dan Perdagangan)	Pemulihan Ekonomi dan Produktifitas Daerah (5)	Meningkatnya Perluasan Kesempatan Berusaha dan Produktifitas Tenaga Kerja (S.9) Indikator Kinerja :Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Target Kinerja : 8.55 Meningkatnya Produksi dan Produktifitas (S 10) Indikator Kinerja :Produktifitas Total Daerah (Juta/Tenaga Kerja/Tahun) Target Kinerja : 109.94 Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam perekonomian daerah (S.11) Indikator Kinerja 1 : Kontribusi PAD Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (%) Target Kinerja : 6

Permasalahan Pembangunan 2022	Isu Strategis 2022	Prioritas RKPD 2022	Sasaran Pembangunan 2022
			Indikator Kinerja 2 : Kontribusi PAD Ekonomi Kreatif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (%) Target Kinerja : 3.8

Kebijakan Pemulihan Ekonomi Dalam Penanganan Dampak Pandemi Covid 19 Tahun 2022

Terdapat tiga arah kebijakan penanganan dampak covid 19 yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 oleh Pemerintah Kota Palopo. Arah kebijakan pertama dan kedua merupakan bagian dari prioritas pembangunan pertama, sementara arah kebijakan ketiga merupakan bagian dari prioritas kelima, sebagai berikut :

1. Pemantapan Layanan Sistem Kesehatan Daerah

Penekanan arah kebijakan pada aspek ini adalah :

- Mengoptimalkan Upaya untuk menghentikan dan menangani Penyebaran Covid 19
- Memantapkan Pelaksanaan serta Edukasi Masyarakat tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, Mulai dari Individu, Keluarga dan Lingkungan.
- Memastikan bahwa protocol kesehatan tetap dijalankan dan terus dioptimalisasi pada area layanan public, sekolah/civitas akademik, dan lembaga pemerintah dan dunia usaha lainnya.
- Memantapkan Pelaksanaan Pencegahan Dini Penyakit Menular
- Memantapkan Ketersediaan dan Kualitas Sarana Prasarana Kesehatan Terutama yang Terkait dengan Pandemi Covid 19
- Memantapkan Cakupan Layanan Iuran Kepesertaan BPJS Daerah
- Mengoptimalkan peran dan sinergi penanganan dengan Kelurahan Tangguh Bencana

2. Pemantapan Pelaksanaan Social Safety Net (Jaringan Pengamanan Sosial)

Penekanan arah kebijakan pada aspek ini adalah :

- Mengoptimalkan dan Menjaga Efektifitas serta Sinergi Cakupan Layanan Program Program Jaring Pengaman Sosial ke Masyarakat baik yang berasal dari Pemerintah Pusat, provinsi maupun pemangku kepentingan lainnya.
- Memastikan bahwa bantuan social yang bersumber dari APBD daerah dilaksanakan tepat sasaran dan mempertimbangkan Basis Data Terpadu, atas bantuan social yang dilaksanakan Perangkat Daerah ke Masyarakat
- Memastikan bahwa harga pangan dan ketersediaannya relative mampu diakses dan dijangkau masyarakat melalui optimalisasi pengelolaan empat rumah pangan yang ada di Kota Palopo.
- Memastikan barang bersubsidi tetap tersedia dengan harga sesuai HET Pemerintah.

3. Pemantapan Pemulihan Ekonomi dan Produktifitas Daerah

Penekanan arah kebijakan pada aspek ini adalah :

- Menjaga dan mengoptimalkan produksi dan produktifitas daerah, dan menjaga ketahanan pangan daerah
- Mengoptimalkan bantuan-bantuan usaha kepada kelompok usaha masyarakat
- Memastikan bahwa seluruh aktifitas lapangan usaha kembali berjalan sesuai scenario *new normal* dengan protocol kesehatan
- Memperluas cakupan pelatihan tenaga kerja berbasis life skill dan fasilitasi akses pada lapangan berusaha
- Memastikan proyek proyek infrastruktur padat karya yang bersumber dari dana kelurahan mengakomodir tenaga kerja local masyarakat.
- Memastikan infrastruktur yang menunjang perekonomian mampu diakses dan dimanfaatkan masyarakat secara optimal

- Memastikan pelaksanaan program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat, dijalankan perangkat daerah secara integrative dan bersinergi antara program pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah Kota Palopo.
- Mengoptimalkan peran dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam mengakselerasi ekonomi masyarakat dan ekonomi daerah

Keterkaitan Rumusan Permasalahan Pembangunan Daerah terhadap Prioritas Pembangunan 2022

Berikut adalah table keterkaitan rumusan permasalahan pembangunan daerah terhadap prioritas pembangunan Kota Palopo Tahun 2022.

Tabel 4.9
Keterkaitan Permasalahan Terhadap
Prioritas Pembangunan Tahun 2022 Kota Palopo

Permasalahan Pembangunan 2022	Prioritas RKPD 2022
1. Peningkatan Daya Saing Kualitas Sumber Daya Manusia, Lamban 2. Taraf Hidup dan Tingkat Kesejahteraan Sosial Masyarakat Belum Kompetitif dengan Daerah Lain	Pengembangan Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat (1)
3. Pemerataan Pembangunan dan Daya Saing Infrastruktur Daerah Belum Sesuai Target Daerah	Pengembangan Wilayah dan Daya Saing Infrastruktur Kota (2)
4. Pengelolaan Tata Ruang dan Ketahanan Daerah Terhadap Bencana Belum Optimal	Pemantapan Pengelolaan Ruang, Pencegahan dan Penanganan Bencana Alam maupun Non Alam (3)
5. Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja dan Layanan Publik (Dasar dan Non Dasar) yang Inovatif Belum Sesuai Target Daerah	Pengembangan Layanan Publik, Inovasi Daerah dan Reformasi Birokrasi (4)
6. Pengangguran Terbuka Masih Tinggi dan Pertumbuhan Ekonomi Melamban	Pemulihan Ekonomi dan Produktifitas Daerah (5)

4.3 Pokok Pikiran DPRD Tahun 2022

DPRD Kota Palopo telah melaksanakan Reses Masa Persidangan II tahun sidang 2020-2021. Proses ini telah menghasilkan Pokok-pokok Pikiran DPRD Kota Palopo untuk kebutuhan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022.

Kegiatan dalam rangka penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Palopo dilakukan berdasarkan hasil kegiatan reses 25 orang anggota dewan, hasil Rapat Dengar Pendapat/Hearing dengan Mitra kerja OPD Pemerintah Kota Palopo dan hasil kunjungan kerja alat-alat kelengkapan DPRD, baik di dalam daerah maupun luar daerah Kota Palopo.

Lokasi Wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) anggota dewan terdiri dari:

- Wilayah Dapil I meliputi : Kecamatan Wara, Kecamatan Wara Barat dan Kecamatan Mungkajang
- Wilayah Dapil II meliputi : Kecamatan Wara Utara, Kecamatan Bara dan Kecamatan Telluwanua
- Wilayah Dapil III meliputi : Kecamatan Wara Timur, Kecamatan Wara Selatan dan Kecamatan Sendana

Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Palopo disusun berdasarkan daftar permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh DPRD dari rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses dan atau risalah rapat dengar pendapat dengan mitra kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Palopo dan hasil kunjungan kerja Dewan. Secara garis besar, catatan isu-isu dan permasalahan strategis pada Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Palopo atas

Pelaksanaan Masa Persidangan Ke-II Tahun Sidang 2020- 2021 ini, adalah sebagai berikut :

A. Bidang Pemerintahan, Administrasi Pemerintahan dan Kependudukan.

- 1) Sosialisasi dan Penerapan Pelaksanaan Perda serta Regulasi terkait dengan Kebijakan-kebijakan Pemerintah Pusat yang berkaitan langsung dengan layanan Publik agar seoptimal mungkin dilakukan sebagai upaya penyelenggaraan tata Pemerintahan di Daerah itu terlaksana secara Optimal;
- 2) Layanan publik kemasyarakatan, seperti : Permintaan pemutahiran data masyarakat kurang mampu sebagai bagian dari Keadilan Sosial, sehingga Program-program Bantuan tepat sasaran; Pemerintah melakukan sosialisasi tentang penerima Bantuan Sosial, Pendampingan terhadap Pengembangan SDM Kemasyarakatan di beberapa Bidang Potensial seperti Pertanian, Peternakan Perikanan dan Kelautan serta Pendampingan Usaha dibidang UMKM/IKM; Pembangunan Infrastruktur Layanan Publik seperti Posyandu/Pustu ataupun Pembukaan Akses Jalan agar dilakukan sosialisasi mengenai Persyaratan Hibah Tanah, sehingga usulan-usulan dimaksud dapat direalisasikan dengan mudah tanpa hambatan persoalan Hibah pemilik lahan;
- 3) Terkait Kebijakan-Kebijakan Pemerintah Pusat seperti halnya terkait dengan Refocusing Anggaran disetiap Daerah untuk Pemulihan Ekonomi atas Pandemic Covid-19, juga diharapkan hal ini adanya Sosialisasi terhadap masyarakat terkait dengan bentuk-bentuk Skala Prioritas Usulan agar dapat terkaper menjadi usulan Prioritas;
- 4) Isu sentral terkait dengan kebutuhan data Faktual dari Pemerintah Daerah disetiap Pelaksanaan Masa Sidang Kelembagaan DPRD atas Rencana Program dan Realisasi Program disetiap OPD, serta data Faktual terkait dengan Sumber Usulan Program-program mana yang tercover dari hasil Musrembang, Program Visi-Misi Pemerintah Daerah ataupun Program melalui Rekomendasi Pokok-pokok Pikiran Anggota Dewan;

B. Bidang Ekonomi dan Potensi SDA Adapun pada Bidang Ekonomi

DPRD Kota Palopo berharap Pemerintah Kota memberikan perhatian mengenai :

1. Peningkatan Bantuan Sosial dimasa pandemi COVID -19
2. Meningkatkan Perhatian Pemerintah Kota Terhadap Penyaluran Dana Bantuan Sosial yang harus tepat sasaran, agar benar – benar dilakukan uji faktual ke lapangan, karena banyaknya aduan masyarakat yang seharusnya mendapatkan Bantuan namun tidak mendapatkan bantuan sosial dan ada pula yang seharusnya tidak layak ditetapkan sebagai Warga Penerima manfaat.
3. Meningkatkan Hibah dan bantuan Sosial untuk masyarakat seperti pada Bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Kelautan seperti Persoalan Bantuan Pupuk, Bantuan Peralatan pendukung Pertanian, Kelautan Perikanan serta bantuan Hibah terhadap UKM/UMKM.
4. Agar Pemerintah Daerah juga tetap memberikan perhatian terhadap bantuan untuk kegiatan rohani dan rumah Ibadah;
5. UMKM dan koperasi agar lebih diperhatikan dan dibantu oleh Pemerintah Kota, baik dari segi perijinan, permodalan maupun pemasaran serta Bantuan Hibah lainnya sebagai Upaya dalam Pemulihan Ekonomi Rumah Tangga dan Pemulihan Perkembangan Industri

C. Bidang Pembangunan/Infrastruktur, Sarana dan Prasarana

Terfokus pada peningkatan infrastruktur dan peningkatan Kapasitas Ekonomi masyarakat, dimana pada sektor Pembenahan Infrastruktur seperti halnya :

1. Usulan mengenai Pembangunan dan Pembenahan drainase
2. Pembangunan dan Rehab Tanggul, Pengerukan Sungai serta Pembangunan Talud dan Bronjong;
3. Pengsapanan/peningkatan Kapsitas Jalan dan jembatan (baik usulan baru maupun Rehabilitasi),

4. Perintisan Jalan Tani sebagai Akses transportasi hasil pertanian dan Perkebunan;
5. usulan Penerangan Lampu Jalan yang tersebar di beberapa titik pada setiap Wilayah Kecamatan dan Kelurahan;
6. Listrik Penerangan Rumah Tangga untuk wilayah Kelurahan Peta;
7. beberapa usulan gedung kantor Kelurahan dan Aula Rapat
8. pembenahan Pagar Sekolah
9. Usulan Bantuan Hibah Pembangunan Rumah Ibadah
10. Rehab dan Usulan Pembangunan Pustu, Posyandu dan Gedung Sekolah di beberapa daerah dalam rangka Layanan Kesehatan dan Pendidikan masyarakat;

D. Bidang Kesejahteraan Sosial, Kesehatan, Pendidikan, Budaya Kepariwisata dan Kemasyarakatan

Usulan terfokus pada Bantuan Pemenuhan Kebutuhan dasar Masyarakat Kota Palopo seperti halnya mengenai peningkatan hasil pengelolaan SDA oleh masyarakat Petani, Peternak dan Pelaut dimana secara keseluruhan Masyarakat yang pada umumnya hidup dari Pertanian dan Perkebunan, Peternakan dan Perikanan serta hasil laut pada Wilayah Daerah kami, seperti usulan Bibit, Benih dan bantuan Pupuk;

E. Bidang Kesehatan Masyarakat

Pemerintah Kota Palopo diminta tetap mengadakan sosialisasi tentang pencegahan Covid 19; Meningkatkan pelayanan puskesmas sebagai ujung tombak kesehatan masyarakat begitu juga dengan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah, terutama bagi pasien BPJS; Melakukan Pembenahan atas perlengkapan/dukungan sarana dan Prasarana untuk Pustu/posyandu yang sudah; Kemudahan Layanan kesehatan bagi Masyarakat yang kurang mampu; Selebihnya usulan--usulan yang juga masih berkaitan dengan layanan publik kesejahteraan masyarakat agar lebih optimal lagi kedepannya.

Sesuai hasil penelaahan dan sintesa dokumen pokok-pokok pikiran DPRD Kota Palopo tersebut, poin-point utama pokok pokok pikiran untuk RKPD Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. **Optimalisasi Penanganan Kesejahteraan Masyarakat** terutama untuk menangani dampak Pandemi Covid 19 yang mencakup aspek Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial, dan aspek kesehatan masyarakat.
2. **Akuntabilitas, Transparansi dan Tata Kelola Pemerintahan** mencakup Optimalisasi Layanan Publik, Layanan Dasar Masyarakat (Standar Pelayanan Minimal) dan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel dalam pelaksanaan semua program, kegiatan dan layanan pemerintahan.
3. **Optimalisasi Ketersediaan dan Pemerataan Infrastruktur Daerah** Optimalisasi Aspek konektifitas dan aksesibilitas wilayah, infrastruktur dasar dan ekonomi, perumahan dan pemukiman, Pengelolaan Sumber Daya Air dan Antisipasi Bencana, serta prasarana pelayanan public di sector pendidikan dan kesehatan
4. **Optimalisasi Pemulihan Ekonomi Daerah** mencakup pembinaan dan pemberdayaan para pelaku usaha UMKM, perijinan dan investasi, permodalan maupun pemasaran serta Bantuan Hibah lainnya sebagai Upaya dalam Pemulihan Ekonomi Rumah Tangga dan Pemulihan Perkembangan Industri Daerah.

Berikut adalah keterkaitan pokok pokok pikiran DPRD Kota Palopo Terhadap Prioritas Pembangunan Kota Palopo Tahun 2022 :

Tabel 4.10
Keterkaitan Pokok Pikiran DPRD Terhadap Prioritas Pembangunan Daerah Kota Palopo 2022

No	Pokok Pikiran DPRD	Prioritas Pembangunan Kota Palopo 2022
1	Optimalisasi Penanganan Kesejahteraan Masyarakat	Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat
2	Optimalisasi Ketersediaan dan Pemerataan Infrastruktur Daerah	Pengembangan Wilayah dan Daya Saing Infrastruktur Kota Pemantapan Pengelolaan Ruang, Pencegahan dan Penanganan Bencana Alam maupun Non Alam
3	Akuntabilitas, Transparansi dan Tata Kelola Pemerintahan	Pengembangan Layanan Publik, Inovasi Daerah dan Reformasi Birokrasi
4	Optimalisasi Pemulihan Ekonomi Daerah	Pemulihan Ekonomi dan Produktifitas Daerah

DPRD Kota Palopo menekankan bahwa pada tahun 2022, Pemerintah Kota Palopo tetap menitikberatkan pencapaian visi Kota Palopo dilaksanakan secara sistematis, terpadu, holistik dan tanggap terhadap perubahan dengan mengacu pada agenda pembangunan nasional yang menekankan pada lima aspek yakni pembangunan SDM, infrastruktur dan tata ruang, dan pemulihan ekonomi. Dan menekankan pentingnya sinergitas dan harmonisasi diantara semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan Kota Palopo.

4.4 Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program Prioritas Pembangunan Daerah sesuai Permendagri 86 Tahun 2017 adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Program pembangunan Daerah disusun dalam RPJMD untuk menggambarkan keterkaitan program Perangkat Daerah dalam mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih. **Suatu program pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah.**

Terdapat 12 Program Prioritas Pembangunan Daerah Kota Palopo Tahun 2022. Dimana masing-masing program prioritas pembangunan daerah berisi program perangkat daerah (program operasional). Keterkaitan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Tahun 2022 terhadap Program Prioritas Pembangunan Kota Palopo diuraikan sebagai berikut :

Tabel 4.11
Keterkaitan Prioritas Pembangunan, Sasaran,
Program Pembangunan dan Program Prioritas Perangkat daerah Kota Palopo Tahun 2022

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Program Prioritas Perangkat Daerah	Indikator Prog Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Pelaksana
Pengembangan Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat (1)	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat (S.1)	PROGRAM PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS PENDIDIKAN (PP 1)	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan
			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Sekolah yang Menerapkan Kurikulum Lokal (%)	Dinas Pendidikan
			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio Guru Murid sekolah pendidikan dasar (per 10.000)	Dinas Pendidikan
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan di Palopo yang Aktif (%)	Dinas Perpustakaan
Pengembangan Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat (1)	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (S.2)	PROGRAM PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS KESEHATAN (PP2)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Pemenuhan Universal Helath Coverage (%)	Dinas Kesehatan, RSUD
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga yang Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS (%))	Dinas Kesehatan
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase PUS yang Ber KB (%)	Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana
Pengembangan Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat (1)	Meningkatnya derajat kesejahteraan sosial masyarakat (S.3)	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KESETARAAN (PP3)	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Rumah Tangga/Keluarga Miskin yang Layanan Mendapatkan Pemberdayaan Sosial	Sosial

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Program Prioritas Perangkat Daerah	Indikator Prog Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Pelaksana
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Rumah Tangga/Keluarga Miskin yang Mendapatkan Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Sosial
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Peningkatan Keluarga Sejahtera I yang Meningkat Menjadi Keluarga Sejahtera (%)	Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Rumah Tangga/Keluarga Miskin yang Mendapatkan Pembinaan Kualitas Keluarga	Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase keluarga miskin yang telah memiliki rumah layak huni	Perumahan
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Lokasi Rawan Pangan yang Melaksanakan Diversifikasi Pangan (%)	Pangan
			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Jumlah Lokasi Rawan pangan Kota Palopo (Kelurahan)	Pangan
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Distributor Barang Bersubsidi , Bahan Pokok dan Penting Lainnya Yang Diawasi	Perdagangan
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Cakupan Keluarga Miskin yang Mendapatkan Edukasi (%)	Bakesbangpol
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase OPD yang Menyediakan Layanan Perlindungan Perempuan yang Terstandarisasi (%)	PP& PA
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Anak yang Diselesaikan (%)	PP& PA
Pengembangan Wilayah dan Daya Saing Infrastruktur Kota (2)	Meningkatnya kapasitas dan Layanan	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN DAN	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	OPD Penyelenggara Urusan Perumahan

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Program Prioritas Perangkat Daerah	Indikator Prog Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Pelaksana
	infrastruktur perkotaan (S.4)	HUNIAN LAYAK (PP4)			
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Jumlah Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas)	OPD Penyelenggara Urusan Perumahan
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Luas Permukiman yang Infrastrukturnya dikembangkan (Ha)	OPD Penyelenggara Urusan Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Ketaatan terhadap RTRW	OPD Penyelenggara Urusan Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
			PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase Pengelolaan Objek Tanah Kosong	OPD Penyelenggara Urusan Pertanahan
			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Luas Kawasan Transmigrasi yang Difasilitasi Penetapannya	OPD Penyelenggara Urusan Transmigrasi
Pengembangan Wilayah dan Daya Saing Infrastruktur Kota (2)	Meningkatnya Konektifitas dan Aksesibilitas Wilayah serta Infrastruktur Strategis Daerah (S.5)	PROGRAM PENINGKATAN INFRASTRUKTUR DAERAH (PP5)	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proporsi Panjang Jalan yang Berkondisi Baik (%)	OPD Penyelenggara Urusan Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Layanan Angkutan Darat	OPD Penyelenggara Urusan Perhubungan
				Persentase Panjang Jalan Kewenangan Kota Palopo yang Dijangkau Penerangan Jalan Umum (%)	OPD Penyelenggara Urusan Lingkungan Hidup
			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Usaha Pelayaran yang Berizin	OPD Penyelenggara Urusan Perhubungan
Pemantapan Pengelolaan Ruang, Pencegahan dan	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan	PROGRAM PENGELOLAAN KUALITAS TATA	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Luas Wilayah Rawan Banjir dan Kawasan Produktif yang Sarana	OPD Penyelenggara Urusan Pekerjaan Umum & Penataan Ruang

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Program Prioritas Perangkat Daerah	Indikator Prog Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Pelaksana
Penanganan Bencana Alam maupun Non Alam (3)	Lingkungan Hidup (S.6)	RUANG, SUMBER DAYA AIR DAN PERSAMPAHAN (PP6)		Prasarana Sumber Daya Airnya Ditangani (Ha)	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik / Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	OPD Penyelenggara Urusan Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Rasio Luas ruang terbuka Hijau yang tertata	OPD Penyelenggara Urusan Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung berizin Yang Terbangun (%)	OPD Penyelenggara Urusan Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Luas Ruang Terbuka Hijau Publik yang dikelola/ditangani (Ha)	OPD Penyelenggara Urusan Lingkungan Hidup
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase cakupan area pelayanan (%)	OPD Penyelenggara Urusan Lingkungan Hidup
			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Kajian Lingkungan yang Disusun (Buah)	OPD Penyelenggara Urusan Lingkungan Hidup
			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase sarana Prasarana persampahan yang berfungsi dengan baik (%)	OPD Penyelenggara Urusan Lingkungan Hidup
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Status Kualitas Air dan Udara	OPD Penyelenggara Urusan Lingkungan Hidup
			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Sumber Limbah B3 di Kota Palopo yang diawasi	OPD Penyelenggara Urusan Lingkungan Hidup
Pengembangan Layanan Publik, Inovasi Daerah dan	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan	PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rata-rata Capaian Kinerja Tahunan Terhadap Target Kinerja Tahunan dalam RKPD (%)	Bappeda

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Program Prioritas Perangkat Daerah	Indikator Prog Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Pelaksana
Reformasi Birokrasi (4)	Pemerintahan (S.7)	DAN REFORMASI BIROKRASI (PP7)			
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat Kesesuaian Program/Kegiatan Perangkat Daerah Terhadap Dokumen Perencanaan Daerah (%)	Bappeda
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Rata-rata Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Inspektorat
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Rata-Rata Nilai PMPRB Organisasi Perangkat Daerah	Inspektorat
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Tingkat Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Tingkat Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Daerah	Sekretariat Daerah
			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Angka Tingkat Ketersediaan Data Statistik Sektoral Perangkat Daerah sesuai Permendagri 86 (%)	OPD Pelaksana Fungsi Statistik
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase PNS yang ditempatkan sesuai Syarat Jabatan & Syarat Kompetensinya	Kepegawaian dan Pengembangan SDM
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Kepegawaian dan Pengembangan SDM
			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase OPD yang Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Arsip (%)	OPD Pelaksana Fungsi Arsip
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat	OPD Pelaksana Fungsi Arsip

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Program Prioritas Perangkat Daerah	Indikator Prog Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Pelaksana
				bukti yang sah, dan pertanggungjawaban	
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Tingkat Kesesuaian Pagu pada Dokumen Penganggaran Terhadap Dokumen Perencanaan (%)	OPD Pelaksana Fungsi Pengelola Keuangan
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Tingkat Pemenuhan Dokumen Pengelolaan Barang yang Memenuhi SAP	OPD Pelaksana Fungsi Pengelola Keuangan
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat daerah yang pengelolaan Informasi sesuai SOP (%)	OPD Pelaksana Fungsi Persandian
Pengembangan Layanan Publik, Inovasi Daerah dan Reformasi Birokrasi (4)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S.8)	PROGRAM PEMENUHAN LAYANAN DASAR MASYARAKAT (PP8)	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar	OPD Pelaksanan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Pemenuhan Universal Helath Coverage (%)	OPD Pelaksana Urusan Pem. Bidang Kesehatan
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang Menerima Layanan Sesuai Standar	Sosial
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah	Sosial
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Total Jumlah Penduduk yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, layanan pencegahan dan kesiapsiagaan	BPBD

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Program Prioritas Perangkat Daerah	Indikator Prog Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Pelaksana
				serta layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (%)	
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Total Persentase Rata-rata Gangguan Trantibum dan Perda/Perkada yang dapat diselesaikan	Satpol PP
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rata-rata Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi serta Fasilitas Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan Masyarakat Terdampak Program Pemerintah di Kota Palopo	Perumahan & Kawasan Pemukiman,
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga yang Telah Memiliki Akses Terhadap Air Minum (%)	Pekerjaan Umum
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Pekerjaan Umum
			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Layanan Pengaduan dan Evakuasi yang Dilaksanakan dengan Memenuhi Respon Time 15 Menit	Pemadam Kebakaran
		PROGRAM PENGEMBANGAN LAYANAN NON DASAR, INOVASI DAERAH DAN PARTISIPASI PUBLIK (PP9)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rata-Rata Tingkat Penyelesaian Pengaduan Masyarakat dan Layanan yang Diselesaikan Tepat Waktu (%)	Kecamatan
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata LPM, LSM, LPM, PKK, Posyandu yang Aktif (%)	Kecamatan

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Program Prioritas Perangkat Daerah	Indikator Prog Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Pelaksana
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kelurahan yang bebas konflik sosial	Kecamatan
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Wajib KTP yang Terlayani (%)	OPD Pelaksana Fungsi Pencatatan Sipil
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	OPD Pelaksana Fungsi Komunikasi & Informatika
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase KIM masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	OPD Pelaksana Fungsi Komunikasi & Informatika
			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Lembaga Pendidikan yang Berizin	OPD Pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Apotek, Toko Obat dan Alat Kesehatan, serta Usaha TTM & TTU dan Usaha Lain yang Memenuhi Syarat Kesehatan (%)	OPD Pelaksana Urusan Pem. Bidang Kesehatan
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio Dokter Per Satuan Puskesmas (Orang/Puskesmas)	OPD Pelaksana Urusan Pem. Bidang Kesehatan
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Izin tentang Lingkungan yang Diproses Tepat Waktu (%)	OPD Pelaksana Fungsi Lingkungan Hidup
			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Usaha Simpan Pinjam yang Berizin	OPD Pelaksana Fungsi Koperasi & UMKM
			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Usaha Pertanian yang Berizin	OPD Pelaksana Fungsi Pertanian

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Program Prioritas Perangkat Daerah	Indikator Prog Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Pelaksana
			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	PersentaseI Unit Industri yang Berizin	OPD Pelaksana Fungsi Perindustrian
			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase Penyelesaian Ijin Lokasi Tanah Negara (%)	OPD Pelaksana Fungsi Pertanian
			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Penyelesaian Subjek Ganti Kerugian Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah	OPD Pelaksana Fungsi Pertanian
			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Persentase Penyelesaian Izin Lokasi (Privat) (%)	OPD Pelaksana Fungsi Pertanian
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Kwartir Pramuka yang Aktif	OPD Pelaksana Fungsi Kepemudaaan
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Jumlah Inovasi Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Sosial dan Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan, dan Teknologi yang Diwujudkan	OPD Pelaksana Fungsi Penelitian & pengembangan
			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	OPD Pelaksana Fungsi Ketahanan Pangan
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Jumlah Sistem Data Gender dan Anak yang Berfungsi Baik	OPD Pelaksana Fungsi PPPA
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Angka Tngkat Pemenuhan Indikator Kota Layak Anak	OPD Pelaksana Fungsi PPPA
			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Luas Taman Makam Pahlawan yang Dikelola (Ha)	OPD Pelaksana Fungsi Sosial
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	OPD Pelaksana Fungsi Kependudukan
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah Sistem Informasi Kependudukan yang Berfungsi Baik	OPD Pelaksana Fungsi Kependudukan
			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penyelesaian Kasus Tanah Negara (%)	OPD Pelaksana Fungsi Pertanian
			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM	Persentase Penetapan Objek Redistribusi Tanah	OPD Pelaksana Fungsi Pertanian

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Program Prioritas Perangkat Daerah	Indikator Prog Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Pelaksana
			TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Angka Pertumbuhan Organisasi Kemasyarakatan yang Terdaftar	OPD Pelaksana Fungsi Kesatuan Bangsa
			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	OPD Pelaksana Fungsi Kesatuan Bangsa
			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Cakupan Lembaga atau Organisasi yang Mendapatkan Pendidikan Politik	OPD Pelaksana Fungsi Kesatuan Bangsa
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Prolegda yang Ditetapkan Menjadi Perda	Setwan
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil yang Tersertifikasi dan Teregistrasi (%/Thn)	OPD Pelaksana Fungsi Perumahan & Pemukiman
			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Jumlah Kasus Korban Tindak Kekerasan Migran yang Diselesaikan (%)	OPD Pelaksanaan PPPA
			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Wilayah Rawan Konflik yang Dibina (%)	OPD Pelaksana Fungsi Kesatuan Bangsa
			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Aktif	OPD Pelaksana Fungsi Lingkungan Hidup

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Program Prioritas Perangkat Daerah	Indikator Prog Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Pelaksana
			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu	OPD Pelaksana Fungsi Lingkungan Hidup
Pemulihan Ekonomi dan Produktifitas Daerah (5)	Meningkatnya Kesempatan Berusaha dan Kualitas Tenaga Kerja (S.9)	PROGRAM PENYEDIAAN LAPANGAN KERJA DAN USAHA SERTA PENINGKATAN KUALITAS TENAGA KERJA (PP10)	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%)	OPD Penyelenggara Urusan Bidang Tenaga Kerja
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) (%)	OPD Penyelenggara Urusan Bidang Tenaga Kerja
			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja (%)	OPD Penyelenggara Urusan Bidang Tenaga Kerja
			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja (Per 100 Juta Nilai PMDN)	OPD Penyelenggara Urusan Bidang Penanaman Modal
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Nilai Investasi yang Masuk per Tahun (%/Thn)	OPD Penyelenggara Urusan Bidang Penanaman Modal
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	OPD Penyelenggara Urusan Bidang Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Tingkat Pertumbuhan Jumlah Pelaku Usaha Pariwisata & Ekonomi Kreatif Daerah (%)	OPD Penyelenggara Urusan Bidang Pariwisata
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SANGGUP KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	OPD Penyelenggara Urusan Bidang Kepemudaan
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (%)	OPD Penyelenggara Urusan Bidang Koperasi dan UMKM

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Program Prioritas Perangkat Daerah	Indikator Prog Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Pelaksana
			PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	OPD Penyelenggara Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	OPD Penyelenggara Urusan Bidang Pertanahan
Pemulihan Ekonomi dan Produktifitas Daerah (5)	Meningkatnya Produksi dan Produktifitas (S 10)	PROGRAM PENGEMBANGAN PRODUKSI DAN PRODUKTIFITAS DAERAH (PP11)	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro yang meningkat menjadi Usaha Kecil (%/Tahun)	OPD Penyelenggara Urusan Bidang Koperasi dan UMKM
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Angka Persentase Koperasi yang Aktif (%/Thn)	OPD Penyelenggara Urusan Bidang Koperasi dan UMKM
			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi yang Sehat (%/Thn)	OPD Penyelenggara Urusan Bidang Koperasi dan UMKM
			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang Meningkatkan Kualitasnya	OPD Penyelenggara Urusan Bidang Koperasi dan UMKM
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton/Thn)	OPD Penyelenggara Urusan Perikanan
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton/Thn)	OPD Penyelenggara Urusan Perikanan
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan (Ton/Thn)	OPD Penyelenggara Urusan Perikanan
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Total Angka Populasi Ternak (Ekor/Tahun)	OPD Penyelenggara Urusan Pertanian

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Program Prioritas Perangkat Daerah	Indikator Prog Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Pelaksana
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Lahan Sawah ber Indeks Pertanaman (IP) diatas 3	OPD Penyelenggara Urusan Pertanian
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelompok Tani yang Mampu Meningkatkan Produksi/Produktifitasnya	OPD Penyelenggara Urusan Pertanian
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	% Luas Lahan Pertanian yang Gagal Panen/Gagal Tanam (Ha/Thn)	OPD Penyelenggara Urusan Pertanian
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	OPD Penyelenggara Urusan Pertanian
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Jumlah Kelompok Tani yang Memanfaatkan Infrastruktur Ketahanan Pangan (Kelompok)	OPD Penyelenggara Urusan Pangan
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Peningkatan Jumlah Retribusi dari Pasar (%/Tahun)	OPD Penyelenggara Urusan Perdagangan
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat ukur,takar,timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	OPD Penyelenggara Urusan Perdagangan
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Pelaku Usaha Produk lokal Yang Masuk Pasar	OPD Penyelenggara Urusan Perdagangan
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	% Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	OPD Penyelenggara Urusan Perindustrian
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Tingkat produktivitas tenaga kerja	OPD Penyelenggara Urusan Bidang Tenaga Kerja

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Program Prioritas Perangkat Daerah	Indikator Prog Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Pelaksana
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Tingkat Kesesuaian Realisasi Pendapatan Daerah dengan Target Pendapatan Daerah (%/Thn)	OPD Penyelenggara Urusan Keuangan
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Angka Pertumbuhan Jumlah Investor di Daerah (%)	OPD Penyelenggara Urusan Penanaman Modal
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Investor dan Penanam Modal di Daerah yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	OPD Penyelenggara Urusan Penanaman Modal
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Industri Kecil Menengah dan Perusahaan di Kawasan Industri Kota Palopo yang Datanya Masuk dalam SII Nasional	OPD Penyelenggara Urusan Perindustrian
Pemulihan Ekonomi dan Produktifitas Daerah (5)	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam perekonomian daerah (S.11)	PROGRAM PENGEMBANGAN PARIWISATA, EKRAF DAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG (PP12)	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Luas Destinasi Wisata yang Ditangani (Ha)	OPD Pelaksanan Urusan Parwisata & Ekraf
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Angka Kunjungan Wisatawan (%/Tahun)	OPD Pelaksanan Urusan Parwisata & Ekraf
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Pelaku Usaha Ekraf Binaan yang Aktif Berusaha (%)	OPD Pelaksanan Urusan Parwisata & Ekraf
			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase sekolah binaan yang berpredikat adiwiyata	OPD Pelaksanan Urusan Lingkungan Hidup

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Program Prioritas Perangkat Daerah	Indikator Prog Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Pelaksana
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Tingkat Partisipasi Kelompok Budaya Binaan dalam Iven Kepariwisata Daerah	OPD Pelaksanan Urusan Kebudayaan
			PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian TRADISIONAL	Persentase Kelompok Kesenian Masyarakat yang Aktif Berpartisipasi dalam Event Kepariwisata Daerah	OPD Pelaksanan Urusan Kebudayaan
			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Jumlah Iven Pameran Sejarah yang Dilaksanakan (Kali/Tahun)	OPD Pelaksanan Urusan Kebudayaan
			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Luas Lokasi Cagar Budaya yang Dikelola (Ha)	OPD Pelaksanan Urusan Kebudayaan
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah Event Olahraga yang Dilaksanan untuk Mendukung Kepariwisata (Kali/Tahun)	OPD Pelaksanan Urusan Keolahragaan
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Usaha kepariwisataan dan ekraf yang tergabung dalam koperasi (%)	OPD Pelaksanan Urusan Koperasi & UMKM
			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah Event Pameran Naskah Kuno yang Dilaksanakan (Kali/Tahun)	OPD Pelaksanan Urusan Perpustakaan

4.5. Dukungan Program Pembangunan Daerah Terhadap Prioritas Nasional Tahun 2022

Prioritas Nasional 2022	Program Pembangunan Daerah 2022 (Kota Palopo)
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan (1)	PROGRAM PENYEDIAAN LAPANGAN KERJA DAN USAHA SERTA PENINGKATAN KUALITAS TENAGA KERJA (PP10) PROGRAM PENGEMBANGAN PRODUKSI DAN PRODUKTIFITAS DAERAH (PP11) PROGRAM PENGEMBANGAN PARIWISATA, EKRAF DAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG (PP12)
Pengembangan Wilayah Untuk Pengurangan Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (2)	PROGRAM PENINGKATAN INFRASTRUKTUR DAERAH (PP5)
Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing (3)	PROGRAM PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS PENDIDIKAN (PP 1) PROGRAM PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS KESEHATAN (PP2) PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KESETARAAN (PP3)
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (4)	PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN REFORMASI BIROKRASI (PP7) PROGRAM PENGEMBANGAN LAYANAN NON DASAR, INOVASI DAERAH DAN PARTISIPASI PUBLIK (PP9)
Memperkuat Infrastruktur untuk ekonomi dan Pelayanan Dasar (5)	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMUKIMAN DAN HUNIAN LAYAK (PP4) PROGRAM PEMENUHAN LAYANAN DASAR MASYARAKAT (PP8)
Membangun Lingkungan Hidup Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim (6)	PROGRAM PENGELOLAAN KUALITAS TATA RUANG, SUMBER DAYA AIR DAN PERSAMPAHAN (PP6)
Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Layanan Publik (7)	PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN REFORMASI BIROKRASI (PP7) PROGRAM PENGEMBANGAN LAYANAN NON DASAR, INOVASI DAERAH DAN PARTISIPASI PUBLIK (PP9)

4.6. Dukungan Program Pembangunan Daerah Kota Palopo Terhadap Sasaran Pembangunan Provinsi Sulsel

Program Pembangunan Daerah Kota Palopo 2022	Indikator Program Pembangunan Daerah	Target Kota Palopo 2022	Sasaran Pembangunan Sulsel
PROGRAM PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS PENDIDIKAN (PP 1)	Persentase Rata-Rata Angka Putus Sekolah Pendidikan Dasar (%) Angka Melek Huruf	0 100	Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Pendidikan

Program Pembangunan Daerah Kota Palopo 2022	Indikator Program Pembangunan Daerah	Target Kota Palopo 2022	Sasaran Pembangunan Sulsel
PROGRAM PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS KESEHATAN (PP2)	Tingkat Pemenuhan Universal Health Coverage (UHC) (%)	100	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
	Angka Kematian Ibu (per 100,000 kelahiran hidup)	20	
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	0.4	
PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KESETARAAN (PP3)	Paritas Daya Beli	13,320	Menurunnya kesenjangan Pendapatan antar lapisan masyarakat
	Indeks Pengeluaran	78	
	Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (%)	26	
	Tingkat Pertumbuhan Penduduk (%)	2	
	Rasio ketergantungan	47	
PROGRAM PENINGKATAN INFRASTRUKTUR DAERAH (PP5)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	78	Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam pembangunan Meningkatkan aksesibilitas infrastruktur wilayah
	Proporsi Panjang Jalan yang Berkondisi Baik (%)	71	
	Rasio Ketersediaan/Kerapatan Jalan per Luas Wilayah (Km/Km2)	2.1	
	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Penduduk (Km/Per 10.000 Jiwa)	30	
	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan (Km/1000 Unit Kendaraan)	15	
	Angka Persentase Pemukiman yang Tertata (%)	93.5	
	Jumlah Kejadian Banjir Kategori Bencana (Kali/Tahun)	0	
PROGRAM PENGEMBANGAN PEMUKIMAN DAN HUNIAN LAYAK (PP4)	Jumlah Kelurahan yang Terdampak Banjir (Keluaraan/Tahun)	3	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup sertakemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
	Luas Ruang Terbuka Hijau Publik yang dikelola/ditangani (Ha)	4224	
	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R (%)	4.3	
	Proporsi Perangkat Daerah yang Nilai LHE SAKIPnya Diatas 50 Poin (%)	45	
PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN			Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah

Program Pembangunan Daerah Kota Palopo 2022	Indikator Program Pembangunan Daerah	Target Kota Palopo 2022	Sasaran Pembangunan Sulsel
REFORMASI BIROKRASI (PP7)	Proporsi Perangkat Daerah yang memiliki nilai LHE PMPRB Diatas 50 Poin (%)	50	
	Rata-Rata Indeks Profesionalisme Aparatur (Point)	52	
PROGRAM PEMENUHAN LAYANAN DASAR MASYARAKAT (PP8)	Rata-rata Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Kota (%)	100	
PROGRAM PENGEMBANGAN LAYANAN NON DASAR, INOVASI DAERAH DAN PARTISIPASI PUBLIK (PP9)	Proporsi Perangkat Daerah yang Telah Melaksanakan Layanan Publik Ber SOP (%)	70	Berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahandan pelayanan public
	Angka Proporsi Perangkat Daerah yang Menyusun Inovasi Layanan Publik (%)	4	Meningkatnya aktualisas nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan masyarakat
	Angka Rata-Rata Pemenuhan Usulan Prioritas Per Kecamatan yang sampai pada dokumen APBD (%)	29	
PROGRAM PENYEDIAAN LAPANGAN KERJA DAN USAHA SERTA PENINGKATAN KUALITAS TENAGA KERJA (PP10)	Rasio Penduduk yang Bekerja	91.43	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor unggulan daerah
PROGRAM PENGEMBANGAN PRODUKSI DAN PRODUKTIFITAS DAERAH (PP11)	Nilai PDRB ADHB Kota Palopo (Trilyun Rupiah)	8,604.23	Meningkatnya hilirisasi ekonomi sektor unggulan daerah
PROGRAM PENGEMBANGAN PARIWISATA, EKRAF DAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG (PP12)	Nilai PAD dari ekonomi kreatif daerah (Rupiah)	6.8 Milyar	
	Nilai PAD sektor pariwisata (Rupiah)	9 Milyar	

4.7. Dukungan Prioritas Pembangunan daerah terhadap Prioritas Nasional Tahun 2022

Prioritas Nasional 2022	Prioritas Sulsel 2022	Prioritas Kota Palopo 2022
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan (1)	Percepatan pemulihan ekonomi dan perlindungan social	Pemulihan Ekonomi dan Produktifitas Daerah (5)

Prioritas Nasional 2022	Prioritas Sulsel 2022	Prioritas Kota Palopo 2022
Mengembangkan Wilayah Untuk Pengurangan Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (2)	Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur wilayah untuk akselerasi pertumbuhan	Pengembangan Wilayah dan Daya Saing Infrastruktur Kota (2)
Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing (3)	Percepatan pembangunan Sumber daya manusia yang berkarakter dan berbudaya	Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat (1)
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (4)	Percepatan pembangunan Sumber daya manusia yang berkarakter dan berbudaya	Pengembangan Layanan Publik, Inovasi Daerah dan Reformasi Birokrasi (4)
Membangun Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan ekonomi dan Pelayanan Dasar (5)	Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur wilayah untuk akselerasi pertumbuhan	Pemulihan Ekonomi dan Produktifitas Daerah (5)
Lingkungan Hidup Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim (6)	Pengelolaan komoditas unggulan berbasis sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup	Pemantapan Pengelolaan Ruang, Pencegahan dan Penanganan Bencana Alam maupun Non Alam (3)
Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Layanan Publik (7)	Pemantapan Reformasi Birokrasi	Pengembangan Layanan Publik, Inovasi Daerah dan Reformasi Birokrasi (4)

4.8. Dukungan Sasaran RKPD terhadap Sasaran RKP Tahun 2022

Sasaran RKP 2022	Sasaran RKPD Sulsel 2022	Sasaran RKPD Kota Palopo 2022
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Pendidikan (S.6) Indeks Pendidikan : 66.39	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat (S.1) <i>Indeks Pendidikan (Poin) 78.48</i>
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (S.7) Indeks Kesehatan : 77.90	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (S.2) <i>Indeks Kesehatan (Poin) 78.58</i>
	Meningkatnya Keberdayaan Perempuan dalam Pembangunan (S8) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) : 76.36	
Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Menurunnya Kesenjangan Pendapatan Antar Lapisan Masyarakat (S5) Indeks Gini : 0.398	Meningkatnya derajat kesejahteraan sosial masyarakat (S.3) <i>Persentase Penduduk Miskin (%) : 6.28%</i>
		Meningkatnya kapasitas dan Layanan infrastruktur perkotaan (S.4) <i>Persentase Areal Kawasan Kumuh (%) : 1.57%</i>

Sasaran RKP 2022	Sasaran RKPD Sulsel 2022	Sasaran RKPD Kota Palopo 2022
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya aksesibilitas Infrastruktur (S3) Indeks Layanan Infrastruktur : 83.38	Meningkatnya Konektifitas dan Aksesibilitas Wilayah serta Infrastruktur Strategis Daerah (S.5) Indeks Layanan Jalan 68.15
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim (S10) Potensi Penurunan Emisi GRK : 1.198 Juta Ton CO2Eq)	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup (S.6) Luas Kawasan Terdampak Banjir (Ha) : 7 Ha Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau Publik : 80%
Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan (S1) Nilai SAKIP A (80-90)	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (S.7) Nilai Akuntabilitas Pemerintahan Daerah (Nilai) : 70
	Berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (S2) Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Publik : A	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S.8) Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik (Point) : 85
Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Unggulan Daerah (S4) Tingkat Pengangguran Terbuka : 6.95%	Meningkatnya Perluasan Kesempatan Berusaha dan Produktifitas Tenaga Kerja (S.9) Tingkat Pengangguran Terbuka (%) : 8.55 %
	Meningkatnya Hilirisasi Ekonomi Sektor Unggulan Daerah Produktifitas Total Daerah : 86.64 Juta/Tenaga Kerja	Meningkatnya Produksi dan Produktifitas (S 10) PDRB per kapita (Juta/Tahun) : 109.94
		Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam perekonomian daerah (S.11) Kontribusi PAD Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (%) : 6 Kontribusi PAD Ekonomi Kreatif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (%) : 3.8

4.9 Keterkaitan prioritas pembangunan dengan indikator kinerja utama pembangunan dalam Perubahan RPJMD Kota Palopo

Lima Prioritas pembangunan Kota Palopo memiliki keterkaitan dengan 18 indikator kinerja utama Pemerintah Kota Palopo. Berikut adalah penjelasan keterkaitan prioritas pembangunan dengan indikator kinerja utama Pemerintah Kota Palopo.

A. Pengembangan Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat

Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat diarahkan pada peningkatan indeks pembangunan manusia, yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Palopo yang terkait dengan prioritas pertama ini sebagaimana yang diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Prioritas	Indikator	Target 2022
Pengembangan Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (Point)	78.82
	Indeks Pendidikan (Poin)	78.48
	Indeks Kesehatan (poin)	78.58
	Persentase Penduduk Miskin (%)	6.28
	Pendapatan per Kapita (Juta/Kapita/Tahun ADHB)	43

B. Pengembangan Wilayah dan Daya Saing Infrastruktur Kota

Pengembangan wilayah dan daya saing infrastruktur kota diarahkan pada upaya pengurangan kawasan dan pencegahan kawasan pemukiman kumuh, meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Palopo yang terkait dengan prioritas kedua ini sebagaimana yang diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Prioritas	Indikator	Target 2022
Pengembangan Wilayah dan Daya Saing Infrastruktur Kota	Persentase Areal Kawasan Kumuh	1.57
	Indeks Layanan Jalan	68.15

C. Pemantapan Pengelolaan Ruang, Pencegahan dan Penanganan Bencana Alam maupun Non Alam

Pemantapan Pengelolaan Ruang, Pencegahan dan Penanganan Bencana Alam maupun Non Alam diarahkan pada upaya mengurangi luas wilayah terdampak banjir, dan meningkatkan kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau kota. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Palopo yang terkait dengan prioritas ketiga ini sebagaimana yang diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Prioritas	Indikator	Target 2022
Pemantapan Pengelolaan Ruang, Pencegahan dan penanganan Bencana alam maupun non alam	Luas Kawasan Terdampak Banjir (Ha)	7
	Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau Publik	80

D. Pengembangan Layanan Publik, Inovasi Daerah dan Reformasi Birokrasi

Pengembangan Layanan Publik, Inovasi Daerah dan Reformasi Birokrasi diarahkan pada upaya meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kualitas layanan publik melalui implementasi SAKIP, Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Palopo yang terkait dengan prioritas keempat ini sebagaimana yang diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Prioritas	Indikator	Target 2022
Pengembangan Layanan Publik, Inovasi daerah dan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	70
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	70
	Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Publik	85

E. Pemulihan Ekonomi dan Produktifitas Daerah

Pemulihan Ekonomi dan Produktifitas Daerah diarahkan pada upaya memulihkan investasi daerah, pemberdayaan dan pembinaan pelaku usaha, optimalisasi dan pemanfaatan platform ekonomi digital, Optimalisasi Platform Ekonomi Digital Pada Lapangan Usaha Transportasi, Jasa Komunikasi & UMKM. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Palopo yang terkait dengan prioritas keempat ini sebagaimana yang diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Prioritas	Indikator	Target 2022
Pemulihan Ekonomi dan Produktifitas Daerah	Pertumbuhan PDRB	4.68
	Tingkat Pengangguran Terbuka	8.55
	Produktifitas Total Daerah (Juta/Tenaga Kerja/Tahun)	109.94
	Kontribusi PAD Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (%)	6
	Kontribusi PAD Ekonomi Kreatif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (%)	3.8

4.10. Integrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Dukungan Prioritas dan Program Pembangunan Daerah Kota Palopo Tahun 2022 terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah sebagai berikut :

Tabel

Dukungan Prioritas Pembangunan dan Program Pembangunan Daerah Kota Palopo Tahun 2022 Terhadap TPB

No	Tujuan TPB	Prioritas Pembangunan Kota Palopo Tahun 2022	Program Pembangunan Daerah
1	Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun	Pengembangan Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS PENDIDIKAN (PP 1)
2	Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta	Pengembangan Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KESETARAAN (PP3)

No	Tujuan TPB	Prioritas Pembangunan Kota Palopo Tahun 2022	Program Pembangunan Daerah
	meningkatkan pertanian berkelanjutan		
		Pemulihan Ekonomi dan Produktifitas Daerah	PROGRAM PENGEMBANGAN PRODUKSI DAN PRODUKTIFITAS DAERAH (PP11)
3	Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.	Pengembangan Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS KESEHATAN (PP2)
		Pengembangan Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KESETARAAN (PP3)
		Pengembangan Layanan Publik, Inovasi Daerah dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PEMENUHAN LAYANAN DASAR MASYARAKAT (PP8)
4	Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.	Pengembangan Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS PENDIDIKAN (PP 1)
		Pengembangan Layanan Publik, Inovasi Daerah dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PEMENUHAN LAYANAN DASAR MASYARAKAT (PP8)
5	Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.	Pengembangan Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KESETARAAN (PP3)
6	Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.	Pemantapan Pengelolaan Ruang, Pencegahan dan Penanganan Bencana Alam maupun Non Alam	PROGRAM PENGELOLAAN KUALITAS TATA RUANG, SUMBER DAYA AIR DAN PERSAMPAHAN (PP6)
7	Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota
8	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua	Pemulihan Ekonomi dan Produktifitas Daerah	PROGRAM PENYEDIAAN LAPANGAN KERJA DAN USAHA SERTA PENINGKATAN KUALITAS TENAGA KERJA (PP10)
9	Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan	Pengembangan Wilayah dan Daya Saing Infrastruktur Kota	PROGRAM PENINGKATAN INFRASTRUKTUR DAERAH (PP5)

No	Tujuan TPB	Prioritas Pembangunan Kota Palopo Tahun 2022	Program Pembangunan Daerah
	berkelanjutan, serta mendorong inovasi		
		Pemulihan Ekonomi dan Produktifitas Daerah	PROGRAM PENGEMBANGAN PRODUKSI DAN PRODUKTIFITAS DAERAH (PP11)
		Pemulihan Ekonomi dan Produktifitas Daerah	PROGRAM PENGEMBANGAN PARIWISATA, EKRAF DAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG (PP12)
		Pengembangan Layanan Publik, Inovasi Daerah dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENGEMBANGAN LAYANAN NON DASAR, INOVASI DAERAH DAN PARTISIPASI PUBLIK (PP9)
10	Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota
11	Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan	Pengembangan Wilayah dan Daya Saing Infrastruktur Kota	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMUKIMAN DAN HUNIAN LAYAK (PP4)
		Pemantapan Pengelolaan Ruang, Pencegahan dan Penanganan Bencana Alam maupun Non Alam	PROGRAM PENINGKATAN INFRASTRUKTUR DAERAH (PP5)
12	Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan	Pemulihan Ekonomi dan Produktifitas Daerah	PROGRAM PENGEMBANGAN PRODUKSI DAN PRODUKTIFITAS DAERAH (PP11)
13	Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya	Pemantapan Pengelolaan Ruang, Pencegahan dan Penanganan Bencana Alam maupun Non Alam	PROGRAM PENGELOLAAN KUALITAS TATA RUANG, SUMBER DAYA AIR DAN PERSAMPAHAN (PP6)
14	Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan.	Pemulihan Ekonomi dan Produktifitas Daerah	PROGRAM PENGEMBANGAN PRODUKSI DAN PRODUKTIFITAS DAERAH (PP11)
15	Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.	Pemantapan Pengelolaan Ruang, Pencegahan dan Penanganan Bencana Alam maupun Non Alam	PROGRAM PENGELOLAAN KUALITAS TATA RUANG, SUMBER DAYA AIR DAN PERSAMPAHAN (PP6)

No	Tujuan TPB	Prioritas Pembangunan Kota Palopo Tahun 2022	Program Pembangunan Daerah
16	Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.	Pengembangan Layanan Publik, Inovasi Daerah dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN REFORMASI BIROKRASI (PP7)
			PROGRAM PENGEMBANGAN LAYANAN NON DASAR, INOVASI DAERAH DAN PARTISIPASI PUBLIK (PP9)
17	Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.	Pengembangan Layanan Publik, Inovasi Daerah dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN REFORMASI BIROKRASI (PP7)
			PROGRAM PENGEMBANGAN LAYANAN NON DASAR, INOVASI DAERAH DAN PARTISIPASI PUBLIK (PP9)

4.11 Integrasi dan Dukungan Terhadap Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Pengarusutamaan Tatakelola Pemerintahan Yang Baik di Kota Palopo ditekankan pada kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, sampai pada tingkat perangkat daerah, meningkatkan atau membaiknya transparansi, akuntabilitas, efektifitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Termasuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Ini juga mencakup bagaimana Pemerintah Kota Palopo mengoptimalkan ruang serta mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan, melalui sinergi 3 aktor utama yakni *Private Sector*, *Civil Society Sector* dan *Public Sector*. Dengan meningkatkan keterbukaan informasi dan komunikasi publik, Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan dan Peningkatan kualitas pelayanan publik. Penekanan pada pengarusutamaan ini pada aspek :

Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN

Melalui penegakan disiplin PNS di seluruh instansi pemerintah; penerapan pakta integritas bagi pejabat pemerintah; kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN); kebijakan antikorupsi; penyelenggaraan SPIP; pengembangan sistem e-procurement, pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK; peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara; serta pengembangan sistem pengaduan masyarakat.

Olehnya Pemerintah Kota Palopo melaksanakan :

1. Menegakkan dan mengimplementasikan sistem disiplin PNS di lingkungan instansi pemerintah, yang ditandai dengan meningkatnya persentase pelanggaran disiplin yang mendapatkan sanksi;
2. Mengembangkan dan menerapkan pakta integritas di kalangan pejabat pemerintah;
3. Mewajibkan pejabat untuk menyampaikan LHKPN;

4. Mewajibkan pelaporan gratifikasi;
5. Meningkatkan penerapan SPIP sesuai dengan pedoman;
6. Meningkatkan penerapan pelaksanaan pengadaan dengan menggunakan e-procurement;
7. Meningkatkan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan BPK;
8. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran dan pelaporannya;
9. Meningkatkan penerapan/implementasi sistem pengaduan masyarakat, yang ditandai dengan meningkatnya persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.

Program Pembangunan Daerahnya adalah :

**"PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN REFORMASI
BIROKRASI (PP7)"**

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dilaksanakan melalui penerapan standar pelayanan pada unit penyelenggara pelayanan publik; penerapan maklumat pelayanan; penerapan pelayanan terpadu satu pintu; penerapan manajemen pengaduan; percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik; serta pelaksanaan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja pelayanan publik.

Pemerintah Kota Palopo melaksanakan :

1. Meningkatkan penerapan standar pelayanan pada unit penyelenggara pelayanan publik;
2. Meningkatkan penerapan maklumat pelayanan pada unit pelayanan publik;
3. Memperluas penerapan pelayanan terpadu satu pintu di lingkungan Pemkot Palopo
4. Meningkatkan penerapan manajemen pengaduan pada unit pelayanan publik di lingkungan OPD Palopo
5. Menyusun dan melaksanakan rencana peningkatan kualitas pelayanan publik;
6. Menyusun dan mengimplementasikan sistem evaluasi kinerja pelayanan publik pada unit pelayanan di lingkungan Pemkot Palopo, yang ditandai dengan meningkatnya unit penyelenggara pelayanan publik yang dinilai baik.

Program Pembangunan Daerahnya adalah :

**"PROGRAM PENGEMBANGAN LAYANAN NON DASAR, INOVASI DAERAH DAN
PARTISIPASI PUBLIK (PP9)"**

Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

Dilaksanakan melalui penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan instansi pemerintah; pemantapan kualitas manajemen SDM; pengembangan dan penerapan e-government; Pengembangan sistem kearsipan dan dokumentasi berbasis TIK; serta penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja aparatur.

Pemerintah Kota Palopo melaksanakan :

1. Meningkatkan upaya restrukturisasi organisasi dan tata kerja instansi pemerintah;
2. Menyusun SOP di tiap Perangkat Daerah sesuai dengan proses bisnis yang lebih sederhana;
3. Meningkatkan kualitas manajemen SDM, yang ditandai dengan penyediaan dan pengimplementasian sistem rekrutmen pegawai yang transparan dan berbasis merit/kompetensi, sistem penilaian kinerja yang terukur, sistem promosi dan penempatan dalam jabatan struktural yang terbuka, transparan, berbasis merit/kompetensi, sistem diklat berbasis merit, dan kompetensi;
4. Telah Menyusun rencana penerapan e-government;
5. Menyediakan dan pengimplementasian sistem kearsipan dan dokumentasi berbasis TIK;
6. Meningkatkan kualitas penerapan SAKIP.

Program Pembangunan Daerahnya adalah :

PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN REFORMASI BIROKRASI (PP7)

4.12 Integrasi dan Dukungan Terhadap Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan gender dalam pembangunan Kota Palopo merupakan strategi yang digunakan untuk mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mendapatkan manfaat pembangunan, serta meningkatkan partisipasi dan mengontrol proses pembangunan. Penerapan pengarusutamaan gender ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan publik yang lebih efektif untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh masyarakat Kota Palopo, baik laki-laki maupun perempuan, tua muda, anak-remaja-dewasa, termasuk kaum difabel dan warga minoritas lain (masyarakat miskin).

Pengarusutamaan gender ini dilaksanakan melalui :

1. Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan
2. Meningkatkan perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan

Olehnya Pemerintah Kota Palopo akan melaksanakan penguatan pada :

1. Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan, antara lain melalui (a) penyediaan layanan pendidikan masyarakat; (b) pemerataan guru yang proporsional untuk seluruh jenjang pendidikan; (c) pembinaan pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi; (d) penyehatan lingkungan; dan (e) pembinaan dan pengembangan budaya politik;
2. Meningkatkan perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan, antara lain melalui (a) penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan; (b) pembinaan penempatan dan perlindungan tenaga kerja perempuan; dan (c) pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, antara lain melalui (a) penyediaan data pendidikan untuk perumusan kebijakan daerah; (b) penyusunan dan harmonisasi kebijakan penyusunan data gender; dan (c) optimalisasi penegakan peraturan daerah Kota Palopo No 3 Tahun 2017 tentang Pengarusutamaan Gender.

Program Pembangunan Daerahnya adalah :

PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KESETARAAN (PP3)

4.13. Integrasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Gambaran Dukungan Prioritas Pembangunan Kota Palopo Tahun 2022 Terhadap Pencapaian Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut :

Standar Pelayanan Minimal	Prioritas Kota Palopo
Urusan Pendidikan	Pengembangan Layanan Publik, Inovasi Daerah dan Reformasi Birokrasi
Urusan Kesehatan	
Urusan Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	
Urusan Perumahan & Pemukiman	
Urusan Sosial	
Urusan Trantibbumlinmas	

Standar pelayanan minimal pada tahun 2022 tetap menjadi prioritas Pemerintah Kota Palopo. Prioritas pembangunan untuk mencapai sasaran SPM adalah "Pengembangan Layanan Publik, Inovasi Daerah dan Reformasi Birokrasi", yang menjadi prioritas ke empat dalam RKPD Tahun 2022. Target pencapaian SPM Kota Palopo Tahun 2022 diuraikan dalam Bab VI RKPD 2022.

4.14. Inovasi Daerah Tahun 2020

Untuk meningkatkan motivasi berinovasi, Pemerintah Kota Palopo juga akan melaksanakan lomba inovasi tingkat perangkat daerah dan menjadikan diklat kepemimpinan sebagai laboratorium lahirnya agen perubahan dan inovasi pelayanan melalui proyek perubahan. Beberapa inovasi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Palopo adalah sebagai berikut :

No	Nama Inovasi	Gambaran Inovasi
1	"AKULO"	Atau Ayam Kampung Unggulan Palopo Inovasi ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan Kota Palopo (UPTD Mancani). Bibit ayam kampung yang awalnya hanya bisa dipasok dari Pulau Jawa dengan harga yang lebih tinggi, kini sudah mampu disediakan di Kota Palopo, dengan kualitas dan harga yang lebih bersaing. Akhir yang ingin diwujudkan oleh inovasi ini adalah meningkatkan pendapatan masyarakat terutama para peternak. Pembudidayaan ternak kampung oleh masyarakat berpotensi untuk bergeser dari skala konsumsi menjadi skala bisnis. Karena bibit ayam kampung unggulan sepanjang tahun sudah tersedia di Kota Palopo dengan harga dan kualitas boleh diadu.
2	"SIBIRU LAUT"	Atau Optimasi Bio Stimulan Inovasi ini dilaksanakan Dinas Perikanan Kota Palopo sebagai upaya mendiversifikasi rumput laut menjadi produk lain yang bernilai lebih tinggi di saat harga rumput laut tidak lagi kompetitif. Sehingga para petani rumput laut tetap mampu mempertahankan bahkan meningkatkan pendapatannya. Diversifikasi rumput laut ini mengubahnya menjadi pupuk biostimulai dengan nilai atau harga yang lebih tinggi dari harga rumput laut. Hasil dari biostimulan terhadap produktifitas tanaman juga lebih tinggi, dengan harga yang sangat kompetitif dengan harga pupuk sejenis di pasaran. Pada uji lapangan oleh puluhan kepala keluarga, produktifitas tanaman yang menggunakan biostimulan sangat meningkat. Inovasi ini dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Kota Palopo. Dengan inovasi ini, Pemerintah Kota Palopo ingin memastikan akses pangan masyarakat terutama terhadap warga miskin dan berpenghasilan rendah terhadap kebutuhan sandang, tetap terjaga, meskipun di masa pandemic daya beli masyarakat terus menurun. Upaya mendekatkan akses pangan ke masyarakat terutama kategori miskin ini dilakukan dengan menyediakan barang-barang kebutuhan pokok dengan harga yang relative lebih rendah dibandingkan dengan harga pasar.
3	"BUJANG MAPAN"	Adalah Inovasi yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Kota Palopo dimasa pandemic covid 19 dengan tujuan mengurangi kerumunan pasien dan kunjungan ke Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Dengan demikian penularan covid
4	"KADER PINTAR BU KB"	

No	Nama Inovasi	Gambaran Inovasi
		19 bisa ditekan. Untuk menjaga jangkauan layanan kesehatan, para petugas kesehatan juga melaksanakan kunjungan secara door to door memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat di masa pandemic termasuk mengoptimalisasi peran posyandu. Sehingga mengurangi antrian dan kerumunan pasien saat berkunjung ke fasilitas kesehatan.
5	 "CAPERINDU"	Adalah singkatan dari Catatan Sipil Perkawinan dan Identifikasi Kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo. Sebagai bentuk solusi atas cukup banyaknya perkawinan (pemberkatan nikah) di gereja yang tidak tercatat dalam system informasi kependudukan. Inovasi ini dilaksanakan dengan menggandeng sejumlah gereja yang ada di Kota Palopo, sehingga memastikan pasangan yang melaksanakan nikah di gereja, juga mendapatkan pelayanan yang baik dengan tercatat di system informasi kependudukan Kota Palopo.
6	 "SI CAKEP"	Adalah Sistem Integrasi Catatan Sipil dan Administrasi Kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo berkolaborasi dengan sejumlah RSUD di Kota Palopo. Pelayanan yang dihasilkan bahwa setiap data kelahiran yang terjadi di sejumlah Rumah Sakit di Kota Palopo secara real time akan langsung terintegrasi ke data base Disdukcapil, sehingga pembuatan akta kelahiran pun bisa diproses, jika pasien merupakan masyarakat Kota Palopo. Ini akan memperpendek waktu pengurusan akta kelahiran.
7	 "PATEN"	Adalah Penerbitan Akta Kematian yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan berkolaborasi dengan para RT dan RW di Kota Palopo. Informasi dan layanan penerbitan akta kematian secara real time bisa diproses dan dilanjutkan dengan dukungan inovasi ini, dimana para RT RW bekerjasama dengan Disdukcapil.

BAB. V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Kerangka Pendanaan

Sebagaimana tertuang dalam Bab 3 tentang Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Keuangan Daerah, pendapatan daerah tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp.**1.046,921,373,130,-** yang bersumber dari PAD sebesar Rp. **196,585,372,483** dan pendapatan transfer sebesar Rp. **740,165,164,027,-** serta Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp. **110,170,836,620,00**. Pendapatan daerah tersebut akan digunakan untuk membiayai serangkaian program/kegiatan pembangunan dalam rencana belanja daerah tahun **2022**, dengan jumlah belanja Rp. **1,063,318,741,307**

Belanja daerah tahun 2022 disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis money follow program priority, memperhatikan prioritas pembangunan daerah dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan tahun 2022, serta dilakukan secara efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan berkeadilan.

Belanja daerah tahun 2022 antara lain diarahkan untuk pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat, penyelenggaraan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, urusan wajib tidak terkait pelayanan dasar dan urusan pilihan sesuai dengan potensi daerah, serta membiayai kegiatan-kegiatan strategis yang menjadi prioritas pembangunan Kota Palopo Tahun 2022.

Struktur Belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2022 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibagi ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer, dengan rincian belanja berikut :

Tabel 5.1
Proyeksi Belanja Pemerintah Kota Palopo
Tahun 2022

No	Uraian	Tahun 2022
5	BELANJA DAERAH	1,063,318,741,307
05.01	BELANJA OPERASI	786,142,169,700
05.01.01	Belanja Pegawai	473,691,775,076
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	292,950,394,624
05.01.03	Belanja Bunga	2,000,000,000
05.01.04	Belanja Subsidi	-
05.01.05	Belanja Hibah	16,000,000,000
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	1,500,000,000
05.02	BELANJA MODAL	272,676,571,607
05.03	BELANJA TIDAK TERDUGA	4,500,000,000
05.04	BELANJA TRANSFER	

5.2 Program Prioritas Pembangunan Daerah

Pada tahun 2022, Pemerintah Kota Palopo akan melaksanakan sebanyak 12 Program Prioritas Pembangunan Daerah. Masing-masing program prioritas pembangunan daerah berisi lebih dari satu perangkat daerah. Berikut adalah uraian table program prioitas pembangunan daerah dan program prioritas perangkat daerah beserta indicator dan target anggaran pada tahun 2022 :

Tabel 5.2
Prioritas dan Program Pembangunan Daerah
Kota Palopo Tahun 2022

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Program Pembangunan/Program Prioritas Perangkat Daerah'	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Target Anggaran 2022	Fungsi Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Pengembangan Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat (1)	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat (S.1)	PROGRAM PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS PENDIDIKAN (PP 1)	Angka Rata-Rata Putus Sekolah Pendidikan Dasar (%)	0	65,488,731,725	
			Angka Melek Huruf (%)	100		
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar	100	65,200,000,000	OPD Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Sekolah yang Menerapkan Kurikulum Lokal (%)	50	50,000,000	OPD Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio Guru Murid sekolah pendidikan dasar (per 10.000)	728	63,930,275	OPD Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan di Palopo yang Aktif (%)	16.70	174,801,450	OPD Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
Pengembangan Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat (1)	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (S.2)	PROGRAM PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS KESEHATAN (PP2)	Angka Partisipasi Penduduk dalam Jaminan Kesehatan Nasional (%)	100	219,228,752,034	
			Angka Kematian Ibu (per 100,000 kelahiran hidup)	20		
			Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	0.4		
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Pemenuhan Universal Helath Coverage (%)	100.00	212,492,227,181	OPD Pelaksana Urusan Pem. Bidang Kesehatan (& RSUD)
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga yang Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS (%)	41.00	766,000,000	OPD Pelaksana Urusan Pem. Bidang Kesehatan

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Program Pembangunan/Program Prioritas Perangkat Daerah'	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Target Anggaran 2022	Fungsi Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase PUS yang Ber KB (%)	82	5,970,524,853	Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana
Pengembangan Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat (1)	Meningkatnya derajat kesejahteraan sosial masyarakat (S.3)	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KESETARAAN (PP3)	Paritas Daya Beli	13,320	9,469,607,213	
			Indeks Pengeluaran	78.38		
			Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (%)	25.74		
			Tingkat Pertumbuhan Penduduk (%)	2.28		
			Rasio ketergantungan	46.70		
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	78.20		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Rumah Tangga/Keluarga Miskin yang Layanan Mendapatkan Pemberdayaan Sosial	64	182,655,000	Sosial
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Rumah Tangga/Keluarga Miskin yang Mendapatkan Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	56	5,398,658,600	Sosial
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Peningkatan Keluarga Sejahtera I yang Meningkat Menjadi Keluarga Sejahtera (%)	1	25,276,500	Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2	35,875,000	Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Rumah Tangga/Keluarga Miskin yang Mendapatkan Pembinaan Kualitas Keluarga	87	90,000,000	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase keluarga miskin yang telah memiliki rumah layak huni	98.10	2,239,866,338	Perumahan
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Lokasi Rawan Pangan yang Melaksanakan Diversifikasi Pangan (%)	28	643,266,425	Pangan
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Jumlah Lokasi Rawan pangan Kota Palopo (Kelurahan)	5	78,566,250	Pangan

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Program Pembangunan/Program Prioritas Perangkat Daerah'	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Target Anggaran 2022	Fungsi Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Distributor Barang Bersubsidi , Bahan Pokok dan Penting Lainnya Yang Diawasi	100	402,000,000	Perdagangan
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Cakupan Keluarga Miskin yang Mendapatkan Edukasi (%)	2.00	134,443,100	Bakesbangpol
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase OPD yang Menyediakan Layanan Perlindungan Perempuan yang Terstandarisasi (%)	2	152,000,000	PP& PA
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Anak yang Diselesaikan (%)	100	87,000,000	PP& PA
Pengembangan Wilayah dan Daya Saing Infrastruktur Kota (2)	Meningkatnya kapasitas dan Layanan infrastruktur perkotaan (S.4)	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMUKIMAN DAN HUNIAN LAYAK (PP4)	Angka Persentase Pemukiman yang Tertata (%)	93.5	2,427,087,138	
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	0.60	1,200,000,000	OPD Penyelenggara Urusan Perumahan
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Jumlah Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas)	35	54,810,500	OPD Penyelenggara Urusan Perumahan
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Luas Permukiman yang Infrastrukturnya dikembangkan (Ha)	0.02	650,000,000	OPD Penyelenggara Urusan Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Ketaatan terhadap RTRW	55	417,734,138	OPD Penyelenggara Urusan Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
		PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase Pengelolaan Objek Tanah Kosong	50.00	8,500,000	OPD Penyelenggara Urusan Pertanahan

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Program Pembangunan/Program Prioritas Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Target Anggaran 2022	Fungsi Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Luas Kawasan Transmigrasi yang Difasilitasi Penetapannya	83.00	96,042,500	OPD Penyelenggara Urusan Transmigrasi
Pengembangan Wilayah dan Daya Saing Infrastruktur Kota (2)	Meningkatnya Konektifitas dan Aksesibilitas Wilayah serta Infrastruktur Strategis Daerah (S.5)	PROGRAM PENINGKATAN INFRASTRUKTUR DAERAH (PP5)	Proporsi Panjang Jalan yang Berkondisi Baik (%)	71.00	19,741,811,700	
			Rasio Ketersediaan/Kerapatan Jalan per Luas Wilayah (Km/Km2)	2.10		
			Rasio Panjang Jalan per Jumlah Penduduk (Km/Per 10.000 Jiwa)	30		
			Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan (Km/1000 Unit Kendaraan)	15		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proporsi Panjang Jalan yang Berkondisi Baik (%)	71	14,290,000,000	OPD Penyelenggara Urusan Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Layanan Angkutan Darat		1,562,879,700	OPD Penyelenggara Urusan Perhubungan
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Panjang Jalan Kewenangan Kota Palopo yang Dijangkau Penerangan Jalan Umum (%)		3,813,000,000	OPD Penyelenggara Urusan Lingkungan Hidup
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Usaha Pelayaran yang Berizin		75,932,000	OPD Penyelenggara Urusan Perhubungan
Pemantapan Pengelolaan Ruang, Pencegahan dan Penanganan Bencana Alam maupun Non Alam (3)	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup (S.6)	PROGRAM PENGELOLAAN KUALITAS TATA RUANG, SUMBER DAYA AIR DAN PERSAMPAHAN (PP6)	Jumlah Kejadian Banjir Kategori Bencana (Kali/Tahun)	0	110,506,495,733	
			Jumlah Kelurahan yang Terdampak Banjir (Kelurahan/Tahun)	3		
			Luas Ruang Terbuka Hijau Publik yang dikelola/ditangani (Ha)	4224		
			Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R (%)	4.3		

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Program Pembangunan/Program Prioritas Perangkat Daerah'	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Target Anggaran 2022	Fungsi Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Luas Wilayah Rawan Banjir dan Kawasan Produktif yang Sarana Prasarana Sumber Daya Airnya Ditangani (Ha)	65	1,186,046,463	OPD Penyelenggara Urusan Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik / Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	10	3,528,582,532	OPD Penyelenggara Urusan Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Rasio Luas ruang terbuka Hijau yang tertata	45	562,454,651	OPD Penyelenggara Urusan Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung berizin Yang Terbangun (%)	24	87,654,334,587	OPD Penyelenggara Urusan Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Luas Ruang Terbuka Hijau Publik yang dikelola/ditangani (Ha)	1176	3,100,000,000	OPD Penyelenggara Urusan Lingkungan Hidup
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase cakupan area pelayanan (%)	67.88	13,100,000,000	OPD Penyelenggara Urusan Lingkungan Hidup
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Kajian Lingkungan yang Disusun (Buah)	4	300,000,000	OPD Penyelenggara Urusan Lingkungan Hidup
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase sarana Prasarana persampahan yang berfungsi dengan baik (%)	4.9	912,000,000	OPD Penyelenggara Urusan Lingkungan Hidup
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Status Kualitas Air dan Udara	Baik	149,650,000	OPD Penyelenggara Urusan Lingkungan Hidup
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Sumber Limbah B3 di Kota Palopo yang diawasi	100	13,427,500	OPD Penyelenggara Urusan Lingkungan Hidup

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Program Pembangunan/Program Prioritas Perangkat Daerah'	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Target Anggaran 2022	Fungsi Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Pengembangan Layanan Publik, Inovasi Daerah dan Reformasi Birokrasi (4)	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (S.7)	PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN REFORMASI BIROKRASI (PP7)	Proporsi Perangkat Daerah yang Nilai LHE SAKIPnya Diatas 50 Poin (%)	45	47,796,140,430	
			Proporsi Perangkat Daerah yang memiliki nilai LHE PMPRB Diatas 50 Poin (%)	50		
			Rata-Rata Indeks Profesionalisme Aparatur (Point)	52		
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rata-rata Capaian Kinerja Tahunan Terhadap Target Kinerja Tahunan dalam RKPD (%)	91	887,693,921	Bappeda
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat Kesesuaian Program/Kegiatan Perangkat Daerah Terhadap Dokumen Perencanaan Daerah (%)	100	903,938,438	Bappeda
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Rata-rata Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75	2,515,478,000	Inspektorat
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Rata-Rata Nilai PMPRB Organisasi Perangkat Daerah	75	550,000,000	Inspektorat
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Tingkat Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100	20,335,959,513	Sekretariat Daerah
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Tingkat Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Daerah	100	1,306,531,333	Sekretariat Daerah
		PROGRAM PENYELENGGARAAN	Angka Tingkat Ketersediaan Data Statistik Sektor Perangkat Daerah sesuai Permendagri 86 (%)	0	82,913,070	OPD Pelaksana Fungsi Statistik

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Program Pembangunan/Program Prioritas Perangkat Daerah'	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Target Anggaran 2022	Fungsi Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		STATISTIK SEKTORAL				
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase PNS yang ditempatkan sesuai Syarat Jabatan & Syarat Kompetensinya	0	2,257,319,238	Kepegawaian dan Pengembangan SDM
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	0	3,965,315,769	Kepegawaian dan Pengembangan SDM
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase OPD yang Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Arsip (%)	8	45,977,400	OPD Pelaksana Fungsi Arsip
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah, dan pertanggungjawaban	19	35,618,750	OPD Pelaksana Fungsi Arsip
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Tingkat Kesesuaian Pagu pada Dokumen Penganggaran Terhadap Dokumen Perencanaan (%)	100	10,445,000,000	OPD Pelaksana Fungsi Pengelola Keuangan
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Tingkat Pemenuhan Dokumen Pengelolaan Barang yang Memenuhi SAP	100	4,440,000,000	OPD Pelaksana Fungsi Pengelola Keuangan
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat daerah yang pengelolaan Informasi sesuai SOP (%)	0	24,395,000	OPD Pelaksana Fungsi Persandian
Pengembangan Layanan Publik, Inovasi Daerah dan Reformasi Birokrasi (4)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S.8)	PROGRAM PEMENUHAN LAYANAN DASAR MASYARAKAT (PP8)	Rata-rata Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Kota (%)	100	163,916,523,875	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar	100	65,200,000,000	OPD Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Program Pembangunan/Program Prioritas Perangkat Daerah'	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Target Anggaran 2022	Fungsi Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Pemenuhan Universal Helath Coverage (%)	100	88,142,227,181	OPD Pelaksana Urusan Pem. Bidang Kesehatan
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang Menerima Layanan Sesuai Standar	100	242,613,656	Sosial
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah	100	162,759,494	Sosial
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Total Jumlah Penduduk yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, layanan pencegahan dan kesiapsiagaan serta layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (%)	100	821,659,475	BPBD
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Total Persentase Rata-rata Gangguan Trantibum dan Perda/Perkada yang dapat diselesaikan	100	2,498,591,250	Satpol PP
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rata-rata Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi serta Fasilitas Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan Masyarakat Terdampak Program Pemerintah di Kota Palopo	100	100,778,000	Perumahan & Kawasan Pemukiman,
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga yang Telah Memiliki Akses Terhadap Air Minum (%)	100	4,156,000,000	Pekerjaan Umum

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Program Pembangunan/Program Prioritas Perangkat Daerah'	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Target Anggaran 2022	Fungsi Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	100	714,181,819	Pekerjaan Umum
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Layanan Pengaduan dan Evakuasi yang Dilaksanakan dengan Memenuhi Respon Time 15 Menit	100	1,877,713,000	Pemadam Kebakaran
		PROGRAM PENGEMBANGAN LAYANAN NON DASAR, INOVASI DAERAH DAN PARTISIPASI PUBLIK (PP9)	Proporsi Perangkat Daerah yang Telah Melaksanakan Layanan Publik Ber SOP (%)	70	32,340,387,202	
			Angka Proporsi Perangkat Daerah yang Menyusun Inovasi Layanan Publik (%)	4		
			Angka Rata-Rata Pemenuhan Usulan Prioritas Per Kecamatan yang sampai pada dokumen APBD (%)	29		
			Predikat Zona Pelayanan Publik (Ombudman)	85		Setwan, Perkim,
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rata-Rata Tingkat Penyelesaian Pengaduan Masyarakat dan Layanan yang Diselesaikan Tepat Waktu (%)	100	5,675,870,875	Kecamatan
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata LPM, LSM, LPM, PKK, Posyandu yang Aktif (%)	100	4,434,560,000	Kecamatan
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kelurahan yang bebas konflik sosial	100	343,586,150	Kecamatan

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Program Pembangunan/Program Prioritas Perangkat Daerah'	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Target Anggaran 2022	Fungsi Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Wajib KTP yang Terlayani (%)	95	88,621,500	OPD Pelaksana Fungsi Pencatatan Sipil
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	85	749,042,452	OPD Pelaksana Fungsi Komunikasi & Informatika
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase KIM masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	85	2,956,151,250	OPD Pelaksana Fungsi Komunikasi & Informatika
		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Lembaga Pendidikan yang Berizin	100	50,000,000	OPD Pelaksanan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Apotek, Toko Obat dan Alat Kesehatan, serta Usaha TTM & TTU dan Usaha Lain yang Memenuhi Syarat Kesehatan (%)	37	555,000,000	OPD Pelaksana Urusan Pem. Bidang Kesehatan
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio Dokter Per Satuan Puskesmas (Orang/Puskesmas)	5	6,713,750	OPD Pelaksana Urusan Pem. Bidang Kesehatan
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Izin tentang Lingkungan yang Diproses Tepat Waktu (%)	100	50,000,000	OPD Pelaksana Fungsi Lingkungan Hidup
		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Usaha Simpan Pinjam yang Berizin	72	12,000,000	OPD Pelaksana Fungsi Koperasi & UMKM
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Usaha Pertanian yang Berizin	30	38,000,000	OPD Pelaksana Fungsi Pertanian

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Program Pembangunan/Program Prioritas Perangkat Daerah'	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Target Anggaran 2022	Fungsi Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	PersentaseI Unit Industri yang Berizin	16	41,000,000	OPD Pelaksana Fungsi Perindustrian
		PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase Penyelesaian Ijin Lokasi Tanah Negara (%)	100	8,302,500	OPD Pelaksana Fungsi Pertanian
		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Penyelesaian Subjek Ganti Kerugian Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah	60	9,075,000,000	OPD Pelaksana Fungsi Pertanian
		PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Persentase Penyelesaian Izin Lokasi (Privat) (%)	45	6,765,000	OPD Pelaksana Fungsi Pertanian
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Kwartir Pramuka yang Aktif	100	120,000,000	OPD Pelaksana Fungsi Kepemudaaan
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Jumlah Inovasi Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Sosial dan Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan, dan Teknologi yang Diwujudkan	100	478,411,319	OPD Pelaksana Fungsi Penelitian & pengembangan
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	90	40,148,225	OPD Pelaksana Fungsi Ketahanan Pangan
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Jumlah Sistem Data Gender dan Anak yang Berfungsi Baik	1	48,347,719	OPD Pelaksana Fungsi PPPA
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Angka Tngkat Pemenuhan Indikator Kota Layak Anak	706	143,000,000	OPD Pelaksana Fungsi PPPA
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Luas Taman Makam Pahlawan yang Dikelola (Ha)	2.5	59,404,900	OPD Pelaksana Fungsi Sosial
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	95	873,300,000	OPD Pelaksana Fungsi Kependudukan
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI	Jumlah Sistem Informasi Kependudukan yang Berfungsi Baik	1	237,000,000	OPD Pelaksana Fungsi Kependudukan

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Program Pembangunan/Program Prioritas Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Target Anggaran 2022	Fungsi Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penyelesaian Kasus Tanah Negara (%)	35	32,718,000	OPD Pelaksana Fungsi Pertanahan
		PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase Penetapan Objek Redistribusi Tanah	70	61,862,850	OPD Pelaksana Fungsi Pertanahan
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Angka Pertumbuhan Organisasi Kemasyarakatan yang Terdaftar	100	1,358,125,000	OPD Pelaksana Fungsi Kesatuan Bangsa
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100	115,620,000	OPD Pelaksana Fungsi Kesatuan Bangsa
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Cakupan Lembaga atau Organisasi yang Mendapatkan Pendidikan Politik	100	976,714,802	OPD Pelaksana Fungsi Kesatuan Bangsa
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Prolegda yang Ditetapkan Menjadi Perda	0	3,048,489,060	Setwan
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG	Persentase Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil yang Tersertifikasi dan Teregistrasi (%/Thn)	20	40,154,375	OPD Pelaksana Fungsi Perumahan & Pemukiman

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Program Pembangunan/Program Prioritas Perangkat Daerah'	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Target Anggaran 2022	Fungsi Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Jumlah Kasus Korban Tindak Kekerasan Migran yang Diselesaikan (%)	50	45,000,000	OPD Pelaksana PPPA
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Wilayah Rawan Konflik yang Dibina (%)	100	524,297,750	OPD Pelaksana Fungsi Kesatuan Bangsa
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Aktif	100	18,014,375	OPD Pelaksana Fungsi Lingkungan Hidup
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu	100	29,165,350	OPD Pelaksana Fungsi Lingkungan Hidup
Pemulihan Ekonomi dan Produktifitas Daerah (5)	Meningkatnya Kesempatan Berusaha dan Kualitas Tenaga Kerja (S.9)	PROGRAM PENYEDIAAN LAPANGAN KERJA DAN USAHA SERTA PENINGKATAN KUALITAS TENAGA KERJA (PP10)	Rasio Penduduk yang Bekerja	91.43	2,677,178,019	
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%)	55	221,707,500	OPD Penyelenggara Urusan Bidang Tenaga Kerja
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) (%)	13	126,382,500	OPD Penyelenggara Urusan Bidang Tenaga Kerja
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja (%)	78.95	61,730,000	OPD Penyelenggara Urusan Bidang Tenaga Kerja

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Program Pembangunan/Program Prioritas Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Target Anggaran 2022	Fungsi Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja (Per 100 Juta Nilai PMDN)	15	42,435,000	OPD Penyelenggara Urusan Bidang Penanaman Modal
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Nilai Investasi yang Masuk per Tahun (%/Thn)	30	158,875,000	OPD Penyelenggara Urusan Bidang Penanaman Modal
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	65	98,332,350	OPD Penyelenggara Urusan Bidang Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Tingkat Pertumbuhan Jumlah Pelaku Usaha Pariwisata & Ekonomi Kreatif Daerah (%)	80	307,295,000	OPD Penyelenggara Urusan Bidang Pariwisata
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	1.38	1,044,475,000	OPD Penyelenggara Urusan Bidang Kepemudaan
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (%)	35	463,201,600	OPD Penyelenggara Urusan Bidang Koperasi dan UMKM
		PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	47.49	147,598,569	OPD Penyelenggara Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	luas pemanfaatan dan penggunaan tanah (Ha)	16.006	5,145,500	OPD Penyelenggara Urusan Bidang Pertanahan
Pemulihan Ekonomi dan Produktifitas Daerah (5)	Meningkatnya Produksi dan Produktifitas (S 10)	PROGRAM PENGEMBANGAN PRODUKSI DAN PRODUKTIFITAS DAERAH (PP11)	Nilai PDRB ADHB Kota Palopo (Trilyun Rupiah)	8,604.23	15,622,019,120	

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Program Pembangunan/Program Prioritas Perangkat Daerah'	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Target Anggaran 2022	Fungsi Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro yang meningkat menjadi Usaha Kecil (%/Tahun)	35	111,571,250	OPD Penyelenggara Urusan Bidang Koperasi dan UMKM
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Angka Persentase Koperasi yang Aktif (%/Thn)	72	10,865,000	OPD Penyelenggara Urusan Bidang Koperasi dan UMKM
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi yang Sehat (%/Thn)	73	14,196,250	OPD Penyelenggara Urusan Bidang Koperasi dan UMKM
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang Meningkatkan Kualitasnya	71	11,070,000	OPD Penyelenggara Urusan Bidang Koperasi dan UMKM
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton/Thn)	19,899	272,552,348	OPD Penyelenggara Urusan Perikanan
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton/Thn)	143,634	448,745,000	OPD Penyelenggara Urusan Perikanan
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan (Ton/Thn)	112	68,285,500	OPD Penyelenggara Urusan Perikanan
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian, Peternakan & Perkebunan	5	4,894,000,145	OPD Penyelenggara Urusan Pertanian
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Lahan Sawah ber Indeks Pertanaman (IP) diatas 2	7	2,189,000,000	OPD Penyelenggara Urusan Pertanian
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelompok Tani yang Mampu Meningkatkan Produksi/Produktifitasnya	54	573,576,675	OPD Penyelenggara Urusan Pertanian
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	% Luas Lahan Pertanian yang Gagal Panen/Gagal Tanam (Ha/Thn)	0.6	74,778,875	OPD Penyelenggara Urusan Pertanian

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Program Pembangunan/Program Prioritas Perangkat Daerah'	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Target Anggaran 2022	Fungsi Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	1.26	145,000,000	OPD Penyelenggara Urusan Pertanian
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Jumlah Kelompok Tani yang Memanfaatkan Infrastruktur Ketahanan Pangan (Kelompok)	3	992,902,917	OPD Penyelenggara Urusan Pangan
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Peningkatan Jumlah Retribusi dari Pasar (%/Tahun)	13	875,000,000	OPD Penyelenggara Urusan Perdagangan
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat ukur,takar,timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	62	66,000,000	OPD Penyelenggara Urusan Perdagangan
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Pelaku Usaha Produk lokal Yang Masuk Pasar	26.92	33,000,000	OPD Penyelenggara Urusan Perdagangan
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	% Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	90	116,194,000	OPD Penyelenggara Urusan Perindustrian
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Tingkat produktivitas tenaga kerja	109.94	192,904,180	OPD Penyelenggara Urusan Bidang Tenaga Kerja
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Tingkat Kesesuaian Realisasi Pendapatan Daerah dengan Target Pendapatan Daerah (%/Thn)	100	3,579,872,155	OPD Penyelenggara Urusan Keuangan
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Angka Pertumbuhan Jumlah Investor di Daerah (%)	12	607,517,500	OPD Penyelenggara Urusan Penanaman Modal
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Investor dan Penanam Modal di Daerah yang yang	100	330,637,325	OPD Penyelenggara Urusan Penanaman Modal

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Program Pembangunan/Program Prioritas Perangkat Daerah'	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Target Anggaran 2022	Fungsi Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			memperoleh izin sesuai dengan ketentuan			
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Industri Kecil Menengah dan Perusahaan di Kawasan Industri Kota Palopo yang Datanya Masuk dalam SII Nasional	35	14,350,000	OPD Penyelenggara Urusan Perindustrian
Pemulihan Ekonomi dan Produktifitas Daerah (5)	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam perekonomian daerah (S.11)	PROGRAM PENGEMBANGAN PARIWISATA, EKRAF DAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG (PP12)	Nilai PAD dari ekonomi kreatif daerah (Rupiah)	6.8 Milyar	3,487,822,375	
			Nilai PAD sektor pariwisata (Rupiah)	9 Milyar		
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Pengunjung Pada Destinasi Wisata Unggulan Daerah (Orang/Tahun)	125000	46,125,000	OPD Pelaksanan Urusan Parwisata & Ekraf
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Angka Kunjungan Wisatawan (%/Tahun)	5	70,933,075	OPD Pelaksanan Urusan Parwisata & Ekraf
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Pelaku Usaha Ekraf Binaan yang Aktif Berusaha (%)	80	750,000,000	OPD Pelaksanan Urusan Parwisata & Ekraf
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase sekolah binaan yang berpredikat adiwiyata	100	42,429,875	OPD Pelaksanan Urusan Lingkungan Hidup
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Tingkat Partisipasi Kelompok Budaya Binaan dalam Iven Kepariwisata Daerah	100	195,000,000	OPD Pelaksanan Urusan Kebudayaan
		PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	Persentase Kelompok Kesenian Masyarakat yang Aktif Berpartisipasi dalam Event Kepariwisata Daerah	100	28,677,450	OPD Pelaksanan Urusan Kebudayaan

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Program Pembangunan/Program Prioritas Perangkat Daerah'	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Target Anggaran 2022	Fungsi Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Jumlah Iven Pameran Sejarah yang Dilaksanakan (Kali/Tahun)	5	29,078,225	OPD Pelaksanaan Urusan Kebudayaan
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Luas Lokasi Cagar Budaya yang Dikelola (Ha)	1	126,000,000	OPD Pelaksanaan Urusan Kebudayaan
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah Event Olahraga yang Dilaksanakan untuk Mendukung Kepariwisata (Kali/Tahun)	1	2,140,200,000	OPD Pelaksanaan Urusan Keolahragaan
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Usaha kepariwisataan dan ekraf yang tergabung dalam koperasi (%)	4	9,378,750	OPD Pelaksanaan Urusan Koperasi & UMKM
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah Event Pameran Naskah Kuno yang Dilaksanakan (Kali/Tahun)	1	50,000,000	OPD Pelaksanaan Urusan Perpustakaan

5.3 Rencana Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022

Penyusunan RKPD 2022 Kota Palopo mempertimbangkan beberapa aspek yakni Hasil Musrenbang RKPD Kota Palopo Tahun 2022 yang melahirkan sejumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi bagian dari Rencana Kerja Perangkat Daerah, serta tetap menjaga perencanaan program sesuai Perubahan RPJMD Kota Palopo 2018-2023. Jumlah Program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan Pemerintah Kota Palopo Pada Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.3
Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Alokasi
Per Perangkat Daerah Tahun 2022

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Jumlah		
		Prog	Keg	Sub Keg
JUMLAH PAGU BELANJA	1,063,318,741,307	207	637	1,585
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	707,107,881,551	38	101	251
DINAS PENDIDIKAN	216,463,930,275	5	17	48
DINAS KESEHATAN	149,336,640,931			
RSUD SAWERIGADING	150,211,000,000	2	3	3
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	158,958,428,222	12	23	69
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	7,443,047,543	6	15	35
DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	7,051,641,250	2	8	20
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	5,212,550,500	2	11	27
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3,535,859,475	2	8	19
DINAS SOSIAL	8,894,783,355	7	16	30
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	113,637,207,442	79	230	537
DINAS TENAGA KERJA	3,072,073,830	4	13	24
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2,899,953,719	7	23	51
DINAS KETAHANAN PANGAN	3,884,139,892	5	14	36
DINAS PERTANAHAN	11,638,003,975	8	15	29
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	34,865,423,428	11	16	31
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4,378,220,205	4	16	34
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	10,588,326,353	4	16	40
DINAS PERHUBUNGAN	7,270,886,700	3	13	30
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	6,263,593,702	3	11	42
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	3,677,193,975	7	16	37
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	6,724,223,450	5	10	24
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	8,259,750,000	4	16	43
DINAS PERSANDIAN DAN STATISTIK	2,503,003,875	3	11	26
DINAS KEBUDAYAAN	2,706,244,188	5	16	34
DINAS PERPUSTAKAAN	2,940,800,000	3	11	29
DINAS KEARSIPAN	1,940,975,150	3	13	27
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	41,124,222,481	27	86	213
DINAS PERIKANAN	4,875,501,848	4	15	33

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Jumlah		
		Prog	Keg	Sub Keg
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	4,489,210,075	5	15	45
DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	21,327,685,245	7	24	60
DINAS PERDAGANGAN	5,741,710,613.00	5	14	32
DINAS PERINDUSTRIAN	2,516,739,100.00	4	11	29
DINAS TRANSMIGRASI	2,173,375,600	2	7	14
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	78,088,957,681	5	35	115
SEKRETARIAT DAERAH	51,092,652,631	3	20	66
SEKRETARIAT DPRD	26,996,305,050	2	15	49
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	52,791,740,265	13	61	187
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	6,022,920,484	3	13	39
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	22,124,000,000	3	14	59
BADAN PENDAPATAN DAERAH	11,065,447,155	2	9	37
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	10,896,227,057	3	13	29
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	2,683,145,569	2	12	23
UNSUR PENGAWASAN UNSUR PEMERINTAHAN	10,308,759,288	3	10	25
INSPEKTORAT DAERAH	10,308,759,288	3	10	25
UNSUR KEWILAYAHAN	54,153,112,626	36	101	224
KECAMATAN WARU	7,006,108,188	4	10	21
KECAMATAN WARU UTARA	5,769,930,000	4	10	19
KECAMATAN WARU SELATAN	5,224,937,500	4	10	27
KECAMATAN WARU BARAT	5,744,901,550	4	13	30
KECAMATAN WARU TIMUR	7,652,866,788	4	12	30
KECAMATAN MUNGKAJANG	5,061,216,300	4	12	25
KECAMATAN BARA	6,688,137,300	4	10	23
KECAMATAN SENDANA	4,854,605,000	4	14	28
KECAMATAN TELLUWANUA	6,150,410,000	4	10	21
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	6,106,859,973	6	13	33
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6,106,859,973	6	13	33

Tabel 5.4
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Alokasi
Per Perangkat Daerah Tahun 2022

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB	
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
					TOTAL ANGGARAN			1,063,318,741,307				1,121,299,312,225		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			707,107,881,551				738,626,951,605		
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			216,463,930,275				221,166,475,529		
					DINAS PENDIDIKAN			216,463,930,275				221,166,475,529		
1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palopo	1	156,300,000,000	DAU		1	154,877,500,000	Dinas Pendidikan
1	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Kota Palopo	6 Dokumen	4,400,000	DAU		6 Dokumen	4,510,000	Dinas Pendidikan
1	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra, renja, RKA dan DPA perangkat daerah	Kota Palopo	6 Dokumen	2,200,000	DAU		6 Dokumen	2,255,000	Dinas Pendidikan
1	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Palopo	1 Laporan	2,200,000	DAU		1 Laporan	2,255,000	Dinas Pendidikan
1	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan keuangan	Kota Palopo	12 Jenis	150,192,086,000	DAU		12 Jenis	153,946,888,150	Dinas Pendidikan
1	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	Kota Palopo	1365 Orang	149,997,947,000	DAU		1365 Orang	153,747,895,675	Dinas Pendidikan
1	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan pertanggungjawaban yang diverifikasi	Kota Palopo	19 Laporan Pertanggungjawaban	157,586,000	DAU		19 Laporan Pertanggungjawaban	161,525,650	Dinas Pendidikan
1	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan yang disusun	Kota Palopo	15 Laporan Keuangan	36,553,000	DAU		15 Laporan Keuangan	37,466,825	Dinas Pendidikan
1	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Aset	Kota Palopo	1 Laporan	12,000,000	DAU		1 Laporan	12,300,000	Dinas Pendidikan
1	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah aset yang ditata kelolakan	Kota Palopo	65 unit	12,000,000	DAU		65 unit	12,300,000	Dinas Pendidikan
1	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi ASN PD yang dikelola	Kota Palopo	174 orang	33,492,000	DAU		174 orang	34,329,300	Dinas Pendidikan
1	1	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah ASN yang memperoleh pelayanan kepegaw aian tepat waktu	Kota Palopo	174 orang	33,492,000	DAU		174 orang	34,329,300	Dinas Pendidikan

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB	
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan	Kota Palopo	2 Jenis	269,780,000	DAU		2 Jenis	276,524,500	Dinas Pendidikan
1	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang dibiayai	Kota Palopo	48 Eksemplar	5,280,000	DAU		48 Eksemplar	5,412,000	Dinas Pendidikan
1	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SPPD yang dilaksanakan	Kota Palopo	35 SPPD	264,500,000	DAU		35 SPPD	271,112,500	Dinas Pendidikan
1	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	Kota Palopo	4 Jenis	5,200,000,000	DAU		-	0	Dinas Pendidikan
1	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jenis dan Jumlah Mebel yang diadakan	Kota Palopo	1 Jenis	5,000,000	DAU		-	0	Dinas Pendidikan
1	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis dan Jumlah peralatan dan mesin yang disediakan	Kota Palopo	3 Jenis	45,000,000	DAU		-	0	Dinas Pendidikan
1	1	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dan luas bangunan gedung kantor lainnya yang diadakan	Kota Palopo	2127 m2	5,150,000,000	DAU		-	0	Dinas Pendidikan
1	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai	Kota Palopo	3 Jasa	486,278,000	DAU		3 Jasa	498,434,950	Dinas Pendidikan
1	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk, surat keluar, ATK, cetak dan penggandaan	Kota Palopo	1500 Surat/jenis/buah	118,847,000	DAU		1500 Surat/jenis/buah	121,818,175	Dinas Pendidikan
1	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening air, listrik dan internet yang dibiayai	Kota Palopo	4 Rek	115,380,000	DAU		4 Rek	118,264,500	Dinas Pendidikan
1	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan kantor yang dilaksanakan	Kota Palopo	27 orang	252,051,000	DAU		27 orang	258,352,275	Dinas Pendidikan
1	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dibiayai	Kota Palopo	135 Unit	101,964,000	DAU		135 Unit	104,513,100	Dinas Pendidikan
1	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	Kota Palopo	53 unit	24,700,000	DAU		53 unit	25,317,500	Dinas Pendidikan
1	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	Kota Palopo	1 unit	28,700,000	DAU		1 unit	29,417,500	Dinas Pendidikan
1	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dibiayai	Kota Palopo	81 buah	16,200,000	DAU		81 buah	16,605,000	Dinas Pendidikan

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	Kota Palopo	2127 m	32,364,000	DAU		2127 m	33,173,100	Dinas Pendidikan
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar	Kota Palopo	100	60,000,000,000	DAU/DAK/APBN		100	65,864,696,997	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Lembaga Pendidikan Dasar yang Ditangani (Sekolah)	Kota Palopo	77 Sekolah	34,808,381,780	DAU/DAK/APBN		77 Sekolah	37,242,816,144	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	6	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	Kota Palopo	50 ruang	14,940,712,604	DAU/DAK/APBN		50 ruang	16,878,455,240	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah siswa SD yang mengikuti ujian	Kota Palopo	7500 orang	4,239,200,000	DAU/DAK/APBN		7500 orang	4,345,180,000	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah siswa yang mengikuti lomba	Kota Palopo	345 orang	107,697,263	DAU/DAK/APBN		345 Org	110,389,693	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mengikuti uji kompetensi	Kota Palopo	450 Org	53,687,963	DAU/DAK/APBN		450 Org	55,030,162	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah laporan pendidikan gratis, Jumlah Siswa	Kota Palopo	77 Sekolah	92,083,950	DAU/DAK/APBN		77 Sekolah	94,386,049	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	30	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah sekolah yang mendapatkan dana BOS	Kota Palopo	77 Sekolah	15,375,000,000	DAU/DAK/APBN		77 Sekolah	15,759,375,000	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Lembaga Pendidikan Menengah Pertama yang Ditangani (Sekolah)	Kota Palopo	25 sekolah	18,380,512,900	DAU/DAK/APBN		25 sekolah	21,640,497,899	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	jumlah sarana/prasaran, utilitas SMP yang dibangun	Kota Palopo	25 sekolah	9,313,727,551	DAU/DAK/APBN		25 sekolah	12,347,042,916	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah siswa SMP yang mengikuti ujian	Kota Palopo	7500 orang	2,826,939,998	DAU/DAK/APBN		7500 orang	2,897,613,500	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah laporan yang dievaluasi	Kota Palopo	25 sekolah	33,307,375	DAU/DAK/APBN		25 sekolah	34,140,059	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah siswa yang mengikuti lomba	Kota Palopo	350 orang	84,374,925	DAU/DAK/APBN		350 orang	86,484,298	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mengikuti uji kompetensi	Kota Palopo	450 orang	63,891,838	DAU/DAK/APBN		450 Org	65,489,133	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah laporan pendidikan gratis, Jumlah Siswa	Kota Palopo	25 sekolah	101,268,463	DAU/DAK/APBN		25 sekolah	103,800,174	Dinas Pendidikan

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1	1	2	2.0 2	4 2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah sekolah yang mendapatkan dana BOS	Kota Palopo	25 sekolah	5,935,570,000	DAU/DAK/APBN		25 sekolah	6,083,959,250	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.0 2	4 3	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah pengelola dana BOS	Kota Palopo	25 sekolah	21,432,750	DAU/DAK/APBN		25 sekolah	21,968,569	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Lembaga PAUD yang ditangani (Lembaga)	Kota Palopo	120 Paud	3,318,176,945	DAU/DAK/APBN		120 Paud	3,401,131,369	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.0 3	2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	Kota Palopo	2 Unit	868,016,945	DAU/DAK/APBN		2 Unit	889,717,369	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.0 3	1 6	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang dilayani	Kota Palopo	110 orang	3,895,000	DAU/DAK/APBN		110 orang	3,992,375	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.0 3	1 8	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Paud yang meneri BOP PAUD	Kota Palopo	120 Paud	2,446,265,000	DAU/DAK/APBN		120 Paud	2,507,421,625	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.04		Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Lembaga Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang ditangani (Lembaga)	Kota Palopo	15 kelompok	3,492,928,375	DAU/DAK/APBN		15 kelompok	3,580,251,585	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.0 4	1 2	Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal/Kesetaraan	Jumlah siswa yang mengikuti Paket A, Paket B dan Paket C	Kota Palopo	500 orang	26,650,000	DAU/DAK/APBN		500 orang	27,316,250	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.0 4	1 6	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah kelompok/lembaga kursus yang dibina	Kota Palopo	15 kelompok	13,770,875	DAU/DAK/APBN		15 kelompok	14,115,147	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.0 4	1 7	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah kelompok/lembagayang menerima dana BOP kesetaraan	Kota Palopo	15 kelompok	3,452,507,500	DAU/DAK/APBN		15 kelompok	3,538,820,188	Dinas Pendidikan
1	1	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Sekolah yang Menerapkan Kurikulum Lokal (%)	Kota Palopo	0.05	50,000,000	DAU		0.3	307,500,000	Dinas Pendidikan
1	1	3	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Sekolah yang Menetapkan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan (Sekolah)	Kota Palopo	6 sekolah	30,000,000	DAU		6 sekolah	190,000,000	Dinas Pendidikan
1	1	3	2.0 1	1	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah tingkatan yang memiliki kompetensi dasar	Kota Palopo	6 sekolah	10,000,000	DAU		40 sekolah	15,000,000	Dinas Pendidikan
1	1	3	2.0 1	4	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah PTK yang mengikuti pelatihan	Kota Palopo	6 sekolah	20,000,000	DAU		40 sekolah	175,000,000	Dinas Pendidikan
1	1	3	2.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Menetapkan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan (Sekolah)	Kota Palopo	5 sekolah	20,000,000	DAU		5 sekolah	117,500,000	Dinas Pendidikan

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB	
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	1	3	2.02	1	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah tingkatan yang memiliki kompetensi dasar	Kota Palopo	5 sekolah	10,000,000	DAU		20 sekolah	15,000,000	Dinas Pendidikan
1	1	3	2.02	2	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah tingkatan yang memiliki kompetensi dasar	Kota Palopo	5 sekolah	10,000,000	DAU		20 sekolah	102,500,000	Dinas Pendidikan
1	1	4			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Sekolah yang Memenuhi Rasio Ideal Guru dan Siswa	Kota Palopo	100 %	63,930,275	DAU		100 %	65,528,532	Dinas Pendidikan
1	1	4	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Lembaga Pendidikan PAUD, Dasar dan NonFormal yang memenuhi rasio guru ideal	Kota Palopo	1 Laporan	63,930,275	DAU		1 Laporan	65,528,532	Dinas Pendidikan
1	1	4	2.01	1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah satuan pendidikan yang memiliki PTK sesuai kebutuhan	Kota Palopo	11 Data	63,930,275	DAU		11 Data	65,528,532	Dinas Pendidikan
1	1	5			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Lembaga Pendidikan yang Berizin	Kota Palopo	100 %	50,000,000	DAU		100 %	51,250,000	Dinas Pendidikan
1	1	5	2.01		Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Lembaga Pendidikan yang Berizin (Lembaga)	Kota Palopo	25 Sekolah	20,000,000	DAU		25 Sekolah	20,500,000	Dinas Pendidikan
1	1	5	2.01	1	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah satuan pendidikan yang layak	Kota Palopo	25 Sekolah	10,000,000	DAU		25 Sekolah	10,250,000	Dinas Pendidikan
1	1	5	2.01	2	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah sekolah yang dilakukan pengawasan	Kota Palopo	25 Sekolah	10,000,000	DAU		25 Sekolah	10,250,000	Dinas Pendidikan
1	1	5	2.02		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah rekomendasi izin PAUDNI yang dikeluarkan	Kota Palopo	127 Sekolah	30,000,000	DAU		127 Sekolah	30,750,000	Dinas Pendidikan
1	1	5	2.02	1	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah satuan pendidikan yang layak	Kota Palopo	127 Sekolah	15,000,000	DAU		127 Sekolah	15,375,000	Dinas Pendidikan
1	1	5	2.02	2	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah sekolah yang dilakukan pengawasan	Kota Palopo	127 Sekolah	15,000,000	DAU		127 Sekolah	15,375,000	Dinas Pendidikan
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				149,336,640,931				158,514,883,589	
					DINAS KESEHATAN				149,336,640,931				158,514,883,589	
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palopo	100	49,866,700,000	DAU		100	50,343,000,000	Dinas Kesehatan

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB	
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja yang Disediakan (Dokumen/Thn)	Kota Palopo	6	3,345,000	DAU		6	3,428,624	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja & Perencanaan Anggaran yang Disusun (Buah/Thn)	Kota Palopo	5	2,345,000	DAU		5	2,403,624	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja yang Disusun (Buah/Thn)	Kota Palopo	1	1,000,000	DAU		1	1,025,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Keuangan yang Dikelola	Kota Palopo	3	47,744,855,500	DAU		3	48,152,220,055	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan (Orang/Thn)	Kota Palopo	600	47,547,286,750	DAU		600	47,949,712,086	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban yang diverifikasi (Laporan/Thn)	Kota Palopo	359	193,725,000	DAU		368	198,568,125	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Keuangan bulanan, semesteran dan tahunan yang disusun (Dokumen)	Kota Palopo	2	3,843,750	DAU		2	3,939,844	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah yang Disusun (Laporan/Tahun)	Kota Palopo	1	71,340,000	DAU		1	73,123,500	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Aset yang ditatakelolakan (Jenis Layanan)	Kota Palopo	4	71,340,000	DAU		4	73,123,500	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Aparatur yang Telah Mengikuti Bimtek (Orang/Thn)	Kota Palopo	8	15,836,250	DAU		8	16,232,156	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.05	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimtek yang Dilaksanakan/Diikuti (Kali/Thn)	Kota Palopo	4	15,836,250	DAU		4	16,232,156	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum yang Dikelola (Buah/Thn)	Kota Palopo	2	226,299,500	DAU		2	247,846,321	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Langganan Media Massa (Media)	Kota Palopo	4	5,412,000	DAU		4	5,547,300	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas (SPPD) (Kali)	Kota Palopo	152	220,887,500	DAU		155	242,299,021	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Milik Dinas yang Tersedia (Buah)	Kota Palopo	72	15,688,750	DAU		74	16,080,969	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis dan jumlah peralatan dan mesin yang disediakan (Buah)	Kota Palopo	2	15,688,750	DAU		2	16,080,969	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan yang Dikelola (Jenis)	Kota Palopo	3	1,729,735,000	DAU		3	1,772,978,375	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar dan surat masuk (Surat)	Kota Palopo	1300	54,735,000	DAU		1300	56,103,375	Dinas Kesehatan

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB	
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening Air, Listrik, Internet yang dibayarkan (Rekning)	Kota Palopo	65	775,000,000	DAU		65	794,375,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan kantor yang dilaksanakan (Layanan)	Kota Palopo	4	900,000,000	DAU		4	922,500,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Randis yang Berfungsi Baik dan Layak Jalan (Unit/Thn)	Kota Palopo	60	59,600,000	DAU		60	61,090,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai (Unit)	Kota Palopo	30	2,600,000	DAU		30	2,665,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai (Unit)	Kota Palopo	30	57,000,000	DAU		30	58,425,000	Dinas Kesehatan
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Pemenuhan Universal Health Coverage (UHC) (%)	Kota Palopo	100	98,146,444,181	DAU/D AK		100	106,776,126,995	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Layanan Kesehatan (RS dan Puskesmas) yang Berfungsi Baik dan Terakreditasi (Buah)	Kota Palopo	12	40,399,762,681	DAU/D AK		12	41,637,862,443	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.01	1	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah RS yang Ditangani (Buah/Thn)	Kota Palopo	-	0			-	0	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.01	2	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditangani (Buah/Thn)	Kota Palopo	-	0			-	0	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.01	3	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Faskes Lainnya (Pustu/Puskeskel/Posyandu) yang dibangun (Buah)	Kota Palopo	10	805,345,681	DAU/D AK		15	1,275,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.01	5	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah RS yang dikembangkan (Buah)	Kota Palopo	1	16,261,000,000	DAU/D AK		1	16,299,750,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.01	6	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dikembangkan (Buah)	Kota Palopo	12	16,186,391,000	DAU/D AK		12	16,348,668,693	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.01	7	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Faskes Lainnya (Pustu/Puskeskel/Posyandu) yang dikembangkan (Buah)	Kota Palopo	5	250,000,000	DAU/D AK		10	500,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.01	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Faskes Lainnya (Pustu/Puskeskel/Posyandu) yang rehabilitasi (Buah)	Kota Palopo	10	250,000,000	DAU/D AK		10	256,250,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Faskes yang Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatannya Diadakan (Buah)	Kota Palopo	12	720,000,000	DAU/D AK		12	738,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Faskes yang Prasarana dan Pendukungnya Fasilitas Layanan Kesehatannya diadakan (Buah)	Kota Palopo	12	1,440,000,000	DAU/D AK		12	1,476,000,000	Dinas Kesehatan

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB	
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	2	2.01	4	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang Peralatan Kesehatannya yang Diadakan (Unit/Thn)	Kota Palopo	12	1,101,250,000	DAU/D AK		12	1,161,818,750	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.01	6	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Faskes yang Menerima Obat dan Vaksin (Unit)	Kota Palopo	12	2,965,776,000	DAU/D AK		12	3,151,875,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.01	9	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Faskes yang Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang direhabilitasi (Buah)	Kota Palopo	12	420,000,000	DAU/D AK		12	430,500,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Layanan Kesehatan yang Dilaksanakan (Jenis Layanan)	Kota Palopo	12	57,669,806,500	DAU/D AK		12	65,059,467,677	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar	Kota Palopo	12	10,250,000	DAU/D AK		12	10,506,250	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai standar	Kota Palopo	12	647,735,000	DAU/D AK		12	693,412,500	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Bayi baru lahir sesuai standar	Kota Palopo	12	7,175,000	DAU/D AK		12	7,354,375	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	Kota Palopo	12	6,150,000	DAU/D AK		12	6,303,750	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar sesuai standar	Kota Palopo	12	16,400,000	DAU/D AK		12	16,810,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar	Kota Palopo	12	12,300,000	DAU/D AK		12	12,607,500	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar	Kota Palopo	12	6,150,000	DAU/D AK		12	6,303,750	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan hipertensi sesuai standar	Kota Palopo	12	8,200,000	DAU/D AK		12	8,405,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan DM sesuai standar	Kota Palopo	12	11,275,000	DAU/D AK		12	11,556,875	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan	Kota Palopo	12	8,200,000	DAU/D AK		12	8,405,000	Dinas Kesehatan

KODE REKENING						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
							kesehatan gangguan jiwa berat sesuai standar								
1	2	2	2.0 2	1	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah SDM TB yang ditingkatkan kapasitasnya	Kota Palopo	12	5,125,000	DAU/D AK		12	5,253,125	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.0 2	1	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan gangguan jiwa berat sesuai standar	Kota Palopo	12	10,250,000	DAU/D AK		12	10,506,250	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.0 2	1	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Layanan Kesehatan Kerja dan Olahraga yang dilaksanakan (Kali/Thn)	Kota Palopo	1	6,457,500	DAU/D AK		1	6,618,938	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.0 2	1	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Layanan Kesehatan Lingkungan yang dilaksanakan (Kali/Thn)	Kota Palopo	1	68,675,000	DAU/D AK		1	70,391,875	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.0 2	1	8	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Posyandu yang Dibina (Buah)	Kota Palopo	149	2,235,000,000	DAU/D AK		149	2,383,891,239	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.0 2	2	3	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Layanan Promotif, Preventif dan Deteksi Dini (Buah)	Kota Palopo	12	11,690,699,000	DAU/D AK		12	12,282,856,875	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.0 2	2	5	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kelurahan yang Menjadi Sasaran Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Kelurahan)	Kota Palopo	48	96,000,000	DAU/D AK		48	204,871,875	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.0 2	2	6	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah masyarakat yang premi asuransi kesehatannya ditanggung Pemerintah (Orang/Thn)	Kota Palopo	80975	27,654,500,000	DAU/D AK		82999	28,345,862,500	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.0 2	3	2	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah RS UPTD Daerah yang melaksanakan layanan kesehatan (Buah/Thn)	Kota Palopo	1	11,845,000,000	DAU/D AK		1	16,891,125,000	Dinas Kesehatan /Palammai Tandi
1	2	2	2.0 2	3	3	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Berfungsi Baik Melaksanakan Pelayanan (Buah)	Kota Palopo	12	1,345,869,000	DAU/D AK		12	2,022,453,125	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.0 2	3	4	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Faskes Daerah yang melaksanakan layanan kesehatan (Buah/Thn)	Kota Palopo	12	1,004,500,000	DAU/D AK		12	1,029,612,500	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.0 2	3	5	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang standar layanan kesehatannya ditenahi (Puskesmas)	Kota Palopo	12	973,896,000	DAU/D AK		12	1,024,359,375	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.03			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah sistem informasi kesehatan yang berfungsi dengan baik (Sistem/Thn)	Kota Palopo	1	76,875,000	DAU/D AK		1	78,796,875	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.03	2		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah sistem informasi kesehatan yang dikelola (Sistem/Thn)	Kota Palopo	1	76,875,000	DAU/D AK		1	78,796,875	Dinas Kesehatan

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB	
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio Dokter Per Satuan Puskesmas (Orang/Puskesmas)	Kota Palopo	5	6,713,750	DAU/D AK		5	6,881,594	Dinas Kesehatan
1	2	3	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan (Dok/Tahun)	Kota Palopo	1	6,713,750	DAU/D AK		1	6,881,594	Dinas Kesehatan
1	2	3	2.02	3	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan SDM kesehatan (Kali/Thn)	Kota Palopo	1	6,713,750	DAU/D AK		1	6,881,594	Dinas Kesehatan
1	2	4			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Apotek, Toko Obat dan Alat Kesehatan, serta Usaha TTM & TTU dan Usaha Lain yang Memenuhi Syarat Kesehatan (%)	Kota Palopo	37	550,783,000	DAU/D AK		38	568,875,000	Dinas Kesehatan
1	2	4	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang berizin	Kota Palopo	23	505,783,000	DAU/D AK		23	522,750,000	Dinas Kesehatan
1	2	4	2.01	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Kegiatan Pengawasan yang Dilaksanakan (Kali/Thn)	Kota Palopo	4	505,783,000	DAU/D AK		4	522,750,000	Dinas Kesehatan
1	2	4	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Usaha TTM dan TTU yang diberikan sertifikat terkait aspek kesehatan (Usaha/Tahun)	Kota Palopo	20	15,000,000	DAU/D AK		25	15,375,000	Dinas Kesehatan
1	2	4	2.03	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan, Tindak Lanjut yang Dilaksanakan (Kali/Tahun)	Kota Palopo	2	15,000,000	DAU/D AK		2	15,375,000	Dinas Kesehatan
1	2	4	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Usaha TPM yang Memperoleh Sertifikat Laik Higiene (Usaha/Tahun)	Kota Palopo	20	15,000,000	DAU/D AK		20	15,375,000	Dinas Kesehatan
1	2	4	2.04	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene	Jumlah Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan, Tindak Lanjut yang Dilaksanakan (Kali/Tahun)	Kota Palopo	2	15,000,000	DAU/D AK		2	15,375,000	Dinas Kesehatan

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB	
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
					Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)									
1	2	4	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah Usaha yang Produknya diperiksa (Buah Usaha)	Kota Palopo	20	15,000,000	DAU/D AK		20	15,375,000	Dinas Kesehatan
1	2	4	2.06	1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Pemeriksaan Post Market yang dilaksanakan (Kali/Tahun)	Kota Palopo	2	15,000,000	DAU/D AK		2	15,375,000	Dinas Kesehatan
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga yang Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS (%))	Kota Palopo	41	766,000,000	DAU/D AK		42	820,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	5	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat (Buah)	Kota Palopo	12	186,240,000	DAU/D AK		12	201,896,000	Dinas Kesehatan
1	2	5	2.01	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (kali/thn)	Kota Palopo	2	186,240,000	DAU/D AK		2	201,896,000	Dinas Kesehatan
1	2	5	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Upaya Promotif Preventif (Buah)	Kota Palopo	12	456,000,000	DAU/D AK		12	480,250,000	Dinas Kesehatan
1	2	5	2.02	1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Kegiatan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Kali/Thn)	Kota Palopo	2	456,000,000	DAU/D AK		2	480,250,000	Dinas Kesehatan
1	2	5	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Upaya UKBM (Buah)	Kota Palopo	12	123,760,000	DAU/D AK		12	137,854,000	Dinas Kesehatan
1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang Dilaksnakan (Kali/Thn)	Kota Palopo	2	123,760,000	DAU/D AK		2	137,854,000	Dinas Kesehatan
					RSUD SAWERIGADING				150,211,000,000				153,966,275,000	
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintah Daerah (%)	Kota Palopo	100	30,861,000,000	DAU		100	31,632,525,000	BLUD RS Sawerigading

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB	
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Keuangan (Laporan)	Kota Palopo	12	30,861,000,000	DAU		12	31,632,525,000	BLUD RS Sawerigading
1	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan (Orang)	Kota Palopo	376	30,861,000,000	DAU		376	31,632,525,000	BLUD RS Sawerigading
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Pemenuhan Universal Helath Coverage (%)	Kota Palopo	100	119,350,000,000	DAU/D AK		100	122,333,750,000	BLUD RS Sawerigading
1	2	2	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang di benahi (Jenis)	Kota Palopo	3	28,890,000,000	DAU/D AK		3	29,611,750,000	BLUD RS Sawerigading
1	2	2	2.01	1	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang diadakan (Unit)	Kota Palopo	17	28,890,000,000	DAU/D AK		23	29,611,750,000	BLUD RS Sawerigading
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Kesehatan yang di fasilitasi (Layanan)	Kota Palopo	21	90,460,000,000	DAU/D AK		21	92,722,000,000	BLUD RS Sawerigading
1	2	2	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah laporan layanan kesehatan (Laporan)	Kota Palopo	12	90,460,000,000	DAU/D AK		12	92,722,000,000	BLUD RS Sawerigading
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				158,958,428,222				171,408,901,274	Dis PU PR
1	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Kota Palopo		34,639,000,000	DAU/D AK			36,418,371,530	Dis PU PR
1	3	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kota Palopo		37,000,000	DAU/D AK			165,050,000	Dis PU PR
1	3	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra, renja, RKA dan DPA perangkat daerah	Kota Palopo	4 DOKUMEN	22,000,000	DAU/D AK			86,325,000	Dis PU PR
1	3	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Palopo	1 LAPORAN	15,000,000	DAU/D AK			78,725,000	Dis PU PR
1	3	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Kota Palopo		6,213,000,000	DAU/D AK			6,415,521,000	Dis PU PR
1	3	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	Kota Palopo	85 ORANG	6,020,000,000	DAU/D AK			6,092,544,000	Dis PU PR
1	3	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Pertanggung Jawaban yang diverifikasi	Kota Palopo	4 Laporan	110,000,000	DAU/D AK			175,725,000	Dis PU PR
1	3	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan yang disusun	Kota Palopo	65 LAPORAN	83,000,000	DAU/D AK			147,252,000	Dis PU PR
1	3	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Kota Palopo		30,000,000	DAU/D AK			94,125,000	Dis PU PR

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB	
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	3	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah aset yang ditatakelolakan	Kota Palopo	65 unit	30,000,000	DAU/DAK			94,125,000	Dis PU PR
1	3	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Kota Palopo		86,000,000	DAU/DAK			214,039,000	Dis PU PR
1	3	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	Kota Palopo	85 stel	44,000,000	DAU/DAK			107,675,000	Dis PU PR
1	3	1	2.05	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	Kota Palopo	18 orang	42,000,000	DAU/DAK			106,364,000	Dis PU PR
1	3	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Kota Palopo		543,000,000	DAU/DAK			690,050,000	Dis PU PR
1	3	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan yang di biayai	Kota Palopo	40 eks	10,000,000	DAU/DAK			80,175,000	Dis PU PR
1	3	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SPPD yang dilaksanakan	Kota Palopo	90 SPPD	500,000,000	DAU/DAK			512,500,000	Dis PU PR
1	3	1	2.06	1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah sistem atau aplikasi yang tersedia serta pengelolaannya	Kota Palopo	5 Aplikasi	33,000,000	DAU/DAK			97,375,000	Dis PU PR
1	3	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Kota Palopo		26,890,400,000	DAU/DAK			27,453,750,000	Dis PU PR
1	3	1	2.07	3	Pengadaan Alat Besar	jumlah alat besar yang diadakan	Kota Palopo	12 unit	240,400,000	DAU/DAK			137,500,000	Dis PU PR
1	3	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan mesin yang diadakan	Kota Palopo	6 unit	150,000,000	DAU/DAK			153,750,000	Dis PU PR
1	3	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dan luas bangunan gedung kantor lainnya yang diadakan	Kota Palopo		26,500,000,000	DAU/DAK			27,162,500,000	Dis PU PR
1	3	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kota Palopo	3500 surat	710,000,000	DAU/DAK			910,958,070	Dis PU PR
1	3	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah surat masuk, surat keluar, atk, cetak dan pengadaan	Kota Palopo	6 rekening	65,000,000	DAU/DAK			130,475,000	Dis PU PR
1	3	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening air, listrik dan internet yang dibiayai	Kota Palopo	10 LAYANAN	145,000,000	DAU/DAK			210,875,000	Dis PU PR
1	3	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan kantor yang dilaksanakan	Kota Palopo		500,000,000	DAU/DAK			569,608,070	Dis PU PR
1	3	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kota Palopo	2 UNIT	270,000,000	DAU/DAK			474,878,460	Dis PU PR
1	3	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	Kota Palopo	60 UNIT	35,000,000	DAU/DAK			101,204,820	Dis PU PR
1	3	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	Kota Palopo	35 UNIT	160,000,000	DAU/DAK			231,015,470	Dis PU PR
1	3	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dibiayai	Kota Palopo	3 UNIT	25,000,000	DAU/DAK			91,408,170	Dis PU PR

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB	
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	3	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah dan Luas gedung kantor yang dipelihara	Kota Palopo	65	50,000,000	DAU/D AK		70	51,250,000	Dis PU PR
1	3	2			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Kota Palopo		2,900,000,000	DAU/D AK			3,099,318,134	Dis PU PR
1	3	2	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Kota Palopo	1 DOKUMEN	2,590,000,000	DAU/D AK			1,730,000,000	Dis PU PR
1	3	2	2.01	4	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang disusun (rangkap)	Kota Palopo	170 Meter	10,000,000	DAU/D AK			10,000,000	Dis PU PR
1	3	2	2.01	9	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang dibangun	Kota Palopo	27 Meter	2,080,000,000	DAU/D AK			1,050,000,000	Dis PU PR
1	3	2	2.01	24	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang di Rehab	Kota Palopo	1 Buah	100,000,000	DAU/D AK			250,000,000	Dis PU PR
1	3	2	2.01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Jumlah Sungai/Kali yang di Keruk	Kota Palopo		400,000,000	DAU/D AK			420,000,000	Dis PU PR
1	3	2	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Kota Palopo	20 METER	310,000,000	DAU/D AK			1,369,318,134	Dis PU PR
1	3	2	2.02	2	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang dibangun (meter)	Kota Palopo	50 METER	10,000,000	DAU/D AK			40,000,000	Dis PU PR
1	3	2	2.02	8	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang ditingkatkan (meter)	Kota Palopo	70 Meter	100,000,000	DAU/D AK			700,000,000	Dis PU PR
1	3	2	2.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang di Rehab	Kota Palopo	34 Meter	100,000,000	DAU/D AK			500,000,000	Dis PU PR
1	3	2	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi yang di Pelihara	Kota Palopo	100	100,000,000	DAU/D AK		100	129,318,134	Dis PU PR
1	3	3			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		Kota Palopo		6,500,000,000	DAU/D AK			6,650,000,000	Dis PU PR
1	3	3	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		Kota Palopo	1 Unit	6,500,000,000	DAU/D AK			6,650,000,000	Dis PU PR
1	3	3	2.01	3	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah SPAM Perkotaan yang dibangun	Kota Palopo	5 unit	2,500,000,000	DAU/D AK			2,562,500,000	Dis PU PR
1	3	3	2.01	5	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	jumlah SPAM perkotaan yang di tingkatkan	Kota Palopo	700 SR	500,000,000	DAU/D AK			500,000,000	Dis PU PR
1	3	3	2.01	7	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Rumah Tangga berakses Air MInum	Kota Palopo	4.9	3,500,000,000	DAU/D AK		5	3,587,500,000	Dis PU PR
1	3	4			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL		Kota Palopo		912,000,000	DAU/D AK			934,800,000	Dis PU PR

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB	
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	3	4	2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota		Kota Palopo	3 UNIT	912,000,000	DAU/D AK			934,800,000	Dis PU PR
1	3	4	2.01	3	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah sarana prasarana persampahan yang ditingkatkan/dibangun (unit)	Kota Palopo	2 UNIT	312,000,000	DAU/D AK			334,800,000	Dis PU PR
1	3	4	2.01	5	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	volume sampah yang mengalami guna ulang dan daur ulang sebelum masuk TPA	Kota Palopo	1 UNIT	100,000,000	DAU/D AK			100,000,000	Dis PU PR
1	3	4	2.01	6	Penyediaan Sarana Persampahan	Jumlah sarana Persampahan yang tersedia (Unit)	Kota Palopo	100	500,000,000	DAU/D AK		100	500,000,000	Dis PU PR
1	3	5			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		Kota Palopo		714,181,819	DAU/D AK			732,036,364	Dis PU PR
1	3	5	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		Kota Palopo	60 SR	714,181,819	DAU/D AK			732,036,364	Dis PU PR
1	3	5	2.01	6	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga Berakses Sanitasi Layak (SR)	Kota Palopo	70 SR	300,000,000	DAU/D AK			300,000,000	Dis PU PR
1	3	5	2.01	12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga Berakses Sanitasi Layak (SR)	Kota Palopo	200 SR	314,181,819	DAU/D AK			332,036,364	Dis PU PR
1	3	5	2.01	14	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga / KK yang terlayani (KK/Tahun)	Kota Palopo	10	100,000,000	DAU/D AK		11	100,000,000	Dis PU PR
1	3	6			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		Kota Palopo		5,528,582,532	DAU/D AK			5,075,000,000	Dis PU PR
1	3	6	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		Kota Palopo	1 Dokumen	5,528,582,532	DAU/D AK			5,075,000,000	Dis PU PR
1	3	6	2.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah dokumen rencana teknis yang tersusun	Kota Palopo	12500 METER	1,000,000,000	DAU/D AK			750,000,000	Dis PU PR
1	3	6	2.01	5	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang dibangun (meter/tahun)	Kota Palopo	1500 METER	3,000,000,000	DAU/D AK			3,075,000,000	Dis PU PR
1	3	6	2.01	7	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang drainase yang direhab (meter/Tahun)	Kota Palopo	300 METER	1,328,582,532	DAU/D AK			1,050,000,000	Dis PU PR
1	3	6	2.01	9	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang drainase yang dinormalisasikan (meter/tahun)	Kota Palopo	0.022	200,000,000	DAU/D AK		0.032	200,000,000	Dis PU PR
1	3	7			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN		Kota Palopo		2,150,000,000	DAU/D AK			2,300,000,000	Dis PU PR
1	3	7	2.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		Kota Palopo	250 m²	2,150,000,000	DAU/D AK			2,300,000,000	Dis PU PR
1	3	7	2.01	1	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di	Luas Infrastruktur Permukiman di Kawasan Strategis yang terbangun (meter/tahun)	Kota Palopo	150 m²	2,000,000,000	DAU/D AK			2,050,000,000	Dis PU PR

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB	
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
					Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota									
1	3	7	2.01	2	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Luas Infrastruktur Permukiman di Kawasan Strategis yang dipelihara (m²/tahun)	Kota Palopo	24	150,000,000	DAU/D AK		25	250,000,000	Dis PU PR
1	3	8			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		Kota Palopo		84,634,334,587	DAU/D AK			88,404,334,587	Dis PU PR
1	3	8	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		Kota Palopo	25 Kegiatan	84,634,334,587	DAU/D AK			88,404,334,587	Dis PU PR
1	3	8	2.01	1	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Gedung/Bangunan pemerintahan/bangunan layanan publik yang ditangani (Unit/tahun)/Jumlah Gedung/Bangunan pemerintahan/bangunan layanan publik yang diberikan izin	Kota Palopo	7 UNIT	250,000,000	DAU/D AK			500,000,000	Dis PU PR
1	3	8	2.01	2	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Bersertifikat Laik Fungsi (unit)	Kota Palopo	100 UNIT	82,134,334,587	DAU/D AK			85,154,334,587	Dis PU PR
1	3	8	2.01	11	Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret dalam rangka Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi	Jumlah Rumah Tangga Bersertifikat Laik Fungsi (unit)	Kota Palopo	4 UNIT	250,000,000	DAU/D AK			250,000,000	Dis PU PR
1	3	8	2.01	12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung yang direhabilitasi/renov/ubahusai (unit)	Kota Palopo	45	2,000,000,000	DAU/D AK		47	2,500,000,000	Dis PU PR
1	3	9			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		Kota Palopo		4,050,000,000	DAU/D AK			4,200,000,000	Dis PU PR
1	3	9	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota		Kota Palopo	205 meter persegi	4,050,000,000	DAU/D AK			4,200,000,000	Dis PU PR
1	3	9	2.01	3	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH yang Tertata(m²)	Kota Palopo	50 m²	4,000,000,000	DAU/D AK			4,100,000,000	Dis PU PR
1	3	9	2.01	4	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH yang terpelihara (m²)	Kota Palopo	71	50,000,000	DAU/D AK		72	100,000,000	Dis PU PR
1	3	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		Kota Palopo		16,273,862,796	DAU/D AK			23,064,750,000	Dis PU PR
1	3	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		Kota Palopo	512.39 Km	16,273,862,796	DAU/D AK			23,064,750,000	Dis PU PR
1	3	10	2.01	4	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Update Data Base Jalan dan Jembatan	Kota Palopo	1 Km	315,576,000	DAU/D AK			323,465,400	Dis PU PR

KODE REKENING						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB	
								Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	3	10	2.01	5		Pembangunan Jalan	panjang jalan yang ditangani	Kota Palopo	1 Km	4,232,262,796	DAU/D AK			6,619,860,000	Dis PU PR
1	3	10	2.01	6		Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang akan dilebarkan	Kota Palopo	1 Km	1,462,700,000	DAU/D AK			1,499,267,500	Dis PU PR
1	3	10	2.01	8		Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan Yang direkonstruksi/di tingkatkan	Kota Palopo	1 Km	6,408,700,000	DAU/D AK			9,643,917,500	Dis PU PR
1	3	10	2.01	10		Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan Yang pemeliharaan berkalnya ditangani (km)	Kota Palopo	1 Km	1,143,000,000	DAU/D AK			1,171,575,000	Dis PU PR
1	3	10	2.01	11		Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan Yang pemeliharaan rutinnya ditangani (km)	Kota Palopo	5 UNIT	150,000,000	DAU/D AK			153,500,000	Dis PU PR
1	3	10	2.01	12		Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan Yang dibangun (m)	Kota Palopo	1 UNIT	300,000,000	DAU/D AK			307,500,000	Dis PU PR
1	3	10	2.01	16		Penggantian Jembatan	Jumlah Jembatan yang akan di ganti (meter)	Kota Palopo	5 UNIT	2,000,000,000	DAU/D AK			3,075,000,000	Dis PU PR
1	3	10	2.01	18		Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang di rehab (Meter)	Kota Palopo	3 Unit	161,624,000	DAU/D AK			165,664,600	Dis PU PR
1	3	10	2.01	19		Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang dipelihara (meter)	Kota Palopo	65	100,000,000	DAU/D AK	70		105,000,000	Dis PU PR
1	3	11				PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		Kota Palopo		98,332,350	DAU/D AK			100,790,659	Dis PU PR
1	3	11	2.01			Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		Kota Palopo	4 Kegiatan	94,007,000	DAU/D AK			96,000,000	Dis PU PR
1	3	11	2.01	4		Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Kegiatan Pelatihan tenaga terampil konstruksi yang dilaksanakan (Kali/Tahun)	Kota Palopo	100 orang	84,007,000	DAU/D AK			85,000,000	Dis PU PR
1	3	11	2.01	6		Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga terampil yang bersertifikat	Kota Palopo		10,000,000	DAU/D AK			11,000,000	Dis PU PR
1	3	11	2.04			Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		Kota Palopo	2 kali	4,325,350	DAU/D AK			4,790,659	Dis PU PR
1	3	11	2.04	3		Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Kegiatan Pengawasan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan (Kali/Tahun)	Kota Palopo	55	4,325,350	DAU/D AK	56		4,790,659	Dis PU PR
1	3	12				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		Kota Palopo		417,734,138	DAU/D AK			429,500,000	Dis PU PR
1	3	12	2.01			Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota		Kota Palopo	1 DOKUMEN	380,000,000	DAU/D AK			398,750,000	Dis PU PR
1	3	12	2.01	2		Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen tersusun (pertahun)	Kota Palopo		310,000,000	DAU/D AK			325,500,000	Dis PU PR
1	3	12	2.01	3		Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah kegiatan penetapan kebijakan (pertahun)	Kota Palopo	3 UNIT	65,000,000	DAU/D AK			68,250,000	Dis PU PR
1	3	12	2.01	4		Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	jumlah sosialisasi yang diadakan (pertahun)	Kota Palopo		5,000,000	DAU/D AK			5,000,000	Dis PU PR

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB	
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	3	1	2	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Kota Palopo	325 Kali/Tahun	17,734,138	DAU/DAK			10,000,000	Dis PU PR
1	3	1	2	03	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Sistem Informasi Penetapan Ruang			17,734,138				10,000,000	
1	3	1	2	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				20,000,000				20,750,000	
1	3	1	2	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Kegiatan Koordinasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Dilaksanakan (Kali/Tahun)			15,000,000				15,750,000	
1	3	1	2	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah koordinasi penataan ruang yang dilaksanakan			5,000,000				5,000,000	
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				7,443,047,543				8,118,496,562	
					DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				7,443,047,543				8,118,496,562	
1	4	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah (%)	Kota Palopo	100	3,807,438,330	DAU		100	3,864,308,425	Disperkim
1	4	1	2	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu (Dok)	Kota Palopo	7	3,800,000	DAU		7	4,344,554	Disperkim
1	4	1	2	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA, dan DPA Perangkat Daerah (Dok)	Kota Palopo	6	2,350,000	DAU		6	2,889,304	Disperkim
1	4	1	2	01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Kota Palopo	1	1,450,000	DAU		1	1,455,250	Disperkim
1	4	1	2	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Keuangan (Laporan)	Kota Palopo	38	3,045,151,100	DAU		38	3,059,744,000	Disperkim
1	4	1	2	02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan gaji dan Tunjangan (Orang)	Kota Palopo	38	2,981,551,100	DAU		38	2,995,200,000	Disperkim
1	4	1	2	02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan Pertanggungjawaban yang diverifikasi (Laporan Pertanggungjawaban)	Kota Palopo	20	61,600,000	DAU		20	62,258,000	Disperkim
1	4	1	2	02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan, Bulanan, Semesteran dan Tahunan yang disusun (Laporan Keuangan)	Kota Palopo	18	2,000,000	DAU		18	2,286,000	Disperkim
1	4	1	2	03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Aset (Laporan)	Kota Palopo	3	8,000,000	DAU		3	9,300,000	Disperkim
1	4	1	2	03	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Aset yang ditatakelola (Unit)	Kota Palopo	300	8,000,000	DAU		300	9,300,000	Disperkim
1	4	1	2	05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi ASN PD yang dikelola (orang)	Kota Palopo	38	51,298,900	DAU		38	54,650,000	Disperkim

KODE REKENING						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB	
								Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023			
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		
								Wara Boting								
1	4	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan (Orang)	Kota Palopo, Wara Boting	126	30,000,000	DAU		126	30,150,000		Disperkim	
1	4	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek (org))	Kota Palopo, semua Kec. Semua Kel.	3	21,298,900	DAU		3	24,500,000		Disperkim	
1	4	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum yang ditatakelolakan (Jenis)	Kota Palopo, Wara Boting	4	307,424,000	DAU		4	311,159,000		Disperkim	
1	4	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang diadakan (Buah)	Kota Palopo, Wara Boting	10	1,500,000	DAU		10	1,650,000		Disperkim	
1	4	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor (Buah)	Kota Palopo, Wara Boting	18	17,149,000	DAU		18	17,149,000		Disperkim	
1	4	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang dibiayai (Eks)	Kota Palopo, Wara Boting	48	4,800,000	DAU		48	4,800,000		Disperkim	
1	4	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SPPD yang dilaksanakan (SPPD)	Kota Palopo, Wara Boting	70	283,975,000	DAU		70	287,560,000		Disperkim	
1	4	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Daerah yang dibiayai (Jenis)	Kota Palopo, Wara Boting	3	320,991,330	DAU		3	353,160,871		Disperkim	
1	4	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk, Surat Keluar, ATK, Cetak dan Penggandaan (Surat/jenis/buah)	Kota Palopo, Wara Boting	1000	73,750,000	DAU		1000	80,250,000		Disperkim	
1	4	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Air, Listrik dan Internet yang dibiayai (Rek)	Kota Palopo, Wara Boting	48	145,855,830	DAU		48	162,330,121		Disperkim	
1	4	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Layanan Kantor yang dilaksanakan (Layanan Kantor)	Kota Palopo, Wara Boting	6	101,385,500	DAU		6	110,580,750		Disperkim	
1	4	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang	Kota Palopo,	59	70,773,000	DAU		59	71,950,000		Disperkim	

KODE REKENING						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB	
								Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
							Pemeliharaannya dibiayai (unit)	Wara Boting							
1	4	1	2.09	1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Pemeliharaan dan Pajaknya dibiayai (Unit)	Kota Palopo, Wara Boting	1	26,500,000	DAU		1	26,550,000	Disperkim
1	4	1	2.09	2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Pemeliharaan dan Pajaknya dibiayai (Unit)	Kota Palopo, Wara Boting	15	3,575,000	DAU		15	3,600,000	Disperkim
1	4	1	2.09	6		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin kantor yang Pemeliharaannya dibiayai (unit)	Kota Palopo, Wara Boting	42	15,875,000	DAU		42	16,250,000	Disperkim
1	4	1	2.09	9		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah dan Luas Gedung Kantor yang Pemeliharaannya dibiayai (Unit/m²)	Kota Palopo, Wara Boting	1	24,823,000	DAU		1	25,550,000	Disperkim
1	4	2				PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rata-rata Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi serta Fasilitas Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan Masyarakat Terdampak Program Pemerintah di Kota Palopo (%)	Kota Palopo, semua Kec.dan Semua Kel.	100	100,778,000	DAU/DAK		100	103,297,450	Disperkim
1	4	2	2.01			Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen Data Rumah di Lokasi rawa bencana dan lahan potensial sebagai lokasi relokasi (Dok)	Kota Palopo, semua Kec.dan Semua Kel.	2	62,180,000	DAU/DAK		2	64,271,950	Disperkim
1	4	2	2.01	1		Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen Data rumah di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program (Dok)	Kota Palopo, semua Kec.dan Semua Kel.	1	50,880,000	DAU/DAK		1	51,750,000	Disperkim
1	4	2	2.01	2		Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Dokumen data lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan (Dok)	Kota Palopo, semua Kec.dan Semua Kel.	1	11,300,000	DAU/DAK		1	12,521,950	Disperkim
1	4	2	2.03			Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Korban Bencana yang Tertangani (%)	Kota Palopo, semua Kec.dan Semua Kel.	1	1,000,000	DAU/DAK		1	1,000,000	Disperkim
1	4	2	2.03	1		Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Rumah Korban Bencana / Relokasi Program yang tertangani (unit)	Kota Palopo, semua	1	1,000,000	DAU/DAK		1	1,000,000	Disperkim

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB	
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
							Kec.dan Semua Kel.							
1	4	2	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Kawasan RUSUN dan RUSUS yang Pengelolaanya dibina (Lokasi)	Kota Palopo, Wara selatan, Songka	4	37,598,000	DAU/DAK		4	38,025,500	Disperkim
1	4	2	2.05	1	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Unit Pengelola Rumah Susun (Unit)	Kota Palopo, Wara selatan, Songka	1	2,887,500	DAU/DAK		1	3,175,500	Disperkim
1	4	2	2.05	2	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah RUSUN /RUSUS yang dikelola (Lokasi)	Kota Palopo, Wara selatan, Takkalala	3	34,710,500	DAU/DAK		3	34,850,000	Disperkim
1	4	3			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Keluarga Miskin, yang telah Memiliki Rumah Layak Huni(%)	Kota Palopo, semua Kec.dan Semua Kel.	98.1	2,239,866,338	DAU/DAK		98.5	2,850,000,000	Disperkim
1	4	3	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Kebijakan PKP (Dok)	Kota Palopo, semua Kec.dan Semua Kel.	3	114,141,338	DAU/DAK		3	161,400,000	Disperkim
1	4	3	2.02	2	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah SK Walikota tentang Penetapan Kawasan Kumuh di Kota Palopo (Dokumen SK)	Kota Palopo, semua Kec.dan Semua Kel.	-	56,461,338	DAU/DAK		-	75,825,000	Disperkim
1	4	3	2.02	8	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Dokumen Rencana Pencegahan dan Pengendalian Pemukiman Kumuh (Dokumen SK)	Kota Palopo, semua Kec.dan Semua Kel.	1	57,680,000	DAU/DAK		1	85,575,000	Disperkim
1	4	3	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Kebijakan PKP (Dok)	Kota Palopo, semua Kec.dan Semua Kel.	2	2,125,725,000	DAU/DAK		2	2,688,600,000	Disperkim
1	4	3	2.03	1	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Persentase Kawasan Kumuh yang tertangani	Kota Palopo, semua Kec.dan Semua Kel.	82	110,100,000	DAU/DAK		82	175,500,000	Disperkim
1	4	3	2.03	2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Dokumen DED dan RAB (Dok)	Kota Palopo,	20	1,452,500,000	DAU/DAK		20	1,852,250,000	Disperkim

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB	
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
							semua Kec.dan Semua Kel.							
1	4	3	2.03	6	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Rumah Tidak layak Huni yang tertangani (Unit)	Kota Palopo, semua Kec.dan Semua Kel.	68	526,025,000	DAU/DAAK		69	600,500,000	Disperkim
1	4	3	2.03	7	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang di Rehab (Unit)	Kota Palopo, semua Kec.dan Semua Kel.	9	37,100,000	DAU/DAAK		9	60,350,000	Disperkim
1	4	4			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Dokumen Data Kawasan Kumuh (Dok)	Kota Palopo, semua Kec.dan Semua Kel.	1	1,200,000,000	DAU/DAAK		1	1,200,000,000	Disperkim
1	4	4	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan	Kota Palopo, semua Kec.dan Semua Kel.	0.6	1,200,000,000	DAU/DAAK		0.4	1,200,000,000	Disperkim
1	4	4	2.01	1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang di Rehab untuk Pencegahan Kumuh (unit)	Kota Palopo, Wara Utara, Batupasi	54	1,200,000,000	DAU/DAAK		54	1,200,000,000	Disperkim
1	4	5			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Jumlah Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas)	Kota Palopo, Wara Utara, Batupasi	54	54,810,500	DAU/DAAK		54	57,700,250	Disperkim
1	4	5	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Prasarana, Sarana, Utilitas yang Tersedia (Unit)	Kota Palopo, semua Kec.dan Semua Kel.	40	54,810,500	DAU/DAAK		45	57,700,250	Disperkim
1	4	5	2.01	1	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Dokumen Data PSU Perumahan (Dok)	Kota Palopo, semua Kec.dan Semua Kel.	5	17,850,500	DAU/DAAK		5	17,900,000	Disperkim
1	4	5	2.01	2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah PSU Perumahan yang terbangun (Unit)	Kota Palopo, semua Kec.dan Semua Kel.	1	14,900,000	DAU/DAAK		1	16,427,250	Disperkim

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB	
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	4	5	2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	PSU Perumahan yang terinventarisir untuk diserahkan (Unit)	Kota Palopo, semua Kec.dan Semua Kel.	5	22,060,000	DAU/DAK		5	23,373,000	Disperkim
1	4	6			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil yang tersertifikasi dan teregistrasi	Kota Palopo, semua Kec.dan Semua Kel.	20	40,154,375	DAU/DAK		20	43,190,437	Disperkim
1	4	6	2.01		Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Jumlah Pengembang Perumahan yang Tersertifikasi dan Teregistrasi	Kota Palopo, semua Kec.dan Semua Kel.	20	40,154,375	DAU/DAK		30	43,190,437	Disperkim
1	4	6	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah Pengembang Perumahan yang Tersertifikasi dan Teregistrasi	Kota Palopo, semua Kec.dan Semua Kel.	24	40,154,375	DAU/DAK		36	43,190,437	Disperkim
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				15,800,051,225				16,170,667,085	
					DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				7,051,641,250				7,227,932,281	
1	5	1			PROGRAM PENUJINGAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palopo	1	4,553,050,000	DAU		1	4,666,876,250	Dis Satpol PP
1	5	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Kinerja yang disusun	Kota Palopo	10 Dokumen	1,423,500	DAU		10 Dokumen	1,466,205	Dis Satpol PP
1	5	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Renstra, Renja, RKA dan DPA Perangkat Daerah	Kota Palopo	5 Dokumen	676,000	DAU		5 Dokumen	696,280	Dis Satpol PP
1	5	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palopo	5 Laporan	747,500	DAU		5 Laporan	769,925	Dis Satpol PP
1	5	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Keuangan	Kota Palopo	7 Laporan	4,146,535,500	DAU		7 Laporan	4,230,080,655	Dis Satpol PP
1	5	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang harus dibayarkan	Kota Palopo	45 Orang ASN	4,085,091,000	DAU		45 Orang ASN	4,166,792,820	Dis Satpol PP
1	5	1	2.02	3	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan	Laporan pertanggungjawaban yang diverifikasi	Kota Palopo	12 Laporan Pertanggung Jawaban	60,840,000	DAU		12 Laporan Pertanggung Jawaban	62,665,200	Dis Satpol PP

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB	
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	5	1	2.0	5	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Akhir Tahun	Kota Palopo	1 Laporan	396,500	DAU		1 laporan	408,395	Dis Satpol PP
1	5	1	2.0	7	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/Triwulan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kota Palopo	6 Laporan	208,000	DAU		6 laporan	214,240	Dis Satpol PP
1	5	1	2.0		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Aset	Kota Palopo	283 Unit	9,360,000	DAU		283 Unit	9,640,800	Dis Satpol PP
1	5	1	2.0	6	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah aset yang dtatakelolan	Kota Palopo	283 Unit	9,360,000	DAU		283 Unit	9,640,800	Dis Satpol PP
1	5	1	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan	Kota Palopo	2 Jenis	159,423,300	DAU		2 Jenis	182,291,659	Dis Satpol PP
1	5	1	2.0	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan yang dibiayai	Kota Palopo	3 Eksamplar	5,148,000	DAU		3 Eksamplar	5,302,440	Dis Satpol PP
1	5	1	2.0	9	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah SPPD yang dilaksanakan	Kota Palopo	40 SPPD	154,275,300	DAU		50 SPPD	176,989,219	Dis Satpol PP
1	5	1	2.0		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai	Kota Palopo	3 Jenis	109,752,700	DAU		3 Jenis	113,045,281	Dis Satpol PP
1	5	1	2.0	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk, surat keluar, ATK, cetak dan penggandaan	Kota Palopo	3700 Surat/jenis/buah	25,512,700	DAU		3900 Surat/jenis/buah	26,278,081	Dis Satpol PP
1	5	1	2.0	2	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening air, listrik dan internet yang dibiayai	Kota Palopo	3 Rekening	12,870,000	DAU		3 Rekening	13,256,100	Dis Satpol PP
1	5	1	2.0	4	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah layanan kantor yang dilaksanakan	Kota Palopo	7 Layanan	71,370,000	DAU		8 Layanan	73,511,100	Dis Satpol PP
1	5	1	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang pemeliharaannya dibiayai	Kota Palopo	18 Unit	126,555,000	DAU		18 Unit	130,351,650	Dis Satpol PP
1	5	1	2.0	1	Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	Kota Palopo	1 Unit	34,125,000	DAU		1 unit	35,148,750	Dis Satpol PP
1	5	1	2.0	2	Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan Dinas operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	Kota Palopo	5 Unit	89,310,000	DAU		5 unit	91,989,300	Dis Satpol PP
1	5	1	2.0	6	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dibiayai	Kota Palopo	12 Unit	3,120,000	DAU		12 unit	3,213,600	Dis Satpol PP
1	5	2			PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	Kota Palopo	1	2,498,591,250	DAU		1	2,561,056,031	Dis Satpol PP
1	5	2	2.0		Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah	Jumlah Orang Yang melaksanakan Kegiatan	Kota Palopo	210 Orang	2,306,191,250	DAU		228 Orang	2,362,884,031	Dis Satpol PP
1	5	2	2.0	1	Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan	Jumlah Personil yang melaksanakan Penjagaan Asset Pemerintah	Kota Palopo	55 Org	1,046,000,000	DAU		60 orang	1,077,380,000	Dis Satpol PP

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB	
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023			
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		
					penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan										
1	5	2	2.01	2	Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Jumlah personil yang melaksanakan kegiatan penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Kota Palopo	118 Orang Personil Non PNS	1,141,391,250	DAU		125 Orang Personil Non PNS	1,163,140,031	Dis Satpol PP	
1	5	2	2.01	5	Peningkatan kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa HAM	Jumlah Pelatih Beladiri Untuk Personil Satpol PP	Kota Palopo	2 Orang Pelatih	13,200,000	DAU		3 Orang Pelatih	13,596,000	Dis Satpol PP	
1	5	2	2.01	7	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Personil yang melaksanakan kegiatan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Kota Palopo	35 Orang Personil/Hari	105,600,000	DAU		40 Orang Personil/Hari	108,768,000	Dis Satpol PP	
1	5	2	2.02		Penegakan Perda Kab/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Kasus yang diselesaikan	Kota Palopo	30 Kasus	192,400,000	DAU		25 Kasus	198,172,000	Dis Satpol PP	
1	5	2	2.02	3	Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	Jumlah Kasus yang diselesaikan	Kota Palopo	30 Kasus	192,400,000	DAU		25 kasus	198,172,000	Dis Satpol PP	
					DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN				5,212,550,500				5,318,478,842	Dis Damkar & Penyelamatan	
1	5	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan daerah	Kota Palopo	100	3,334,837,500	DAU		100	3,418,208,438	Dis Damkar & Penyelamatan	
1	5	1	2.01		Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Kota Palopo	8 Dokumen	2,870,000	DAU		8 Dokumen	3,015,293	Dis Damkar & Penyelamatan	
1	5	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA Perangkat Daerah	Kota Palopo	6 Dokumen	1,620,000	DAU		6 Dokumen	1,702,013	Dis Damkar & Penyelamatan	
1	5	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Palopo	2 Laporan	1,250,000	DAU		2 Laporan	1,313,280	Dis Damkar & Penyelamatan	
1	5	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan penatausahaan keuangan	Kota Palopo	15 Laporan	2,588,630,200	DAU		15 Laporan	2,589,934,250	Dis Damkar &	

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB	
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
														Penyelamatan
1	5	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan gaji dan tunjangan	Kota Palopo	32 Org	2,550,172,200	DAU		32 Org	2,550,576,550	Dis Damkar & Penyelamatan
1	5	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan Pertanggungjawaban yang diverifikasi	Kota Palopo	1575 Lap Pertanggungjawaban	35,670,000	DAU		1650 Lap Pertanggungjawaban	36,500,000	Dis Damkar & Penyelamatan
1	5	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	Kota Palopo	1 Lap Keuangan	1,312,000	DAU		1 Lap Keuangan	1,344,800	Dis Damkar & Penyelamatan
1	5	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran yang disusun	Kota Palopo	13 Lap Keuangan	1,476,000	DAU		13 Lap Keuangan	1,512,900	Dis Damkar & Penyelamatan
1	5	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Aset	Kota Palopo	1 Laporan	9,840,000	DAU		1 Laporan	10,086,000	Dis Damkar & Penyelamatan
1	5	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Aset yang ditatakelolakan	Kota Palopo	20 Unit	9,840,000	DAU		20 Unit	10,086,000	Dis Damkar & Penyelamatan
1	5	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi ASN Perangkat Daerah yang dikelola	Kota Palopo	32 Org	107,218,750	DAU		32 Org	115,300,000	Dis Damkar & Penyelamatan
1	5	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yaang diadakan	Kota Palopo	158 Stel	107,218,750	DAU		76 Stel	95,300,000	Dis Damkar & Penyelamatan
1	5	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan tekhnis	Kota Palopo			DAU		2 Org	20,000,000	Dis Damkar & Penyelamatan
1	5	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan Administrasi Umum yang ditata kelolakan	Kota Palopo	3 Jenis	92,460,000	DAU		3 Jenis	125,521,500	Dis Damkar & Penyelamatan
1	5	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang diadakan	Kota Palopo	10 buah	5,000,000	DAU		10 buah	5,000,000	Dis Damkar & Penyelamatan
1	5	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang dibayai	Kota Palopo	2 Exp	2,460,000	DAU		2 Exp	2,521,500	Dis Damkar &

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB	
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
														Penyelamatan
1	5	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas yang dilakukan	Kota Palopo	50 sppd	85,000,000	DAU		50 sppd	118,000,000	Dis Damkar & Penyelamatan
1	5	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	Kota Palopo	10 Jenis	19,125,500	DAU		11 Jenis	49,603,300	Dis Damkar & Penyelamatan
1	5	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional atau lapangan yang dibeli	Kota Palopo	-	-	DAU		1 Unit	30,000,000	Dis Damkar & Penyelamatan
1	5	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dibeli	Kota Palopo	10 Jenis	19,125,500	DAU		10 Jenis	19,603,300	Dis Damkar & Penyelamatan
1	5	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Daerah dibiayai	Kota Palopo	3 Jenis	456,683,050	DAU		3 Jenis	464,894,489	Dis Damkar & Penyelamatan
1	5	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk, Surat keluar, ATK, Cetak dan Penggandaan	Kota Palopo	1500 Surat	20,000,000	DAU		1500 Surat	20,583,845	Dis Damkar & Penyelamatan
1	5	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya air dan Listrik	Jumlah rekening air, listrik, internet dan tv kabel yg dibiayai	Kota Palopo	14 rekening	116,433,050	DAU		14 rekening	120,007,598	Dis Damkar & Penyelamatan
1	5	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan Kantor yang dilaksanakan	Kota Palopo	7 Layanan	320,250,000	DAU		7 Layanan	324,303,046	Dis Damkar & Penyelamatan
1	5	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang pemeliharaannya dibiayai	Kota Palopo	54 Unit	58,010,000	DAU		54 Unit	59,853,606	Dis Damkar & Penyelamatan
1	5	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang Pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	Kota Palopo	1 Unit	28,187,500	DAU		1 Unit	28,892,188	Dis Damkar & Penyelamatan
1	5	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	Kota Palopo	13 Unit	7,687,500	DAU		13 Unit	7,879,688	Dis Damkar & Penyelamatan
1	5	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dibiayai	Kota Palopo	37 Unit	7,000,000	DAU		37 Unit	7,322,355	Dis Damkar &

KODE REKENING						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB	
								Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
															Penyelamatan
1	5	1	2.09	9		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah dan luas gedung kantor yang dipelihara	Kota Palopo	3 Unit	15,135,000	DAU		3 Unit	15,759,375	Dis Damkar & Penyelamatan
1	5	4				PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN, KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase layanan Pengaduan dan Evakuasi yang dilaksanakan dengan memenuhi Respon Time 15 Menit	Kota Palopo	1	1,877,713,000	DAU/DAK		1	1,900,270,404	Dis Damkar & Penyelamatan
1	5	4	2.01			Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Luas Wilayah Manajemen Kebakaran(WMK) yang dilayani sesuai Responce Time	Kota Palopo	7,5 Km	1,859,913,000	DAU/DAK		7,5 Km	1,846,770,404	Dis Damkar & Penyelamatan
1	5	4	2.01	1		Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti penyuluhan	Kota Palopo	0	-	DAU/DAK		96 Org	10,000,000	Dis Damkar & Penyelamatan
1	5	4	2.01	2		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Personil Pemadam Kebakaran yang melakukan kesiapsiagaan	Kota Palopo	75 Org	1,760,213,000	DAU/DAK		75 Org	1,737,020,404	Dis Damkar & Penyelamatan
1	5	4	2.01	3		Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Kota Palopo	50 Evakuasi	40,200,000	DAU/DAK		50 Evakuasi	40,250,000	Dis Damkar & Penyelamatan
1	5	4	2.01	4		Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bahan berbahaya dan beracun kebakaran yang ditangani	Kota Palopo	0	-	DAU/DAK		12 bahan	12,000,000	Dis Damkar & Penyelamatan
1	5	4	2.01	6		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah sarana dan prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung diri yang dibiayai	Kota Palopo	12 buah	25,000,000	DAU/DAK		12 buah	25,000,000	Dis Damkar & Penyelamatan
1	5	4	2.01	7		Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah aparaturnya yang memenuhi standar kualifikasi	Kota Palopo	15 Org	34,500,000	DAU/DAK		10 Org	22,500,000	Dis Damkar & Penyelamatan
1	5	4	2.02			Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah bangunan gedung yang memenuhi persyaratan proteksi kebakaran	Kota Palopo	4 Unit	4,800,000	DAU/DAK		4 Unit	4,800,000	Dis Damkar & Penyelamatan
1	5	4	2.02	1		Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Kota Palopo	4 Unit	4,800,000	DAU/DAK		4 Unit	4,800,000	Dis Damkar & Penyelamatan

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB	
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	5	4	2.03		Investigasi Kejadian Kebakaran	Investigasi Kejadian Kebakaran	Kota Palopo		-	DAU/D A K		30 Kejadian	3,600,000	Dis Damkar & Penyelamatan
1	5	4	2.03	1	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah kejadian kebakaran yang terinvestigasi	Kota Palopo			DAU/D A K		30 Kejadian	3,600,000	Dis Damkar & Penyelamatan
1	5	4	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	masyarakat yang memperoleh sosialisasi dan edukasi	Kota Palopo	500 Org	13,000,000	DAU/D A K		148 Org	24,600,000	Dis Damkar & Penyelamatan
1	5	4	2.04	1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Orang yang berpartisipasi dalam sosialisasi dan edukasi masyarakat	Kota Palopo	500 Org	13,000,000	DAU/D A K		100 Org	3,000,000	Dis Damkar & Penyelamatan
1	5	4	2.04	2	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah relawan kebakaran	Kota Palopo		-	DAU/D A K		48 Org	21,600,000	Dis Damkar & Penyelamatan
1	5	4	2.05		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	jumlah Kejadian kondisi berbahaya yang tertangani	Kota Palopo	0	-	DAU/D A K		50 Kejadian	20,500,000	Dis Damkar & Penyelamatan
1	5	4	2.05	1	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam keselamatan Manusia	Jumlah operasi pencarian dan pertolongan	Kota Palopo	0	-	DAU/D A K		50 Kejadian	20,500,000	Dis Damkar & Penyelamatan
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				3,535,859,475				3,624,255,962	
1	5	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintah Daerah	Kota Palopo	1	2,714,200,000	DAU		1	2,782,055,000	BPBD
1	5	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Kota Palopo	8 Dokumen	5,500,000	DAU		8 Dokumen	6,000,000	BPBD
1	5	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra, renja, RKA dan DPA perangkat daerah	Kota Palopo	7 Dokumen	4,000,000	DAU		7 Dokumen	4,500,000	BPBD
1	5	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Jumlah laporan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Palopo	1 Dokumen	1,500,000	DAU		1 Dokumen	1,500,000	BPBD
1	5	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan keuangan	Kota Palopo	4 Jenis	2,449,872,158	DAU		4 Jenis	2,450,472,158	BPBD
1	5	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	Kota Palopo	24 Orang	2,405,872,158	DAU		24 Orang	2,405,872,158	BPBD
1	5	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan OPD	Laporan pertanggungjawaban yang diverifikasi	Kota Palopo	5 Laporan Pertanggung jawaban	43,200,000	DAU		5 Laporan Pertanggung jawaban	43,200,000	BPBD

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1	5	1	2.0 2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD	Jumlah laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan yang disusun	Kota Palopo	1 Laporan	400,000	DAU		1 Laporan	700,000	BPBD
1	5	1	2.0 2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran OPD	Jumlah laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan yang disusun	Kota Palopo	2 Laporan	400,000	DAU		2 Laporan	700,000	BPBD
1	5	1	2.0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah aset yang ditatakelolakan	Kota Palopo	1 Laporan	7,200,000	DAU		1 Laporan	7,200,000	BPBD
1	5	1	2.0 3	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada OPD	Jumlah aset yang ditatakelolakan	Kota Palopo	1 Laporan	7,200,000	DAU		1 Laporan	7,200,000	BPBD
1	5	1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi ASN PD yang dikelola	Kota Palopo	-	-	DAU		26 Orang	20,400,000	BPBD
1	5	1	2.0 5	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	Kota Palopo	-	-	DAU		24 orang	10,400,000	BPBD
1	5	1	2.0 5	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	Kota Palopo	-	-	DAU		2 Orang	10,000,000	BPBD
1	5	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan	Kota Palopo	4 Jenis	58,627,842	DAU		4 Jenis	98,700,000	BPBD
1	5	1	2.0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang diadakan	Kota Palopo	20 Buah	627,842	DAU		15 Buah	700,000	BPBD
1	5	1	2.0 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Kota Palopo	5 Buah	500,000	DAU		5 Buah	500,000	BPBD
1	5	1	2.0 6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang dibiayai	Kota Palopo	5 Eksampl	7,500,000	DAU		5 Eksampl	7,500,000	BPBD
1	5	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD	Jumlah SPPD yang dilaksanakan	Dalam/Luar Kota Palopo	10 SPPD	50,000,000	DAU		15 SPPD	90,000,000	BPBD
1	5	1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	Kota Palopo	-	-	DAU		-	-	BPBD
1	5	1	2.0 7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis dan Jumlah peralatan dan mesin yang disediakan	Kota Palopo	-	-	DAU		-	-	BPBD
1	5	1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai	Kota Palopo	3 Jenis	160,500,000	DAU		3Jenis	161,282,842	BPBD
1	5	1	2.0 8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk, surat keluar, atk, cetak dan pengadaan	Kota Palopo	1575 Surat/jenis/ Buah	4,500,000	DAU		1575 Surat/jenis/ Buah	5,282,842	BPBD
1	5	1	2.0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening air, listrik dan internet yang dibiayai	Kota Palopo	3 Rekening	69,000,000	DAU		3 Rekening	69,000,000	BPBD
1	5	1	2.0 8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan kantor yang dilaksanakan	Kota Palopo	16 Orang	87,000,000	DAU		16 Orang	87,000,000	BPBD
1	5	1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang pemeliharaannya dibiayai	Kota Palopo	25 Unit	32,500,000	DAU		30 Unit	38,000,000	BPBD
1	5	1	2.0 9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah kendaraan dinas yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	Kota Palopo	1 Unit	20,000,000	DAU		1 Unit	21,000,000	BPBD

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB	
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
					Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
1	5	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	Kota Palopo	14 Unit	9,000,000	DAU		14 Unit	10,000,000	BPBD
1	5	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dibiayai	Kota Palopo	10 Unit	3,500,000	DAU		15 Unit	7,000,000	BPBD
1	5	3			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Total Jumlah Penduduk yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, layanan pencegahan dan kesiapsiagaan serta layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Kota Palopo	1	821,659,475	DAU		1	842,200,962	BPBD
1	5	3	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Informasi Bencana yang dilaksanakan (kali/Tahun)	Kota Palopo		-	DAU		3 Kali	25,000,000	BPBD
1	5	3	2.01	1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	Kota Palopo		-	DAU		3 Dokumen	10,000,000	BPBD
1	5	3	2.01	2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah peserta sosialisasi	Kota Palopo		-	DAU		25 Orang	15,000,000	BPBD
1	5	3	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Jenis Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan Bencana yang dilaksanakan	Kota Palopo	3 Jenis	57,709,475	DAU		4 Jenis	57,850,962	BPBD
1	5	3	2.02	1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana kab/kota	Jumlah Dokumen Rencana penanggulangan bencana	Kota Palopo	-	-	DAU		2 Dokumen	12,850,962	BPBD
1	5	3	2.02	2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	jumlah aparatur dan Warga Negara yang ikut pelatihan	Kota Palopo	-	-	DAU		30 Orang	15,000,000	BPBD
1	5	3	2.02	7	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga Negara yang mendapatkan bantuan pasca bencana	Kota Palopo	-	-	DAU		9 Kecamatan	30,000,000	BPBD
1	5	3	2.02	8	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personil TRC yang di diklat	Kota Palopo	65 orang	57,709,475	DAU		-	-	BPBD
1	5	3	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Bencana	Jumlah Jenis Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Bnecana yang dilaksanakan	Kota Palopo	3 Jenis	763,950,000	DAU		3 Jenis	759,350,000	BPBD
1	5	3	2.03	2	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Persentase kasus Darurat Bencana yang tertangani dalam 24 Jam	Kota Palopo	-	-	DAU		1	8,500,000	BPBD
1	5	3	2.03	3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	Kota Palopo	38 Orang	763,950,000	DAU		38 Orang	742,350,000	BPBD
1	5	3	2.03	4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	jumlah logistik yang disalurkan terhadap korban bencana	Kota Palopo	-	-	DAU		9 Kecamatan	8,500,000	BPBD
					DINAS SOSIAL				8,894,783,355				9,281,252,566	Dinsos

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB	
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	6	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palopo	1	2,803,691,705	DAU		1	2,873,783,997	Dinsos
1	6	1	2.0	1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Kota Palopo	5 Dokumen	3,000,000	DAU		5 Dokumen	4,000,000	Dinsos
1	6	1	2.0	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA dan DPA Perangkat Daerah	Kota Palopo	4 Dokumen	1,500,000	DAU		4 Dokumen	2,000,000	Dinsos
1	6	1	2.0	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palopo	1 Laporan	1,500,000	DAU		1 Laporan	2,000,000	Dinsos
1	6	1	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan keuangan	Kota Palopo	3 Laporan	2,364,517,705	DAU		3 Laporan	2,423,188,997	Dinsos
1	6	1	2.0	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	Kota Palopo	30 Orang	2,326,817,705	DAU		30 Orang	2,384,988,997	Dinsos
1	6	1	2.0	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan pertanggungjawaban yang diverifikasi	Kota Palopo	900 SPJ	35,200,000	DAU		900 SPJ	35,200,000	Dinsos
1	6	1	2.0	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan, semesteran, dan tahunan yang disusun	Kota Palopo	2 Laporan	2,500,000	DAU		2 Laporan	3,000,000	Dinsos
1	6	1	2.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi ASN PD yang dikelola	Kota Palopo	45 Org	45,000,000	DAU		15 Org	30,500,000	Dinsos
1	6	1	2.0	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	Kota Palopo	30 Stell	20,000,000	DAU		-	-	Dinsos
1	6	1	2.0	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	Kota Palopo	15 Org	25,000,000	DAU		15 Org	30,500,000	Dinsos
1	6	1	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan	Kota Palopo	3 Jenis	109,060,000	DAU		3 Jenis	121,760,000	Dinsos
1	6	1	2.0	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang diadakan	Kota Palopo	20 Buah	2,500,000	DAU		20 Buah	3,000,000	Dinsos
1	6	1	2.0	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang dibiayai	Kota Palopo	3 Eksemplar	3,960,000	DAU		3 Eksemplar	3,960,000	Dinsos
1	6	1	2.0	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SPPD yang dilaksanakan	Kota Palopo	38 SPPD	102,600,000	DAU		38 SPPD	114,800,000	Dinsos
1	6	1	2.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang di adakan	Kota Palopo	1 Unit	5,000,000	DAU		3 Unit	14,350,000	Dinsos
1	6	1	2.0	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Barang Milik Daerah yang di adakan	Kota Palopo	1 Unit	5,000,000	DAU		3 Unit	14,350,000	Dinsos
1	6	1	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai	Kota Palopo	3 Jenis	214,514,000	DAU		3 Jenis	215,985,000	Dinsos
1	6	1	2.0	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk, surat keluar, atk, cetak dan penggandaan	Kota Palopo	800 surat	43,500,000	DAU		800 surat	44,000,000	Dinsos
1	6	1	2.0	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening air, listrik dan internet yang dibiayai	Kota Palopo	9 Rekening	70,200,000	DAU		9 Rekening	70,200,000	Dinsos

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB	
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	6	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan kantor yang dilaksanakan	Kota Palopo	10 Layanan	100,814,000	DAU		10 Layanan	101,785,000	Dinsos
1	6	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang pemeliharaannya dibiayai	Kota Palopo	61 Unit	62,600,000	DAU		61 Unit	64,000,000	Dinsos
1	6	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	Kota Palopo	1 Unit	26,500,000	DAU		1 Unit	27,000,000	Dinsos
1	6	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	Kota Palopo	21 Unit	27,600,000	DAU		21 Unit	28,000,000	Dinsos
1	6	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dibiayai	Kota Palopo	39 Unit	8,500,000	DAU		39 Unit	9,000,000	Dinsos
1	6	2			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Rumah Tangga/ Keluarga Miskin yang mendapatkan Pemberdayaan Sosial	Kota Palopo	0.64	182,655,000	DAU		0.65	250,000,000	Dinsos
1	6	2	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang tertangani	Kota Palopo	2 Potensi	182,655,000	DAU		2 Potensi	250,000,000	Dinsos
1	6	2	2.03	3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan, evaluasi dan pelaporan Keluarga penerima bantuan sosial	Kota Palopo	12 Pengawasan	110,000,000	DAU		12 Pengawasan	170,000,000	Dinsos
1	6	2	2.03	5	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah PMKS yang melakukan konseling melalui Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kota Palopo	12 Konseling	72,655,000	DAU		12 Konseling	80,000,000	Dinsos
1	6	3			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Jumlah Kasus Korban Tindak Kekerasan Migran yang diselesaikan	Kota Palopo	0.5	45,000,000	DAU		0.5	46,125,000	Dinsos
1	6	3	2.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang menerima pelayanan	Kota Palopo	2 Orang	45,000,000	DAU		2 Orang	46,125,000	Dinsos
1	6	3	2.01	1	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang menerima layanan	Kota Palopo	2 Orang	45,000,000	DAU		2 Orang	46,125,000	Dinsos
1	6	4			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penduduk penyandang disabilitas, anak	Kota Palopo	100 %	242,613,656	DAU		100 %	350,000,000	Dinsos

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB	
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
						terlantar, lanjut usia serta gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti								
1	6	4	2.0 1		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis di luar panti yang menerima pelayanan	Kota Palopo	129 Org	212,283,656	DAU		160 Org	319,670,000	Dinsos
1	6	4	2.0 1	3	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah alat bantu yang diberikan kepada PMKS	Kota Palopo	6 Unit	26,000,000	DAU		10 Unit	43,330,000	Dinsos
1	6	4	2.0 1	5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis di luar panti yang menerima bimbingan	Kota Palopo	123 Org	186,283,656	DAU		150 Org	276,340,000	Dinsos
1	6	4	2.0 2		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza yang menerima layanan	Kota Palopo	45 Org	30,330,000	DAU		45 Org	30,330,000	Dinsos
1	6	4	2.0 2	7	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza yang menerima layanan	Kota Palopo	45 Org	30,330,000	DAU		45 Org	30,330,000	Dinsos
1	6	5			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Rumah tangga /Keluarga Miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial(%)	Kota Palopo	55.5	5,398,658,600	DAU		56	5,533,625,065	Dinsos
1	6	5	2.0 1		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak - Anak Terlantar luar panti yang di pantau	Kota Palopo	60 Org	16,874,600	DAU		60 Org	28,000,000	Dinsos
1	6	5	2.0 1	3	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar luar panti yang memperoleh layanan	Kota Palopo	60 Org	16,874,600	DAU		60 Org	28,000,000	Dinsos
1	6	5	2.0 2		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin yang mendapatkan bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Kota Palopo	20526 KK	5,381,784,000	DAU		20526 KK	5,505,625,065	Dinsos
1	6	5	2.0 2	2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin yang tervalidasi dalam DTKS	Kota Palopo	81.407 Jiwa	561,384,000	DAU		81.407 Jiwa	697,225,065	Dinsos
1	6	5	2.0 2	3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Fakir Miskin yang menerima RASTRA Daerah	Kota Palopo	3800 KK	4,820,400,000	DAU		3700 KK	4,808,400,000	Dinsos
1	6	6			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan	Kota Palopo	100 %	162,759,494	DAU		100 %	166,828,481	Dinsos

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
						setelah tanggap darurat bencana daerah								
1	6	6	2.0 1		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang diberikan pelayanan	Kota Palopo	120 Jiwa	49,759,494	DAU		120 Jiwa	52,828,481	Dinsos
1	6	6	2.0 1	5	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah masyarakat korban bencana yang mendapat bantuan peralatan dan logistik	Kota Palopo	120 Jiwa	49,759,494	DAU		120 Jiwa	52,828,481	Dinsos
1	6	6	2.0 2		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Rawan Bencana	Kota Palopo	5 Lokasi	113,000,000	DAU		5 Lokasi	114,000,000	Dinsos
1	6	6	2.0 2	1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Lokasi Rawan Bencana yang mendapat bantuan mitigasi tanggap darurat bencana	Kota Palopo	5 Lokasi	22,000,000	DAU		5 Lokasi	20,000,000	Dinsos
1	6	6	2.0 2	2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Taruna Siaga Bencana yang tanggap darurat bencana alam maupun bencana sosial	Kota Palopo	13 Orang	91,000,000	DAU		13 Orang	94,000,000	Dinsos
1	6	7			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Luas Taman Makam Pahlawan yang di Kelola	Kota Palopo	2,5 Ha	59,404,900	DAU		2,5 Ha	60,890,023	Dinsos
1	6	7	2.0 1		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	Kota Palopo	1 Lokasi	59,404,900	DAU		1 Lokasi	60,890,023	Dinsos
1	6	7	2.0 1	2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	Kota Palopo	1 Lokasi	59,404,900	DAU		1 Lokasi	60,890,023	Dinsos
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				113,637,207,442				119,482,405,924	
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				3,072,073,830				3,428,525,017	
					DINAS TENAGA KERJA				3,072,073,830				3,428,525,017	
2	7				DINAS TENAGA KERJA				3,072,073,830				3,428,525,017	
2	0	0	7	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palopo	100	2,394,349,650	DAU/DAAK		100	2,531,083,391	Disnaker
2	0	0	7	1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu	Kota Palopo	7 Dokumen	9,575,000	DAU/DAAK		7 Dokumen	1,610,000	Disnaker
2	0	0	7	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA dan DPA Perangkat Daerah	Kota Palopo	5 Dokumen	5,105,000	DAU/DAAK		5 Dokumen	110,000	Disnaker
2	0	0	7	1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palopo	2 Laporan	4,470,000	DAU/DAAK		2 Laporan	1,500,000	Disnaker
2	0	0	7	1	Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Keuangan	Kota Palopo	18 Laporan	1,909,072,000	DAU/DAAK		18 Laporan	2,119,400,000	Disnaker
2	0	0	7	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang Menerima Gaji dan Tunjangan	Kota Palopo	20 orang	1,769,872,000	DAU/DAAK		20 orang	2,005,000,000	Disnaker

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB	
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
2	0	0	2.0	0	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan Pertanggungjawaban yang diverifikasi	Kota Palopo	625 Laporan	125,000,000	DAU/D A K		650 Laporan	110,000,000	Disnaker
2	0	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Akhir Tahunan yang Disusun	Kota Palopo	1 Laporan	5,400,000	DAU/D A K		1 Laporan	1,500,000	Disnaker
2	0	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan / Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Bulanan/Triwulan/Semesteran Yang Disusun	Kota Palopo	18 Laporan	8,800,000	DAU/D A K		18Laporan	2,900,000	Disnaker
2	0	0	2.0		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Aset	Kota Palopo	5 Laporan	10,900,000	DAU/D A K		5 Laporan	8,500,000	Disnaker
2	0	0	2.0	0	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Aset yang Ditatakelolakan	Kota Palopo	77 Unit	10,900,000	DAU/D A K		77 Unit	8,500,000	Disnaker
2	0	0	2.0		Administrasi umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum yang Ditatakelolakan	Kota Palopo	2 jenis	160,600,000	DAU/D A K		2 jenis	162,800,000	Disnaker
2	0	0	2.0	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang diBiayai	Kota Palopo	2 Exp	5,600,000	DAU/D A K		2 Exp	2,800,000	Disnaker
2	0	0	2.0	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SPPD yang Dilaksanakan	Dalam/Luar Kota Palopo	50 sppd	155,000,000	DAU/D A K		53 sppd	160,000,000	Disnaker
2	0	0	2.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	Kota Palopo	9 Unit	52,000,000	DAU/D A K		10 Unit	44,000,000	Disnaker
2	0	0		0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis dan Jumlah Peralatan Kantor yang Diadakan	Kota Palopo	9 Unit	52,000,000	DAU/D A K		10 Unit	44,000,000	Disnaker
2	0	0	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dibiayai	Kota Palopo	3 Jenis	165,352,650	DAU/D A K		3 Jenis	123,573,391	Disnaker
2	0	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk, Surat Keluar, ATK dan Cetak	Kota Palopo	1.050 Surat	37,352,650	DAU/D A K		1.100 Surat	23,000,000	Disnaker
2	0	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Air, Listrik dan Internet yang Dibiayai	Kota Palopo	6 Rek	35,000,000	DAU/D A K		6 Rek	33,000,000	Disnaker
2	0	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Layanan Kantor yang Diklaksanakan	Kota Palopo	6 Layanan	93,000,000	DAU/D A K		6 Layanan	67,573,391	Disnaker
2	0	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Pemeliharaannya Dibiayai	Kota Palopo	53 Unit	86,850,000	DAU/D A K		54 Unit	71,200,000	Disnaker
2	0	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang Pemeliharaan dan Pajaknya Dibiayai	Kota Palopo	1 Unit	32,500,000	DAU/D A K		1 Unit	35,600,000	Disnaker
2	0	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas yang Pemeliharaan dan Pajaknya Dibiavai	Kota Palopo	28 Unit	36,000,000	DAU/D A K		28 Unit	27,000,000	Disnaker

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
					Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
2	07	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan Mesin yang Dibiayai	Kota Palopo	23 Unit	11,300,000	DAU/D A K		24 Unit	6,500,000	Disnaker
2	07	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasaran Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dan Luas Gedung Kantor yang dipelihara	Kota Palopo	1 Unit	7,050,000	DAU/D A K		2 Unit	2,100,000	Disnaker
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA	Persentase lulusan bersertifikat kompetensi (%)	Kota Palopo	109,94	515,000,000	DAU/D A K		115,75	540,649,375	Disnaker
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Jenis pelatihan berdasarkan kompetensi (jenis)	Kota Palopo	17	500,000,000	DAU/D A K		17	540,649,375	Disnaker
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja Terampil Terlatih (orang)	Kota Palopo	120	500,000,000	DAU/D A K		360	540,649,375	Disnaker
2	7	3	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LPKS yang aktif (Buah)	Kota Palopo		15,000,000	DAU/D A K		-	0	-
2	7	3	2.02	1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LPKS yang Dibina (Buah)	Kota Palopo	12 LPKS	15,000,000	DAU/D A K		-	0	-
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%)	Kota Palopo	55	56,500,500	DAU/D A K		56	227,250,188	Disnaker
2	07	04	2.01		Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kab/Kota	Jumlah Tenaga kerja yang diberikan pelayanan	Kota Palopo	2.200 Org	30,700,000	DAU/D A K		2.300 Org	31,500,000	Disnaker
2	07	04	2.01	02	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Pencari Terdaftar (orang)	Kota Palopo	2.200 Org	30,700,000	DAU/D A K		2.300 Org	31,500,000	Disnaker
2	07	04	2.02		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah	Jumlah LPTKS yang sudah berizin	Kota Palopo	1 lptks	0	DAU/D A K		1 lptks	11,750,188	Disnaker
2	07	04	2.02	02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang Mendapatkan Pengawasan dan Pengendalian	Kota Palopo	1 LPTKS	0	DAU/D A K		1 LPTKS	11,750,188	Disnaker
2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Informasi Pasar Kerja yang dikelola	Kota Palopo		25,800,500	DAU/D A K			184,000,000	Disnaker
2	07	04	2.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Layanan Informasi Pasar Kerja	Kota Palopo	1 Layanan	25,800,500	DAU/D A K		1 Layanan	26,000,000	Disnaker
2	07	04	2.03	03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang mengakses Job Fair (orang)	Kota Palopo	600 Org	0	DAU/D A K		700 Org	158,000,000	Disnaker
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (%)	Kota Palopo	13	106,223,680	DAU/D A K		14	129,542,063	Disnaker

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB	
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peraturan / perjanjian kerjasama yang disahkan	Kota Palopo	22	80,841,180	DAU/DAK		25	95,000,000	Disnaker
2	07	05	2.01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Tenaga Kerja yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perusahaan (orang)	Kota Palopo	200 Org	50,841,180	DAU/DAK		210 org	57,000,000	Disnaker
2	07	05	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Perusahaan yang menerapkan Tata Kelola Kerja yang layak (perusahaan)	Kota Palopo	550 Perusahaan	30,000,000	DAU/DAK		575 Perusahaan	38,000,000	Disnaker
2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jmlah kasus perselisihan hubungan industrial yang dilaporkan dan di selesaikan	Kota Palopo	22 Kasus	25,382,500	DAU/DAK		23 Kasus	34,542,063	Disnaker
2	07	05	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat /Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan	Kota Palopo	22 Kasus	25,382,500	DAU/DAK		23 Kasus	34,542,063	Disnaker
2	07				PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja yang Ditetapkan (%)	Kota Palopo	78,95		DAU/DAK		-	-	Disnaker
2	07	0	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang disusun	Kota Palopo	78,95		DAU/DAK				Disnaker
2	07	0	2.01	01	Peyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang disusun	Kota Palopo	78,95		DAU/DAK				Disnaker
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				2,899,953,719				2,972,452,561	
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				2,899,953,719				2,972,452,561	DPPPA
2	8	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah (%)	Kota Palopo		2,232,007,431	DAU			2,287,807,617	DPPPA
2	8	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu (Dok)	Kota Palopo		3,600,000	DAU			4,500,000	DPPPA
2	8	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra, renja, RKA dan DPA perangkat Daerah	Kota Palopo	2 Dokumen	1,800,000	DAU			2,700,000	DPPPA
2	8	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Palopo	2 Laporan	1,800,000	DAU			1,800,000	DPPPA
2	8	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Kota Palopo		1,787,823,000	DAU			1,787,823,000	DPPPA

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
2	8	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan Tunjangan	Kota Palopo	21 Orang	1,716,423,000	DAU			1,716,423,000	DPPPA
2	8	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan Pertanggungjawaban yang diverifikasi	Kota Palopo	14 Laporan	69,600,000	DAU			69,600,000	DPPPA
2	8	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	Kota Palopo	1 Laporan	900,000	DAU			900,000	DPPPA
2	8	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan, triwulan dan semesteran yang disusun	Kota Palopo	1 Laporan	900,000	DAU			900,000	DPPPA
2	8	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Kota Palopo		15,000,000	DAU			15,600,000	DPPPA
2	8	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah aset yang ditatakelolakan	Kota Palopo	122 Unit	15,000,000	DAU			15,600,000	DPPPA
2	8	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Kota Palopo		20,500,000	DAU			20,500,000	DPPPA
2	8	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	Kota Palopo	41 Orang	20,500,000	DAU			20,500,000	DPPPA
2	8	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Kota Palopo		174,877,000	DAU			206,409,617	DPPPA
2	8	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang diadakan	Kota Palopo	40 Buah	1,500,000	DAU			2,000,000	DPPPA
2	8	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Kota Palopo	6 Buah	1,800,000	DAU			1,800,000	DPPPA
2	8	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang dibiayai	Kota Palopo	36 Eksemplar	3,960,000	DAU			3,960,000	DPPPA
2	8	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	Kota Palopo	50 Orang	2,500,000	DAU			3,000,000	DPPPA
2	8	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SPPD yang dilaksanakan	Kota Palopo	50 SPPD	165,117,000	DAU			188,649,617	DPPPA
2	8	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah sistem atau aplikasi yang tersedia serta pengelolaannya	Kota Palopo	0 aplikasi	0	DAU			7,000,000	DPPPA
2	8	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Kota Palopo		60,000,000	DAU			65,250,000	DPPPA
2	8	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jenis dan Jumlah mebel yang diadakan	Kota Palopo	10 Jenis/Unit	15,000,000	DAU			18,000,000	DPPPA
2	8	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis dan Jumlah peralatan dan mesin yang disediakan	Kota Palopo	6 Jenis/Unit	39,000,000	DAU			40,950,000	DPPPA
2	8	1	2.07	8	Pengadaan Aset Tak Berwujud	jumlah aset tak berwujud yang dikelola	Kota Palopo	2 aplikasi	6,000,000	DAU			6,300,000	DPPPA
2	8	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kota Palopo		135,900,000	DAU			146,525,000	DPPPA
2	8	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk, surat keluar, atk, cetak dan penggandaan	Kota Palopo	670 surat	20,000,000	DAU			23,000,000	DPPPA
2	8	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening air, listrik dan internet yang di biayai	Kota Palopo	3 Rekening	32,500,000	DAU			34,125,000	DPPPA

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB	
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
2	8	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa layanan kantor yang dilaksanakan	Kota Palopo	15 Orang	83,400,000	DAU			89,400,000	DPPPA
2	8	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kota Palopo		34,307,431	DAU			41,200,000	DPPPA
2	8	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	Kota Palopo	4 Unit	27,000,000	DAU			27,000,000	DPPPA
2	8	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	Kota Palopo	0 Unit	0	DAU			2,500,000	DPPPA
2	8	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang pemeliharaannya dibiayai	Kota Palopo	20 Buah	1,407,431	DAU			2,500,000	DPPPA
2	8	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dibiayai	Kota Palopo	17 Buah	3,900,000	DAU			7,200,000	DPPPA
2	8	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah dan luas gedung kantor yang dipelihara	Kota Palopo	1 Unit	2,000,000	DAU			2,000,000	DPPPA
2	8	2			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		Kota Palopo		147,598,569	DAU			149,670,500	DPPPA
2	8	2	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		Kota Palopo		84,000,000	DAU			84,500,000	DPPPA
2	8	2	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah kebijakan teknis pelaksanaan PUG yang disusun dan ditetapkan ditingkat OPD	Kota Palopo	49 OPD	12,000,000	DAU			12,500,000	DPPPA
2	8	2	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi PUG	Kota Palopo	15 Kali	20,000,000	DAU			20,000,000	DPPPA
2	8	2	2.01	3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah perencana terlatih PPRG ditingkat OPD	Kota Palopo	49 Orang	22,000,000	DAU			22,000,000	DPPPA
2	8	2	2.01	4	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah OPD yang didampingi dalam pemenuhan 7 prasyarat PUG	Kota Palopo	49 OPD	30,000,000	DAU			30,000,000	DPPPA
2	8	2	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota		Kota Palopo		13,000,000	DAU			13,670,500	DPPPA
2	8	2	2.02	2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah perempuan yang berpartisipasi dalam politik, hukum, sosial dan ekonomi	Kota Palopo	150 Orang	13,000,000	DAU			13,670,500	DPPPA
2	8	2	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan		Kota Palopo		50,598,569	DAU			51,500,000	DPPPA

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB	
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
					Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota									
2	8	2	2.03	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi/lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang didampingi	Kota Palopo	4 Lembaga	10,500,000	DAU			10,500,000	DPPPA
2	8	2	2.03	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi/lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan terlatih penerapan standarisasi	Kota Palopo	4 Lembaga	20,098,569	DAU			21,000,000	DPPPA
2	8	2	2.03	3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok perempuan yang diberi pelatihan (PKK)	Kota Palopo	58 Kelompok	20,000,000	DAU			20,000,000	DPPPA
2	8	3			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Kota Palopo		152,000,000	DAU			158,474,444	DPPPA
2	8	3	2.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Kota Palopo		27,000,000	DAU			27,474,444	DPPPA
2	8	3	2.01	2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mendapatkan layanan perlindungan perempuan dan anak	Kota Palopo	40 Orang	27,000,000	DAU			27,474,444	DPPPA
2	8	3	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Kota Palopo		50,000,000	DAU			53,000,000	DPPPA
2	8	3	2.02	1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan Korban kekerasan yang ditindaklanjuti di P2TP2A	Kota Palopo	40 Orang	35,000,000	DAU			37,000,000	DPPPA
2	8	3	2.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah layanan rujukan korban kekerasan	Kota Palopo	4 Layanan	15,000,000	DAU			16,000,000	DPPPA
2	8	3	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Kota Palopo		75,000,000	DAU			78,000,000	DPPPA
2	8	3	2.03	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah rumah aman bagi korban kekerasan	Kota Palopo	1 Rumah Aman	35,000,000	DAU			38,000,000	DPPPA
2	8	3	2.03	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban	Jumlah tenaga layanan penanganan korban kekerasan dikota palopo	Kota Palopo	4 Orang	30,000,000	DAU			30,000,000	DPPPA

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB	
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
					Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota									
2	8	3	2.03	4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah jejaring antar lembaga penyedia layanan korban kekerasan	Kota Palopo	4 Lembaga	10,000,000	DAU			10,000,000	DPPPA
2	8	4			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		Kota Palopo		90,000,000	DAU			90,000,000	DPPPA
2	8	4	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Kota Palopo		0	DAU			0	DPPPA
2	8	4	2.01	3	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah partisipasi masyarakat yang mendukung peningkatan kualitas keluarga	Kota Palopo	2 Ormas	0	DAU			0	DPPPA
2	8	4	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Kota Palopo		40,000,000	DAU			40,000,000	DPPPA
2	8	4	2.02	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan peningkatan kualitas keluarga (PUSPAGA)	Kota Palopo	1 Layanan	40,000,000	DAU			40,000,000	DPPPA
2	8	4	2.03		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Kota Palopo		50,000,000	DAU			50,000,000	DPPPA
2	8	4	2.03	1	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang datang konsultasi keluarga	Kota Palopo	25 Orang	50,000,000	DAU			50,000,000	DPPPA
2	8	5			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		Kota Palopo		48,347,719	DAU			49,500,000	DPPPA
2	8	5	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Kota Palopo		48,347,719	DAU			49,500,000	DPPPA
2	8	5	2.01	1	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah petugas pengelola sistem informasi gender dan anak di OPD	Kota Palopo	49 Orang	20,000,000	DAU			20,500,000	DPPPA
2	8	5	2.01	2	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen profil gender dan anak yang tersusun	Kota Palopo	1 Dokumen	28,347,719	DAU			29,000,000	DPPPA
2	8	6			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		Kota Palopo		143,000,000	DAU			148,000,000	DPPPA

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB	
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
2	8	6	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Kota Palopo		104,000,000	DAU			108,000,000	DPPPA
2	8	6	2.01	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD melakukan advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak	Kota Palopo	36 OPD	83,122,600	DAU			85,000,000	DPPPA
2	8	6	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah forum anak yang terbentuk	Kota Palopo	58 Forum Anak	20,877,400	DAU			23,000,000	DPPPA
2	8	6	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Kota Palopo		39,000,000	DAU			40,000,000	DPPPA
2	8	6	2.02	3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KIE pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas anak	Kota Palopo	4 Lembaga Layanan Anak	21,000,000	DAU			21,500,000	DPPPA
2	8	6	2.02	4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan yang tersedia bagi peningkatan hidup anak	Kota Palopo	4 Layanan	18,000,000	DAU			18,500,000	DPPPA
2	8	7			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Kota Palopo		87,000,000	DAU			89,000,000	DPPPA
2	8	7	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Kota Palopo		24,000,000	DAU			25,000,000	DPPPA
2	8	7	2.01	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah anak yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan kekerasan	Kota Palopo	25 Orang	24,000,000	DAU			25,000,000	DPPPA
2	8	7	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Kota Palopo		23,000,000	DAU			23,000,000	DPPPA
2	8	7	2.02	1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	Kota Palopo	1 Layanan	23,000,000	DAU			23,000,000	DPPPA
2	8	7	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Kota Palopo		40,000,000	DAU			41,000,000	DPPPA

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB	
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
2	8	7	2.03	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah unit sarana dan prasarana layanan anak korban kekerasan yang tersedia di UPT PPA dikota Palopo	Kota Palopo	12 unit	20,000,000	DAU			21,000,000	DPPPA
2	8	7	2.03	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus	Kota Palopo	4 Lembaga	20,000,000	DAU			20,000,000	DPPPA
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				3,884,139,892				4,061,680,056	
					DINAS KETAHANAN PANGAN				3,884,139,892				4,061,680,056	
2	9	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palopo	1	2,129,256,075	DAU		1	2,182,487,477	Dis Ketahanan Pangan
2	9	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Kota Palopo	9 Dokumen	5,000,000	DAU		9 Dokumen	6,000,000	Dis Ketahanan Pangan
2	9	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra, renja, RKA dan DPA perangkat daerah	Kota Palopo	7 Dokumen	2,000,000	DAU		7 Dokumen	2,500,000	Dis Ketahanan Pangan
2	9	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Palopo	2 Laporan	3,000,000	DAU		2 Laporan	3,500,000	Dis Ketahanan Pangan
2	9	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan keuangan	Kota Palopo	12 Laporan	1,707,500,000	DAU		12 Laporan	1,713,000,000	Dis Ketahanan Pangan
2	9	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	Kota Palopo	27 Orang	1,660,000,000	DAU		30 Orang	1,663,000,000	Dis Ketahanan Pangan
2	9	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan pertanggungjawaban yang diverifikasi	Kota Palopo	950 LPJ	45,000,000	DAU		1.000 LPJ	47,000,000	Dis Ketahanan Pangan
2	9	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan yang disusun	Kota Palopo	4 Laporan Keuangan	2,500,000	DAU		4 Laporan Keuangan	3,000,000	Dis Ketahanan Pangan
2	9	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelolaan aset	Kota Palopo	8 Laporan	7,500,000	DAU		8 Laporan	8,500,000	Dis Ketahanan Pangan
2	9	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah aset yang ditatakelolakan	Kota Palopo	284 Unit	7,500,000	DAU		284 Unit	8,500,000	Dis Ketahanan Pangan
2	9	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN Perangkat Daerah yang dikelola	Kota Palopo	35 Orang	22,000,000	DAU		35 Orang	28,500,000	Dis Ketahanan Pangan
2	9	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	Kota Palopo	35 Orang	12,000,000	DAU		35 Orang	17,500,000	Dis Ketahanan Pangan

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB	
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
2	9	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah ASN yang memperoleh pelayanan kepegawaian tepat waktu	Kota Palopo	30 Orang	3,000,000	DAU		30 Orang	3,000,000	Dis Ketahanan Pangan
2	9	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	Kota Palopo	2 Orang	7,000,000	DAU		3 Orang	8,000,000	Dis Ketahanan Pangan
2	9	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan	Kota Palopo	4 Jenis	156,700,000	DAU		4 Jenis	187,960,000	Dis Ketahanan Pangan
2	9	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang diadakan	Kota Palopo	10 buah	1,200,000	DAU		15 buah	1,500,000	Dis Ketahanan Pangan
2	9	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dibiayai	Kota Palopo	3 jenis	2,500,000	DAU		5 jenis	2,500,000	Dis Ketahanan Pangan
2	9	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang dibiayai	Kota Palopo	3 Eksemplar	3,000,000	DAU		3 Eksemplar	3,960,000	Dis Ketahanan Pangan
2	9	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SPPD yang dibiayai	Dalam/Luar Kota Palopo	45 SPPD	150,000,000	DAU		48 SPPD	180,000,000	Dis Ketahanan Pangan
2	9	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	Kota Palopo	7 Jenis	21,000,000	DAU		9 Jenis	20,500,000	Dis Ketahanan Pangan
2	9	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jenis dan Jumlah mebel yang diadakan	Kota Palopo	2 Jenis	6,000,000	DAU		3 Jenis	7,500,000	Dis Ketahanan Pangan
2	9	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis dan Jumlah peralatan dan mesin yang disediakan	Kota Palopo	5 Unit	15,000,000	DAU		6 Unit	13,000,000	Dis Ketahanan Pangan
2	9	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai	Kota Palopo	50 Unit	143,556,075	DAU		44 Unit	146,527,477	Dis Ketahanan Pangan
2	9	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk, surat keluar, atk, cetak dan pengadaan	Kota Palopo	5 jenis	41,556,075	DAU		5 jenis	43,000,000	Dis Ketahanan Pangan
2	9	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening air, listrik dan internet yang dibiayai	Kota Palopo	4 Rekening	38,000,000	DAU		4 Rekening	38,527,477	Dis Ketahanan Pangan
2	9	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan kantor yang dilaksanakan	Kota Palopo	8 Layanan	64,000,000	DAU		8 Layanan	65,000,000	Dis Ketahanan Pangan
2	9	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang emeliharaannya dibiayai	Kota Palopo	4 Jenis	66,000,000	DAU		4 Jenis	71,500,000	Dis Ketahanan Pangan
2	9	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah kendaraan dinas yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	Kota Palopo	1 Unit	26,500,000	DAU		1 Unit	26,500,000	Dis Ketahanan Pangan

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB	
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
					Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
2	9	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	Kota Palopo	18 Unit	21,500,000	DAU		18 Unit	22,000,000	Dis Ketahanan Pangan
2	9	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dibiayai	Kota Palopo	30 Buah	7,000,000	DAU		24 Buah	8,000,000	Dis Ketahanan Pangan
2	9	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah dan Luas gedung kantor yang dipelihara	Kota Palopo	1 Unit	11,000,000	DAU		1 Unit	15,000,000	Dis Ketahanan Pangan
2	9	2			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Jumlah Kelompok Tani yang Memanfaatkan Infrastruktur Ketahanan Pangan (Kelompok)	Kota Palopo	6 Kelompok	992,902,917	DAU/D AK		6 Kelompok	1,098,162,156	Dis Ketahanan Pangan
2	9	2	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah infrastruktur ketahanan pangan (lumbung pangan, lantai jemur dsb) yang tersedia (unit)	Kota Palopo	6 Unit	992,902,917	DAU/D AK		6 Unit	1,098,162,156	Dis Ketahanan Pangan
2	9	2	2.01	1	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah gudang Lumbung pangan	Kota Palopo	2 Unit	330,000,000	DAU/D AK		2 Unit	375,000,000	Dis Ketahanan Pangan
2	9	2	2.01	2	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah lantai jemur lumbung pangan	Kota Palopo	2 Unit	82,902,917	DAU/D AK		2 Unit	93,162,156	Dis Ketahanan Pangan
2	9	2	2.01	3	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah sarana pendukung lumbung pangan	Kota Palopo	2 Unit	580,000,000	DAU/D AK		2 Unit	630,000,000	Dis Ketahanan Pangan
2	9	3			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Lokasi Rawan Pangan yang Melaksanakan Diversifikasi Pangan (%)	Kota Palopo	0.28	643,266,425	DAU/D AK		0.28	659,348,086	Dis Ketahanan Pangan
2	9	3	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah kebutuhan pangan pokok atau pangan lainnya (Ton/Kap/Hari)	Kota Palopo	17.896 Ton	51,500,000	DAU/D AK		17.323 Ton	59,348,086	Dis Ketahanan Pangan
2	9	3	2.01	1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah Dokumen Neraca Bahan Makanan	Kota Palopo	1 Dokumen	14,000,000	DAU/D AK		1 Dokumen	16,000,000	Dis Ketahanan Pangan
2	9	3	2.01	2	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah penyuluhan sumber pangan lokal	Kota Palopo	20 Kelompok	17,500,000	DAU/D AK		25 Kelompok	19,348,086	Dis Ketahanan Pangan
2	9	3	2.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah laporan rekomendasi yang dihasilkan	Kota Palopo	1 Laporan	9,000,000	DAU/D AK		1 Laporan	11,000,000	Dis Ketahanan Pangan

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB	
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
2	9	3	2.01	4	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah data harga dan pasokan pangan	Kota Palopo	4 Dokumen	11,000,000	DAU/D AK		4 Dokumen	13,000,000	Dis Ketahanan Pangan
2	9	3	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka kecukupan gizi masyarakat Kota Palopo	Kota Palopo	1845	591,766,425	DAU/D AK		1845	600,000,000	Dis Ketahanan Pangan
2	9	3	2.04	1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Jumlah data untuk penyusunan pola konsumsi pangan Kota Palopo	Kota Palopo	1 Dokumen	8,500,000	DAU/D AK		1 Dokumen	10,000,000	Dis Ketahanan Pangan
2	9	3	2.04	2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah pekarangan dan kelompok yang dimanfaatkan	Kota Palopo	9 Kelompok	583,266,425	DAU/D AK		9 Kelompok	590,000,000	Dis Ketahanan Pangan
2	9	4			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Jumlah Lokasi Rawan pangan Kota Palopo yang diintervensi (Kelurahan)	Kota Palopo	3 Kelurahan	78,566,250	DAU/D AK		2 Kelurahan	80,530,406	Dis Ketahanan Pangan
2	9	4	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Terdeteksinya daerah rawan pangan dan rentan pangan	Kota Palopo	48 Kelurahan	15,566,250	DAU/D AK		48 Kelurahan	16,030,406	Dis Ketahanan Pangan
2	9	4	2.01	1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	jumlah peta ketahanan dan kerentanan pangan	Kota Palopo	1 Peta	15,566,250	DAU/D AK		1 Peta	16,030,406	Dis Ketahanan Pangan
2	9	4	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penanganan cadangan pangan masyarakat & pemerintah daerah	Kota Palopo	2 Kelompok	63,000,000	DAU/D AK		2 Kelompok	64,500,000	Dis Ketahanan Pangan
2	9	4	2.02	2	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan masyarakat dan Pemerintah Daerah	Kota Palopo	5 Ton	63,000,000	DAU/D AK		5 Ton	64,500,000	Dis Ketahanan Pangan
2	9	5			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	Kota Palopo	0.9	40,148,225	DAU/D AK		0.91	41,151,931	Dis Ketahanan Pangan
2	9	5	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat pengawasan dan pembinaan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Kota Palopo	16 Laporan	40,148,225	DAU/D AK		16 Laporan	41,151,931	Dis Ketahanan Pangan
2	9	5	2.01	1	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pertemuan, pemantauan dan pengawasan tim terpadu	Kota Palopo	4 Pengawas an	6,050,000	DAU/D AK		4 Pengawa san	6,300,000	Dis Ketahanan Pangan
2	9	5	2.01	3	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen registrasi pangan segar asal tumbuhan	Kota Palopo	1 Dokumen	7,000,000	DAU/D AK		1 Dokumen	7,300,000	Dis Ketahanan Pangan
2	9	5	2.01	5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan, pengawasan dan pengujian sampel pangan segar	Kota Palopo	12 Kali	27,098,225	DAU/D AK		12 Kali	27,551,931	Dis Ketahanan Pangan
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				11,638,003,975				12,627,079,075	
					DINAS PERTANAHAN				11,638,003,975				12,627,079,075	

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB	
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
2	1	0	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palopo		2,439,710,125	DAU			2,500,702,878	Disertakan
2	1	0	1	2.0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu	Kota Palopo		5,254,000	DAU			5,150,000	Disertakan
2	1	0	1	2.0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen rentra, renja, rka dan dpa perangkat daerah	Kota Palopo	4 dokumen	2,379,000	DAU			2,350,000	Disertakan
2	1	0	1	2.0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Palopo	2 laporan	2,875,000	DAU			2,800,000	Disertakan
2	1	0	1	2.0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Kota Palopo		1,982,011,575	DAU			2,044,360,795	Disertakan
2	1	0	1	2.0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah ASN yang mendapat gaji dan tunjangan	Kota Palopo	23 orang	1,947,711,575	DAU			2,009,360,795	Disertakan
2	1	0	1	2.0	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah pertanggungjawaban yang diverifikasi	Kota Palopo	12 laporan	32,000,000	DAU			32,500,000	Disertakan
2	1	0	1	2.0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan yang disusun	Kota Palopo	15 laporan keuangan	2,300,000	DAU			2,500,000	Disertakan
2	1	0	1	2.0	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Kota Palopo		7,590,000	DAU			7,800,000	Disertakan
2	1	0	1	2.0	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah aset yang di tatakelola	Kota Palopo	147 unit	7,590,000	DAU			7,800,000	Disertakan
2	1	0	1	2.0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Kota Palopo		36,160,250	DAU			36,100,000	Disertakan
2	1	0	1	2.0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pakaian dinas yang diadakan	Kota Palopo	33 orang	26,898,500	DAU			26,800,000	Disertakan
2	1	0	1	2.0	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	Kota Palopo	2 orang	9,261,750	DAU			9,300,000	Disertakan
2	1	0	1	2.0	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Kota Palopo		80,250,000	DAU			85,240,000	Disertakan
2	1	0	1	2.0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen penerangan bangunan kantor	Kota Palopo	6 buah	750,000	DAU			780,000	Disertakan
2	1	0	1	2.0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan yang dibiayai	Kota Palopo	3 exemplar	6,000,000	DAU			6,500,000	Disertakan

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB	
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
2	10	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah SPPD yang dilaksanakan	Kota Palopo	55 SPPD	73,500,000	DAU			77,960,000	Disertanahan
2	10	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Kota Palopo		136,000,000	DAU			128,100,000	Disertanahan
2	10	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jenis dan jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan	Kota Palopo	3 unit	60,000,000	DAU			55,000,000	Disertanahan
2	10	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jenis dan jumlah mebel yang diadakan Kursi rapat	Kota Palopo	15 unit	9,000,000	DAU			9,000,000	Disertanahan
2	10	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kota Palopo	3 unit	32,000,000	DAU			32,100,000	Disertanahan
2	10	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana pendukung kantor yang disediakan	Kota Palopo	14 pasang	35,000,000	DAU			32,000,000	Disertanahan
2	10	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kota Palopo		171,444,300	DAU			172,852,083	Disertanahan
2	10	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah surat masuk, surat keluar, atk, cetak dan penggandaan	Kota Palopo	1500 surat	14,814,300	DAU			15,002,083	Disertanahan
2	10	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening air dan listrik dan internet yang dibiayai	Kota Palopo	1 rekening	7,590,000	DAU			7,850,000	Disertanahan
2	10	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah layanan kantor yang dilaksanakan	Kota Palopo	12 layanan	149,040,000	DAU			150,000,000	Disertanahan
2	10	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kota Palopo		21,000,000	DAU			21,100,000	Disertanahan
2	10	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	Kota Palopo	1 unit	15,000,000	DAU			15,000,000	Disertanahan
2	10	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas yang pemeliharaan dan pajaknya yang dibiayai	Kota Palopo	11 unit	1,500,000	DAU			1,600,000	Disertanahan
2	10	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dibiayai	Kota Palopo	7 unit	4,500,000	DAU			4,500,000	Disertanahan
2	10	2			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI		Kota Palopo		6,765,000	DAU			6,934,125	Disertanahan

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB	
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
2	10	2	2.01		Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Kota Palopo		6,765,000	DAU			6,934,125	Disertanahan
2	10	2	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	jumlah koordinasi izin modal yang dilaksanakan	Kota Palopo	3 kali	6,765,000	DAU			6,934,125	Disertanahan
2	10	4			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN		Kota Palopo		32,718,000	DAU			33,535,950	Disertanahan
2	10	4	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Kota Palopo		32,718,000	DAU			33,535,950	Disertanahan
2	10	4	2.01	1	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah laporan inventarisasi kasus sengketa	Kota Palopo	20 laporan	8,500,000	DAU			9,000,000	Disertanahan
2	10	4	2.01	2	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah mediasi yang dilaksanakan dalam penyelesaian kasus sengketa	Kota Palopo	3 Kasus	24,218,000	DAU			24,535,950	Disertanahan
2	10	5			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN		Kota Palopo		9,075,000,000	DAU			10,000,000,000	Disertanahan
2	10	5	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Kota Palopo		9,075,000,000	DAU			10,000,000,000	Disertanahan
2	10	5	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah kota	Kota Palopo	7 bidang	9,075,000,000	DAU			10,000,000,000	Disertanahan
2	10	6			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE		Kota Palopo		61,862,850	DAU			63,409,421	Disertanahan
2	10	6	2.01		Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Kota Palopo		61,862,850	DAU			63,409,421	Disertanahan
2	10	6	2.01	1	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	jumlah obyek tanah yang diinventarisasi	Kota Palopo	6 sertifikat	61,862,850	DAU			63,409,421	Disertanahan
2	10	8			PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG		Kota Palopo		8,500,000	DAU			8,712,500	Disertanahan

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB	
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
2	10	8	2.02		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong		Kota Palopo		8,500,000	DAU			8,712,500	Disertanahan
2	10	8	2.02	1	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	jumlah inventarisasi tanah kosong	Kota Palopo	8 dokumen	8,500,000	DAU			8,712,500	Disertanahan
2	10	9			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH		Kota Palopo		8,302,500	DAU			8,510,063	Disertanahan
2	10	9	2.01		Penerbitan Izin Membuka Tanah		Kota Palopo		8,302,500	DAU			8,510,063	Disertanahan
2	10	9	2.01	2	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	luas tanah negara yang difungsikan	Kota Palopo	6 Bidang	8,302,500	DAU			8,510,063	Disertanahan
2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH		Kota Palopo		5,145,500	DAU			5,274,138	Disertanahan
2	10	10	2.01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota		Kota Palopo		5,145,500	DAU			5,274,138	Disertanahan
2	10	10	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	data pemanfaatan dan penggunaan tanah dalam satu kabupaten/kota	Kota Palopo	8 dokumen	5,145,500	DAU			5,274,138	Disertanahan
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				34,865,423,428				38,764,559,013	
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP				34,865,423,428				38,764,559,013	
2	11	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Kota Palopo	100	9,746,600,000	DAU		100	10,235,949,735	Dis LH & Kebersihan
2	11	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kota Palopo	7	41,500,000	DAU		7	62,000,000	Dis LH & Kebersihan
2	11	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA dan DPA	Kota Palopo	7 Dokumen	41,500,000	DAU		7	62,000,000	Dis LH & Kebersihan
2	11	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Kota Palopo		6,608,500,000	DAU		12	6,857,969,999	Dis LH & Kebersihan
2	11	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	Kota Palopo	88 Orang	6,458,500,000	DAU		88	6,657,969,999	Dis LH & Kebersihan
2	11	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan pertanggungjawaban yang diverifikasi	Kota Palopo	710 Laporan	150,000,000	DAU		711	200,000,000	Dis LH & Kebersihan
2	11	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Kota Palopo		307,100,000	DAU		112	407,700,000	Dis LH & Kebersihan

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
2	1	1	2.0	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Kompenen Instalasi Listrik yang diadakan	Kota Palopo	15 Buah	1,900,000	DAU		18	2,100,000	Dis LH & Kebersihan
2	1	1	2.0	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Kota Palopo	17 Buah	3,300,000	DAU		20	3,500,000	Dis LH & Kebersihan
2	1	1	2.0	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang dibiayai	Kota Palopo	4 Expl	6,600,000	DAU		4	6,600,000	Dis LH & Kebersihan
2	1	1	2.0	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SPPD yang dilaksanakan	Kota Palopo	65 Kali	295,300,000	DAU		70	395,500,000	Dis LH & Kebersihan
2	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Kota Palopo		45,000,000	DAU		14	56,000,000	Dis LH & Kebersihan
2	1	1	2.0	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis dan Jumlah Peralatan dan Mesin yang disediakan	Kota Palopo	12 Unit	45,000,000	DAU		14	56,000,000	Dis LH & Kebersihan
2	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kota Palopo		2,567,000,000	DAU		2019	2,722,679,736	Dis LH & Kebersihan
2	1	1	2.0	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk, Surat Keluar, ATK, Cetak dan Penggandaan	Kota Palopo	1400 Surat/ Jenis/Buah	67,000,000	DAU		2000	100,000,000	Dis LH & Kebersihan
2	1	1	2.0	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Air, Listrik dan Internet yang dibiayai	Kota Palopo	10 Rekening	100,000,000	DAU		10	100,000,000	Dis LH & Kebersihan
2	1	1	2.0	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Layanan Kantor yang dilaksanakan	Kota Palopo	9 Layanan	2,400,000,000	DAU		9	2,522,679,736	Dis LH & Kebersihan
2	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kota Palopo		177,500,000	DAU		322	129,600,000	Dis LH & Kebersihan
2	1	1	2.0	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang Pemeliharaan dan Pajaknya dibiayai	Kota Palopo	1 Unit	24,500,000	DAU		1	24,600,000	Dis LH & Kebersihan
2	1	1	2.0	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Pemeliharaan dan Pajaknya dibiayai	Kota Palopo	1 Unit	68,000,000	DAU		1	70,000,000	Dis LH & Kebersihan
2	1	1	2.0	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dibiayai	Kota Palopo	20 Unit	5,000,000	DAU		20	15,000,000	Dis LH & Kebersihan
2	1	1	2.0	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah dan luas gedung kantoryang dipelihara	Kota Palopo	300 M2	80,000,000	DAU		300	20,000,000	Dis LH & Kebersihan

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB	
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
2	1	2			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		Kota Palopo		300,000,000	DAU		0	24,100,000	Dis LH & Kebersihan
2	1	2	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota		Kota Palopo		300,000,000	DAU		0	24,100,000	Dis LH & Kebersihan
2	1	2	2.02	3	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen yang tersedia	Kota Palopo	1 Dokumen	300,000,000	DAU		1	24,100,000	Dis LH & Kebersihan
2	1	3			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		Kota Palopo		302,786,328	DAU/DAK		140	353,391,250	Dis LH & Kebersihan
2	1	3	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota		Kota Palopo		302,786,328	DAU/DAK		3	353,391,250	Dis LH & Kebersihan
2	1	3	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Predikat Adipura	Kota Palopo	1 Penghargaan	52,150,000	DAU/DAK		1	74,891,250	Dis LH & Kebersihan
2	1	3	2.01	3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Laboratorium yang dikelola	Kota Palopo	1 Unit	250,636,328	DAU/DAK		2	278,500,000	Dis LH & Kebersihan
2	1	4			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		Kota Palopo		3,100,000,000	DAU/DAK		1177	3,565,000,000	Dis LH & Kebersihan
2	1	4	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota		Kota Palopo		3,100,000,000	DAU/DAK		1177	3,565,000,000	Dis LH & Kebersihan
2	1	4	2.01	4	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah luas Ruang Terbuka Hijau yang dikelola	Kota Palopo	1176 M2	3,100,000,000	DAU/DAK		1177	3,565,000,000	Dis LH & Kebersihan
2	1	5			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		Kota Palopo		13,427,500	DAU/DAK		100	13,763,188	Dis LH & Kebersihan
2	1	5	2.01		Penyimpanan Sementara Limbah B3		Kota Palopo		13,427,500	DAU/DAK		5	13,763,188	Dis LH & Kebersihan
2	1	5	2.01	2	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah B3 dan Limbah B3 yang dikelola	Kota Palopo	5 Laporan	13,427,500	DAU/DAK		5	13,763,188	Dis LH & Kebersihan
2	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN		Kota Palopo		50,000,000	DAU/DAK		100	51,250,000	Dis LH & Kebersihan

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB	
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
					PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)									
2	1	6	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Kota Palopo		50,000,000	DAU/DAK		1	51,250,000	Dis LH & Kebersihan
2	1	6	2.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Dokumen AMDAL	Kota Palopo	1 Dokumen	50,000,000	DAU/DAK		1	51,250,000	Dis LH & Kebersihan
2	1	8			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Kota Palopo		18,014,375	DAU/DAK		20	18,464,734	Dis LH & Kebersihan
2	1	8	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Kota Palopo		18,014,375	DAU/DAK		20	18,464,734	Dis LH & Kebersihan
2	1	8	2.01	2	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	Kota Palopo	20 Kali	18,014,375	DAU/DAK		100	18,464,734	Dis LH & Kebersihan
2	1	9			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Kota Palopo		42,429,875	DAU/DAK		10	43,490,622	Dis LH & Kebersihan
2	1	9	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Kota Palopo		42,429,875	DAU/DAK		10	43,490,622	Dis LH & Kebersihan
2	1	9	2.01	1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah sekolah adiwiyata yang dibina	Kota Palopo	4 Sekolah	42,429,875	DAU/DAK		100	43,490,622	Dis LH & Kebersihan
2	1	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		Kota Palopo		29,165,350	DAU/DAK		10	29,894,484	Dis LH & Kebersihan
2	1	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota		Kota Palopo		29,165,350	DAU/DAK		10	29,894,484	Dis LH & Kebersihan
2	1	10	2.01	1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan masyarakat yang diselesaikan	Kota Palopo	8 Kali	29,165,350	DAU/DAK		67.09	29,894,484	Dis LH & Kebersihan
2	1	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		Kota Palopo		13,130,000,000	DAU/DAK		1	16,405,000,000	Dis LH & Kebersihan

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB	
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
2	1	1	2.01		Pengelolaan Sampah		Kota Palopo		13,130,000,000	DAU/DAK		500	16,405,000,000	Dis LH & Kebersihan
2	1	1	2.01	1	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Dokumen Jakstrada	Kota Palopo	1 dokumen	30,000,000	DAU/DAK		12	30,000,000	Dis LH & Kebersihan
2	1	1	2.01	3	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah petugas kebersihan	Kota Palopo	672 Orang	7,868,737,000	DAU/DAK		120	14,205,000,000	Dis LH & Kebersihan
2	1	1	2.01	4	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah pengelola TPS3R dan bank sampah	Kota Palopo	21 Orang	267,015,000	DAU/DAK		1	200,000,000	Dis LH & Kebersihan
2	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah kendaraan operasional yang dikelola	Kota Palopo	120 Unit	4,244,248,000	DAU/DAK			1,220,000,000	Dis LH & Kebersihan
2	1	1	2.01	7	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah TPA yang dikelola	Kota Palopo	1 TPA	720,000,000	DAU/DAK		100	750,000,000	Dis LH & Kebersihan
2	1	5			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		Kota Palopo		8,133,000,000				8,024,255,000	Dis LH & Kebersihan
2	1	5	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Kota Palopo		8,133,000,000	DAU/DAK		10	8,024,255,000	Dis LH & Kebersihan
2	1	5	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Kota Palopo		8,133,000,000	DAU/DAK		100	8,024,255,000	Dis LH & Kebersihan
2	1	5	2.02	1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasaranan jalan yang dibangun	Kota Palopo	10 Paket	2,200,000,000	DAU/DAK		30	2,200,000,000	Dis LH & Kebersihan
2	1	5	2.02	3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah PJU yang dibiayai	Kota Palopo	10 PJU	5,933,000,000	DAU/DAK		10	5,824,255,000	Dis LH & Kebersihan
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				4,378,220,205				4,481,750,710	
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				4,378,220,205				4,481,750,710	
2	1	2	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintah Daerah (%)	Kota Palopo		3,179,298,705	DAU			3,258,781,172	Dis PendukCapil
2	1	2	2.01	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun Tepat Waktu (dokumen)	Kota Palopo		4,901,000	DAU			5,070,718	Dis PendukCapil
2	1	2	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen renstra renja.RKA,DPA, perangkat daerah (dokumen)	Kota Palopo	7 dokumen	1,886,000	DAU			1,970,718	Dis PendukCapil

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB		
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023			
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
2	1	2	1	2.0	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan akuntabilitas kinerja perangkat daerah (dokumen)	Kota Palopo	1 laporan	3,015,000	DAU			3,100,000	Dis PendukCa pil
2	1	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Kota Palopo		2,410,500,705	DAU			2,469,512,500	Dis PendukCa pil
2	1	2	1	2.0	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan (orang)	Kota Palopo	33 orang	2,350,000,705	DAU			2,400,000,000	Dis PendukCa pil
2	1	2	1	2.0	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah laporan pertanggungjawaban yang diverifikasi (jumlah lembar lpij)	Kota Palopo	16000 LPJ	50,000,000	DAU			57,500,000	Dis PendukCa pil
2	1	2	1	2.0	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah laporan keuangan akhir tahun yang dibuat	Kota Palopo	1 laporan	5,000,000	DAU			5,512,500	Dis PendukCa pil
2	1	2	1	2.0	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan bulanan /triwulan semesteran yang di buat (laporan)	Kota Palopo	17 laporan	5,500,000	DAU			6,500,000	Dis PendukCa pil
2	1	2	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Kota Palopo		8,700,000	DAU			9,500,000	Dis PendukCa pil
2	1	2	1	2.0	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah aset yang di tata kelola (jenis)	Kota Palopo	6 jenis	8,700,000	DAU			9,500,000	Dis PendukCa pil
2	1	2	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Kota Palopo		60,200,000	DAU			67,250,000	Dis PendukCa pil
2	1	2	1	2.0	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pakaian dinas	Kota Palopo	35 stel	11,700,000	DAU			13,000,000	Dis PendukCa pil
2	1	2	1	2.0	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	jumlah laporan kinerja yang dievaluasi	Kota Palopo	37 SKP	11,500,000	DAU			13,250,000	Dis PendukCa pil
2	1	2	1	2.0	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah ASN yang mengikuti bimbingan tehnik(orang ASN)	Kota Palopo	7 orang	37,000,000	DAU			41,000,000	Dis PendukCa pil
2	1	2	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Kota Palopo		219,225,000	DAU			225,940,750	Dis PendukCa pil
2	1	2	1	2.0	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik yang diadakan (buah)	Kota Palopo	49 buah	3,900,000	DAU			4,300,000	Dis PendukCa pil
2	1	2	1	2.0	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan yang di biyai(exlampler)	Kota Palopo	48 eksampler	4,800,000	DAU			4,800,000	Dis PendukCa pil
2	1	2	1	2.0	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah SPPD yang di laksanakan (kali)	Kota Palopo	95 kali	210,525,000	DAU			216,840,750	Dis PendukCa pil

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB		
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023			
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
2	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Kota Palopo		115,000,000	DAU			137,500,000	Dis PendukCapil	
2	1	2	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah jenis kendaraanoperasional yang diadakan	Kota Palopo	0 unit	0	DAU			40,000,000	Dis PendukCapil
2	1	2	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	jenis dan jumlah mebel yang diadakan	Kota Palopo	3 jenis	15,000,000	DAU			25,000,000	Dis PendukCapil
2	1	2	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jenis dan jumlah mesin yang diadakan	Kota Palopo	12 unit	100,000,000	DAU			72,500,000	Dis PendukCapil
2	1	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kota Palopo		260,772,000	DAU			200,907,204	Dis PendukCapil
2	1	2	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah surat masuk keluar ,ATK,cetak dan pengandaan (surat/jenis,buah)	Kota Palopo	547 surat/jenis/ buah	102,700,000	DAU			105,000,000	Dis PendukCapil
2	1	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening air telpon listrik internet yang di biayai	Kota Palopo	4 rekening	77,672,000	DAU			8,155,500	Dis PendukCapil
2	1	2	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	luas bangunan kantor yang dibersihkan(m2)	Kota Palopo	1500 m2	9,000,000	DAU			14,209,704	Dis PendukCapil
2	1	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah layanan kantor yang dilaksanakan(layanan)	Kota Palopo	5 layanan	71,400,000	DAU			73,542,000	Dis PendukCapil
2	1	2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kota Palopo		100,000,000	DAU			143,100,000	Dis PendukCapil
2	1	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas dan jabatan yang pemeliaraanya dan pajaknya dibiayai	Kota Palopo	10 unit	3,000,000	DAU			3,400,000	Dis PendukCapil
2	1	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai (unit)	Kota Palopo	1 unit	53,000,000	DAU			58,000,000	Dis PendukCapil
2	1	2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang di biayai(unit)	Kota Palopo	14 unit	21,000,000	DAU			56,000,000	Dis PendukCapil
2	1	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah dan luas gedung kantor yang dipelihara	Kota Palopo	500 m2	23,000,000	DAU			25,700,000	Dis PendukCapil
								Kota Palopo			DAU				Dis PendukCapil

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB	
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
2	1	2			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		Kota Palopo		929,601,500	DAU			953,329,538	Dis PendukCapil
2	1	2	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Kota Palopo	12 laporan	194,500,000	DAU			205,416,125	Dis PendukCapil
2	1	2	2.01	2	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Penerbitan dan Pendaftaran Penduduk yang Ditatausahakan (laporan/Tahun)	Kota Palopo	12 laporan	44,500,000	DAU			49,958,125	Dis PendukCapil
2	1	2	2.01	4	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan/Tahun)	Kota Palopo		150,000,000	DAU			155,458,000	Dis PendukCapil
2	1	2	2.02		Penataan Pendaftaran Penduduk		Kota Palopo	1 laporan	678,800,000	DAU			689,716,375	Dis PendukCapil
2	1	2	2.02	1	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pedoman dan Penataan Pendaftaran Penduduk yang Disusun/Diperbaiki (Laporan/Tahun)	Kota Palopo	3000 buah	12,000,000	DAU			17,458,125	Dis PendukCapil
2	1	2	2.02	2	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Bahan Dokumen Kependudukan yang disediakan (Buah/Tahun)	Kota Palopo		666,800,000	DAU			672,258,250	Dis PendukCapil
2	1	2	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		Kota Palopo	85 kali	32,360,000	DAU			32,360,000	Dis PendukCapil
2	1	2	2.03	1	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Palopo		32,360,000	DAU			32,360,000	Dis PendukCapil
2	1	2	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		Kota Palopo	12 laporan	23,941,500	DAU			25,837,038	Dis PendukCapil
2	1	2	2.04	1	Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Penatausahaan Penerbitan Dokumen(Laporan)	Kota Palopo		23,941,500	DAU			25,837,038	Dis PendukCapil
2	1	2	3		PROGRAM PENCATATAN SIPIL		Kota Palopo		64,680,000	DAU			65,000,000	Dis PendukCapil
2	1	2	3.01		Pelayanan Pencatatan Sipil		Kota Palopo	12 laporan	64,680,000	DAU			65,000,000	Dis PendukCapil

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB	
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
2	1	3	2.0	1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	jumlah laporan penatausahaan penerbitan dokumen akta kelahiran (laporan)	Kota Palopo	12 Laporan	9,700,000	DAU			10,000,000	Dis PendukCa pil
2	1	3	2.0	2	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Dokumen Kartu Keluarga (Laporan)	Kota Palopo		54,980,000	DAU			55,000,000	Dis PendukCa pil
2	1	4			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		Kota Palopo		345,040,000	DAU			204,640,000	Dis PendukCa pil
2	1	4	2.0		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan		Kota Palopo	1 sistem	30,550,000	DAU			30,550,000	Dis PendukCa pil
2	1	4	2.0	1	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah sistem data yang dikelola (Sistem)	Kota Palopo		30,550,000	DAU			30,550,000	Dis PendukCa pil
2	1	4	2.0		Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Kota Palopo	12 Laporan	14,490,000	DAU			14,490,000	Dis PendukCa pil
2	1	4	2.0	1	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi yang disusun (Laporan/Tahun)	Kota Palopo		14,490,000	DAU			14,490,000	Dis PendukCa pil
2	1	4	2.0		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Kota Palopo	1 laporan	140,400,000	DAU			159,600,000	Dis PendukCa pil
2	1	4	2.0	4	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Aplikasi dan Laporan Pemanfaatan Data Kependudukan			140,400,000				159,600,000	
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				10,588,326,353				10,964,658,266	
					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				10,588,326,353				10,964,658,266	
2	1	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palopo	100	4,096,650,000	DAU		100	4,147,350,000	Dispenduk & KB
2	1	0	2.0		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Kota Palopo	8 Dokumen	10,000,000	DAU		8 Dokumen	10,000,000	Dispenduk & KB
2	1	0	2.0	0	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra, renja, RKA dan DPA	Kota Palopo	7 Dokumen	7,000,000	DAU		7 Dokumen	7,000,000	Dispenduk & KB
2	1	0	2.0	0	Koordinasi & Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Palopo	1 Laporan	3,000,000	DAU		1 Laporan	3,000,000	Dispenduk & KB
2	1	0	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan keuangan	Kota Palopo	14 Laporan	3,426,000,000	DAU		14 Laporan	3,426,000,000	Dispenduk & KB

KODE REKENING						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB			
								Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023				
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		
2	1	4	0	2	0	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	Kota Palopo	45 Orang	3,350,000,000	DAU		45 Orang	3,350,000,000	Dispenduk & KB	
2	1	4	0	2	0	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan pertanggungjawaban yang diverifikasi	Kota Palopo	1.300 Kuitansi	72,000,000	DAU		1.300 Kuitansi	72,000,000	Dispenduk & KB	
2	1	4	0	2	0	7	Koordinasi & Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan yang disusun	Kota Palopo	14 Laporan	4,000,000	DAU		14 Laporan	4,000,000	Dispenduk & KB	
2	1	4	0	2	0	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelolaan aset	Kota Palopo	112 Unit	10,200,000	DAU		112 Unit	10,200,000	Dispenduk & KB	
2	1	4	0	2	0	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah aset yang ditatakelola	Kota Palopo	112 Unit	10,200,000	DAU		112 Unit	10,200,000	Dispenduk & KB	
2	1	4	0	2	0	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi ASN Perangkat Daerah yang dikelola	Kota Palopo	50 Orang	87,500,000	DAU		50 Orang	87,500,000	Dispenduk & KB	
2	1	4	0	2	0	5	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	Kota Palopo	50 Orang	56,500,000	DAU		50 Orang	56,500,000	Dispenduk & KB
2	1	4	0	2	0	5	3	Pendataan & Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah ASN yang memperoleh pelayanan kepegawaian tepat waktu	Kota Palopo	50 Orang	11,000,000	DAU		50 Orang	11,000,000	Dispenduk & KB
2	1	4	0	2	0	5	0	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi	Kota Palopo	6 Orang	10,000,000	DAU		6 Orang	10,000,000	Dispenduk & KB
2	1	4	0	2	0	5	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	Kota Palopo	6 Orang	10,000,000	DAU		6 Orang	10,000,000	Dispenduk & KB
2	1	4	0	2	0	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelola	Kota Palopo	4 Jenis	121,800,000	DAU		4 Jenis	121,800,000	Dispenduk & KB
2	1	4	0	2	0	6	2	Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan & perlengkapan gedung kantor	Kota Palopo	7 jenis	5,000,000	DAU		7 jenis	5,000,000	Dispenduk & KB
2	1	4	0	2	0	6	6	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah bahan bacaan yang dibiayai	Kota Palopo	2 Eksampler	2,400,000	DAU		2 Eksampler	2,400,000	Dispenduk & KB
2	1	4	0	2	0	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD	Jumlah SPPD yang dilaksanakan	Kota Palopo	25 Sppd	100,000,000	DAU		25 Sppd	100,000,000	Dispenduk & KB
2	1	4	0	2	0	6	1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah sistem atau aplikasi yang tersedia serta pengelolaannya	Kota Palopo	5 Aplikasi	14,400,000	DAU		5 Aplikasi	14,400,000	Dispenduk & KB
2	1	4	0	2	0	7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	Kota Palopo	7 Jenis	75,000,000	DAU		7 Jenis	75,000,000	Dispenduk & KB
2	1	4	0	2	0	7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah & jenis peralatan dan mesin	Kota Palopo	4 Jenis	75,000,000	DAU		4 Jenis	75,000,000	Dispenduk & KB
2	1	4	0	2	0	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai	Kota Palopo	14 Jenis	219,000,000	DAU		14 Jenis	219,000,000	Dispenduk & KB
2	1	4	0	2	0	8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk, surat keluar, atk, cetak & penggandaan	Kota Palopo	900 Surat	15,000,000	DAU		900 Surat	15,000,000	Dispenduk & KB
2	1	4	0	2	0	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah rekening air, listrik dan internet yang dibiayai	Kota Palopo	3 Rekening	70,000,000	DAU		3 Rekening	70,000,000	Dispenduk & KB
2	1	4	0	2	0	8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan kantor yang dilaksanakan	Kota Palopo	10 Layanan	134,000,000	DAU		10 Layanan	134,000,000	Dispenduk & KB

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB	
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
2	1	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang pemeliharaannya dibiayai	Kota Palopo	128 Unit	147,150,000	DAU		128 Unit	197,850,000	Dispenduk & KB
2	1	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan & Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	Kota Palopo	1 Unit	25,000,000	DAU		1 Unit	25,000,000	Dispenduk & KB
2	1	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan & Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	Kota Palopo	112 Unit	84,150,000	DAU		112 Unit	134,850,000	Dispenduk & KB
2	1	0	2.0	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan & mesin lainnya yang dibiayai pemeliharaannya	Kota Palopo	15 Buah	8,000,000	DAU		15 Buah	8,000,000	Dispenduk & KB
2	1	0	2.0	0	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor & Bangunan Lainnya	Jumlah dan luas gedung kantor yang dipelihara	Kota Palopo	300 m2	30,000,000	DAU		300 m2	30,000,000	Dispenduk & KB
2	1	0	4	2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rata - rata jumlah anak per keluarga	Kota Palopo	2 Orang	245,875,000	DAU/DAAK		2 Orang	470,875,000	Dispenduk & KB
2	1	0	2.0		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah kabupaten / Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah dokumen & data pengendalian penduduk yang tersusun	Kota Palopo	2 Dokumen	95,875,000	DAU/DAAK		2 Dokumen	95,875,000	Dispenduk & KB
2	1	0	2.0	0	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen grand design kependudukan yang tersusun	Kota Palopo	-	-	DAU/DAAK		-	-	Dispenduk & KB
2	1	0	2.0	0	Advokasi, sosialisasi & fasilitasi pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur formal di satuan pendidikan jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, jalur non formal dan informal	Jumlah siswa & masyarakat yang mendapatkan sosialisasi	Kota Palopo	100 Orang	95,875,000	DAU/DAAK		100 Orang	95,875,000	Dispenduk & KB
2	1	0	2.0		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah laporan data mikro keluarga	Kota Palopo	2 Laporan	150,000,000	DAU/DAAK		2 Laporan	375,000,000	Dispenduk & KB
2	1	0	2.0	1	Penyediaan data dan informasi keluarga	Jumlah Kepala Keluarga yang terdata	Kota Palopo	56582 KK	120,000,000	DAU/DAAK		56582 KK	120,000,000	Dispenduk & KB
2	1	0	2.0	1	Pembinaan dan pengawasan pencatatan dan pelaporan program KKBPK	Jumlah kampung KB yang dibina & dilakukan pengawasan pelaporannya	Kota Palopo	9 Kampung KB	30,000,000	DAU/DAAK		9 Kampung KB	255,000,000	Dispenduk & KB
2	1	0	4	3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase PUS yang ber- KB (%)	Kota Palopo	8	6,020,524,853	DAU/DAAK		8	6,070,524,853	Dispenduk & KB
2	1	0	2.0		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi & Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk & KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah UPTD yang sarananya di tata kelola	Kota Palopo	4 Layanan	576,498,000	DAU/DAAK		4 Layanan	576,498,000	Dispenduk & KB

KODE REKENING						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB	
								Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
2	1	4	0	2.0	0	Penyediaan Distribusi & Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah operasional pengelola BOKB	Kota Palopo	4 Orang / 4 Media	156,498,000	DAU/DAK		4 Orang / 4 Media	156,498,000	Dispenduk & KB
2	1	4	0	2.0	0	Pengelolaan Operasional & Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah operasional UPTD KB yang ditata kelola	Kota Palopo	9 UPTD	420,000,000	DAU/DAK		9 UPTD	420,000,000	Dispenduk & KB
2	1	4	0	2.0		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB (PKB / PLKB)	Jumlah tenaga penyuluh & petugas lapangan KB	Kota Palopo	4 Layanan	2,930,400,000	DAU/DAK		4 Layanan	2,980,400,000	Dispenduk & KB
2	1	4	0	2.0	0	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB / PLKB	Jumlah dasawisma, Sub PPKBD & PPKBD serta UPTD yang dibina	Kota Palopo	4 Layanan	2,700,000,000	DAU/DAK		4 Layanan	2,750,000,000	Dispenduk & KB
2	1	4	0	2.0	0	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah kader yang dibina	Kota Palopo	350 Orang	230,400,000	DAU/DAK		350 Orang	230,400,000	Dispenduk & KB
2	1	4	0	2.0		Pengendalian & Pendistribusian Kebutuhan Alat & Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah alokon KB yang tersedia dan di distribusikan kepada faskes dan pemasangan KB MKJP	Kota Palopo	5 Layanan	1,999,514,853	DAU/DAK		5 Layanan	1,999,514,853	Dispenduk & KB
2	1	4	0	2.0	0	Pengendalian & Pendistribusian Kebutuhan Alat & Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang mendapatkan Alokon	Kota Palopo	23 Faskes	54,671,000	DAU/DAK		23 Faskes	54,671,000	Dispenduk & KB
2	1	4	0	2.0	0	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah akseptor yang mendapatkan pelayanan MKJP, MOP & MOW	Kota Palopo	1334 Orang	435,596,853	DAU/DAK		1334 Orang	435,596,853	Dispenduk & KB
2	1	4	0	2.0	0	Penyediaan dukungan ayoman komplikasi berat dan kegagalan penggunaan MKJP	Jumlah orang yang ditangani menggunakan metode MKJP	Kota Palopo	3 Orang	20,000,000	DAU/DAK		3 Orang	20,000,000	Dispenduk & KB
2	1	4	0	2.0	0	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jenis peralatan pelayanan KB yang diadakan	Kota Palopo	6 Jenis	1,461,547,000	DAU/DAK		6 Jenis	1,461,547,000	Dispenduk & KB
2	1	4	0	2.0	0	Pembinaan pelayanan keluarga berencana & kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaring	Jumlah fasilitas kesehatan yang menerima penyaluran alokon	Kota Palopo	23 Faskes	27,700,000	DAU/DAK		23 Faskes	27,700,000	Dispenduk & KB
2	1	4	0	2.0		Pemberdayaan & Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat daerah kabupaten / Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan & Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah layanan kegiatan pembinaan KB yang dilaksanakan	Kota Palopo	2 Layanan	514,112,000	DAU/DAK		2 Layanan	514,112,000	Dispenduk & KB
2	1	4	0	2.0	0	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan & Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan & Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah kegiatan pelayanan KB yang dilaksanakan	Kota Palopo	2 Pelayanan	44,188,000	DAU/DAK		2 Pelayanan	44,188,000	Dispenduk & KB
2	1	4	0	2.0	0	Pelaksanaan & Pengelolaan Program KKBPK di kampung KB	Jumlah kampung KB yang ditatakelola	Kota Palopo	9 Kampung KB	469,924,000	DAU/DAK		9 Kampung KB	469,924,000	Dispenduk & KB
2	1	4	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	persentase peningkatan kesejahteraan yang	Kota Palopo	1	225,276,500	DAU/DAK		1	275,908,413	Dispenduk & KB

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
						meningkat menjadi keluarga sejahtera (%)								
2	1	0	2.0		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan & Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok BKB, BKR, PIK-R, BKL, UPPKS yang dibentuk & dibina	Kota Palopo	37 Kelompok	28,000,000	DAU/DAK		37 Kelompok	28,000,000	Dispenduk & KB
2	1	0	2.0	0	Pembentukan Kelompok Ketahanan & Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi & Koseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah kelompok yang dibentuk	Kota Palopo	37 Kelompok	28,000,000	DAU/DAK		37 Kelompok	28,000,000	Dispenduk & KB
2	1	0	2.0		Pelaksanaan & Peningkatan Peran serta organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan & kesejahteraan keluarga	Jumlah kelompok yang sudah dibina	Kota Palopo	224 Kelompok	197,276,500	DAU/DAK		224 Kelompok	247,908,413	Dispenduk & KB
2	1	0	2.0	0	Pelaksanaan peningkatan kapasitas mitra & organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan program ketahanan & kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, & pemberdayaan ekonomi keluarga / UPPKS)	Jumlah kelompok yang akan ditingkatkan kualitas pembinaannya	Kota Palopo	37 Kelompok	97,276,500	DAU/DAK		37 Kelompok	147,908,413	Dispenduk & KB
2	1	0	2.0	0	Promosi & sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan & kesejahteraan keluarga (menjadi orang tua hebat, generasi berencana, kelanjutan serta pengelolaan keuangan keluarga)	Jumlah kelompok yang dibina	Kota Palopo	224 Kelompok	100,000,000	DAU/DAK		224 Kelompok	100,000,000	Dispenduk & KB
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				7,270,886,700				7,452,658,868	
					DINAS PERHUBUNGAN				7,270,886,700				7,452,658,868	
2	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palopo	1	5,632,075,000	DAU		1	6,264,876,875	Dishub
2	1	1	2.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Kinerja Perangkat Daerah yang disusun Tepat Waktu	Kota Palopo	8 Dokumen	1,700,000	DAU		8 Dokumen	1,700,000	Dishub
2	1	1	2.0	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA dan DPA Perangkat Daerah	Kota Palopo	6 Dokumen	700,000	DAU		6 Dokumen	700,000	Dishub
2	1	1	2.0	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palopo	2 Laporan	1,000,000	DAU		2 Laporan	1,000,000	Dishub
2	1	1	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan keuangan	Kota Palopo	835 Laporan	4,930,900,000	DAU		845 Laporan	5,545,200,000	Dishub

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB	
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
2	15	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	Kota Palopo	70 Orang	4,882,500,000	DAU		70 Orang	5,496,000,000	Dishub
2	15	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan pertanggungjawaban yang diverifikasi	Kota Palopo	820 Laporan	47,200,000	DAU		830 Laporan	48,000,000	Dishub
2	15	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan yang disusun	Kota Palopo	15 Laporan	1,200,000	DAU		15 Laporan	1,200,000	Dishub
2	15	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelolaan aset	Kota Palopo	10 Laporan	9,600,000	DAU		10 Laporan	9,600,000	Dishub
2	15	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah aset yang ditatakelolakan	Kota Palopo	1580 Unit	9,600,000	DAU		1580 Unit	9,600,000	Dishub
2	15	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi ASN PD yang dikelola	Kota Palopo	70 Orang	51,000,000	DAU		70 Orang	25,000,000	Dishub
2	15	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang Diadakan	Kota Palopo	60 Pasang	26,000,000	DAU				Dishub
2	15	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	Kota Palopo	2 Orang	25,000,000	DAU		2 Orang	25,000,000	Dishub
2	15	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan	Kota Palopo	14 Jenis	135,780,000	DAU		14 Jenis	185,880,000	Dishub
2	15	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang diadakan	Kota Palopo	45 Buah	5,500,000	DAU		50 Buah	5,600,000	Dishub
2	15	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis Logistik Kantor Yang diadakan	Kota Palopo	10 Jenis	25,000,000	DAU		10 Jenis	25,000,000	Dishub
2	15	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang dibiayai	Kota Palopo	4 Eksamplar	5,280,000	DAU		4 Eksamplar	5,280,000	Dishub
2	15	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SPPD yang dilaksanakan	Kota Palopo	18 SPPD	100,000,000	DAU		23 SPPD	150,000,000	Dishub
2	15	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	Kota Palopo	12 Unit	71,000,000	DAU		10 Unit	56,000,000	Dishub
2	15	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	Kota Palopo	10 Unit	8,000,000	DAU		5 Unit	14,000,000	Dishub
2	15	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang disediakan	Kota Palopo			DAU		4 Unit	12,000,000	Dishub
2	15	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung kantor yang disediakan	Kota Palopo	2 Unit	63,000,000	DAU		1 Unit	30,000,000	Dishub
2	15	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai	Kota Palopo	3 Jenis	297,595,000	DAU		3 Jenis	303,300,875	Dishub
2	15	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk, surat keluar, atk, cetak dan pengadaan	Kota Palopo	1410 Surat	37,595,000	DAU		1420 Surat	37,800,875	Dishub
2	15	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening air, listrik dan internet yang dibiayai	Kota Palopo	8 Rekening	70,000,000	DAU		8 Rekening	71,000,000	Dishub
2	15	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan kantor yang dilaksanakan	Kota Palopo	6 Layanan	190,000,000	DAU		6 Layanan	194,500,000	Dishub

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB	
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
2	15	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang pemeliharaannya dibiayai	Kota Palopo	54 Unit	134,500,000	DAU		54 Unit	138,196,000	Dishub
2	15	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	Kota Palopo	1 Unit	26,600,000	DAU		1 Unit	26,500,000	Dishub
2	15	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	Kota Palopo	17 Unit	67,000,000	DAU		17 Unit	68,500,000	Dishub
2	15	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dibiayai	Kota Palopo	33 Buah	15,400,000	DAU		33 Buah	16,500,000	Dishub
2	15	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	Kota Palopo	29663 M2	25,500,000	DAU		29663 M2	26,696,000	Dishub
2	15	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Layanan Angkutan Darat	Kota Palopo	0.0414	1,562,879,700	DAU/DAK		0.0435	1,109,951,693	Dishub
2	15	2	2.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen Rencana Induk Lalu Lintas Angkutan Jalan yang ditetapkan	Kota Palopo	1 Dokumen	500,000,000	DAU/DAK				Dishub
2	15	2	2.01	1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Induk LLAJ	Kota Palopo	1 Dokumen	500,000,000	DAU/DAK				Dishub
2	15	2	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kepemilikan KIR angkutan umum (%)	Kota Palopo	1.600 Unit	121,679,000	DAU/DAK		1.600 Unit	127,000,000	Dishub
2	15	2	2.05	1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	Kota Palopo	1600 Unit	86,179,000	DAU/DAK		1600 Unit	88,000,000	Dishub
2	15	2	2.05	7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dipelihara	Kota Palopo	10 Unit	35,500,000	DAU/DAK		10 Unit	39,000,000	Dishub
2	15	2	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan yang Dilaksanakan Rekayasa Lalu Lintas	Kota Palopo	301 KM	681,200,700	DAU/DAK		301 KM	715,751,693	Dishub
2	15	2	2.06	1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaturan Dan Rekayasa Lalu Lintas	Kota Palopo	20 Kali	62,000,700	DAU/DAK		25 Kali	68,000,693	Dishub
2	15	2	2.06	2	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Rambu Rambu Yang Berfungsi dengan Baik	Kota Palopo	600 Buah	123,600,000	DAU/DAK		665 Buah	126,251,000	Dishub
2	15	2	2.06	3	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Sosialisasi yang memahami manajemen dan rekayasa Lalu Lintas	Kota Palopo			DAU/DAK		50 Orang	7,000,000	Dishub

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
2	1	2	2.0	4	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pengendalian (Kali)	Kota Palopo	220 Kali	495,600,000	DAU/D		250 Kali	514,500,000	Dishub
2	1	2	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ	Kota Palopo	250 Kali	260,000,000	DAU/D		260 Kali	267,200,000	Dishub
2	1	2	2.0	3	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ	Kota Palopo	4 Laporan	260,000,000	DAU/D		4 Laporan	267,200,000	Dishub
2	1	3			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Usaha Pelayaran Kewenangan Daerah yang berizin	Kota Palopo	0.3	75,932,000	DAU/D		0.35	77,830,300	Dishub
2	1	3	2.02		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Bagi Orang Perorangan Atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Koordinasi dengan instansi Terkait	Kota Palopo	4 Kali	75,932,000	DAU/D		4 Kali	77,830,300	Dishub
2	1	3	2.0	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kapal GT yang memiliki Izin	Kota Palopo	50 Unit	75,932,000	DAU/D		55 Unit	77,830,300	Dishub
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				6,263,593,702				6,993,364,545	
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				6,263,593,702				6,993,364,545	
2	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	Palopo	100	2,558,400,000	DAU		100	2,695,541,000	Diskominfo
2	1	1	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Palopo	3 Dokumen	3,200,000	DAU		3 dokumen	3,200,000	Diskominfo
2	1	1	2.0	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA PD	Palopo	2 Dokumen	2,000,000	DAU		2 Dokumen	2,000,000	Diskominfo
2	1	1	2.0	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah	Palopo	1 Dokumen	1,200,000	DAU		1 Dokumen	1,200,000	Diskominfo
2	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan penatausahaan keuangan PD	Palopo	12 Laporan	1,956,700,000	DAU		2 dokumen	1,966,700,000	Diskominfo
2	1	1	2.0	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	Palopo	30 Orang	1,890,000,000	DAU		35 Orang	1,900,000,000	Diskominfo
2	1	1	2.0	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pertanggungjawaban yang diverifikasi	Palopo	12 Orang	64,800,000	DAU		12 Orang	64,800,000	Diskominfo
2	1	1	2.0	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan, TRIwulan, Semesteran, tahunan yang disusun	Palopo	2 Laporan Keuangan	1,900,000	DAU		2 Dokmen	1,900,000	Diskominfo
2	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelolaan aset	Palopo	1 Laporan	6,600,000	DAU		1 Laporan	6,600,000	Diskominfo
2	1	1	2.0	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Aset yang diatkelolakan	Palopo	29 Unit	6,600,000	DAU		29 Unit	6,600,000	Diskominfo

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB	
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
2	1	6	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi ASN PD yang dikelola	Palopo	25 Orang	53,000,000	DAU		25 Orang	58,000,000	Diskominfo
2	1	6	1	2.05	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	Palopo	60 Stel	25,000,000	DAU		100 Stel	30,000,000	Diskominfo
2	1	6	1	2.05	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	Palopo	4 Orang	28,000,000	DAU		4 Orang	28,000,000	Diskominfo
2	1	6	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan	Palopo	3 Jenis	162,000,000	DAU		3 Jenis	263,181,000	Diskominfo
2	1	6	1	2.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang dibiayai	Palopo	4 Exmp	5,000,000	DAU		4 Exmp	5,000,000	Diskominfo
2	1	6	1	2.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SPPD yang dilaksanakan	Palopo	20 SPPD	150,000,000	DAU		25 Orang	248,181,000	Diskominfo
2	1	6	1	2.06	Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah aplikasi yang tersedia serta pengelolaannya	Palopo	3 Aplikasi	7,000,000	DAU		49 Perangkat Daerah	10,000,000	Diskominfo
2	1	6	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	Palopo	3 Jenis	75,000,000	DAU		3 Jenis	70,000,000	Diskominfo
2	1	6	1	2.07	Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional lapangan yang diadakan	Palopo	2 Unit	35,000,000	DAU		-	0	Diskominfo
2	1	6	1	2.07	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	Palopo	3 Jenis	15,000,000	DAU		4 Jenis	25,000,000	Diskominfo
2	1	6	1	2.07	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang disediakan	Palopo	5 Jenis	25,000,000	DAU		4 Jenis	45,000,000	Diskominfo
2	1	6	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai	Palopo	3 Jenis	261,900,000	DAU		3 Jenis	283,860,000	Diskominfo
2	1	6	1	2.08	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat masuk/surat keluar ATK, Cetak dan Penggandaan	Palopo	400 Surat	29,900,000	DAU		400 Surat	25,000,000	Diskominfo
2	1	6	1	2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening Air, Listrik dan Internet yang di biayai	Palopo	62 Rekening	140,000,000	DAU		62 Rekening	166,860,000	Diskominfo
2	1	6	1	2.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan Kantor yang dilaksanakan	Palopo	9 Layanan	92,000,000	DAU		17 Orang	92,000,000	Diskominfo
2	1	6	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipeliharaannya dibiayai	Palopo	3 Unit	40,000,000	DAU		3 Unit	44,000,000	Diskominfo
2	1	6	1	2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang pemeliharaa dan pajaknya dibiayai	Palopo	1 Unit	18,000,000	DAU		1 Unit	20,000,000	Diskominfo
2	1	6	1	2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang pemeliharaa dan pajaknya dibiayai	Palopo	8 Unit	10,000,000	DAU		6 Unit	10,000,000	Diskominfo
2	1	6	1	2.09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang dibiayai	Palopo	5 Unit	6,000,000	DAU		5 Unit	6,000,000	Diskominfo

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB		
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023			
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
2	1	6	1	2.0	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	Palopo	250 m2	6,000,000	DAU		250 M2	8,000,000	Diskominfo
2	1	6	2			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik,mengetahui kebikan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Palopo	0.85	2,956,151,250	DAU		0.9	3,530,055,031	Diskominfo
2	1	6	2	2.0		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah informasi yang disebarluaskan	Palopo	450 Informasi	2,956,151,250	DAU		500 Informasi	3,530,055,031	Diskominfo
2	1	6	2	2.0	2	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Aduan yang ditindaklanjuti	Palopo	40 Aduan	10,651,250	DAU		40 Aduan	12,000,000	Diskominfo
2	1	6	2	2.0	4	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Konten yang disediakan	Palopo	3 Konten	24,000,000	DAU		3 Konten	36,000,000	Diskominfo
2	1	6	2	2.0	5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Media Online yang disediakan	Palopo	25 Media Online	1,319,000,000	DAU		5 Media Online	1,407,555,031	Diskominfo
2	1	6	2	2.0	6	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Berita yang disebar luaskan	Palopo	450 Berita	10,000,000	DAU		500 Berita	12,000,000	Diskominfo
2	1	6	2	2.0	7	Layanan Hubungan Media	Jumlah media yang dikerjasamakan	Palopo	22 Media	1,307,500,000	DAU		22 Media	1,807,500,000	Diskominfo
2	1	6	2	2.0	10	Penguatan Kapasitas Sumber daya komunikasi publik	Jumlah Orang yang ditingkatkan kapasitasnya dalam komunikasi publik	Palopo	6 Orang	30,000,000	DAU		6 Orang	30,000,000	Diskominfo
2	1	6	2	2.0	11	Penguatan Tata kelola komisi informasi di Daerah	Jumlah Dokumen yang disajikan	Palopo	2 Dokumen	30,000,000	DAU		2 Dokumen	25,000,000	Diskominfo
2	1	6	2	2.0	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Kelompok masyarakat yang dibina	Palopo	35 Kelompok	175,000,000	DAU		35 Kelompok	175,000,000	Diskominfo
2	1	6	2	2.0	13	Penyediaan/pengadaan sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publikpemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Peralatan studio yang diadakan	Palopo	1 Set	50,000,000	DAU		1 Set	25,000,000	Diskominfo
2	1	6	3			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Palopo	0.85	749,042,452	DAU		0.95	767,768,514	Diskominfo
2	1	6	3	2.0		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Domain yang disediakan	Palopo	1 Domain	19,500,000	DAU		1 Domain	22,000,000	Diskominfo
2	1	6	3	2.0	1	Pendaftaran nama domain pemerintah kabupatn/kota	Jumlah nama Domain yang terdaftar	Palopo	1 Domain	7,000,000	DAU		1 Domain	8,000,000	Diskominfo
2	1	6	3	2.0	2	Penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain di linhkup pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah nama sub domain yang dikelola	Palopo	32 Sub Domain	5,000,000	DAU		37 Sub Domain	6,000,000	Diskominfo

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB	
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023			
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		
2	1	6	3	2.01	3	Penyelenggaraan sistem jaringan intra Pemerintah Daerah	Jumlah OPD yang disediakan akses internetnya Oleh dinas Kominfo	Palopo	49 OPD	7,500,000	DAU		49 OPD	8,000,000	Diskominfo
2	1	6	3	2.02		Pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Aplikasi yang kelolah dan dikembangkan	Palopo	38 Aplikasi	729,542,452	DAU		38 Aplikasi	745,768,514	Diskominfo
2	1	6	3	2.02	1	Penatalaksanaan dan pengawasan e-goverment dalam penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota	jumlah aplikasi yang terintegrasi	Palopo	5 Aplikasi	6,000,000	DAU		7 Aplikasi	7,500,000	Diskominfo
2	1	6	3	2.02	2	Sinkronisasi pengelolaan Rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik	Jumlah Dokumen Rencana Induk yang ditetapkan	Palopo	2 Dokumen	7,000,000	DAU		2 Dokumen	8,000,000	Diskominfo
2	1	6	3	2.02	3	Pengelolaan Pusat data pemerintahan daerah	jumlah aplikasi yang dikelola	Palopo	20	289,242,452	DAU		23 Aplikasi	290,000,000	Diskominfo
2	1	6	3	2.02	4	Penyelenggaraan sistem komunikasi intra pemerintah daerah	Jumlah Menara telekomunikasi yang diawasi	Palopo	119 Menara	7,500,000	DAU		127 Menara	7,000,000	Diskominfo
2	1	6	3	2.02	6	Koordinasi dan singkronisasi data dan informasi elektronik	jumlah aplikasi yang terintegrasi	Palopo	7 Aplikasi	5,000,000	DAU		9 Aplikasi	6,000,000	Diskominfo
2	1	6	3	2.02	7	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi yang dikembangkan	Palopo	6 Aplikasi	397,800,000	DAU		8 Aplikasi	409,268,514	Diskominfo
2	1	6	3	2.02	9	Pengembangan dan pengelolaan ekosistem kabupaten/kota cerdas	Jumlah Dokumen ekosistem kabuopaten kota cerdas yang ditetapkan	Palopo	1 Dokumen	5,000,000	DAU		1 Dokumen	5,500,000	Diskominfo
2	1	6	3	2.02	10	Pengembangan dan pengelolaan sumber daya tehnologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah	jumlah aparatur yang mengikuti pengembangan dan pengelolaan sumberdya tehnologi informasi	Palopo	5 Aparatur	6,000,000	DAU		7 Aparatur	6,500,000	Diskominfo
2	1	6	3	2.02	12	Monitoring, evaluasi dan pelaporan dan pengembangan ekosistem spbe	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi ekosistem SPBE	Palopo	1 Laporan	6,000,000	DAU		1 Laporan	6,000,000	Diskominfo
						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				3,677,193,975.00				3,904,763,293	
						DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				3,677,193,975				3,904,763,293	Diskop & UMKM
2	1	7	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Cakupan Urusan Pemerintah Daerah	Kota Palopo	100	3,044,911,125	DAU		100	3,293,428,712	Diskop & UMKM
2	1	7	1	2.01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	Kota Palopo	9 dkm.	5,600,000	DAU		9 dkm.	5,600,000	Diskop & UMKM
2	1	7	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, renja dan RKA perangkat daerah(Dokumen)	Kota Palopo	7 dokumen	2,800,000	DAU		7dokumen	2,800,000	Diskop & UMKM
2	1	7	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerjtja dan iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah(Lap.)	Kota Palopo	2 lap	2,800,000	DAU		2lap.	2,800,000	Diskop & UMKM
2	1	7	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan penatasan Keuangan(Lap.)	Kota Palopo	12 Laporan	2,504,793,975	DAU		12 Laporan	2,549,233,903	Diskop & UMKM

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB		
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023			
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
2	1	7	1	2.0	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan (org)	Kota Palopo	25 org	2,419,193,975	DAU		25 org	2,463,433,903	Diskop & UMKM
2	1	7	1	2.0	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Vcerivikasi Keuangan SKPD	Laporan pertanggungjawaban yang diverifikasi(Lap)	Kota Palopo	13 lap.	80,000,000	DAU		13 lap.	80,000,000	Diskop & UMKM
2	1	7	1	2.0	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jlh lap. Keuangan bln,triwulan, semesteran yang disusun(Lap)	Kota Palopo	1 lap.	2,800,000	DAU		1 lap	2,800,000	Diskop & UMKM
2	1	7	1	2.0	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan yang tersusun	Kota Palopo	1 lap.	2,800,000	DAU		1 lap	3,000,000	Diskop & UMKM
2	1	7	1	2.0	03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Lap. Pengelolaan Asset (lap.)	Kota Palopo	1 Lap	7,200,000	DAU		1 Lap	7,200,000	Diskop & UMKM
2	1	7	1	2.0	6	Penatausahaan Barang Milik Derah pada SKPD	Jumlah aset yang ditatakelolakan (unit)	Kota Palopo	25 Unit	7,200,000	DAU		25 Unit	7,200,000	Diskop & UMKM
2	1	7	1	2.0	05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Adm ASN yang dikelola	Kota Palopo	39 Org	20,000,000	DAU		39 Org	25,000,000	Diskop & UMKM
2	1	7	1	2.0	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	Kota Palopo	39 org	20,000,000	DAU		0	-	Diskop & UMKM
2	1	7	1	2.0	1	Soialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang Mengikuti sosialisasi	Kota Palopo	0	-	DAU		2 org	5,000,000	Diskop & UMKM
2	1	7	1	2.0	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti BimTek	Kota Palopo	0	-	DAU		2 org	20,000,000	Diskop & UMKM
2	1	7	1	2.0	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan Adm umum yg ditatakelolakan (jenis)	Kota Palopo	6 Jenis	232,980,000	DAU		6 Jenis	302,500,000	Diskop & UMKM
2	1	7	1	2.0	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen listrik yang diadakan (buah)	Kota Palopo	45 buah	3,000,000	DAU		45 buah	2,220,000	Diskop & UMKM
2	1	7	1	2.0	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan Gdng. Kantor yang tersedia	Kota Palopo	2 Unit	9,700,000	DAU		5 unit	30,000,000	Diskop & UMKM
2	1	7	1	2.0	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang diadakan	Kota Palopo	0	-	DAU		0	-	Diskop & UMKM
2	1	7	1	2.0	5	Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan	Jumnlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia (buah)	Kota Palopo	12 buah	15,000,000	DAU		12 buah	15,000,000	Diskop & UMKM
2	1	7	1	2.0	6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan /peraturan Perundang-undangan yang dibayarkan (Exmp)	Kota Palopo	4 Exp	5,280,000	DAU		4 Exp	5,280,000	Diskop & UMKM
2	1	7	1	2.0	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SPPD yg dilaksanakan (SPPD)	Dalam/Luar Kota Palopo	45 sppd	200,000,000	DAU		50 sppd	250,000,000	Diskop & UMKM
2	1	7	1	2.0	07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Brg Milik daerah yg diadakan (Unit)	Kota Palopo	12 Unit	17,000,000	DAU		12 Unit	140,500,000	Diskop & UMKM
2	1	7	1	2.0	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan	Kota Palopo	0	-	DAU		2 unit	40,000,000	Diskop & UMKM
2	1	7	1	2.0	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan (Buah)	Kota Palopo	10 buah	5,500,000	DAU		25 buah	50,500,000	Diskop & UMKM

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB		
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023			
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
2	1	7	1	2.0	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan Mesin yang diadakan (Unit)	Kota Palopo	2 Unit	11,500,000	DAU		3 Unit	50,000,000	Diskop & UMKM
2	1	7	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang urusan daerah yg dibiayai (Jenis)	Kota Palopo	3 Jenis	219,837,150	DAU		3 Jenis	224,894,809	Diskop & UMKM
2	1	7	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan surat Keluar	Kota Palopo	1750 sm/sk	42,517,150	DAU		1750 sm/sk	47,894,809	Diskop & UMKM
2	1	7	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	Kota Palopo	7 rek.	92,000,000	DAU		7 rek.	92,000,000	Diskop & UMKM
2	1	7	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Layanan Kantor yg dilaksanakan (layanan)	Kota Palopo	3 Layanan	85,320,000	DAU		3 Layanan	85,000,000	Diskop & UMKM
2	1	7	1	2.09		Pemeliharaan Barangf Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah brg Milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yg pemeliharaannya dibiayai (Unit)	Kota Palopo	41unit	37,500,000	DAU		47 unit	38,500,000	Diskop & UMKM
2	1	7	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Dinas Yg Pajaknya dibiayai (unit)	Kota Palopo	6 Unit	27,500,000	DAU		9 unit	28,500,000	Diskop & UMKM
2	1	7	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan Mesin dan Aset Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yg dibiayai (Unit)	Kota Palopo	33 unit	5,000,000	DAU		36 unit	5,000,000	Diskop & UMKM
2	1	7	1	2.09	9	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Bangunan Kantor yang dipelihara	Kota Palopo	2 unit	5,000,000	DAU		2 unit	5,000,000	Diskop & UMKM
2	1	7	2			Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Usaha Simpan Pinjam yang berizin	Kota Palopo	0.72	12,000,000	DAU		0.73	12,300,000	Diskop & UMKM
2	1	7	2	2.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kab./Kota	Jumlah Rekomendasi Penerbitan izin	Kota Palopo	10 Rekomendasi	2,800,000	DAU		10 Rekomendasi	3,500,000	Diskop & UMKM
2	1	7	2	2.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha simpan pinjam yang difasilitasi dalam pemenuhan izin usaha	Kota Palopo	10 Fasilitasi	2,800,000	DAU		15 fasilitasi	3,500,000	Diskop & UMKM
2	1	7	2	2.02		Penerbitan Izin Pembukaan Knator Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas KSP untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kab./Kota	Jumlah Rekomendasi Penerbitan Izin	Kota Palopo	5 Rekomendasi	9,200,000	DAU		4 Rekomendasi	8,800,000	Diskop & UMKM
2	1	7	2	2.02	1	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas KSP untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kab./Kota	Jumlah Koperasi Cabang Pembantu yg difasilitasi pemenuhan Perizinan	Kota Palopo	5 fasilitasi.	9,200,000	DAU		4 fasilitasi	8,800,000	Diskop & UMKM
2	1	7	3			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang meningkat Kualitasnya	Kota Palopo	0.71	11,070,000	DAU		0.72	11,346,750	Diskop & UMKM
2	1	7	3	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi,KSP/USP Koperasi yang	Jumlah KSP/USP yg diperiksa dan diawasi (Kop)	Kota Palopo	80 kop	11,070,000	DAU		90 kop	11,346,750	Diskop & UMKM

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
					wilayah keanggotaannya dalam daerah Kab./Kota									
2	1	3	2.0	1	Pengawasan Kekuatan,kesehantaran ,Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kab. /Kota	Jumlah Koperasi yang diawasi dan diperiksa	Kota Palopo	45 kop	4,800,000	DAU		50 kop	5,500,000	Diskop & UMKM
2	1	3	2.0	2	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap peraturan Perundang-undangan kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang diperiksa yg mematuhi terhadap Peraturan Perundang-undangan Koperasi	Kota Palopo	35 kop	6,270,000	DAU		40 kop	5,846,750	Diskop & UMKM
2	1	4			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi yang Sehat	Kota Palopo	0.73	14,196,250	DAU		%	14,551,156	Diskop & UMKM
2	1	4	2.0		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KSP/USP yang dinilai Kesehatannya	Kota Palopo	30 kop	14,196,250	DAU		35 kop	14,551,156	Diskop & UMKM
2	1	4	2.0	1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang dalam penilaian kesehatan	Kota Palopo	25 kop	5,500,000	DAU		30 kop	5,000,000	Diskop & UMKM
2	1	4	2.0	2	Penghargaan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kab./ Kota	Jumlah Koperasi yang mendapat penghargaan	Kota Palopo	5 kop	8,696,250	DAU		5 kop	9,551,156	Diskop & UMKM
2	1	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Usaha keparawisataan dan ekraf yang tergabung dalam Koperasi	Kota Palopo	0.04	213,000,000	DAU/DAK		0.05	220,000,000	Diskop & UMKM
2	1	5	2.0		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yg mengikuti Pendidikan dan latihan Perkoperasian	Kota Palopo	30kop	213,000,000	DAU/DAK		30kop	220,000,000	Diskop & UMKM
2	1	5	2.0	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi dan UMKM	Jumlah Koperasi yang Mengikuti Pendidikan /Pelatihan	Kota Palopo	30 Kop	213,000,000	DAU/DAK		35 Kop	220,000,000	Diskop & UMKM
2	1	6			PROGRAM BEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Angka Persentase Koperasi yang aktif	Kota Palopo	0.72	10,865,000	DAU/DAK		0.73	11,136,675	Diskop & UMKM
2	1	6	2.0		Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam daerah Kab./Kota	Jumlah Koperasi yg diberdayakan dan dilindungi melalui pembinaan dan pendampingan	Kota Palopo	65 kop	10,865,000	DAU/DAK		75 kop	11,136,675	Diskop & UMKM
2	1	6	2.0	1	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas,Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatran Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kab. /Kota	Jumlah Koperasi yang diaktifkan dan diberdayakan	Kota Palopo	65 kop	10,865,000	DAU/DAK		75 kop	11,136,675	Diskop & UMKM
2	1	7			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Kota Palopo	35	44,151,600	DAU/DAK		36	92,000,000	Diskop & UMKM

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB	
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
2	1	7	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha Mikro yg diberdayakan melalui pendataan,kemitraan, perizinan, dan kelembagaan.	Kota Palopo	220 ukm	44,151,600	DAU/DAK		310 ukm	92,000,000	Diskop & UMKM
2	1	7	2.01	1	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Data Base yang tersedia	Kota Palopo	3 Data Base	7,000,000	DAU/DAK		3 Data Base	29,000,000	Diskop & UMKM
2	1	7	2.01	2	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah UKM yang diberdayakan melalui kemitraan.	Kota Palopo	35 UKM	5,000,000	DAU/DAK		40 UKM	20,000,000	Diskop & UMKM
2	1	7	2.01	3	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi dalam perizinan	Kota Palopo	150 UKM	3,734,000	DAU/DAK		200 UKM	5,000,000	Diskop & UMKM
2	1	7	2.01	4	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang dikembangkan	Kota Palopo	5 klp UKM	7,500,600	DAU/DAK		10 klp UKM	10,000,000	Diskop & UMKM
2	1	7	2.01	5	Koordinasi dan sinkronisasi dengan Para pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kota Palopo	1 koor	20,917,000	DAU/DAK		1 Koor	28,000,000	Diskop & UMKM
2	1	7	8		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	persentase Pertumbuhan Usaha Mikro yang meningkat menjadi Usaha Kecil	Kota Palopo	25 klp	327,000,000	DAU/DAK		35 klp	250,000,000	Diskop & UMKM
2	1	7	8	2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yg ditingkatkan menjadi usaha kecil	Kota Palopo	200 Um	327,000,000	DAU/DAK		210 UM	250,000,000	Diskop & UMKM
2	1	7	8	2.01	1	Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi dalam pengembangan usahanya	Kota Palopo	200 UM	327,000,000	DAU/DAK	210 UM	250,000,000	Diskop & UMKM
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				6,724,223,450				7,011,916,102	
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				6,724,223,450				7,011,916,102	
2	1	8	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palopo	1	5,584,758,625	DAU		1	5,806,360,702	DPMPTSP
2	1	8	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Kota Palopo	6 Dok	847,875	DAU		6 Dok	949,268	DPMPTSP
2	1	8	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA dan DPA perangkat Daerah	Kota Palopo	6 Dok	427,875	DAU	6 Dok	449,268	DPMPTSP
2	1	8	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Palopo	3 Lap	465,000	DAU	3 Lap	500,000	DPMPTSP
2	1	8	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan keuangan	Kota Palopo	36 Lap	3,692,163,732	DAU		36 Lap	3,820,855,269	DPMPTSP
2	1	8	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan orang	Kota Palopo	36 org	3,615,839,232	DAU	36 org	3,741,094,544	DPMPTSP
2	1	8	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan pertanggung jawaban yang diverifikasi	Kota Palopo	6 Lap	75,600, 000	DAU	6 Lap	79,000,000	DPMPTSP

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB	
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
2	18	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan yang disusun	Kota Palopo	12 Lap	724,500	DAU		12 Lap	760,725	DPMPTSP
2	18	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Aset	Kota Palopo	1 Lap	9,600,000	DAU		1 Lap	9,600,000	DPMPTSP
2	18	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah aset yang ditatakelolakan	Kota Palopo	12 Unit	9,600,000	DAU		12 Unit	9,600,000	DPMPTSP
2	18	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan	Kota Palopo	3 Jenis	219,924,650	DAU		3 Jenis	230,667,382	DPMPTSP
2	18	1	2.06	6	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan	Jumlah bahan bacaan yang dibiayai	Kota Palopo	12 Eks	5,280,000	DAU		12 Eks	5,280,000	DPMPTSP
2	18	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SPPD yang dilaksanakan	Kota Palopo	45 SPPD	199,524,650	DAU		50 SPPD	209,511,382	DPMPTSP
2	18	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah sistem atau aplikasi yang tersedia serta pengelolaannya	Kota Palopo	4 Apk	15,120,000	DAU		5 Apk	15,876,000	DPMPTSP
2	18	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai	Kota Palopo	3 Jasa	1,572,474,661	DAU		3 Jasa	1,651,098,393	DPMPTSP
2	18	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat masuk, surat keluar, atk, cetak dan pengadaan	Kota Palopo	1250 Surat	300,077,925	DAU		1500 Surat	315,081,821	DPMPTSP
2	18	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Jumlah rekening air, listrik, dan internet yang dibiayai	Kota Palopo	12 Rek	342,936,736	DAU		13 Rek	360,083,572	DPMPTSP
2	18	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Layanan kantor yang dilaksanakan	Kota Palopo	8 Lay	929,460,000	DAU		9 Lay	975,933,000	DPMPTSP
2	18	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang pemeliharaannya dibiayai	Kota Palopo	23 Unit	89,747,707	DAU		23 Unit	93,190,390	DPMPTSP
2	18	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang pemeliharaan dan pajak nya dibiayai	Kota Palopo	1 Unit	19,949,055	DAU		1 Unit	19,949,055	DPMPTSP
2	18	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang pemeliharaan dan pajak nya dibiayai	Kota Palopo	6 Unit	47,136,652	DAU		6 Unit	49,493,485	DPMPTSP
2	18	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dibiayai	Kota Palopo	15 Unit	17,430,000	DAU		15 Unit	18,301,500	DPMPTSP
2	18	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah dan luas gedung kantor yang dipelihara	Kota Palopo	1 Unit	5,187,000	DAU		1 Unit	5,446,350	DPMPTSP
2	18	2			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja (Per 100 juta Nilai PMDN)	Kota Palopo	15	42,435,000	DAU		16	43,470,000	DPMPTSP
2	18	2	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Jumlah Peta Potensi dan Peluang Usaha	Kota Palopo	3 Dok	42,435,000	DAU		6 Dok	43,470,000	DPMPTSP
2	18	2	2.02	2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi dan Peluang Usaha	Kota Palopo	3 Dok	42,435,000	DAU		6 Dok	43,470,000	DPMPTSP

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB	
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
2	1	8	3		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Nilai Investasi yang masuk per Tahun (%/Thn)	Kota Palopo	0.3	158,875,000	DAU		0.4	162,750,000	DPMPTSP
2	1	8	3	2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Promosi yang diselenggarakanPenanaman Modal	Kota Palopo	3 kali Promosi	158,875,000	DAU		4 kali Promosi	162,750,000	DPMPTSP
2	1	8	3	2.01	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Promosi yang diikuti	Kota Palopo	3 Kali	158,875,000	DAU		4 Kali	162,750,000	DPMPTSP
2	1	8	4		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Angka Pertumbuhan Jumlah Investor di Daerah (%)	Kota Palopo	12	607,517,500	DAU		15	653,451,750	DPMPTSP
2	1	8	4	2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Layanan Perizinan yang dikelola Penanaman Modal	Kota Palopo	22 Lay	607,517,500	DAU		23 Lay	653,451,750	DPMPTSP
2	1	8	4	2.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Layanan Perizinan Daerah yang Dikelola	Kota Palopo	24 Lay	372,632,500	DAU		24 Lay	406,822,500	DPMPTSP
2	1	8	4	2.01	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Pemohon yang memenuhi komitmen perizinan dan non perizinan	Kota Palopo	120 Org	180,600,000	DAU		130 Org	189,630,000	DPMPTSP
2	1	8	4	2.01	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Nilai mutu Layanan yang Ditindaklanjuti	Kota Palopo	89.99 Layanan	54,285,000	DAU		90.05 Layanan	56,999,250	DPMPTSP
2	1	8	5		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Investor dan Penanaman Modal di Daerah yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	Kota Palopo	1	330,637,325	DAU		1	345,883,650	DPMPTSP
2	1	8	5	2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Palopo	99 Keg	330,637,325	DAU		102 Keg	345,883,650	DPMPTSP
2	1	8	5	2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan yang dilaksanakan Penanaman Modal	Kota Palopo	38 Laporan Pemantauan	47,880,000	DAU		40 Laporan Pemantauan	50,274,000	DPMPTSP
2	1	8	5	2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Laporan Pembinaan yang dilaksanakan Penanaman Modal	Kota Palopo	12 Laporan Pembinaan	186,996,925	DAU		12 Laporan Pembinaan	195,061,650	DPMPTSP
2	1	8	5	2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan yang dilaksanakan Penanaman Modal	Kota Palopo	49 Laporan Pengawasan	95,760,400	DAU		50 Laporan Pengawasan	100,548,000	DPMPTSP
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				8,259,750,000				6,443,243,750	

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB	
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
2	19	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jenis dan Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan	Kota Palopo	3 Unit	45,000,000	DAU			90,000,000	Dispora
2	19	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jenis dan Jumlah Meubeler Yang diadakan	Kota Palopo	11 Unit	30,000,000	DAU			33,000,000	Dispora
2	19	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis dan Jumlah Peralatan Dan Mesin yang disediakan	Kota Palopo	8 Unit	35,000,000	DAU			40,000,000	Dispora
2	19	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kota Palopo		270,000,000	DAU			297,000,000	Dispora
2	19	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk, Surat Keluar, ATK, Cetak dan Penggandaan	Kota Palopo	1200 Surat	120,000,000	DAU			130,000,000	Dispora
2	19	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening air, listrik, internet yang dibiayai	Kota Palopo	4 Rekening	30,000,000	DAU			35,000,000	Dispora
2	19	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Layanan Kantor yang dilaksanakan	Kota Palopo	5 Layanan	120,000,000	DAU			132,000,000	Dispora
2	19	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kota Palopo		110,000,000	DAU			130,000,000	Dispora
2	19	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	Kota Palopo	1 Unit	30,000,000	DAU			35,000,000	Dispora
2	19	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	Kota Palopo	6 Unit	30,000,000	DAU			35,000,000	Dispora
2	19	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dibiayai	Kota Palopo	30 Unit	20,000,000	DAU			25,000,000	Dispora
2	19	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah dan Luas Gedung kantor yang terpelihara	Kota Palopo	300 m2	30,000,000	DAU			35,000,000	Dispora
2	19	2			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		Kota Palopo		1,044,475,000	DAU			1,070,586,875	Dispora
2	19	2	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota		Kota Palopo		864,475,000	DAU			885,586,875	Dispora
2	19	2	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda yang mengikuti seleksi Pemuda Pelopor	Kota Palopo	25 Orang	35,000,000	DAU			38,000,000	Dispora
2	19	2	2.01	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Pemuda yang mengikuti penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda dan kewirausahaan pemuda	Kota Palopo	30 Orang	50,000,000	DAU			55,000,000	Dispora
2	19	2	2.01	5	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan	Jumlah Dokumen Yang dihasilkan	Kota Palopo	1 Dokumen	12,000,000	DAU			12,000,000	Dispora

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB	
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
					Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota									
2	19	2	2.01	6	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana kepemudaan yang diadakan, direhab dan dipelihara	Kota Palopo	1 Unit	20,000,000	DAU			20,000,000	Dispora
2	19	2	2.01	8	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang mengikuti penyelenggaraan peningkatan kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawan pemuda	Kota Palopo	70 Orang	47,475,000	DAU			50,000,000	Dispora
2	19	2	2.01	9	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda yang dibina	Kota Palopo	76 Orang	700,000,000	DAU			710,586,875	Dispora
2	19	2	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Kota Palopo		180,000,000	DAU			185,000,000	Dispora
2	19	2	2.02	2	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi pemuda yang dibina dan difasilitasi	Kota Palopo	1 Organisasi	180,000,000	DAU			185,000,000	Dispora
2	19	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		Kota Palopo		4,140,200,000	DAU			2,193,705,000	Dispora
2	19	3	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Kota Palopo		50,000,000	DAU			50,000,000	Dispora
2	19	3	2.01	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah cabang olahraga yang dikoordinasikan dalam 1 tahun	Kota Palopo	1 cabor	50,000,000	DAU			50,000,000	Dispora
2	19	3	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Kota Palopo		328,200,000	DAU			300,000,000	Dispora
2	19	3	2.02	2	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Event Olahraga yang dilaksanakan	Kota Palopo	2 Event	198,200,000	DAU			170,000,000	Dispora
2	19	3	2.02	3	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Cabang Olahraga yang mengikuti event di tingkat propinsi	Kota Palopo	5 Cabor	130,000,000	DAU			130,000,000	Dispora
2	19	3	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi		Kota Palopo		312,000,000	DAU			267,000,000	Dispora
2	19	3	2.03	1	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Pelajar yang terjaring dalam pemanduan bakat	Kota Palopo	60 Orang	30,000,000	DAU			35,000,000	Dispora
2	19	3	2.03	3	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah atlit berprestasi yang dibina dan dikembangkan	Kota Palopo	40 Orang	200,000,000	DAU			200,000,000	Dispora

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB		
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023			
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
2	1	9	3	2.0	4	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Insan Olahraga yang mendapatkan medali	Kota Palopo	40 Orang	70,000,000	DAU			20,000,000	Dispora
2	1	9	3	2.0	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Dokumen Yang dihasilkan	Kota Palopo	1 Dokumen	12,000,000	DAU			12,000,000	Dispora
2	1	9	3	2.0		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga		Kota Palopo		3,000,000,000	DAU			1,000,000,000	Dispora
2	1	9	3	2.0	2	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Organisasi olahraga yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi	Kota Palopo	1 Organisasi	3,000,000,000	DAU			1,000,000,000	Dispora
2	1	9	3	2.0		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		Kota Palopo		450,000,000	DAU			576,705,000	Dispora
2	1	9	3	2.0	1	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah orang yang mengikuti Pengembangan Olahraga Rekreasi, tradisional dan Layanan Khusus	Kota Palopo	2500 Orang	150,000,000	DAU			176,705,000	Dispora
2	1	9	3	2.0	3	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	"Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Yang dibangun, direhab dan dipelihara	Kota Palopo	12 Unit	300,000,000	DAU			400,000,000	Dispora
2	1	9	4			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN		Kota Palopo		120,000,000	DAU			150,000,000	Dispora
2	1	9	4	2.0		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		Kota Palopo		120,000,000	DAU			150,000,000	Dispora
2	1	9	4	2.0	2	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah organisasi kepramukaan yang dibina	Kota Palopo	1 Organisasi	50,000,000	DAU			60,000,000	Dispora
2	1	9	4	2.0	3	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah anggota pramuka yang mengikuti penyelenggaraan pengembangan SDM kepramukaan	Kota Palopo	25 Orang	25,000,000	DAU			30,000,000	Dispora
2	1	9	4	2.0	5	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah kegiatan pramuka tingkat daerah yang dilaksanakan	Kota Palopo	2 Kegiatan	25,000,000	DAU			30,000,000	Dispora
2	1	9	4	2.0	8	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah kegiatan pramuka tingkat daerah dan nasional yang diikuti	Kota Palopo	1 Kegiatan	20,000,000	DAU			30,000,000	Dispora
						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				2,503,003,875				2,565,578,972	
						DINAS PERSANDIAN DAN STATISTIK				2,503,003,875				2,565,578,972	
2	2	0	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintah Daerah (%)	Kota Palopo		2,420,090,805	DAU			2,480,593,075	Dis Persandia n Statistik
2	2	0	1	2.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun Tepat Waktu (dokumen)	Kota Palopo		3,000,000	DAU			4,800,000	Dis Persandia n Statistik
2	2	0	1	2.0	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen renstra,renja, RKA dan DPA perangkat daerah	Kota Palopo	5 dokumen	2,000,000	DAU			3,800,000	Dis Persandia n Statistik

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB	
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
2	20	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Palopo	3 laporan	1,000,000	DAU			1,000,000	Dis Persandian Statistik
2	20	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Kota Palopo		2,056,390,805	DAU			2,083,793,075	Dis Persandian Statistik
2	20	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	Kota Palopo	25 orang	2,019,890,805	DAU			2,043,493,075	Dis Persandian Statistik
2	20	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan Pertanggungjawaban yang diverifikasi	Kota Palopo	3 laporan	35,500,000	DAU			36,000,000	Dis Persandian Statistik
2	20	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan,semesteran dan tahunan yang disusun	Kota Palopo	2 laporan	1,000,000	DAU			4,300,000	Dis Persandian Statistik
2	20	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Kota Palopo		21,000,000	DAU			24,000,000	Dis Persandian Statistik
2	20	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah aset yang ditatakelolakan	Kota Palopo	32 unit	21,000,000	DAU			24,000,000	Dis Persandian Statistik
2	20	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Kota Palopo		46,000,000	DAU			25,000,000	Dis Persandian Statistik
2	20	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	Kota Palopo	32 orang	16,000,000	DAU			0	Dis Persandian Statistik
2	20	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan Teknis	Kota Palopo	5 orang	30,000,000	DAU			25,000,000	Dis Persandian Statistik
2	20	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Kota Palopo		107,200,000	DAU			133,500,000	Dis Persandian Statistik
2	20	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang diadakan	Kota Palopo	5 buah	2,000,000	DAU			4,000,000	Dis Persandian Statistik
2	20	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan Bacaan yang dibiayai	Kota Palopo	3 eksampler	5,200,000	DAU			6,500,000	Dis Persandian Statistik
2	20	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SPPD yang dilaksanakan	Kota Palopo	60 sppd	100,000,000	DAU			123,000,000	Dis Persandian Statistik
2	20	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Kota Palopo		27,000,000	DAU			50,000,000	Dis Persandian Statistik
2	20	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jenis dan jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan	Kota Palopo	1 unit	0	DAU			23,000,000	Dis Persandian Statistik

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
2	20	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jenis dan jumlah peralatan dan mesin yang diadakan	Kota Palopo	4 unit	27,000,000	DAU			27,000,000	Dis Persandian Statistik
2	20	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kota Palopo		138,500,000	DAU			126,000,000	Dis Persandian Statistik
2	20	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk,keluar,atk,cetak dan penggandaan	Kota Palopo	900 surat	25,000,000	DAU			22,000,000	Dis Persandian Statistik
2	20	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening Air,listrik dan internet yang dibiayai	Kota Palopo	3 rekening	58,000,000	DAU			47,000,000	Dis Persandian Statistik
2	20	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan kantor yang dilaksanakan	Kota Palopo	5 layanan	55,500,000	DAU			57,000,000	Dis Persandian Statistik
2	20	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kota Palopo		21,000,000	DAU			33,500,000	Dis Persandian Statistik
2	20	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang pemeliharaanya dan pajaknya di biayai	Kota Palopo	1 unit	15,000,000	DAU			25,000,000	Dis Persandian Statistik
2	20	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang pemeliharaanya dan pajaknya di biayai	Kota Palopo	6 unit	1,500,000	DAU			2,500,000	Dis Persandian Statistik
2	20	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang di biayai	Kota Palopo	5 unit	2,000,000	DAU			3,000,000	Dis Persandian Statistik
2	20	1	2.09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset yang ditatakelolakan	Kota Palopo	3 unit	2,500,000	DAU			3,000,000	Dis Persandian Statistik
2	20	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Kota Palopo		82,913,070	DAU			84,985,897	Dis Persandian Statistik
2	20	2	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Kota Palopo		82,913,070	DAU			84,985,897	Dis Persandian Statistik
2	20	2	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Partisipasi Perangkat daerah dalam pengumpulan data statistik sektoral	Kota Palopo	49 OPD	32,600,000	DAU			33,300,000	Dis Persandian Statistik
2	20	2	2.01	3	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah dokumen data statistik perekonomian	Kota Palopo	60 eksampler	22,500,000	DAU			22,500,000	Dis Persandian Statistik
2	20	2	2.01	6	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah dokumen data potensi wilayah	Kota Palopo	60 eksampler	27,813,070	DAU			29,185,897	Dis Persandian Statistik

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB	
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
2	2	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN		Kota Palopo		24,395,000	DAU			25,004,875	Dis Persandian Statistik
2	2	1	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		Kota Palopo		24,395,000	DAU			25,004,875	Dis Persandian Statistik
2	2	1	2	2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Kota Palopo		10,400,000	DAU			10,600,000	Dis Persandian Statistik
2	2	1	2	2.01	3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kota Palopo	39 OPD	5,200,000	DAU			5,300,000	Dis Persandian Statistik
2	2	1	2	2.01	4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Palopo	39 OPD	5,200,000	DAU			5,300,000	Dis Persandian Statistik
2	2	1	2	2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota		Kota Palopo		13,995,000	DAU			14,404,875	Dis Persandian Statistik
2	2	1	2	2.02	1	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Palopo	49 surat	13,995,000	DAU			14,404,875	Dis Persandian Statistik
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				2,706,244,188				2,773,900,292	
					DINAS KEBUDAYAAN				2,706,244,188				2,773,900,292	
2	2	2	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintah Daerah (%)	Kota Palopo		2,327,488,513	DAU			2,385,675,725	Dis Kebudayaan
2	2	2	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun Tepat Waktu (dokumen)	Kota Palopo		2,100,000	DAU			2,275,725	Dis Kebudayaan
2	2	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palopo	6 Dokumen	1,100,000	DAU			1,205,725	Dis Kebudayaan
2	2	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palopo	1 Laporan	1,000,000	DAU			1,070,000	Dis Kebudayaan
2	2	2	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Kota Palopo		1,946,938,513	DAU			1,961,800,000	Dis Kebudayaan
2	2	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palopo	25 orang	1,909,668,513	DAU			1,924,000,000	Dis Kebudayaan
2	2	2	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Palopo	700 SPJ	35,000,000	DAU			35,500,000	Dis Kebudayaan
2	2	2	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palopo	5 Laporan Keuangan	1,070,000	DAU			1,100,000	Dis Kebudayaan

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB	
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
2	2	1	2.0	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan Bulanan,semesteran,dan tahunan yang disusun	Kota Palopo	13 Laporan Keuangan	1,200,000	DAU			1,200,000	Dis Kebudayaan
2	2	1	2.0		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Kota Palopo		6,500,000	DAU			6,700,000	Dis Kebudayaan
2	2	1	2.0	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah aset yang ditatakelolakan	Kota Palopo	253 unit	6,500,000	DAU			6,700,000	Dis Kebudayaan
2	2	1	2.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Kota Palopo		15,100,000	DAU			16,000,000	Dis Kebudayaan
2	2	1	2.0	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	jumlah ASN yang memperoleh pelayanan kepegawaian tepat waktu	Kota Palopo	4 orang	500,000	DAU			700,000	Dis Kebudayaan
2	2	1	2.0	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah ASN yang Berprestasi	Kota Palopo	2 orang	1,000,000	DAU			1,300,000	Dis Kebudayaan
2	2	1	2.0	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek Teknis	Kota Palopo	2 orang	13,600,000	DAU			14,000,000	Dis Kebudayaan
2	2	1	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Kota Palopo		120,700,000	DAU			160,800,000	Dis Kebudayaan
2	2	1	2.0	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Dokumen yang digandakan	Kota Palopo	20100 lembar	5,000,000	DAU			5,000,000	Dis Kebudayaan
2	2	1	2.0	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang dibiayai	Kota Palopo	3 Eksamplerrr	3,600,000	DAU			3,600,000	Dis Kebudayaan
2	2	1	2.0	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	Kota Palopo	250 Orang	2,100,000	DAU			2,200,000	Dis Kebudayaan
2	2	1	2.0	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SPPD yang dilaksanakan	Kota Palopo	75 sppd	110,000,000	DAU			150,000,000	Dis Kebudayaan
2	2	1	2.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Kota Palopo		21,000,000	DAU			5,000,000	Dis Kebudayaan
2	2	1	2.0	5	Pengadaan Mebel	Jenis dan Jumlah mebel yang diadakan	Kota Palopo	10 Unit/Jenis	15,000,000	DAU			0	Dis Kebudayaan
2	2	1	2.0	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis dan Jumlah peralatan dan mesin yang disediakan	Kota Palopo	1 unit	6,000,000	DAU			0	Dis Kebudayaan
2	2	1	2.0	7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset tetap kantor yang diadakan	Kota Palopo	1 unit	0	DAU			5,000,000	Dis Kebudayaan

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB	
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
2	2	1	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kota Palopo		178,150,000	DAU			196,400,000	Dis Kebudayaan an
2	2	1	2.0	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk, surat keluar, atk, cetak dan pengadaan	Kota Palopo	1360 Surat/Jenis/ Buah	8,900,000	DAU			10,400,000	Dis Kebudayaan an
2	2	1	2.0	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening air, listrik dan internet yang dibiayai	Kota Palopo	3 Rekening	35,000,000	DAU			36,000,000	Dis Kebudayaan an
2	2	1	2.0	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan kantor yang dilaksanakan	Kota Palopo	5 Buah/Jenis	134,250,000	DAU			150,000,000	Dis Kebudayaan an
2	2	1	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kota Palopo		37,000,000	DAU			36,700,000	Dis Kebudayaan an
2	2	1	2.0	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	Kota Palopo	5 unit	27,000,000	DAU			27,200,000	Dis Kebudayaan an
2	2	1	2.0	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah meubel yang pemeliharaannya dibiayai	Kota Palopo	5 buah	1,500,000	DAU			0	Dis Kebudayaan an
2	2	1	2.0	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dibiayai	Kota Palopo	15 buah	6,000,000	DAU			6,000,000	Dis Kebudayaan an
2	2	1	2.0	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah dan Luas gedung kantor yang dipelihara	Kota Palopo	100 m2	2,500,000	DAU			3,500,000	Dis Kebudayaan an
2	2	2			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		Kota Palopo		195,000,000	DAU			199,875,000	Dis Kebudayaan an
2	2	2	2.0		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Kota Palopo		113,555,000	DAU			115,975,000	Dis Kebudayaan an
2	2	2	2.0	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah karya Budaya yang dilindungi dikembangkan dan dimanfaatkan	Kota Palopo	5 jenis/ Buah	83,000,000	DAU			84,375,000	Dis Kebudayaan an
2	2	2	2.0	2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	jumlah kelompok/pelaku seni dan Budaya yang dibina	Kota Palopo	20 orang	30,555,000	DAU			31,600,000	Dis Kebudayaan an
2	2	2	2.0		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Kota Palopo		70,000,000	DAU			71,900,000	Dis Kebudayaan an
2	2	2	2.0	3	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Kelompok yang Mendapat Penghargaan	Kota Palopo	6 Kelompok	70,000,000	DAU			71,900,000	Dis Kebudayaan an

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB	
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
2	2	2	2.0		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Kota Palopo		11,445,000	DAU			12,000,000	Dis Kebudayaan an
2	2	2	2.0	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	jumlah pelaksanaan adat istiadat	Kota Palopo	4 Kali	11,445,000	DAU			12,000,000	Dis Kebudayaan an
2	2	2	3		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL		Kota Palopo		28,677,450	DAU			29,394,386	Dis Kebudayaan an
2	2	2	2.0		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Kota Palopo		28,677,450	DAU			29,394,386	Dis Kebudayaan an
2	2	2	2.0	1	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	jumlah kesenian tradisional yang dilaksanakan	Kota Palopo	6 kesenian	20,000,000	DAU			22,000,000	Dis Kebudayaan an
2	2	2	2.0	3	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	jumlah grup/kelompok kesenian berbadan Hukum	Kota Palopo	3 grup/kelompok	8,677,450	DAU			7,394,386	Dis Kebudayaan an
2	2	2	4		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH		Kota Palopo		29,078,225	DAU			29,805,181	Dis Kebudayaan an
2	2	2	2.0		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Kota Palopo		29,078,225	DAU			29,805,181	Dis Kebudayaan an
2	2	2	2.0	3	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	jumlah peninggalan sejarah yang diinventarisir	Kota Palopo	5 karya budaya	29,078,225	DAU			29,805,181	Dis Kebudayaan an
2	2	2	5		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		Kota Palopo		126,000,000	DAU			129,150,000	Dis Kebudayaan an
2	2	2	2.0		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		Kota Palopo		10,000,000	DAU			5,150,000	Dis Kebudayaan an
2	2	2	2.0	2	Penetapan Cagar Budaya	jumlah warisan budaya yang ditetapkan	Kota Palopo	3 wbtb/wbb	10,000,000	DAU			5,150,000	Dis Kebudayaan an
2	2	2	2.0		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		Kota Palopo		106,000,000	DAU			109,000,000	Dis Kebudayaan an
2	2	2	2.0	1	Pelindungan Cagar Budaya	jumlah cagar budaya yang dilindungi dan terpelihara	Kota Palopo	53 Cagar Budaya	106,000,000	DAU			109,000,000	Dis Kebudayaan an
2	2	2	2.0		Penerbitan Izin membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Kota Palopo		10,000,000	DAU			15,000,000	Dis Kebudayaan an
2	2	2	2.0	2	Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah	jumlah warisan budaya benda yang	Kota Palopo	148 buah	10,000,000	DAU			15,000,000	Dis Kebudayaan an

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB	
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
2	2	0	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum yang ditatakelola	Kota Palopo		109,000,000	DAU			139,500,000	Dis perpustakaan
2	2	0	2.0	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang dibiayai	Kota Palopo	3 Eksamplar	4,000,000	DAU		3 Eksamplar	4,500,000	Dis perpustakaan
2	2	0	2.0	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah SPPD yang dilaksanakan	Kota Palopo	14 SPPD	105,000,000	DAU		14 SPPD	135,000,000	Dis perpustakaan
2	2	0	2.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	Kota Palopo		25,000,000	DAU			32,000,000	Dis perpustakaan
2	2	0	2.0	0	Pengadan Mebel	Jenis dan Jumlah Mebel yang diadakan	Kota Palopo	2 Jenis/Unit	12,000,000	DAU		2 Jenis/Unit	16,000,000	Dis perpustakaan
2	2	0	2.0	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis dan Jumlah Peralatan dan Mesin yang Disediakan	Kota Palopo	2 Jenis/Unit	13,000,000	DAU		2 Jenis/Unit	16,000,000	Dis perpustakaan
2	2	0	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Daerah yang dibiayai	Kota Palopo		155,000,000	DAU			175,000,000	Dis perpustakaan
2	2	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar ATK, Cetak dan Penggandaan	Kota Palopo	700 Surat/ Jenis/ Buah	23,500,000	DAU		700 Surat/ Jenis/ Buah	27,000,000	Dis perpustakaan
2	2	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Air, Listrik dan Internet yang dibiayai	Kota Palopo	5 Rekening	46,500,000	DAU		5 Rekening	49,500,000	Dis perpustakaan
2	2	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Layanan Kantor yang dilaksanakan	Kota Palopo	24 Layanan	85,000,000	DAU		24 Layanan	98,500,000	Dis perpustakaan
2	2	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Pemeliharaannya dibiayai	Kota Palopo		60,989,000	DAU			65,090,000	Dis perpustakaan
2	2	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Dan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas dipelihara dan pajaknya dibiayai	Kota Palopo	3 Unit	15,500,000	DAU		3 Unit	17,500,000	Dis perpustakaan
2	2	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara dan pajaknya dibiayai	Kota Palopo	3 Unit	17,000,000	DAU		3 Unit	20,000,000	Dis perpustakaan
2	2	0	2.0	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dibiayai	Kota Palopo	21 Unit	6,500,000	DAU		21 Unit	8,500,000	Dis perpustakaan
2	2	0	2.0	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah dan Luas Gedung Kantor yang dipelihara	Kota Palopo	1 Unit/m²	21,989,000	DAU		1 Unit/m²	19,090,000	Dis perpustakaan

KODE REKENING						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB			
								Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023				
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		
2	2	3	0	2			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan di Palopo yang Aktif (%)	Kota Palopo			184,800,000	DAU/DAK			191,171,000	Dis perpustakaan
2	2	3	0	2	2.0	1	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Perpustakaan	Kota Palopo			134,800,000	DAU/DAK			134,171,000	Dis perpustakaan
2	2	3	0	2	2.0	0	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Pelayanan Perpustakaan Berbasis Digital	Kota Palopo	1 Aplikasi		48,550,000	DAU/DAK		1 Aplikasi	40,000,000	Dis perpustakaan
2	2	3	0	2	2.0	0	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan	Kota Palopo	1 Unit/m²		11,450,000	DAU/DAK		1 Unit/m²	12,000,000	Dis perpustakaan
2	2	3	0	2	2.0	0	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang dibina	Kota Palopo	30 Lokasi		7,500,000	DAU/DAK		40 Lokasi	10,000,000	Dis perpustakaan
2	2	3	0	2	2.0	0	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang dibina Pengelolanya	Kota Palopo	16 Lokasi		4,000,000	DAU/DAK		24 Lokasi	6,000,000	Dis perpustakaan
2	2	3	0	2	2.0	0	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Pustaka yang Dikelola dan Dilestarikan	Kota Palopo	120 Judul		39,300,000	DAU/DAK		140 Judul	41,171,000	Dis perpustakaan
2	2	3	0	2	2.0	1	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pekan Perpustakaan yang dibuat	Kota Palopo	1 Dokumen		24,000,000	DAU/DAK		1 Dokumen	25,000,000	Dis perpustakaan
2	2	3	0	2	2.0	2	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kegemaran Membaca Masyarakat	Kota Palopo			50,000,000	DAU/DAK			57,000,000	Dis perpustakaan
2	2	3	0	2	2.0	0	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Layanan Operasional Perpustakaan Keliling	Kota Palopo	122 Lokasi		40,000,000	DAU/DAK		125 Lokasi	45,000,000	Dis perpustakaan
2	2	3	0	2	2.0	0	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Peserta Kegiatan Lomba Story Telling	Kota Palopo	40 Peserta		10,000,000	DAU/DAK		40 Peserta	12,000,000	Dis perpustakaan
2	2	3	0	3			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah Event Pameran Naskah Kuno yang dilaksanakan (Kali/Tahun)				40,000,000				46,700,000	Dis perpustakaan
2	2	3	0	3	2.0	1	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Pameran Naskah Kuno Milik Daerah yang dilaksanakan				40,000,000				46,700,000	Dis perpustakaan
2	2	3	0	3	2.0	0	Peningkatan Peran serta Masyarakat Dalam Menyimpan, Perawatan, Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno	Pameran Naskah Kuno	Kota Palopo	1 Event		40,000,000	DAU		1 Event	46,700,000	Dis perpustakaan
							URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					1,940,975,150				1,989,499,529	
							DINAS KEARSIPAN					1,940,975,150				1,989,499,529	

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB	
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
2	2	4	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintah Daerah (%)	Kota Palopo		1,859,379,000	DAU			1,905,863,475	Dis Kearsipan
2	2	4	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun Tepat Waktu (dokumen)	Kota Palopo		4,510,000	DAU			4,510,000	Dis Kearsipan
2	2	4	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA dan DPA perangkat daerah	Kota Palopo	4 Dokumen	2,255,000	DAU		2,255,000	Dis Kearsipan
2	2	4	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Palopo	1 Laporan	2,255,000	DAU		2,255,000	Dis Kearsipan
2	2	4	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Kota Palopo		1,449,127,000	DAU		1,481,439,475	Dis Kearsipan
2	2	4	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	Kota Palopo	18 Orang	1,418,027,000	DAU		1,450,339,475	Dis Kearsipan
2	2	4	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan Pertanggungjawaban yang diverifikasi	Kota Palopo	3 Orang	23,100,000	DAU		23,100,000	Dis Kearsipan
2	2	4	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan/bulanan/semesteran yang disusun	Kota Palopo	4 Laporan	8,000,000	DAU		8,000,000	Dis Kearsipan
2	2	4	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Kota Palopo		14,700,000	DAU		14,700,000	Dis Kearsipan
2	2	4	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah aset yang ditata kelolakan	Kota Palopo	3 Unit	14,700,000	DAU		14,700,000	Dis Kearsipan
2	2	4	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Kota Palopo		10,000,000	DAU		10,000,000	Dis Kearsipan
2	2	4	1	2.05	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	Kota Palopo	2 Orang	10,000,000	DAU		10,000,000	Dis Kearsipan
2	2	4	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Kota Palopo		114,545,000	DAU		120,037,000	Dis Kearsipan
2	2	4	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang diadakan	Kota Palopo	3 Buah	750,000	DAU		750,000	Dis Kearsipan
2	2	4	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan yang di biayai	Kota Palopo	3 Eksemplar	3,960,000	DAU		3,960,000	Dis Kearsipan
2	2	4	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah sppd yang dilaksanakan	Kota Palopo	60 SPPD	109,835,000	DAU		115,327,000	Dis Kearsipan
2	2	4	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Kota Palopo		124,940,000	DAU		130,117,000	Dis Kearsipan
2	2	4	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jenis dan jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan	Kota Palopo	1 Unit	21,409,000	DAU		21,409,000	Dis Kearsipan
2	2	4	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah mebelair yang diadakan	Kota Palopo	6 Unit	50,400,000	DAU		52,920,000	Dis Kearsipan
2	2	4	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis dan jumlah peralatan dan mesin yang disediakan	Kota Palopo	5 Unit	53,131,000	DAU		55,788,000	Dis Kearsipan
2	2	4	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kota Palopo		94,533,000	DAU		95,685,000	Dis Kearsipan

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB		
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023			
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
2	2	4	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah surat masuk, surat keluar, ATK, Cetak, dan Penggandaan	Kota Palopo	1500 Surat	23,033,000	DAU			24,185,000	Dis Kearsipan
2	2	4	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik, internet yang dibiayai	Kota Palopo	2 Rekening	6,600,000	DAU			6,600,000	Dis Kearsipan
2	2	4	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Layanan kantor yang dilaksanakan	Kota Palopo	11 Orang	64,900,000	DAU			64,900,000	Dis Kearsipan
2	2	4	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kota Palopo		47,024,000	DAU			49,375,000	Dis Kearsipan
2	2	4	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	Kota Palopo	1 Unit	26,250,000	DAU			27,563,000	Dis Kearsipan
2	2	4	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau kendaraan lapangan yang dibiayai	Kota Palopo	1 Unit	18,149,000	DAU			19,056,000	Dis Kearsipan
2	2	4	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang di biayai	Kota Palopo	5 Buah	2,625,000	DAU			2,756,000	Dis Kearsipan
2	2	4	2			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		Kota Palopo		45,977,400	DAU			47,126,835	Dis Kearsipan
2	2	4	2	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota		Kota Palopo		27,977,400	DAU			29,126,835	Dis Kearsipan
2	2	4	2	2.01	1	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Perda dan Perwal yang tercipta	Kota Palopo	4 Perwal	15,611,400	DAU			16,520,835	Dis Kearsipan
2	2	4	2	2.01	2	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah arsip yang dipelihara (Arsip Inaktif)(Buah/Tahun)	Kota Palopo	700 Buah	3,766,000	DAU			4,006,000	Dis Kearsipan
2	2	4	2	2.01	3	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang dilakukan Pengawasan Kearsipan Kab/Kota	Kota Palopo	49 OPD	8,600,000	DAU			8,600,000	Dis Kearsipan
2	2	4	2	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota		Kota Palopo		14,500,000	DAU			14,500,000	Dis Kearsipan
2	2	4	2	2.02	2	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Perangkat Daerah yang Diakuisis Arsip Statis (Buah/Tahun)	Kota Palopo	49 OPD	14,500,000	DAU			14,500,000	Dis Kearsipan
2	2	4	2	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota		Kota Palopo		3,500,000	DAU			3,500,000	Dis Kearsipan
2	2	4	2	2.03	1	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Jumlah Sarana Layanan Informasi Arsip yang disediakan (Buah)	Kota Palopo	1 Buah	3,500,000	DAU			3,500,000	Dis Kearsipan
2	2	4	3			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP		Kota Palopo		35,618,750	DAU			36,509,219	Dis Kearsipan
2	2	4	3	2.01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun		Kota Palopo		28,400,000	DAU			29,290,469	Dis Kearsipan

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB	
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
2	2	3	2.0	1	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah arsip yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi dibawah 10 tahun	Kota Palopo	49 Arsip	24,400,000	DAU			24,400,000	Dis Kearsipan
2	2	3	2.0	2	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi dibawah 10 tahun	Kota Palopo	10 Arsip	4,000,000	DAU			4,890,469	Dis Kearsipan
2	2	3	2.0		Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota		Kota Palopo		7,218,750	DAU			7,218,750	Dis Kearsipan
2	2	3	2.0	1	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Penilaian dan Penetapan Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjamin Keabsahan Arsip	Kota Palopo	20 Dokumen	7,218,750	DAU			7,218,750	Dis Kearsipan
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				41,124,222,481				47,618,918,369	
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				4,875,501,848				4,997,389,394	
					DINAS PERIKANAN				4,875,501,848				4,997,389,394	Dinas Perikanan
3	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan urusan pemerintahan daerah	Kota Palopo	1	4,085,919,000	DAU		1	4,188,066,975	Dinas Perikanan
3	2	1	2.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Kota Palopo	8 dokumen	2,880,000	DAU		8 dokumen	2,950,000	Dinas Perikanan
3	2	1	2.0	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra, Renja, RKA dan DPA Perangkat Daerah	Kota Palopo	7 dokumen	1,440,000	DAU		7 dokumen	1,475,000	Dinas Perikanan
3	2	1	2.0	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Palopo	1 laporan	1,440,000	DAU		1 laporan	1,475,000	Dinas Perikanan
3	2	1	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan keuangan	Kota Palopo	737 laporan	3,427,487,725	DAU		757 laporan	3,462,265,241	Dinas Perikanan
3	2	1	2.0	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	Kota Palopo	46 orang	3,355,287,725	DAU		46 orang	3,388,260,241	Dinas Perikanan
3	2	1	2.0	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan pertanggungjawaban yang diverifikasi	Kota Palopo	725 laporan pertanggungjawaban	70,000,000	DAU		750 laporan pertanggungjawaban	71,750,000	Dinas Perikanan
3	2	1	2.0	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan, semesteran, dan tahunan yang disusun	Kota Palopo	14 laporan keuangan	2,200,000	DAU		14 laporan keuangan	2,255,000	Dinas Perikanan
3	2	1	2.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang difasilitasi	Kota Palopo	52 orang	48,000,000	DAU		4 orang	28,000,000	Dinas Perikanan
3	2	1	2.0	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	Kota Palopo	46 orang	23,000,000	DAU		-	-	Dinas Perikanan
3	2	1	2.0	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan teknis	Kota Palopo	4 orang	25,000,000	DAU		4 orang	28,000,000	Dinas Perikanan

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB	
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
3	2	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan	Kota Palopo	2 jenis	282,130,000	DAU		2 jenis	313,417,500	Dinas Perikanan
3	2	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan yang dibiayai	Kota Palopo	4 eksemplar	5,380,000	DAU		4 eksemplar	5,480,000	Dinas Perikanan
3	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SPPD yang dilaksanakan	Dalam/Luar Kota Palopo	80 kali	276,750,000	DAU		85 kali	307,937,500	Dinas Perikanan
3	2	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	Kota Palopo	18 unit	59,000,000	DAU/DAK		19 unit	104,675,000	Dinas Perikanan
					Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang diadakan	Kota Palopo	-	-	DAU/DAK		1 unit	38,000,000	Dinas Perikanan
3	2	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang dibeli	Kota Palopo	8 unit	14,500,000	DAU/DAK		6 unit	16,500,000	Dinas Perikanan
3	2	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan mesin yang disediakan	Kota Palopo	10 unit	44,500,000	DAU/DAK		12 unit	50,175,000	Dinas Perikanan
3	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai	Kota Palopo	3 jenis	170,921,275	DAU		3 jenis	174,259,234	Dinas Perikanan
3	2	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar	Kota Palopo	1.525 surat	33,865,125	DAU		1.560 surat	35,795,430	Dinas Perikanan
3	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening air, listrik dan internet yang dibiayai	Kota Palopo	3 rekening	46,306,150	DAU		3 rekening	47,463,804	Dinas Perikanan
3	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan kantor yang dilaksanakan	Kota Palopo	7 layanan	90,750,000	DAU		7 layanan	91,000,000	Dinas Perikanan
3	2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang pemeliharaannya dibiayai	Kota Palopo	53 unit	95,500,000	DAU		56 unit	102,500,000	Dinas Perikanan
3	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	Kota Palopo	1 unit	26,250,000	DAU		1 unit	26,250,000	Dinas Perikanan
3	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	Kota Palopo	26 unit	36,050,000	DAU		26 unit	39,600,000	Dinas Perikanan
3	2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dibiayai	Kota Palopo	25 unit	6,950,000	DAU		28 unit	7,400,000	Dinas Perikanan
3	2	1	2.09	9	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah dan luas gedung kantor yang dipelihara	Kota Palopo	3.976 m²	26,250,000	DAU		3.976 m²	29,250,000	Dinas Perikanan
3	2	3			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi perikanan tangkap	Kota Palopo	19.899,40 ton	272,552,348	DAU/DAK		20.098,39 ton	279,366,157	Dinas Perikanan
3	2	3	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota	Jumlah sarana dan prasarana perikanan tangkap yang diadakan	Kota Palopo	45 unit	175,000,875	DAU/DAK		35 unit	179,375,897	Dinas Perikanan

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB		
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023			
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
3	2	5	3	2.0	2	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah prasarana perikanan tangkap yang diadakan	Kota Palopo	35 unit	172,700,000	DAU/D AK		25 unit	177,050,000	Dinas Perikanan
3	2	5	3	2.0	3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah sarana perikanan tangkap yang disediakan	Kota Palopo	10 unit	2,300,875	DAU/D AK		10 unit	2,325,897	Dinas Perikanan
3	2	5	3	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah kelompok nelayan yang diberdayakan	Kota Palopo	30 klp	38,796,188	DAU/D AK		30 klp	39,766,092	Dinas Perikanan
3	2	5	3	2.0	1	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah kelompok nelayan yang dibina	Kota Palopo	30 klp	20,769,000	DAU/D AK		30 klp	21,288,225	Dinas Perikanan
3	2	5	3	2.0	2	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah kelompok yang difasilitasi	Kota Palopo	30 klp	18,027,188	DAU/D AK		30 klp	18,477,867	Dinas Perikanan
3	2	5	3	2.03		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah TPI yang dikelola	Kota Palopo	1 unit	58,755,285	DAU/D AK		1 unit	60,224,168	Dinas Perikanan
3	2	5	3	2.0	2	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah TPI yang beroperasi	Kota Palopo	1 unit	58,755,285	DAU/D AK		1 unit	60,224,168	Dinas Perikanan
3	2	5	4			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya	Kota Palopo	143.634,56 ton	448,745,000	DAU/D AK		150.816,29 ton	459,963,625	Dinas Perikanan
3	2	5	4	2.02		Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah kelompok pembudidaya yang diberdayakan	Kota Palopo	30 klp	34,125,275	DAU/D AK		30 klp	37,612,914	Dinas Perikanan
3	2	5	4	2.0	1	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok pembudidaya yang dibina	Kota Palopo	20 klp	17,825,275	DAU/D AK		20 klp	19,962,914	Dinas Perikanan
3	2	5	4	2.0	2	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok yang didampingi	Kota Palopo	30 klp	16,300,000	DAU/D AK		30 klp	17,650,000	Dinas Perikanan
3	2	5	4	2.04		Pengelolaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Luas lahan budidaya yang produktif	Kota Palopo	1.578,92 ha	414,619,725	DAU/D AK		1.583,92 ha	422,350,711	Dinas Perikanan
3	2	5	4	2.0	1	Penyediaan Data dan Informasi Pem budidaya Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah data / laporan	Kota Palopo	4 laporan	22,471,000	DAU/D AK		4 laporan	23,594,550	Dinas Perikanan
3	2	5	4	2.0	2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) daerah Kabupaten / Kota	Jumlah prasarana pembudidayaan ikan yang produktif	Kota Palopo	5 unit	342,179,975	DAU/D AK		10 unit	346,288,973	Dinas Perikanan
3	2	5	4	2.0	3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah produksi bibit ikan unggul	Kota Palopo	685.510 ekor	49,968,750	DAU/D AK		755.525 ekor	52,467,188	Dinas Perikanan
3	2	5	6			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah produksi olahan hasil perikanan	Kota Palopo	112,48 ton	68,285,500	DAU/D AK		113,38 ton	69,992,638	Dinas Perikanan
3	2	5	6	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah tanda daftar usaha pengolahan yang diterbitkan	Kota Palopo	10 UMK	8,772,000	DAU/D AK		10 UMK	8,991,300	Dinas Perikanan
3	2	5	6	2.0	1	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah data / laporan	Kota Palopo	12 laporan	8,772,000	DAU/D AK		12 laporan	8,991,300	Dinas Perikanan
3	2	5	6	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah produk yang dikembangkan	Kota Palopo	4 produk	20,790,000	DAU/D AK		4 produk	21,309,750	Dinas Perikanan

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB	
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
3	2	6	2.0	1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah produk yang memenuhi persyaratan / standar	Kota Palopo	4 produk	20,790,000	DAU/DAAK		4 produk	21,309,750	Dinas Perikanan
3	2	6	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten / Kota	Jumlah kelompok pengolah dan pemasar perikanan	Kota Palopo	9 kelompok	38,723,500	DAU/DAAK		9 kelompok	39,691,588	Dinas Perikanan
3	2	6	2.03	1	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah pemasar / pemasok ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan	Kota Palopo	5 pemasok	7,050,000	DAU/DAAK		5 pemasok	7,226,250	Dinas Perikanan
3	2	6	2.03	2	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah kelompok yang difasilitasi	Kota Palopo	4 klp	31,673,500	DAU/DAAK		4 klp	32,465,338	Dinas Perikanan
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				4,489,210,075				10,085,012,202	
					DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				4,489,210,075				10,085,012,202	
3	2	6	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintah Daerah (%)	Kota Palopo		3,314,857,000	DAU/DAAK			3,397,328,425	Dis Parekraf
3	2	6	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun Tepat Waktu (dokumen)	Kota Palopo		1,200,000	DAU/DAAK			1,200,000	Dis Parekraf
3	2	6	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen Renstra, renja, RKA, DPA perangkat daerah	Kota Palopo	4 Dokumen	600,000	DAU/DAAK		600,000	Dis Parekraf
3	2	6	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Palopo	2 laporan	600,000	DAU/DAAK		600,000	Dis Parekraf
3	2	6	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Kota Palopo		2,715,110,000	DAU/DAAK		2,815,110,000	Dis Parekraf
3	2	6	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	Kota Palopo	33 orang	2,673,110,000	DAU/DAAK		2,773,110,000	Dis Parekraf
3	2	6	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan pertanggungjawaban yang diverifikasi	Kota Palopo	14 laporan	41,400,000	DAU/DAAK		41,400,000	Dis Parekraf
3	2	6	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan yang disusun	Kota Palopo	3 laporan	600,000	DAU/DAAK		600,000	Dis Parekraf
3	2	6	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Kota Palopo		6,953,000	DAU/DAAK		6,953,000	Dis Parekraf
3	2	6	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah aset yang ditata kelolakan	Kota Palopo	140 unit	6,953,000	DAU/DAAK		6,953,000	Dis Parekraf
3	2	6	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Kota Palopo		12,000,000	DAU/DAAK		12,000,000	Dis Parekraf
3	2	6	1	2.05	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	Kota Palopo	4 Orang	12,000,000	DAU/DAAK		12,000,000	Dis Parekraf
3	2	6	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Kota Palopo		200,694,000	DAU/DAAK		197,400,425	Dis Parekraf

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB		
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023			
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
3	2	6	1	2.0	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang diadakan	Kota Palopo	10 Buah	1,000,000	DAU/DAK			1,000,000	Dis Parekraf
3	2	6	1	2.0	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Kota Palopo	10 buah	1,000,000	DAU/DAK			1,000,000	Dis Parekraf
3	2	6	1	2.0	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Kota Palopo	1 Tahun	0	DAU/DAK			0	Dis Parekraf
3	2	6	1	2.0	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan yang dibiayai	Kota Palopo	3 Exemplar	3,960,000	DAU/DAK			3,960,000	Dis Parekraf
3	2	6	1	2.0	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah SPPD yang dilaksanakan	Kota Palopo	25 SPPD	194,734,000	DAU/DAK			191,440,425	Dis Parekraf
3	2	6	1	2.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Kota Palopo		46,000,000	DAU/DAK			42,000,000	Dis Parekraf
3	2	6	1	2.0	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jenis dan jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan	Kota Palopo	1 unit	18,000,000	DAU/DAK			19,500,000	Dis Parekraf
3	2	6	1	2.0	5	Pengadaan Mebel	jenis dan jumlah mebel yang diadakan	Kota Palopo	1 jenis	5,000,000	DAU/DAK			0	Dis Parekraf
3	2	6	1	2.0	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jenis dan jumlah peralatan dan mesin yang disediakan	Kota Palopo	6 unit	23,000,000	DAU/DAK			22,500,000	Dis Parekraf
3	2	6	1	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kota Palopo		289,700,000	DAU/DAK			292,865,000	Dis Parekraf
3	2	6	1	2.0	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah surat masuk, surat keluar, atk, cetak dan pengadaan	Kota Palopo	100 jenis	14,500,000	DAU/DAK			15,000,000	Dis Parekraf
3	2	6	1	2.0	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening air, listrik dan internet yang dibiayai	Kota Palopo	5 rekening	75,000,000	DAU/DAK			75,000,000	Dis Parekraf
3	2	6	1	2.0	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah layanan kantor yang dilaksanakan	Kota Palopo	29 layanan	200,200,000	DAU/DAK			202,865,000	Dis Parekraf
3	2	6	1	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kota Palopo		43,200,000	DAU/DAK			29,800,000	Dis Parekraf
3	2	6	1	2.0	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	Kota Palopo	6 unit	21,100,000	DAU/DAK			25,000,000	Dis Parekraf
3	2	6	1	2.0	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	Kota Palopo	5 unit	800,000	DAU/DAK			800,000	Dis Parekraf
3	2	6	1	2.0	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya dibiayai	Kota Palopo	20 buah	4,300,000	DAU/DAK			4,000,000	Dis Parekraf
3	2	6	1	2.0	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya	Kota Palopo	1 Tahun	0	DAU/DAK			0	Dis Parekraf
3	2	6	1	2.0	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah dan luas gedung kantor yang dipelihara	Kota Palopo	90 unit/M2	17,000,000	DAU/DAK			0	Dis Parekraf
3	2	6	2			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		Kota Palopo		46,125,000	DAU/DAK			3,800,000,000	Dis Parekraf

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB	
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
3	2	2	2.0		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Kota Palopo		41,125,000	DAU/DAAK			3,800,000,000	Dis Parekraf
3	2	2	2.0	4	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana destinasi pariwisata yang diadakan / direhab / dipelihara	Kota Palopo	1 Destinasi	16,500,000	DAU/DAAK			3,760,000,000	Dis Parekraf
3	2	2	2.0	5	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kepariwisataaan	Kota Palopo	17 Dokumen	8,625,000	DAU/DAAK			20,000,000	Dis Parekraf
3	2	2	2.0	6	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	jumlah kelompok usaha pariwisata yang dibina	Kota Palopo	10 kelompok usaha	16,000,000	DAU/DAAK			20,000,000	Dis Parekraf
3	2	2	2.0		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota		Kota Palopo		5,000,000	DAU/DAAK			0	Dis Parekraf
3	2	2	2.0	4	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah pelaku usaha pariwisata yang dibina	Kota Palopo	30 Pelaku usaha	5,000,000	DAU/DAAK			0	Dis Parekraf
3	2	3			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		Kota Palopo		70,933,075	DAU/DAAK			72,706,402	Dis Parekraf
3	2	3	2.0		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Kota Palopo		70,933,075	DAU/DAAK			72,706,402	Dis Parekraf
3	2	3	2.0	1	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Frekuensi promosi melalui media baik dalam dan luar negeri	Kota Palopo	1 Pameran	20,933,075	DAU/DAAK			22,706,402	Dis Parekraf
3	2	3	2.0	2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pemasaran pariwisata yang difasilitasi	Kota Palopo	4 pameran	0	DAU/DAAK			50,000,000	Dis Parekraf
3	2	3	2.0	3	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jenis dan jumlah data pariwisata serta penyebarannya	Kota Palopo	1 dokumen	50,000,000	DAU/DAAK			0	Dis Parekraf
3	2	4			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL		Kota Palopo		750,000,000	DAU/DAAK			2,500,000,000	Dis Parekraf
3	2	4	2.0		Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota		Kota Palopo		250,000,000	DAU/DAAK			2,070,000,000	Dis Parekraf
3	2	4	2.0	1	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Gedung ruang kreatif HUB bagi pelaku ekonomi kreatif dikota palopo	Kota Palopo	1 gedung	250,000,000	DAU/DAAK			2,070,000,000	Dis Parekraf
3	2	4	2.0		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif		Kota Palopo		500,000,000	DAU/DAAK			430,000,000	Dis Parekraf

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB	
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
3	2	4	2.0	3	Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mendapatkan bantuan pendanaan dan pembiayaan	Kota Palopo	50 orang	290,000,000	DAU/D			300,000,000	Dis Parekraf
3	2	4	2.0	5	Pengembangan Sistem Pemasaran	Aplikasi data pokok ekonomi kreatif dikota palopo	Kota Palopo	1 aplikasi	60,000,000	DAU/D			30,000,000	Dis Parekraf
3	2	4	2.0	7	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mengikuti sosialisasi dan pendampingan HAKI	Kota Palopo	12 Komunitas	50,000,000	DAU/D			100,000,000	Dis Parekraf
3	2	4	2.0	9	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Kota Palopo	1 dokumen	100,000,000	DAU/D			0	Dis Parekraf
3	2	5			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		Kota Palopo		307,295,000	DAU/D			314,977,375	Dis Parekraf
3	2	5	2.0		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		Kota Palopo		100,000,000	DAU/D			105,000,000	Dis Parekraf
3	2	5	2.0	5	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	jumlah pelaku ekonomi kreatif yang berpartisipasi dalam kegiatan Palopo Art Festifal (PAF)	Kota Palopo	10 Komunitas	100,000,000	DAU/D			105,000,000	Dis Parekraf
3	2	5	2.0		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif		Kota Palopo		207,295,000	DAU/D			209,977,375	Dis Parekraf
3	2	5	2.0	1	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah orang (pelaku ekraf) yang mengikuti bimbingan tehknis dan pendampingan ekraf	Kota Palopo	80 orang	207,295,000	DAU/D			209,977,375	Dis Parekraf
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				21,327,685,245				21,860,877,376	
3	3	1			DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN				21,327,685,245				21,860,877,376	Dis PPP
3	2	7	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAKUPAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Palopo	100	14,166,000,000	DAU		100	14,474,300,000	Dis PPP
3	2	7	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Kota Palopo	8	9,700,000	DAU		8	11,000,000	Dis PPP
3	2	7	1	2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra, renja, RKA dan DPA perangkat daerah	Kota Palopo	7	4,500,000	DAU		7	5,000,000	Dis PPP
3	2	7	1	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Palopo	1	5,200,000	DAU		1	6,000,000	Dis PPP
3	2	7	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan keuangan	Kota Palopo	158	12,324,300,000	DAU		158	12,579,800,000	Dis PPP
3	2	7	1	2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	Kota Palopo	130	12,250,000,000	DAU		130	12,500,000,000	Dis PPP
3	2	7	1	2.02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan pertanggung jawaban yang diverifikasi	Kota Palopo	9	70,000,000	DAU		9	75,000,000	Dis PPP
3	2	7	1	2.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun yang disusun	Kota Palopo	1	2,000,000	DAU		1	2,300,000	Dis PPP

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB		
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023			
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
3	2	7	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan, semesteran yang disusun	Kota Palopo	18	2,300,000	DAU		18	2,500,000	Dis PPP
3	2	7	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelolaan aset	Kota Palopo	1230	30,000,000	DAU		1280	32,000,000	Dis PPP
3	2	7	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah aset yang ditatakelolakan	Kota Palopo	1230	30,000,000	DAU		1280	32,000,000	Dis PPP
3	2	7	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi ASN PD yang dikelola	Kota Palopo	136	124,000,000	DAU		136	129,000,000	Dis PPP
3	2	7	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian dinas yang diadakan	Kota Palopo	130	78,000,000	DAU		130	80,000,000	Dis PPP
3	2	7	1	2.05	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	Kota Palopo	6	46,000,000	DAU		6	49,000,000	Dis PPP
3	2	7	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Yang Ditatakelolakan	Kota Palopo	332	440,000,000	DAU		334	452,500,000	Dis PPP
3	2	7	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang diadakan	Kota Palopo	25	10,000,000	DAU		25	10,000,000	Dis PPP
3	2	7	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Kota Palopo	3	13,000,000	DAU		5	15,000,000	Dis PPP
3	2	7	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang dibiayai	Kota Palopo	4	7,000,000	DAU		4	7,500,000	Dis PPP
3	2	7	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SPPD yang dilaksanakan	Kota Palopo	300	410,000,000	DAU		300	420,000,000	Dis PPP
3	2	7	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	Kota Palopo	8	100,000,000	DAU		10	110,000,000	Dis PPP
3	2	7	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis dan Jumlah peralatan dan mesin yang disediakan	Kota Palopo	8	100,000,000	DAU		10	110,000,000	Dis PPP
3	2	7	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan yang dibiayai	Kota Palopo	2941	756,000,000	DAU		3085	770,000,000	Dis PPP
3	2	7	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk, surat keluar, atk, cetak dan pengadaan	Kota Palopo	2893	90,000,000	DAU		3037	95,000,000	Dis PPP
3	2	7	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening air, listrik dan internet yang dibiayai	Kota Palopo	38	326,000,000	DAU		38	330,000,000	Dis PPP
3	2	7	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan kantor yang dilaksanakan	Kota Palopo	10	340,000,000	DAU		10	345,000,000	Dis PPP
3	2	7	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang pemeliharaannya dibiayai	Kota Palopo	213	382,000,000	DAU		214	390,000,000	Dis PPP
3	2	7	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	Kota Palopo	1	30,000,000	DAU		1	33,000,000	Dis PPP
3	2	7	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	Kota Palopo	143	42,000,000	DAU		143	45,000,000	Dis PPP

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
					Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
3	2	7	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dibiayai	Kota Palopo	19	10,000,000	DAU	20	12,000,000	Dis PPP
3	2	7	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah dan Luas gedung kantor yang terpelihara	Kota Palopo	50	300,000,000	DAU	50	300,000,000	Dis PPP
3	2	7	2			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	Kota Palopo	5	4,894,000,145	DAU/DAK	5	5,016,350,149	Dis PPP
3	2	7	2	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Kelompok Tani dan Sarana yang diawasi	Kota Palopo	16	690,000,000	DAU/DAK	16	720,000,000	Dis PPP
3	2	7	2	2.01	1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah alat dan mesin pertanian yang diadakan dan diawasi	Kota Palopo	20	250,000,000	DAU/DAK	6	260,000,000	Dis PPP
3	2	7	2	2.01	2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Kelompok Tani yang diberi sarana pendukung pertanian	Kota Palopo	10	440,000,000	DAU/DAK	10	460,000,000	Dis PPP
3	2	7	2	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah bibit unggul hewan/tanaman yang beredar di masyarakat	Kota Palopo	5190	400,000,000	DAU/DAK	5700	420,000,000	Dis PPP
3	2	7	2	2.02	2	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelayanan Inseminasi Buatan yang dilakukan	Kota Palopo	190	35,000,000	DAU/DAK	200	36,000,000	Dis PPP
3	2	7	2	2.02	3	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Bibit Unggul yang beredar di masyarakat	Kota Palopo	5000	365,000,000	DAU/DAK	5500	384,000,000	Dis PPP
3	2	7	2	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan yang dilaksanakan	Kota Palopo	12	70,000,000	DAU/DAK	12	75,000,000	Dis PPP
3	2	7	2	2.03	1	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan yang dilaksanakan	Kota Palopo	12	70,000,000	DAU/DAK	12	75,000,000	Dis PPP
3	2	7	2	2.04		Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Jumlah Pengawasan/Pemeriksaan obat hewan di tingkat pengecer	Kota Palopo	12	8,505,000	DAU/DAK	12	9,500,000	Dis PPP
3	2	7	2	2.04	1	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pengawasan/Pemeriksaan yang dilakukan	Kota Palopo	12	8,505,000	DAU/DAK	12	9,500,000	Dis PPP
3	2	7	2	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bibit Ayam Hasil Penetasan UPTD	Kota Palopo	130500	1,364,000,000	DAU/DAK	131000	1,428,000,000	Dis PPP
3	2	7	2	2.05	5	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Bibit Ayam Hasil Penetasan UPTD	Kota Palopo	130500	1,364,000,000	DAU/DAK	131000	1,428,000,000	Dis PPP
3	2	7	2	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang	Jumlah jenis benih/bibit ternak dan pakan ternak yang diadakan	Kota Palopo	22671	2,361,495,145	DAU/DAK	26671	2,363,850,149	Dis PPP

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB	
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
					Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain									
3	2	2	2.0	1	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah benih/bibit ternak yang diadakan	Kota Palopo	4	2,327,495,145	DAU/DAK		4	2,323,850,149	Dis PPP
3	2	2	2.0	2	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang diadakan	Kota Palopo	22667	34,000,000	DAU/DAK		26667	40,000,000	Dis PPP
3	2	3			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Lahan Sawah ber Indeks Pertanaman (IP) diatas 2	Kota Palopo	7	1,436,329,550	DAU/DAK		9	1,518,087,788	Dis PPP
3	2	3	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang dikelola	Kota Palopo	202	291,329,550	DAU/DAK		502	320,000,000	Dis PPP
3	2	3	2.01	1	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Luas Lahan Pertanian pangan yang dilindungi	Kota Palopo	200	271,329,550	DAU/DAK		500	300,000,000	Dis PPP
3	2	3	2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi	Kota Palopo	2	20,000,000	DAU/DAK		2	20,000,000	Dis PPP
3	2	3	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana pertanian yang dibangun	Kota Palopo	19	1,130,000,000	DAU/DAK		20	1,183,087,788	Dis PPP
3	2	3	2.02	1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi yang dikelola	Kota Palopo	3	100,000,000	DAU/DAK		3	100,000,000	Dis PPP
3	2	3	2.02	2	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang dikelola	Kota Palopo	2	100,000,000	DAU/DAK		2	100,000,000	Dis PPP
3	2	3	2.02	3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Panjang Jalan Tani yang dibangun	Kota Palopo	3	330,000,000	DAU/DAK		4	383,087,788	Dis PPP
3	2	3	2.02	4	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang dikelola	Kota Palopo	2	100,000,000	DAU/DAK		2	100,000,000	Dis PPP
3	2	3	2.02	5	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage	Jumlah Long Storage yang dikelola	Kota Palopo	2	100,000,000	DAU/DAK		2	100,000,000	Dis PPP
3	2	3	2.02	6	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang dikelola	Kota Palopo	3	100,000,000	DAU/DAK		3	100,000,000	Dis PPP
3	2	3	2.02	7	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang dikelola	Kota Palopo	2	100,000,000	DAU/DAK		2	100,000,000	Dis PPP
3	2	3	2.02	8	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di kecamatan yang dikelola	Kota Palopo	1	100,000,000	DAU/DAK		1	100,000,000	Dis PPP
3	2	3	2.02	9	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang dikelola	Kota Palopo	1	100,000,000	DAU/DAK		1	100,000,000	Dis PPP
3	2	3	2.03		Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Wilayah pengembangan bibit ternak yang diawasi	Kota Palopo	2	15,000,000	DAU/DAK		2	15,000,000	Dis PPP

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB	
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
3	2	3	2.0	1	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah pengembangan bibit ternak yang diawasi	Kota Palopo	2	15,000,000	DAU/D A K		2	15,000,000	Dis PPP
3	2	4			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Kota Palopo	2	145,000,000	DAU/D A K		2	148,625,000	Dis PPP
3	2	4	2.0		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ternak yang ditangani	Kota Palopo	5100	65,000,000	DAU/D A K		5100	66,625,000	Dis PPP
3	2	4	2.0	1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Pengobatan Hewan yang dilaksanakan	Kota Palopo	5000	65,000,000	DAU/D A K		5000	66,625,000	Dis PPP
3	2	4	2.0		Penerapan dan Pengawasan Pesyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Ternak yang ditertibkan	Kota Palopo	100	80,000,000	DAU/D A K		100	82,000,000	Dis PPP
3	2	4	2.0	2	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Ternak yang ditertibkan	Kota Palopo	100	80,000,000	DAU/D A K		100	82,000,000	Dis PPP
3	2	5			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	% Luas Lahan Pertanian yang Gagal Panen/Gagal Tanam (Ha/Thn)	Kota Palopo	0.6	74,778,875	DAU/D A K		0.5	76,648,347	Dis PPP
3	2	5	2.0		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas Lahan Pertanian yang di kendalikan	Kota Palopo	120	74,778,875	DAU/D A K		150	76,648,347	Dis PPP
3	2	5	2.0	1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Sosialisasi Pengendalian Hama dan Penyakit Secara terpadu	Kota Palopo	2	6,800,000	DAU/D A K		2	7,200,000	Dis PPP
3	2	5	2.0	2	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah sosialisasi GAP OPT yang dilakukan	Kota Palopo	4	37,978,875	DAU/D A K		4	38,248,347	Dis PPP
3	2	5	2.0	3	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah gangguan usaha tanaman perkebunan yang ditangani	Kota Palopo	1	15,500,000	DAU/D A K		1	16,200,000	Dis PPP
3	2	5	2.0	5	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Luas Lahan sawah yang diasuransi	Kota Palopo	120	14,500,000	DAU/D A K		150	15,000,000	Dis PPP
3	2	6			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Usaha Pertanian yang Berizin	Kota Palopo	20	38,000,000	DAU/D A K		25	38,950,000	Dis PPP
3	2	6	2.0		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha pertanian yang ditertibkan	Kota Palopo	7	12,000,000	DAU/D A K		9	12,600,000	Dis PPP
3	2	6	2.0	1	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Jumlah dokumen yang dihasilkan	Kota Palopo	1	4,000,000	DAU/D A K		1	4,200,000	Dis PPP
3	2	6	2.0	2	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Usaha Pertanian yang dinilai kelayakannya	Kota Palopo	3	4,000,000	DAU/D A K		4	4,200,000	Dis PPP

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB		
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023			
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
3	2	7	6	2.01	3	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Usaha Pertanian yang diterbitkan	Kota Palopo	3	4,000,000	DAU/DAAK		4	4,200,000	Dis PPP
3	2	7	6	2.02		Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Usaha Peternakan yang diterbitkan	Kota Palopo	26	21,000,000	DAU/DAAK		28	21,000,000	Dis PPP
3	2	7	6	2.02	1	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah rekomendasi izin usaha yang diterbitkan	Kota Palopo	10	4,000,000	DAU/DAAK		10	4,200,000	Dis PPP
3	2	7	6	2.02	2	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	Jumlah usaha produksi benih/bibit ternak yang diawasi	Kota Palopo	3	4,000,000	DAU/DAAK		5	4,200,000	Dis PPP
3	2	7	6	2.02	3	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan	Jumlah pengawasan usaha petshop yang memfasilitasi pemeliharaan hewan	Kota Palopo	6	4,000,000	DAU/DAAK		6	4,200,000	Dis PPP
3	2	7	6	2.02	4	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan	Jumlah pengawasan Rumah sakit hewan/klinik hewan/petshop	Kota Palopo	1	4,000,000	DAU/DAAK		1	4,200,000	Dis PPP
3	2	7	6	2.02	5	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan	Jumlah usaha rumah potong hewan yang diawasi	Kota Palopo	6	5,000,000	DAU/DAAK		6	4,200,000	Dis PPP
3	2	7	6	2.03		Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Jumlah pengecer obat hewan yang diawasi	Kota Palopo	12	5,000,000	DAU/DAAK		12	5,350,000	Dis PPP
3	2	7	6	2.03	2	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah pengawasan izin pengecer obat hewan	Kota Palopo	12	5,000,000	DAU/DAAK		12	5,350,000	Dis PPP
3	2	7	7			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelompok Tani yang Mampu Meningkatkan Produksi/Produktifitasnya	Kota Palopo	54	573,576,675	DAU/DAAK		55	587,916,092	Dis PPP
3	2	7	7	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Penyuluhan dan pendampingan kelompok tani	Kota Palopo	12	573,576,675	DAU/DAAK		12	587,916,092	Dis PPP
3	2	7	7	2.01	1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah penyuluhan dan pendampingan yang dilaksanakan	Kota Palopo	12	333,576,675	DAU/DAAK		12	337,916,092	Dis PPP
3	2	7	7	2.01	2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelompok Tani Yang Aktif	Kota Palopo	466	60,000,000	DAU/DAAK		466	65,000,000	Dis PPP
3	2	7	7	2.01	5	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani	Kota Palopo	4	180,000,000	DAU/DAAK		4	185,000,000	Dis PPP
						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				5,741,710,613.00				5,885,253,378.00	
						DINAS PERDAGANGAN				5,741,710,613.00				5,885,253,378.00	
3	3	0	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintah Daerah (%)	Kota Palopo		4,365,710,613	DAU			4,460,753,378	Disdag

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB	
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
3	30	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun Tepat Waktu (dokumen)	Kota Palopo		5,430,000	DAU			6,100,000	Disdag
3	30	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA dan DPA Perangkat Daerah	Kota Palopo	7 dokumen	2,730,000	DAU			3,000,000	Disdag
3	30	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palopo	1 Dokumen	2,700,000	DAU			3,100,000	Disdag
3	30	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Kota Palopo		3,810,490,613	DAU			3,830,303,378	Disdag
3	30	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	Kota Palopo	50 orang	3,719,890,613	DAU			3,735,003,378	Disdag
3	30	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban yang diverifikasi	Kota Palopo	16000 LPJ	86,000,000	DAU			90,000,000	Disdag
3	30	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang Dibuat	Kota Palopo	1 Laporan	2,100,000	DAU			2,100,000	Disdag
3	30	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran yang dibuat	Kota Palopo	17 Laporan	2,500,000	DAU			3,200,000	Disdag
3	30	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Kota Palopo		23,600,000	DAU			22,800,000	Disdag
3	30	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Aset yang ditatakelolakan	Kota Palopo	6 Jenis	23,600,000	DAU			22,800,000	Disdag
3	30	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Kota Palopo		31,500,000	DAU			32,600,000	Disdag
3	30	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas dan Atributnya	Kota Palopo	50 orng	15,000,000	DAU			15,000,000	Disdag
3	30	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan Kinerja yang dievaluasi (SKP)	Kota Palopo	52 SKP	9,000,000	DAU			10,100,000	Disdag
3	30	1	2.05	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang Mengikuti Bimbingan Tekhnis	Kota Palopo	1 orang	7,500,000	DAU			7,500,000	Disdag
3	30	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Kota Palopo		156,150,000	DAU			177,500,000	Disdag
3	30	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Intalasi Listrik yang diadakan	Kota Palopo	20 buah	1,350,000	DAU			1,500,000	Disdag
3	30	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang dibiayai	Kota Palopo	60 exemplar	4,800,000	DAU			6,000,000	Disdag
3	30	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SPPD yang dilaksanakan	Kota Palopo	60 Kali	150,000,000	DAU			170,000,000	Disdag
3	30	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Kota Palopo		32,500,000	DAU			60,000,000	Disdag
3	30	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan yang diadakan	Kota Palopo	1 Unit	20,000,000	DAU			30,000,000	Disdag
3	30	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jenis dan Jumlah Mebel yang diadakan	Kota Palopo	1 Unit	5,000,000	DAU			15,000,000	Disdag

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB	
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
3	30	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis dan Jumlah Peralatan Mesin yang diadakan	Kota Palopo	1 Unit	7,500,000	DAU			15,000,000	Disdag
3	30	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kota Palopo		260,500,000	DAU			276,450,000	Disdag
3	30	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk, Surat Keluar, ATK, Cetak dan Penggandaan	Kota Palopo	5400 Surat/Jenis/buah	45,000,000	DAU			48,000,000	Disdag
3	30	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekenin telepon, Air, Listrik dan Internet, Infotorial yang dibiayai	Kota Palopo	23 Rekening	155,000,000	DAU			160,000,000	Disdag
3	30	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Luas Bangunan Kantor yang dibersihkan	Kota Palopo	1500 m2	11,500,000	DAU			13,450,000	Disdag
3	30	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Layanan Kantor yang dilaksanakan	Kota Palopo	5 Layanan	49,000,000	DAU			55,000,000	Disdag
3	30	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kota Palopo		45,540,000	DAU			55,000,000	Disdag
3	30	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas dan Jabatan yang Pemeliharaan dan Pajaknya dibiayai	Kota Palopo	10 Unit	27,500,000	DAU			28,000,000	Disdag
3	30	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Pemeliharaan dan Pajaknya dibiayai	Kota Palopo	3 Unit	8,500,000	DAU			13,000,000	Disdag
3	30	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dibiayai	Kota Palopo	22 Unit	3,700,000	DAU			4,000,000	Disdag
3	30	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah dan Luas Gedung Kantor yang dipelihara	Kota Palopo	500 m2	5,840,000	DAU			10,000,000	Disdag
3	30	3			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Kota Palopo		875,000,000	DAU			898,000,000	Disdag
3	30	3	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Kota Palopo		35,000,000	DAU			55,000,000	Disdag
3	30	3	2.01	1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Perdagangan yang diadakan	Kota Palopo	15 buah	35,000,000	DAU			55,000,000	Disdag
3	30	3	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		Kota Palopo		840,000,000	DAU			843,000,000	Disdag
3	30	3	2.02	1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pedagang yang Memanfaatkan Sarana Perdagangan dengan Baik	Kota Palopo	1318 Pedagang	840,000,000	DAU			843,000,000	Disdag
							Kota Palopo			DAU				Disdag
3	30	4			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Kota Palopo		402,000,000	DAU			419,000,000	Disdag
3	30	4	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang		Kota Palopo		298,000,000	DAU			303,000,000	Disdag

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB	
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
					Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota									
3	30	4	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Rumah Pangan yang dikelola	Kota Palopo	3 Unit	237,000,000	DAU			240,000,000	Disdag
							Kota Palopo			DAU				Disdag
							Kota Palopo			DAU				Disdag
3	30	4	2.01	3	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Pelaksanaan Pengawasan Distributor	Kota Palopo	12 kali	61,000,000	DAU			63,000,000	Disdag
3	30	4	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota		Kota Palopo		104,000,000	DAU			116,000,000	Disdag
3	30	4	2.02	2	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Pelaksanaan Pemantauan Informasi Harga	Kota Palopo	12 Kali	41,000,000	DAU			43,000,000	Disdag
3	30	4	2.02	3	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Pelaksanaan Pasar Murah dan Reguler	Kota Palopo	9 Lokasi	63,000,000	DAU			73,000,000	Disdag
3	30	6			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Kota Palopo		66,000,000	DAU			67,500,000	Disdag
3	30	6	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		Kota Palopo		66,000,000	DAU			67,500,000	Disdag
3	30	6	2.01	1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Pelasanaan Tera dan Tera Ulang	Kota Palopo	6 kali	66,000,000	DAU			67,500,000	Disdag
3	30	7			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		Kota Palopo		33,000,000	DAU			40,000,000	Disdag
3	30	7	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Kota Palopo		33,000,000	DAU			40,000,000	Disdag
3	30	7	2.01	3	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Promosi Dagang yang diikuti/Jenis Pemasaran yang dilaksanakan	Kota Palopo	2 Kali	33,000,000	DAU			40,000,000	Disdag
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				2,516,739,100.00				2,579,657,578.00	
					DINAS PERINDUSTRIAN				2,516,739,100.00				2,579,657,578.00	
3	31	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Urusan Pemerintah Daerah (%)	Kota Palopo		2,345,195,100	DAU			2,403,824,978	Dis perindustrian

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB	
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
3	3	1	2.0	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun Tepat Waktu (dokumen)	Kota Palopo		3,100,000	DAU			3,650,000	Dis perindustrian
3	3	1	2.0	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra, renja, RKA dan DPA Perangkat Daerah	Kota Palopo	7 dokumen	2,000,000	DAU			2,500,000	Dis perindustrian
3	3	1	2.0	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan, evaluasi dan kinerja yang disusu	Kota Palopo	1 laporan	1,100,000	DAU			1,150,000	Dis perindustrian
3	3	1	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Kota Palopo		1,834,195,100	DAU			1,830,424,978	Dis perindustrian
3	3	1	2.0	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai	Kota Palopo	25 orang	1,768,520,100	DAU			1,763,274,978	Dis perindustrian
							Kota Palopo			DAU				Dis perindustrian
3	3	1	2.0	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan Pertanggungjawaban yang diverifikasi	Kota Palopo	2 laporan	62,675,000	DAU			63,125,000	Dis perindustrian
							Kota Palopo			DAU				Dis perindustrian
3	3	1	2.0	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan bulanan, Semesteran, dan tahunan yang disusun	Kota Palopo	18 Laporan	3,000,000	DAU			4,025,000	Dis perindustrian
							Kota Palopo			DAU				Dis perindustrian
3	3	1	2.0		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Kota Palopo		9,775,000	DAU			11,250,000	Dis perindustrian
3	3	1	2.0	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah aset yang ditata kelolakan	Kota Palopo	2 Orang	9,775,000	DAU			11,250,000	Dis perindustrian
							Kota Palopo			DAU				Dis perindustrian
3	3	1	2.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Kota Palopo		99,500,000	DAU			99,500,000	Dis perindustrian
3	3	1	2.0	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pakaian dinas yang diadakan	Kota Palopo	25 orang	24,500,000	DAU			24,500,000	Dis perindustrian
3	3	1	2.0	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN Yang Mengikuti Soisalisasi	Kota Palopo	4 Orang	30,000,000	DAU			30,000,000	Dis perindustrian

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB	
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
3	3	1	2.0	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis	Kota Palopo	5 Orang	45,000,000	DAU			45,000,000	Dis perindustrian
3	3	1	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Kota Palopo		160,250,000	DAU			162,000,000	Dis perindustrian
3	3	1	2.0	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang diadakan	Kota Palopo	10 Buah	2,500,000	DAU			2,500,000	Dis perindustrian
3	3	1	2.0	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah langganan koran/majalah	Kota Palopo	5 eksamplar	5,750,000	DAU			6,000,000	Dis perindustrian
3	3	1	2.0	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SPPD yang dilaksanakan	Kota Palopo	40 SPPD	152,000,000	DAU			153,500,000	Dis perindustrian
3	3	1	2.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Kota Palopo		55,000,000	DAU			96,000,000	Dis perindustrian
3	3	1	2.0	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jenis dan jumlah kendaraan dinas jabatan yang diadakan	Kota Palopo	1 unit	20,000,000	DAU			60,000,000	Dis perindustrian
3	3	1	2.0	5	Pengadaan Mebel	Jenis dan jumlah mebel yang diadakan	Kota Palopo	50 unit	10,000,000	DAU			15,000,000	Dis perindustrian
3	3	1	2.0	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis dan jumlah peralatan dan mesin yang diadakan	Kota Palopo	4 unit	25,000,000	DAU			21,000,000	Dis perindustrian
3	3	1	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kota Palopo		137,250,000	DAU			147,000,000	Dis perindustrian
3	3	1	2.0	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang masuk dan jumlah surat yang keluar, ATK, Cetak dan penggandaan	Kota Palopo	2000 surat	17,250,000	DAU			21,000,000	Dis perindustrian
3	3	1	2.0	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening Air, listrik dan internet yang dibiayai	Kota Palopo	8 rek	65,000,000	DAU			70,000,000	Dis perindustrian
3	3	1	2.0	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan kantor yang dilaksanakan	Kota Palopo	6 orang	55,000,000	DAU			56,000,000	Dis perindustrian
3	3	1	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kota Palopo		46,125,000	DAU			54,000,000	Dis perindustrian
3	3	1	2.0	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	Kota Palopo	1 unit	33,500,000	DAU			40,000,000	Dis perindustrian
3	3	1	2.0	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	Kota Palopo	6 unit	1,725,000	DAU			2,500,000	Dis perindustrian

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
					Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
3	31	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan da mesin lainnya yang dibiayai	Kota Palopo	14 unit	4,000,000	DAU			4,000,000	Dis perindustrian
3	31	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah dan luas gedung kantor yang dipelihara	Kota Palopo	500 M2	6,900,000	DAU			7,500,000	Dis perindustrian
3	31	2			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Kota Palopo		116,194,000	DAU			119,098,850	Dis perindustrian
3	31	2	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Kota Palopo		116,194,000	DAU			119,098,850	Dis perindustrian
3	31	2	2.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan TOT dan aparatur yang mengikuti pelatihan peningkatan kuantitas produksi serta pelatihan manajemn standarisasi sistem	Kota Palopo	50 IKM	35,865,000	DAU			37,000,000	Dis perindustrian
3	31	2	2.01	4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	JJumlah IKM yang mendapat bantuan sarana dan prasana	Kota Palopo	15 IKM	34,965,000	DAU			35,300,000	Dis perindustrian
3	31	2	2.01	5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah pelatihan pengembangan bagi IKM pangan dan jumlah pelatihan pengembangan bagi IKM kerajinan	Kota Palopo	100 IKM	45,364,000	DAU			46,798,850	Dis perindustrian
3	31	3			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA		Kota Palopo		41,000,000	DAU			42,025,000	Dis perindustrian
3	31	3	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota		Kota Palopo		41,000,000	DAU			42,025,000	Dis perindustrian
3	31	3	2.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah IKM Pangan yang difasilitasi Sertifikat Produk	Kota Palopo	5 IKM	25,000,000	DAU			27,000,000	Dis perindustrian
3	31	3	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah IKM yang difasilitasi Akta Pendirian dan Aspek Legal	Kota Palopo	15 IKM	16,000,000	DAU			15,025,000	Dis perindustrian

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB	
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
3	31	4			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		Kota Palopo		14,350,000	DAU			14,708,750	Dis perindustrian
3	31	4	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		Kota Palopo		14,350,000	DAU			14,708,750	Dis perindustrian
3	31	4	2.01	1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah sentra industri yang didata	Kota Palopo	3 sentra	650,000	DAU			708,750	Dis perindustrian
3	31	4	2.01	2	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	jumlah IKM yang didata yang dipublikasikan	Kota Palopo	1957 IKM	13,700,000	DAU			14,000,000	Dis perindustrian
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				2,173,375,600.00				2,210,728,441	Dis Transmigrasi
					DINAS TRANSMIGRASI				2,173,375,600				2,210,728,441	Dis Transmigrasi
3	32	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Kota Palopo		2,077,333,100	DAU			2,112,284,878	Dis Transmigrasi
3	32	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kota Palopo		1,151,100	DAU			1,700,000	Dis Transmigrasi
3	32	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra, Renja, RKA dan DPA Perangkat Daerah	Kota Palopo	11 dokumen	1,151,100	DAU			1,700,000	Dis Transmigrasi
3	32	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Kota Palopo		1,628,082,000	DAU			1,651,784,878	Dis Transmigrasi
3	32	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	Kota Palopo	20 orang	1,583,082,000	DAU			1,595,784,878	Dis Transmigrasi
3	32	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan Pertanggungjawaban yang di verifikasi	Kota Palopo	19 Laporan	45,000,000	DAU			56,000,000	Dis Transmigrasi
3	32	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Kota Palopo		253,000,000	DAU			253,800,000	Dis Transmigrasi
3	32	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang dibiayai	Kota Palopo	4 Eksemplar	3,000,000	DAU			3,800,000	Dis Transmigrasi
3	32	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	Kota Palopo	50 kali/org	250,000,000	DAU			250,000,000	Dis Transmigrasi

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB	
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
3	32	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Kota Palopo		67,000,000	DAU			91,000,000	Dis Transmigrasi
3	32	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jenis dan jumlah kendaraan dinas operasional yang diadakan	Kota Palopo	2 unit	50,000,000	DAU			70,000,000	Dis Transmigrasi
3	32	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis dan jumlah peralatan dan mesin yang disediakan	Kota Palopo	4 unit	17,000,000	DAU			21,000,000	Dis Transmigrasi
3	32	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kota Palopo		91,000,000	DAU			77,000,000	Dis Transmigrasi
3	32	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk, surat keluar, ATK, cetak dan penggandaan	Kota Palopo	700 surat	10,500,000	DAU			0	Dis Transmigrasi
3	32	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening air, listrik dan internet yang dibiayai	Kota Palopo	36 rek	22,000,000	DAU			27,000,000	Dis Transmigrasi
3	32	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan kantor yang dilaksanakan	Kota Palopo	12 layanan	58,500,000	DAU			50,000,000	Dis Transmigrasi
3	32	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kota Palopo		37,100,000	DAU			37,000,000	Dis Transmigrasi
3	32	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan pajaknya dibiayai	Kota Palopo	5 unit	27,100,000	DAU			27,000,000	Dis Transmigrasi
3	32	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	Kota Palopo	12 Unit	10,000,000	DAU			10,000,000	Dis Transmigrasi
							Kota Palopo			DAU				Dis Transmigrasi
3	32	3			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI		Kota Palopo		96,042,500	DAU			98,443,563	Dis Transmigrasi
3	32	3	2.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Kota Palopo		96,042,500	DAU			98,443,563	Dis Transmigrasi
3	32	3	2.01	2	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah data peserta transmigrasi lokal dan non lokal	Kota Palopo	300 KK	29,042,500	DAU			31,443,563	Dis Transmigrasi
3	32	3	2.01	3	Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	Jumlah data kepemilikan tanah transmigrasi	Kota Palopo	300 KK	67,000,000	DAU			67,000,000	Dis Transmigrasi
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				78,088,957,681				84,005,284,608	
					SEKRETARIAT DAERAH				51.092.652.631				56.369.968.946	

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB	
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SPPD yang dilaksanakan	Kota Palopo	300 SPPD	1,118,386,950	DAU			1,260,100,000	Setda
4	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Kota Palopo		611,500,000	DAU			805,105,000	Setda
4	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jenis dan jumlah kendaraan dinas jabatan yang diadakan	Kota Palopo	2 Unit	55,000,000	DAU			65,000,000	Setda
4	1	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas Operasional atau lapangan yang diadakan	Kota Palopo	3 Unit	171,500,000	DAU			180,105,000	Setda
4	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	Kota Palopo	18 Unit	75,000,000	DAU			180,000,000	Setda
4	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan	Kota Palopo	5 unit	125,000,000	DAU			130,000,000	Setda
4	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diadakan	Kota Palopo	3 buah	185,000,000	DAU			250,000,000	Setda
4	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kota Palopo		5,507,950,300	DAU			5,526,413,000	Setda
4	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk, Surat Keluar, atk, cetak dan pengadaan	Kota Palopo	3000 Surat	215,000,000	DAU			220,000,000	Setda
4	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening air, listrik dan internet yang dibiayai	Kota Palopo	40 rekening	1,814,794,710	DAU			1,820,000,000	Setda
4	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Palopo	3 jasa	514,698,422	DAU			520,845,000	Setda
4	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Layanan kantor yang dilaksanakan	Kota Palopo	50 orang	2,963,457,168	DAU			2,965,568,000	Setda
4	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kota Palopo		1,702,872,000	DAU			1,931,172,000	Setda
4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	Kota Palopo	20 Unit	490,000,000	DAU			600,000,000	Setda
4	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	Kota Palopo	20 Unit	400,000,000	DAU			510,000,000	Setda
4	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dibiayai	Kota Palopo	500 buah	142,000,000	DAU			150,300,000	Setda
4	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah dan luas gedung kantor yang di pelihara	Kota Palopo	5 Unit	670,872,000	DAU			670,872,000	Setda
4	1	1	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Kota Palopo		2,506,329,000	DAU			2,530,191,300	Setda
4	1	1	2.11	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah gaji dan tunjangan KDH dan WKDH yang disiapkan	Kota Palopo	24 kali	181,329,000	DAU			190,142,300	Setda

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB	
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
4	1	1	2.1 1	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah pakaian dinas kepala daerah dan wakil kepala daerah yang disiapkan	Kota Palopo	20 stell	155,000,000	DAU			160,049,000	Setda
4	1	1	2.1 1	3	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pemeriksaan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah yang disiapkan	Kota Palopo	24 kali	320,000,000	DAU			330,000,000	Setda
4	1	1	2.1 1	4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Penyediaan Oprasional KDH dan WKDH	Kota Palopo	24 Kali	1,850,000,000	DAU			1,850,000,000	Setda
4	1	1	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		Kota Palopo		1,339,905,000	DAU			1,347,833,050	Setda
4	1	1	2.1 2	1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang disiapkan	Kota Palopo	12 Kali	675,890,000	DAU			680,297,900	Setda
4	1	1	2.1 2	2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Kebutuhan rumahtangga wakil kepala daerah yang disiapkan	Kota Palopo	12 kali	485,615,000	DAU			487,371,150	Setda
4	1	1	2.1 2	3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat daerah yang disiapkan	Kota Palopo	12 kali	178,400,000	DAU			180,164,000	Setda
4	1	1	2.13		Penataan Organisasi		Kota Palopo		696,891,000	DAU			705,576,220	Setda
4	1	1	2.1 3	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Perangkat Daerah (PD) yang di tata kelembagaan dan analisis jabatan	Kota Palopo	49 Perangkat Daerah	197,148,000	DAU			199,099,500	Setda
4	1	1	2.1 3	2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Perangkat Daerah (PD) di Fasilitasi dalam pelaksanaan Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kota Palopo	49 Perangkat Daerah	159,911,000	DAU			162,310,150	Setda
4	1	1	2.1 3	3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Implemetasi Reformasi Birokrasi (RB)	Kota Palopo	49 Dokumen	223,875,000	DAU			225,980,000	Setda
4	1	1	2.1 3	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Lakip Perangkat Daerah	Kota Palopo	49 Dokumen	115,957,000	DAU			118,186,570	Setda
4	1	1	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		Kota Palopo		1,730,110,000	DAU			1,763,151,700	Setda
4	1	1	2.1 4	1	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Kota Palopo	1500 Laporan	515,000,000	DAU			525,950,000	Setda
4	1	1	2.1 4	2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Naskah Pidato/ Sambutan yang disusun	Kota Palopo	1500 Naskah	540,000,000	DAU			557,000,000	Setda
4	1	1	2.1 4	3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Dokumentasi Walikota dan Wakil walikota yang diliput	Kota Palopo	1500 Laporan	675,110,000	DAU			680,201,700	Setda
4	1	2			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		Kota Palopo		18,735,959,513	DAU			21,146,055,500	Setda
4	1	2	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan		Kota Palopo		8,207,550,813	DAU			8,370,372,400	Setda
4	1	2	2.0 1	1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Laporan/Dokumen Kegiatan Penataan Administrasi	Kota Palopo	9 Laporan	198,770,500	DAU			270,415,900	Setda

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB	
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
						Pemerintahan (Laporan Hasil kegiatan penataan Administrasi Pemerintahan)								
4	1	2	2.01	2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah laporan Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kota Palopo	54 Laporan	7,769,152,500	DAU			7,769,152,500	Setda
4	1	2	2.01	3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kota Palopo	5 Laporan	239,627,813	DAU			330,804,000	Setda
4	1	2	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		Kota Palopo		9,028,440,000	DAU			10,555,084,675	Setda
4	1	2	2.02	1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual yang dilaksanakan	Kota Palopo	3 Fasilitasi	2,524,350,200	DAU			2,755,863,950	Setda
4	1	2	2.02	2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Lembaga Keagamaan Terkait Kesejahteraan Sosial	Kota Palopo	6 Lembaga	940,452,800	DAU			1,179,536,725	Setda
4	1	2	2.02	3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Petugas Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kota Palopo	1454 Orang	5,563,637,000	DAU			6,619,684,000	Setda
4	1	2	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		Kota Palopo		1,203,050,000	DAU			1,830,203,625	Setda
4	1	2	2.03	1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Penyusunan Produk Hukum	Kota Palopo	427 Produk Hukum	437,400,000	DAU			559,400,000	Setda
4	1	2	2.03	2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Penanganan Perkara Hukum dan Bantuan Hukum	Kota Palopo	3 Perkara	672,997,000	DAU			1,057,524,125	Setda
4	1	2	2.03	3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Perda, Perwal dan Keputusan Walikota yang di dokumentasikan dan dikelola melalui Pengelolaan Informasi Hukum	Kota Palopo	427 Produk Hukum	92,653,000	DAU			213,279,500	Setda
4	1	2	2.04		Fasilitasi Kerjasama Daerah		Kota Palopo		296,918,700	DAU			390,394,800	Setda
4	1	2	2.04	1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Naskah Kerja Sama Antar Daerah Dalam Negeri	Kota Palopo	25 Dokumen	200,158,200	DAU			220,044,800	Setda
4	1	2	2.04	2	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Naskah Kerja Sama Antar Daerah Luar Negeri	Kota Palopo	1 Laporan	20,996,000	DAU			30,250,000	Setda
4	1	2	2.04	3	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, monitoring dan evaluasi Kerja sama	Kota Palopo	8 Dokumen	75,764,500	DAU			140,100,000	Setda
4	1	3			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		Kota Palopo		1,306,531,333	DAU			2,939,194,616	Setda
4	1	3	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		Kota Palopo		357,499,363	DAU			802,506,116	Setda
4	1	3	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kota Palopo	4 Laporan	78,293,400	DAU			268,757,149	Setda

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB	
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
4	1	3	2.01	2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kota Palopo	4 Laporan	159,308,350	DAU			283,494,400	Setda
4	1	3	2.01	3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Laporan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Kota Palopo	4 Laporan	119,897,613	DAU			250,254,567	Setda
4	1	3	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		Kota Palopo		231,120,000	DAU			539,796,600	Setda
4	1	3	2.02	1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Laporan Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan	Kota Palopo	16 Laporan	93,324,000	DAU			174,270,300	Setda
4	1	3	2.02	2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Kota Palopo	1 Laporan	22,796,000	DAU			100,191,900	Setda
4	1	3	2.02	3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Pelaksanaan monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	Kota Palopo	8 Laporan	115,000,000	DAU			265,334,400	Setda
4	1	3	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Kota Palopo		460,429,300	DAU			776,860,100	Setda
4	1	3	2.03	1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen (Paket) Penyelenggaraan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Palopo	70 Paket	199,926,800	DAU			321,295,800	Setda
4	1	3	2.03	2	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Paket Sistem Informasi E-procument	Kota Palopo	4 Laporan	199,716,500	DAU			297,590,800	Setda
4	1	3	2.03	3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Evaluasi Monitoring Pengendalian Barang dan Jasa	Kota Palopo	9 Dokumen	60,786,000	DAU			157,973,500	Setda
4	1	3	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		Kota Palopo		257,482,670	DAU			820,031,800	Setda
4	1	3	2.04	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Kota Palopo	1 Laporan	98,128,880	DAU			248,053,700	Setda
4	1	3	2.04	2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Kota Palopo	1 Laporan	80,615,000	DAU			269,387,300	Setda
4	1	3	2.04	3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Kota Palopo	1 Dokumen	78,738,790	DAU			302,590,800	Setda
					SEKRETARIAT DPRD				26,996,305,050				27,635,315,662	
					SEKRETARIAT DPRD				26,996,305,050				27,635,315,662	
4	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintah Daerah (%)	Kota Palopo		23,947,815,990	DAU			24,546,511,390	Setwan
4	2	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun Tepat Waktu (dokumen)	Kota Palopo		15,000,000	DAU			25,000,000	Setwan
4	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA dan DPA Perangkat Daerah	Kota Palopo	4 Dokumen	10,000,000	DAU			15,000,000	Setwan

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB	
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
4	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palopo	3 Laporan	5,000,000	DAU			10,000,000	Setwan
4	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Kota Palopo		3,412,506,930	DAU			3,435,999,430	Setwan
4	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Yang Mendapat Gaji dan Tunjangan	Kota Palopo	45 Orang	3,277,299,430	DAU			3,287,299,430	Setwan
4	2	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Yang Diverifikasi	Kota Palopo	300 Laporan	127,707,500	DAU			138,700,000	Setwan
4	2	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Kota Palopo	3 Laporan	7,500,000	DAU			10,000,000	Setwan
4	2	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Kota Palopo		12,000,000	DAU			12,000,000	Setwan
4	2	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Jasa Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kota Palopo	1.895 Unit	12,000,000	DAU			12,000,000	Setwan
4	2	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Kota Palopo		261,374,000	DAU			303,874,000	Setwan
4	2	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Yang Diadakan	Kota Palopo	35 Pasang	0	DAU			17,500,000	Setwan
4	2	1	2.05	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN Yang Mengikuti Bimbingan Teknis	Kota Palopo	18 Orang	261,374,000	DAU			286,374,000	Setwan
4	2	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Kota Palopo		774,174,000	DAU			921,674,000	Setwan
4	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang Diadakan	Kota Palopo	20 Buah	2,500,000	DAU			10,000,000	Setwan
4	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Kota Palopo	2 Unit	15,000,000	DAU			25,000,000	Setwan
4	2	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Yang Dibiayai	Kota Palopo	24 Eksemplar	231,550,000	DAU			251,550,000	Setwan
4	2	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu Yang Difasilitasi	Kota Palopo	100 Orang	10,000,000	DAU			20,000,000	Setwan
4	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SPPD Yang Dilaksanakan	Kota Palopo	61 SPPD	515,124,000	DAU			615,124,000	Setwan
4	2	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Kota Palopo		250,000,000	DAU			300,000,000	Setwan
4	2	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jenis dan Jumlah Mebel Yang Diadakan	Kota Palopo	10 Buah	0	DAU			50,000,000	Setwan
4	2	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis dan Jumlah Peralatan Mesin Yang Diadakan	Kota Palopo	30 Unit	250,000,000	DAU			250,000,000	Setwan
4	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kota Palopo		1,322,431,060	DAU			1,387,633,960	Setwan
4	2	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk, Surat Keluar, ATK, Cetak dan Penggandaan	Kota Palopo	2500 Surat	125,000,000	DAU			135,000,500	Setwan

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB	
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
4	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening telepon, Air, Listrik Dan Internet Yang Dibiayai	Kota Palopo	6 Rekening	293,600,320	DAU			318,600,320	Setwan
4	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Kantor Yang Dilaksanakan	Kota Palopo	5 Layanan	903,830,740	DAU			934,033,140	Setwan
4	2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kota Palopo		258,600,000	DAU			268,600,000	Setwan
4	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas dan Jabatan Yang Pemeliharaan dan Pajaknya Dibiayai	Kota Palopo	4 Unit	142,600,000	DAU			142,600,000	Setwan
4	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Yang Pemeliharaan dan Pajaknya Dibiayai	Kota Palopo	29 Unit	66,000,000	DAU			66,000,000	Setwan
4	2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dibiayai	Kota Palopo	30 Buah	10,000,000	DAU			20,000,000	Setwan
4	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas Gedung Kantor Yang Dipelihara	Kota Palopo	1500 M2	40,000,000	DAU			40,000,000	Setwan
4	2	1	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Kota Palopo		10,325,954,000	DAU			10,325,954,000	Setwan
4	2	1	2.15	1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Dibayarkan	Kota Palopo	25 Orang	10,050,954,000	DAU			10,050,954,000	Setwan
4	2	1	2.15	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Pakaian Anggota DPRD yang diadakan	Kota Palopo	50 Pasang	225,000,000	DAU			225,000,000	Setwan
4	2	1	2.15	3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Anggota Dewan yang di Medical Check Up	Kota Palopo	25 Orang	50,000,000	DAU			50,000,000	Setwan
4	2	1	2.16		Layanan Administrasi DPRD		Kota Palopo		7,315,776,000	DAU			7,565,776,000	Setwan
4	2	1	2.16	3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Koordinasi dan konsultasi yang Difasilitasi	Kota Palopo	672 SPPD	6,049,896,000	DAU			6,149,896,000	Setwan
4	2	1	2.16	4	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Kota Palopo	60 Item	1,265,880,000	DAU			1,415,880,000	Setwan
4	2	2			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		Kota Palopo		3,048,489,060	DAU			3,088,804,272	Setwan
4	2	2	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		Kota Palopo		961,276,000	DAU			962,066,272	Setwan
4	2	2	2.01	1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Perda Yang Disusun	Kota Palopo	5 Ranperda	10,000,000	DAU			10,000,000	Setwan
4	2	2	2.01	2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Perda Yang Dihasilkan	Kota Palopo	20 Perda	921,276,000	DAU			921,566,272	Setwan
4	2	2	2.01	3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Regulasi Yang Dihasilkan	Kota Palopo	5 Regulasi	10,000,000	DAU			10,500,000	Setwan
4	2	2	2.01	4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Yang Dihasilkan	Kota Palopo	5 Dokumen	10,000,000	DAU			10,000,000	Setwan

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB	
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
4	2	2	2.01	5	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Tata Tertib DPRD Yang Disusun	Kota Palopo	5 Dokumen	10,000,000	DAU			10,000,000	Setwan
4	2	2	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran		Kota Palopo		60,000,000	DAU			62,500,000	Setwan
4	2	2	2.02	1	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Pembahasan KUA dan PPAS	Kota Palopo	2 Dokumen	10,000,000	DAU			10,000,000	Setwan
4	2	2	2.02	2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Perubahan KUA dan PPAS	Kota Palopo	2 Dokumen	10,000,000	DAU			10,000,000	Setwan
4	2	2	2.02	3	Pembahasan APBD	Jumlah APBD Yang Dibahas	Kota Palopo	2 Dokumen	10,000,000	DAU			10,000,000	Setwan
4	2	2	2.02	4	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah APBD Perubahan Yang Dibahas	Kota Palopo	2 Dokumen	10,000,000	DAU			12,500,000	Setwan
4	2	2	2.02	5	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Laporan Semester	Kota Palopo	2 Dokumen	10,000,000	DAU			10,000,000	Setwan
4	2	2	2.02	6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Pertanggungjawaban APBD	Kota Palopo	1 Dokumen	10,000,000	DAU			10,000,000	Setwan
4	2	2	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD		Kota Palopo		1,320,921,060	DAU			1,326,738,000	Setwan
4	2	2	2.04	2	Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah Bimbingan Teknis DPRD yang Dilaksanakan	Kota Palopo	25 Orang	976,921,060	DAU			982,738,000	Setwan
4	2	2	2.04	3	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan Yang Dilaksanakan	Kota Palopo	20 Publikasi	190,000,000	DAU			190,000,000	Setwan
4	2	2	2.04	4	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Kota Palopo	3 Orang	144,000,000	DAU			144,000,000	Setwan
4	2	2	2.04	7	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Program Kerja DPRD	Kota Palopo	2 Dokumen	10,000,000	DAU			10,000,000	Setwan
4	2	2	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Kota Palopo		575,520,000	DAU			580,000,000	Setwan
4	2	2	2.05	1	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Kota Palopo	4 Kunjungan	20,000,000	DAU			20,000,000	Setwan
4	2	2	2.05	2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Kota Palopo	1 Laporan	10,000,000	DAU			10,000,000	Setwan
4	2	2	2.05	3	Pelaksanaan Reses	Jumlah Kegiatan Reses	Kota Palopo	3 Reses	545,520,000	DAU			550,000,000	Setwan
4	2	2	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD		Kota Palopo		130,772,000	DAU			157,500,000	Setwan
4	2	2	2.08	1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Perjalanan Dinas Pimpinan DPRD	Kota Palopo	3 Kali	10,000,000	DAU			20,000,000	Setwan
4	2	2	2.08	2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Kinerja DPRD	Kota Palopo	1 Laporan	10,000,000	DAU			10,000,000	Setwan
4	2	2	2.08	3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Fasilitasi Badan Musyawarah	Kota Palopo	25 Fasilitasi	10,000,000	DAU			12,500,000	Setwan
4	2	2	2.08	4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD Terlaksana	Kota Palopo	4 Kali	100,772,000	DAU			115,000,000	Setwan
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				52,791,740,265				58,901,918,074	
					PERENCANAAN				6,022,920,484.00				10,627,525,475.00	

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB	
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				6,022,920,484				10,627,525,475	
5	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Kota palopo		4,231,288,125	DAU			5,095,905,958	Bappeda
5	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kota palopo		13,000,000	DAU			39,000,000	Bappeda
5	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA dan DPA	Kota palopo	6 Dokumen	9,000,000	DAU			34,800,000	Bappeda
5	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota palopo	1 Laporan	4,000,000	DAU			4,200,000	Bappeda
5	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Kota palopo		3,139,086,125	DAU			3,221,764,958	Bappeda
5	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Gaji dan Tunjangan	Kota palopo	34 Orang	3,080,436,125	DAU			3,161,414,958	Bappeda
5	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan Pertanggungjawaban yang Diverifikasi	Kota palopo	1 Laporan	53,300,000	DAU			55,000,000	Bappeda
5	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan Tahunan yang Disusun	Kota palopo	14 Laporan	5,350,000	DAU			5,350,000	Bappeda
5	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Kota palopo		72,000,000	DAU			338,500,000	Bappeda
5	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atributnya yang diadakan	Kota palopo	0 Pasang	0	DAU			38,500,000	Bappeda
5	1	1	2.05	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang Mengikuti Bimbingan Teknis	Kota palopo	7 Orang	72,000,000	DAU			300,000,000	Bappeda
5	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Kota palopo		433,702,000	DAU			474,501,000	Bappeda
5	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang Diadakan	Kota palopo	50 Buah	4,700,000	DAU			5,000,000	Bappeda
5	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Alat Rumah Tangga yang Diadakan	Kota palopo	25 Buah	6,300,000	DAU			6,500,000	Bappeda
5	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang Dibiayai	Kota palopo	60 Exp	50,000,000	DAU			51,000,000	Bappeda
5	1	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan Material yang Diadakan	Kota palopo	20 Jenis	15,500,000	DAU			16,000,000	Bappeda
5	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SPPD yang Dilaksanakan	Kota palopo	45 SPPD	357,202,000	DAU			396,001,000	Bappeda
5	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Kota palopo		100,000,000	DAU			500,000,000	Bappeda
5	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas operasional yang disediakan	Kota palopo	0 Unit	0	DAU			300,000,000	Bappeda
5	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang disediakan	Kota palopo	13 Unit	100,000,000	DAU			200,000,000	Bappeda
5	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kota palopo		440,000,000	DAU			487,840,000	Bappeda

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB	
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
5	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk, Surat Keluar, ATK, Cetak dan Penggandaan	Kota palopo	1350 Surat	35,500,000	DAU			36,000,000	Bappeda
5	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Air, Listrik dan Internet yang Dibiayai	Kota palopo	12 Rekening	155,000,000	DAU			197,140,000	Bappeda
5	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang Dapat Pemeliharaan	Kota palopo	35 Buah	9,500,000	DAU			9,700,000	Bappeda
5	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Layanan Kantor yang Dilaksanakan	Kota palopo	9 Layanan	240,000,000	DAU			245,000,000	Bappeda
5	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kota palopo		33,500,000	DAU			34,300,000	Bappeda
5	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang Mendapat Pemeliharaan	Kota palopo	1 Unit	27,500,000	DAU			28,000,000	Bappeda
5	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Pemeliharaan dan Pajaknya Dibiayai	Kota palopo	16 Unit	6,000,000	DAU			6,300,000	Bappeda
5	1	2			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Kota palopo		887,693,921	DAU			3,056,619,517	Bappeda
5	1	2	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Kota palopo		406,694,921	DAU			1,437,425,000	Bappeda
5	1	2	2.01	3	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Kesepakatan Terhadap Rancangan Awal RKPD	Kota palopo	1 Berita Acara	32,500,000	DAU			195,875,000	Bappeda
5	1	2	2.01	4	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah berita acara kesepakatan hasil Forum SKPD	Kota palopo	1 Berita Acara	35,500,000	DAU			235,800,000	Bappeda
5	1	2	2.01	5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah berita acara kesepakatan hasil Musrenbang	Kota palopo	1 Berita Acara	120,000,000	DAU			395,000,000	Bappeda
5	1	2	2.01	7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan yang difasilitasi	Kota palopo	2 Dokumen	218,694,921	DAU			610,750,000	Bappeda
5	1	2	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Kota palopo		120,499,000	DAU			655,750,000	Bappeda
5	1	2	2.02	1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Platform SIPD yang Dikelola	Kota palopo	1 Sistem	93,249,000	DAU			395,750,000	Bappeda
5	1	2	2.02	3	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen profil pembangunan yang disusun	Kota palopo	1 Dokumen	27,250,000	DAU			260,000,000	Bappeda
5	1	2	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Kota palopo		360,500,000	DAU			963,444,517	Bappeda

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB	
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
5	1	2	2.03	1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	laporan pengendalian dan evaluasi Renja, Renstra, RKPD, dan RPJMD yang dikelola	Kota palopo	8 Laporan	185,000,000	DAU			535,619,517	Bappeda
5	1	2	2.03	3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan APBD, APBN dan DAK yang Dikelola	Kota palopo	2 Laporan	175,500,000	DAU			427,825,000	Bappeda
5	1	3			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Kota palopo		903,938,438	DAU			2,475,000,000	Bappeda
5	1	3	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Kota palopo		280,000,000	DAU			728,975,000	Bappeda
5	1	3	2.01	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Bidang Pemerintahan	Kota palopo	1 Laporan	70,000,000	DAU			205,675,000	Bappeda
5	1	3	2.01	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Bidang Pembangunan Manusia	Kota palopo	4 Laporan	90,000,000	DAU			237,550,000	Bappeda
5	1	3	2.01	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Daerah Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah dan Kota Sehat	Kota palopo	2 Laporan	120,000,000	DAU			285,750,000	Bappeda
5	1	3	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Kota palopo		290,000,000	DAU			800,750,000	Bappeda
5	1	3	2.02	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Asistensi Penyusunan Dokumen	Kota palopo	1 Laporan	75,000,000	DAU			245,750,000	Bappeda
5	1	3	2.02	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	Kota palopo	1 Laporan	85,000,000	DAU			257,500,000	Bappeda
5	1	3	2.02	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kegiatan	Kota palopo	1 Laporan	130,000,000	DAU			297,500,000	Bappeda
5	1	3	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah		Kota palopo		333,938,438	DAU			945,275,000	Bappeda
5	1	3	2.03	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Asistensi Penyusunan Dokumen	Kota palopo	1 Laporan	30,009,438	DAU			0	Bappeda
5	1	3	2.03	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi	Kota palopo	1 Laporan	25,000,000	DAU			195,000,000	Bappeda
5	1	3	2.03	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penanganan Permukiman Kumuh	Kota palopo	1 Laporan	125,000,000	DAU			305,000,000	Bappeda

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB	
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
5	0	0	2.0		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan	Kota Palopo	2 Jenis	520,000,000	DAU		2 Jenis	520,000,000	BPKAD
5	0	0	2.0	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang dibiayai	Kota Palopo	15 Eks	20,000,000	DAU		15 Eks	20,000,000	BPKAD
5	0	0	2.0	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SPPD yang dilaksanakan	Kota Palopo	60 SPPD	500,000,000	DAU		60 SPPD	500,000,000	BPKAD
5	0	0	2.0		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	Kota Palopo	7 Jenis	625,000,000	DAU		8 Jenis	705,000,000	BPKAD
5	0	0	2.0	0	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jenis dan Jumlah kendaraan dinas jabatan yang	Kota Palopo	1 Unit	400,000,000	DAU		1 Unit	500,000,000	BPKAD
5	0	0	2.0	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jenis dan Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan	Kota Palopo	2 Unit	45,000,000	DAU		1 Unit	25,000,000	BPKAD
5	0	0	2.0	0	Pengadaan Mebel	Jenis dan Jumlah mebel yang diadakan	Kota Palopo	5 Buah	30,000,000	DAU		5 Buah	30,000,000	BPKAD
5	0	0	2.0	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang disediakan	Kota Palopo	10 Unit	150,000,000	DAU		10 Unit	150,000,000	BPKAD
5	0	0	2.0		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai	Kota Palopo	5 Jenis	1,240,000,000	DAU		5 Jenis	1,240,000,000	BPKAD
5	0	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk, surat keluar, atk, cetak dan pengadaan	Kota Palopo	2.000 Surat	40,000,000	DAU		2.000 Surat	40,000,000	BPKAD
5	0	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening air, listrik dan internet yang dibiayai	Kota Palopo	8 Rekening	400,000,000	DAU		8 Rekening	400,000,000	BPKAD
5	0	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan kantor yang dilaksanakan	Kota Palopo	4 Jasa Layanan	800,000,000	DAU		4 Jasa Layanan	800,000,000	BPKAD
5	0	0	2.0		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang pemeliharaannya dibiayai	Kota Palopo	85 Unit	406,500,000	DAU		85 Unit	416,500,000	BPKAD
5	0	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang	Kota Palopo	1 Unit	26,500,000	DAU		1 Unit	26,500,000	BPKAD
5	0	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	Kota Palopo	40 Unit	60,000,000	DAU		40 Unit	60,000,000	BPKAD
5	0	0	2.0	0	Pemeliharaan Mebel	Jumlah meubel yang pemeliharaannya dibiayai	Kota Palopo	15 Unit	20,000,000	DAU		15 Unit	20,000,000	BPKAD
5	0	0	2.0	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dibiayai	Kota Palopo	30 Unit	50,000,000	DAU		30 Unit	50,000,000	BPKAD
5	0	0	2.0	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah dan Luas gedung kantor yang dipelihara	Kota Palopo	1 Unit	250,000,000	DAU		1 Unit	260,000,000	BPKAD
5	0	0	2.2		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Tingkat Kesesuaian Pagu pada Dokumen	Kota Palopo	100	10,345,000,000	DAU		100	10,665,000,000	BPKAD

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
						Penganggaran Terhadap Dokumen Perencanaan (%)								
5	02	02	2.01		Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Penyusunan penganggaran daerah yang dihasilkan	Kota Palopo	9 Jenis	1,660,000,000	DAU		9 Jenis	1,660,000,000	BPKAD
5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah KUA dan PPAS yang ditetapkan	Kota Palopo	2 Dokumen	35,000,000	DAU		2 Dokumen	35,000,000	BPKAD
5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Perubahan KUA dan PPAS yang ditetapkan	Kota Palopo	2 Dokumen	35,000,000	DAU		2 Dokumen	35,000,000	BPKAD
5	02	02	2.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA SKPD	Kota Palopo	49 Dokumen	40,000,000	DAU		49 Dokumen	40,000,000	BPKAD
5	02	02	2.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA SKPD	Kota Palopo	49 Dokumen	40,000,000	DAU		49 Dokumen	40,000,000	BPKAD
5	02	02	2.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD	Kota Palopo	49 Dokumen	35,000,000	DAU		49 Dokumen	35,000,000	BPKAD
5	02	02	2.01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA SKPD	Kota Palopo	49 Dokumen	35,000,000	DAU		49 Dokumen	35,000,000	BPKAD
5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Perda dan Perkada APBD yang ditetapkan	Kota Palopo	2 Dokumen	170,000,000	DAU		2 Dokumen	170,000,000	BPKAD
5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumah Perda dan Perkada Perubahan APBD yang ditetapkan	Kota Palopo	2 Dokumen	170,000,000	DAU		2 Dokumen	170,000,000	BPKAD
5	02	02	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumah Regulasi Kebijakan Bidang Anggaran yang ditetapkan	Kota Palopo	1 Dokumen	200,000,000	DAU		1 Dokumen	200,000,000	BPKAD
5	02	02	2.01	13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Penganggaran SKPD	Kota Palopo	49 SKPD	900,000,000	DAU		49 SKPD	900,000,000	BPKAD
5	02	02	2.02		Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Pengelolaan penatausahaan keuangan yang diterbitkan	Kota Palopo	2 Jenis	1,750,000,000	DAU		2 Jenis	1,750,000,000	BPKAD
5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah dokumen pencairan yang diterbitkan	Kota Palopo	4.000 Dokumen	1,100,000,000	DAU		4.000 Dokumen	1,100,000,000	BPKAD
5	02	02	2.02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Anggaran Kas dan SPD yang diterbitkan	Kota Palopo	600 Dokumen	550,000,000	DAU		600 Dokumen	550,000,000	BPKAD
5	02	02	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Pembinaan Penatausahaan Keuangan SKPD	Kota Palopo	49 SKPD	100,000,000	DAU		49 SKPD	100,000,000	BPKAD
5	02	02	2.03		Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palopo	Kota Palopo	1 Laporan	1,660,000,000	DAU		1 Laporan	1,660,000,000	BPKAD
5	02	02	2.03	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Rekon SPJ SKPD	Kota Palopo	588 Laporan	450,000,000	DAU		588 Laporan	450,000,000	BPKAD
5	02	02	2.03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Laporan Rekon LK SKPD	Kota Palopo	588 Laporan	650,000,000	DAU		588 Laporan	650,000,000	BPKAD

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB	
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
5	0	0	2.0	0	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah LKPD	Kota Palopo	1 Laporan	60,000,000	DAU		1 Laporan	70,000,000	BPKAD
5	0	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Perda dan Perwal yang ditetapkan tepat waktu	Kota Palopo	2 Dokumen	200,000,000	DAU		2 Dokumen	210,000,000	BPKAD
5	0	0	2.0	0	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Sidang TGR	Kota Palopo	4 Sidang	100,000,000	DAU		4 Sidang	100,000,000	BPKAD
5	0	0	2.0	1	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah SKPD yang dibina	Kota Palopo	49 SKPD	200,000,000	DAU		49 SKPD	200,000,000	BPKAD
5	0	0	2.0		Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Bunga utang dan kegiatan darurat yang dibiayai	Kota Palopo	2 Jenis	5,250,000,000	DAU		2 Jenis	5,550,000,000	BPKAD
5	0	0	2.0	0	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Bunga Utang yang dibiayai	Kota Palopo	1 Keg	2,000,000,000	DAU		1 Keg	2,000,000,000	BPKAD
5	0	0	2.0	0	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kegiatan Darurat yang dibiayai	Kota Palopo	1 Keg	3,250,000,000	DAU		1 Keg	3,550,000,000	BPKAD
5	0	0	2.0		Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah	Kota Palopo	1 Jenis	25,000,000	DAU		1 Jenis	25,000,000	BPKAD
5	0	0	2.0	0	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Sistem yang dipelihara	Kota Palopo	1 Aplikasi	25,000,000	DAU		1 Aplikasi	25,000,000	BPKAD
5	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Tingkat Pemenuhan Dokumen Pengelolaan Barang yang Memenuhi SAP	Kota Palopo	100	3,865,000,000	DAU		100	4,355,000,000	BPKAD
5	0	0	3.0		Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dihasilkan	Kota Palopo	12 Jenis	3,865,000,000	DAU		12 Jenis	4,355,000,000	BPKAD
5	0	0	3.0	0	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Buku Standar Biaya yang ditetapkan	Kota Palopo	4 Dokumen	200,000,000	DAU		4 Dokumen	200,000,000	BPKAD
5	0	0	3.0	0	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumah Regulasi Standar BMD dan Kebutuhan BMD yang ditetapkan	Kota Palopo	1 Dokumen	120,000,000	DAU		1 Dokumen	145,000,000	BPKAD
5	0	0	3.0	0	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Daftar Rencana Kebutuhan Barang	Kota Palopo	1 Dokumen	75,000,000	DAU		1 Dokumen	100,000,000	BPKAD
5	0	0	3.0	0	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumah Regulasi Pengelolaan BMD	Kota Palopo	1 Dokumen	120,000,000	DAU		1 Dokumen	150,000,000	BPKAD
5	0	0	3.0	0	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Penatusahaan BMD sesuai peraturan perundang undangan	Kota Palopo	5 Laporan	950,000,000	DAU		5 Laporan	1,000,000,000	BPKAD

KODE REKENING						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
5	0	2	0	3.0	0	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Inventarisasi Barang	Kota Palopo	1 Laporan	200,000,000	DAU		1 Laporan	200,000,000	BPKAD
5	0	2	0	3.0	0	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum BMD	Kota Palopo	1 Laporan	1,200,000,000	DAU		1 Laporan	1,380,000,000	BPKAD
5	0	2	0	3.0	0	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Nilai yang handal dan akurat pada BMD	Kota Palopo	1 Laporan	300,000,000	DAU		1 Laporan	300,000,000	BPKAD
5	0	2	0	3.0	0	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Pengawasan dan Pengendalian atas Pengelolaan BMD	Kota Palopo	1 Dokumen	120,000,000	DAU		1 Dokumen	150,000,000	BPKAD
5	0	2	0	3.0	1	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Pengawasan dan Pengendalian atas Pemindahtanganan BMD	Kota Palopo	1 Laporan	350,000,000	DAU		1 Laporan	450,000,000	BPKAD
5	0	2	0	3.0	1	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan BMD	Kota Palopo	1 Laporan	80,000,000	DAU		1 Laporan	80,000,000	BPKAD
5	0	2	0	3.0	1	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan BMD	Kota Palopo	1 Laporan	100,000,000	DAU		1 Laporan	100,000,000	BPKAD
5	0	2	0	3.0	1	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah SKPD yang dibina	Kota Palopo	49 SKPD	50,000,000	DAU		49 SKPD	100,000,000	BPKAD
						KEUANGAN				11,065,447,155				11,360,943,334	
						BADAN PENDAPATAN DAERAH				11,065,447,155				11,360,943,334	
5	0	2	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah (%)	Kota Palopo	100	7,485,575,000	DAU		100	7,691,574,375	Bapenda
5	0	2	0	2.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Kota Palopo	6	2,672,000	DAU		6	2,817,000	Bapenda
5	0	2	0	2.0	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra, renja, RKA dan DPA perangkat daerah	Kota Palopo	4	1,281,000	DAU		4	1,350,000	Bapenda
5	0	2	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Palopo	2	1,391,000	DAU		2	1,467,000	Bapenda
5	0	2	0	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan keuangan	Kota Palopo	4	5,786,400,000	DAU		4	5,906,296,875	Bapenda
5	0	2	0	2.0	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	Kota Palopo	41	5,186,957,000	DAU		41	5,302,870,375	Bapenda
5	0	2	0	2.0	0	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan Pertanggungjawaban yang diverifikasi	Kota Palopo	1800	597,390,000	DAU		1925	601,424,500	Bapenda
5	0	2	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan laporan keuangan akhir tahun yang disusun	Kota Palopo	1	1,173,000	DAU		1	1,100,000	Bapenda
5	0	2	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan yang disusun	Kota Palopo	2	880,000	DAU		2	902,000	Bapenda
5	0	2	0	2.0		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelolaan aset	Kota Palopo	1	50,269,000	DAU		1	51,525,000	Bapenda
5	0	2	0	2.0	0	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah aset yang ditatakelolakan	Kota Palopo	11	50,269,000	DAU		11	51,525,000	Bapenda
5	0	2	0	2.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi ASN Perangkat Daerah yang dikelola	Kota Palopo	191	219,568,000	DAU		41	126,892,500	Bapenda

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
5	0	0	2.0	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	Kota Palopo	150	100,000,000	DAU		-	-	Bapenda
5	0	0	2.0	0	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah ASN yang memperoleh pelayanan kepegawaian tepat waktu	Kota Palopo	41	47,700,000	DAU		41	48,892,500	Bapenda
5	0	0	2.0	0	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan kinerja yang dievaluasi	Kota Palopo	41	34,600,000	DAU		41	40,000,000	Bapenda
5	0	0	2.0	1	Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	Kota Palopo	3	37,268,000	DAU		6	38,000,000	Bapenda
5	0	0	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan	Kota Palopo	5	574,926,000	DAU		5	610,227,000	Bapenda
5	0	0	2.0	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang diadakan	Kota Palopo	35	10,760,000	DAU		40	11,029,000	Bapenda
5	0	0	2.0	0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan yang dibutuhkan	Kota Palopo	2	215,000,000	DAU		2	215,000,000	Bapenda
5	0	0	2.0	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan Yang dibiayai	Kota Palopo	4	8,600,000	DAU		4	8,815,000	Bapenda
5	0	0	2.0	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SPPD yang dilaksanakan	Kota Palopo	200	250,566,000	DAU		200	283,133,000	Bapenda
5	0	0	2.0	1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Sistem atau aplikasi yang tersedia serta pengelolaannya	Kota Palopo	6	90,000,000	DAU		6	92,250,000	Bapenda
5	0	0	2.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	Kota Palopo	21	106,200,000	DAU		21	210,250,000	Bapenda
5	0	0	2.0	0	Pengadaan Mebel	Jenis dan Jumlah mebel yang diadakan	Kota Palopo	6	16,200,000	DAU		6	18,000,000	Bapenda
5	0	0	2.0	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis dan Jumlah Peralatan yang disediakan	Kota Palopo	15	90,000,000	DAU		15	92,250,000	Bapenda
5	0	0	2.0	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana pnedukung kantor yang disediakan	Kota Palopo	0	-	DAU		1	100,000,000	Bapenda
5	0	0	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang urusan daerah yang dibiayai	Kota Palopo	3	624,512,000	DAU		3	642,050,000	Bapenda
5	0	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk, surat keluar yang diagendakan	Kota Palopo	10000	20,961,000	DAU		10000	22,000,000	Bapenda
5	0	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Listrik	Jumlah rekening air, listrik dan internet yang dibiayai	Kota Palopo	36	322,000,000	DAU		36	330,050,000	Bapenda
5	0	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan kantor yang dilaksanakan	Kota Palopo	48	281,551,000	DAU		48	290,000,000	Bapenda
5	0	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang penunjang urusan pemerintahan daerah yang pemeliharaannya dibiayai	Kota Palopo	46	121,028,000	DAU		46	141,516,000	Bapenda
5	0	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	Kota Palopo	40	58,400,000	DAU		40	59,860,000	Bapenda

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
5	0	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	Kota Palopo	2	21,628,000	DAU		2	20,631,000	Bapenda
5	0	0	2.0	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dibiayai	Kota Palopo	3	20,000,000	DAU		3	20,500,000	Bapenda
5	0	0	2.0	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah dan Luas Gedung kantor yang dipelihara	Kota Palopo	1	21,000,000	DAU		1	40,525,000	Bapenda
5	0	0	2	4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Tingkat Kesesuaian Realisasi Pendapatan Daerah dengan Target Pendapatan Daerah (%/Tahun)	Kota Palopo	100	3,579,872,155	DAU		100	3,669,368,959	Bapenda
5	0	0	2.0		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Nilai PAD yang terealisasi (Milyar/Tahun)	Kota Palopo	196	3,579,872,155	DAU		221	3,669,368,959	Bapenda
5	0	0	2.0	0	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah potensi pajak dan retribusi daerah (Jenis)	Kota Palopo	13	239,964,800	DAU		13	245,963,920	Bapenda
5	0	0	2.0	0	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah revisi perda dan perwal pajak dan retribusi yang dibuat (Jenis)	Kota Palopo	2	18,514,575	DAU		2	18,977,440	Bapenda
5	0	0	2.0	0	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah regulasi yang disosialisasikan kepada masyarakat (Jenis)	Kota Palopo	2	26,178,500	DAU		2	26,832,963	Bapenda
5	0	0	2.0	0	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah pemutakhiran data subjek dan objek pajak (Objek)	Kota Palopo	17425	574,617,050	DAU		17500	588,982,475	Bapenda
5	0	0	2.0	0	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah STTS PBB P-2 dan DHKP yang diterbitkan (Surat)	Kota Palopo	41000	363,217,155	DAU		42000	372,297,584	Bapenda
5	0	0	2.0	0	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah SSPD yang diterbitkan (Lembar)	Kota Palopo	71000	385,512,750	DAU		72000	395,150,568	Bapenda
5	0	0	2.0	1	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Laporan PAD yang diverifikasi (Laporan)	Kota Palopo	12	244,772,050	DAU		12	250,891,352	Bapenda
5	0	0	2.0	1	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah SPTPD Pajak yang diterbitkan (Lembar)	Kota Palopo	56000	582,815,000	DAU		57000	597,385,375	Bapenda
5	0	0	2.0	1	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah laporan pengaduan pajak dan retribusi yang ditindaklanjuti (Laporan)	Kota Palopo	300	199,055,000	DAU		400	204,031,375	Bapenda
5	0	0	2.0	1	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah reklame terbit, tempat usaha dan Alat Transaksi Pajak Online (M-POS) yang diawasi (unit)	Kota Palopo	131	664,203,075	DAU		131	680,808,152	Bapenda
5	0	0	2.0	1	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring pemungutan retribusi daerahnya (Unit)	Kota Palopo	12	281,022,200	DAU		12	288,047,755	Bapenda
					KEPEGAWAIAN				10,896,227,057				11,169,225,057	
					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				10,896,227,057				11,169,225,057	BKDPSDM
5	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palopo	100	4,673,592,050	DAU		100	4,790,431,851	BKDPSDM

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB	
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
5	3	1	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Kota Palopo	3 Dok	6,000,000	DAU		3 Dok	6,000,000	BKDPSDM
5	3	1	2.0 1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra, renja, RKA dan DPA Perangkat Daerah	Kota Palopo	2 Dok	4,000,000	DAU		2 Dok	4,000,000	BKDPSDM
5	3	1	2.0 1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Palopo	1 Dok	2,000,000	DAU		1 Dok	2,000,000	BKDPSDM
5	3	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan keuangan	Kota Palopo	3 Laporan	3,726,436,000	DAU		3 Laporan	3,756,412,000	BKDPSDM
5	3	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	Kota Palopo	48 Org	3,651,236,000	DAU		52 Org	3,681,212,000	BKDPSDM
5	3	1	2.0 2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan pertanggungjawaban yang diverifikasi	Kota Palopo	12 Laporan	73,200,000	DAU		12 Laporan	73,200,000	BKDPSDM
5	3	1	2.0 2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	Kota Palopo	1 Dok	2,000,000	DAU		1 Dok	2,000,000	BKDPSDM
5	3	1	2.0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelolaan aset	Kota Palopo	690 Unit	7,800,000	DAU		690 Unit	7,800,000	BKDPSDM
5	3	1	2.0 3	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah aset yang ditatakelolakan	Kota Palopo	690 Unit	7,800,000	DAU		690 Unit	7,800,000	BKDPSDM
5	3	1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi ASN PD yang dikelola	Kota Palopo	17 Org	45,000,000	DAU		20 Org	60,000,000	BKDPSDM
5	3	1	2.0 5	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	Kota Palopo	40 Org	45,000,000	DAU		45 Org	60,000,000	BKDPSDM
5	3	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan	Kota Palopo	3 Jenis	309,185,500	DAU		3 Jenis	337,054,851	BKDPSDM
5	3	1	2.0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang diadakan	Kota Palopo	10 Unit	2,947,500	DAU		20 Unit	5,450,000	BKDPSDM
5	3	1	2.0 6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang dibiayai	Kota Palopo	3 Jenis	10,560,000	DAU		3 Jenis	10,560,000	BKDPSDM
5	3	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SPPD yang dilaksanakan	Kota Palopo	165 SPPD	295,678,000	DAU		194 SPPD	321,044,851	BKDPSDM
5	3	1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	Kota Palopo	30 Unit	50,000,000	DAU		30 Unit	75,000,000	BKDPSDM
5	3	1	2.0 7	5	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis dan Jumlah peralatan dan mesin yang disediakan	Kota Palopo	10 Unit	30,000,000	DAU		10 Unit	50,000,000	BKDPSDM
5	3	1	2.0 7	6	Pengadaan Mebel	Jenis dan Jumlah Mebel yang diadakan	Kota Palopo	20 Unit	20,000,000	DAU		20 Unit	25,000,000	BKDPSDM
5	3	1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai	Kota Palopo	9 Jenis	491,170,550	DAU		9 Jenis	501,165,000	BKDPSDM
5	3	1	2.0 8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk, surat keluar, atk, cetak dan penggadaan	Kota Palopo	6138 Berkas	125,970,550	DAU		7541 Berkas	135,965,000	BKDPSDM
5	3	1	2.0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Iuran Internet, Media Publikasi yang dibiayai	Kota Palopo	5 Jenis	124,000,000	DAU		5 Jenis	124,000,000	BKDPSDM
5	3	1	2.0 8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan kantor yang dilaksanakan	Kota Palopo	3 Jenis	241,200,000	DAU		3 Jenis	241,200,000	BKDPSDM

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB	
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
5	3	1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang pemeliharaannya dibiayai	Kota Palopo	53 Unit	38,000,000	DAU		66 Unit	47,000,000	BKDPSDM
5	3	1	2.0 9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	Kota Palopo	21 Unit	25,000,000	DAU		21 Unit	27,000,000	BKDPSDM
5	3	1	2.0 9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dibiayai	Kota Palopo	32 Jenis	13,000,000	DAU		45 Jenis	20,000,000	BKDPSDM
5	3	2			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase PNS yang ditempatkan sesuai syarat jabatan & syarat kompetensinya	Kota Palopo	0.56	2,257,319,238	DAU		0.6	2,313,752,218	BKDPSDM
5	3	2	2.0 1		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Laporan Kebutuhan pengadaan, dan Pemberhentian ASN	Kota Palopo	1 Laporan	838,000,000	DAU		1 Laporan	892,000,000	BKDPSDM
5	3	2	2.0 1	4	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah orang yang dilayani dalam proses pengadaan ASN	Kota Palopo	4500 org	620,000,000	DAU		4600 org	670,000,000	BKDPSDM
5	3	2	2.0 1	6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah berkas pensiun dan pemberhentian yang diproses	Kota Palopo	100 berkas	55,000,000	DAU		100 berkas	57,000,000	BKDPSDM
5	3	2	2.0 1	8	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah data dan informasi kepegawaian yang ditangani	Kota Palopo	6200 data	83,000,000	DAU		6300 data	85,000,000	BKDPSDM
5	3	2	2.0 1	10	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah lembaga profesi ASN yang dibina	Kota Palopo	1 lembaga	80,000,000	DAU		1 lembaga	80,000,000	BKDPSDM
5	3	2	2.0 2		Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Laporan Mutasi dan Promosi ASN	Kota Palopo	1 Laporan	1,049,319,238	DAU		1 Laporan	1,049,252,218	BKDPSDM
5	3	2	2.0 2	1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah berkas mutasi ASN yang diproses	Kota Palopo	500 berkas	60,000,000	DAU		500 berkas	62,500,000	BKDPSDM
5	3	2	2.0 2	2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah berkas kepangkatan ASN yang diproses	Kota Palopo	1000 berkas	125,000,000	DAU		1000 berkas	127,500,000	BKDPSDM
5	3	2	2.0 2	3	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah laporan pengembangan karier dan promosi aparatur	Kota Palopo	1 Laporan	864,319,238	DAU		1 Laporan	859,252,218	BKDPSDM
5	3	2	2.0 3		Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah pelaksanaan sertifikasi yang dilaksanakan dan diikuti	Kota Palopo	1 kegiatan	240,000,000	DAU		1 kegiatan	242,500,000	BKDPSDM
5	3	2	2.0 3	1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah aparatur yang akan mengikuti sertifikasi aparatur (Orang/Tahun)	Kota Palopo	20 orang	120,000,000	DAU		20 orang	120,000,000	BKDPSDM
5	3	2	2.0 3	4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah aparatur yang tugas belajar	Kota Palopo	6 orang	120,000,000	DAU		6 orang	122,500,000	BKDPSDM
5	3	2	2.0 4		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pertumbuhan jumlah aparatur yang diberi penghargaan (%)	Kota Palopo	0.07	130,000,000	DAU		0.07	130,000,000	BKDPSDM
5	3	2	2.0 4	4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah aparatur yang diberi penghargaan	Kota Palopo	50 orang	30,000,000	DAU		50 orang	30,000,000	BKDPSDM
5	3	2	2.0 4	8	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah aparatur yang diproses pelanggaran disiplin	Kota Palopo	15 orang	100,000,000	DAU		15 orang	100,000,000	BKDPSDM

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB	
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
5	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Kota Palopo	175	3,965,315,769	DAU		180	4,065,040,988	BKDPSDM
5	4	2	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah pelaksanaan sertifikasi yang dilaksanakan dan diikuti	Kota Palopo	2 kegiatan	3,965,315,769	DAU		2 kegiatan	4,065,040,988	BKDPSDM
5	4	2	2.02	7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklatpim, Pendidikan Dasar, Diklat Fungsional	Kota Palopo	120 Orang	3,965,315,769	DAU		120	4,065,040,988	BKDPSDM
					PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				2,683,145,569				2,750,224,208	
					BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				2,683,145,569				2,750,224,208	
5	5	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Penunjang Pemerintahan Derah	Kota Palopo	100	2,204,734,250	DAU		100	2,259,852,606	Balitbangda
5	5	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	Kota Palopo	8	1,000,000	DAU		8	1,000,000	Balitbangda
5	5	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA Perangkat Daerah	Kota Palopo	7	500,000	DAU		7	500,000	Balitbangda
5	5	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		1	500,000	DAU		1	500,000	Balitbangda
5	5	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Keuangan	Kota Palopo	12	1,841,477,050	DAU		12	1,841,477,050	Balitbangda
5	5	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat Gaji dan Tunjangan	Kota Palopo	23	1,786,477,050	DAU		23	1,786,477,050	Balitbangda
5	5	1	2.02	3	Pelaksanaan Penata Usahanaa dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban yang diverifikasi	Kota Palopo	500	54,000,000	DAU		500	54,000,000	Balitbangda
5	5	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran dan tahunan yang disusun	Kota Palopo	2	1,000,000	DAU		2	1,000,000	Balitbangda
5	5	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Pengelolaan Aset	Kota Palopo	2	6,600,000	DAU		2	6,600,000	Balitbangda
5	5	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Aset yang ditatkelolakan		170	6,600,000	DAU		173	6,600,000	Balitbangda
5	5	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi ASN Perangkat Daerah yang dikelola		35	17,500,000	DAU		0	-	Balitbangda
5	5	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	Kota Palopo	35	17,500,000	DAU		0	-	Balitbangda

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB	
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
5	5	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum yang ditatakelolakan	Kota Palopo	2	158,711,000	DAU		2	219,703,356	Balitbangda
5	5	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang dibiayai	Kota Palopo	4	5,280,000	DAU		4	5,280,000	Balitbangda
5	5	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SPPD yang dilaksanakan	Kota Palopo	50	153,431,000	DAU		70	214,423,356	Balitbangda
5	5	1	2.07		Pengadaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	Kota Palopo	6	19,874,000	DAU		6	25,000,000	Balitbangda
5	5	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan jenis peralatan dan mesin yang disediakan	Kota Palopo	6	19,874,000	DAU		6	25,000,000	Balitbangda
5	5	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan daerah yang dibiayai	Kota Palopo	3	127,722,200	DAU		3	133,722,200	Balitbangda
5	5	1	2.08	1	Pemyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat, ATK. Cetak dan Penggandaan	Kota Palopo	610	28,999,000	DAU		620	28,999,000	Balitbangda
5	5	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Data Air dan Listrik	Jumlah Rekening internet dan publikasi yang dibayarkan	Kota Palopo	2	28,600,000	DAU		2	28,600,000	Balitbangda
5	5	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Layanan Kantor yang dilaksanakan	Kota Palopo	8	70,123,200	DAU		8	76,123,200	Balitbangda
5	5	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang pemeliharannya dibiayai	Kota Palopo	20	31,850,000	DAU		20	32,350,000	Balitbangda
5	5	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	Kota Palopo	1	26,250,000	DAU		1	26,250,000	Balitbangda
5	5	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	Kota Palopo	3	600,000	DAU		3	600,000	Balitbangda
5	5	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang pemeliharannya dibiayai		15	3,500,000	DAU		15	3,500,000	Balitbangda
5	5	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dipelihara		1	1,500,000	DAU		1	2,000,000	Balitbangda
5	5	2			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Persentase Inovasi Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Sosial, dan Ekonomi, Pembangunan dan Teknologi yang diwujudkan	Kota Palopo	100	478,411,319	DAU		100	490,371,602	Balitbangda
5	5	2	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Hasil kelitbangan Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturanyang ditindaklaniuti	Kota Palopo	1	87,000,000	DAU		1	88,500,000	Balitbangda

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB	
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
5	5	2	2.01	2	Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah dokumen hasil kelitbangan bidang pemerintahan umum yang dihasilkan	Kota Palopo	1	87,000,000	DAU		1	88,500,000	Balitbangda
5	5	2	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah hasil kelitbangan sosial, dan kependudukan yang ditindaklanjuti	Kota Palopo	1	72,000,000	DAU		1	73,871,602	Balitbangda
5	5	2	2.02	1	Penelitian dan pengembangan Bidang Aspek-aspek sosial	Jumlah dokumen hasil kelitbangan bidang sosial yang dihasilkan	Kota Palopo	1	72,000,000	DAU		1	73,871,602	Balitbangda
5	5	2	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Hasil kelitbangan Ekonomi dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	Kota Palopo	2	160,000,000	DAU		2	164,000,000	Balitbangda
5	5	2	2.03	1	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah dokumen hasil kelitbangan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang dihasilkan	Kota Palopo	1	75,000,000	DAU		1	77,000,000	Balitbangda
5	5	2	2.03	12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah dokumen hasil kelitbangan bidang penataan ruang dan pertanahan yang dihasilkan	Kota Palopo	1	85,000,000	DAU		1	87,000,000	Balitbangda
5	5	2	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah inovasi yang difasilitasi	Kota Palopo	19	159,411,319	DAU		24	164,000,000	Balitbangda
5	5	2	2.04	2	Uji Coba dan Penerapan Rancang/Bangun Replikasi dan Invensi di Bidang difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Dokumen hasil pemenuhan unsur-unsur Sagu Teknopark	Kota Palopo	1	54,411,319	DAU		1	56,000,000	Balitbangda
5	5	2	2.04	4	Sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Inovasi yang dihasilkan	Kota Palopo	1	105,000,000	DAU		1	108,000,000	Balitbangda
6					UNSUR PENGAWASAN UNSUR PEMERINTAHAN				10,308,759,288				10,897,364,610	
					INSPEKTORAT DAERAH				10,308,759,288				10,897,364,610	
					INSPEKTORAT DAERAH				10,308,759,288				10,897,364,610	
6	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Urusan Pemerintah Daerah (%)	Kota Palopo	100	7,243,281,288	DAU		100	7,721,886,610	Inspektora
6	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun Tepat Waktu (dokumen)	Kota Palopo	8 Dokumen	240,000	DAU		8 Dokumen	240,000	Inspektora
6	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra, renja, RKA dan DPA perangkat daerah	Kota Palopo	7 Dokumen	120,000	DAU		7 Dokumen	120,000	Inspektora
6	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Palopo	1 Dokumen	120,000	DAU		1 Dokumen	120,000	Inspektora
6	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan keuangan	Kota Palopo	24 Laporan	5,534,402,000	DAU		24 Laporan	5,734,402,000	Inspektora
6	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang mendapatkan gaji dan tunjangan	Kota Palopo	53 Orang	5,500,000,000	DAU		55 Orang	5,700,000,000	Inspektora
6	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan Pertanggungjawaban yang diverifikasi	Kota Palopo	12 Laporan	34,272,000	DAU		12 Laporan	34,272,000	Inspektora

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB	
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
6	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan	Kota Palopo	12 Laporan	130,000	DAU		12 Laporan	130,000	Inspektora t
6	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi ASN PD yang dikelola	Kota Palopo	13 Orang	132,056,816	DAU		18 Orang	232,056,816	Inspektora t
6	1	1	2.05	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	Kota Palopo	13 Orang	132,056,816	DAU		18 Orang	232,056,816	Inspektora t
6	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan	Kota Palopo	3 Jenis	561,000,000	DAU		3 Jenis	613,000,000	Inspektora t
6	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang diadakan	Kota Palopo	165 Buah	3,000,000	DAU		165 Buah	3,000,000	Inspektora t
6	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Palopo	3 Eksamplar	8,000,000	DAU		4 Eksamplar	10,000,000	Inspektora t
6	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SPPD yang dilaksanakan	Dalam/Luar Kota Palopo	124 SPPD	550,000,000	DAU		135 SPPD	600,000,000	Inspektora t
6	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	Kota Palopo	24 unit	579,648,372	DAU		30 unit	706,253,694	Inspektora t
6	1	1	2.07	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung kantor yang disediakan	Kota Palopo	24 unit	579,648,372	DAU		30 unit	706,253,694	Inspektora t
6	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai	Kota Palopo	3 Jenis	348,934,100	DAU		3 Jenis	348,934,100	Inspektora t
6	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk, surat keluar, atk, cetak dan pengadaan	Kota Palopo	680 Surat	60,000,000	DAU		680 Surat	60,000,000	Inspektora t
6	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening air, listrik dan internet yang dibiayai	Kota Palopo	4 Rekening	155,504,000	DAU		4 Rekening	155,504,000	Inspektora t
6	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan kantor yang dilaksanakan	Kota Palopo	6 Jenis	133,430,100	DAU		6 Jenis	133,430,100	Inspektora t
6	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah pemerintah daerah yang emeliharannya dibiayai	Kota Palopo	42 Unit	87,000,000	DAU		42 Unit	87,000,000	Inspektora t
6	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	Kota Palopo	1 Unit	14,000,000	DAU		1 Unit	14,000,000	Inspektora t
6	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang pemeliharaan dan operasionalnya dibiayai	Kota Palopo	2 Unit	18,000,000	DAU		2 Unit	18,000,000	Inspektora t
6	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dibiayai	Kota Palopo	38 Unit	25,000,000	DAU		38 Unit	25,000,000	Inspektora t
6	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah dan Luas gedung kantor yang dipelihara	Kota Palopo	500 M2	30,000,000	DAU		500 M2	30,000,000	Inspektora t

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB	
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
6	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Rata-Rata Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kota Palopo	75	2,515,478,000	DAU		80	2,585,478,000	Inspektora t
6	1	2	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Internal	Kota Palopo	154 LHP	1,745,478,000	DAU		161 LHP	1,815,478,000	Inspektora t
6	1	2	2.01	1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kota Palopo	48 LHP	598,969,500	DAU		48 LHP	598,969,500	Inspektora t
6	1	2	2.01	2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Palopo	48 LHP	598,969,500	DAU		48 LHP	598,969,500	Inspektora t
6	1	2	2.01	3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Reviu Laporan Kinerja	Kota Palopo	30 Laporan	103,716,000	DAU		32 Laporan	153,716,000	Inspektora t
6	1	2	2.01	4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Reviu Laporan Keuangan	Kota Palopo	4 Laporan	173,823,000	DAU		4 Laporan	173,823,000	Inspektora t
6	1	2	2.01	7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan Monev Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kota Palopo	27 Laporan	270,000,000	DAU		29 Laporan	290,000,000	Inspektora t
6	1	2	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Pengawasan dengan tujuan tertentu	Kota Palopo	24 LHP	770,000,000	DAU		24 LHP	770,000,000	Inspektora t
6	1	2	2.02	1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Kota Palopo	12 Laporan	120,000,000	DAU		12 Laporan	120,000,000	Inspektora t
6	1	2	2.02	2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kota Palopo	12 Laporan	650,000,000	DAU		12 Laporan	650,000,000	Inspektora t
6	1	3			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Rata-Rata Nilai PMPRB Perangkat Daerah	Kota Palopo	75	550,000,000	DAU		80	590,000,000	Inspektora t
6	1	3	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi	Kota Palopo	24 Laporan	550,000,000	DAU		27 Laporan	650,000,000.00	Inspektora t
6	1	3	2.02	3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Laporan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kota Palopo	24 Laporan	550,000,000	DAU		27 Laporan	590,000,000	Inspektora t
7					UNSUR KEWILAYAHAN				54,153,112,626				55,506,939,942	
					KECAMATAN				54,153,112,626				55,506,939,942	
					KECAMATAN WARA				7,006,108,188				7,181,260,892	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palopo	100	5,437,895,600	DAU		100	5,573,842,990	Kec Wara
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Palopo		9,555,000	DAU			13,700,000	Kec Wara
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra, renja, RKA dan DPA Perangkat Daerah	Kota Palopo	7 Dokumen	6,005,000	DAU			8,100,000	Kec Wara
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Palopo	3 Laporan	3,550,000	DAU			5,600,000	Kec Wara

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB	
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
7	1	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan keuangan	Kota Palopo		5,127,550,000	DAU			5,135,100,000	Kec Wara
7	1	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	Kota Palopo	70 orang	5,100,000,000	DAU			5,100,000,000	Kec Wara
7	1	1	2.0 2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan pertanggung jawaban yang diverifikasi	Kota Palopo	4 Laporan	24,500,000	DAU			30,000,000	Kec Wara
7	1	1	2.0 2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan yang disusun	Kota Palopo	17 Laporan	3,050,000	DAU			5,100,000	Kec Wara
7	1	1	2.0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelolaan aset	Kota Palopo		7,000,000	DAU			9,500,000	Kec Wara
7	1	1	2.0 3	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Aset yang ditatakelolakan	Kota Palopo	20 Unit	7,000,000	DAU			9,500,000	Kec Wara
7	1	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan	Kota Palopo		52,400,000	DAU			77,400,000	Kec Wara
7	1	1	2.0 6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang dibiayai	Kota Palopo	24 Eksemplar	2,400,000	DAU			2,400,000	Kec Wara
7	1	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SPPD yang dilaksanakan	Kota Palopo	10 Kegiatan	50,000,000	DAU			75,000,000	Kec Wara
7	1	1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai	Kota Palopo		149,540,600	DAU			206,142,990	Kec Wara
7	1	1	2.0 8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk, surat keluar, atk, cetak dan penggandaan	Kota Palopo	1500 Surat	13,390,600	DAU			21,500,000	Kec Wara
7	1	1	2.0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening air, listrik dan internet yang dibiayai	Kota Palopo	3 Rekening	26,000,000	DAU			35,000,000	Kec Wara
7	1	1	2.0 8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan kantor yang dilaksanakan	Kota Palopo	9 Layanan	110,150,000	DAU			149,642,990	Kec Wara
7	1	1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang pemeliharaannya dibiayai	Kota Palopo		91,850,000	DAU			132,000,000	Kec Wara
7	1	1	2.0 9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	Kota Palopo	3 Unit	36,850,000	DAU			50,000,000	Kec Wara
7	1	1	2.0 9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peraltan mesin dan lainnya yang dibiayai	Kota Palopo	7 Unit	10,000,000	DAU			17,000,000	Kec Wara
7	1	1	2.0 9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah dan luas gedung kantor yang dibiayai	Kota Palopo	1 Unit	45,000,000	DAU			65,000,000	Kec Wara
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Kota Palopo		611,755,875	DAU			627,049,772	Kec Wara
7	1	2	2.0 2		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Kota Palopo		599,455,875	DAU			614,649,772	Kec Wara

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB	
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
7	1	2	2.0 2	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Jenis Layanan yang dilaksanakan	Kota Palopo	6 Jenis	599,455,875	DAU			614,649,772	Kec Wara
7	1	2	2.0 4		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Kota Palopo		12,300,000	DAU			12,400,000	Kec Wara
7	1	2	2.0 4	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah surat keterangan izin Non Usaha yang dikeluarkan	Kota Palopo	12 Layanan	6,850,000	DAU			6,900,000	Kec Wara
7	1	2	2.0 4	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah surat keterangan izin Nonperizinan	Kota Palopo	12 Layanan	5,450,000	DAU			5,500,000	Kec Wara
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Kota Palopo		919,376,313	DAU			942,360,720	Kec Wara
7	1	3	2.0 2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Kota Palopo		919,376,313	DAU			942,360,720	Kec Wara
7	1	3	2.0 2	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah warga/peserta yang hadir dalam musrenbang	Kota Palopo	150 orang	19,350,000	DAU			34,400,000	Kec Wara
7	1	3	2.0 2	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah warga terdampak pembangunan sarana/prasarana kelurahan	Kota Palopo	50 orang	882,353,000	DAU			882,353,000	Kec Wara
7	1	3	2.0 2	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan layanan pemberdayaan	Kota Palopo	12 Kegiatan	17,673,313	DAU			25,607,720	Kec Wara
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Kota Palopo		37,080,400	DAU			38,007,410	Kec Wara
7	1	4	2.0 1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Kota Palopo		37,080,400	DAU			38,007,410	Kec Wara
7	1	4	2.0 1	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Petugas Babinsa dan Bhabinkantibmas	Kota Palopo	14 Orang	37,080,400	DAU			38,007,410	Kec Wara
					KECAMATAN WARU UTARA				5,769,930,000				5,914,178,250	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palopo		4,782,650,000	DAU			4,902,216,250	Kec Wara Utara
7	1	1	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Palopo		650,000	DAU			650,000	Kec Wara Utara
7	1	1	2.0 1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang dibuat	Kota Palopo	5 Dokumen	650,000	DAU			650,000	Kec Wara Utara
7	1	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan keuangan	Kota Palopo		4,586,000,000	DAU			4,699,350,000	Kec Wara Utara
7	1	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai	Kota Palopo	55 Orang	4,559,048,216	DAU			4,670,608,216	Kec Wara Utara

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB	
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
7	1	1	2.0 2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan pertanggungjawaban yang diverifikasi	Kota Palopo	923 Laporan	26,951,784	DAU			28,741,784	Kec Wara Utara
7	1	1	2.0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelolaan aset	Kota Palopo		16,000,000	DAU			16,000,000	Kec Wara Utara
7	1	1	2.0 3	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah aset yang ditatakelolakan	Kota Palopo	2 Jenis	16,000,000	DAU			16,000,000	Kec Wara Utara
7	1	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan	Kota Palopo		50,000,000	DAU			55,000,000	Kec Wara Utara
7	1	1	2.0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang diadakan	Kota Palopo	10 Buah	3,000,000	DAU			4,000,000	Kec Wara Utara
7	1	1	2.0 6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang dibiayai	Kota Palopo	2 Eksampler	2,400,000	DAU			2,400,000	Kec Wara Utara
7	1	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SPPD yang dilaksanakan	Kota Palopo	10 SPPD	44,600,000	DAU			48,600,000	Kec Wara Utara
7	1	1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai	Kota Palopo		90,000,000	DAU			90,500,000	Kec Wara Utara
7	1	1	2.0 8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk, surat keluar, ATK, cetak, penggandaan	Kota Palopo	750 Surat	25,267,500	DAU			25,767,500	Kec Wara Utara
7	1	1	2.0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening air, listrik, internet yang dibiayai	Kota Palopo	3 Rekening	15,532,500	DAU			15,532,500	Kec Wara Utara
7	1	1	2.0 8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan kantor yang dilaksanakan	Kota Palopo	5 Layanan	49,200,000	DAU			49,200,000	Kec Wara Utara
7	1	1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang pemeliharaannya dibiayai	Kota Palopo		40,000,000	DAU			40,716,250	Kec Wara Utara
7	1	1	2.0 9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	Kota Palopo	2 Unit	23,164,050	DAU			23,880,300	Kec Wara Utara
7	1	1	2.0 9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	Kota Palopo	2 Unit	5,549,655	DAU			5,549,655	Kec Wara Utara
7	1	1	2.0 9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan mesin lainnya yang dibiayai	Kota Palopo	5 Buah	5,700,000	DAU			5,700,000	Kec Wara Utara
7	1	1	2.0 9	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah dan luas gedung kantor yang dipelihara	Kota Palopo	1200 m2	5,586,295	DAU			5,586,295	Kec Wara Utara
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Kota Palopo		671,375,000	DAU			688,159,375	Kec Wara Utara
7	1	2	2.0 2		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Kota Palopo		662,875,000	DAU			679,559,375	Kec Wara Utara

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB	
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
7	1	2	2.0 2	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah jenis layanan yang dilaksanakan	Kota Palopo	3 Jenis	662,875,000	DAU			679,559,375	Kec Wara Utara
7	1	2	2.0 4		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Kota Palopo		8,500,000	DAU			8,600,000	Kec Wara Utara
7	1	2	2.0 4	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah surat keterangan non perizinan yang dikeluarkan	Kota Palopo	1 Jenis	8,500,000	DAU			8,600,000	Kec Wara Utara
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Kota Palopo		268,550,000	DAU			275,263,750	Kec Wara Utara
7	1	3	2.0 2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Kota Palopo		268,550,000	DAU			275,263,750	Kec Wara Utara
7	1	3	2.0 2	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah warga/peserta yang hadir dalam musrenbang	Kota Palopo	100 Orang	28,832,490	DAU			35,546,240	Kec Wara Utara
7	1	3	2.0 2	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana prasarana kelurahan yang diadakan	Kota Palopo	3 Unit	239,717,510	DAU			239,717,510	Kec Wara Utara
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Kota Palopo		47,355,000	DAU			48,538,875	Kec Wara Utara
7	1	4	2.0 1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Kota Palopo		47,355,000	DAU			48,538,875	Kec Wara Utara
7	1	4	2.0 1	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kota Palopo	5 Kali	47,355,000	DAU			48,538,875	Kec Wara Utara
					KECAMATAN WARAS SELATAN				5,224,937,500				5,355,560,938	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Kota Palopo		4,389,050,000	DAU			4,498,776,250	Kec Wara Selatan
7	1	1	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kota Palopo		2,376,144	DAU			2,500,000	Kec Wara Selatan
7	1	1	2.0 1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra, renja, RKA dan DPA	Kota Palopo	7 dokumen	1,250,000	DAU			1,300,000	Kec Wara Selatan
7	1	1	2.0 1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah	Kota Palopo	3 dokumen	1,126,144	DAU			1,200,000	Kec Wara Selatan
7	1	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Kota Palopo		4,180,649,000	DAU			4,277,714,900	Kec Wara Selatan
7	1	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Yang Mendapatkan Gaji dan Tunjangan	Kota Palopo	54 orang	4,122,000,000	DAU			4,213,570,000	Kec Wara Selatan
7	1	1	2.0 2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Pertanggungjawaban yang diverifikasi	Kota Palopo	12 Laporan	56,449,000	DAU			61,644,900	Kec Wara Selatan
7	1	1	2.0 2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan, Semesteran, dan Tahunan yang disusun	Kota Palopo	18 laporan	2,200,000	DAU			2,500,000	Kec Wara Selatan

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB	
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Kota Palopo		17,124,856	DAU			17,550,000	Kec Wara Selatan
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian Dinas yang diadakan	Kota Palopo	17 Pasang	17,124,856	DAU			17,550,000	Kec Wara Selatan
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Kota Palopo		41,400,000	DAU			45,450,000	Kec Wara Selatan
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik yang dibutuhkan	Kota Palopo	20 Buah	3,000,000	DAU			3,250,000	Kec Wara Selatan
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Kota Palopo	131 buah	3,000,000	DAU			3,200,000	Kec Wara Selatan
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan yang dibiayai	Kota Palopo	21 Buah	2,500,000	DAU			2,600,000	Kec Wara Selatan
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan Bacaan yang dibiayai	Kota Palopo	2 terbitan	2,400,000	DAU			2,400,000	Kec Wara Selatan
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang difasilitasi	Kota Palopo	800 orang	16,500,000	DAU			17,000,000	Kec Wara Selatan
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SPPD yang dilaksanakan	Kota Palopo	10 SDPP	14,000,000	DAU			17,000,000	Kec Wara Selatan
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kota Palopo		91,000,000	DAU			93,361,350	Kec Wara Selatan
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk Surat Keluar, ATK, Cetak dan Penggandaan	Kota Palopo	700 Surat	7,000,000	DAU			7,500,000	Kec Wara Selatan
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Air, Listrik, dan Internet yang dibiayai	Kota Palopo	5 Rekening	17,000,000	DAU			17,661,350	Kec Wara Selatan
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Kota Palopo	3 Kegiatan	3,000,000	DAU			3,200,000	Kec Wara Selatan
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Layanan Kantor yang dilaksanakan	Kota Palopo	9 Layanan	64,000,000	DAU			65,000,000	Kec Wara Selatan
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kota Palopo		56,500,000	DAU			62,200,000	Kec Wara Selatan
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang Pemeliharaannya dibiayai	Kota Palopo	1 Unit	18,000,000	DAU			21,500,000	Kec Wara Selatan
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Pemeliharaan Pajak dan Perizinan yang dibiayai	Kota Palopo	16 Unit	10,000,000	DAU			11,500,000	Kec Wara Selatan
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dibiayai	Kota Palopo	12 Unit	3,500,000	DAU			3,700,000	Kec Wara Selatan
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah dan luas Gedung Kantor yang dipelihara	Kota Palopo	1 Unit	25,000,000	DAU			25,500,000	Kec Wara Selatan
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Kota Palopo		440,750,000	DAU			451,768,750	Kec Wara Selatan
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak		Kota Palopo		428,150,000	DAU			439,168,750	Kec Wara Selatan

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB	
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
					Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan									
7	1	2	2.0 2	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Jenis Layanan diLaksanakan	Kota Palopo	14 Layanan	428,150,000	DAU			439,168,750	Kec Wara Selatan
7	1	2	2.0 4		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Kota Palopo		12,600,000	DAU			12,600,000	Kec Wara Selatan
7	1	2	2.0 4	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Surat Keterangan Izin non Usaha Yang di Keluarkan	Kota Palopo	1 Jenis	4,200,000	DAU			4,200,000	Kec Wara Selatan
7	1	2	2.0 4	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Surat Keterangan Non Perizinan Yang di Keluarkan (Lembar)	Kota Palopo	4 lembar	8,400,000	DAU			8,400,000	Kec Wara Selatan
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Kota Palopo		370,537,500	DAU			379,800,938	Kec Wara Selatan
7	1	3	2.0 2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Kota Palopo		370,537,500	DAU			379,800,938	Kec Wara Selatan
7	1	3	2.0 2	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dalam Kegiatan Musrenbang	Kota Palopo	50 Orang	8,400,000	DAU			8,400,000	Kec Wara Selatan
7	1	3	2.0 2	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah kegiatan Pembangunan sarana di Kelurahan	Kota Palopo	5 Kegiatan	357,937,500	DAU			367,200,938	Kec Wara Selatan
7	1	3	2.0 2	4	Evaluasi Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dievaluasi (kel/tahun)	Kota Palopo	4 kelurahan	4,200,000	DAU			4,200,000	Kec Wara Selatan
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Kota Palopo		24,600,000	DAU			25,215,000	Kec Wara Selatan
7	1	4	2.0 1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Kota Palopo		24,600,000	DAU			25,215,000	Kec Wara Selatan
7	1	4	2.0 1	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Petugas Babinasa/Babinkamtibmas	Kota Palopo	10 Orang	24,600,000	DAU			25,215,000	Kec Wara Selatan
					KECAMATAN WARA BARAT				5,744,901,550				5,888,524,089	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Kota Palopo		4,370,600,000	DAU			4,479,865,000	Kec Wara Barat
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kota Palopo		5,600,000	DAU			6,300,000	Kec Wara Barat
7	1	1	2.0 1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA dan DPA perangkat daerah	Kota Palopo	3 Dokumen	2,800,000	DAU			3,300,000	Kec Wara Barat
7	1	1	2.0 1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palopo	7 Dokumen	2,800,000	DAU			3,000,000	Kec Wara Barat

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB	
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Kota Palopo		4,133,733,250	DAU			4,223,365,000	Kec Wara Barat
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	Kota Palopo	56 orang	4,080,933,250	DAU			4,169,265,000	Kec Wara Barat
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan pertanggung jawaban yang diverifikasi	Kota Palopo	12 Laporan	46,800,000	DAU			46,800,000	Kec Wara Barat
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan Akhir Tahun Yang dibuat	Kota Palopo	12 Laporan	3,000,000	DAU			3,000,000	Kec Wara Barat
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan yang disusun	Kota Palopo	12 Laporan	3,000,000	DAU			4,300,000	Kec Wara Barat
7	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Kota Palopo		12,600,000	DAU			12,600,000	Kec Wara Barat
7	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Pengelolaan Aset	Kota Palopo	12 Laporan	12,600,000	DAU			12,600,000	Kec Wara Barat
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Kota Palopo		41,000,000	DAU			42,000,000	Kec Wara Barat
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian dinas yang diadakan	Kota Palopo	28 orang/stell	29,400,000	DAU			29,400,000	Kec Wara Barat
7	1	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah ASN yang memperoleh pelayanan Kepegawaiantepat waktu	Kota Palopo	2 orang	11,600,000	DAU			12,600,000	Kec Wara Barat
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Kota Palopo		47,700,000	DAU			51,900,000	Kec Wara Barat
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang diadakan	Kota Palopo	50 buah	2,300,000	DAU			3,000,000	Kec Wara Barat
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Kota Palopo	5 buah	3,500,000	DAU			4,000,000	Kec Wara Barat
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	Kota Palopo	1 unit	2,500,000	DAU			2,500,000	Kec Wara Barat
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang dibiayai	Kota Palopo	2 eksemplar	2,400,000	DAU			2,400,000	Kec Wara Barat
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	Kota Palopo	250 orang	12,000,000	DAU			15,000,000	Kec Wara Barat
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SPPD yang dilaksanakan	Kota Palopo	6 kali	25,000,000	DAU			25,000,000	Kec Wara Barat
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Kota Palopo		30,000,000	DAU			36,000,000	Kec Wara Barat
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jenis dan jumlah meubel yang diadakan	Kota Palopo	5 Unt	12,000,000	DAU			18,000,000	Kec Wara Barat
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis dan jumlah peralatan dan mesin yang disediakan	Kota Palopo	2 unit	18,000,000	DAU			18,000,000	Kec Wara Barat
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kota Palopo		70,066,750	DAU			76,800,000	Kec Wara Barat
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah ATK,Cetak,dan Penggandaan	Kota Palopo	4000 surat	34,126,750	DAU			36,700,000	Kec Wara Barat
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Dava Air dan Listrik	Jumlah tagihan air,listrik dan internet	Kota Palopo	4 rekening	18,700,000	DAU			20,000,000	Kec Wara Barat

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB	
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan kantor yang disediakan	Kota Palopo	2 layanan	17,240,000	DAU			20,100,000	Kec Wara Barat
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kota Palopo		29,900,000	DAU			30,900,000	Kec Wara Barat
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas	Kota Palopo	4 unit	22,900,000	DAU			23,400,000	Kec Wara Barat
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dibiayai	Kota Palopo	10 unit	3,000,000	DAU			3,500,000	Kec Wara Barat
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor yang di pelihara	Kota Palopo	1 unit	4,000,000	DAU			4,000,000	Kec Wara Barat
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Kota Palopo		584,352,500	DAU			598,961,313	Kec Wara Barat
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Kota Palopo		12,000,000	DAU			12,000,000	Kec Wara Barat
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah biaya operasional,jumlah ATK,makan minum kegiatan,belanja jasa	Kota Palopo	12 Laporan	12,000,000	DAU			12,000,000	Kec Wara Barat
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Kota Palopo		560,352,500	DAU			574,961,313	Kec Wara Barat
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Layanan Operasional kelurahan	Kota Palopo	5 Jenis	560,352,500	DAU			574,961,313	Kec Wara Barat
7	1	2	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		Kota Palopo		12,000,000	DAU			12,000,000	Kec Wara Barat
7	1	2	2.03	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kota Palopo	12 Laporan	12,000,000	DAU			12,000,000	Kec Wara Barat
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Kota Palopo		748,129,050	DAU			766,832,276	Kec Wara Barat
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Kota Palopo		748,129,050	DAU			766,832,276	Kec Wara Barat
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah warga yang hadir	Kota Palopo	250 orang	12,000,000	DAU			12,000,000	Kec Wara Barat
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun	Kota Palopo	5 Kelurahan	724,129,050	DAU			742,832,276	Kec Wara Barat

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB	
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kelompok masyarakat yang dilayani	Kota Palopo	5 kelompok	12,000,000	DAU			12,000,000	Kec Wara Barat
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Kota Palopo		41,820,000	DAU			42,865,500	Kec Wara Barat
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Kota Palopo		41,820,000	DAU			42,865,500	Kec Wara Barat
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan rapat koordinasi yang diselenggarakan	Kota Palopo	12 orang	41,820,000	DAU			42,865,500	Kec Wara Barat
					KECAMATAN WARU TIMUR				7,652,866,788				7,844,188,457	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palopo	100%	6,324,250,000	DAU		100%	6,482,356,250	Kec Wara Timur
7	1	1	2.01		Perencanaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Kota Palopo	2 Dok	6,000,000	DAU		2 Dok	7,000,000	Kec Wara Timur
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kota Palopo	2 Dok	3,000,000	DAU		2 Dok	3,500,000	Kec Wara Timur
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Palopo	2 Lap	3,000,000	DAU		2 Lap	3,500,000	Kec Wara Timur
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Keuangan	Kota Palopo	12 Laporan	5,860,150,000	DAU		12 Laporan	5,984,356,250	Kec Wara Timur
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	Kota Palopo	82 Orng	5,805,150,000	DAU		82 Orng	5,922,356,250	Kec Wara Timur
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan pertanggung jawaban yang diverifikasi	Kota Palopo	8 Lap Pertanggung Jawaban	25,000,000	DAU		8 Lap Pertanggung Jawaban	30,000,000	Kec Wara Timur
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan bulanan, Semesteran dan Tahunan yang disusun	Kota Palopo	5 Lap	3,000,000	DAU		5 Lap	3,500,000	Kec Wara Timur
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan bulanan, Semesteran yang disusun	Kota Palopo	3 Lap Keu	27,000,000	DAU		3 Lap Keu	28,500,000	Kec Wara Timur
7	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan pengelolaan aset	Kota Palopo	1 Laporan	17,000,000	DAU		1 Laporan	20,000,000	Kec Wara Timur
7	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah aset yang ditata kelolakan	Kota Palopo	43 Unit	17,000,000	DAU		43 Unit	20,000,000	Kec Wara Timur
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi ASN PD yang dikelola	Kota Palopo	82 Orng	36,000,000	DAU		82 Orng	40,000,000	Kec Wara Timur
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	Kota Palopo	82 Orng	36,000,000	DAU		82 Orng	40,000,000	Kec Wara Timur
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan administrasi umum yang ditata kelola	Kota Palopo	7 Jenis	88,600,000	DAU		7 Jenis	114,500,000	Kec Wara Timur

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB	
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik yang diadakan	Kota Palopo	56 Buah	20,000,000	DAU		56 Buah	25,000,000	Kec Wara Timur
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan gedung kantor	Kota Palopo	58 Buah	3,000,000	DAU		58 Buah	4,000,000	Kec Wara Timur
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik yang dibutuhkan	Kota Palopo	15 Jenis	22,000,000	DAU		15 Jenis	26,500,000	Kec Wara Timur
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Langganan Koran/Majalah	Kota Palopo	3 Exsampler	3,600,000	DAU		3 Exsampler	4,000,000	Kec Wara Timur
7	1	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jenis Bahan Material yang diadakan	Kota Palopo	15 Jenis	15,000,000	DAU		15 Jenis	20,000,000	Kec Wara Timur
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Tamu	Jumlah Tamu yang difasilitasi	Kota Palopo	250 Orng	10,000,000	DAU		250 Orng	15,000,000	Kec Wara Timur
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SPPD yang Diadakan	Kota Palopo	5 SPPD	15,000,000	DAU		5 SPPD	20,000,000	Kec Wara Timur
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	Kota Palopo	10 Unit	40,000,000	DAU		10 Unit	40,000,000	Kec Wara Timur
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jenis dan Jumlah mebel yang diadakan	Kota Palopo	5 Unut	10,000,000	DAU		5 Unut	10,000,000	Kec Wara Timur
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya	Jenis dan Jumlah peralatan dan Mesin yang disediakan	Kota Palopo	5 unut	30,000,000	DAU		5 unut	30,000,000	Kec Wara Timur
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai	Kota Palopo	3 Jenis	224,000,000	DAU		3 Jenis	224,000,000	Kec Wara Timur
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk, surat keluar, atk, cetak dan Penggandaan	Kota Palopo	2500 Surat	20,000,000	DAU		2500 Surat	20,000,000	Kec Wara Timur
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	Jumlah Rekening Air, Listrik dan Inter net yang dibiayai	Kota Palopo	9 Rek	60,000,000	DAU		9 Rek	60,000,000	Kec Wara Timur
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Layanan Kantor yang dilaksanakan	Kota Palopo	6 Layanan	144,000,000	DAU		6 Layanan	144,000,000	Kec Wara Timur
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang pemeliharaannya dibiayai	Kota Palopo	77 Jenis	52,500,000	DAU		77 Jenis	52,500,000	Kec Wara Timur
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	Kota Palopo	18 Unit	12,500,000	DAU		18 Unit	12,500,000	Kec Wara Timur
7	1	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang pemeliharaannya dibiayai	Kota Palopo	48 Unit	5,000,000	DAU		48 Unit	5,000,000	Kec Wara Timur
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dibiayai	Kota Palopo	24 Unit	5,000,000	DAU		24 Unit	5,000,000	Kec Wara Timur
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan /Rehab Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah dan Luas Gedung Kantor yang dibiayai	Kota Palopo	1 Unit	30,000,000	DAU		1 Unit	30,000,000	Kec Wara Timur
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rata-Rata Tingkat Penyelesaian Pengaduan Masyarakat dan Layanan yang Diselesaikan Tepat Waktu (%)	Kota Palopo	100%	694,950,000	DAU		100%	712,323,750	Kec Wara Timur

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB	
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Jumlah Layanan Urusan yang Diselenggarakan	Kota Palopo	7 Layanan	694,450,000	DAU		7 Layanan	711,823,750	Kec Wara Timur
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Jenis layanan yang Dilaksanakan	Kota Palopo	7 Jenis Layanan	694,450,000	DAU		7 Jenis Layanan	711,823,750	Kec Wara Timur
7	1	2	2.04		Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Jumlah Jenis Layanan yang Diproses Tepat Waktu	Kota Palopo	500 Lembar	500,000	DAU		500 Lembar	500,000	Kec Wara Timur
7	1	2	2.04	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinzn Non Usaha	Jumlah Surat keterangan izin non usaha yang dikeluarkan	Kota Palopo	250 Lembar	250,000	DAU		250 Lembar	250,000	Kec Wara Timur
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Surat Keterangan Nonperizinzn yang dikeluarkan	Kota Palopo	250 Lember	250,000	DAU		250 Lembar	250,000	Kec Wara Timur
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kecamatan yang kelurahannya Melaksanakan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Kota Palopo	100%	564,171,788	DAU		100%	578,276,082	Kec Wara Timur
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang meleksanakan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Kota Palopo	7 Kelurahan	564,171,788	DAU		7 Kelurahan	578,276,082	Kec Wara Timur
7	1	3	2.02	1	Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah dalam perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Warga/Peserta yang hadir dalam Musrembang	Kota Palopo	350 Orng	34,760,000	DAU		350 Orng	48,864,294	Kec Wara Timur
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah warga yang terdampak pembangunan sarana/prasarana kelurahan	Kota Palopo	3 Kelurahan	529,411,788	DAU		3 Kelurahan	529,411,788	Kec Wara Timur
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kelurahan yang bebas konflik sosial	Kota Palopo	100%	69,495,000	DAU		100%	71,232,375	Kec Wara Timur
7	1	4	2.03		Koordinasi Upayah Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Aparat Ketertiban dan Keamanan	Kota Palopo	16 Orng	69,495,000	DAU			71,232,375	Kec Wara Timur
7	1	4	2.03	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Petugas Babinsa dan Babinkamtibmas	Kota Palopo	16 Orng	69,495,000	DAU		16 Orng	71,232,375	Kec Wara Timur
					KECAMATAN MUNGKAJANG				5,061,216,300				5,187,746,708	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Kota Palopo		3,855,025,000	DAU			3,951,400,625	Kec Mungkajang
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kota Palopo		1,350,000	DAU			1,558,000	Kec Mungkajang
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra, renja, RKA dan DPA Perangkat Daerah	Kota Palopo	7 Dokumen	700,000	DAU			808,000	Kec Mungkajang

KODE REKENING						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB	
								Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
7	1	1	2.0 1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Palopo	3 Dokumen	650,000	DAU			750,000	Kec Mungkajang	
7	1	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Kota Palopo		3,575,788,000	DAU			3,663,540,625	Kec Mungkajang	
7	1	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	Kota Palopo	75 Orang	3,552,028,000	DAU			3,639,120,625	Kec Mungkajang	
7	1	1	2.0 2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan pertanggung jawaban yang diverifikasi	Kota Palopo	2 laporan	22,500,000	DAU			23,000,000	Kec Mungkajang	
7	1	1	2.0 2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan,semesteran dan tahunan yang di susun	Kota Palopo	5 Laporan	660,000	DAU			720,000	Kec Mungkajang	
7	1	1	2.0 2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan, Triwulan dan semesteran yang disusun	Kota Palopo	2 Laporan	600,000	DAU			700,000	Kec Mungkajang	
7	1	1	2.0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Kota Palopo		14,500,000	DAU			15,000,000	Kec Mungkajang	
7	1	1	2.0 3	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Aset yang ditatakelolakan	Kota Palopo	12 Unit	14,500,000	DAU			15,000,000	Kec Mungkajang	
7	1	1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Kota Palopo		47,950,000	DAU			49,000,000	Kec Mungkajang	
7	1	1	2.0 5	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	Kota Palopo	75 Orang	47,950,000	DAU			49,000,000	Kec Mungkajang	
7	1	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Kota Palopo		62,950,000	DAU			63,400,000	Kec Mungkajang	
7	1	1	2.0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalansi Listrik yang diadakan	Kota Palopo	92 Buah	4,550,000	DAU			5,000,000	Kec Mungkajang	
7	1	1	2.0 6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang dibiayai	Kota Palopo	36 Eksamplar	2,400,000	DAU			2,400,000	Kec Mungkajang	
7	1	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SPPD yang dilaksanakan	Kota Palopo	10 SPPD	56,000,000	DAU			56,000,000	Kec Mungkajang	
7	1	1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Kota Palopo		9,350,000	DAU			9,900,000	Kec Mungkajang	
7	1	1	2.0 7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis dan jumlah peralatan dan mesin diadakan	Kota Palopo	1 Unit	9,350,000	DAU			9,900,000	Kec Mungkajang	

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB	
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kota Palopo		90,357,000	DAU			92,452,000	Kec Mungkajang
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk, surat keluar, atk, cetak dan penggandaan	Kota Palopo	1736 Surat	17,952,000	DAU			18,952,000	Kec Mungkajang
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening air, listrik dan internet yang dibiayai	Kota Palopo	3 Rekening	14,000,000	DAU			14,500,000	Kec Mungkajang
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan kantor yang dilaksanakan	Kota Palopo	5 Layanan	58,405,000	DAU			59,000,000	Kec Mungkajang
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kota Palopo		52,780,000	DAU			56,550,000	Kec Mungkajang
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	Kota Palopo	13 Unit	27,000,000	DAU			28,500,000	Kec Mungkajang
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peraltan mesin dan lainnya yang dibiayai	Kota Palopo	19 Unit	4,805,000	DAU			5,550,000	Kec Mungkajang
7	1	1	2.09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah meubel yang pemeliharaannya di biayai	Kota Palopo	21 Unit	2,475,000	DAU			3,000,000	Kec Mungkajang
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah dan luas gedung kantor yang dibiayai	Kota Palopo	1 Gedung	18,500,000	DAU			19,500,000	Kec Mungkajang
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Kota Palopo		451,000,000	DAU			462,275,000	Kec Mungkajang
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Kota Palopo		449,730,000	DAU			460,995,000	Kec Mungkajang
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Jenis Layanan Yang dilaksanakan	Kota Palopo	4 Jenis	449,730,000	DAU			460,995,000	Kec Mungkajang
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Kota Palopo		1,270,000	DAU			1,280,000	Kec Mungkajang
7	1	2	2.04	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah surat keterangan non perizinan yang dikeluarkan (Lembar)	Kota Palopo	50 Lembar	635,000	DAU			640,000	Kec Mungkajang
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah surat keterangan izin non usaha yang dikeluarkan (Lembar)	Kota Palopo	70 Lembar	635,000	DAU			640,000	Kec Mungkajang

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB	
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Kota Palopo		729,945,550	DAU			748,194,189	Kec Mungkajang
7	1	3	2.0	2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Kota Palopo		729,945,550	DAU			748,194,189	Kec Mungkajang
7	1	3	2.0	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah warga/peserta yang hadir dalam musrenbang (Orang/Than)	Kota Palopo	150 Orang	8,300,550	DAU			9,194,189	Kec Mungkajang
7	1	3	2.0	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah warga terdampak pembangunan sarana/prasarana kelurahan (Orang/Tahun)	Kota Palopo	4 Kelurahan	721,645,000	DAU			739,000,000	Kec Mungkajang
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Kota Palopo		25,245,750	DAU			25,876,894	Kec Mungkajang
7	1	4	2.0		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Kota Palopo		25,245,750	DAU			25,876,894	Kec Mungkajang
7	1	4	2.0	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah petugas babinsa dan babikamtibmas	Kota Palopo	10 Orang	25,245,750	DAU			25,876,894	Kec Mungkajang
					KECAMATAN BARA				6,688,137,300				6,855,340,233	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Kota Palopo		5,369,975,000	DAU			5,504,223,875	Kec Bara
7	1	1	2.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kota Palopo		945,000	DAU			2,314,250	Kec Bara
7	1	1	2.0	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Yang di buat	Kota Palopo	7 Dokumen	405,000	DAU			1,093,500	Kec Bara
7	1	1	2.0	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan pertanggung jawaban yang diverifikasi	Kota Palopo	7 Laporan	540,000	DAU			1,220,750	Kec Bara
7	1	1	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Kota Palopo		5,001,086,064	DAU			5,009,877,564	Kec Bara
7	1	1	2.0	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Yang di biyai	Kota Palopo	55 Orang	4,968,106,064	DAU			4,968,106,064	Kec Bara
7	1	1	2.0	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Yang diverifikasi	Kota Palopo	150 Dokumen	32,250,000	DAU			40,312,500	Kec Bara
7	1	1	2.0	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Yang di sajikan	Kota Palopo	1 Laporan	400,000	DAU			650,000	Kec Bara
7	1	1	2.0	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan yang di sajikan	Kota Palopo	1 Laporan	330,000	DAU			809,000	Kec Bara
7	1	1	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Kota Palopo		79,842,883	DAU			128,762,440	Kec Bara
7	1	1	2.0	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen listrik yang di adakan	Kota Palopo	10 Unit	6,662,083	DAU			10,999,450	Kec Bara

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB	
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah langganan Koran / Majalah`	Kota Palopo	2 Eksemplar	3,600,000	DAU			4,800,000	Kec Bara
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan dinas yang di laksanakan	Kota Palopo	12 SPPD	55,180,800	DAU			98,562,990	Kec Bara
7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip dinamis yang di tata	Kota Palopo	1 Laporan	14,400,000	DAU			14,400,000	Kec Bara
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Kota Palopo		6,006,000	DAU			13,213,200	Kec Bara
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlengkapan kantor yang di adakan	Kota Palopo	12 Unit	6,006,000	DAU			13,213,200	Kec Bara
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kota Palopo		211,170,053	DAU			256,808,700	Kec Bara
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Yang Keluar	Kota Palopo	1736 Surat	11,623,150	DAU			16,272,410	Kec Bara
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Langganan Air, Listrik, dan Internet	Kota Palopo	12 Rekening	15,256,436	DAU			20,785,600	Kec Bara
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga administrasi yang di biyai	Kota Palopo	12 Orang	184,290,467	DAU			219,750,690	Kec Bara
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kota Palopo		70,925,000	DAU			93,247,721	Kec Bara
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas yang di biyai	Kota Palopo	18 Unit	39,695,000	DAU			45,700,000	Kec Bara
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah kendaraan dan peralatan mesin kantor yang di pelihara	Kota Palopo	6 Unit	3,250,000	DAU			7,995,500	Kec Bara
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang di pelihara	Kota Palopo	1 Unit	27,980,000	DAU			39,552,221	Kec Bara
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Kota Palopo		560,162,500	DAU			574,166,563	Kec Bara
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Kota Palopo		552,712,500	DAU			562,756,063	Kec Bara
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Jenis layanan yang di laksanakan	Kota Palopo	30 Layanan	552,712,500	DAU			562,756,063	Kec Bara
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Kota Palopo		7,450,000	DAU			11,410,500	Kec Bara
7	1	2	2.04	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah layanan yang terkait dengan Non Perizinan	Kota Palopo	12 Laporan	1,200,000	DAU			2,840,000	Kec Bara
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah surat keterangan izin non usaha yang di Ikeluarkan	Kota Palopo	12 Layanan	6,250,000	DAU			8,570,500	Kec Bara

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB	
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Kota Palopo		731,349,800	DAU			749,633,545	Kec Bara
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Kota Palopo		731,349,800	DAU			749,633,545	Kec Bara
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Masyarakat yang bertasipasi dalam kegiatan Musrenbang	Kota Palopo	50 Orang	11,250,000	DAU			15,858,145	Kec Bara
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah warga terdampak pembangunan sarana/prasarana kelurahan	Kota Palopo	50 Orang	720,099,800				733,775,400	Kec Bara
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Kota Palopo		26,650,000				27,316,250	Kec Bara
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Kota Palopo		26,650,000				27,316,250	Kec Bara
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Polisi Dan TNI Yang Bersinergi		10 Orang	26,650,000				27,316,250	Kec Bara
					KECAMATAN SENDANA				4,854,605,000				4,975,970,125	
7	0	1	0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palopo	1	4,339,850,000	DAU		1	4,448,346,250	Kec Sendana
7	0	1	0	2.01	Perencanaan ,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Kinerja Perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Kota Palopo	1	2,000,000	DAU		1	3,400,000	Kec Sendana
7	0	1	0	2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen renstra, renja, RKA dan DPA Perangkat Daerah yang dibuat	Kota Palopo	7 Dokumen	1,000,000	DAU		7 Dokumen	2,000,000	Kec Sendana
7	0	1	0	2.01	Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Palopo	4 Laporan	1,000,000	DAU		4 Laporan	1,400,000	Kec Sendana
7	0	1	0	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan penata usahaan keuangan yang dibuat	Kota Palopo	1	4,020,279,000	DAU		1	4,106,946,250	Kec Sendana
7	0	1	0	2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang mendapatkan gaji dan Tunjangan yang dibuat	Kota Palopo	60 Pegawai	3,982,379,000	DAU		60 Pegawai	4,067,546,250	Kec Sendana
7	0	1	0	2.01	Pelaksanaan Penata Usahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah ASN yang memverifikasi Keuangan yang dibuat	Kota Palopo	36 Pegawai	35,400,000	DAU		36 Pegawai	35,400,000	Kec Sendana
7	0	1	0	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Lapooran Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Akhit Tahun yang disusun	Kota Palopo	4 Laporan	1,000,000	DAU		4 Laporan	1,500,000	Kec Sendana
7	0	1	0	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan,Bulanan,	Jumlah Laporan Keuangan bulanan, semesteran yang disusun	Kota Palopo	17 Laporan	1,500,000	DAU		17 Laporan	2,500,000	Kec Sendana

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB	
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
					Triwulan,Semesteran SKPD Akhir Tahun SKPD									
7	01	01	2.03		Adminstrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mengelolah Aset	Kota Palopo	1	7,200,000	DAU		1	7,200,000	Kec Sendana
7	01	01	2.03	06	Penata Usahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Pegawai yang menangani aset	Kota Palopo	12 Orang	7,200,000	DAU		12 Orang	7,200,000	Kec Sendana
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN	Kota Palopo	1	46,500,000	DAU		1	10,500,000	Kec Sendana
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah ASN yang mendapatkan Pakaian Dinas	Kota Palopo	21 Orang	11,500,000	DAU		21 Orang	10,500,000	Kec Sendana
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan	Kota Palopo	1 Orang	35,000,000	DAU		1 Orang	40,000,000	Kec Sendana
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum yang dikelola	Kota Palopo	1	53,600,000	DAU		1	58,600,000	Kec Sendana
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan ynag dibiayai	Kota Palopo	36 Eks	3,600,000	DAU		36 Eks	3,600,000	Kec Sendana
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SPPD yang dilaksanakan	Kota Palopo	7 Kali	50,000,000	DAU		7 Kali	55,000,000	Kec Sendana
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang yang diadakan	Kota Palopo	1	15,750,000	DAU		1	4,500,000	Kec Sendana
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	Kota Palopo	2 Buah	4,000,000	DAU		2 Buah	6,500,000	Kec Sendana
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah,Kemputer, Laptop, printer yang diadakan		2 Unit	11,750,000	DAU		2 Unit	25,000,000	Kec Sendana
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah sub kegiatan administrasi yang dikelola	Kota Palopo	1	166,121,000	DAU		1	242,000,000	Kec Sendana
7	1	2	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk, keluar,ATKCetak dan Penggandaan	Kota Palopo	1100 Surat	19,640,000	DAU		1100 Surat	20,500,000	Kec Sendana
7	1	2	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik Wifi	Jumlah rekening	Kota Palopo	36 Rek	15,783,000	DAU		36 Rek	18,500,000	Kec Sendana
7	1	2	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan kantor	Kota Palopo	6 Layanan	130,698,000	DAU		6 Layanan	203,000,000	Kec Sendana
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Peunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang pemeliharaannya dibiayai	Kota Palopo	1	28,400,000	DAU		1	30,200,000	Kec Sendana
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang pemeliharaannya dibiayai	Kota Palopo	1 Unit	3,000,000	DAU		1 Unit	3,500,000	Kec Sendana
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak Kendaraan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	Kota Palopo	3 Unit	900,000	DAU		3 Unit	1,200,000	Kec Sendana
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan mesin lainnya van dibiayai	Kota Palopo	16 Unit	4,500,000	DAU		16 Unit	5,500,000	Kec Sendana

KODE REKENING						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB	
								Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
7	0	1	0	2.0	0	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantordan Banuanan Lainnya	Luas akntor yang dipelihara	Kota Palopo	1 Gedung	20,000,000	DAU		1 Gedung	20,000,000	Kec Sendana
7		1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rata-rata tingkat penyelesaian Pengaduan masyarakat dan Layanan yang diselesaikan tepat waktu (%)	Kota Palopo	1	443,825,000	DAU		1	454,920,625	Kec Sendana
7		1	2			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahandi Tingkat Kecamatan	Jumlah Biaya Operasional Kelurahan	Kota Palopo	1	9,500,000	DAU		1	13,500,000	Kec Sendana
7		1	2			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan penduduk/ jasa Administrasi yang dibiayai	Kota Palopo	12 Laporan	9,500,000	DAU		12 Laporan	13,500,000	Kec Sendana
7	0	1	0	2.0		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat daerah yang ada dikecamatan	Jumlah urusanpemerintahan yang dilaksanakan di Kecamatan	Kota Palopo	1	431,000,000	DAU		1	431,000,000	Kec Sendana
7	0	1	0	2.0	0	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Layanan Urusan yang Diselenggarakan (jenis layanan)	Kota Palopo	12 Kegiatan	431,000,000	DAU		12 Kegiatan	431,000,000	Kec Sendana
7	0	1	0	2.0		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Jumlah layanan perizinan NonUsaha, Non perizinan yang dilaksanakan	Kota Palopo	1	3,325,000	DAU		1	10,420,625	Kec Sendana
7	0	1	0	2.0	0	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan NonUsaha	Jumlah Laporan yang terkait Non Usaha	Kota Palopo	12 Laporan	1,325,000	DAU		12 Laporan	4,920,625	Kec Sendana
7	0	1	0	2.0	0	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Non perizinan	Jumlah Laporan yang terkait Non Perizinan	Kota Palopo	12 Laporan	2,000,000	DAU		12 Laporan	5,500,000	Kec Sendana
7	0	1	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata LPM, PKK,Posyandu yang Aktip	Kota Palopo	1	51,250,000	DAU		1	52,531,250	Kec Sendana
7	0	1	0	2.0		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Partisipai Masyarakat daam Kegiatan Kemasyarakatan	Kota Palopo	1	15,000,000	DAU		1	20,000,000	Kec Sendana
7	0	1	0	2.0		Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawaran Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Musrenbang	Kota Palopo	12 Laporan	15,000,000	DAU		12 Laporan	20,000,000	Kec Sendana
7	0	1	0	2.0		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasaranan Kelurahan	Kota Palopo	0	0	DAU		0	-	Kec Sendana
7	0	1	0	2.0		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase PartisipasiLembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kota Palopo	1	36,250,000	DAU		1	32,531,250	Kec Sendana
7	0	1	0	2.0	0	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Kota Palopo	12	36,250,000	DAU		12	32,531,250	Kec Sendana

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB	
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
7	0	0			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kalurahan yang Bebas Komplit	Kota Palopo	1	19,680,000	DAU		1	20,172,000	Kec Sendana
7	0	0	2.0		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Orang yang dibuat, Laporan Babinsa dan Babinkantibmas	Kota Palopo	1	19,680,000	DAU		1	20,172,000	Kec Sendana
7	0	0	2.0	0	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Petugas Keamanan dan Ketertiban yang dibayar jasanya	Kota Palopo	8 Org	19,680,000	DAU		8 Org	20,172,000	Kec Sendana
					KECAMATAN TELLUWANUA				6,150,410,000				6,304,170,250	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Kota Palopo		5,280,800,000	DAU			5,412,820,000	Kec Telluwanua
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kota Palopo		6,000,000	DAU			8,000,000	Kec Telluwanua
7	1	1	2.0	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra, renja, dpa perangkat daerah	Kota Palopo	6 dokumen	4,000,000	DAU			5,000,000	Kec Telluwanua
7	1	1	2.0	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Palopo	1 Laporan	2,000,000	DAU			3,000,000	Kec Telluwanua
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Kota Palopo		5,027,300,000	DAU			5,118,820,000	Kec Telluwanua
7	1	1	2.0	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	Kota Palopo	68 orang	4,997,800,000	DAU			5,086,820,000	Kec Telluwanua
7	1	1	2.0	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah dokumen yang diverifikasi	Kota Palopo	150 Dokumen	29,500,000	DAU			32,000,000	Kec Telluwanua
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Kota Palopo		500,000	DAU			1,000,000	Kec Telluwanua
7	1	1	2.0	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah ASN yang memperoleh pelayanan tepat waktu	Kota Palopo	15 orang	500,000	DAU			1,000,000	Kec Telluwanua
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Kota Palopo		52,000,000	DAU			68,000,000	Kec Telluwanua
7	1	1	2.0	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang diadakan	Kota Palopo	30 Unit	2,000,000	DAU			4,000,000	Kec Telluwanua
7	1	1	2.0	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Kota Palopo	5 Buah	3,000,000	DAU			7,000,000	Kec Telluwanua

KODE REKENING						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							OPD PENANGGUNG JAWAB
								Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
7	1	1	2.06	3		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang di sediakan	Kota Palopo	5 Unit	2,000,000	DAU			4,000,000	Kec Telluwanua
7	1	1	2.06	6		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang digunakan	Kota Palopo	4 eksamplar	5,000,000	DAU			6,000,000	Kec Telluwanua
7	1	1	2.06	9		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan	Kota Palopo	22 SPPD	40,000,000	DAU			47,000,000	Kec Telluwanua
7	1	1	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Kota Palopo		15,000,000	DAU			25,000,000	Kec Telluwanua
7	1	1	2.07	6		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan	Kota Palopo	2 Unit	15,000,000	DAU			25,000,000	Kec Telluwanua
7	1	1	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kota Palopo		144,000,000	DAU			149,000,000	Kec Telluwanua
7	1	1	2.08	1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar	Kota Palopo	1200 Surat	33,000,000	DAU			35,000,000	Kec Telluwanua
7	1	1	2.08	2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah langganana, listrik dan internet yang dibiayai	Kota Palopo	3 rekening	21,000,000	DAU			22,000,000	Kec Telluwanua
7	1	1	2.08	4		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan kantor yang dilaksanakan	Kota Palopo	5 Layanan	90,000,000	DAU			92,000,000	Kec Telluwanua
7	1	1	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kota Palopo		36,000,000	DAU			43,000,000	Kec Telluwanua
7	1	1	2.09	1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan yang pajaknya dibiayai	Kota Palopo	2 unit	21,000,000	DAU			23,000,000	Kec Telluwanua
7	1	1	2.09	6		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan	Kota Palopo	3 Unit	5,000,000	DAU			7,000,000	Kec Telluwanua
7	1	1	2.09	9		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	Kota Palopo	669 m2	10,000,000	DAU			13,000,000	Kec Telluwanua
7	1	2				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Kota Palopo		766,700,000	DAU			785,867,500	Kec Telluwanua
7	1	2	2.02			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Kota Palopo		766,700,000	DAU			785,867,500	Kec Telluwanua

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB	
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
7	1	2	2.0 2	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah jenis layanan yang dilaksanakan	Kota Palopo	120 Layanan	766,700,000	DAU			785,867,500	Kec Telluwanua
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Kota Palopo		51,250,000	DAU			52,531,250	Kec Telluwanua
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Kota Palopo		51,250,000	DAU			52,531,250	Kec Telluwanua
7	1	3	2.0 2	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah warga yang hadir dalam musrenbang	Kota Palopo	50 Orang	14,000,000	DAU			14,000,000	Kec Telluwanua
7	1	3	2.0 2	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	JumlahJumlah kelurahan berdampak pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Kota Palopo	7 Kelurahan	37,250,000	DAU			38,531,250	Kec Telluwanua
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Kota Palopo		51,660,000	DAU			52,951,500	Kec Telluwanua
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Kota Palopo		51,660,000	DAU			52,951,500	Kec Telluwanua
7	1	4	2.0 1	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah petugas babinsa dan babinkamtibmas	Kota Palopo	16 orang	51,660,000	DAU			52,951,500	Kec Telluwanua
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				6,106,859,973				6,259,529,094	
					KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				6,106,859,973				6,259,529,094	
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				6,106,859,973				6,259,529,094	
8	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palopo	1	2,997,657,000	DAU		1	3,072,598,425	Bakesbangpol
8	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Kota Palopo	Dok	12,000,000	DAU		Dok	14,150,000	Bakesbangpol
8	1	1	2.0 1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra, renja, RKA dan DPA yang disusun	Kota Palopo	4 Dok	1,000,000	DAU		4 Dok	1,150,000	Bakesbangpol
8	1	1	2.0 1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Palopo	6 Lap	11,000,000	DAU		6 Lap	13,000,000	Bakesbangpol
8	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Keuangan	Kota Palopo	Lap	2,622,122,000	DAU		Lap	2,624,622,000	Bakesbangpol
8	1	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan Tujangan	Kota Palopo	29 Org	2,574,922,000	DAU		29 Org	2,574,922,000	Bakesbangpol
8	1	1	2.0 2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan pertanggungjawaban yang diverifikasi	Kota Palopo	12 Lpj	46,200,000	DAU		12 Lpj	48,200,000	Bakesbangpol

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB	
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
8	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan, bulanan, triwulan dan semesteran yang disusun	Kota Palopo	18 Lap. Keu.	1,000,000	DAU		18 Lap. Keu.	1,500,000	Bakesban gpol
8	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelolaan aset	Kota Palopo	Lap	7,200,000	DAU		Lap	7,200,000	Bakesban gpol
8	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah aset yang ditatakelolakan	Kota Palopo	119 Unit	7,200,000	DAU		119 Unit	7,200,000	Bakesban gpol
8	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi ASN PD yang dikelola	Kota Palopo	29 Org	23,200,000	DAU		29 Org	24,000,000	Bakesban gpol
8	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	Kota Palopo	29 Org	23,200,000	DAU		29 Org	24,000,000	Bakesban gpol
8	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan	Kota Palopo	3 Jenis	107,900,000	DAU		3 Jenis	128,160,000	Bakesban gpol
8	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang diadakan	Kota Palopo	10 Buah	1,500,000	DAU		10 Buah	1,500,000	Bakesban gpol
8	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang dibiayai	Kota Palopo	24 Examp	4,800,000	DAU		24 Examp	5,000,000	Bakesban gpol
8	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat/Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SPPD yang dilaksanakan	Kota Palopo	50 SPPD	101,600,000	DAU		50 SPPD	121,660,000	Bakesban gpol
8	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	Kota Palopo	3 Jenis/ Unit	29,195,300	DAU		3 Jenis/ Unit	41,861,000	Bakesban gpol
8	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis dan Jumlah peralatan dan mesin yang disediakan	Kota Palopo	3 Jenis/ Unit	29,195,300	DAU		3 Jenis/ Unit	41,861,000	Bakesban gpol
8	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai	Kota Palopo	3 Jenis/ Unit	163,135,600	DAU		3 Jenis/ Unit	189,729,925	Bakesban gpol
8	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk, surat keluar, atk, cetak dan penggandaan	Kota Palopo	1200 Surat/ Jenis/ Buah	19,328,000	DAU		1200 Surat/ Jenis/ Buah	23,479,925	Bakesban gpol
8	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening air, listrik dan internet yang dibiayai	Kota Palopo	3 Rek.	57,957,600	DAU		3 Rek.	59,750,000	Bakesban gpol
8	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan kantor yang dilaksanakan	Kota Palopo	1 Jml Jenis Layanan	85,850,000	DAU		1 Jml Jenis Layanan	106,500,000	Bakesban gpol
8	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang pemeliharaannya dibiayai	Kota Palopo	19 Unit	32,904,100	DAU		19 Unit	42,875,500	Bakesban gpol
8	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan PajakKendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	Kota Palopo	2 Unit	13,128,800	DAU		2 Unit	15,550,000	Bakesban gpol
8	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang pemeliharaan dan pajaknya	Kota Palopo	5 Unit	12,775,300	DAU		5 Unit	14,775,500	Bakesban gpol
8	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dibiayai	Kota Palopo	12 Buah	7,000,000	DAU		12 Buah	12,550,000	Bakesban gpol

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB	
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
8	1	2			PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kota Palopo	100 %	115,620,000	DAU		100%	118,510,500	Bakesban gpol
8	1	2	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Etnis yang berpartisipasi dalam pemantapan bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kota Palopo	23 Etnis	115,620,000	DAU		23 Etnis	118,510,500	Bakesban gpol
8	1	2	2.01	3	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan (kali /tahun)	Kota Palopo	12 Kali	26,200,000	DAU		12 Kali	27,140,000	Bakesban gpol
8	1	2	2.01	4	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Pelaporan	Kota Palopo	4 Kali	20,200,000	DAU		4 Kali	20,998,800	Bakesban gpol
8	1	2	2.01	5	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Pertemuan antar etnis yang dilaksakan setahun	Kota Palopo	4 Kali	69,220,000	DAU		4 Kali	70,371,700	Bakesban gpol
8	1	3			PROGRAM Peningkatan PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Cakupan Lembaga atau Organisasi yang Mendapatkan Pendidikan Politik	Kota Palopo	1	976,714,802	DAU		1	1,001,132,672	Bakesban gpol
8	1	3	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik Daerah	Jumlah Partai Politik yang mendapatkan Pembinaan	Kota Palopo	10 Parpol	976,714,802	DAU		10 Parpol	1,001,132,672	Bakesban gpol
8	1	3	2.01	1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan parpol, Pemilu/Pemilukada serta Pemantauan Situasi Politik Daerah	Jumlah Laporan program yang disusun	Kota Palopo	1 Lap	22,425,000	DAU		1 Lap	23,396,200	Bakesban gpol

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB	
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
8	1	3	2.01	2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Parpol, Pemilu/Pemilukada serta Pemantauan Situasi Politik Daerah	Jumlah Partai Politik yang menerima Bimtek	Kota Palopo	10 Parpol	38,639,800	DAU		10 Parpol	42,593,182	Bakesban gpol
8	1	3	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Parpol, Pemilu/Pemilukada serta Pemantauan Situasi Politik Daerah	Jumlah Peserta Sosialisasi	Kota Palopo	35 Org	876,100,002	DAU		35 Org	879,693,290	Bakesban gpol
8	1	3	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan serta Pemantauan situasi Politik dalam wilayah Kota Palopo	Jumlah Laporan Monev tentang situasi politik	Kota Palopo	4 Lap	39,550,000	DAU		4 Lap	55,450,000	Bakesban gpol
8	1	4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Angka Pertumbuhan Organisasi Kemasyarakatan yang Terdaftar	Kota Palopo	1	1,358,125,000	DAU		1	1,392,078,125	Bakesban gpol
8	1	4	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan danPengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah organisasi masyarakat binaan yang aktif	Kota Palopo	114 ormas	1,358,125,000	DAU		114 ormas	1,392,078,125	Bakesban gpol
8	1	4	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jurmlah organisasi masyarakat yang dibina	Kota Palopo	7 Ormas	1,286,201,900	DAU		7 Ormas	1,319,158,125	Bakesban gpol
8	1	4	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Monitoring Evaluasi yang dilaksanakan	Kota Palopo	4 Kali	71,923,100	DAU		4 Kali	72,920,000	Bakesban gpol
8	1	5			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Cakupan Keluarga Miskin yang Mendapatkan Edukasi (%)	Kota Palopo	1	134,443,100	DAU		1	137,804,178	Bakesban gpol
8	1	5	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi,Sosial dan Budaya	Jumlah Kebijakan Teknis Bidang Ketahanan Ekonomi yang disusun	Kota Palopo		134,443,100	DAU			137,804,178	Bakesban gpol
8	1	5	2.01	1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Rumusan Program kegiatan yang tersusun	Kota Palopo	4 Lap	10,520,000	DAU		4 Lap	26,282,178	Bakesban gpol

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB	
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
8	1	5	2.01	2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi Forum Kerukunan Umat Beragama yang terlaksana	Kota Palopo	3 Kali	73,200,000	DAU		3 Kali	76,162,000	Bakesban gpol
8	1	5	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Pemantauan dan Fasilitas masalah Aktual Ekonomi	Kota Palopo	12 Kali	50,723,100	DAU		12 Kali	35,360,000	Bakesban gpol
8	1	6			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Wilayah Rawan Konflik yang Dibina (%)	Kota Palopo	1	524,300,071	DAU		1	537,405,194	Bakesban gpol
8	1	6	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Kelurahan Rawan Konflik yang dibina	Kota Palopo	5 Kelurahan	524,300,071	DAU		5 Kelurahan	537,405,194	Bakesban gpol
8	1	6	2.01	1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Nasional	Kota Palopo	2 Kali	10,127,071	DAU		2 Kali	10,625,094	Bakesban gpol
8	1	6	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Penanganan Konflik Sosial dalam Kehidupan Bermasyarakat	Kota Palopo	4 Keg	23,680,000	DAU		4 Keg	25,864,000	Bakesban gpol
8	1	6	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi FKDD	Kota Palopo	12 Kali	467,380,000	DAU		12 Kali	474,647,600	Bakesban gpol
8	1	6	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi FKDM	Kota Palopo	4 Kali	23,113,000	DAU		4 Kali	26,268,500	Bakesban gpol

KODE REKENING					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						OPD PENANGGUNG JAWAB	
							Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
					Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah									

BAB. VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Dalam upaya mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan akuntabel dan berorientasi pada hasil, maka ditetapkan sejumlah indikator kinerja daerah beserta target kinerja yang akan dicapai pada waktu tertentu. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran keberhasilan pencapaian target dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah, yang ditetapkan dalam wujud Indikator Kinerja Utama (IKU), indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK). Berikut adalah Indikator Kinerja Pemerintah Kota Palopo Tahun 2022.

6.1. Indikator Makro Pembangunan

Penyusunan RKPD 2022 Kota Palopo diarahkan pada pencapaian sejumlah indikator makro pembangunan daerah. Berikut adalah indikator dan target indikator makro pembangunan daerah di Kota Palopo tahun 2022.

Tabel 6.1
Capaian, Proyeksi dan Target Indikator Makro Pembangunan
Kota Palopo 2022

Indikator Kinerja Makro	Capaian 2020	Proyeksi 2021	Target Kinerja 2022
Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	78.06	78.4	78.82
Persentase Penduduk Miskin (%)	7.85	6.57	6.28
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	10.37	9.03	8.55
Pertumbuhan Ekonomi (%)	0.45	4.16	4.68
PDRB per Kapita (Juta/Kapita/Thn) (ADHB)	42.61	42	43
Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio/Poin)	0.354	0.335	0.333
Inflasi	1.21	2.5	2.4

6.2 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Palopo adalah indikator kinerja yang ditetapkan sesuai tujuan dan sasaran pembangunan Kota Palopo yang akan menjadi ukuran keberhasilan penyelesaian permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah. Berikut adalah capaian, proyeksi dan target kinerja IKU Kota Palopo:

Tabel 6.2
Capaian, Proyeksi dan Target Indikator Kinerja Utama
(IKU) Kota Palopo 2022

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2020	Proyeksi 2021	Target Kinerja 2022
1	Indeks Pembangunan Manusia (Point)	78.06	78.4	78.82
2	Indeks Pendidikan (Poin)	77.76	78.37	78.48
3	Indeks Kesehatan (poin)	78.28	78.21	78.58
4	Persentase Penduduk Miskin (%)	7.85	6.57	6.28
5	PDRB per Kapita (Juta/Kapita/Thn) (ADHB)	42.61	42	43
6	Indeks Daya Saing Infrastruktur (Angka)	85.88	85.9	86.20
7	Persentase Areal Kawasan Kumuh (%)	0.02	1.61	1.57
8	Indeks Layanan Jalan (Poin)	67.09	67.95	68.15
9	Luas Kawasan Terdampak Banjir (Ha)	54.95	10	7
10	Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau Publik	76.95	79.98	80
11	Indeks Reformasi Birokrasi (Nilai)	50.33	65	70
12	Nilai Akuntabilitas Pemerintahan Daerah (Nilai)	60.03 (B)	70 (BB)	75 (BB)

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2020	Proyeksi 2021	Target Kinerja 2022
13	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik (Point)	83.06	84	85
14	Pertumbuhan Ekonomi (%)	0.45	4.16	4.68
15	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	10.37	9.03	8.55
16	Produktifitas Total Daerah (Juta/Tenaga Kerja/Tahun)	94.39	104.13	109.94
17	Total Kontribusi PAD Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Terhadap PAD (%)	2.28	8.78	9.8
18	Kontribusi PAD Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (%)	0.02	5	6
19	Kontribusi PAD Ekonomi Kreatif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (%)	2.26	3.78	3.8

6.3 Indikator Kinerja Kunci

Selain menetapkan target indikator kinerja utama, juga ditetapkan sejumlah target kinerja pada indikator penyelenggaraan urusan (indikator kinerja kunci) pada tahun 2022, yang merujuk pada Permendagri 86 Tahun 2017 dan Permendagri 18 Tahun 2020, dengan capaian, proyeksi dan target indikator kinerja berikut :

Tabel 6.3
Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Pemerintah Kota Palopo Tahun 2022

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Realisasi 2020	Proyeksi 2021	Target 2022
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi				
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian				
1	Pertumbuhan PDRB (%/Tahun)	0.45	4.16	4.68
2	Laju inflasi (%/Tahun)	1.21	2.5	2.4
3	PDRB per kapita (Juta/Tahun)	42.61	42	43
4	Paritas Daya Beli (Ribu/Tahun)	12,995	13048	13320
5	Indeks Gini (Angka)	0.354	0.335	0.333
6	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan (%)	92.15	93.43	93.72
7	Persentase Penduduk Miskin (%)	7.85*	6.57	6.28
8	Perkembangan Garis Kemiskinan Kota Palopo (Rp/Kapita/Bulan)	362,859	362850	363423
9	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	14,710	14532	14241
10	Proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari USD 1,00 (PPP) per kapita per hari (%)	7.85	6.57	6.28
	Indeks Kedalaman Kemiskinan	0.95	1.2	1.19
	Indeks Keparahan Kemiskinan	0.21	0.38	0.3
	Indeks Kesehatan	78.28	78.21	78.58
	Indeks Pendidikan	77.76	78.37	78.48
	Indeks Pengeluaran	78.14	78.2	78.38
11	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Angka)	78.06	78.4	78.82
12	Angka melek huruf (%)	98.16	100	100
13	Angka rata-rata lama sekolah (Tahun)	10.76	10.82	10.85
	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	15.08	15.17	15.19
14	Angka usia harapan hidup (Tahun)	70.88	71.03	71.15
15	Persentase balita gizi buruk (%/Tahun)	0	0	0
16	Prevalensi balita gizi kurang (%/Tahun)	3.24	0.64	0.06
17	Cakupan Kelurahan Siaga Aktif (%)	100	100	100

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Realisasi	Proyeksi	Target
		2020	2021	2022
18	Angka partisipasi angkatan kerja (%)	62.35	60.63	61.69
	<i>Angka Partisipasi Angkatan Kerja Laki-Laki</i>	75,66	79.3	80.63
	<i>Angka Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan</i>	50,34	43.42	44.17
19	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	61.23*	60.59	60.85
	<i>Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Laki-Laki</i>	76.23	74.95	75.1
	<i>Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan</i>	47.14	46.6	47.49
20	Tingkat pengangguran terbuka (%)	10.37*	9.03	8.55
21	Rasio penduduk yang bekerja (%)	89.63	90.95	91.43
22	Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja (%)	71.80%	76.85	78.95
23	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas (%)	51.57	55.09	56.33
24	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja (%)	33.62	26.75	26.8
	<i>Laki - Laki</i>	22.15	18.45	18.55
	<i>Perempuan</i>	11.46	8.3	8.25
25	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (%)	26.09 (2019)	39.86	39.81
26	Indeks Kepuasan Masyarakat	83.06	84	85
27	Persentase PAD terhadap pendapatan (%)	22.85%	16	19
28	Opini BPK	WTP	WTP	WTP
29	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	90.1	91.7	91.8
30	Penguatan cadangan pangan (%)	87.53	97	97.5
31	Penanganan daerah rawan pangan (%)	n/a	0	0
32	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB (%)	n/a	7	8
33	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	n/a	3	3
34	Produksi sektor pertanian (Ton/Tahun)	21,756	44,187	46,388
	Padi	17,019	37,842	39,734
	Jagung	4,737	6,139	6,446
	Ubi Kayu	n/a	182	183
	Ubi Jalar	n/a	6	6
	Sagu	n/a	18	19
	Daging (Ruminansia dan Unggas) Ton	3642.79	3,377	3,413
	Daging (Ruminansia) Ton	375.62	255	258
	Daging Sapi (Ton)	370.18	255	257
	Daging Kerbau (Ton)	3.77	0	0
	Daging Kambing (Ton)	1.67	1	1
	Daging Unggas (Ton)	3267.17	3,122	3,155
	Daging Ayam Kampung (Ton)	124.28	158	160
	Daging Ayam Pedaging (Ton)	3,129.60	2,964	2,995
	Daging Itik/Bebek/Entog (Ton)	13.29	8,71	8,80
	Telur (Ayam Kampung/Ras/Itik/Entog) (Ton)	1354.3	1,833	1,852
	Telur Ayam Buras/Kampung (Ton)	1,083	1,639	1,656
	Telur Ayam Ras Petelur (Ton)	150.688	46	47
	Itik/Angsa/Entog (Ton)	120.55	147	149
35	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (%)	n/a	3	3
36	Produksi sektor perkebunan (Ton/Tahun)	1364.64	2305.39	2359.89
	Kelapa Dalam	7.24	33.38	33.88
	Kopi	60.40	69	70
	Kopi Robusta	n/a	69	70
	Kopi Arabika	n/a	0.01	0.01

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Realisasi	Proyeksi	Target
		2020	2021	2022
	Cengkeh'	n/a	134	136
	Kakao	1,297	2000	2050
37	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB (%)	n/a	2	2
38	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB (%)	n/a	0.03	0.03
39	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB (%)	n/a	0.19	0.19
40	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	0.14	1.24	1.25
41	Kontribusi sector kelautan dan perikanan terhadap PDRB (%)	n/a	6	7
42	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	24.47%	22	23
43	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%)	2.56%	2.95	2.98
44	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri (%)	n/a	n/a	n/a
45	Pertumbuhan Industri (%)	n/a	5	5
46	Kontribusi transmigrasi terhadap PDRB (%)	n/a	0	0
ASPEK DAYA SAING DAERAH				
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Ribu/Kapita/Tahun)	112,776.50	117,815	124,981
2	Nilai tukar petani	n/a	n/a	n/a
3	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (%)	55.34	53	54
4	Produktivitas total daerah (Ribu/Tenaga Kerja/Tahun)	94.39	104	110
5	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	100	100	100
6	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi) (%)	n/a	70	71
7	Rasio pinjaman terhadap simpanan di bank umum	n/a	2	2
8	Rasio pinjaman terhadap simpanan di BPR	n/a	n/a	n/a
9	Angka kriminalitas yang tertangani (per 10.000)	8	21	23
10	Rasio ketergantungan	45.31	47	47
Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah				
NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR			
ASPEK PELAYANAN UMUM				
Layanan Urusan Wajib Dasar				
1.	Pendidikan			
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%)	54.6	100	100
2	Angka Partisipasi Kasar			
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A (%)	104.62	100	100
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B (%)	87.87	100	100
3	Angka pendidikan yang ditamatkan (%)			
	Tidak/Belum Bersekolah (%)	7.32	5.7	5.6
	Tamat SD/ sederajat (%)	17.01	10	9
	Tamat SMP/ sederajat (%)	22.53	22	21
	Tamat SMA (%)	33.58	39	40
	Tamat SMK (%)	3.04	5	6
	Tamat Perguruan Tinggi (%)	16.52	18	18

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Realisasi	Proyeksi	Target
		2020	2021	2022
	Diploma I/II (%)	0.41	0.7	0.8
	Diploma III (%)	1.47	3.1	3.3
	Diploma IV/S1-S3 (%)	14.64	14.2	14.3
4	Angka Partisipasi Murni			
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%)	99.01	100	100
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%)	78.33	100	100
5	Angka partisipasi sekolah (%)			
	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A (Per 1000)	995.3	1000	1000
	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B (Per 1000)	986.9	1000	1000
6	Angka Putus Sekolah:			
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%)	0.43	0	0
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%)	0.78	0	0
7	Angka Kelulusan:			
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)	100	100	100
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%)	100	100	100
8	Angka Melanjutkan (AM):			
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)	100	100	100
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA (%)	-	100	100
9	Fasilitas Pendidikan:			
	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	100	100	100
	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik (%)	100	100	100
10	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar (per 10,000)	-		
	SD/MI (per 10,000)	36	39	39
	SMP/ MTS (per 10,000)	26	30	30
11	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar (per 10.000)	672	691	709
	SD/MI (per 10,000)	640	656	672
	SMP/ MTS (per 10,000)	731	752	773
12	Rasio guru/murid per kelas rata-rata pendidikan dasar (per 10.000)	0.59	0.6	0.61
13	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar (%)	n/a	100	100
14	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki (%)	-	100	100
15	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) (%)		100	100
16	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%)	94.06	100	100
17	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	100	100	100
18	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100	100	100
19	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	100	100	100
20	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan	100	100	100

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Realisasi	Proyeksi	Target
		2020	2021	2022
	dasar dan mengengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan			
2.	Kesehatan			
1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	0.95	0.5	0.4
2	Angka kelangsungan hidup bayi (per 100)	98.98	99	99
3	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	3.74	5	5
4	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	2.72	3	3
5	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	33.96	30	20
6	Rasio posyandu per satuan balita (Per 1000 balita)	8.23	10	10
7	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk (per 10.000)	3	4	4
8	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk (per 100.000)	4.33	4	4
9	Rasio dokter per satuan penduduk (per 1.000)	0.62	6	6
10	Rasio tenaga medis per satuan penduduk (per 10.000)	6	6	6
11	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)	66.92%	86	86.42
12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)	89.44%	100	100
13	Cakupan Desa/kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI) (%)	70.83%	100	100
14	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%)	-	100	100
15	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari) (%)	-	81	82
16	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak (%)	104.27%	98.48	98.5
17	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk (Rasio)	-	0	0
18	Cakupan balita pneumonia yang ditangani (%)	7.61%	9.7	10.5
19	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%)	100.00%	100	100
20	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (Rasio per 100.000 penduduk)	162.50	200	190
21	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	0	0	0
22	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS (%)	100.00%	92	93
23	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS (%)	93.00%	40	41
24	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)	100	100	100
25	Penderita diare yang ditangani (per 100.000)		8	9
26	Angka kejadian Malaria (per 1000)	0.72	60	58
27	Tingkat kematian akibat malaria (per 1000)	-	0	0

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Realisasi	Proyeksi	Target
		2020	2021	2022
28	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida (%)	-	n/a	n/a
29	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat (%)	-	100	100
30	Prevalensi HIV/AIDS dari total populasi (%)	0.070%	36	34
31	Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir (per 1000)	-	n/a	n/a
32	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS (%)	-	2.4	2.4
33	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)	100	100	100
34	Cakupan kunjungan bayi (%)	94.87%	100	100
35	Cakupan puskesmas (%)	133.33	133,33	133,33
36	Cakupan pembantu puskesmas (%)	62.50%	65	70
37	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 (%)	82.79%	100	100
38	Cakupan pelayanan nifas (%)	85.10%	100	100
39	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (%)	67.63%	76	77
40	Cakupan pelayanan anak balita (%)	39.20%	74	75
41	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin (%)	-	100	100
42	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat (%)	95.83	100	100
43	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%)	-	100	100
44	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) (%)	100	100	100
45	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam (%)	100	100	100
46	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk (%)	0.52	0.53	0.54
47	Persentase RS rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi (%)	0.78	0.78	0.79
48	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100	100	100
49	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100	100	100
50	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan bayi baru lahir	100	100	100
51	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100	100	100
52	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100
53	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	100	100
54	Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	100	100

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Realisasi	Proyeksi	Target
		2020	2021	2022
55	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100
56	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100
57	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	100	100
58	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	100	100
59	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100	100	100
60	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	0	0
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
	Pekerjaan Umum:			
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	67.87%	70	71
2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk (per 10,000)	27	29	30
3	Persentase kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4	n/a	n/a	n/a
4	Persentase Jalan Kewenangan Kota yang Berkondisi Baik (> 40 KM/Jam) (%)	69.67%	72	73
5	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) (%)	51.82	1.34	1.36
6	Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	n/a	n/a	n/a
7	Persentase rumah tinggal bersanitasi (%)	83.68	97	98
8	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (%)	41.85	49	48
9	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)	n/a	9	10
10	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun (%)	18.478	14	13
11	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor (%)	59.13%	6	7
12	Persentase irigasi kota dalam kondisi baik (%)	77.95	73	74
13	Rasio Jaringan Irigasi (per 1000 Ha)	82.610	21	22
14	Persentase penduduk berakses air minum (%)	95.11	100	100
15	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan (%)	n/a	100	100
16	Persentase areal kawasan kumuh (%)	0.16	1.61	1.57
17	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan		4.8	4.9
18	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk (per 10.000)	1.52	1.9	1.9
19	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk (per 1000)	1.84	2	2
20	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kab/kota	-	6	7

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Realisasi	Proyeksi	Target
		2020	2021	2022
21	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi,erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kab/kota	-	6	7
22	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	-	21	22
23	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga diseluruh kabupaten/kota	-	100	100
24	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	97.31	100.00	100.00
3	Penataan Ruang:			
1	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	36.92	76.98	77.1
2	Luas Ruang Terbuka Hijau Publik (Ha)	1,174	1174.63	1176.46
3	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan (%)	76.98	79.98	80
4	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	0.045	79.98	80
5	Ruang publik yang berubah peruntukannya	n/a	79.98	80
6	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan	0.4046	79.98	80
7	Ketaatan terhadap RTRW	54	55	56
8	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	52	79.98	80
9	Tingkat kemantapan Jalan kabupaten/kota	64	70	71
10	Rasio tenaga/operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	60	60	65
11	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100	100	100
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman			
1	Rasio rumah layak huni	0.191	0.2	0.21
2	Rasio permukiman layak huni (%)	93.60%	95.78	96.23
3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%)	92.75%	97.4	98
4	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau (%)	92.75	98.5	98.7
5	Persentase permukiman yang tertata (%)	67.67	93	93.5
6	Persentase lingkungan permukiman kumuh (%)	1.7	0.6	0.4
7	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (%)	22.20	10	4
8	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan (%)	21.8	3	2
9	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU (%)	28.05	35	40
10	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100	100	100
11	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	100	100	100
12	Persentase permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	10	30	30

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Realisasi	Proyeksi	Target
		2020	2021	2022
13	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)(%)	1.2	1.2	1.2
14	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas umum)	28.05	35	40
5.	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat			
1	Cakupan petugas perlindungan Masyarakat (Linmas)	200	100	100
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	94.93	100	100
3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	10,08	15.15	13.13
4	Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	98,13	100	100
5	Persentase Penegakan PERDA	94,93	100	100
6	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100	100	100
7	Persentase Perda dan perkara yang ditegakkan	100	100	100
8	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (%)	100	100	100
9	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (%)	100	100	100
10	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100	100
11	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	100	100
12	Waktu tanggap (<i>response time</i>) penanganan kebakaran	100	100	100
6.	Sosial			
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	69.06	55	56
2	Persentase PMKS yang tertangani (%)	69.3	56	57
3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar (%)	76.81	61	62
4	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya (%)	0	2	3
5	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial (%)	100	100	100
6	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (%)	100	100	100
7	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (%)	100	100	100

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Realisasi	Proyeksi	Target
		2020	2021	2022
8	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap (%)	0	100	100
9	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial (%)	16.79	42	42
10	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	14.2	42	42
11	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100	100	100
Layanan Urusan Wajib Non Dasar				
1	Tenaga Kerja			
1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun (Per 1000)	0.57	8	7
	Angka sengketa pengusaha-pekerja di Perusahaan ber TDP per tahun (Per 1000)	1.5	2	2
2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) (%)	100.00	12	13
3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%)	42.51	54	55
4	Keselamatan dan perlindungan (%)	25.4	26	27
5	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek (%)	44	55	56
6	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah (%)	0	0	0
7	Besaran Pemeriksaan Perusahaan (%)	9.1	1.5	1.7
8	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan (%)	-	1.5	2
9	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	0.00	47	48
10	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat (%)	0	12	13
11	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan (%)	0	5	6
12	Rasio lulusan S1/S2/S3	-	10.5	10.7
13	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	60	65	70
14	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	2	3	4
15	Tingkat produktivitas tenaga kerja (Ribuan/Tenaga Kerja/Thn)	98.32	104.13	109.94
16	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur skala upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan)	27	26	27
17	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota	56	54	55
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Realisasi	Proyeksi	Target
		2020	2021	2022
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	9.27%	10	11
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR (%)	28.00%	28	28
3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta (%)	-	3.5	4
4	Rasio KDRT (per 10.000)	-	1	1
5	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur (%)	n/a	n/a	n/a
6	Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	-	46.6	47.49
7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (%)	100	25	26
8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit (%)	100	40	50
9	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.(%)	n/a	30	40
10	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (%)	-	100	100
11	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (%)	-	40	50
12	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan (%)	76.92	10	11
13	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan (%)	n/a	20	25
14	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD		0	0
	APM Perempuan pada Tingkat SD	n/a	100	100
	APM Laki-Laki Pada Tingkat SD	n/a	100	100
15	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	n/a	0	0
	APM Perempuan pada Tingkat SMP	n/a	78	79
	APM Laki-Laki Pada Tingkat SMP	n/a	80	81
16	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	n/a	0	0
	APM Perempuan pada Tingkat SMA	n/a	63	64
	APM Laki-Laki Pada Tingkat SMA	n/a	76	77
17	Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi	n/a	43.85	44.1
	APM Perempuan yang masuk Tingkat Perguruan Tinggi	n/a	n/a	n/a
	APM Laki-Laki yang masuk Tingkat Perguruan Tinggi	n/a	n/a	n/a
18	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	n/a	n/a	n/a
19	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian	n/a	44	45
20	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	10.00%	20.00%	30.00%
21	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	72.2	100	100

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Realisasi	Proyeksi	Target
		2020	2021	2022
22	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	3	3	3
3	Pangan			
1	Ketersediaan pangan utama (%)	36.60	11.6	11.8
2	Ketersediaan energi dan protein perkapita (Kkal/kapita/hari)	2,540	2497	2498
	Ketersediaan energi perkapita (Kkal/kapita/hari)	2,442	2400	2400
	Ketersediaan protein perkapita (Kkal/kapita/hari)	97.84	97.8	98
3	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	94.00	89	90
	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	87.53	97	97.5
4	Pertanahan			
1	Persentase luas lahan bersertifikat (%)	28.71	29	30
2	Penyelesaian kasus tanah Negara (%)	27.27	29	30
3	Penyelesaian izin lokasi (%)	100%	100	100
4	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan (%)	0	100	100
5	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	0	100	100
6	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	0	2	3
7	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	0	9	9
8	Tersedianya tanah untuk masyarakat	0	2	2
9	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi (Kasus)	0	3	3
5	Lingkungan Hidup			
	Kabupaten/Kota			
1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Belum ada	Ada	ada
2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Belum ada	ada	ada
3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah	Ada	0	0
4	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	Cemar Ringan	31.22	31.32
5	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	Sangat Baik	88.12	88.41
6	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	Belum tersedia	19.39	19.46
7	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota (%)	4.33	28	29

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Realisasi	Proyeksi	Target
		2020	2021	2022
8	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota		0	0
	<i>Jumlah PPLHD yang dilatih dan/atau dibina (Orang)</i>	0	1	1
	<i>Jumlah sarana prasarana PPLHD yang memenuhi standar minimum (Orang)</i>	0	1	1
9	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	0	0	0
10	Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional	0	0	0
11	Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	0	0	0
12	Penetapan hak MHA	0	0	0
13	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan (%)	0	0	0
14	Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana (%)	0	0	0
15	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	0	0	0
16	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup (Kali)	Tidak Ada	Ada	Ada
17	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.(%)	100%	100	100
18	Timbulan sampah yang ditangani (%)	88.63	91	92
19	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R (%)	4.76	4.2	4.3
20	Persentase cakupan area pelayanan (%)	81.43	87.85	87.88
21	Persentase jumlah sampah yang tertangani	47.62	88	89
22	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	-	80	80.2
23	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan (%)	0	100	100
24	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	0	100	100
25	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kab/kota	43.37	43.56	43.7
26	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kab/kota	77.98	80	80.2
27	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	0	0	0
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	0.69	0.85	0.87
2	Rasio bayi berakte kelahiran	0.97	0.9	0.96
3	Rasio pasangan berakte nikah	0.39	0.85	0.9
4	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	ada	ada	ada
5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	sudah	sudah	sudah
6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (%)	93.16	97	98

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Realisasi	Proyeksi	Target
		2020	2021	2022
7	Cakupan penerbitan akta kelahiran (%)	100	100	100
8	Perekaman KTP elektronik	0	0	0
9	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	0	0	0
10	Kepemilikan akta kelahiran	0.87	0.9	0.96
11	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	3	4	5
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (%)	100	100	100
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	1	1	1
3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK (%)	4.17	2.5	2.5
4	Persentase LSM aktif (%)	-	2.8	2.9
5	Persentase LPM Berprestasi (%)	4.17	4.18	4.19
6	Persentase PKK aktif	100	100	100
7	Persentase Posyandu aktif (%)	100	100	100
8	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	n/a	n/a	n/a
9	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	n/a	n/a	n/a
10	Persentase pengentasan desa tertinggal	0	0	0
11	Persentase peningkatan status desa mandiri	n/a	n/a	n/a
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	2.17	2.28	2.27
2	Total Fertility Rate (TFR) (Angka)	2.6	2.5	2.25
3	Dokumen Rancangan Induk Pengendalian Penduduk (ada/tidak)	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
4	Persentase sektor yang tersosialisasi konsep Pembangunan Berwawasan Kependudukan dan alat ukurnya (IPBK/indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan)	-	2	3
5	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB (%)	38.78	37	38
6	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	-	2	3
7	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	-	1	0
8	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	-	0	2
9	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	-	0	0
10	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2	2	2
11	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49 (%)	75.60%	80.29	82.16

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Realisasi	Proyeksi	Target
		2020	2021	2022
12	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	-	10	9
13	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun (1000 PUS)	-	6	5
14	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) (%)	12.07	14	12
15	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (%)	23.86%	24	25
16	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi (%)	22.47	31.66	26.26
17	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (%)	73.75	86.07	89.71
18	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB (%)	58.64	69.78	73.52
19	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB (%)	48.04	51.06	52.35
20	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan (%)	11.11	0.11	0.11
21	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	7.6	12	13
22	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk (%)	100	100	100
23	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri (%)	22.90	30.35	33.59
24	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	100	100	100
25	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di gudang Kabupaten/Kota (%)	15.82	10	11
26	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di Faskes (%)	18.47	67	68
27	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan (%)	100	100	100
28	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa (%)	n/a	n/a	n/a
29	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS) (%)	n/a	n/a	n/a
30	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga (%)	100%	3.15	3.56
31	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak (%)	100%	100	100
32	Rata-rata usia kawin pertama wanita (Tahun)	-	22	23
33	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD (%)	61.87	0.27	0.28
	TFR (Angka Kelahiran Total)	2.6	2.5	2.25

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Realisasi	Proyeksi	Target
		2020	2021	2022
	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mPCR)	78.42	80.29	82.16
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	17	14	12
9	Perhubungan			
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum (Orang)	539,500	1,523,904	1,583,393
2	Rasio ijin trayek (Per 100.000 Penduduk)	2	2	2
3	Jumlah uji kir angkutan umum (Unit)	2602	1,400	1,450
4	Jumlah Pelabuhan Laut dan Terminal Bis	2	2	2
5	Persentase layanan angkutan darat (per 10.000)	6.07	0	0
6	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum (%)	74.79	1	1
7	Persentase Pemasangan Rambu-rambu (%)	76.7%	47	48
8	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan (per 1000)	16	17	18
9	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum (Orang/Tahun)	573,160	1,523,350	1,582,803
10	Jumlah barang yang terangkut angkutan umum (M3/Tahun)	n/a	613,037	616,931
11	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	1,054,677	2,102,153	2,171,752
12	Rasio konektivitas kabupaten/kota			
13	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota			
10	Komunikasi dan Informatika			
1	Persentase pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan (%)	3.77	3.65	3.75
2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	0.9	0.9	0.92
3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon (%)	-	80.5	80.7
4	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	0.25	0.11	0.11
5	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	0.5	0.55	0.75
6	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	85	90	95
7	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	75	80	85
8	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	65	70	85
11	Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah			
1	Persentase koperasi aktif (%)	23.6	71	72
2	Persentase UKM non BPR/LKM aktif (%)	100	100	100
3	Persentase BPR/LKM aktif (%)	n/a	n/a	n/a
4	Persentase Usaha Mikro dan Kecil (%)	81.85	76	77
5	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	70.00	71.00	71.00
6	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	5	6.00	7.00
12	Penanaman Modal			
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN)	74	70	71

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Realisasi	Proyeksi	Target
		2020	2021	2022
2	Jumlah investor berskala nasional (PMA)	0	0	0
3	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Juta)	109,484	150,000	170000
4	Rasio daya serap tenaga kerja (per 100 Juta Nilai PMDN)	9.00	14	15
5	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	21.25	10	20
6	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	5	5	5
13	Kepemudaan dan Olah Raga			
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)	71.06%	52.7	54.1
2	Persentase wirausaha muda (%)	1.3	1.36	1.38
3	Cakupan pembinaan olahraga (%)	96.96	64.29	67.86
4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi (%)	27.71	34.94	36.14
5	Cakupan pembinaan atlet muda (%)	0	68.8	69.4
6	Jumlah atlet berprestasi (Orang)	0	7	8
7	Jumlah prestasi olahraga (Cabang)	0	2	3
8	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	1.35	1.36	1.38
9	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	9.85	9.91	9.96
10	Peningkatan prestasi olahraga	0	3	4
14	Statistik			
1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Dalam Proses	Ada	Ada
2	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada	Ada	Ada
3	Buku "PDRB"	Ada	Ada	Ada
4	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100	100	100
5	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100	100	100
15	Persandian			
1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah (%)	79.59	80	81
2	Tingkat keamanan informasi pemerintah	65	75	85
16	Kebudayaan			
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	5	15	16
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%)	100	100	100
3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi (Buah)	0	1	1
4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	53	52	52
	Terlestarikannya Cagar Budaya			
17	Perpustakaan			
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (%)	23.23	11	12
2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	37.55	39	40
3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk (per 1000)	1.17	1.15	1.3

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Realisasi	Proyeksi	Target
		2020	2021	2022
4	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	2,964	1300	1350
5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	185	430	450
6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat (%)	100	67	68
7	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	51	51.5	52
8	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	6	7	8
18	Kearsipan			
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	12.24%	25	26
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	6	8	9
3	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	100	100	100
4	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	75	80	85
Layanan Urusan Pilihan				
1.	Pariwisata			
1	Kunjungan wisata (%)	53.28%	100	100
2	Lama kunjungan Wisata (Rata-rata Kunjungan Wisata Dalam Satu Tahun)	1	2.5	2.5
3	PAD sektor pariwisata (%)	3.63%	5	6
4	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	n/a	n/a	n/a
5	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	2	2	2
6	Tingkat hunian akomodasi (%)	32	32	32
7	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	1.23	1.24	1.25
7	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	0.17	5	6
2.	Pertanian			
1	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	n/a	15.40	15.35
2	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB (%)	n/a	4	5
3	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (%)	n/a	3	3.5
4	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB (%)	n/a	30	32
5	Produksi Bahan Pangan Utama (Ton/Tahun)	22,963		
	Padi	17,585	37,842	39,734
	Jagung	5,360	6,139	6,446
	Ubi Kayu	n/a	182	183
	Ubi Jalar	n/a	6	6
	Sagu	18.2	18	19

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Realisasi	Proyeksi	Target
		2020	2021	2022
6	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (Ton/Ha)			
	Padi	5.76	6,61	6,71
	Jagung	6.19	7,36	7,47
	Ubi Kayu	n/a	29	30
	Ubi jalar	n.a	14	15
	Sagu	0.25	0	0.4
7	Cakupan bina kelompok petani	87.98	53	54
	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	6,51	6,61	6,71
	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	5	10	15
3	Energi dan Sumber Daya Mineral			
1	Persentase rumah tangga pengguna listrik	100	100	100
2	Rasio ketersediaan daya listrik	100	100	100
4	Perdagangan			
1	Ekspor Bersih Perdagangan (Nilai/Juta)	(1,005,968.10)	-924,251	-886,449
2	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal (%)	-	13	14
3	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	72.52	73.52	74.53
4	Persentase kinerja realisasi pupuk	54	55	55
5	Persentase alat-alat ukur,takar,timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	53	56	59
5	Perindustrian			
1	Cakupan bina kelompok pengrajin (%)	1.69	2.5	2.6
2	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah	5	5	5
3	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator	80	85	90
4	Pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	n/a	n/a	n/a
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin perluasan industri (IPUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	96	96.3	96.5
6	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha kawasan industri (UKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	13.97	14.77	11.1
7	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	n/a	Tersedia	Tersedia
6	Transmigrasi			
1	Persentase transmigran swakarsa			
7	Perikanan			
1	Produksi perikanan (%)	96.90	100	100
	Target Produksi Perikanan Daerah (Ton/Tahun)	145,143	156,497	163,533
2	Konsumsi ikan (%)	98.20	100	100

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Realisasi	Proyeksi	Target
		2020	2021	2022
	Target Konsumsi Perikanan Daerah (Kg/Kapita/Tahun)	54.7	57.37	58.52
3	Cakupan bina kelompok nelayan (%)	2.80	2.09	4.17
4	Produksi perikanan kelompok nelayan (%)	6.75	6.67	6.77
5	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	n/a	n/a	n/a
6	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	n/a	n/a	n/a
7	Nilai tukar nelayan	n/a		
	Jumlah total produksi perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	149,898	156,607	163,645
Penunjang Urusan				
1.	Perencanaan Pembangunan			
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD (%)	98	98	98
6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD (%)	100	100	100
7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	n/a	n/a	n/a
2.	Keuangan			
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP
2	Persentase SILPA	0	0	0
3	Persentase SiLPA terhadap APBD	4.96%	1.4	1.2
4	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana (%)			
	Persentase program yang tidak terlaksana (%)	1.24	0	0
	Persentase kegiatan yang tidak terlaksana (%)	0.73	0	0
5	Persentase belanja pendidikan (20%)	19.55	20	20
6	Persentase belanja kesehatan (10%)	37.14	10	10
7	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung (%)			
	Perbandingan antara belanja langsung dengan APBD (%)	55.85		
	Perbandingan antara belanja tidak langsung dengan APBD (%)	44.15		
8	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa (%)	4.92	2	2.25
9	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
	Perbandingan antara belanja operasi, modal dan tidak terduga			
	Belanja Operasi Terhadap APBD (%)		75	75
	Belanja Modal Terhadap APBD (%)		24	24

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Realisasi	Proyeksi	Target
		2020	2021	2022
	Belanja Tidak Terduga Terhadap APBD (%)		1	1
10	Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kerja kesehatan	20	20	20
	Rasio PAD (%)	7.58	16.21	19.54
	Devialisasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (%)	100	100	100
	Devialisasi realisasi belanja terhadap anggaran PAD dalam APBD (%)			
	Manajemen Aset			
	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya (%)	0	0	0
	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	100	100	100
	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan umum (dikurangi transfer expenditures)	0.33	0.8	1
	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP
	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	100	100	100
3.	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan			
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan (Hari/Jam Pelajaran)	103/894	103/894	103/894
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (%)	0.09%	1.2	1.3
3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	38.17%	40	45
4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	33	33	33
5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	975	949	949
6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah (Orang)	2122	2284	2307
7	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	65	66	67
8	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	35	36	37
9	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	2	3	4
4.	Penelitian dan pengembangan			
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan.(%)	100	100	100
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.(%)	50	100	100
	Penerapan SIDA:			
3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.(%)	n/a	33	41
4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah(%)	100	100	100
5.	Pengawasan			
1	Persentase tindak lanjut temuan	97.64	82	83
2	Persentase pelanggaran pegawai	0.86	0.4	0.4

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Realisasi	Proyeksi	Target
		2020	2021	2022
3	Jumlah temuan BPK	27	14	13
4	Maturitas Sistem pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level)	3 (Nilai 3.2)	3 (Nilai 3.2)	3 (Nilai 3.3)
5	Peningkatan Kapabilitass Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Level	3 (DC)	3	3
6.	Sekretariat Dewan			
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada	Ada	Ada
2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada	Ada	Ada
3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada	Ada	Ada
7	Sekretariat Daerah			
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama (%)	0	0	0
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif (%)	0.2	30	35
3	Rasio belanja yang dilakukan melalui pengadaan (%)	75	92	92

6.4 Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar di Kota Palopo terdiri atas :

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
6. Sosial

Berikut adalah table capaian dan Penetapan target indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Palopo:

Tabel 6.4
Capaian dan Target Kinerja Indikator
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Palopo

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Capaian 2020	Target 2021	Target kinerja 2022
	Aspek Pelayanan Dasar				
I	SPM Bidang Pendidikan		100	100	100
	Pendidikan Dasar				
1	Persentase penduduk Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	%	100	100	100
	Pendidikan Kesetaraan				0
2	Persentase penduduk Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	100	100	100
	Pendidikan Anak Usia Dini				
3	Persentase penduduk Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	100	100	100
II	SPM Bidang Kesehatan		84.06	100	100
	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				
1	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	%	96.27	100	100
	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				
2	Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	%	99.79	100	100
	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				
3	Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	%	96.86	100	100
	Pelayanan kesehatan balita				
4	Persentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	%	68.33	100	100
	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar				
5	Persentase penduduk usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	%	97.93	100	100
	Pelayanan kesehatan pada usia produktif				
6	Persentase penduduk usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	%	50.66	100	100
	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut				
7	Persentase penduduk usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	%	74.82	100	100
	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi				
8	Persentase penduduk penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	%	41.88	100	100
	Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus				

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Capaian 2020	Target 2021	Target kinerja 2022
9	Persentase penduduk penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	%	87.03	100	100
	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat				
10	Persentase penduduk dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan		100	100	100
	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis				
11	Persentase penduduk terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	100	100
	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)				
12	Persentase penduduk dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	%	95.17	100	100
III	SPM Bidang Pekerjaan Umum				
	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari		89.51	100	100
1	Persentase penduduk yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	81.7	100	100
	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik				
2	Persentase penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	%	97.31	100	100
IV	SPM Bidang Perumahan		100	100	100
	Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana				
1	Persentase penduduk korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100	100
	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah				
2	Persentase penduduk yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100	100	100
V	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum				
	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum		79.8	100	100
1	Persentase penduduk yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	%	90.37	100	100
	Pelayanan informasi rawan bencana				
2	Persentase penduduk yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	88.88	100	100

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Capaian 2020	Target 2021	Target kinerja 2022
	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana				
3	Persentase penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	84.17	100	100
	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana				
4	Persentase penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	70	100	100
	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran				
5	Persentase penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	%	65.59	100	100
VI	SPM Bidang Sosial				
	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti		100	100	100
1	Persentase penduduk penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100
	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti				
2	Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100
	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti				
3	Persentase penduduk lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100
	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti				
4	Persentase penduduk /gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	%	100	100	100
	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota				
5	Persentase penduduk korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	%	100	100	100

6.5 Indikator Sustainable Development Goals (SDGs)

Target pencapaian SDGs Kota Palopo berikut sesuai dengan Dokumen Rencana Aksi Daerah tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang telah disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Kota Palopo. Berikut adalah target SDGs Kota Palopo Tahun 2022 :

Tabel 6.5
Target Indikator SDGs Kota Palopo 2022

TUJUAN 1
TANPA KEMISKINAN

TARGET	INDIKATOR	Target Tahun 2022
Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	6.63
Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	100
Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	77
Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	100
Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	3000
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	100
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	100
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	82.16

Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	100
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	100
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	0
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	100
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	100
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	100
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	100

kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.		
Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	0
Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	4
Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	0 *juta
Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	0
Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	51.92
Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Pend. 23 Kes. 28 Perl. Sos. 8
TUJUAN 2		
TANPA KELAPARAN		
TARGET	INDIKATOR	2022
Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	7.6
Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	0.06

makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.		
Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Sedang 11 Berat 27
Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	4.98
Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	5
Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	5
Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	0
Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	0
Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	90
Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	91.8
TUJUAN 3		
KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA		
TARGET	INDIKATOR	

		2022
Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	Angka Kematian Ibu (AKI).	50
Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	100
Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	100
Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	1
Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	3
Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	1
Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	Persentase kelahiran yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	100
Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	0.034
Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	190
Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	Kejadian Malaria per 1000 orang.	1,200
Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	Jumlah kelahiran yang mencapai eliminasi malaria.	4
Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	Persentase kelahiran yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	4

Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	Prevalensi tekanan darah tinggi.	8
Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun.	22
Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	0.5
Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	78
Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	82.16
Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	25
Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	9
Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	Total Fertility Rate (TFR).	2.25
Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	Unmet need pelayanan kesehatan.	9
Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	100
Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	100

layanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.		
Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	100
Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	100
TUJUAN 4		
PENDIDIKAN BERKUALITAS		
TARGET	INDIKATOR	2022
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	100
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	100
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	100
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	100
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	100

Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun.	10.48
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	100
Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	SD/MI (100) SMP/MTs (100)
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun.	100
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	100 & 100
Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	SD (61) SMP (66) SMA (71) SMK (61)
TUJUAN 5		
KESETARAAN GENDER		
TARGET	INDIKATOR	
		2022
Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	6
Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	0
Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	0
Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang	0

eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	
Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	90
Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	5
Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	23
Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	27
Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	12%
Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	80%
TUJUAN 6		
AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK		
TARGET	INDIKATOR	
		2022
Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	100
Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	520 m3/detik
Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	100
Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	94

Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	Jumlah kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	9
Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	9
Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	Jumlah Kelurahan yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	192 Skala Lingkungan
Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	90
Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	3
Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Memenuhi Standar
Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Ada
Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	Jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	Ada
Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	Ada
TUJUAN 8		
PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI		
TARGET	INDIKATOR	2022

Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	7.2
Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	PDB per kapita.	37.6
Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	78.95
Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	26.8
Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	35
Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	8.55
Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	1.25
Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	Jumlah wisatawan mancanegara.	1,300
Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	131,700
TUJUAN 9		
INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR		
TARGET	INDIKATOR	
		2022
Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB dan per kapita.	3.20%
Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto,	Laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur.	8%

sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.		
Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	2,700
Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	25%
Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.	Proporsi individu yang menggunakan internet	0.11
TUJUAN 10		
BERKURANGNYA KESENJANGAN		
TARGET	INDIKATOR	2022
Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	Koefisien Gini.	0.333
Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	6.63
Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	45
TUJUAN 11		
KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN		
TARGET	INDIKATOR	2022
Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	99
Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	30
Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.	Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.	47

Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	Ada
Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	0
Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	10
Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	0 *juta
Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	100
Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.	Jumlah kelurahan yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan.	Ada
Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	0
TUJUAN 12		
KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB		
TARGET	INDIKATOR	
		2022
Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	550

Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	5
Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	4
Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional.	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	4
Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	4
TUJUAN 13		
PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM		
TARGET	INDIKATOR	
		2022
Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	0
Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	0
TUJUAN 15		
EKOSISTEM DARATAN		
TARGET	INDIKATOR	
		2022
Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	63
Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	16
TUJUAN 16		
PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH		
TARGET	INDIKATOR	
		2022
Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	1
Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	0
Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	1

Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	95
Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	1
Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	1
Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	1
Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	WTP
Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	A
Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	75
Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	70
Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	100
Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	8
Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	10

Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	100
Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	100
Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	100
Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	4
TUJUAN 17		
KEMITRAAN MENCAPAI TUJUAN		
TARGET	INDIKATOR	Target
		2022
Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	4.5
Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	0.95
Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	1
Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	1
Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	90
Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan	100

melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.	kematian (Vital Statistics Register)	

BAB. VII P E N U T U P

7.1. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang merupakan tahun ke 4 (empat) dari tahapan pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palopo Tahun 2018 – 2023. Proses penyusunannya berlandaskan pada prioritas pembangunan dalam RKP 2022, RPJMN 2020-2024, Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan, Perubahan RPJMD Kota Palopo 2018-2023 dan RPJPD Kota Palopo 2005-2025, dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Dokumen RKPD Kota Palopo akan menjadi landasan, pedoman dan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam bentuk nota kesepakatan antara Eksekutif dan Legislatif, yang mana nota kesepakatan KUA dan PPAS ini sebagai dasar penyusunan RAPBD. RKPD juga akan menjadi referensi dalam evaluasi RAPBD untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD dan juga sebagai acuan/pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun dan melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan-penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah, berisi tentang rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja, pendanaan/pagu indikatif dan prakiraan maju. Pada era keterbukaan dan transparansi informasi publik, maka RKPD idealnya dipublikasikan dengan tujuan diketahui oleh semua pihak. Kemudian untuk menjamin agar program dan kegiatan masing-masing OPD pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan dan dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi alokasi sumberdaya serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program pembangunan, maka diperlukan instrumen pengendalian dan evaluasi.

Adapun Instrumen pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat disajikan program dan kegiatan yang sudah direncanakan dengan target target tertentu dan bagaimana pelaksanaan program dan kegiatan tersebut oleh masing masing OPD dan yang dievaluasi tidak hanya kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan saja, akan tetapi mencakup juga tingkat capaian kinerja pada setiap tahapan pelaksanaannya.

Pada tata cara pengendalian tersebut menempatkan OPD pada posisi strategis, dimana OPD mempunyai kewenangan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan sendiri dan diharapkan apabila terjadi ketidak sesuaian dapat segera diambil langkah tindak lanjut sebagai upaya preventif dan korektif sebelum pelaksanaan program dan kegiatan tersebut menyimpang, sehingga dalam hal ini kemandirian OPD dalam memahami setiap proses dan langkah pengendalian menjadi suatu hal yang penting.

Sehubungan dengan tata cara pengendalian tersebut di atas maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Untuk memaduserasikan pelaksanaan setiap program dalam rangka koordinasi perencanaan, masing-masing OPD agar menyempurnakan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Tahun 2022.
2. OPD dan masyarakat termasuk di dalamnya dunia usaha berkewajiban untuk mendukung dan berpartisipasi dalam implementasi program-program yang ada di RKPD Tahun 2022 dengan sebaik baiknya.
3. Masyarakat luas dapat berperan serta dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan.
4. Untuk menjaga efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program, setiap OPD wajib melakukan tindakan koreksi yang diperlukan, dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala kepada kepala dan wakil kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
5. Pada akhir tahun anggaran 2022, setiap OPD wajib melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang sudah ditetapkan, kesesuaian dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, kesesuaian dengan target RPJMD serta kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan peraturan lainnya.

7.2. Kesimpulan

1. RKPD Kota Palopo Tahun 2022 penyusunannya dilakukan secara partisipatif berdasarkan usulan masyarakat, usulan Organisasi Perangkat Daerah, DPRD melalui pokok-pokok pikiran dan pemangku pembangunan lainnya.
2. RKPD merupakan acuan/pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun 2022.
3. Pelaksanaan pembangunan daerah diarahkan untuk mencapai target sasaran sesuai dengan tema pembangunan yang dimuat dalam RKPD 2022 yaitu : **"Pemulihan Ekonomi, Peningkatan Daya Saing dan Kemandirian Daerah"** sehingga program kegiatan di masing-masing OPD mengarah pada pencapaian tersebut dan untuk menjamin pelaksanaan program kegiatan tersebut dapat sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan, maka harus dilakukan evaluasi dan analisis sebagai tahapan dalam melakukan pengendalian.
4. RKPD Kota Palopo Tahun 2022, pelaksanaannya harus bersinergis dengan prioritas-prioritas pembangunan Nasional dengan tetap memperhitungkan potensi dan keuangan daerah. Termasuk pendanaan dari APBN maupun sumber dana lainnya.
5. Kerja keras, semangat, komitmen, partisipasi, konsistensi dan disiplin yang tinggi dari pelaksana pemerintahan dan segenap pemangku pembangunan sangat diperlukan dalam pelaksanaan rencana pembangunan daerah, sehingga masing-masing dapat berperan dan bertanggungjawab terhadap proses, hasil dan kinerja pembangunan sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing.

WALIKOTA PALOPO



M. JUDAS AMIR